



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

(RPJPD)

PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2045

VISI RIAU 2025-2045

**"RIAU MAJU DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN
BUDAYA MELAYU YANG AGAMIS"**

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**



GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI RIAU

TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2045.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI
RIAU TAHUN 2025–2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Riau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Riau.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi.

BAB II

RPJPD

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
- (2) RPJPD disusun mempedomani RPJPN dan RTRW.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
 - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
 - f. BAB VI : Penutup.

- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui penyusunan RPJMD setiap (5) lima tahun dan RKPD setiap 1 (satu) tahun.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur.

Pasal 5

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- (3) Tatacara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

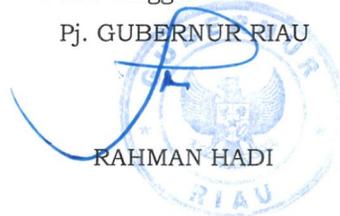
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Lampiran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12) masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 31 DESEMBER 2024
Pj. GUBERNUR RIAU



Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 31 DESEMBER 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR : 14

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: 15 - 358 / 2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI RIAU
TAHUN 2025 – 2045

I. UMUM

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (2) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah. RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2045 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah Kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah terpilih yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah meliputi Ketentuan Umum, RPJPD, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Penutup serta dokumen RPJPD.

Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025 – 2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah, analisis isu-isu strategis, visi dan misi, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Provinsi Riau;
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah provinsi beberapa tahun terakhir dan rumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten/Kota;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau;
4. Menyesuaikan proses penyusunan dan sistematika dokumen RPJPD Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024;
5. Merumuskan fokus pembangunan pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau pada tiap pentahapan pembangunannya berdasarkan evaluasi pencapaian rencana jangka panjang dalam rangka akselerasi pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau;
6. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMABAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 14



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

(RPJPD)

PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2045

VISI RIAU 2025-2045

**"RIAU MAJU DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN
BUDAYA MELAYU YANG AGAMIS"**

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada Provinsi Riau, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045 dapat disusun sesuai waktu. Dokumen ini disusun sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan pedoman penyusunan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dimana setiap pemerintah daerah harus menyusun dan mengajukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 ini diharapkan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau, dan penyusunan RPJPD kabupaten/kota. Secara bertahap diharapkan arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya sehingga terwujud visi Provinsi Riau 2045 **“Riau Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu yang Agamis”**.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu dalam penyusunan Dokumen RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 ini.

DAFTAR ISI



| | Halaman |
|--|-------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xxviii |
| Bab I Pendahuluan | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang | I-1 |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan | I-4 |
| 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya.. | I-7 |
| 1.3.1. Keterkaitan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 | I-8 |
| 1.3.2. Keterkaitan dengan RTRW Nasional Tahun 2025-2045..... | I-8 |
| 1.3.3. Keterkaitan dengan RTRW Provinsi Riau | I-9 |
| 1.3.4. Keterkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045..... | I-10 |
| 1.4. Maksud dan Tujuan | I-10 |
| 1.5. Sistematika Penulisan | I-11 |
| Bab II Gambaran Umum | II-1 |
| 2.1. Aspek Geografi dan Demografi..... | II-2 |

| | |
|---|-------|
| 2.1.1. Aspek Geografi | II-2 |
| 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah... | II-2 |
| 2.1.1.2. Karakteristik Sumber Daya Alam ... | II-6 |
| 2.1.1.3. Gambaran Kualitas Lingkungan Hidup..... | II-12 |
| 2.1.1.4. Kebencanaan dan Perubahan Iklim | II-15 |
| 2.1.1.5. Daya Dukung dan Daya Tampung . | II-22 |
| 2.1.2. Aspek Demografi | II-32 |
| 2.1.2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk | II-33 |
| 2.1.2.2. Komposisi Penduduk | II-35 |
| 2.1.2.3. Kepadatan Penduduk..... | II-39 |
| 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat | II-41 |
| 2.2.1. Aspek Kesejahteraan Ekonomi | II-41 |
| 2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi | II-41 |
| 2.2.1.2. Indeks Gini | II-43 |
| 2.2.1.3. Angka Kemiskinan | II-45 |
| 2.2.1.4. Angka Kemiskinan Ekstrem | II-48 |
| 2.2.1.5. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | II-52 |
| 2.2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | II-56 |
| 2.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM). | II-57 |
| 2.2.1.8. Laju Inflasi | II-68 |
| 2.2.1.9. Nilai Tukar Petani (NTP) | II-69 |

| | |
|---|-------|
| 2.2.1.10. Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | II-70 |
| 2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya..... | II-71 |
| 2.2.2.1. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) | II-71 |
| 2.2.2.2. Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) | II-72 |
| 2.2.2.3. <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate</i> (mCPR) | II-73 |
| 2.2.2.4. <i>Unmet Need</i> (Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi) .. | II-76 |
| 2.2.2.5. <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR) Usia 15-19 Tahun | II-77 |
| 2.2.2.6. Indeks Perlindungan Anak | II-78 |
| 2.2.2.7. Indeks Pembangunan Gender | II-79 |
| 2.2.2.8. Indeks Ketimpangan Gender | II-79 |
| 2.2.2.9. Indeks Pembangunan Pemuda | II-81 |
| 2.2.2.10. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Provinsi Riau | II-82 |
| 2.2.2.11. Indeks Pembangunan Kebudayaan | II-83 |
| 2.2.2.12. Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Melayu Riau | II-83 |
| 2.2.2.13. Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan Cagar Budaya Provinsi Riau | II-84 |

| | |
|---|--------|
| 2.2.2.14. Persentase Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di Provinsi Riau . | II-85 |
| 2.3. Aspek Daya Saing Daerah | II-86 |
| 2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah | II-86 |
| 2.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | II-86 |
| 2.3.1.2. PDRB Per Kapita | II-96 |
| 2.3.1.3. Indeks Ekonomi Hijau..... | II-97 |
| 2.3.1.4. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan | II-98 |
| 2.3.1.5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ... | II-100 |
| 2.3.1.6. Perkembangan Koperasi..... | II-100 |
| 2.3.1.7. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)..... | II-103 |
| 2.3.1.8. Lokasi Kawasan Industri..... | II-104 |
| 2.3.1.9. Pendapatan Daerah..... | II-105 |
| 2.3.1.10. Rasio Kewirausahaan Daerah | II-108 |
| 2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) | II-109 |
| 2.3.2.1. Indeks Pendidikan..... | II-109 |
| 2.3.2.2. Angka Literasi/Numerasi | II-110 |
| 2.3.2.3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)..... | II-111 |
| 2.3.2.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Sederajat | II-112 |
| 2.3.2.5. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Sederajat | II-113 |
| 2.3.2.6. Angka Partisipasi Sekolah..... | II-115 |

| | |
|--|--------|
| 2.3.2.7. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) | II-116 |
| 2.3.2.8. Indeks Literasi Digital | II-117 |
| 2.3.2.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki dan Perempuan ... | II-117 |
| 2.3.2.10. Tenaga Kerja Asing..... | II-118 |
| 2.3.2.11. Angka Ketergantungan..... | II-119 |
| 2.3.2.12. Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan | II-121 |
| 2.3.2.13. Prevalensi Balita Gizi Buruk | II-122 |
| 2.3.2.14. Prevalensi Balita Gizi Kurang | II-123 |
| 2.3.2.15. Angka Kematian Ibu (AKI) | II-125 |
| 2.3.2.16. Prevalensi Stunting Balita | II-127 |
| 2.3.2.17. Pengendalian Penyakit Tuberkulosis | II-129 |
| 2.3.2.18. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | II-131 |
| 2.3.2.19. Pengunjung dan Dokumen Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau | II-132 |
| 2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah . | II-133 |
| 2.3.3.1. Kondisi Jalan dan Transportasi..... | II-133 |
| 2.3.3.2. Daerah Irigasi Permukaan..... | II-138 |
| 2.3.3.3. Daerah Irigasi Rawa (DIR) | II-140 |
| 2.3.3.4. Penggunaan Lahan Sawah Irigasi... .. | II-142 |
| 2.3.3.5. Pengamanan Pantai di Pulau Terluar . | II-143 |

| | | |
|-----------|---|--------|
| 2.3.3.6. | Akses Sumber Air Minum Bersih dan Air Minum Layak..... | II-145 |
| 2.3.3.7. | Akses Terhadap Sanitasi Layak | II-151 |
| 2.3.3.8. | Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja | II-152 |
| 2.3.3.9. | Persampahan | II-155 |
| 2.3.3.10. | Akses Hunian yang Layak dan Terjangkau | II-156 |
| 2.3.3.11. | Kawasan Kumuh..... | II-162 |
| 2.3.3.12. | Jaringan Komunikasi..... | II-168 |
| 2.3.4. | Daya Saing Iklim Investasi..... | II-169 |
| 2.3.4.1. | Indeks Ketahanan Nasional (IKN) ... | II-169 |
| 2.3.4.2. | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)... | II-170 |
| 2.3.4.3. | Indeks Kerukunan Umat Beragama | II-172 |
| 2.3.4.4. | Indeks Rasa Aman | II-172 |
| 2.3.4.5. | Indeks Ketentraman dan Ketertiban | II-173 |
| 2.3.4.6. | Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) .. | II-174 |
| 2.3.4.7. | Penanaman Modal / Investasi..... | II-176 |
| 2.3.4.8. | Ekspor Bersih Perdagangan | II-177 |
| 2.4. | Aspek Pelayanan Umum | II-179 |
| 2.4.1. | Indeks Reformasi Birokrasi..... | II-179 |
| 2.4.2. | Indeks Pelayanan Publik | II-180 |
| 2.4.3. | Indeks Inovasi Daerah (IID) | II-181 |
| 2.4.4. | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | II-182 |

| | |
|--|--------|
| 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 | II-184 |
| 2.5.1. Capaian Kinerja RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 Per Periode RPJMD | II-185 |
| 2.5.2. Capaian Indikator Makro RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 | II-188 |
| 2.5.3. Kesimpulan | II-190 |
| 2.5.4. Rekomendasi | II-191 |
| 2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik..... | II-192 |
| 2.6.1. Proyeksi Jumlah Penduduk..... | II-192 |
| 2.6.2. Komponen Kependudukan | II-196 |
| 2.6.2.1. Distribusi Penduduk | II-196 |
| 2.6.2.2. Fertilitas (Kelahiran)..... | II-198 |
| 2.6.2.3. Mortality (Kematian)..... | II-199 |
| 2.6.2.4. Penduduk Usia Tua..... | II-201 |
| 2.6.3. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin | II-202 |
| 2.6.4. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur..... | II-204 |
| 2.6.5. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana..... | II-208 |
| 2.6.5.1. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal | II-208 |
| 2.6.5.2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum | II-213 |
| 2.6.5.3. Proyeksi Kebutuhan Listrik..... | II-219 |

| | | |
|-----------|--|--------|
| 2.6.5.4. | Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan | II-223 |
| 2.6.5.5. | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan | II-225 |
| 2.6.5.6. | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan | II-230 |
| 2.7. | Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah | II-236 |
| 2.7.1. | Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Provinsi Riau | II-238 |
| 2.7.1.1. | Konsep Pengembangan Wilayah | II-238 |
| 2.7.1.2. | Pusat Pertumbuhan Wilayah di Provinsi Riau | II-243 |
| 2.7.1.3. | Kebijakan Perkotaan | II-250 |
| 2.7.2. | Arah Kebijakan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau | II-272 |
| 2.7.2.1. | Kabupaten Kuantan Singingi | II-273 |
| 2.7.2.2. | Kabupaten Indragiri Hulu | II-274 |
| 2.7.2.3. | Kabupaten Indragiri Hilir | II-275 |
| 2.7.2.4. | Kabupaten Pelalawan | II-277 |
| 2.7.2.5. | Kabupaten Siak | II-278 |
| 2.7.2.6. | Kabupaten Kampar | II-279 |
| 2.7.2.7. | Kabupaten Rokan Hulu | II-281 |
| 2.7.2.8. | Kabupaten Bengkalis | II-282 |
| 2.7.2.9. | Kabupaten Rokan Hilir | II-284 |
| 2.7.2.10. | Kabupaten Kepulauan Meranti | II-285 |
| 2.7.2.11. | Kota Pekanbaru | II-288 |

| | |
|--|--------------|
| 2.7.2.12. Kota Dumai..... | II-292 |
| Bab III Permasalahan dan Isu Strategis | III-1 |
| 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah..... | III-1 |
| 3.1.1. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul dan Sejahtera..... | III-2 |
| 3.1.2. Belum Optimalnya Pengembangan Nilai Tambah Ekonomi yang Produktif | III-6 |
| 3.1.3. Belum Optimalnya Tatakelola Pemerintahan Yang Berintegritas dan Adaptif..... | III-9 |
| 3.1.4. Masih Tingginya Pengaruh Ekonomi Global dan Regional | III-10 |
| 3.1.5. Masih Tinggi Ketimpangan Pembangunan Wilayah | III-10 |
| 3.1.6. Belum Optimalnya Penyediaan, Konektivitas Transportasi dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | III-11 |
| 3.1.7. Adanya Potensi Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup | III-13 |
| 3.1.8. Kurang Pengamalan Budaya Dalam Kehidupan Bermasyarakat..... | III-14 |
| 3.2. Isu Strategis..... | III-15 |
| 3.2.1. Isu Strategis Global..... | III-15 |
| 3.2.2. Isu Strategis Nasional..... | III-16 |

| | |
|---|--------|
| 3.2.3. Pengintegrasian Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 dalam Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045..... | III-25 |
| Bab IV Visi dan Misi | IV-1 |
| 4.1. Visi..... | IV-1 |
| 4.2. Sasaran Visi | IV-7 |
| 4.3. Misi | IV-8 |
| 4.4. Sinkronisasi Berbagai Kebijakan Perumusan Visi dan Misi Provinsi Riau dengan Visi dan Misi Indonesia tahun 2045 | IV-11 |
| Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok | V-1 |
| 5.1. Arah Kebijakan..... | V-2 |
| 5.1.1. Transformasi Sosial Untuk Membangun Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul dan Sejahtera | V-4 |
| 5.1.2. Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif dan Ekonomi Hijau | V-17 |
| 5.1.3. Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif..... | V-34 |
| 5.1.4. Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah..... | V-38 |

| | |
|--|------|
| 5.1.5. Mewujudkan Kebudayaan Melayu Berlandaskan Masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi | V-42 |
| 5.1.6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Antar Kabupaten/Kota..... | V-48 |
| 5.1.7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Berkualitas yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan | V-51 |
| 5.1.8. Kestinambungan Pembangunan untuk Mewujudkan Riau Maju | V-55 |
| 5.2. Tiga Belas Upaya Transformatif Super Prioritas (<i>Game Changers</i>) | V-57 |
| 5.3. Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Riau Maju | V-61 |
| 5.4. Sasaran Pokok | V-69 |
| Bab VI Penutup | VI-1 |
| 6.1. Manajemen Resiko Pembangunan | VI-3 |
| 6.2. Pembiayaan Pembangunan | VI-6 |
| 6.3. Kesimpulan | VI-7 |

DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|------------|--|---------|
| Tabel 2.1 | Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau . | II-3 |
| Tabel 2.2 | Lokasi Prioritas Perbatasan Negara di Provinsi Riau Tahun 2020-2024 | II-4 |
| Tabel 2.3 | Luas Tutupan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2023 | II-6 |
| Tabel 2.4 | Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018 – 2023..... | II-8 |
| Tabel 2.5 | Capaian Bauran Energi Provinsi Riau 2022-2023 | II-9 |
| Tabel 2.6 | Potensi EBT Provinsi Riau dan Pemanfaatannya Tahun 2023..... | II-10 |
| Tabel 2.7 | Konsumsi Listrik Provinsi Riau Tahun 2021-2023 | II-11 |
| Tabel 2.8 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Riau Tahun 2018-2023 | II-12 |
| Tabel 2.9 | Kerusakan Kawasan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Riau Tahun 2018-2023 | II-14 |
| Tabel 2.10 | Indeks Resiko Bencana (IRB) Provinsi Riau Tahun 2016-2023 | II-15 |
| Tabel 2.11 | Abrasi di Provinsi Riau Tahun 2023 | II-18 |
| Tabel 2.12 | Rekapitulasi Jumlah <i>Hotspot</i> dan Luas Lahan Terbakar di Provinsi Riau Tahun 2017-2023 | II-21 |
| Tabel 2.13 | Status DDDTLH Penyedia Pangan Provinsi Riau.. | II-23 |
| Tabel 2.14 | Status DDDTLH Penyedia Air Provinsi Riau..... | II-25 |

| | | |
|------------|---|-------|
| Tabel 2.15 | Kualitas Air Danau di Provinsi Riau | II-29 |
| Tabel 2.16 | Timbulan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019-2022 | II-30 |
| Tabel 2.17 | Komposisi Sampah Berdasarkan Sumbernya di Provinsi Riau Tahun 2019-2022 | II-31 |
| Tabel 2.18 | Komposisi Sampah Berdasarkan Jenisnya di Provinsi Riau Tahun 2019-2022 | II-31 |
| Tabel 2.19 | Jumlah Sampah yang Masuk Landfill, Organik Terolah, Anorganik Terolah, dan Recovery Pemulung Tahun 2022 | II-32 |
| Tabel 2.20 | Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2024 | II-33 |
| Tabel 2.21 | Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio di Provinsi Riau Tahun 2024 | II-36 |
| Tabel 2.22 | Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Provinsi Riau Tahun 2019-2023 | II-38 |
| Tabel 2.23 | Jumlah dan Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024..... | II-40 |
| Tabel 2.24 | Indeks Gini Rasio Kabupaten-Kota di Provinsi Riau Tahun 2018-2023 | II-45 |
| Tabel 2.25 | Perkembangan Indikator Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2018-2024 | II-46 |

| | | |
|------------|--|-------|
| Tabel 2.26 | Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2022-2023 | II-47 |
| Tabel 2.27 | Angka Kemiskinan Ekstrem Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023 | II-48 |
| Tabel 2.28 | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial di Provinsi Riau Tahun 2023 | II-52 |
| Tabel 2.29 | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Riau Tahun 2018-2023 | II-53 |
| Tabel 2.30 | Persentase Jumlah PPKS yang Tertangani di Provinsi Riau Tahun 2018-2023 | II-56 |
| Tabel 2.31 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018-2023 | II-57 |
| Tabel 2.32 | IPM Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023 | II-59 |
| Tabel 2.33 | Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010 – 2023 (Tahun)..... | II-61 |
| Tabel 2.34 | Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010 – 2023 (Tahun)..... | II-63 |
| Tabel 2.35 | Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010 – 2023 (Tahun)..... | II-65 |
| Tabel 2.36 | Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010 – 2023 (Ribu Rupiah) . | II-67 |
| Tabel 2.37 | Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau Tahun 2018-2023 | II-69 |

| | | |
|------------|--|-------|
| Tabel 2.38 | Perkembangan Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap PDRB ADHB Provinsi Riau Tahun 2010-2023..... | II-70 |
| Tabel 2.39 | Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Riau Tahun 2020-2022 | II-72 |
| Tabel 2.40 | Capaian <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate</i> (mCPR) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019-2023 | II-74 |
| Tabel 2.41 | Indeks Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun 2018-2022 | II-78 |
| Tabel 2.42 | Indeks Pembangunan Gender Provinsi Riau Tahun 2018-2023 | II-79 |
| Tabel 2.43 | Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Riau Tahun 2018-2023 | II-80 |
| Tabel 2.44 | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023..... | II-82 |
| Tabel 2.45 | Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2019-2023..... | II-83 |
| Tabel 2.46 | Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau Tahun 2018..... | II-84 |
| Tabel 2.47 | Penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya Provinsi Riau Tahun 2016-2020 | II-84 |
| Tabel 2.48 | Persentase Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023 | II-85 |

| | | |
|------------|--|-------|
| Tabel 2.49 | Nilai dan Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2019-2023 | II-87 |
| Tabel 2.50 | Nilai dan Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2019-2023 | II-88 |
| Tabel 2.51 | Kontribusi Pertumbuhan Sektoral dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2019-2023 | II-90 |
| Tabel 2.52 | Kontribusi Pertumbuhan Sektoral dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2019-2023 | II-90 |
| Tabel 2.53 | PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Termasuk Minyak Bumi dan Gas Tahun 2010-2023 (Triliun Rupiah) | II-94 |
| Tabel 2.54 | Sumbangan Terbesar PDRB Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2010-2023 | II-95 |
| Tabel 2.55 | PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2019-2023 (Juta Rp) | II-97 |
| Tabel 2.56 | Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Riau Tahun 2015-2023 | II-98 |
| Tabel 2.57 | <i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i> Provinsi Riau Tahun 2019-2023 | II-99 |

| | | |
|------------|---|--------|
| Tabel 2.58 | <i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i> Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2019- 2023..... | II-99 |
| Tabel 2.59 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018- 2023 | II-100 |
| Tabel 2.60 | Perkembangan Koperasi di Provinsi Riau Tahun 2019-2023 | II-101 |
| Tabel 2.61 | Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023 | II-102 |
| Tabel 2.62 | Perkembangan UMKM di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023 | II-103 |
| Tabel 2.63 | Lokasi Kawasan Industri di Provinsi Riau Tahun 2023..... | II-104 |
| Tabel 2.64 | Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019-2023 (Ribu-Rupiah) | II-106 |
| Tabel 2.65 | Indeks Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019- 2023..... | II-109 |
| Tabel 2.66 | Angka Literasi/Numerasi Provinsi Riau Tahun 2021-2023..... | II-111 |
| Tabel 2.67 | Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010 – 2023 (Tahun)..... | II-112 |
| Tabel 2.68 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Sederajat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau | II-113 |

| | | |
|------------|--|--------|
| Tabel 2.69 | Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Sederajat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau | II-114 |
| Tabel 2.70 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Riau dan Indonesia Sesuai Jenjang Pendidikan Tahun 2021-2023..... | II-115 |
| Tabel 2.71 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023 | II-116 |
| Tabel 2.72 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021-2023..... | II-118 |
| Tabel 2.73 | Rasio Ketergantungan Provinsi Riau Tahun 2023 | II-120 |
| Tabel 2.74 | Jumlah Fasilitas dan Rasio Pelayanan Kesehatan di Provinsi Riau Tahun 2019-2023 | II-121 |
| Tabel 2.75 | Balita Gizi Buruk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023 | II-123 |
| Tabel 2.76 | Persentase Balita Gizi Kurang di Provinsi Riau Tahun 2019-2023..... | II-124 |
| Tabel 2.77 | Persentase Balita Gizi Kurang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023 ... | II-124 |
| Tabel 2.78 | Jumlah Kematian Ibu (Kehamilan, Kelahiran, Nifas) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019-2023..... | II-125 |

| | | |
|------------|--|--------|
| Tabel 2.79 | Prevalensi Stunting Balita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2013-2023..... | II-128 |
| Tabel 2.80 | Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis yang Ditemukan dan Diobati Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023 | II-130 |
| Tabel 2.81 | Capaian Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023..... | II-131 |
| Tabel 2.82 | Jumlah Pengunjung dan Dokumen Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau Tahun 2019-2023 | II-132 |
| Tabel 2.83 | Kondisi Jalan Provinsi di Provinsi Riau Tahun 2019-2023 | II-133 |
| Tabel 2.84 | Panjang Jalan di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (Km) Tahun 2023 | II-135 |
| Tabel 2.85 | Kondisi Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi se-Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023 | II-139 |
| Tabel 2.86 | Kondisi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kewenangan Provinsi se-Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023 | II-140 |
| Tabel 2.87 | Penggunaan Lahan Sawah Irigasi di Provinsi Riau Tahun 2023 | II-143 |
| Tabel 2.88 | Rekapitulasi Pengaman Pantai di Pulau Terluar Provinsi Riau | II-144 |

| | | |
|------------|--|--------|
| Tabel 2.89 | Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih dan Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses terhadap Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018 - 2023..... | II-146 |
| Tabel 2.90 | Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan di Wilayah Provinsi Riau Tahun 2023 . | II-149 |
| Tabel 2.91 | Data Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Non Jaringan Perpipaan di Wilayah Provinsi Riau Tahun 2023..... | II-150 |
| Tabel 2.92 | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten/Kota Tahun 2018 - 2023..... | II-151 |
| Tabel 2.93 | Kondisi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Provinsi Riau | II-153 |
| Tabel 2.94 | Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan Tahun 2018-2023 | II-155 |
| Tabel 2.95 | Jumlah Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah Provinsi Riau Tahun 2019-2023 (Ton) | II-156 |
| Tabel 2.96 | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019-2023..... | II-157 |

| | | |
|-------------|--|--------|
| Tabel 2.97 | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Data E-RTLH dan Data P3KE (Tertanggal 10 Juni 2024)..... | II-158 |
| Tabel 2.98 | Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Riau Tahun 2023 | II-159 |
| Tabel 2.99 | Pembangunan Rumah Layak Huni Di Provinsi Riau Tahun 2017 – 2023 (Unit) | II-160 |
| Tabel 2.100 | Realisasi Rumah Layak Huni Korban Bencana Yang Tertangani Tahun 2021-2023 | II-161 |
| Tabel 2.101 | Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Riau dari Tahun 2017-2023..... | II-163 |
| Tabel 2.102 | Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama dan SK Kumuh Kabupaten/Kota Tahun 2024 | II-166 |
| Tabel 2.103 | Data <i>Low Signal</i> (Sinyal Lemah) dan <i>Blankspot</i> Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022 dan 2023 | II-168 |
| Tabel 2.104 | Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023..... | II-169 |
| Tabel 2.105 | Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau Tahun 2019-2023 | II-171 |
| Tabel 2.106 | Perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau Tahun 2018-2023 | II-172 |

| | | |
|-------------|--|--------|
| Tabel 2.107 | Indeks Rasa Aman Provinsi Riau Tahun 2014-2020..... | II-173 |
| Tabel 2.108 | Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau Tahun 2021 - 2023..... | II-174 |
| Tabel 2.109 | Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Riau Tahun 2019-2023 | II-175 |
| Tabel 2.110 | Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023 | II-176 |
| Tabel 2.111 | Jumlah Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Riau Tahun 2019-2023 | II-176 |
| Tabel 2.112 | Ekspor Bersih Perdagangan Provinsi Riau (Migas dan Non Migas) Tahun 2019-2023 | II-178 |
| Tabel 2.113 | Perkembangan Indeks Pelayanan Publik di Provinsi Riau Tahun 2020-2023 | II-180 |
| Tabel 2.114 | Perkembangan Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023..... | II-181 |
| Tabel 2.115 | Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2005-2025 | II-188 |
| Tabel 2.116 | Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau | II-193 |
| Tabel 2.117 | Klasifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau | II-194 |

| | | |
|-------------|---|--------|
| Tabel 2.118 | Distribusi Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau | II-197 |
| Tabel 2.119 | Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau | II-197 |
| Tabel 2.120 | <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) Kabupaten/Kota Provinsi Riau | II-199 |
| Tabel 2.121 | <i>Infant Mortality Rate</i> (IMR) Kabupaten/Kota Provinsi Riau | II-200 |
| Tabel 2.122 | Distribusi Penduduk Lanjut Usia 65+ Tahun (Provinsi/Kabupaten/Kota), Persen | II-202 |
| Tabel 2.123 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Provinsi Riau/Kabupaten/Kota) | II-203 |
| Tabel 2.124 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (Provinsi Riau/Kabupaten/Kota) | II-205 |
| Tabel 2.125 | Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Provinsi/Kabupaten/Kota)..... | II-209 |
| Tabel 2.126 | Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Provinsi/Kabupaten/Kota)..... | II-214 |
| Tabel 2.127 | Rata-rata Jumlah Daya Listrik per Kapita (Watt) Tahun 2021..... | II-219 |
| Tabel 2.128 | Besar Daya Listrik (dalam MW) di Provinsi Riau Tahun 2021..... | II-220 |
| Tabel 2.129 | Proyeksi Kebutuhan Listrik (Provinsi/Kabupaten/Kota)..... | II-221 |
| Tabel 2.130 | Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan (Provinsi Kabupaten/Kota) | II-223 |

| | | |
|-------------|--|--------|
| Tabel 2.131 | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Provinsi/Kabupaten/Kota)..... | II-226 |
| Tabel 2.132 | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Provinsi/Kabupaten/Kota)..... | II-232 |
| Tabel 2.133 | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (SMA/SMK/MA) (Provinsi/Kabupaten/Kota) | II-234 |
| Tabel 2.134 | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Proyeksi Tambahan SMA/SMK/MA)..... | II-235 |
| Tabel 2.135 | Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Riau | II-243 |
| Tabel 2.136 | Kawasan Budidaya di Wilayah Provinsi Riau | II-246 |
| Tabel 2.137 | Arahan Kebijakan Kawasan Metropolitan Pekansikawan | II-252 |
| Tabel 2.138 | Arahan Kebijakan Kawasan Industri Selinsing | II-253 |
| Tabel 2.139 | Arahan Kebijakan Kawasan Bekan Hulir..... | II-255 |
| Tabel 2.140 | Arahan Kebijakan Kawasan Japura-Pematang Reba..... | II-256 |
| Tabel 2.141 | Arahan Kebijakan Kawasan Pariwisata Pulau Rumat | II-257 |
| Tabel 2.142 | Arahan Kebijakan Kawasan <i>Technopark</i> Pelalawan..... | II-258 |
| Tabel 2.143 | Arahan Kebijakan Kawasan Meno (Mendol – Bono)..... | II-259 |
| Tabel 2.144 | Arahan Kebijakan Kawasan Sekitar Kawasan Industri Tanjung Buton..... | II-260 |
| Tabel 2.145 | Arahan Kebijakan Kawasan Medang Terang (Merbau, Padang, Tebing Tinggi, dan Rangsang).. | II-262 |

| | | |
|-------------|---|--------|
| Tabel 2.146 | Arahan Kebijakan Kawasan Maritim Gaung Anak Serka..... | II-263 |
| Tabel 2.147 | Arahan Kebijakan Kawasan Perindustrian Pangkalan Kerinci | II-264 |
| Tabel 3.1 | <i>Long List</i> Isu Strategis Provinsi Riau Tahun 2025-2045..... | III-18 |
| Tabel 3.2 | <i>Short List</i> Isu Strategis Provinsi Riau Tahun 2025-2045..... | III-21 |
| Tabel 3.3 | Isu Strategis Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025-2045..... | III-22 |
| Tabel 3.4 | Pengintegrasian Rekomendasi KLHS ke Dalam Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045..... | III-25 |
| Tabel 4.1 | Sasaran Visi RPJP Provinsi Riau Tahun 2025-2045..... | IV-7 |
| Tabel 4.2 | Penyelarasan Visi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045 | IV-12 |
| Tabel 4.3 | Sasaran Visi RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 | IV-12 |
| Tabel 4.4 | Penyelarasan 8 Misi RPJPN Tahun 2025-2045 ke dalam 8 Misi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045..... | IV-14 |
| Tabel 5.1 | Target Indikator Transformasi Sosial Untuk Membangun Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul dan Sejahtera..... | V-5 |

| | | |
|-----------|--|-------|
| Tabel 5.2 | Target Indikator Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif dan Ekonomi Hijau | V-18 |
| Tabel 5.3 | Target Indikator Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif..... | V-35 |
| Tabel 5.4 | Target Indikator Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah..... | V-38 |
| Tabel 5.5 | Target Indikator Kebudayaan Melayu Berlandaskan Masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi..... | V-43 |
| Tabel 5.6 | Upaya Transformasi Super Prioritas (Game Changer)..... | V-57 |
| Tabel 5.7 | Perumusan Sasaran Pokok Provinsi Riau Tahun 2025-2045..... | V-73 |
| Tabel 5.8 | Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045..... | V-112 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 1.1 Proses Penyusunan dan Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya | I-8 |
| Gambar 2.1 Peta Provinsi Riau | II-2 |
| Gambar 2.2 Sebaran Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau | II-5 |
| Gambar 2.3 Wilayah Sungai Provinsi Riau..... | II-6 |
| Gambar 2.4 Peta Indeks Resiko Bencana Gerakan Tanah Provinsi Riau | II-16 |
| Gambar 2.5 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi Provinsi Riau..... | II-18 |
| Gambar 2.6 Indeks Resiko Bencana Gelombang Ekstrem Abrasi Provinsi Riau | II-20 |
| Gambar 2.7 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi Provinsi Riau | II-21 |
| Gambar 2.8 Peta Status DDDTLH Penyedia Pangan Provinsi Riau | II-23 |
| Gambar 2.9 Peta Status DDDTLH Penyedia Air Provinsi Riau . | II-25 |
| Gambar 2.10 Lokasi Titik Pantau Kualitas Air di Provinsi Riau. | II-27 |
| Gambar 2.11 Pemantauan Kualitas Air Laut Provinsi Riau | II-28 |
| Gambar 2.12 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2024 (%)..... | II-34 |
| Gambar 2.13 Perbandingan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Penduduk Provinsi Riau, 2020 dan 2024..... | II-37 |

| | | |
|-------------|--|-------|
| Gambar 2.14 | Trend Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Riau Tahun 2010-2023 (%)..... | II-41 |
| Gambar 2.15 | Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas dan Tanpa Migas di Provinsi Riau Tahun 2010-2023 (%) | II-42 |
| Gambar 2.16 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023 (%) . | II-43 |
| Gambar 2.17 | Gini Rasio Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2010-2024..... | II-43 |
| Gambar 2.18 | Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Ekstrem Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2023..... | II-49 |
| Gambar 2.19 | Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) di Provinsi Riau, Tahun 2023..... | II-50 |
| Gambar 2.20 | IPM Provinsi Riau dan Nasional, 2010-2023..... | II-58 |
| Gambar 2.21 | Umur Harapan Hidup Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2010 – 2023 (Tahun) | II-60 |
| Gambar 2.22 | Harapan Lama Sekolah per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2010 - 2023 (Tahun)..... | II-62 |
| Gambar 2.23 | Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2010 – 2023 (Tahun)..... | II-64 |
| Gambar 2.24 | Pengeluaran Riil Per Kapita per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2010-2023 (Ribu Rupiah) ... | II-66 |
| Gambar 2.25 | Perkembangan Laju Inflasi Provinsi Riau Tahun 2010-2023 (%)..... | II-68 |

| | | |
|-------------|---|--------|
| Gambar 2.26 | Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Kredit Provinsi Riau Tahun 2010-2023 (Juta Rupiah).... | II-71 |
| Gambar 2.27 | Capaian IBangga di Provinsi Riau Tahun 2021-2023..... | II-73 |
| Gambar 2.28 | Unmet Need di Provinsi Riau Tahun 2019-2023 .. | II-76 |
| Gambar 2.29 | Age Specific Fertility Rate (ASFR) Usia 15-19 Tahun di Provinsi Riau Tahun 2020-2023..... | II-77 |
| Gambar 2.30 | Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Riau Tahun 2019-2023 | II-81 |
| Gambar 2.31 | Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Utama di Provinsi Riau 2019-2023, (%) | II-92 |
| Gambar 2.32 | Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Pengeluaran di Provinsi Riau 2010-2023, (%)..... | II-93 |
| Gambar 2.33 | Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Riau Tahun 2019-2023 (Rp. Juta) | II-96 |
| Gambar 2.34 | Rasio Kewirausahaan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010-2023..... | II-108 |
| Gambar 2.35 | Jumlah Tenaga Kerja Asing yang Mengurus Izin Kerja di Provinsi Riau Tahun 2008-2023..... | II-119 |
| Gambar 2.36 | Sebaran Kondisi Ruas Jalan Kewenangan Provinsi | II-134 |
| Gambar 2.37 | Gerbang Tol Pekanbaru, Gerbang Tol Dumai, dan Gerbang Tol Bathin Solapan..... | II-136 |

| | | |
|-------------|--|--------|
| Gambar 2.38 | Kondisi Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, Jalan Tol Duri dan Jalan Tol Bathin Solapan-Dumai..... | II-136 |
| Gambar 2.39 | Kondisi Jembatan Menuju Jambi | II-137 |
| Gambar 2.40 | Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2019-2023..... | II-179 |
| Gambar 2.41 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau Tahun 2019-2023 | II-183 |
| Gambar 2.42 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2005-2022 | II-189 |
| Gambar 2.43 | Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Riau | II-192 |
| Gambar 2.44 | <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) Penduduk Provinsi Riau | II-193 |
| Gambar 2.45 | Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota (%)..... | II-195 |
| Gambar 2.46 | <i>Infant Mortality Rate</i> (IMR) dan Umur Harapan Hidup Provinsi Riau | II-200 |
| Gambar 2.47 | Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Provinsi Riau Tahun 2025-2045 | II-207 |
| Gambar 2.48 | Peta Wilayah Pengembangan Provinsi Riau | II-239 |
| Gambar 2.49 | Konsep Spasial Pengembangan Provinsi Berbasis Wilayah Sungai | II-241 |
| Gambar 2.50 | Dukungan Transportasi Terintegrasi Wilayah Pengembangan Provinsi Riau | II-242 |
| Gambar 2.51 | Sebaran Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Riau | II-245 |

| | | |
|-------------|--|--------|
| Gambar 2.52 | Rencana Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari Sudut Kepentingan Ekonomi | II-265 |
| Gambar 2.53 | Rencana Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya..... | II-267 |
| Gambar 2.54 | Rencana Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup..... | II-271 |
| Gambar 2.55 | Arah Pengembangan Wilayah dan Sebaran Kawasan Strategis Provinsi Riau | II-272 |
| Gambar 2.56 | Sektor PDRB pada Kabupaten/Kota yang Merupakan Sektor Unggulan (Basis)..... | II-273 |
| Gambar 2.57 | Rencana Sistem Infrastruktur Transportasi dan Kondisi Jalan Provinsi di Kabupaten Indragiri Hilir..... | II-276 |
| Gambar 2.58 | Kondisi Jalan Kota Pekanbaru | II-289 |
| Gambar 2.59 | Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Kota Pekanbaru..... | II-290 |
| Gambar 2.60 | Kondisi Jalan Kota Dumai..... | II-294 |
| Gambar 4.1 | Visi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025-2045..... | IV-3 |
| Gambar 4.2 | Misi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025-2045..... | IV-11 |
| Gambar 4.3 | Keterkaitan Visi dan Misi Provinsi Riau Tahun 2025-2045..... | IV-15 |
| Gambar 5.1 | Tahapan Arah Kebijakan Lima Tahunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025-2045 | V-3 |

| | | |
|------------|--|------|
| Gambar 5.2 | Tahapan Arah Kebijakan Lima Tahunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025-2045 pada Transformasi Sosial untuk Membangun Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul dan Sejahtera..... | V-4 |
| Gambar 5.3 | Tahapan Arah Kebijakan Lima Tahunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025-2045 pada Transformasi Ekonomi Untuk Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif dan Ekonomi Hijau | V-17 |
| Gambar 5.4 | Tahapan Arah Kebijakan Lima Tahunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025-2029 pada Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif..... | V-35 |
| Gambar 5.5 | Tahapan Arah Kebijakan Lima Tahunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025-2045 pada Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah | V-38 |
| Gambar 5.6 | Tahapan Arah Kebijakan Lima Tahunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025-2045 pada Kebudayaan Melayu Berlandaskan Masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi | V-43 |
| Gambar 5.7 | Tahapan Arah Kebijakan Lima Tahunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025-2045 pada | |

| | | |
|-------------|---|------|
| | Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Antar Kabupaten/Kota | V-49 |
| Gambar 5.8 | Tahapan Arah Kebijakan Lima Tahunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025-2045 pada Sarana dan Prasarana yang ramah Lingkungan dan Berkelanjutan..... | V-51 |
| Gambar 5.9 | Tahapan Arah Kebijakan Lima Tahunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025-2045 pada Kestinambungan Pembangunan untuk Mewujudkan Riau Maju | V-55 |
| Gambar 5.10 | Merangkai Pulau di Provinsi Riau..... | V-62 |
| Gambar 5.11 | Rencana Pembangunan Jalan di Provinsi Riau | V-63 |

BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang



Pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional secara eksplisit dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan suatu kegiatan perencanaan yang terstruktur, terukur dan terintegrasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang harus ada dalam setiap tingkatan pemerintahan baik nasional dan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran

dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Pasal 1 point 4 mendefinisikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Pada pasal 5 ayat (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN. Penyusunan dan penetapan Rencana pembangunan Jangka Panjang pada pasal 10 menyatakan kepala Bappeda menyiapkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang menjadi bahan utama bagi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Berdasarkan pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa dokumen rencana pembangunan daerah antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan nasional maupun daerah yang berkelanjutan memerlukan perencanaan yang berkualitas. Setidaknya perencanaan yang berkualitas tersebut agar:

- 1) Dapat menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat baik saat ini danantisipasi ke depan;

- 2) Efektif, dimana perencanaan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan, sesuai dengan pentahapan pencapaian hasil;
- 3) Komprehensif, yang diindikasikan oleh adanya sinergitas dan konsistensi perencanaan.
- 4) Sinergitas dapat dilihat dari sejauhmana integrasi dan sinkronisasi perencanaan baik antar sektor, antar level pemerintahan, maupun pemangku kepentingan. Sedangkan konsisten menegaskan bahwa perencanaan perlu menjaga keberlanjutan selama periode perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, sehingga diharapkan dapat menuntaskan penyelesaian masalah atau target capaian perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu;
- 5) Partisipatif, dimana proses perencanaan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga diperoleh hasil yang baik dan rasa memiliki;
- 6) Transparan dan akuntabel, dimana perencanaan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan pendekatan keadilan dan pemerataan. Selain itu, perencanaan disusun dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Penyusunan RPJPD Provinsi Riau menjadi sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena RPJPD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. RPJPD juga memberikan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah dalam waktu 20 tahun kedepan. RPJPD harus mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif seperti hasil evaluasi RPJPD tahun 2005-2025 serta pencapaian kerangka ekonomi makro daerah, adanya jangka waktu mencapai sasaran, masalah yang dihadapi, modal atau sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya dan kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

Selanjutnya untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 yang berkualitas diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, maka hal-hal yang diperhatikan sebagai berikut:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Visi RPJPN 2025-2045 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.
- 2) Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi Riau tahun 2005-2025 menjadi dasar dalam penyusunan RPJPD Provinsi Riau tahun 2025-2045.
- 3) Menganalisa capaian pembangunan daerah dengan melakukan analisis gambaran umum kondisi Daerah sehingga didapatkan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, perumusan visi dan misi daerah, perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Riau serta kebijakan lainnya.
- 4) Menganalisa Kerangka Ekonomi Makro Daerah untuk menentukan target indikator Makro pembangunan daerah. Skenario ini digunakan untuk menganalisis dan memperkirakan kejadian atau kondisi di masa yang akan datang;
- 5) Melibatkan pemangku kepentingan dengan melaksanakan pembahasan baik melalui forum konsultasi dan Diskusi Kelompok Terpumpun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025 – 2045 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

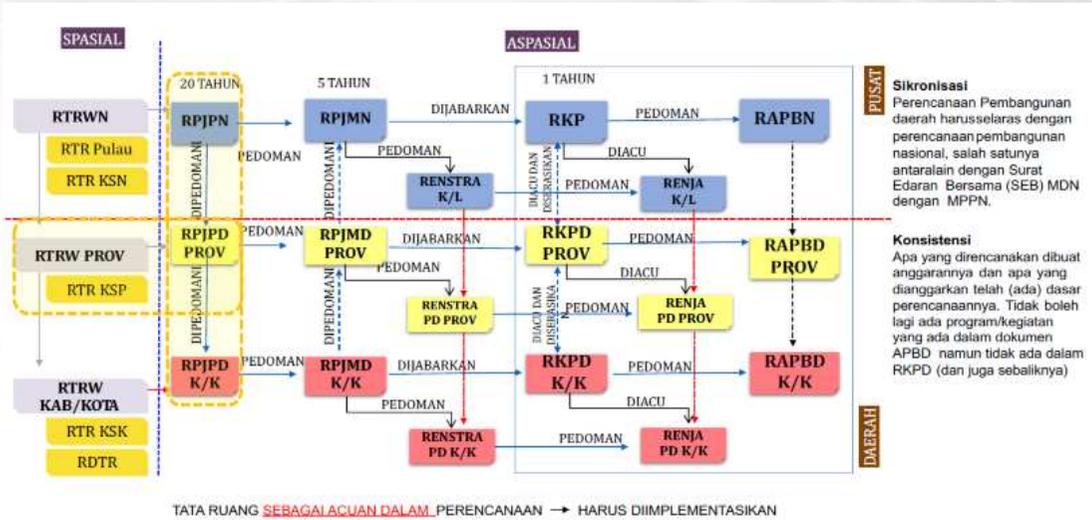
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
- 9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 10) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 20) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 - 21) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
 - 22) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.2/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045;
 - 23) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10).

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Dokumen RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025–2045 merupakan satu kesatuan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat tetap memperhatikan arah dan kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional melalui penyelenggaraan antara visi dan misi arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau dengan visi, misi, arah tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional serta berpedoman pada RTRW Provinsi Riau. Hubungan antar Dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Riau disajikan dalam gambar 1.1.



Gambar 1.1
Proses Penyusunan dan Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.3.1. Keterkaitan dengan RPJPN Tahun 2025-2045

- a. RPJPN tahun 2025-2045 menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045;
- b. Jangka waktu RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 sesuai dengan RPJPN Tahun 2025-2045;
- c. Memperhatikan ruang lingkup penyelarasan yang tertuang dalam surat edaran bersama menteri dalam negeri dengan menteri perencanaan pembangunan nasional/Kepala badan perencanaan pembangunan nasional nomor 600.1/176/SJ dan nomor 1 tahun 2024 tentang penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045. Penyelarasan tersebut dalam hal perumusan Visi, Sasaran Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Indikator Utama Pembangunan.

1.3.2. Keterkaitan dengan RTRW Nasional Tahun 2025-2045

- a. Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

- b. Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- c. Sebagaimana yang dinyatakan dalam penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota, Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, Keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, Keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor dan pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

1.3.3. Keterkaitan dengan RTRW Provinsi Riau

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau merupakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan. Penyusunan RPJPD ini memperhatikan sinkronisasi kebijakan dengan Dokumen Aspaspial Nasional (RPJPD dengan RPJPN dan RPJMD dengan RPJMN) dan Dokumen Spasial baik dengan RTRW Nasional serta RTRW Provinsi. Ruang lingkup penyelarasan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang penyelarasan dokumen rencana pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Keselarasan tersebut antara lain:

- Tujuan RTRW dengan Visi Misi RPJPD;
- Kebijakan dan Strategi RTRW dengan Arah Kebijakan RPJPD;
- Pusat-Pusat Kegiatan yang tercantum dalam RTRW terhadap perumusan pengembangan kewilayahan dalam RPJPD.

1.3.4. Keterkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) dalam rangka mewujudkan RPJPD sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

KLHS merupakan sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin dampak negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan, sehingga penyusunan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 harus mengacu pada dokumen KLHS terutama yang berkaitan dengan arah kebijakan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan selama periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. RPJPD disusun dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan (Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Riau, Badan Usaha dan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis. Selain itu RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Provinsi Riau.

Sementara itu RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang ada pada Provinsi Riau dengan ruang dan waktu.
2. Menjaga arah kebijakan pembangunan jangka panjang selama kurun waktu 20 (dua puluh tahun) yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian dokumen RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 disusun dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RPJPD, proses penyusunan RPJPD, alasan mengapa tentang RPJPD disusun, resiko jika RPJPD tidak tersedia dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai dengan peraturan perundangan dan produk hokum terkait.

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Menjelaskan hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang relevan yang mencakup RPJPN, RTRWN, RTRW Provinsi dan KLHS RPJPD Provinsi.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD.

1.5 Sistematika Penulisan

Menjelaskan organisasi penyusunan RPJPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar setiap bab.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim dan menjelaskan karakteristik demografi daerah.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi perspektif sosial budaya.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan, kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah dan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Mengemukakan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh Pemerintah Daerah, yang memuat:

- a. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua.

b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1 Permasalahan

Menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

3.2 Isu Strategis Daerah

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi

Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045.

4.2 Misi

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1 Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian Visi daerah meliputi:

- 5.1.1 Arah Kebijakan Periode 2025 – 2029;
- 5.1.2 Arah Kebijakan Periode 2030 – 2034;
- 5.1.3 Arah Kebijakan Periode 2035 – 2039;
- 5.1.4 Arah Kebijakan Periode 2040 – 2045.

Sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah.

5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 memuat 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

BAB VI PENUTUP

Memuat salah satunya tentang pelaksanaan pengendalian dan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM



Gambaran umum kondisi daerah provinsi menyajikan secara logis refleksi pembangunan hasil dan analisis kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dan serta indikator capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Pemerintahan Provinsi Riau beberapa tahun terakhir.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Provinsi Riau merupakan gambaran terhadap luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, serta penggunaan lahan.

a) Luas Geografis

Wilayah Provinsi Riau terdiri dari wilayah daratan seluas kurang lebih 9.002.079 Ha (termasuk pulau-pulau kecil) dan wilayah perairan pesisir seluas kurang lebih 1.262.303. Ha. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1 Peta Provinsi Riau

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau

Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota dengan 172 kecamatan dan 1.591 desa serta 271 kelurahan. Kesepuluh kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti. Dua kota adalah Kota Pekanbaru dan Dumai. Luas wilayah kabupaten/kota ditunjukkan pada Tabel 2.1, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa wilayah yang paling luas adalah Kabupaten Indragiri Hilir seluas 1.352.271 Ha dari luas Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut belum mengalami pemekaran sebagaimana

wilayah kabupaten lainnya di Provinsi Riau. Sedangkan wilayah paling sempit adalah Kota Pekanbaru seluas 63.833 Ha yang merupakan ibukota dari Provinsi Riau. Luas wilayah Provinsi Riau seluas 10.264.383 Ha yang terdiri dari luas daratan seluas 9.002.079 Ha dan luas perairan seluas 1.262.304 Ha.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Ibu Kota | Luas Wilayah (Ha) |
|-----------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| 14 | RIAU | Pekanbaru | 9.002.079 |
| 14.01 | Kab. Kampar | Bangkinang | 1.032.704 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | Rengat | 787.207 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | Bengkalis | 861.256 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | Tembilahan | 1.352.271 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | Pangkalan Kerinci | 1.334.630 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | Pasir Pengaraian | 768.391 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | Bagan Siapi-api | 906.863 |
| 14.08 | Kab. Siak | Siak Sri Indrapura | 780.606 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | Teluk Kuantan | 545.786 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | Selat Panjang | 362.355 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | Pekanbaru | 63.833 |
| 14.12 | Kota Dumai | Dumai | 206.178 |

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau

b) Letak Geografis

Letak geografis adalah posisi daerah pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain, ditentukan berdasarkan aspek astronomis, geologis, fisiografis dan sosial budaya. Secara geografis Provinsi Riau terletak pada posisi 1°7'39,37" Lintang Selatan 3°12'42,18" Lintang Utara dan antara 100°2'58,99" Bujur Timur hingga 104°0'47,06" Bujur Timur, yang membentang dari lereng bukit barisan hingga Selat Malaka.

Provinsi Riau secara geografis berbatasan dengan Provinsi lain dan Negara Tetangga sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Kepulauan Riau

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Riau berada pada posisi strategis yang mempunyai arti penting dalam geopolitik dan perekonomian nasional dan regional. Beberapa keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografis tersebut adalah berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka, dekat dengan Malaysia, Singapura, selain itu berada di segitiga pertumbuhan ekonomi tiga negara Indonesia, Malaysia dan Thailand.

Di Provinsi Riau terdapat 17 Lokasi Prioritas (Lokpri) yang tersebar di 4 (empat) kabupaten/kota yang merupakan Lokpri Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memerlukan penanganan khusus yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis. Prioritas penanganan secara khusus direncanakan secara simultan dan bertahap mulai dari tahun 2020-2024. Daftar Lokpri per kabupaten/kota sebagaimana pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Lokasi Prioritas Perbatasan Negara di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

| No | Kabupaten/Kota | Lokpri (Kecamatan) |
|----|-------------------|--|
| 1 | Rokan Hilir | Pasir Limau Kapas Sinaboi Bangko |
| 2 | Dumai | Dumai Kota Medang Kampai Sungai Sembilan |
| 3 | Bengkalis | Rupat Utara Rupat Bantan Bengkalis Bukit Batu |
| 4 | Kepulauan Meranti | Rangsang Barat Rangsang Pesisir Merbau Rangsang Pulau Merbau Tasik Putri Puyu |

Sumber: Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024

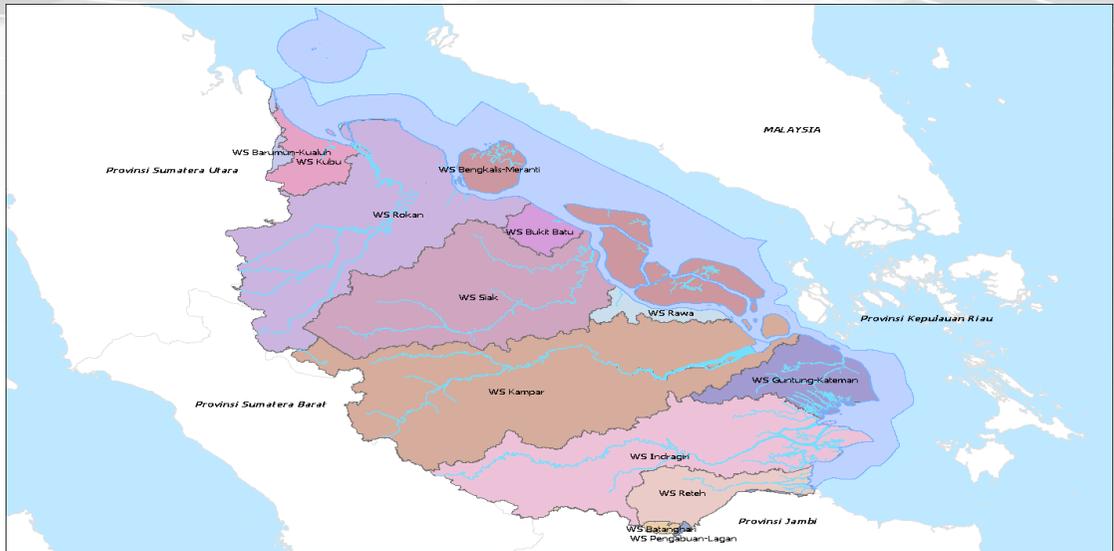


Gambar 2.2 Sebaran Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau

Sumber : Rencana Induk Kawasan Perbatasan Negara 2020-2024

Provinsi Riau memiliki 15 (lima belas) sungai diantaranya terdapat 4 (empat) sungai besar yang mempunyai peranan penting sebagai prasarana perhubungan masyarakat sekitar bantaran sungai, pariwisata dan perikanan. Sungai-sungai tersebut mengalir mulai dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka, keempat sungai tersebut adalah:

- Sungai Siak dengan panjang 345 Km dengan kedalaman 8-12 meter.
- Sungai Rokan sepanjang 325 Km dengan kedalaman 6-8 meter.
- Sungai Kampar sepanjang 580 Km dengan kedalaman 6 meter.
- Sungai Indragiri sepanjang 645 Km dengan kedalaman 6-8 meter.



Gambar 2.3 Wilayah Sungai Provinsi Riau

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau

Sungai-sungai tersebut memiliki anak-anak sungai yang cukup banyak dan membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS tersebut tersebar merata diseluruh wilayah daratan Provinsi Riau.

2.1.1.2 Karakteristik Sumber Daya Alam

a) Luas Tutupan Lahan

Data tutupan lahan digunakan untuk memperkirakan berapa potensi pemanfaatan ruang terutama untuk penggunaan sumber-sumber pengembangan sosial ekonomi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan peruntukan ruang. Berikut jenis dan sebaran tutupan lahan di Provinsi Riau.

Tabel 2.3 Luas Tutupan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2023

| No | Tutupan Lahan | Luas (Ha) | (%) |
|----|------------------------------|-----------|-------|
| 1 | Bangunan bukan-permukiman | 13.215 | 0,15 |
| 2 | Bangunan permukiman/campuran | 217.148 | 2,41 |
| 3 | Danau/telaga alami | 4.900 | 0,05 |
| 4 | Hamparan pasir pantai | 537 | 0,01 |
| 5 | Hutan lahan rendah | 919.461 | 10,21 |
| 6 | Hutan lahan tinggi | 169.499 | 1,88 |

| No | Tutupan Lahan | Luas (Ha) | (%) |
|----|--|------------------|------------|
| | (pegunungan/perbukitan) | | |
| 7 | Hutan mangrove | 151.928 | 1,69 |
| 8 | Hutan rawa/gambut | 725.696 | 8,06 |
| 9 | Hutan sagu | 12.968 | 0,14 |
| 10 | Hutan tanaman | 808.425 | 8,98 |
| 11 | Kebun dan Tanaman campuran (tahunan dan semusim) | 1.423.662 | 15,81 |
| 12 | Kolam air asin/payau (tambak) | 840 | 0,01 |
| 13 | Kolam air tawar | 1.195 | 0,01 |
| 14 | Lahan terbuka alami lain | 148.551 | 1,65 |
| 15 | Lahan terbuka diusahakan | 14.578 | 0,16 |
| 16 | Perkebunan dengan tanaman berkayu keras | 3.852.120 | 42,79 |
| 17 | Perkebunan tanaman semusim | 669 | 0,01 |
| 18 | Permukaan diperkeras bukan gedung | 147 | 0,00 |
| 19 | Rataan lumpur | 1.127 | 0,01 |
| 20 | Rawa pedalaman | 16.822 | 0,19 |
| 21 | Semak dan belukar | 347.161 | 3,86 |
| 22 | Sungai | 116.454 | 1,29 |
| 23 | Tampungan air lain | 11 | 0,00 |
| 24 | Tanaman semusim lahan basah (sawah) | 31.603 | 0,35 |
| 25 | Tanaman semusim lahan kering | 12.995 | 0,14 |
| 26 | Waduk dan danau buatan | 10.369 | 0,12 |
| | Grand Total | 9.002.079 | 100 |

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau

Berdasarkan tabel 2.3 di atas, dapat diidentifikasi luas tutupan lahan di Provinsi Riau Tahun 2023 didominasi oleh Perkebunan dengan tanaman berkayu keras dan kebun (42,79%), tanaman campuran (tahunan dan semusim) (15,81%) dan hutan lahan rendah (10,21%) sedangkan yang lainnya dibawah 10%.

b) Indeks Ketahanan Pangan

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga

aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Tabel 2.4 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018 – 2023

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/ Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 | RIAU | - | 63,37 | 64,12 | 66,84 | 67,59 | 68,68 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 52,74 | 63,97 | 55,51 | 61,78 | 56,28 | 57,59 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 53,79 | 60,14 | 66,58 | 64,66 | 57,96 | 59,35 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 58,18 | 60,36 | 65,95 | 61,15 | 62,61 | 61,68 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 66,21 | 67,08 | 67,48 | 69,15 | 68,38 | 69,29 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 66,87 | 68,62 | 60,51 | 66,16 | 69,68 | 69,49 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 57,76 | 54,25 | 53,24 | 54,92 | 54,91 | 56,76 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 59,73 | 71,42 | 66,63 | 67,48 | 66,46 | 67,45 |
| 14.08 | Kab. Siak | 70,78 | 76,6 | 77,12 | 76,84 | 76,87 | 74,74 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 70,08 | 76,48 | 67,85 | 72,64 | 70,7 | 68,94 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 48,94 | 52,07 | 37,58 | 38,12 | 68,06 | 70,47 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 81,15 | 85,38 | 82,85 | 90,56 | 86,56 | 89,81 |
| 14.12 | Kota Dumai | 63,67 | 69,95 | 68,15 | 78,64 | 72,63 | 78,61 |

Sumber : Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Ketersediaan pangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan menyebabkan ketidakstabilan bagi suatu negara atau daerah, baik secara ekonomi maupun politis, sehingga ketahanan pangan merupakan suatu hal yang wajib menjadi perhatian pemerintah daerah. Masalah ketersediaan beras di Provinsi Riau saat ini dan akan datang, perlu mendapat perhatian khusus, hal ini dikarenakan semakin terbatasnya produksi beras, sedangkan konsumsi semakin meningkat, karena semakin bertambahnya jumlah penduduk. Dari tabel dapat dilihat bahwa indeks ketahanan pangan (IKP) Provinsi Riau dari tahun 2018-2023 semakin meningkat. IKP Provinsi Riau tahun 2023 sebesar 68,68, angka ini meningkat 8,4% dalam enam tahun terakhir. IKP tertinggi di Kota Pekanbaru sebesar 89,81 dan terendah di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 56,76. Dari sisi produksi lokal, beberapa bahan pokok strategis seperti beras, cabe, bawang dan telur masih defisit. Namun demikian, upaya untuk menjaga kelancaran jaringan logistik terus dilakukan terutama infrastruktur jalan dan transportasi logistik yang memadai.

c) Bauran Energi

Bauran energi merupakan energi primer gabungan yang terdiri dari energi fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara), dan energi baru terbarukan baik dari sisi *demand* (pengguna energi) maupun *supply* (penyedia energi).

Tabel 2.5 Capaian Bauran Energi Provinsi Riau 2022-2023

| No | Tahun | Penggunaan Energi (%) | | | |
|----|-------|-----------------------|----------|----------|---------------|
| | | Minyak Bumi | Gas Bumi | Batubara | Bauran Energi |
| 1 | 2022 | 26,98 | 16,10 | 27,58 | 29,34 |
| 2 | 2023 | 28,93 | 15,04 | 29,90 | 26,13 |

Sumber Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

Capaian bauran energi Provinsi Riau pada tahun 2023 menurun dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan ini disebabkan karena adanya peningkatan data pemanfaatan energi yang bersumberkan minyak bumi dan batubara. Dari capaian EBT tahun 2023 sebesar 26,13% masih perlu upaya untuk penambahan EBT di tahun 2025 sebesar 5,09%. Provinsi Riau memiliki potensi energi baru terbarukan yang cukup besar yang terdiri dari laut, biomassa, biogas, surya, angin, panas bumi dan sampah.

d) Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT)

Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) mencakup berbagai sumber energi yang dapat diperbaharui secara alami dan berpotensi untuk memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan. Berikut pemanfaatan sumber energi terbarukan yang dilakukan Provinsi Riau, yaitu:

1. Sumber energi terbarukan dari jenis energi surya, air, energi panas bumi, energi laut, dan energi angin diarahkan untuk ketenagalistrikan.
2. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi sinar matahari (surya) diarahkan untuk ketenagalistrikan dan energi non listrik untuk industri, rumah tangga, dan transportasi.
3. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati diarahkan untuk mengurangi BBM terutama untuk transportasi dan industri.
4. Pemanfaatan energi terbarukan dari jenis biomassa, biogas dan sampah diarahkan untuk ketenagalistrikan dan transportasi.

5. Pemanfaatan sumber energi gas bumi untuk industri, ketenagalistrikan, rumah tangga, dan transportasi, diutamakan untuk pemanfaatan yang memiliki nilai tambah paling tinggi.
6. Peningkatan pemanfaatan sumber energi sinar matahari melalui penggunaan sel surya pada transportasi, industri, gedung komersial dan rumah tangga.

Tabel berikut menggambarkan potensi EBT yang ada di Provinsi Riau serta pemanfaatannya.

Tabel 2.6 Potensi EBT Provinsi Riau dan Pemanfaatannya Tahun 2023

| No | Jenis Pemanfaatan | Kapasitas (MW) | Potensi (MW) | Persentase Pemanfaatan Dari Potensi |
|--------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | PLTS | 19,58 | 1.700,00 | 1,15% |
| 2 | PLTBm | 640,3 | 2.142,37 | 29,89% |
| 3 | PLTBg | 30,4 | 4.354,55 | 0,70% |
| 4 | PLTMH | 0,28 | 894 | 12,78% |
| 5 | PLTA | 114 | | |
| 6 | PLTP | 0 | 15 | 0,00% |
| 7 | PLTSa | 0 | 10 | 0,00% |
| Total | | 804,55 | 9.115,92 | 8,83% |

Sumber Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

Dari potensi EBT Provinsi Riau sebesar 9.115,92 MW yang baru dimanfaatkan sebesar 8,83% atau sebesar 804.936 MW. Potensi EBT terbesar bersumberkan dari kelapa sawit berupa biogas sebesar 4.354,55 MW dan biomassa sebesar 2.142,37 MW dan diikuti energi surya sebesar 1.700 MW.

e. Konsumsi Listrik

Jumlah desa yang sudah terlayani listrik di Provinsi Riau hingga tahun 2023 sudah mencapai 100% dan semuanya telah dialiri listrik PLN. Peningkatan rasio elektrifikasi akan berdampak kepada konsumsi listrik dan konsumsi listrik perkapita.

Tabel 2.7 Konsumsi Listrik Provinsi Riau Tahun 2021-2023

| Kode | Provinsi / Kabupaten / Kota | Konsumsi Listrik (Kwh) | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) | Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh) | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|-----------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 14 | RIAU | 6.115.101.087 | 7.691.637.991 | 8.212.556.502,96 | 16 | 941,71 | 1.162,87 | 1.202,21 | 13 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 743.781.125 | 766.492.424 | 813.748.202,01 | 5 | 867,13 | 872,79 | 945,8 | 4 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 237.445.621 | 253.158.043 | 320.958.328,28 | 16 | 523,88 | 545,51 | 678,85 | 14 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 1.311.760.259 | 2.572.096.001 | 2.721.213.602,08 | 44 | 2.287,27 | 4.412,03 | 4.130,27 | 34 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 233.499.000 | 256.238.757 | 262.655.985,45 | 6 | 354,85 | 387,8 | 377,61 | 3 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 176.218.747 | 196.055.279 | 213.136.651,96 | 10 | 441,36 | 477,03 | 504,53 | 7 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 237.863.493 | 262.627.984 | 284.643.469,60 | 9 | 416,61 | 450,72 | 496,31 | 9 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 310.700.029 | 325.012.373 | 351.768.804,86 | 6 | 480,37 | 493,63 | 530,93 | 5 |
| 14.08 | Kab. Siak | 257.550.038 | 274.964.362 | 300.351.581,59 | 8 | 551,87 | 575,78 | 625,51 | 6 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 171.406.901 | 181.253.975 | 190.820.592,99 | 6 | 504,3 | 524,08 | 535,64 | 3 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 92.311.483 | 92.042.379 | 98.806.054,84 | 3 | 440,71 | 431,05 | 466,57 | 3 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 1.597.940.874 | 1.653.768.972 | 1.759.342.794,19 | 5 | 1.606,64 | 1.641,39 | 1.566,16 | -1 |
| 14.12 | Kota Dumai | 744.623.517 | 857.927.442 | 895.110.435,11 | 10 | 2.302,11 | 2.585,43 | 2.854,33 | 11 |

Sumber : PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, 2024

Konsumsi listrik merupakan konsumsi energi yang berupa energi listrik. Konsumsi listrik Provinsi Riau mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai tahun 2023 sebesar 16 persen pertahun sedangkan konsumsi listrik perkapita merupakan jumlah energi listrik yang digunakan dibagi dengan jumlah penduduk dalam periode satu tahun. Konsumsi listrik perkapita Provinsi Riau dari tahun 2021 mengalami peningkatan sampai tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13 persen pertahun, dimana konsumsi listrik perkapita Provinsi Riau Tahun 2023 masih dibawah konsumsi listrik nasional tahun 2023 sebesar 1.337 Kwh.

Konsumsi Listrik yang semakin meningkat di Provinsi Riau tentu saja membutuhkan ketersediaan energi dalam jumlah yang cukup, tidak terputus dan terjangkau bagi masyarakat. Pemenuhan konsumsi energi ini memperhatikan aspek lingkungan dan penggunaan berbagai sumber energi baik yang berbahakan bahan fosil maupun energi baru terbarukan. Untuk penggunaan energi baru terbarukan

Provinsi Riau menargetkan sebesar 31,22 persen pada tahun 2025 dan 46,63 persen pada tahun 2050 (RUED Provinsi Riau 2021-2050).

2.1.1.3 Gambaran Kualitas Lingkungan Hidup

a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Status mutu air dipantau dari kualitas lingkungan baku mutu air sungai Provinsi Riau yang pengawasannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau dengan sasaran industri yang membuang air limbah ke badan air. Kualitas air dari empat sungai besar di Provinsi Riau, yaitu Sungai Indragiri, Sungai Rokan, Sungai Siak, dan Sungai Kampar dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan kualitas mutu air. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan industri, masih terdapat perusahaan yang membuang limbahnya ke badan air melebihi baku mutu yang telah ditetapkan sesuai izin yang dimiliki. Di samping itu, penurunan kualitas mutu air disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat pinggiran sungai yang umumnya membuang limbah domestik ke sungai.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan menilai kondisi lingkungan di suatu daerah. IKLH mencakup beberapa komponen utama yang mencerminkan aspek-aspek penting dari kualitas lingkungan, yakni kualitas udara (Indeks Kualitas Udara), kualitas air (Indeks Kualitas Air), kualitas tutupan lahan, dan kualitas air laut. Perubahan IKLH Provinsi Riau dari tahun 2018 sampai dengan 2023, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Riau Tahun 2018-2023

| No | Indeks | Tahun | | | | | |
|----|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Udara (IKU) | 89,91 | 90,40 | 90,42 | 90,13 | 90,69 | 90,89 |
| 2 | Air (IKA) | 73,68 | 53,55 | 50,23 | 52,25 | 53,88 | 50,84 |
| 3 | Tutupan Lahan (IKTL) | 48,37 | 48,15 | 57,59 | 50,22 | 50,00 | 51,69 |
| 4 | Air Laut | - | - | - | 77,73 | 83,95 | 74,39 |
| | IKLH | 68,43 | 62,47 | 68,94 | 70,72 | 72,10 | 70,42 |

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan IKLH Provinsi Riau pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya perubahan metode perhitungan IKLH tahun 2023. Nilai maksimal Indeks Kualitas Air (IKA) yang sebelumnya 70 poin, dengan metodologi baru menjadi 100 dan tidak membandingkan kelas air. Indeks Kualitas Udara (IKU) terdapat penambahan parameter PM 2,5 selain NO_x, SO_x dan PM 10. Sedangkan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan metodologi baru memasukkan variabel kanal, kebakaran, tinggi muka air tanah dan mengakomodir 23 kelas tutupan lahan.

IKLH Tahun 2023 sebesar 70,42 poin menurun dari IKLH tahun 2022 sebesar 72,10 poin. Parameter yang mengalami penurunan adalah Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). IKA Tahun 2023 berada pada peringkat sedang sebesar 50,84 poin, angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 53,88 poin. Sedangkan IKAL Tahun 2023 berada pada peringkat baik sebesar 74,39 poin, namun angka ini juga mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 83,95 poin. Kondisi lahan gambut dan pasang surut mempengaruhi hasil pemantauan IKA yang pada akhirnya juga mempengaruhi kualitas air laut. Oleh sebab itu, perlu peningkatan upaya pengendalian pencemaran air terutama dari sisi pengawasan dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan terhadap pembuangan limbah ke badan air. Sedangkan capaian IKU pada tahun 2023 sebesar 90,89 poin dengan peringkat sangat baik, dimana angka ini meningkat dari tahun 2022 sebesar 90,69 poin. Faktor yang mempengaruhi antara lain berkurangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan sebagai penyumbang terbesar kualitas udara. Capaian IKL pada tahun 2023 sebesar 46,60 poin berada pada peringkat sedang, angka ini meningkat dari tahun 2022 sebesar 50,00 poin, dikarenakan meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di kabupaten/kota. Namun demikian, upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH perlu terus ditingkatkan, di samping upaya mempertahankan tutupan hutan yang ada dengan intervensi kebijakan alih fungsi lahan di Provinsi Riau.

b) Kerusakan Kawasan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Luas kawasan hutan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6612/MENLHK-

PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 sebesar ± 5.352.503 ha. Kawasan Hutan produksi tetap (HP) merupakan yang terluas yaitu sebesar ± 2.329.904,00 ha atau 43,53% dari total luas kawasan hutan. Selanjutnya Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 1.149.035,00 ha atau 21,47%, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 1.013.166,00 ha atau 18,93%, Hutan Konservasi seluas ± 630.622,00 ha atau seluas 11,78% dan Hutan Lindung seluas ± 229.776,00 ha atau 4,29% dari total luas kawasan hutan.

Tabel 2.9 Kerusakan Kawasan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Riau Tahun 2018-2023

| No | Keterangan | Tahun | | | | | |
|----|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Kerusakan Kawasan Hutan dan Lahan | 701.607,00 | 701.607,00* | 701.607,00* | 701.607,00* | 221.828,00 | 221.828,00 |
| | a. Sangat Kritis | 261.139,00 | 261.139,00* | 261.139,00* | 261.139,00* | 191.877,00 | 191.877,00 |
| | b. Agak Kritis | - | - | - | - | - | - |
| | c. Kritis | 440.468,00 | 440.468,00* | 440.468,00* | 440.468,00* | 29.951,00 | 29.951,00 |
| 2 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis | 1.887,59 | 14.786,00 | 2.196,54 | 8.547,00 | 3.055,50 | 1.775,20 |

Sumber: BPS Provinsi Riau, Riau Dalam Angka 2018 – 2023

Ket. * : Berdasarkan data tahun 2018 karena rilis per tiga tahun sekali

** : Berdasarkan data tahun 2021 karena rilis per tiga tahun sekali

Berdasarkan tabel di atas, kerusakan kawasan hutan di Provinsi Riau berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) relatif tetap pada tahun 2018-2021. Namun dengan adanya perubahan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan oleh KLHK, luas kerusakan kawasan hutan dan lahan pada tahun 2022 menjadi 221.828 ha, dimana 86,5% merupakan kategori sangat kritis. Tingginya kategori kerusakan sangat kritis ini memerlukan upaya rehabilitasi kolaboratif dan masif dari berbagai pihak terkait. Dalam lima tahun terakhir, rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Riau menunjukkan angka yang berfluktuasi dan cenderung meningkat, namun belum dapat menyelesaikan kerusakan kawasan hutan dan lahan secara menyeluruh di Provinsi Riau.

2.1.1.4 Kebencanaan dan Perubahan Iklim

a) Indeks Risiko Bencana

Provinsi Riau yang beribukota di Kota Pekanbaru ini memiliki luas wilayah seluas 10.264.383 Ha yang terdiri dari luas daratan seluas 9.002.079 Ha dan luas perairan seluas 1.262.304 Ha.. Dengan kondisi geologi Riau yang umumnya berada di wilayah daratan sepanjang Bukit Barisan hingga bagian tengah dan selatan, sebagian besar wilayah Provinsi Riau bagian tengah dan barat termasuk zona lipatan (folded zone) namun memiliki potensi gerakan tanah yang relatif kecil karena kondisi topografinya yang sebagian besar merupakan daerah dataran rendah (kemiringan lahan <2%). Provinsi Riau memiliki 15 sungai, 4 diantaranya merupakan sungai utama dan 3 Cekungan Air Tanah (CAT) yang digunakan sebagai sumber air.

Berdasarkan Geoportal Data Bencana Indonesia tahun 2023, Provinsi Riau memiliki potensi bencana alam yang dominan terjadi yaitu kebakaran hutan dan lahan, serta banjir. Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Riau mencapai 2.643 ha sejak selama tahun 2023, dimana kebakaran hutan dan lahan terluas terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu. Jumlah lahan terbakar tercatat dari data hotspot satelit BMKG terpantau ada 3.341 titik. Sementara itu, untuk Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) tercatat dalam kategori baik hingga sedang selama tahun 2023.

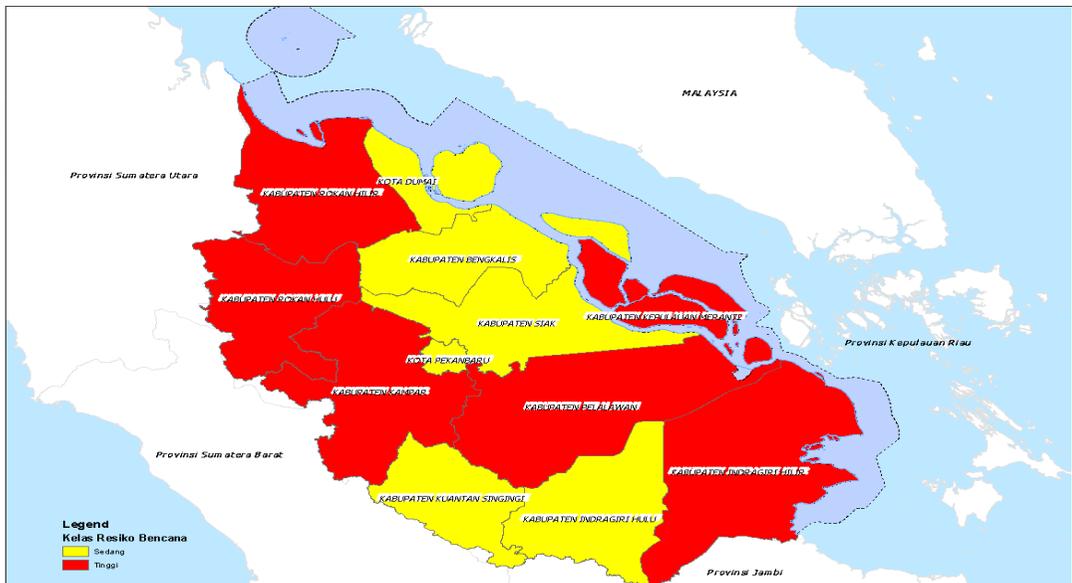
Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2023, Provinsi Riau memiliki indeks risiko 137,75 (sedang). Perkembangan Indeks Risiko Bencana (IRB) kabupaten/kota secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 2.10 Indeks Resiko Bencana (IRB) Provinsi Riau Tahun 2016-2023

| Kode | Provinsi / Kabupaten/Kota | Tahun | | | | | | | | Kelas Resiko |
|-------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 14 | RIAU | 147,27 | 147,27 | 147,27 | 147,27 | 147,27 | 142,41 | 141,26 | 137,75 | Sedang |
| 14.01 | Kab. Kampar | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 139,93 | 148,53 | 136,81 | Sedang |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 127,24 | 122,06 | Sedang |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 140,37 | 128,86 | 134,65 | Sedang |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | Tinggi |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 151,41 | Tinggi |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | Tinggi |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 153,75 | Tinggi |

| Kode | Provinsi / Kabupaten/Kota | Tahun | | | | | | | | Kelas Resiko |
|-------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 14.08 | Kab. Siak | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 120,9 | Sedang |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | Sedang |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 147,6 | 147,6 | 147,6 | 147,6 | 147,6 | 147,6 | 147,6 | 146,91 | Tinggi |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 130,37 | 130,98 | 125,07 | Sedang |
| 14.12 | Kota Dumai | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 106,6 | Sedang |

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2024



Gambar 2.4 Peta Indeks Resiko Bencana Gerakan Tanah Provinsi Riau

Sumber: Indeks Resiko Bencana (IRB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tahun 2022 Diolah kembali

Bencana alam yang sering terjadi setiap tahunnya di Provinsi Riau adalah banjir dan kebakaran lahan sehingga berakibat kepada kabut asap. Bencana alam lainnya seperti gempa, dan tsunami hampir tidak pernah terjadi. Bencana banjir yang berakibat kepada kerusakan dan bahkan kematian terutama terjadi di wilayah sekitar tepian sungai Indragiri (Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir), Sungai Siak (Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis), Sungai Kampar (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan), dan Sungai Rokan (Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir).

Provinsi Riau merupakan daerah tingkat kerawanan bencana pergeseran

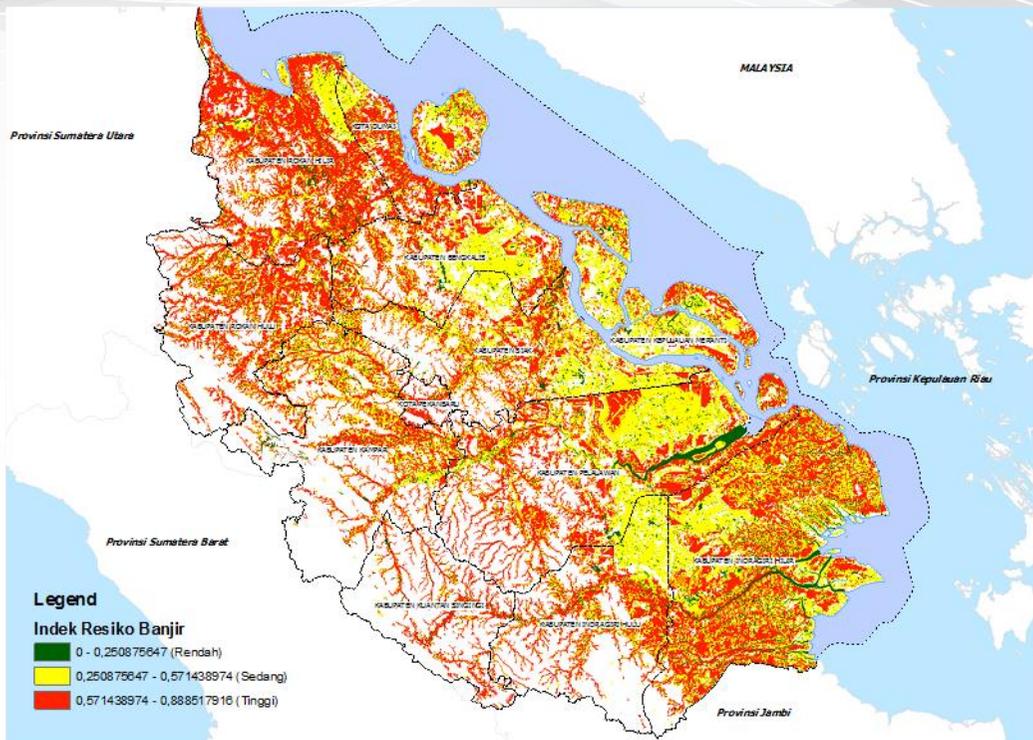
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045

tanah dengan indeks resiko mulai dari sedang sampai rendah. Kawasan dengan tingkat resiko bencana gerakan tanah sedang dominan ditemukan kabupaten yang mempunyai daratan tinggi terutama sekitar kaki bukit barisan dan berbatasan dengan Provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Jambi. Sebaliknya kawasan dengan indeks resiko bencana gegerakan tanah rendah ditemukan pada kabupaten dengan daratan rendah dan berbatasan dengan daerah pesisir.

Meskipun luas daerah yang mempunyai indeks resiko bencana gegerakan tanah rendah sampai sedang hampir sama, tingkat resiko bencana erosi berbeda. Secara umum Provinsi Riau termasuk pada daerah yang aman dari bencana erosi. Sebagian besar kawasan Provinsi Riau mempunyai indeks resiko bencana erosi rendah, hanya kawasan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebagian kecil kawasan yang berbatasan dengan Sumatera Barat indeks resiko bencana erosi sedang.

b) Bencana banjir, Longsor, dan Abrasi

Provinsi Riau merupakan provinsi yang juga rawan akan bencana alam yaitu bencana banjir, longsor, abrasi yang terjadi hampir setiap tahun, hal ini dimaklumi karena Provinsi Riau memiliki 4 (empat) sungai besar yaitu Sungai Indragiri, Sungai Kampar, Sungai Rokan dan Sungai Siak. Wilayah bagian barat yang merupakan hulu dari sungai-sungai yang mengalir, bermuara di pantai timur yang mengakibatkan daerah ini rentan terhadap bencana banjir dan genangan air. Dengan empat sungai besar yang mengalir dan seiring dengan musim hujan, maka bencana banjir sering terjadi setiap tahunnya. Sementara untuk bencana longsor merupakan insidental di beberapa wilayah dan waktu tertentu. Dan melihat kecenderungan data bencana di Provinsi Riau, maka diperlukan upaya penanganan bencana oleh Pemerintah Provinsi Riau.



Gambar 2.5 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi Provinsi Riau
 Sumber: Indeks Resiko Bencana (IRB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),
 Tahun 2022 Diolah kembali

Abrasi yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Riau dapat mengakibatkan kerusakan jalan, rumah, fasilitas umum, perkebunan, jembatan, dermaga dan lainnya sehingga diperlukan perhatian dari Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah kabupaten/kota setempat dan masyarakat untuk mengurangi dampak abrasi yang disebabkan oleh air laut maupun sungai ini.

Tabel 2.11 Abrasi di Provinsi Riau Tahun 2023

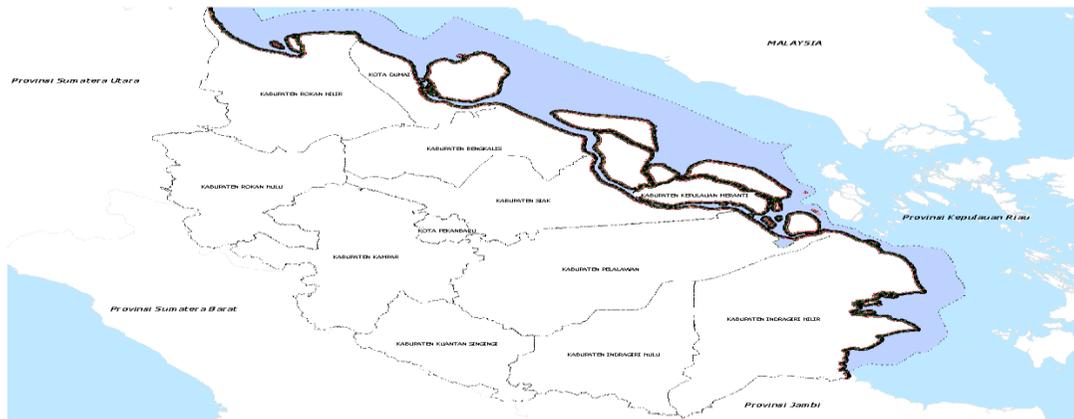
| No. | Abrasi | Tanggal | Luas Terkena Abrasi | Kerusakan |
|-----|---|------------|---------------------|--------------------------|
| 1. | Longsor akibat Abrasi Ds. Koto Taluk, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuansing | 15 Januari | - | • 1 Jembatan Rusak Berat |
| 2. | Longsor Tebing Penahan Bendungan Stanum, Kel. Langgini, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar | 23 Januari | - | • Tanggul Rusak Berat |

| No. | Abrasi | Tanggal | Luas Terkena Abrasi | Kerusakan |
|-----|---|-------------|---------------------|--|
| 3. | Longsor akibat Abrasi Jl. Sejahtera RT.10/ RW.05, Dsn. 3 Tanjung Jering, Ds. Sri Tanjung, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis | 23 Januari | ± 2 M | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Rumah Hancur (1 KK / 6 Jiwa) • Jalan Putus ± 2 Meter |
| 4. | Longsor Ds. Tanjung Alai, Kec. XII Koto Kampar, Kab. Kampar | 04 Februari | ± 300 M | <ul style="list-style-type: none"> • Jalan Putus ± 300 Meter |
| 5. | Longsor Tanggul Bendungan Stanum, Kel. Langgini, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar | 05 Februari | - | <ul style="list-style-type: none"> • Tanggul Rusak Berat |
| 6. | Longsor Jl. Lintas Riau - Sumbar KM 81 dan 82, Ds. Merangin, Kec. Kuok, Kab. Kampar | 21 Maret | ± 100 M | <ul style="list-style-type: none"> • Jalan Putus ± 300 Meter |
| 7. | Longsor akibat Abrasi Ds. Koto Taluk, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuansing | 21 Maret | ± 10 M | <ul style="list-style-type: none"> • Turap ± 10 Meter |
| 8. | Longsor akibat Abrasi Jl. Koni RT.01/RW.03, Kel. Kuala Enok, Kec. Tanah Merah, Kab. Inhil | 04 Juli | - | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Rumah Hancur (2 KK / 8 Jiwa) |
| 9. | Longsor Jl. Danang lelo, Ds. Pematang Benteng, Kec. Batang Peranap, kab. Inhu | 09 April | ± 25 M | <ul style="list-style-type: none"> • Jalan Desa Putur ± 25 Meter |
| 10. | Longsor akibat Abrasi RT.01/RW.05, Kel. Minas, Kec. Minas, Kab. Siak | 22 Mei | - | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Rumah Hancur (1 KK / 5 Jiwa) |
| 11. | Longsor akibat Abrasi Ds. Pulau Panjang, Kec. Cerenti, Kab. Kuansing | 28 Juni | ± 26 M | <ul style="list-style-type: none"> • Turap ± 26 Meter |
| 12. | Longsor Dsn. Koto Bangun RT.02/RW.03, Ds. Salo, Kec. Salo, Kab. Kampar | 09 Desember | - | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Jembatan Putus |
| 13. | Longsor akibat Abrasi Jl. M. Boya RT.01/RW.01, Kel. Kuala Enok, Kec. Tanah Merah, Kab. Inhil | 17 Desember | - | <ul style="list-style-type: none"> • 6 Rumah Hancur (6 KK / 23 Jiwa) • 1 Mesjid Rusak Ringan |
| 14. | Longsor akibat Abrasi Ds. Koto Bangun, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar | 27 Desember | ± 50 M | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Jalan Rusak ± 50 Meter |
| 15. | Longsor akibat Abrasi Ds. | 27 | - | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Jembatan Putus |

| No. | Abrasi | Tanggal | Luas Terkena Abrasi | Kerusakan |
|-----|---|-------------|---------------------|---|
| | Cinta Damai, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar | Desember | | |
| 16. | Longsor akibat Abrasi Ds. Koto Inuman, Kec. Cerenti, Kab. Kuansing | 28 Desember | - | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Jembatan Rusak Ringan |
| 17. | Longsor akibat Abrasi Dsn. Sungai Pinang RT.01/RW.07, Kel. Kuala Enok, Kec. Tanah Merah, Kab. Inhil | 31 Desember | - | <ul style="list-style-type: none"> • 4 Rumah Hancur (4 KK / 16 Jiwa) |

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau

Pemerintah Provinsi Riau menangani bencana alam seperti banjir, longsor, dan abrasi melalui berbagai upaya yang meliputi pembangunan infrastruktur, restorasi ekosistem, pengelolaan sumber daya alam, kebijakan dan peraturan, serta sistem peringatan dini. Integrasi dari semua upaya ini penting untuk mengurangi risiko, meminimalkan dampak, dan meningkatkan kesiapsiagaan serta respons terhadap bencana alam.



Gambar 2.6 Indeks Resiko Bencana Gelombang Ekstrem Abrasi Provinsi Riau

Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Provinsi Riau, 2020 Diolah kembali

c) Hotspot dan Lahan Terbakar

Sebagaimana dimaklumi bahwa Provinsi Riau disamping rentan terhadap bencana banjir di musim hujan, namun juga rentan terhadap bencana kekeringan di musim kemarau, yang akhirnya menyebabkan terjadinya kebakaran lahan dan

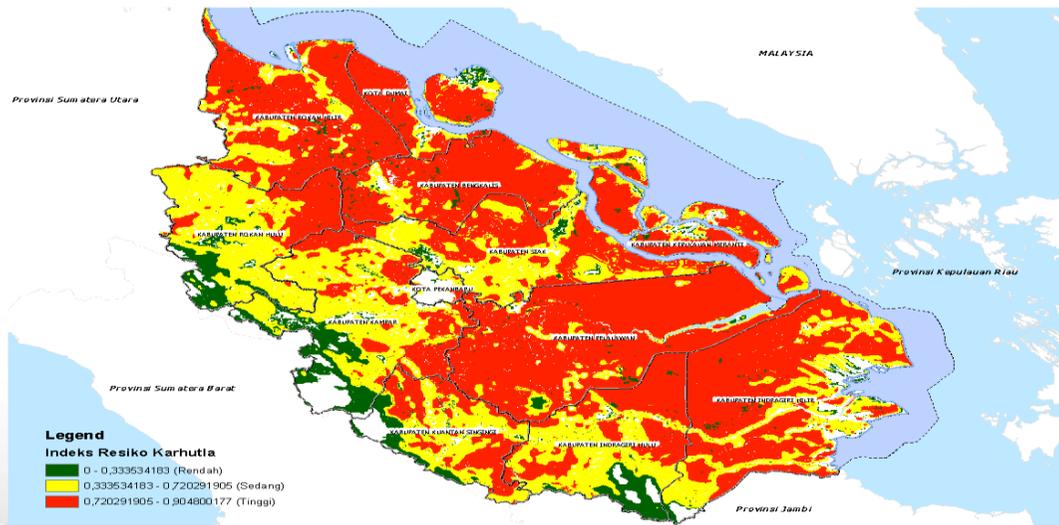
hutan. Dari hasil pantauan Satelit NOAA sepanjang tahun 2017 terpantau *hotspot* di Provinsi Riau sebanyak 425 *hotspot*, sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12 Rekapitulasi Jumlah *Hotspot* dan Luas Lahan Terbakar di Provinsi Riau Tahun 2017-2023

| No. | Tahun | Jumlah Hotspot | Luas Lahan Terbakar (Ha) |
|-----|-------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2017 | 425 | 2.348,65 |
| 2 | 2018 | 1.215 | 1.369,27 |
| 3 | 2019 | 3.716 | 5.776,46 |
| 4 | 2020 | 2.732 | 1.603,95 |
| 5 | 2021 | 2.780 | 1.456,52 |
| 6 | 2022 | 1.652 | 1.247,47 |
| 7 | 2023 | 3.342 | 2.432,70 |

Sumber: Satelit Lapan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau.

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 secara keseluruhan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2.780 hotspot. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan jumlah hotspot yang ada. Penurunan hotspot pada tahun 2022 dan 2021 berdampak terhadap kondisi udara di Provinsi Riau yang bebas asap, hal ini merupakan keberhasilan tersendiri bagi Provinsi Riau.



Gambar 2.7 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi Provinsi Riau

Sumber: Indeks Resiko Bencana (IRB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tahun 2022 Diolah kembali

2.1.1.5 Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) lingkungan hidup adalah instrumen penting dalam pengendalian pembangunan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan ekosistem untuk menyediakan sumber daya alam dan layanan ekosistem yang mendukung kehidupan manusia. Ini termasuk produksi sumber daya alam, pengaturan iklim, pengendalian banjir, penyerapan polutan, dan keanekaragaman hayati yang berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Sementara itu, daya tampung mengacu pada kapasitas ekosistem untuk menahan tekanan dan gangguan lingkungan.

Ekosistem memiliki batas daya tampung, dan jika terlampaui, dapat menyebabkan kerusakan atau bahkan kerusakan permanen pada ekosistem. Daya tampung lingkungan hidup penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem serta menyediakan jasa lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk manusia, seperti menyerap polusi, menunjang pertumbuhan populasi manusia, dan menghadapi perubahan iklim.

a) Daya Dukung Pangan

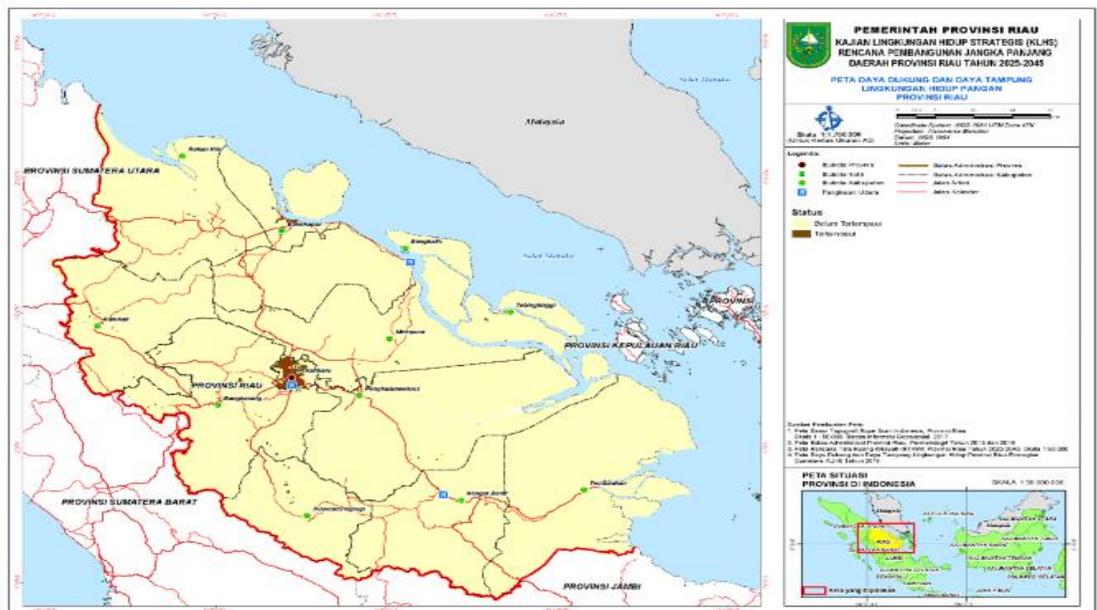
Daya dukung penyedia pangan adalah potensi yang dimiliki oleh ekosistem atau lingkungan alami untuk mendukung ketersediaan pangan bagi manusia. Potensi tersebut meliputi sumber daya alami seperti tanah, air, dan iklim yang merupakan karakteristik alami suatu wilayah. Potensi ini dapat berperan dalam mendukung produksi pangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, nilai maksimal dari potensi tersebut bergantung pada cara manusia dalam memanfaatkannya.

Status daya dukung dan daya tampung penyedia pangan Provinsi Riau berdasarkan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Riau Ekoregion Sumatera KLHK Tahun 2019 didominasi oleh status Belum Terlampaui, yaitu seluas 8.938.753,10 Ha atau 99,30% dari total luas daerahnya. Lebih jelasnya luas status DDDTLH Penyedia Pangan per kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 2.13 Status DDDTLH Penyedia Pangan Provinsi Riau

| Kabupaten / Kota | Luas (Ha) | | Persentase (%) | | Total Luas (Ha) | Total Persentase (%) |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | Belum Terlampaui | Terlampaui | Belum Terlampaui | Terlampaui | | |
| Bengkalis | 857.908,02 | 3.347,68 | 9,53% | 0,04% | 861.255,70 | 9,57% |
| Indragiri Hilir | 1.351.654,24 | 616,67 | 15,01% | 0,01% | 1.352.270,91 | 15,02% |
| Indragiri Hulu | 786.097,29 | 1.109,91 | 8,73% | 0,01% | 787.207,20 | 8,74% |
| Kampar | 1.026.564,39 | 6.139,67 | 11,40% | 0,07% | 1.032.704,06 | 11,47% |
| Kepulauan Meranti | 360.174,16 | 2.180,39 | 4,00% | 0,02% | 362.354,55 | 4,03% |
| Kuantan Singingi | 543.909,44 | 1.876,86 | 6,04% | 0,02% | 545.786,30 | 6,06% |
| Pelalawan | 1.332.660,10 | 1.971,03 | 14,80% | 0,02% | 1.334.631,13 | 14,83% |
| Rokan Hilir | 905.060,76 | 1.801,87 | 10,05% | 0,02% | 906.862,63 | 10,07% |
| Rokan Hulu | 767.538,25 | 852,89 | 8,53% | 0,01% | 768.391,13 | 8,54% |
| Siak | 778.517,93 | 2.086,63 | 8,65% | 0,02% | 780.604,56 | 8,67% |
| Kota Dumai | 200.504,52 | 5.673,46 | 2,23% | 0,06% | 206.177,99 | 2,29% |
| Kota Pekanbaru | 28.164,01 | 35.669,09 | 0,31% | 0,40% | 63.833,09 | 0,71% |
| Grand Total | 8.938.753,10 | 63.326,16 | 99,30% | 0,70% | 9.002.079,25 | 100,00% |

Sumber: Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Riau Ekoregion Sumatera KLHK Tahun 2019

**Gambar 2.8 Peta Status DDDTLH Penyedia Pangan Provinsi Riau**

Sumber: Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Riau Ekoregion Sumatera KLHK Tahun 2019

Berdasarkan kondisi di atas, kondisi di mana produksi pangan atau praktik pertanian yang sedang berlangsung masih berada di bawah batas kapasitas yang dapat ditopang oleh lingkungan atau sistem pertanian, tanpa mengganggu keseimbangan ekologis atau menimbulkan dampak negatif yang signifikan dan ini menunjukkan masih luas lahan yang berpotensi dapat mendukung penyediaan pangan bagi penduduk Provinsi Riau. Namun, ada kecenderungan luasan penyediaan pangan ini telah menuju kondisi telah terlampaui sehingga upaya pengelolaan yang berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga agar daya dukung dan daya tampung penyediaan pangan tersebut tetap dalam kondisi yang baik di masa depan.

b) Daya Dukung Air

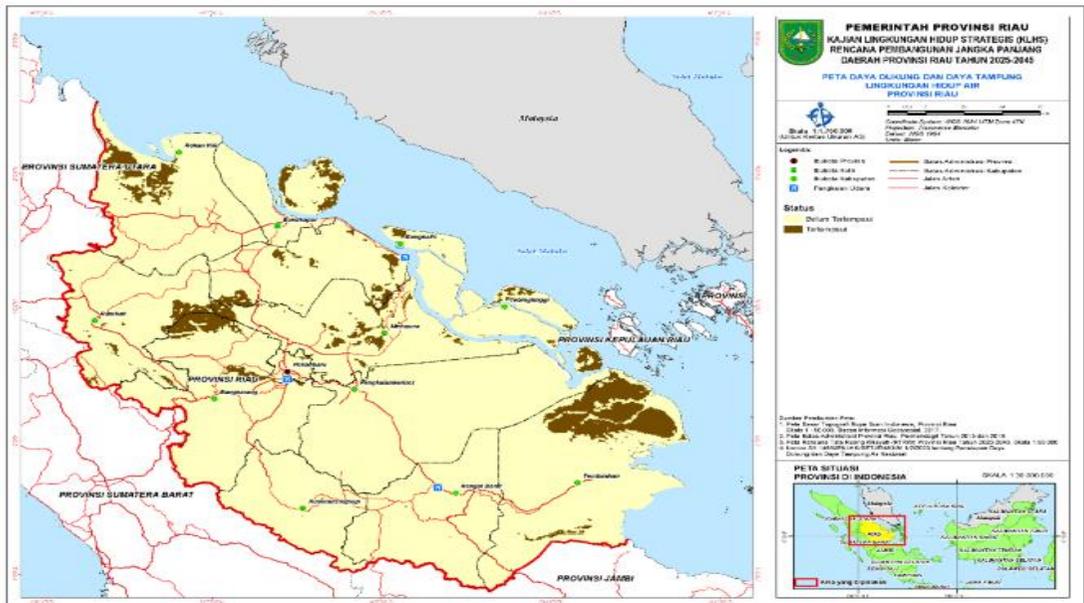
Daya dukung air merupakan kemampuan sumber daya air untuk memenuhi suatu kebutuhan dengan meninjau besarnya ketersediaan air. Daya dukung air dihitung berdasarkan perhitungan kebutuhan air dan ketersediaan air. Kedua variabel tersebut dibandingkan sehingga dapat diketahui air yang tersedia dapat mencukupi untuk berbagai kebutuhan. Kajian daya dukung air dilakukan guna mengetahui potensi kebutuhan dan ketersediaan air.

Status daya dukung dan daya tampung penyedia air berdasarkan lampiran peta nomor SK 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional secara umum dalam kondisi belum terlampaui di lahan seluas 9.608.204,30 ha atau 93,61%. Artinya, ketersediaan air sebagai bahan baku untuk mencukupi kebutuhan air bersih bagi manusia masih sangat besar, tergantung cara dan metode pemanfaatannya. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah luasan sekitar 6,39% yang merupakan Kawasan dengan DDDTLH Penyedia Air yang telah terlampaui. Rincian status DDDTLH per kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.14 Status DDDTLH Penyedia Air Provinsi Riau

| Kabupaten/ Kota | Luas (Ha) | | Persentase (%) | | Total Luas (Ha) | Total Persentase (%) |
|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------------|
| | Belum Terlampai | Terlampai | Belum Terlampai | Terlampai | | |
| Bengkalis | 757.666,77 | 103.588,93 | 7,38% | 1,01% | 861.255,70 | 8,39% |
| Indragiri Hilir | 1.095.234,92 | 257.035,99 | 10,67% | 2,50% | 1.352.270,91 | 13,17% |
| Indragiri Hulu | 786.950,77 | 256,43 | 7,67% | 0,00% | 787.207,20 | 7,67% |
| Kampar | 967.108,28 | 65.595,78 | 9,42% | 0,64% | 1.032.704,06 | 10,06% |
| Kepulauan Meranti | 348.438,28 | 13.916,27 | 3,39% | 0,14% | 362.354,55 | 3,53% |
| Kuantan Singingi | 544.931,53 | 854,77 | 5,31% | 0,01% | 545.786,30 | 5,32% |
| Pelalawan | 1.311.982,96 | 22.648,19 | 12,78% | 0,22% | 1.334.631,14 | 13,00% |
| Rokan Hilir | 824.374,29 | 82.488,34 | 8,03% | 0,80% | 906.862,63 | 8,84% |
| Rokan Hulu | 727.769,61 | 40.621,53 | 7,09% | 0,40% | 768.391,13 | 7,49% |
| Siak | 714.524,19 | 66.080,37 | 6,96% | 0,64% | 780.604,56 | 7,60% |
| Kota Dumai | 206.177,96 | 0,03 | 2,01% | 0,00% | 206.177,99 | 2,01% |
| Kota Pekanbaru | 60.760,05 | 3.073,04 | 0,59% | 0,03% | 63.833,09 | 0,62% |
| Perairan Pesisir | 1.262.284,68 | 18,99 | 12,30% | 0,00% | 1.262.303,67 | 12,30% |
| Grand Total | 9.608.204,30 | 656.178,64 | 93,61% | 6,39% | 10.264.382,94 | 100,00% |

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Sk.146/Menlhk/Setjbn/Kum.1/2/2023 Tentang, Penetapan Daya Dukung Dan Daya Tampung Air

**Gambar 2.9 Peta Status DDDTLH Penyedia Air Provinsi Riau**

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Sk.146/Menlhk/Setjbn/Kum.1/2/2023 Tentang, Penetapan Daya Dukung Dan Daya Tampung Air

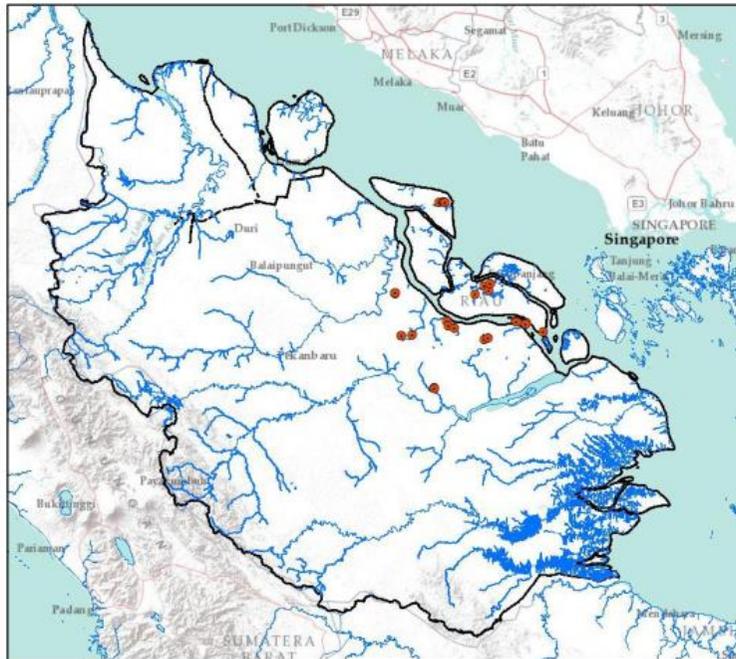
c) Kualitas Air

Analisis DPSIR mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan kualitas air (*driving forces*) dan tekanan yang dihasilkan (*pressure*) oleh aktivitas manusia pada lingkungan air. DPSIR memungkinkan pemantauan yang terorganisir dan sistematis terhadap kualitas air (*state*), sehingga dapat melacak perubahan dan mengidentifikasi tren jangka panjang dalam kualitas air. Analisis DPSIR akan memberikan pemahaman dampak (*impact*) yang ditimbulkan akibat perubahan kualitas air. Identifikasi dampak tersebut merupakan hal penting dalam mengambil tindakan pencegahan atau mitigasi (*response*) untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif tersebut.

Pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Riau berdampak pada peningkatan permintaan akan air minum dan fasilitas sanitasi. Mayoritas sumber air minum berasal dari air minum kemasan (53,41%), diikuti oleh air sumur (27,62%), dan air hujan (15,88%). Meskipun air minum dalam kemasan mendominasi, sekitar 27,6% masih mengandalkan air tanah (sumur), dan sekitar 0,30% menggunakan air sungai. Data menunjukkan bahwa volume limbah cair industri dan domestik di Provinsi Riau meningkat dari 4.105.770 liter pada 2010 menjadi 6.473.510 liter pada 2019. Pertumbuhan ini dipicu oleh aktivitas domestik dan industri yang terus berkembang, berkontribusi pada isu kualitas air di wilayah tersebut.

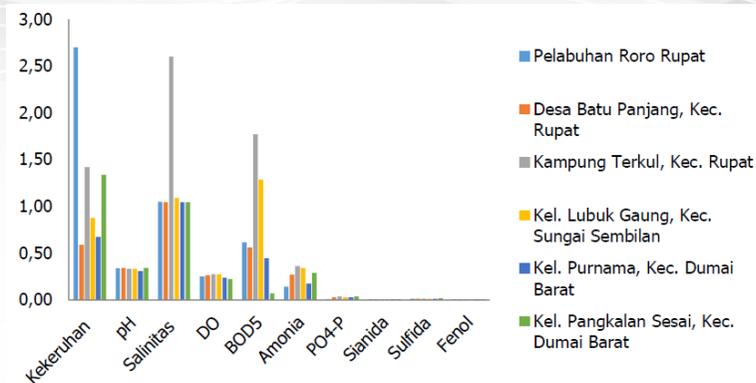
Alih fungsi lahan menjadi faktor utama yang memengaruhi isu kualitas air. Proses ini, dimulai dari pembersihan lahan, membuat tanah lebih rentan terhadap erosi oleh hujan dan aliran permukaan. Dampaknya termasuk peningkatan endapan tanah dan sedimen yang dibawa oleh aliran air ke sungai dan danau, menyebabkan kerusakan pada ekosistem air dan pengaruh negatif pada kualitas air. Perubahan lahan menjadi wilayah industri atau perkotaan juga dapat meningkatkan produksi limbah domestik, industri, dan komersial, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat mencemari sumber air dan menyebabkan penurunan kualitas air. Penggunaan bahan kimia yang tinggi dalam perkebunan juga menjadi ancaman serius terhadap kualitas air dan ekosistem akuatik. Semua ini menunjukkan perlunya upaya serius dalam pengelolaan sumber daya alam dan

limbah untuk menjaga kualitas air di Provinsi Riau. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau secara rutin memantau kualitas air di wilayahnya sebagai respons terhadap perubahan ini. Pemantauan ini dilakukan di berbagai titik sumber air, termasuk sungai dan air tanah. Jumlah titik pemantauan kualitas air selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan, menunjukkan kesadaran akan pentingnya memantau dan menjaga kualitas air di Provinsi Riau.



Gambar 2.10 Lokasi Titik Pantau Kualitas Air Di Provinsi Riau

Kualitas air laut di Selat Rupa, khususnya di wilayah Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis, tergolong dalam kategori tercemar berat. Hal ini disebabkan oleh beberapa parameter yang melebihi baku mutu, meskipun kondisi tersebut terjadi secara alami dan bukan akibat pencemaran. Meskipun demikian, indeks kualitas air laut Selat Rupa menunjukkan status yang Baik, dengan rata-rata nilai indeks mencapai 81,63 untuk Kota Dumai dan 85,60 untuk Kabupaten Bengkalis.



Gambar 2.11 Pemantauan Kualitas Air Laut Provinsi Riau

Sumber: Analisis Isu Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Riau (diakses melalui http://dislkh.riau.go.id/informasi_publik.php)

Sementara itu, untuk kualitas air danau, hasil analisis menggunakan metode Storet menunjukkan rentang nilai antara -25 hingga -44 untuk semua titik pantau. Data ini mengindikasikan bahwa kondisi mutu air danau, seperti Danau Meduyan, Danau Pulau Besar, dan Danau Naga Sakti, tergolong dalam kategori cemar ringan hingga cemar berat untuk peruntukan air kelas 2. Beberapa parameter yang signifikan dalam menyebabkan kondisi tersebut meliputi TSS, pH, DO, BOD, COD, Klorin Bebas, TP, Zn, dan Pb. Adanya kandungan bahan organik yang signifikan secara alami dalam air juga menyebabkan nilai BOD, COD, DO, dan pH melampaui baku mutu yang ditetapkan. Dalam konteks ini, perlu perhatian khusus terhadap pengelolaan dan pemantauan kualitas air untuk menjaga kesehatan ekosistem danau.

Tabel 2.15 Kualitas Air Danau di Provinsi Riau

| No. | Lokasi | Peruntukan Kelas | Skor | Status Mutu Air | |
|-----|---------------------------|------------------|------|-----------------|--------------|
| 1 | Inlet Danau Meduyan | 2 | -28 | Sedang | Cemar Ringan |
| 2 | Tengah Danau Meduyan | 2 | -26 | Sedang | Cemar Ringan |
| 3 | Outlet Danau Meduyan | 2 | -25 | Sedang | Cemar Ringan |
| 4 | Inlet Danau Besar Zamrud | 2 | -40 | Buruk | Cemar Berat |
| 5 | Tengah Danau Besar Zamrud | 2 | -38 | Buruk | Cemar Berat |
| 6 | Outlet Danau Besar Zamrud | 2 | -44 | Buruk | Cemar Berat |
| 7 | Inlet Danau Nagasakti | 2 | -26 | Sedang | Cemar Ringan |
| 8 | Tengah Danau Nagasakti | 2 | -32 | Buruk | Cemar Berat |
| 9 | Outlet Danau Nagasakti | 2 | -30 | Sedang | Cemar Ringan |

Sumber: Analisis Isu Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Riau (diakses melalui http://dislkh.riau.go.id/informasi_publik.php)

Dampak yang terjadi akibat permasalahan kualitas air meliputi penurunan ketersediaan air bersih yang sangat signifikan, terlihat dari perbandingan data kebutuhan air bersih dan jumlah air yang tersalurkan pada tahun 2019-2020. Selain itu, dampak lainnya adalah peningkatan risiko penyakit yang disebabkan oleh kontaminasi air pada manusia melalui berbagai aktivitas seperti minum, mandi, mencuci, proses persiapan makanan, atau mengonsumsi makanan yang terkontaminasi selama proses persiapan.

Data tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat penderita diare mencapai 5,5% dari semua kelompok usia, dan tingkat kejadian diare pada balita sangat tinggi, melebihi sasaran yang ditetapkan. Profil Kesehatan Provinsi Riau tahun 2021 juga mengungkapkan bahwa diare merupakan penyebab kematian bayi post neonatal (usia 29 hari hingga 11 bulan) yang cukup berbahaya, dengan tingkat kematian akibat diare mencapai 13,8%. Selain itu, pada anak balita usia 1-4 tahun, diare juga menjadi penyebab kematian sebesar 11%. Selain penyakit diare, hepatitis juga merupakan penyakit yang berpotensi disebabkan oleh kualitas air yang buruk. Dengan demikian, isu kualitas air menjadi perhatian serius yang mempengaruhi kesehatan masyarakat di Provinsi Riau.

d) Daya Tampung Sampah

Sampah rumah tangga dan sejenisnya merupakan masalah yang sangat penting untuk dikelola agar kesehatan masyarakat dapat dijaga dengan baik. Volume sampah akan selalu meningkat setiap tahun karena adanya penambahan

jumlah penduduk. Oleh karena itu daya tampung sampah perlu diperhatikan berdasarkan perkiraan volume timbulan sampah tersebut setiap tahunnya. Pertambahan jumlah penduduk memberikan tekanan terhadap lingkungan dari jumlah timbulan sampah yang dihasilkan setiap harinya. Sampah tersebut berasal dari sampah permukiman atau sampah rumah tangga dan sampah dari non-permukiman yang sejenis sampah rumah tangga, seperti dari pasar dan perkantoran. Sampah dari kedua jenis sumber tersebut dikenal sebagai sampah domestik.

Tabel 2.16 Timbulan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019-2022

| Tahun | Provinsi | Kabupaten/Kota | Timbulan Sampah Harian (ton) | Timbulan Sampah Tahunan (ton) |
|-------|----------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 2019 | Riau | Kampar | 344,98 | 125.917,12 |
| 2019 | Riau | Pelalawan | 148,14 | 54.072,27 |
| 2019 | Riau | Rokan Hilir | 500,79 | 182.786,74 |
| 2019 | Riau | Siak | 186,17 | 67.950,44 |
| 2019 | Riau | Kota Pekanbaru | 1.036,51 | 378.324,91 |
| 2020 | Riau | Kampar | 351,88 | 128.435,47 |
| 2020 | Riau | Indragiri Hilir | 299,93 | 109.472,70 |
| 2020 | Riau | Pelalawan | 151,12 | 55.158,80 |
| 2020 | Riau | Siak | 191,07 | 69.739,82 |
| 2020 | Riau | Kuantan Singingi | 133,66 | 48.784,73 |
| 2020 | Riau | Kota Pekanbaru | 1.097,15 | 400.461,54 |
| 2020 | Riau | Kota Dumai | 159,91 | 58.368,43 |
| 2021 | Riau | Indragiri Hilir | 460,62 | 168.125,39 |
| 2021 | Riau | Siak | 191,07 | 69.739,82 |
| 2021 | Riau | Kota Pekanbaru | 967,49 | 353.133,89 |
| 2021 | Riau | Kota Dumai | 161,73 | 59.029,99 |
| 2022 | Riau | Indragiri Hulu | 181,30 | 66.173,19 |
| 2022 | Riau | Bengkalis | 261,88 | 95.585,50 |
| 2022 | Riau | Rokan Hulu | 363,33 | 132.613,76 |
| 2022 | Riau | Siak | 186,67 | 68.135,72 |
| 2022 | Riau | Kuantan Singingi | 139,18 | 50.800,55 |
| 2022 | Riau | Kota Pekanbaru | 976,72 | 356.503,31 |
| 2022 | Riau | Kota Dumai | 165,92 | 60.559,34 |

Sumber: SISPN (<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn>, diakses 5 September 2023)

Tabel 2.17 Komposisi Sampah Berdasarkan Sumbernya di Provinsi Riau Tahun 2019-2022

| Tahun | Kabupaten/ Kota | Rumah Tangga (ton) | Perkantoran (ton) | Pasar (ton) | Perniagaan (ton) | Fasilitas Publik (ton) | Kawasan (ton) | Lainnya (ton) |
|-------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| 2019 | Rokan Hilir | 195,00 | 3,55 | 89,00 | 101,60 | 4,80 | 20,00 | 82,50 |
| 2019 | Siak | 17,40 | 4,50 | 7,00 | 2,00 | 4,30 | 2,80 | 1,00 |
| 2020 | Pelalawan | 91,12 | 6,00 | 30,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2020 | Indragiri Hilir | 299,93 | 0,90 | 4,07 | 2,88 | 6,70 | | |
| 2020 | Siak | 17,40 | 4,50 | 7,00 | 2,00 | 4,30 | 2,80 | 1,00 |
| 2021 | Indragiri Hilir | 20,00 | 0,10 | 14,70 | 0,10 | 0,10 | | |
| 2021 | Siak | 17,40 | 4,50 | 7,00 | 2,00 | 4,30 | 2,80 | 1,00 |
| 2022 | Bengkalis | 168,01 | 24,05 | 15,41 | 6,87 | 32,01 | 17,42 | 11,21 |
| 2022 | Siak | 17,40 | 4,50 | 7,00 | 2,00 | 4,30 | 2,80 | 1,00 |
| 2022 | Indragiri Hulu | 5,00 | 1,00 | 9,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |

Sumber: SISPAN (<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn>, diakses 5 September 2023)

Tabel 2.18 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenisnya di Provinsi Riau Tahun 2019-2022

| Tahun | Kabupaten/ Kota | Sisa Makanan (%) | Kayu- Ranting (%) | Kertas- Karton (%) | Plastik (%) | Logam (%) | Kain (%) | Karet- Kulit (%) | Kaca (%) | Lainnya (%) |
|-------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|
| 2019 | Kampar | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 35,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 2019 | Siak | 39,00 | 15,00 | 10,00 | 26,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 |
| 2019 | Rokan Hilir | 8,00 | 33,00 | 19,00 | 24,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 |
| 2020 | Indragiri Hilir | | | 36,00 | 33,00 | 12,00 | | | | |
| 2020 | Kampar | 20,00 | 10,00 | 5,00 | 35,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2020 | Siak | 39,00 | 15,00 | 10,00 | 26,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 |
| 2020 | Pelalawan | 10,00 | 18,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 |
| 2021 | Kota Pekanbaru | 59,00 | 3,00 | 12,00 | 10,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11,00 |
| 2021 | Siak | 39,00 | 15,00 | 10,00 | 26,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 |
| 2021 | Indragiri Hilir | 65,00 | 2,00 | 2,00 | 30,00 | | 1,00 | | | |
| 2021 | Kota Dumai | 45,75 | 7,25 | 5,67 | 8,45 | 2,75 | 3,75 | 4,15 | 3,65 | 18,58 |
| 2022 | Bengkalis | 72,90 | 3,62 | 2,89 | 5,02 | 0,52 | 0,96 | 0,91 | 1,98 | 10,66 |
| 2022 | Kota Pekanbaru | 59,00 | 3,00 | 12,00 | 10,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11,00 |
| 2022 | Indragiri Hulu | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 |
| 2022 | Siak | 39,00 | 15,00 | 10,00 | 26,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 |
| 2022 | Rokan Hulu | 30,50 | 6,00 | 8,80 | 20,20 | 0,70 | 3,90 | 1,20 | 1,30 | 27,40 |
| 2022 | Kota Dumai | 48,97 | 7,50 | 5,30 | 8,95 | 2,27 | 3,72 | 2,50 | 2,79 | 18,00 |

Sumber: SISPAN (<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn>, diakses 5 September 2023)

Pada tahun 2022, jumlah sampah yang Masuk Landfill pada Rokan Hulu, Siak, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Bengkalis, Kota Pekanbaru, Kota Dumai adalah 570.668,99 ton/tahun; organik Terolah sebesar 492.366,33 ton/tahun, Anorganik Terolah sebesar 3.308,62 ton/tahun, dan Recovery Pemulung sebesar 6.553,88 ton/tahun. Selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 2.19 Jumlah Sampah yang Masuk Landfill, Organik Terolah, Anorganik Terolah, dan Recovery Pemulung Tahun 2022

| Kabupaten/Kota | Sampah masuk Landfill (ton/thn) | Sampah Organik terolah (ton/thn) | Sampah An-Organik terolah (ton/thn) | Recovery Pemulung (ton/thn) |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Rokan Hulu | 43.281,70 | 43.281,70 | 0,00 | 0,00 |
| Siak | 83.862,40 | 78.511,50 | 1.766,60 | 3.584,30 |
| Kuantan Singingi | 16.060,00 | 16.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indragiri Hulu | 8.030,00 | 7.665,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bengkalis | 135.253,18 | 62.666,42 | 1.542,02 | 2.969,58 |
| Kota Pekanbaru | 243.301,71 | 243.301,71 | 0,00 | 0,00 |
| Kota Dumai | 40.880,00 | 40.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 570.668,99 | 492.366,33 | 3.308,62 | 6.553,88 |

Sumber: SISPN (<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn>, diakses 5 September 2023)

Kapasitas pengelolaan di TPA hanya 842,99 ton/hari. Sampah yang tidak mampu dikelola dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Peningkatan limbah domestik perkotaan akan sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan ketersediaan TPA. Diperkirakan setiap tahun selalu terjadi kenaikan volume timbulan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Jika pertumbuhan penduduk tersebut tidak diiringi dengan penguatan pengelolaan limbah secara baik maka tekanan terhadap penurunan kualitas air akan semakin tinggi. Pertambahan jumlah penduduk memberikan tekanan terhadap lingkungan dari jumlah timbulan sampah yang dihasilkan setiap harinya. Sampah tersebut berasal dari sampah permukiman atau sampah rumah tangga dan sampah dari non-permukiman yang sejenis sampah rumah tangga, seperti dari pasar dan perkantoran. Selain daya tampung sampah yang perlu disesuaikan dengan perkiraan kenaikan volume yang timbul setiap tahunnya, perlu juga dipikirkan teknologi penanggulangan sampah antara lain dengan mengubahnya menjadi pupuk kompos, sumber energi dan lainnya.

2.1.2 Aspek Demografi

Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

2.1.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Riau terus mengalami pertambahan setiap tahunnya. Sensus penduduk 2020 mencatat penduduk Riau sebanyak 6,39 juta jiwa. Berdasarkan hasil sensus penduduk 1971 hingga sensus penduduk 2020, laju pertumbuhan penduduk Riau selalu berada diatas laju pertumbuhan penduduk nasional. Secara nasional jumlah penduduk Riau berkontribusi 2,37% setelah Lampung (3,33%) dan Sumatera Selatan (3,13%) di Sumatera.

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk Riau tahun 2024 berjumlah 6.728.053 orang terdiri dari laki-laki 3.437.170 orang dan perempuan 3.292.920 orang. Perkembangan jumlah penduduk Riau selama periode 2020-2024 mengalami kenaikan sejumlah 351.980 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,35%. Perkembangan dan penyebaran penduduk Provinsi Riau menurut kabupaten/kota dalam kurun waktu tahun 2020-2024 ditunjukkan pada tabel berikut.

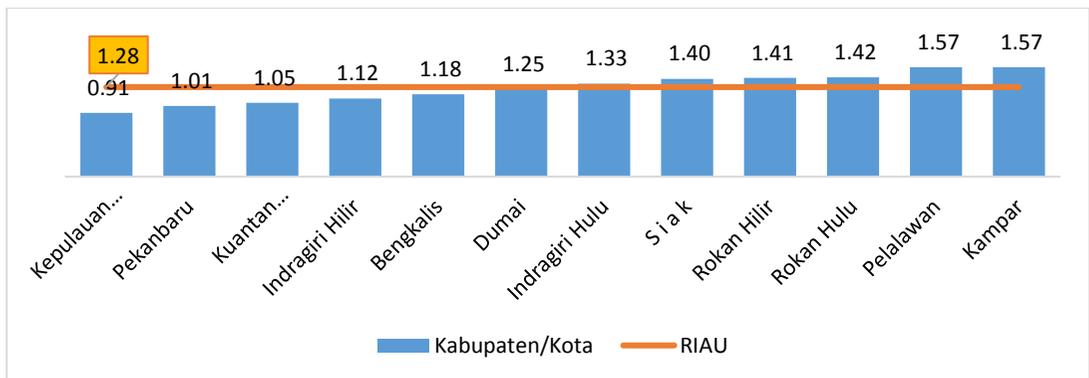
Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020-2024

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/ Kota | Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%) |
|-----------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 14 | RIAU | 6.376.095 | 6.466.763 | 6.555.746 | 6.642.874 | 6.728.053 | 1,35 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 838.149 | 852.633 | 866.942 | 881.028 | 894.848 | 1,65 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 443.146 | 449.596 | 455.958 | 462.220 | 468.366 | 1,39 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 562.280 | 570.155 | 577.700 | 584.916 | 591.800 | 1,29 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 653.207 | 661.449 | 669.482 | 677.290 | 684.860 | 1,19 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 388.681 | 395.404 | 402.040 | 408.543 | 414.943 | 1,65 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 559.614 | 568.268 | 576.766 | 585.183 | 593.486 | 1,48 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 635.433 | 645.005 | 654.522 | 663.956 | 673.323 | 1,46 |
| 14.08 | Kab. Siak | 456.574 | 463.472 | 470.309 | 477.064 | 483.754 | 1,46 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 334.090 | 338.024 | 341.874 | 345.610 | 349.251 | 1,12 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 205.760 | 207.802 | 209.817 | 211.791 | 213.720 | 0,95 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 983.182 | 994.582 | 1.005.658 | 1.016.366 | 1.026.671 | 1,09 |
| 14.12 | Kota Dumai | 315.979 | 320.373 | 324.678 | 328.907 | 333.031 | 1,32 |

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan Tahun/Juni) BPS Provinsi Riau

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau yang mempunyai penduduk terbanyak di Provinsi Riau, sebaliknya Kepulauan Meranti merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit. Pada periode 2020 hingga 2024, rata-rata pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Pelalawan dan Kampar sebesar 1,65% yang disebabkan adanya peningkatan kelahiran bayi. Pada Kepulauan Meranti terjadi penurunan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 0,95% yang merupakan terendah di Provinsi Riau.

Pertumbuhan penduduk pada setiap kabupaten/kota Provinsi Riau tergolong tinggi. Laju pertumbuhan penduduk terbesar didorong oleh faktor migrasi, sedangkan pertambahan dari faktor kelahiran relatif kecil (sekitar 1,5% per tahun). Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,28% lihat gambar berikut.



Gambar 2.12 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2024 (%)

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan Tahun/Juni) BPS Provinsi Riau

Tingginya pertumbuhan penduduk Provinsi Riau, mengindikasikan bahwa kontribusi tertinggi dalam pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau dikarenakan tingginya migrasi dari luar provinsi yang datang dengan berbagai alasan dan tujuan, antara lain migrasi karena pendidikan, bencana alam dan mencari pekerjaan terutama berasal dari provinsi tetangga. Oleh karena itu, upaya pengendalian jumlah penduduk migrasi perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari pertambahan penduduk yang tinggi adalah berupa pertambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, berkembangnya upaya potensi sumberdaya yang ada di daerah, menarik investasi baru, dan berkembangnya suatu wilayah/kawasan sehingga terjadinya pemekaran wilayah. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya penduduk miskin, meningkatnya jumlah pengangguran, terjadinya degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya jika tidak ada upaya program penanganan yang secara sistematis dan terstruktur.

2.1.2.2 Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan atau kriteria tertentu menurut karakteristik-karakteristik yang sama. Pengelompokan tersebut dapat berdasarkan menurut umur dan jenis kelamin, lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Pada tabel dibawah ini merupakan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio di Provinsi Riau Tahun 2024

| No | Kelompok Umur | Jenis Kelamin (Ribun Jiwa) | | Total (Ribun Jiwa) | Persentase (%) | Rasio Laki-laki dan Perempuan |
|----|---------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | | | |
| 1 | 0-4 | 301,64 | 289,06 | 590,70 | 8,78 | 104,35 |
| 2 | 5-9 | 310,40 | 295,96 | 606,36 | 9,01 | 104,88 |
| 3 | 10-14 | 304,78 | 289,64 | 594,42 | 8,83 | 105,23 |
| 4 | 15-19 | 292,96 | 274,54 | 567,50 | 8,43 | 106,71 |
| 5 | 20-24 | 287,37 | 272,73 | 560,10 | 8,32 | 105,37 |
| 6 | 25-29 | 284,53 | 274,51 | 559,04 | 8,31 | 103,65 |
| 7 | 30-34 | 276,06 | 267,60 | 543,66 | 8,08 | 103,16 |
| 8 | 35-39 | 265,89 | 259,93 | 525,82 | 7,82 | 102,29 |
| 9 | 40-44 | 248,61 | 241,91 | 490,52 | 7,29 | 102,77 |
| 10 | 45-49 | 229,96 | 220,78 | 450,74 | 6,70 | 104,16 |
| 11 | 50-54 | 196,42 | 186,89 | 383,31 | 5,70 | 105,10 |
| 12 | 55-59 | 157,62 | 147,78 | 305,40 | 4,54 | 106,66 |
| 13 | 60-64 | 119,84 | 112,24 | 232,08 | 3,45 | 106,77 |
| 14 | 65-69 | 81,09 | 76,34 | 157,43 | 2,34 | 106,22 |
| 15 | 70-74 | 48,70 | 47,00 | 95,70 | 1,42 | 103,62 |
| 16 | 75-79 | 18,48 | 19,11 | 37,59 | 0,56 | 96,70 |
| 17 | 80+ | 12,82 | 14,90 | 27,72 | 0,41 | 86,04 |
| | Total | 3.437,16 | 3.290,90 | 6.728,06 | 100,00 | 104,44 |

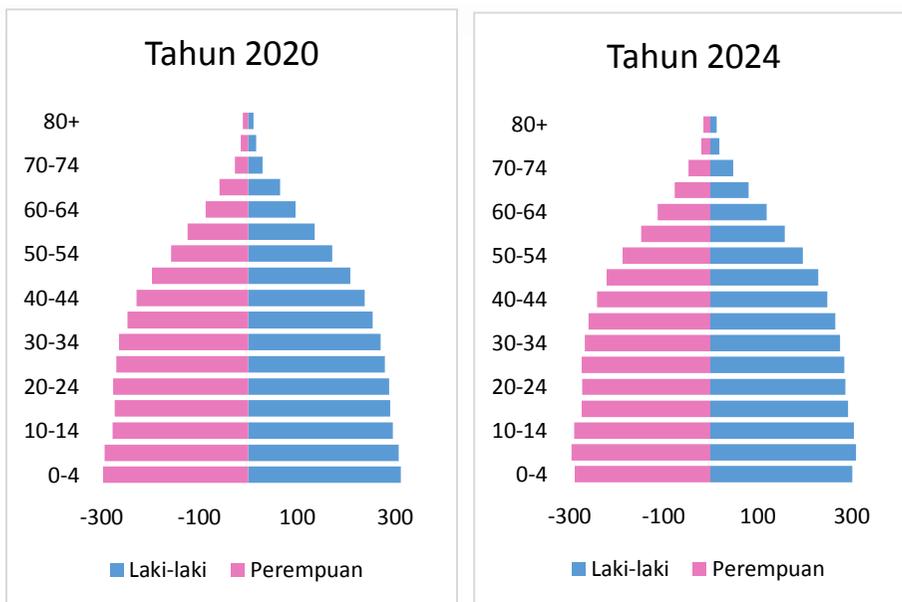
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan Tahun/Juni) BPS Provinsi Riau

Penduduk Provinsi Riau tahun 2024 didominasi kelompok umur 5-9 tahun (9,01%), diikuti kelompok umur 10-14 tahun (8,83%) dan kelompok umur lainnya kurang dari 8,7%. Jika dilihat dari kelompok umur sekolah mulai dari TK hingga sekolah menengah atas atau kisaran umur 5-19 tahun menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu sebanyak 1.768,28 ribu jiwa atau 26,28% dari total penduduk pada tahun 2024. Dengan tingginya usia sekolah maka penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan harus dipersiapkan.

Adapun penduduk usia 15-64 tahun sejumlah 4.683,17 ribu jiwa atau sebesar 68,64% dari total penduduk Riau. Hal ini menggambarkan pentingnya penduduk usia kerja yang nantinya akan meningkatkan produksi dan dengan bekerja akan meningkatkan pendapatan serta dalam rumah tangga akan mengkonsumsi produk lebih banyak. Rumah tangga ini juga akan menabung lebih banyak yang berdampak pada kenaikan investasi, peningkatan modal, dan pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian.

Untuk penduduk yang berumur antara 65 hingga di atas 75 tahun sebanyak 318,44 ribu jiwa atau 4,73% dan penambahan kelompok umur ini menunjukkan terjadinya perbaikan dari aspek kesehatan masyarakat, namun tetap menjadi perhatian karena lebih rentan terhadap penyakit sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.

Penduduk usia 0 hingga 74 tahun didominasi oleh laki-laki dimana rasio antara laki-laki dan perempuan berkisar 102,29 hingga 106,77 yang artinya terdapat 102 hingga 106 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Sedangkan rasio penduduk 75 tahun keatas hanya berkisar 86,04 hingga 96,70 yang artinya penduduk perempuan lanjut usia lebih banyak dibandingkan laki-laki lanjut usia.



Gambar 2.13 Perbandingan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Penduduk Provinsi Riau, 2020 dan 2024

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan Tahun/Juni) BPS Provinsi Riau

Komposisi umur penduduk Provinsi Riau dapat digambarkan dalam piramida penduduk pada gambar diatas. Terdapat perubahan komposisi jumlah penduduk dari tahun 2020 ke tahun 2024. Dimana pada tahun 2020 jumlah penduduk didominasi oleh usia 0-4 tahun sedangkan pada Model piramida penduduk Provinsi Riau mempunyai dasar lebar dan puncak yang mengerucut. Bentuk semacam ini terdapat pada daerah-daerah dengan tingkat kelahiran yang

masih tinggi dan angka kematian sudah mulai menurun walaupun masih tergolong tinggi. Karakteristik yang dimiliki piramida penduduk semacam ini yaitu umur median rendah dan angka beban tanggungan pada usia muda tinggi. Piramida penduduk Provinsi Riau mempunyai ciri di mana jumlah usia produktif, khususnya dewasa memiliki tanggungan besar terhadap jumlah manula dan usia muda yang cukup banyak. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif.

Penduduk Provinsi Riau yang bekerja menurut mata pencarian bertujuan memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja minimal 1 jam secara terus menerus dalam seminggu. Dalam hal ini yakni tahun 2018-2022 menggunakan komposisi penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam 17 kategori lapangan usaha.

Tabel 2.22 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Provinsi Riau Tahun 2019-2023

| No | Lapangan Usaha | Persentase (%) | | | | | Pertumbuhan (± / %) |
|----|--------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 38,08 | 39,17 | 38,59 | 39,96 | 38,20 | 0,13 |
| 2 | Pertambangan dan Pengalihan | 0,99 | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 1,43 | 10,34 |
| 3 | Industri Pengolahan | 7,68 | 7,61 | 8,18 | 7,26 | 7,89 | 1,00 |
| 4 | Pengadaan Listrik Air dan Gas | 0,36 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | -10,71 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah | 0,49 | 0,33 | 0,30 | 0,59 | 0,51 | 10,34 |
| 6 | Konstruksi | 5,02 | 4,78 | 4,93 | 5,21 | 5,97 | 4,66 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran | 17,88 | 17,50 | 18,61 | 17,94 | 17,43 | -0,56 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 3,82 | 3,55 | 3,40 | 2,94 | 3,43 | -2,04 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | 6,70 | 6,20 | 5,92 | 5,67 | 6,91 | 1,42 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 0,61 | 0,71 | 0,51 | 0,59 | 0,84 | 11,57 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,16 | 1,01 | 0,85 | 0,98 | 0,90 | -5,41 |
| 12 | Jasa Persewaan | 0,21 | 0,16 | 0,19 | 0,30 | 0,17 | 2,38 |

| No | Lapangan Usaha | Persentase (%) | | | | | Pertumbuhan (±/ %) |
|----|---------------------------------------|----------------|------|------|------|------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | Bangunan/Real Estate | | | | | | |
| 13 | Jasa Perusahaan | 1,44 | 1,38 | 1,29 | 1,86 | 1,62 | 5,15 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan | 4,75 | 4,34 | 4,43 | 4,10 | 3,90 | -4,72 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 5,93 | 5,78 | 6,22 | 6,05 | 5,52 | -1,60 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,53 | 1,63 | 1,78 | 1,72 | 1,44 | -0,98 |
| 17 | Jasa Lainnya | 3,35 | 4,55 | 3,47 | 3,53 | 3,66 | 4,37 |

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Riau, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Riau Agustus 2023

Sektor pertanian masih mendominasi pada perekonomian Riau hal ini berdampak pada banyaknya penduduk Riau yang berusaha dan bekerja pada sektor pertanian. Penduduk Riau yang bekerja di usia 15 tahun ke atas sebesar 38,2% pada tahun 2023 dimana penduduk yang bekerja masih banyak dengan tingkat pendidikan SMA/SMK/Sederajat dengan status buruh/karyawan/ pegawai. Namun jika dilihat pada rata-rata pertumbuhan per tahun diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja tertinggi ada pada sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 11,57% yang meningkat signifikan pada tahun 2023. Kemudian diikuti sektor Pengadaan Listrik Air dan Gas sebesar 10,34% serta Pertambangan dan Penggalan sebesar 10,34%. Banyaknya tenaga kerja yang terserap di kategori informasi dan komunikasi perlu menjadi perhatian pemerintah daerah Provinsi Riau dalam mengambil kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat Riau.

2.1.2.3 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di kabupaten/kota sangat terkait terhadap pembangunan suatu daerah. Penduduk yang terdistribusi tidak merata dan terpusat di wilayah-wilayah tertentu akan menimbulkan permasalahan kepadatan jika wilayah tersebut relatif kecil menampung peningkatan jumlah penduduk.

Kepadatan penduduk di Provinsi Riau tahun 2024 mencapai 74,65 jiwa per km² meningkat 0,95 jiwa per km² dibandingkan tahun 2023 sebesar 73,70 jiwa per km². Kepadatan penduduk Provinsi Riau termasuk kategori penduduk sangat jarang yang mana dapat berdampak pada ketersediaan pangan, kebutuhan lahan tempat tinggal, ketersediaan air bersih, faktor lingkungan, dan sebagainya.

Tabel 2.23 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (Km ²) | Jumlah (Jiwa) | Share terhadap Provinsi (%) | Kepadatan Penduduk (Jw/Km ²) |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 14 | Riau | 90.128,76 | 6.728.053 | 100,00 | 74,65 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 10.897,22 | 894.848 | 12,09 | 82,12 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 7.978,17 | 468.366 | 8,85 | 58,71 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 8.520,44 | 591.800 | 9,45 | 69,46 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 13.465,89 | 684.860 | 14,94 | 50,86 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 13.020,19 | 414.943 | 14,45 | 31,87 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 7.527,43 | 593.486 | 8,35 | 78,84 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 9.154,72 | 673.323 | 10,16 | 73,55 |
| 14.08 | Kab. Siak | 7.843,97 | 483.754 | 8,7 | 61,67 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 5.272,74 | 349.251 | 5,85 | 66,24 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 3.636,79 | 213.720 | 4,04 | 58,77 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 633,4 | 1.026.671 | 0,7 | 1.620,89 |
| 14.12 | Kota Dumai | 2.177,79 | 333.031 | 2,42 | 152,92 |

Sumber: RTRW Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau, Diolah Kembali

Kepadatan penduduk terbesar di Riau terdapat di Kota Pekanbaru sebanyak 1.620,89 jiwa/km² yang mana jauh diatas kabupaten/kota lainnya. Kecilnya luas wilayah Kota Pekanbaru menjadi penyebab tingginya kepadatan di kota tersebut. Selain itu, banyaknya kesempatan kerja di Kota Pekanbaru berdampak pada meningkatnya arus urbanisasi. Sedangkan kepadatan penduduk paling sedikit berada di Kabupaten Pelalawan yaitu sebanyak 31,87 jiwa/km². Kepadatan penduduk per wilayah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan lahan baik untuk penggunaan perumahan maupun untuk sektor pertanian dan lainnya sehingga akan memicu terjadinya peningkatan harga lahan dan perlunya penyediaan sarana dan prasarana pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kondisi penduduk yang padat juga akan mengakibatkan terjadinya persoalan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan dan antar wilayah.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Aspek Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

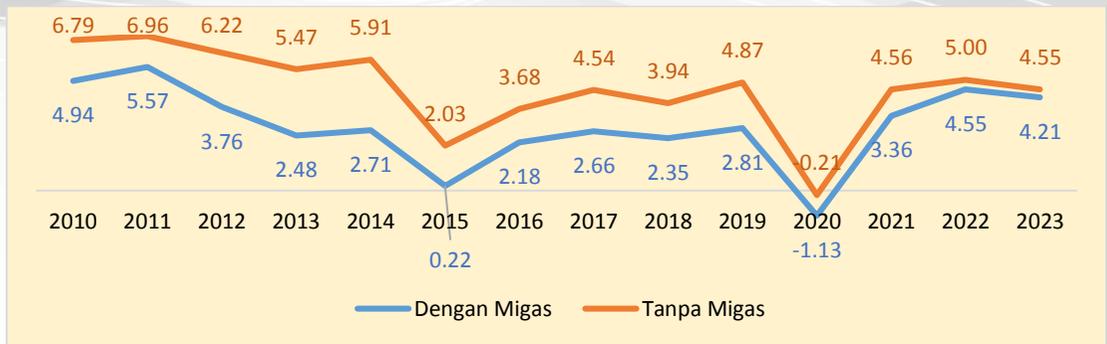
Trend laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Provinsi Riau sangat berfluktuatif dan cenderung menurun dari tahun 2010 hingga 2020. Tahun 2023 ekonomi Indonesia kembali tumbuh sebesar 5,05% dan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,69%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau masih dibawah pertumbuhan nasional, namun perekonomian Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,00% terhadap perekonomian nasional sehingga Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia atau terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa.



Gambar 2.14 Trend Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Riau Tahun 2010-2023 (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar dibawah ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan migas tahun 2023 tumbuh positif namun melambat dibanding tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau ini meningkat pada semua lapangan usaha namun peningkatan hanya terjadi di sebagian komponen pengeluaran.

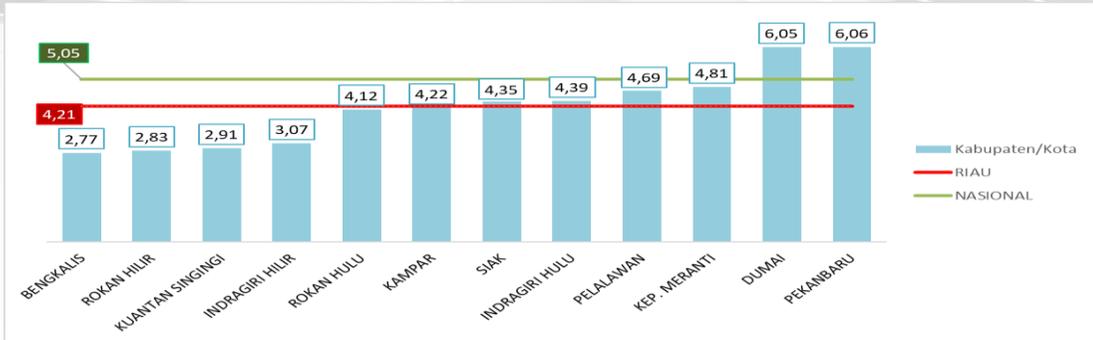


Gambar 2.15 Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas dan Tanpa Migas di Provinsi Riau Tahun 2010-2023 (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Apabila melihat kondisi per tahun, terjadi fluktuasi yang cukup besar dalam laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, khususnya pada tahun 2020. Hal ini berkaitan dengan fluktuasi produksi barang dan jasa di daerah ini terutama migas yang mengalami penurunan harga hingga 70% dan kondisi tersebut menyebabkan tidak berjalannya investasi pada sektor migas sementara 14 sektor lainnya juga mengalami penurunan akibat pembatasan aktivitas pergerakan manusia akibat Pandemi *Covid-19*. Tetapi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2020 masih ditunjang oleh 8 (delapan) sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2022 peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan tidak terlepas dari upaya penanggulangan pandemi sehingga sektor yang berpengaruh langsung terhadap pergerakan manusia dapat meningkat, selain itu peningkatan nilai pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2022 disebabkan oleh kenaikan harga migas, kenaikan transportasi dan pergudangan serta peningkatan listrik dan gas juga mempengaruhi kenaikan pertumbuhan ekonomi Riau. Meningkatnya investasi Riau dan juga besarnya konsumsi rumah tangga berpengaruh signifikan pada pertumbuhan Riau.

Sementara itu jika ditinjau pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/kota tahun 2023 tergolong positif dibanding tahun sebelumnya dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Pekanbaru sebesar 6,06% dan terendah Kabupaten Bengkalis sebesar 2,77%. Pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, sedangkan di Kabupaten Bengkalis sektor pertambangan dan penggalian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

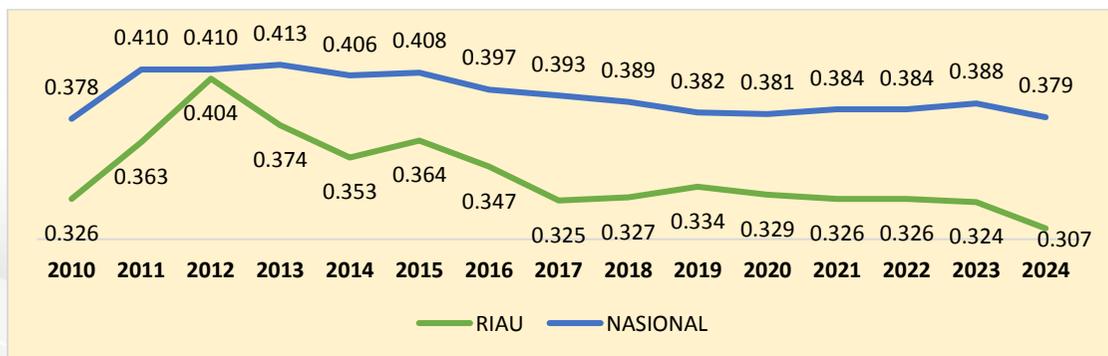


Gambar 2.16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023 (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

2.2.1.2 Indeks Gini

Di negara-negara berkembang, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi akan bias bila hanya dilihat dari besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk, tetapi perlu juga dilihat dari pemerataan pendapatan, Distribusi pendapatan dapat diukur menggunakan indeks gini yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Lebih lanjut Todaro (2000) menyatakan bahwa untuk negara-negara sedang berkembang, distribusi pendapatan *sangat tidak merata* jika angka indeks gini terletak antara 0,5 sampai dengan 0,7. Distribusi pendapatan dengan *ketidakmerataan sedang* jika angka indeks gini terletak antara 0,36 sampai dengan 0,49. Distribusi pendapatan *relatif merata* jika angka indeks gini antara 0,20 sampai 0,35.



Gambar 2.17 Gini Rasio Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2010-2024

Sumber: BPS Provinsi Riau

Gini rasio Provinsi Riau lebih kecil dibandingkan nasional dan terjadi penurunan yang signifikan selama periode 2010 hingga 2024. Gini rasio Provinsi Riau berkisar antara 0,326-0,307, hal ini memberi arti bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Riau berada pada kategori pendapatan relatif merata. Klasifikasi kategori menjadi merata perlu menjadi catatan perbaikan pendapatan di Provinsi Riau dan menjadi perhatian dalam pembangunan Provinsi Riau ke depan agar dapat dipertahankan. Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut dapat memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan kedepan yang mengarah pada pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat bawah baik yang berada di perkotaan maupun dipedesaan harus menjadi prioritas sehingga pendapatan masyarakat bawah dapat meningkat dan mampu mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara kelompok masyarakat tersebut.

Pencapaian indeks gini Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 0,307 sudah termasuk kategori relatif merata dengan penurunan pertumbuhan -0,017 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbaikan kondisi pemerataan pendapatan di Provinsi Riau tidak terlepas dari besaran anggaran pemerintah pusat dalam pembangunan di pedesaan dan pola pembangunan (self services development). Dibandingkan dengan Indeks Gini Nasional, Provinsi Riau memiliki angka yang lebih rendah, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan secara nasional lebih tinggi dibanding Provinsi Riau.

Berikutnya jika dilihat dari pencapaian indeks gini kabupaten/kota se-Provinsi Riau tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, keseluruhan kabupaten/kota mengalami trend fluktuatif menurun sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini yang menunjukkan bahwa angka indeks gini ini menyatakan distribusi pendapatan di kabupaten/kota se-Provinsi Riau berada pada kategori pendapatan relatif merata. Gini rasio di tingkat di kota cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten. Ini dapat dilihat trend gini rasio Kota Pekanbaru dan Kota Dumai yang memiliki ketimpangan lebih tinggi dari kabupaten lainnya di Provinsi Riau.

Tabel 2.24 Indeks Gini Rasio Kabupaten-Kota di Provinsi Riau Tahun 2018-2023

| Kode | Kabupaten/ Kota | Tahun | | | | | |
|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 0,293 | 0,3 | 0,306 | 0,281 | 0,311 | 0,302 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 0,315 | 0,295 | 0,276 | 0,305 | 0,268 | 0,282 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 0,272 | 0,288 | 0,28 | 0,273 | 0,265 | 0,296 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 0,311 | 0,303 | 0,31 | 0,297 | 0,296 | 0,279 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 0,283 | 0,28 | 0,325 | 0,294 | 0,282 | 0,267 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 0,298 | 0,306 | 0,314 | 0,296 | 0,268 | 0,259 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 0,323 | 0,306 | 0,281 | 0,257 | 0,285 | 0,316 |
| 14.08 | Kab. Siak | 0,3 | 0,298 | 0,279 | 0,295 | 0,29 | 0,325 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 0,321 | 0,317 | 0,291 | 0,264 | 0,281 | 0,264 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 0,245 | 0,302 | 0,271 | 0,278 | 0,266 | 0,282 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 0,351 | 0,363 | 0,345 | 0,391 | 0,397 | 0,392 |
| 14.12 | Kota Dumai | 0,339 | 0,361 | 0,36 | 0,345 | 0,324 | 0,307 |

Sumber: BPS Provinsi Riau

Ket. Rendah Tinggi

2.2.1.3 Angka Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya dan berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan. Koordinasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga diperlukan untuk mendukung sinergi dan harmonisasi kebijakan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan yang dicapai Provinsi Riau dalam penanggulangan kemiskinan yang selaras dengan capaian SDG's, dimana terjadi penurunan yang cukup signifikan. Meski pemerintah Provinsi Riau telah berhasil menurunkan kemiskinan dalam satu dekade terakhir, namun perlu diperhatikan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga memperhatikan indikator kemiskinan lainnya. Perkembangan indikator kemiskinan Provinsi Riau tahun 2018-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini.

Tabel 2.25 Perkembangan Indikator Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2018-2024

| No | Tahun | Kondisi Kemiskinan | | | | |
|----|-------|------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | Penduduk Miskin (Jiwa) | Tingkat Kemiskinan (%) | Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) | Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) | Indek Keparahan Kemiskinan (P2) |
| 1 | 2018 | 500.440 | 7,39 | 479.944 | 1,20 | 0,30 |
| 2 | 2019 | 490.720 | 7,08 | 500.612 | 1,13 | 0,27 |
| 3 | 2020 | 483.390 | 6,82 | 544.057 | 1,14 | 0,28 |
| 4 | 2021 | 500.810 | 7,12 | 565.937 | 1,06 | 0,24 |
| 5 | 2022 | 485.030 | 6,78 | 605.912 | 1,10 | 0,27 |
| 6 | 2023 | 485.660 | 6,68 | 658.611 | 1,00 | 0,24 |
| 7 | 2024 | 492.250 | 6,67 | 740.222 | 0,97 | 0,21 |

Sumber: BPS Provinsi Riau

Permasalahan kemiskinan tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (poverty gap index-P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (poverty severity index-P2). Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan lebih menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi Riau tahun 2024, yakni sebesar 0,97 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan cenderung mendekati garis kemiskinan. Untuk indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index-P2) juga mengalami penurunan yaitu sebesar 0,24 pada tahun 2023 menjadi 0,21 pada tahun 2023.

Persoalan penanggulangan kemiskinan selain harus mampu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan sebaiknya harus bisa juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta ketimpangannya antara kota dan pedesaan. Sejalan dengan perkembangan capaian penurunan indikator kemiskinan Provinsi Riau sangat dipengaruhi oleh capaian penurunan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Riau. Berikut disajikan data indikator kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Riau tahun 2022-2023.

Tabel 2.26 Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2022-2023

| Kode | Provinsi/ Kabupaten / Kota | Indikator Kemiskinan | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|
| | | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) | | Persentase Penduduk Miskin (%) | | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | | Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan) | |
| | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 14 | RIAU | 485,03 | 485,66 | 6,78 | 6,68 | 1,10 | 1,00 | 0,27 | 0,24 | 605.912 | 658.611 |
| 1406 | Kampar | 63,55 | 63,84 | 7,12 | 7,04 | 1,1 | 0,72 | 0,29 | 0,14 | 502.670 | 547.696 |
| 1402 | Indragiri Hulu | 27,46 | 27,4 | 6,14 | 6,06 | 1,01 | 1,14 | 0,29 | 0,33 | 584.910 | 626.671 |
| 1408 | Bengkalis | 36,03 | 36,1 | 6,32 | 6,31 | 0,81 | 1,03 | 0,15 | 0,23 | 648.933 | 713.826 |
| 1403 | Indragiri Hilir | 43,22 | 40,86 | 5,98 | 5,64 | 0,73 | 0,68 | 0,13 | 0,13 | 568.879 | 597.122 |
| 1404 | Pelalawan | 47,84 | 45,3 | 8,97 | 8,15 | 1,23 | 1,05 | 0,28 | 0,28 | 655.641 | 689.786 |
| 1407 | Rokan Hulu | 73,81 | 74,38 | 9,95 | 9,72 | 1,51 | 1,54 | 0,34 | 0,38 | 585.225 | 647.599 |
| 1409 | Rokan Hilir | 49,59 | 53,04 | 6,73 | 7,07 | 1,34 | 1,22 | 0,36 | 0,29 | 465.614 | 511.610 |
| 1405 | Siak | 25,71 | 26,99 | 5,07 | 5,23 | 0,77 | 0,66 | 0,18 | 0,14 | 518.768 | 558.867 |
| 1401 | Kuantan Singingi | 26,61 | 26,1 | 8,24 | 8,07 | 1,18 | 1,17 | 0,26 | 0,25 | 638.678 | 693.493 |
| 1410 | Kep. Meranti | 45,25 | 43,82 | 23,84 | 22,98 | 3,54 | 3,86 | 0,87 | 1,06 | 568.639 | 623.576 |
| 1471 | Pekanbaru | 35,96 | 37,67 | 3,06 | 3,16 | 0,33 | 0,38 | 0,07 | 0,09 | 655.389 | 712.000 |
| 1473 | Dumai | 10 | 10,15 | 3,2 | 3,21 | 0,36 | 0,36 | 0,06 | 0,06 | 543.182 | 601.348 |

Sumber: Berita Resmi Statistik, Riau Dalam Angka 2024 – BPS Provinsi Riau

Bila dianalisis lebih mendalam dengan membandingkan antara kabupaten/kota di Provinsi Riau menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin, persentase tingkat kemiskinan, angka indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan dan garis kemiskinan di Provinsi Riau berbeda cukup signifikan antar wilayah pada tahun 2023, Secara umum jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di desa jauh lebih tinggi dibandingkan di kota, yang memberi arti bahwa kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan jauh lebih besar dibanding perkotaan, Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan masih perlu terus dilakukan dengan memperkuat wilayah pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan khususnya pedesaan wilayah pesisir.

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan

sendiri merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan juga kebutuhan pokok bukan makanan.

Nilai garis kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2023 sebesar Rp 658.611 per kapita/bulan. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa garis kemiskinan tertinggi terdapat di Bengkalis sebesar Rp713.826 per kapita/bulan dan terendah terdapat di Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp511.610 per kapita/bulan. Terdapat empat kabupaten dengan angka garis kemiskinan diatas Provinsi Riau yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Bengkalis, Pekanbaru, dan Pelalawan. Sementara kabupaten/kota lainnya dibawah rata-rata garis kemiskinan Provinsi Riau. Garis kemiskinan digunakan sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosial ekonomi, seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.

2.2.1.4 Angka Kemiskinan Ekstrem

Angka kemiskinan ekstrem pada tingkat kabupaten/kota yang secara reguler dirilis oleh Badan Pusat Statistik, untuk Maret 2023 diestimasi dan dirilis oleh Satgas Data Penyesaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Tabel 2.27 Angka Kemiskinan Ekstrem Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023

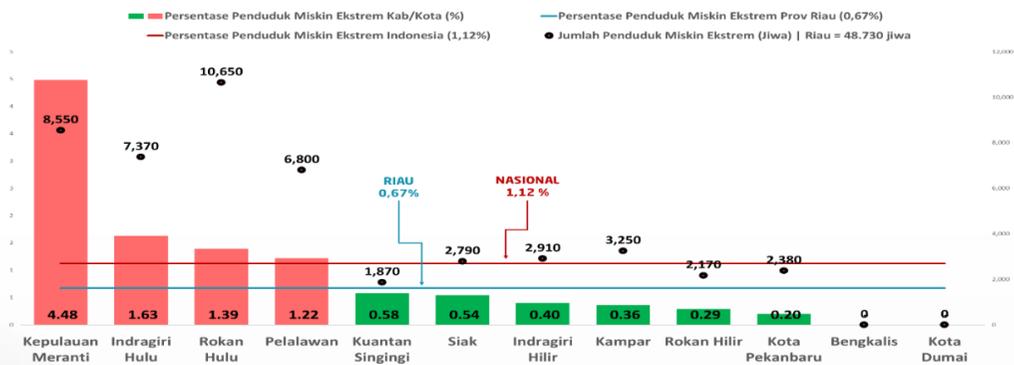
| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (Persen) | | Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Ribu Jiwa) | |
|-----------|-----------------------------|---|-------------|--|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 14 | Provinsi Riau | 1,40 | 0,67 | 100,33 | 48,73 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 1,73 | 0,36 | 15,45 | 3,25 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 2,49 | 1,63 | 11,15 | 7,37 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 0,6 | 0 | 3,4 | 0 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 0,69 | 0,4 | 5,02 | 2,91 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 1,81 | 1,22 | 9,65 | 6,8 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 1,9 | 1,39 | 14,08 | 10,65 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 2,06 | 0,29 | 15,16 | 2,17 |
| 14.08 | Kab. Siak | 1,27 | 0,54 | 6,42 | 2,79 |

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (Persen) | | Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Ribu Jiwa) | |
|-------|-----------------------------|---|------|--|------|
| | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 1,51 | 0,58 | 4,88 | 1,87 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 5,53 | 4,48 | 10,5 | 8,55 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 0,34 | 0,2 | 4,01 | 2,38 |
| 14.12 | Kota Dumai | 0,2 | 0 | 0,62 | 0 |

Sumber: BPS, Satgas Data P3KE di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2024

Keterangan warna: Diatas capaian provinsi

Posisi relatif capaian angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau yakni terdapat empat kabupaten dengan capaian persentase kemiskinan ekstrem di atas capaian Provinsi dan Nasional yakni Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Rokan Hulu dan Pelalawan. Delapan kabupaten/kota memiliki capaian angka kemiskinan ekstrem di bawah nasional dan provinsi yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai. Posisi relatif capaian persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Riau pada tiap kabupaten/kota sebagaimana tergambar pada grafik berikut.



Gambar 2.18 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Ekstrem Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2023

Sumber: BPS, Satgas Data P3KE di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2024

Mengacu pada capaian angka kemiskinan pada tiap daerah kabupaten/kota sebagaimana dijelaskan di atas, maka terhadap angka kemiskinan dari sisi bentuk maupun bobot dari akar masalah kemiskinan sangat mungkin berbeda antar daerah. Peta sebaran masalah antar wilayah dapat berupa grafik empat kuadran, dimana setiap kuadran akan menunjukkan posisi relatif wilayah dalam suatu konstalasi masalah yang dibentuk oleh pasangan indikator yang menjadi tujuan. Sebagai gambaran masalah tingkat kemiskinan di Provinsi Riau, wilayah-wilayah yang berada pada kuadran yang dimana capaian kedua indikator tersebut relatif buruk harus menjadi wilayah prioritas. Pengelompokan wilayah berdasarkan empat kuadran ini dapat pula diterapkan pada determinan kemiskinan pada dimensi lain seperti dimensi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, pembangunan desa, sosial, serta sektor lain yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.



Gambar 2.19 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) di Provinsi Riau, Tahun 2023

Sumber: BPS, Satgas Data P3KE di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2024

Pencapaian kesejahteraan penduduk terutama di Provinsi Riau secara makro salah satunya tergambar dari penurunan tingkat kemiskinan sebesar 6,68 persen (Maret 2023). Meski penduduk miskin di Provinsi Riau mengalami penurunan, di lain kondisi masih terdapat penduduk yang memiliki tingkat kerentanan untuk

jatuh miskin. Kondisi kerentanan dapat menjadi buruk dengan adanya pengucilan sosial (social exclusion) sebagai akibat distribusi pendapatan dan akses layanan dasar yang belum dapat dijangkau oleh seluruh penduduk. Salah satu kelompok rentan yang mengalami marginalisasi dan eksklusivitas adalah Penyandang Disabilitas.

Menurut catatan Dinas Sosial Provinsi Riau, data penyandang disabilitas di Provinsi Riau tahun 2022 sebanyak 10.174 jiwa. Berdasarkan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Riau tahun 2023, dari total penduduk Provinsi Riau yang tercatat sebanyak 6.794.944 jiwa, terdapat 8.890 diantaranya adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas fisik terdapat 1.065 jiwa, disabilitas netra sebanyak 705 jiwa, disabilitas wicara 1.545 jiwa, disabilitas mental 3.851 jiwa, disabilitas fisik dan mental 182 jiwa, dan disabilitas lainnya sebanyak 1.542 jiwa. Sementara, data terakhir hasil pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilakukan oleh BPS menyebutkan bahwa jumlah penduduk disabilitas (sedang dan berat) di Provinsi Riau total berjumlah 85.953 jiwa.

Penyandang disabilitas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memiliki hak-hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak penyandang disabilitas, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas menjadi pondasi yang menggeser paradigma penyandang disabilitas, dari hanya sekedar objek, sekarang menjadi subjek pembangunan. Dari yang hanya menerima bantuan (charity based) menjadi pemenuhan hak (human right based), dari yang hanya sektor sosial menjadi multisektor. Untuk itu, kebijakan terkait kelompok rentan tidak hanya dibentuk oleh instansi tertentu, namun dilaksanakan oleh seluruh elemen terutama di lingkup pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

2.2.1.5 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar khususnya rehabilitasi sosial maka pemerintah wajib memberikan pelayanan tersebut. Pelayanan dasar tersebut untuk di bidang sosial terdiri dari rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial. Untuk rehabilitasi sosial sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjutan.

Pemerintah Provinsi bertanggungjawab dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi setiap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial khususnya disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis, dan anak terlantar di dalam panti. Sarana pelayanan sosial seperti sarana rehabilitasi sosial seperti panti bagi lansia, panti bagi anak terlantar menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan, memberikan dan melakukan pembinaan kepada sarana pelayanan tersebut. Berikut sebaran lembaga kesejahteraan sosial pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.28 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial di Provinsi Riau Tahun 2023

| Kode | Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial | Jumlah Klien |
|-----------|------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 14 | Provinsi Riau | 4 | 259 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 5 | 234 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 10 | 459 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 3 | 51 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 2 | 78 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 5 | 149 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 25 | 864 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 6 | 151 |
| 14.08 | Kab. Siak | 7 | 329 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 2 | 55 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 1 | 40 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 21 | 698 |
| 14.12 | Kota Dumai | 11 | 430 |
| | Jumlah | 102 | 3.797 |

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau, 2024

Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang

tidak berbadan hukum. Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial berbentuk Panti di Provinsi Riau tahun 2023 khususnya yang berbadan hukum milik masyarakat secara keseluruhan berjumlah 98 panti, terdiri dari panti yang menangani anak terlantar sebanyak 94 panti, panti yang melaksanakan pelayanan bagi disabilitas sebanyak 3 panti, dan yang melayani lanjut usia terlantar milik masyarakat sebanyak 1 panti.

Keberadaan Panti Sosial yang tersedia bila dibanding dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, dan lanjut usia terlantar yang memerlukan panti, masih jauh dari mencukupi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan panti sosial belum dapat sepenuhnya menampung PPKS yang memerlukan layanan di dalam panti. Adapun jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dari tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.29 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Riau Tahun 2018–2023

| No | Jenis PPKS | Tahun (Jiwa) | | | | | |
|----|--|--------------|------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Anak Nakal | 262 | 379 | 297 | 297 | 456 | 330 |
| 2 | Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 142 | 4 | 154 | 154 | 91 | 99 |
| 3 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | 118 | 1 | 58 | 58 | 80 | 22 |
| 4 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | 11.156 | 2 | - | - | 37 | 49 |
| 5 | Korban Tindak Kekerasan | 84 | 4 | 9 | 9 | 63 | 55 |
| 6 | Korban Trafficking | 43 | 43 | 29 | 29 | 1 | 13 |
| 7 | Kelompok Minoritas | 59 | 59 | 8 | 8 | 20 | 5 |
| 8 | Anak Jalanan | 96 | 91 | 142 | 142 | 125 | 43 |
| 9 | Pengemis | 104 | 316 | 153 | 153 | 132 | 145 |
| 10 | Gelandangan | 678 | 316 | 263 | 263 | 186 | 250 |
| 11 | Pemulung | 429 | 429 | 160 | 160 | 6 | 352 |
| 12 | Bekas BWBLP | 400 | 497 | 91 | 91 | 15 | 380 |
| 13 | Orang Dengan HIV/AIDS (OD) | 233 | 611 | 555 | 555 | 158 | 892 |

| No | Jenis PPKS | Tahun (Jiwa) | | | | | |
|----|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | HA) | | | | | | |
| 14 | Korban Penyalahgunaan NAPZA | 999 | 648 | 83 | 83 | 90 | 418 |
| 15 | Korban Bencana Sosial | 357 | 774 | 817 | 2.419 | 1.156 | 579 |
| 16 | Tuna Susila | 269 | 1.019 | 211 | 211 | 43 | 104 |
| 17 | Komunitas Adat Terpencil | 8.646 | 2.405 | 5.914 | 5.914 | 20.775 | 1.198 |
| 18 | Anak Dengan Kedisabilitan (ADK) | 1.309 | 2.706 | 1.477 | 1.477 | 1.001 | 1.970 |
| 19 | Anak Balita Terlantar | 4.563 | 4.441 | 14 | 14 | 32 | 6.190 |
| 20 | Penyandang Cacat (Disabilitas) | 8.731 | 7.829 | 10.561 | 10.561 | 11.275 | 7.659 |
| 21 | Wanita Rawan Sosial Ekonomi | 10.992 | 10.992 | - | - | 43 | 2.665 |
| 22 | Korban Bencana Alam | 8.034 | 33.807 | 4.520 | 27.458 | 32.933 | 17.728 |
| 23 | Anak Terlantar | 37.869 | 36.152 | 751 | 751 | 4.977 | 35.047 |
| 24 | Lanjut Usia Terlantar | 27.722 | 59.523 | 33.895 | 33.895 | 5.710 | 32.253 |
| 25 | Fakir Miskin *) | 500.440 | 490.720 | 483.390 | 500.810 | 485.030 | 485.660 |
| 26 | Keluarga Rentan | - | - | - | - | 37 | 49 |
| | Total Populasi PPKS | 612.754 | 653.768 | 539.484 | 571.069 | 545.914 | 594.155 |

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2024

*) BPS Provinsi Riau

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah PPKS di Provinsi Riau tahun 2023 adalah sebanyak 594.115 jiwa. Jumlah ini meningkat sebesar 29.683 jiwa atau sekitar 5 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sejumlah PPKS ini ada yang diberikan layanan di dalam panti dan di luar panti. Pelayanan di dalam panti khususnya untuk rehabilitasi sosial dasar sesuai kewenangannya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk din luar panti dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk PPKS yang dilayani di dalam panti adalah anak terlantar,

lanjut usia terlantar, disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis. Sedangkan PPKS lainnya dilayani di luar panti.

Disamping perlunya penyediaan panti untuk pemerlu pelayanan sosial tertentu, kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi pemerlu pelayanan sosial lainnya perlu terus dioptimalkan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pemerlu pelayanan sosial dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Jumlah PPKS yang terbesar terlihat dari jenis PPKS Fakir Miskin. Data fakir miskin yang ada di Provinsi Riau merupakan data yang berasal dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sejumlah warga masyarakat yang masuk dalam database tersebut ada yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa bansos PKH dan Bantuan Sembako ataupun bantuan lainnya, namun ada juga yang belum tersentuh sama sekali dari bantuan manapun, dalam hal ini statusnya masih berupa daftar tunggu atau bahkan tidak masuk dalam DTKS yang artinya tidak terjangkau sama sekali dengan informasi dan pendataan. Hal ini dikarenakan kuota bantuan sosial tidak berbanding lurus dengan jumlah masyarakat miskin yang ada di dalam DTKS. Selain hal tersebut permasalahan *inclusion error* dan *exclusion error* masih menjadi isu utama dalam penerimaan bantuan sosial di berbagai daerah sehingga pemerataan bantuan yang tepat sasaran masih belum dapat dicapai.

Angka PPKS yang begitu besar selain dari faktor jumlah masyarakat miskin sebagaimana disebutkan di atas juga disebabkan akibat kebencanaan. Provinsi Riau merupakan daerah yang rawan bencana seperti banjir dan kebakaran hutan sehingga masyarakat mudah terpapar bencana dan menjadi korban bencana. Selain itu tingginya angka migrasi yang masuk ke Riau berpotensi meningkatkan angka pemerlu pelayanan social, hal ini patut menjadi pertimbangan kebijakan dalam penanganan masalah sosial ini kedepan.

Indikator dalam menangani PPKS adalah dengan melihat jumlah PPKS yang terlayani dengan membandingkan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang dilayani melalui rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberian modal kerja dan pelatihan pengembangan keterampilan usaha dengan jumlah masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dengan jumlah keseluruhan PPKS yang ada. Jumlah PPKS yang tertangani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30 Persentase Jumlah PPKS yang Tertangani di Provinsi Riau Tahun 2018-2023

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Jumlah PPKS yang tertangani *) | - | - | - | 205.524 | 199.820 | 208.388 |
| 2 | Jumlah PPKS yang ada | 612.754 | 653.768 | 539.484 | 571.069 | 545.914 | 594.155 |
| 3 | Persentase PPKS yang tertangani | - | - | - | 35,99 | 36,60 | 35.07 |

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau, 2023

*)Tahun 2021 dan 2023, termasuk bantuan PKH dari Pemerintah Pusat, Tahun 2018 – 2020 hanya bantuan Pemda

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase PPKS yang tertangani bersifat fluktuatif. Hal ini disebabkan jumlah PPKS tergantung dari jumlah jenis PPKS yang tidak semuanya bersifat tetap. Untuk jenis PPKS seperti fakir miskin, korban bencana, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandang pengemis jumlahnya bisa bertambah dan bisa berkurang. Hal ini tidak dapat diprediksi karena permasalahan sosial yang terjadi dan dialami masyarakat tidak dapat dikendalikan. Namun yang menjadi fokus pelayanan adalah bagaimana seharusnya kualitas pelayanan tersebut semakin meningkat dan pemerintah selalu ada memberikan pelayanan Ketika dibutuhkan. Upaya ini salah satunya adalah dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam pelayanan sosial.

2.2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Tabel 2.31 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018-2023

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | |
| 14 | Provinsi Riau | 5,98 | 5,76 | 6,32 | 4,42 | 4,37 | 4,23 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 5,19 | 5,65 | 6,15 | 4,27 | 3,62 | 3,38 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 4,53 | 4,79 | 4,91 | 3,32 | 2,53 | 2,47 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 9,76 | 9,28 | 9,31 | 6,63 | 7,18 | 7,09 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 3,96 | 4,55 | 4,35 | 2,66 | 1,5 | 1,71 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 5,12 | 4,67 | 5,99 | 2,34 | 2,73 | 2,26 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 5,23 | 4,51 | 4,42 | 2,25 | 3,62 | 3,45 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 5,82 | 4,79 | 4,8 | 3,25 | 4,55 | 4,42 |
| 14.08 | Kab. Siak | 4,06 | 4,13 | 5,8 | 4,34 | 6,11 | 5,82 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 5,79 | 4,82 | 5,21 | 2,06 | 2,66 | 2,49 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 6,47 | 5,93 | 7,94 | 4,43 | 5,5 | 5,17 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 8,11 | 7,74 | 8,56 | 8,29 | 6,4 | 6,2 |
| 14.12 | Kota Dumai | 5,87 | 6,3 | 8,19 | 6,29 | 5,38 | 5,15 |

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2023

Ket. Rendah Sedang Tinggi

Pada tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2023 bahwa Kabupaten Bengkalis mendominasi tingginya angka pengangguran sebesar 7,09% dan yang terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 1,71%. Penduduk yang bekerja di Kabupaten Bengkalis didominasi oleh penduduk dengan latar pendidikan SMA/MA/SMLB/ Paket C dan tingkat SD/MI/SDLB/Paket A.

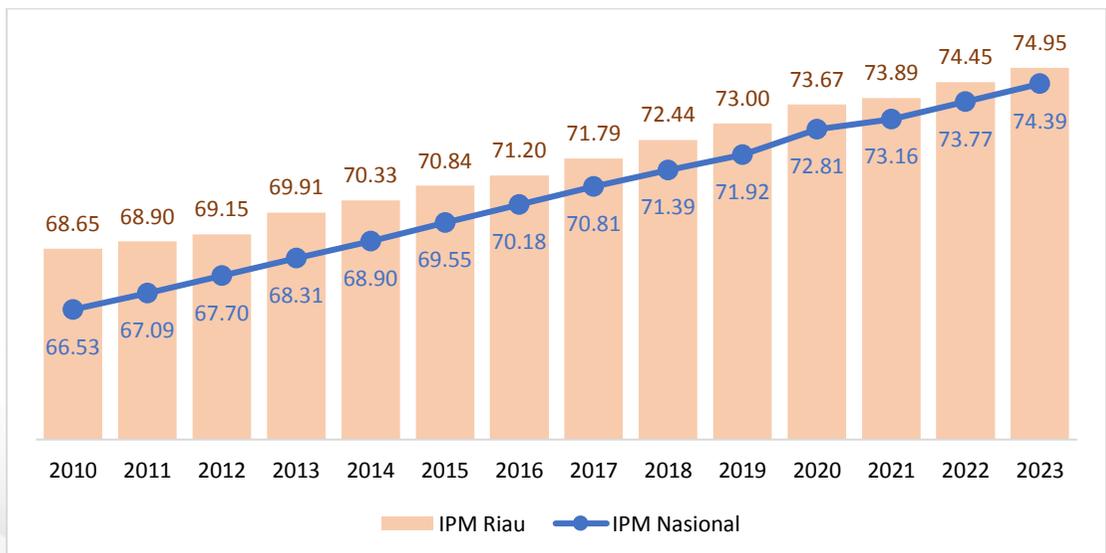
Pada tahun 2023, tingkat pengangguran di Provinsi Riau sebesar 4,23 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat 4 orang yang masuk kategori pengangguran. Dimana terdapat perubahan estimasi data oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan estimasi populasi penduduk berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2015) dan tidak lagi menggunakan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Pencapaian tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau jauh lebih rendah dibandingkan dengan nasional sebesar 5,32% di tahun 2023.

2.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dari data indeks pembangunan manusia dapat terlihat bahwa pembangunan kualitas hidup masyarakat Provinsi Riau meningkat dari tahun ke tahun. Analisis

kinerja terhadap IPM dilakukan dengan memperhatikan indikator pembentuk IPM antara lain umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita oleh karena itu upaya percepatan peningkatan IPM harus dilakukan melalui optimasi program terkait dengan indikator pembentuk IPM yaitu umur harapan hidup melalui kegiatan perbaikan kesehatan masyarakat, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah melalui kegiatan perbaikan pendidikan masyarakat dan pengeluaran riil per kapita melalui kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat.

Rilisnya hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 maka perhitungan dasar jumlah penduduk mempengaruhi data IPM dan komponennya khususnya komponen umur harapan hidup. IPM Provinsi Riau dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun pada 2020 terjadi penurunan IPM akibat pandemi *Covid-19* dimana penurunan ini diakibatkan menurunnya pengeluaran riil per kapita penduduk. IPM terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023, jika dibandingkan dengan IPM nasional, IPM Riau rata-rata lebih tinggi 0,35 poin. Dan IPM Riau termasuk wilayah dengan kategori IPM yang tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Dimana Riau menempati peringkat ke tujuh dari 34 provinsi serta peringkat kedua dari 10 provinsi di Sumatera setelah Kepulauan Riau.



Gambar 2.20 IPM Provinsi Riau dan Nasional, 2010-2023

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2023

Program perbaikan kesehatan masyarakat, peningkatan rata-rata lama sekolah dan peningkatan pendapatan per kapita harus menjadi prioritas utama dalam rangka peningkatan nilai IPM karena hanya tumbuh sebesar 0,68% per tahun. Salah satu faktor pendukung peningkatan IPM adalah dengan terjadinya perbaikan kinerja ekonomi Riau dan terus menguatnya perekonomian yang berdampak positif terhadap komponen pengeluaran riil per kapita.

Tabel 2.32 IPM Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Indikator IPM | | | | |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | Umur Harapan Hidup (Tahun) | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | Pengeluaran Riil Per Kapita (Rp000) | IPM |
| | Nasional | 71,88 | 13,15 | 8,77 | 11.890 | 74,39 |
| 14 | Provinsi Riau | 74,18 | 13,3 | 9,32 | 11.448 | 74,95 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 74,29 | 13,6 | 9,4 | 11.662 | 75,59 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 73,38 | 12,59 | 8,42 | 10.957 | 72,28 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 73,88 | 13,34 | 9,73 | 12.153 | 75,96 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 72,27 | 12,2 | 7,31 | 10.659 | 69,64 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 74,37 | 12,9 | 8,73 | 12.399 | 74,69 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 73,59 | 12,88 | 8,81 | 10.055 | 72,28 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 73,64 | 12,88 | 8,52 | 10.097 | 71,98 |
| 14.08 | Kab. Siak | 73,72 | 12,86 | 9,88 | 12.637 | 75,97 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 72,68 | 13,37 | 8,9 | 10.945 | 73,35 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 72,14 | 12,86 | 7,99 | 8.613 | 68,96 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 75,55 | 15,58 | 11,94 | 14.983 | 83,67 |
| 14.12 | Kota Dumai | 73,31 | 13,33 | 10,16 | 12.457 | 76,45 |

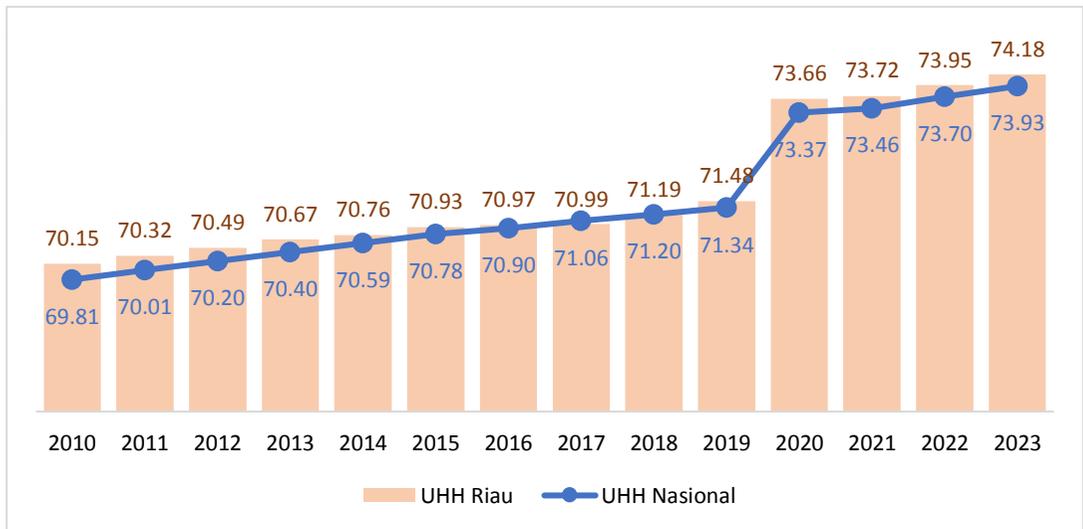
Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2023

: Merupakan kabupaten dengan capaian dibawah provinsi

Pada tabel diatas terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang memiliki IPM lebih tinggi dari IPM Provinsi Riau, yakni Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis, dan Kampar. Sedangkan IPM paling rendah adalah Kabupaten Kep. Meranti diikuti Indragiri Hilir, yang masih dibawah 70 poin. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesenjangan yang cukup tinggi, maka kebijakan dan program yang terkait dengan peningkatan IPM lebih diprioritaskan pada kedua kabupaten yang memiliki IPM terendah ini dengan memperhatikan atau fokus pada komponen pembentukan IPM, yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita.

a) Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur harapan hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Setelah rilisnya hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 maka perhitungan dasar jumlah penduduk mempengaruhi data UHH mulai pada tahun 2020 hingga tahun 2023. UHH di Provinsi Riau lebih tinggi capaiannya dibandingkan nasional dengan peningkatan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,43% dari tahun 2010 hingga 2023.



Gambar 2.21 Umur Harapan Hidup Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2010 – 2023 (Tahun)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Pemerintah berperan penting dalam meningkatkan umur harapan hidup dengan berbagai usaha yang melibatkan peningkatan kualitas layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur, dan kebijakan sosial. Usaha pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan umur harapan hidup melibatkan pendekatan multi-sektor yang mencakup peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pola hidup sehat, peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi, penanggulangan dan pencegahan penyakit, serta pengembangan dan penelitian kesehatan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan kualitas hidup dan umur harapan hidup.

Tabel 2.33 Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010 – 2023 (Tahun)

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Tahun | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14 | RIAU | 70,15 | 70,32 | 70,49 | 70,67 | 70,76 | 70,93 | 70,97 | 70,99 | 71,19 | 71,48 | 73,66 | 73,72 | 73,95 | 74,18 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 69,58 | 69,65 | 69,72 | 69,77 | 69,8 | 70 | 70,08 | 70,16 | 70,35 | 70,64 | 73,74 | 73,77 | 74,03 | 74,29 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 69,51 | 69,53 | 69,6 | 69,63 | 69,64 | 69,74 | 69,79 | 69,83 | 69,97 | 70,2 | 72,76 | 72,97 | 73,17 | 73,38 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 70,32 | 70,36 | 70,38 | 70,38 | 70,38 | 70,58 | 70,63 | 70,69 | 70,85 | 71,11 | 73,39 | 73,4 | 73,62 | 73,88 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 66,26 | 66,3 | 66,43 | 66,5 | 66,54 | 66,84 | 66,95 | 67,07 | 67,32 | 67,66 | 72,03 | 72,11 | 72,19 | 72,27 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 69,46 | 69,78 | 69,86 | 70,04 | 70,13 | 70,23 | 70,39 | 70,54 | 70,74 | 71,03 | 73,81 | 73,84 | 74,16 | 74,37 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 68,33 | 68,6 | 68,7 | 68,85 | 68,93 | 69,03 | 69,17 | 69,31 | 69,55 | 69,89 | 73,52 | 73,54 | 73,56 | 73,59 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 68,98 | 69,07 | 69,16 | 69,23 | 69,27 | 69,47 | 69,57 | 69,66 | 69,87 | 70,17 | 73,13 | 73,19 | 73,46 | 73,64 |
| 14.08 | Kab. Siak | 70,31 | 70,39 | 70,45 | 70,51 | 70,54 | 70,54 | 70,59 | 70,64 | 70,79 | 71,03 | 73,31 | 73,32 | 73,52 | 73,72 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 67,54 | 67,57 | 67,61 | 67,64 | 67,66 | 67,86 | 67,92 | 67,99 | 68,17 | 68,44 | 72,39 | 72,41 | 72,45 | 72,68 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 66,06 | 66,17 | 66,29 | 66,38 | 66,42 | 66,72 | 66,85 | 66,99 | 67,21 | 67,53 | 71,93 | 72,02 | 72,08 | 72,14 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 71,42 | 71,46 | 71,51 | 71,54 | 71,55 | 71,65 | 71,7 | 71,75 | 71,94 | 72,22 | 74,99 | 75,05 | 75,29 | 75,55 |
| 14.12 | Kota Dumai | 69,93 | 69,95 | 70,02 | 70,04 | 70,05 | 70,25 | 70,31 | 70,37 | 70,55 | 70,82 | 72,88 | 72,9 | 73,18 | 73,31 |

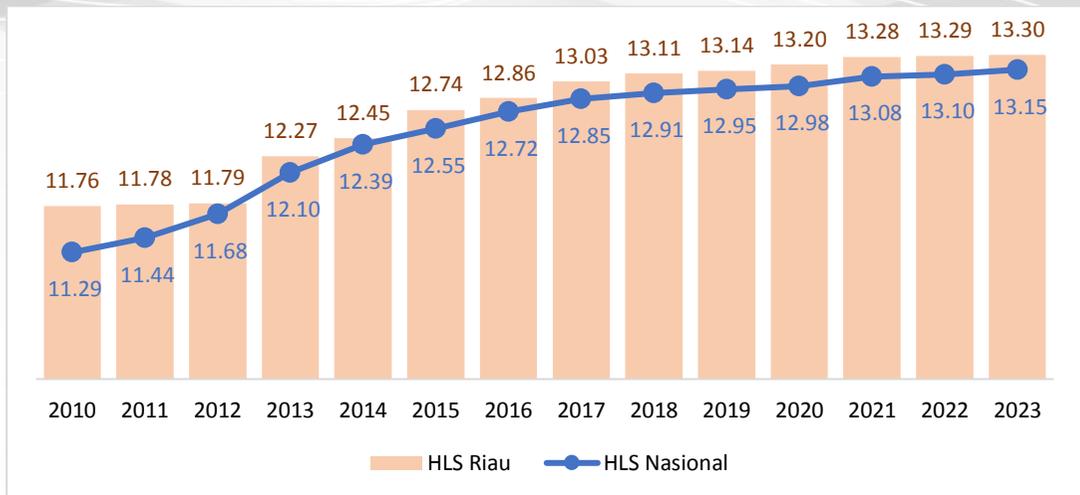
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Ket. Tinggi Sedang Rendah

Pada tingkat kabupaten/kota hanya Kota Pekanbaru yang memiliki UHH diatas UHH Provinsi Riau pada tahun 2023, yakni sebesar 75,55. Hal ini dapat dilihat banyaknya pelayanan kesehatan yang terpusat di Kota Pekanbaru sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Kabupaten yang perhatian dan prioritas pemerintah adalah pada Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singingi yang memiliki UHH terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

b) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling) adalah rata-rata jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh seorang anak yang baru lahir, berdasarkan tingkat partisipasi pendidikan saat ini. Ini mencerminkan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat diterima oleh anak-anak jika kondisi pendidikan tetap seperti sekarang.



Gambar 2.22 Harapan Lama Sekolah per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2010 - 2023 (Tahun)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Capaian HLS Provinsi Riau berada diatas HLS nasional dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,96% dari tahun 2010 hingga tahun 2023. Pencapaian angka rata-rata harapan lama sekolah Provinsi Riau hingga tahun 2023 yaitu 13,30 tahun sudah di atas wajib belajar 9 tahun. Hal ini memberikan gambaran peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan serta peran sistem pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan HLS melibatkan perbaikan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas pengajaran, program akses dan partisipasi, reformasi kebijakan pendidikan, pengembangan pendidikan non-formal dan keterampilan, serta peningkatan data dan sistem informasi pendidikan. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan untuk menerima pendidikan yang berkualitas dan mencapai potensi penuh mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan HLS dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Tabel 2.34 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010 – 2023 (Tahun)

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Tahun | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14 | RIAU | 11,76 | 11,78 | 11,79 | 12,27 | 12,45 | 12,74 | 12,86 | 13,03 | 13,11 | 13,14 | 13,2 | 13,28 | 13,29 | 13,3 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 11,65 | 11,93 | 12,22 | 12,51 | 12,72 | 12,86 | 12,87 | 13,2 | 13,21 | 13,45 | 13,46 | 13,55 | 13,59 | 13,6 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 10,8 | 11,2 | 11,25 | 11,29 | 11,51 | 11,92 | 12,24 | 12,29 | 12,32 | 12,35 | 12,36 | 12,46 | 12,58 | 12,59 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 12,12 | 12,16 | 12,19 | 12,22 | 12,35 | 12,39 | 12,72 | 12,73 | 12,83 | 12,86 | 12,87 | 12,88 | 13,16 | 13,34 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 10 | 10,49 | 10,49 | 10,5 | 10,67 | 11,38 | 11,58 | 11,88 | 11,89 | 11,9 | 11,91 | 11,93 | 12,19 | 12,2 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 10,75 | 10,78 | 10,81 | 10,84 | 11,02 | 11,56 | 11,68 | 11,89 | 12,16 | 12,17 | 12,24 | 12,41 | 12,68 | 12,9 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 10,62 | 10,87 | 11,35 | 12,09 | 12,36 | 12,39 | 12,59 | 12,81 | 12,82 | 12,83 | 12,84 | 12,85 | 12,86 | 12,88 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 10,89 | 10,94 | 11 | 11,06 | 11,42 | 11,75 | 12,06 | 12,25 | 12,63 | 12,67 | 12,68 | 12,76 | 12,83 | 12,88 |
| 14.08 | Kab. Siak | 11,41 | 11,49 | 11,5 | 11,64 | 11,81 | 12,26 | 12,56 | 12,72 | 12,73 | 12,75 | 12,76 | 12,81 | 12,85 | 12,86 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 11,31 | 11,47 | 11,63 | 11,79 | 11,96 | 12,64 | 12,81 | 13,26 | 13,27 | 13,32 | 13,33 | 13,34 | 13,36 | 13,37 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 11,17 | 11,53 | 11,89 | 12,23 | 12,34 | 12,41 | 12,74 | 12,77 | 12,78 | 12,81 | 12,82 | 12,83 | 12,84 | 12,86 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 13,64 | 13,74 | 13,83 | 13,93 | 14,07 | 14,86 | 14,87 | 14,93 | 15,34 | 15,37 | 15,54 | 15,55 | 15,56 | 15,58 |
| 14.12 | Kota Dumai | 11,67 | 11,87 | 12,07 | 12,27 | 12,4 | 12,46 | 12,75 | 12,97 | 12,98 | 13,1 | 13,12 | 13,31 | 13,32 | 13,33 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Ket. Tinggi Sedang Rendah

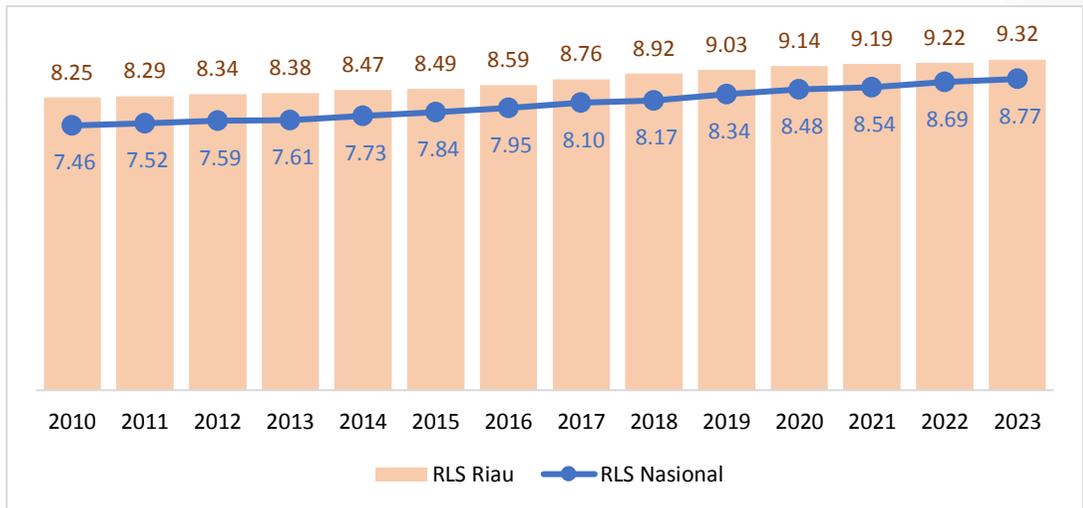
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Indragiri Hilir merupakan kabupaten dengan HLS terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya yakni sebesar 12,2 tahun pada 2023. Hal ini berarti bahwa anak usia 7 tahun di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki peluang untuk bersekolah selama 12 tahun, yaitu hanya tamat pendidikan sekolah menengah atas (SMA/SMK). Sedangkan Kota Pekanbaru dengan HLS sebesar 15,58 tahun telah menggambarkan bahwa peluang anak usia 7 tahun dapat bersekolah hingga tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA/SMK) bahkan Diploma III dan hampir ke tingkat pendidikan tinggi (universitas).

c) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (Average Years of Schooling) adalah indikator yang mengukur jumlah rata-rata tahun pendidikan formal yang telah dicapai oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam suatu negara atau wilayah. Ini

memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh populasi dewasa dan menunjukkan pencapaian pendidikan dalam masyarakat secara keseluruhan.

Capaian RLS Provinsi Riau lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,94% yang menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2023.



Gambar 2.23 Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2010 – 2023 (Tahun)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Pencapaian rata-rata lama sekolah Provinsi Riau hingga tahun 2023 yaitu 9,32 tahun sudah diatas wajib belajar 9 tahun. Upaya peningkatan angka rata-rata lama sekolah minimal 9 tahun tetap menjadi prioritas pembangunan sumberdaya manusia di Provinsi Riau ke depannya melalui program peningkatan wajib belajar 15 tahun dan didukung pendidikan universal. Selain itu pemerintah dapat melaksanakan berbagai upaya yang berfokus pada peningkatan akses, kualitas pendidikan, dan dukungan bagi individu untuk menyelesaikan pendidikan.

Tabel 2.35 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010 – 2023 (Tahun)

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Tahun | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14 | RIAU | 8,25 | 8,29 | 8,34 | 8,38 | 8,47 | 8,49 | 8,59 | 8,76 | 8,92 | 9,03 | 9,14 | 9,19 | 9,22 | 9,32 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 8,08 | 8,56 | 8,56 | 8,62 | 8,62 | 8,84 | 8,85 | 9,09 | 9,1 | 9,25 | 9,26 | 9,27 | 9,39 | 9,4 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 7,2 | 7,31 | 7,38 | 7,46 | 7,55 | 7,82 | 7,83 | 7,89 | 8,16 | 8,17 | 8,38 | 8,39 | 8,4 | 8,42 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 8,14 | 8,34 | 8,64 | 8,76 | 8,8 | 8,82 | 8,83 | 8,89 | 9,21 | 9,41 | 9,69 | 9,7 | 9,71 | 9,73 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 6,54 | 6,66 | 6,7 | 6,74 | 6,81 | 6,82 | 6,94 | 7,18 | 7,19 | 7,22 | 7,23 | 7,24 | 7,26 | 7,31 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 6,94 | 7,2 | 7,41 | 7,74 | 7,82 | 8,17 | 8,18 | 8,19 | 8,44 | 8,49 | 8,5 | 8,7 | 8,72 | 8,73 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 7,18 | 7,24 | 7,31 | 7,38 | 7,83 | 7,84 | 7,97 | 8,18 | 8,37 | 8,38 | 8,39 | 8,54 | 8,55 | 8,81 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 7,24 | 7,3 | 7,36 | 7,42 | 7,62 | 7,62 | 7,88 | 7,89 | 8,15 | 8,24 | 8,25 | 8,26 | 8,28 | 8,52 |
| 14.08 | Kab. Siak | 8,6 | 8,72 | 8,77 | 8,81 | 9,05 | 9,2 | 9,21 | 9,4 | 9,64 | 9,65 | 9,66 | 9,86 | 9,87 | 9,88 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 7,19 | 7,46 | 7,68 | 7,7 | 8,17 | 8,18 | 8,19 | 8,2 | 8,31 | 8,58 | 8,59 | 8,75 | 8,76 | 8,9 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 6,12 | 6,27 | 6,8 | 7,33 | 7,44 | 7,45 | 7,46 | 7,47 | 7,48 | 7,51 | 7,7 | 7,84 | 7,88 | 7,99 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 10,67 | 10,84 | 10,88 | 10,93 | 10,95 | 10,97 | 11,2 | 11,21 | 11,22 | 11,43 | 11,68 | 11,92 | 11,93 | 11,94 |
| 14.12 | Kota Dumai | 9,36 | 9,42 | 9,48 | 9,54 | 9,56 | 9,57 | 9,58 | 9,67 | 9,84 | 9,85 | 10,07 | 10,14 | 10,15 | 10,16 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Ket. Tinggi Sedang Rendah

Kabupaten Indragiri Hilir tetap menjadi prioritas pendidikan dimana HLS dan RLS di kabupaten tersebut merupakan yang paling rendah se-Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat sejak tahun 2012 hingga tahun 2023 yakni sebesar 7,31 tahun. Artinya, penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Indragiri Hilir secara rata-rata hanya menempuh pendidikan selama 7 tahun, yaitu kelas VII (1 SMP) dan tidak lulus pada kelas VII (2 SMP). Untuk Kota Pekanbaru dengan capaian RLS tertinggi menggambarkan bahwa secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama hampir 12 tahun, yaitu kelas XII (3 SMA).

Rendahnya capaian RLS hampir di seluruh kabupaten/kota harus menjadi prioritas pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Provinsi Riau yang dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai strategi yang terintegrasi, mulai dari meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, memberikan dukungan finansial dan sosial, hingga merumuskan kebijakan pendidikan yang inklusif. Dengan

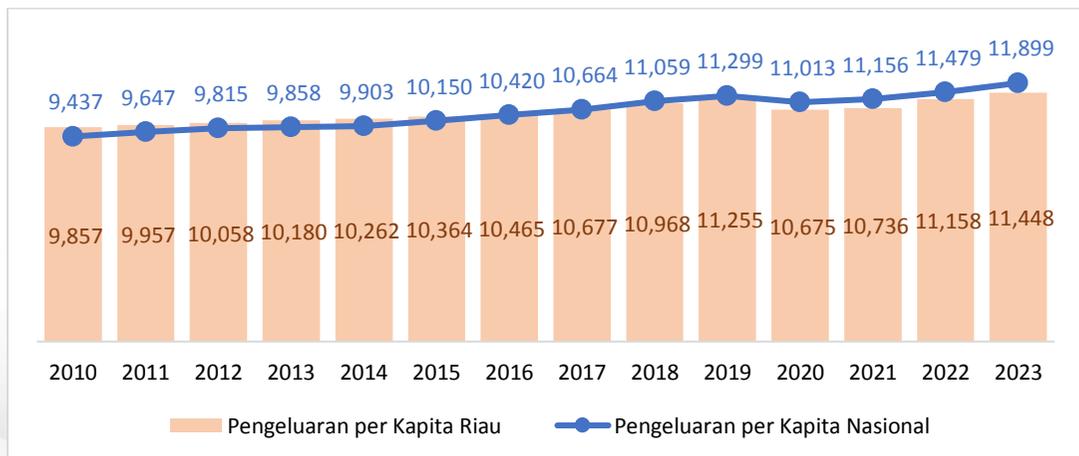
pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan dapat meningkatkan pencapaian pendidikan di seluruh lapisan masyarakat dan akhirnya meningkatkan RLS.

d) Pengeluaran Riil Per Kapita

Pengeluaran riil per kapita merujuk pada rata-rata jumlah uang yang dikeluarkan oleh individu dalam suatu negara atau wilayah untuk konsumsi dan belanja, termasuk barang dan jasa. Ini sering kali diukur sebagai Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita atau Pendapatan per Kapita.

Pengeluaran riil per kapita mencerminkan standar hidup dan kesejahteraan ekonomi, serta berkontribusi pada penilaian kualitas hidup secara keseluruhan. Angka ini memberikan wawasan tentang kemampuan ekonomi penduduk untuk membeli barang dan jasa yang memadai, dan berhubungan erat dengan indikator lain dalam IPM seperti kesehatan dan pendidikan.

Program peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Provinsi Riau karena dengan peningkatan pendapatan akan berdampak positif pada peningkatan pengeluaran riil per kapita. Peningkatan pengeluaran riil per kapita juga dapat mengindikasikan terjadinya peningkatan pendapatan per kapita di samping berkontribusi pada peningkatan PDRB Provinsi Riau.



Gambar 2.24 Pengeluaran Riil Per Kapita per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2010-2023 (Ribuan Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Capaian pengeluaran riil per kapita di Provinsi Riau masih dibawah capaian nasional dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,18% dari tahun 2010-2023. Tahun 2023 mencapai angka Rp11,45 juta per tahun yang artinya rata-rata penduduk Riau menghabiskan uang Rp11,45 juta per tahun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, kesehatan, serta barang dan jasa lainnya.

Tabel 2.36 Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010 – 2023 (Ribu Rupiah)

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Tahun | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14 | RIAU | 9.857 | 9.957 | 10.058 | 10.180 | 10.262 | 10.364 | 10.465 | 10.677 | 10.968 | 11.255 | 10.675 | 10.736 | 11.158 | 11.448 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 10.433 | 10.513 | 10.593 | 10.624 | 10.651 | 10.710 | 10.765 | 10.912 | 11.128 | 11.232 | 10.796 | 10.858 | 11.394 | 11.662 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 9.043 | 9.270 | 9.636 | 9.656 | 9.726 | 9.776 | 10.068 | 10.223 | 10.481 | 10.738 | 10.202 | 10.260 | 10.472 | 10.957 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 10.172 | 10.300 | 10.429 | 10.598 | 10.661 | 10.965 | 11.325 | 11.530 | 11.640 | 11.753 | 11.331 | 11.415 | 11.857 | 12.153 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 9.168 | 9.269 | 9.370 | 9.680 | 9.738 | 9.787 | 9.911 | 10.041 | 10.254 | 10.382 | 9.954 | 9.945 | 10.234 | 10.659 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 10.326 | 10.440 | 10.788 | 11.342 | 11.391 | 11.422 | 11.641 | 11.725 | 11.894 | 12.149 | 11.606 | 11.672 | 12.163 | 12.399 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 10.874 | 11.046 | 11.220 | 11.397 | 11.531 | 11.604 | 11.826 | 11.898 | 12.119 | 12.347 | 11.799 | 11.807 | 12.230 | 12.637 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 8.380 | 8.490 | 8.603 | 8.717 | 8.786 | 8.942 | 9.065 | 9.303 | 9.608 | 9.979 | 9.374 | 9.406 | 9.841 | 10.055 |
| 14.08 | Kab. Siak | 8.281 | 8.656 | 8.784 | 8.962 | 9.051 | 9.176 | 9.181 | 9.250 | 9.316 | 9.672 | 9.362 | 9.417 | 9.906 | 10.097 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 9.329 | 9.437 | 9.546 | 9.676 | 9.719 | 9.770 | 9.892 | 10.274 | 10.476 | 10.820 | 10.243 | 10.309 | 10.647 | 10.945 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 6.818 | 6.849 | 6.863 | 6.876 | 6.945 | 7.030 | 7.194 | 7.673 | 7.978 | 8.358 | 7.790 | 7.780 | 8.246 | 8.613 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 13.633 | 13.719 | 13.805 | 13.891 | 14.023 | 14.126 | 14.225 | 14.497 | 14.778 | 15.206 | 14.433 | 14.360 | 14.804 | 14.983 |
| 14.12 | Kota Dumai | 9.593 | 10.162 | 10.499 | 10.735 | 10.870 | 11.058 | 11.531 | 11.699 | 12.063 | 12.453 | 11.751 | 11.818 | 12.249 | 12.457 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Ket. Tinggi Sedang Rendah

Dari tabel diatas diketahui bahwa Kepulauan Meranti merupakan kabupaten dengan pengeluaran riil per kapita yang terendah yakni sebesar Rp8,6 juta per tahun yang dikeluarkan oleh masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan tingginya kemiskinan yang ada pada kabupaten tersebut. Sedangkan Kota Pekanbaru telah mencapai pengeluaran riil per kapita sebesar Rp14,98 juta per tahun lebih tinggi dari capaian Provinsi Riau.

Upaya peningkatan pengeluaran riil per kapita suatu daerah memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu, melibatkan berbagai sektor mulai dari

ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, memperbaiki standar hidup, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, pemerintah dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh.

2.2.1.8 Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu tertentu dan umumnya 1 tahun. Berdasarkan keparahan, inflasi dikategorikan (i) inflasi ringan: di bawah 10% setahun; (ii) inflasi sedang: antara 10 - 30% setahun; (iii) inflasi berat: antara 30 - 100% setahun; dan (iv) hiperinflasi: di atas 100% setahun.



Gambar 2.25 Perkembangan Laju Inflasi Provinsi Riau Tahun 2010-2023 (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar diatas terlihat bahwa selama periode 2010-2023 trend inflasi di Provinsi Riau cenderung menurun dari 7% pada tahun 2010 menjadi 2,5% pada tahun 2023. Namun terjadi beberapa peningkatan inflasi pada tahun 2013, 2014 dan 2022. Pada tahun 2022 peningkatan inflasi terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran kecuali kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kontribusi terbesar yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah transportasi dimana disebabkan oleh kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak.

Menurunkan inflasi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, melibatkan kebijakan moneter, fiskal, harga, serta peningkatan produksi dan investasi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pemerintah dapat mengurangi tekanan inflasi, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.1.9 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani dan efektivitas kebijakan pertanian di suatu wilayah. NTP memberikan gambaran tentang daya beli petani berdasarkan harga yang mereka terima untuk hasil pertanian dibandingkan dengan biaya yang mereka keluarkan untuk produksi.

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau pada Desember 2023 sebesar 156,29 atau naik sebesar 8,4% dibanding NTP Tahun 2022 sebesar 144,19. Terjadi kenaikan indeks harga konsumsi rumah tangga pertanian di Provinsi Riau sebesar 0,26 persen. Hal ini disebabkan adanya kenaikan harga pada tujuh kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Adapun kelompok pengeluaran dengan kenaikan indeks konsumen perdesaan tertinggi adalah kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Riau juga mengalami kenaikan sebesar 1,42 persen, yaitu dari 150,92 pada November 2023 menjadi 153,07 pada Desember 2023. Perkembangan NTP Provinsi Riau Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.37 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau Tahun 2018-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|----|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Indeks yang diterima petani (It) | 124,49 | 129,81 | 124,78 | 149,01 | 162,29 | 183,81 |
| 2 | Indeks yang dibayar petani (Ib) | 132,16 | 135,81 | 105,05 | 107,42 | 112,55 | 117,38 |
| 3 | NTP | 94,20 | 95,58 | 118,78 | 138,68 | 144,19 | 156,29 |

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2024

2.2.1.10 Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan total dana yang dihimpun oleh bank dari pihak ketiga, yaitu masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. DPK merupakan salah satu sumber utama pembiayaan bagi bank dan mencakup berbagai jenis simpanan dari masyarakat. Secara keseluruhan, DPK berfungsi sebagai pilar penting dalam sistem perbankan dan ekonomi regional. Dengan memfasilitasi pinjaman, investasi, dan pengeluaran, DPK berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada pertumbuhan PDRB di suatu daerah. Berikut disajikan total DPK terhadap PDRB Provinsi Riau tahun 2019-2023.

Tabel 2.38 Perkembangan Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap PDRB ADHB Provinsi Riau Tahun 2010-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | DPK (Rp Juta) | 36,87 | 44,88 | 52,41 | 55,84 | 64,69 | 62,83 | 67,10 | 73,21 | 76,57 | 82,44 | 91,59 | 109,52 | 116,63 | 119,70 |
| 2 | KREDIT (Rp Juta) | 42,38 | 51,09 | 60,03 | 67,00 | 74,75 | 85,96 | 88,40 | 89,82 | 104,67 | 110,51 | 112,99 | 116,64 | 140,58 | 146,75 |
| 3 | PDRB ADHB (Rp Juta) | 388,58 | 485,65 | 558,49 | 607,50 | 679,40 | 652,76 | 681,70 | 704,71 | 752,26 | 760,25 | 727,60 | 839,00 | 991,61 | 1.026,47 |
| 4 | %DPK/PDRB | 9,49 | 9,24 | 9,38 | 9,19 | 9,52 | 9,63 | 9,84 | 10,39 | 10,18 | 10,84 | 12,59 | 13,05 | 11,76 | 11,66 |
| 5 | %KREDIT/PDRB | 10,91 | 10,52 | 10,75 | 11,03 | 11,00 | 13,17 | 12,97 | 12,75 | 13,91 | 14,54 | 15,53 | 13,90 | 14,18 | 14,30 |

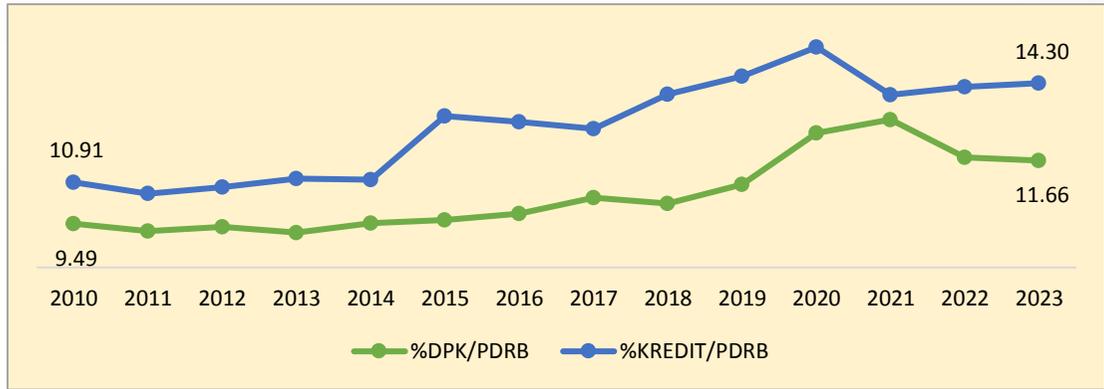
Sumber: Bank Indonesia Wilayah Provinsi Riau

Persentase DPK terhadap PDRB ADHB Provinsi Riau selama tahun 2010-2023 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun cenderung mengalami kenaikan dari 9,49 persen tahun 2010 menjadi 11,66 persen tahun 2023 atau naik 2,17 persen. Untuk persentase total kredit terhadap PDRB ADHB juga mengalami kenaikan 3,39 persen dari 10,91 persen pada tahun 2010 menjadi 14,3 persen pada tahun 2023.

Rendahnya persentase DPK dibandingkan persentase kredit terhadap PDRB ADHB di Provinsi Riau tersebut mengindikasikan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat relatif kecil dibandingkan dengan total output ekonomi di Provinsi Riau, yang bisa menjadi indikasi lemahnya kapasitas perbankan dalam memberikan kredit dan mendanai investasi. Selain itu menggambarkan kurangnya kepercayaan

masyarakat dalam menyimpan dana di bank atau keterbatasan kapasitas bank dalam menarik dana.

Dengan demikian pemerintah Provinsi Riau diharapkan mampu meningkatkan persentase DPK terhadap PDRB yang berimplikasi terhadap likuiditas yang baik dan peningkatan potensi sumber pembiayaan berbasis ekonomi syariah.



Gambar 2.26 Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Kredit Provinsi Riau Tahun 2010-2023 (Juta Rupiah)

Sumber: Bank Indonesia Wilayah Provinsi Riau

2.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

Indeks Kualitas Keluarga merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi pemerintah dalam rangka mengidentifikasi permasalahan keluarga dan selanjutnya mempersiapkan penyusunan intervensi kebijakan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. IKK merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan kualitas keluarga di Indonesia dan menjadi tolak ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan kualitas keluarga di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penghitungan IKK dimulai pada tahun 2020 dilakukan atas kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Perkembangan Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.39 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Riau Tahun 2020-2022

| Provinsi | Tahun | | |
|----------|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Riau | 71,36 | 74,36 | 77,07 |

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Capaian IKK Provinsi Riau dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,39 poin, namun capaian IKK Provinsi Riau pada tahun 2022 masih dibawah rata-rata Nasional sebesar 0,31 poin. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian indeks kualitas keluarga dapat antara lain sebagai berikut:

- a) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan
- b) Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/ pengasuhan anak
- c) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d) Penurunan pekerja anak
- e) Pencegahan perkawinan anak

2.2.2.2 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga atau IBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Dimensi Ketenteraman adalah kondisi keluarga yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga. Dimensi Kemandirian adalah kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain. Adapun dimensi Kebahagiaan adalah kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri (Hurlock: 2014, Seligmen :2002, Chaplin :2008)

Indeks Pembangunan Keluarga atau IBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga rentan, berkembang atau berkualitas. Nilai Indeks Pembangunan Keluarga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: a) kurang baik (rentan) nilainya di bawah 40; b) cukup baik (berkembang) nilainya antara 40-70; c) baik (berkualitas di atas 70).



Gambar 2.27 Capaian IBangga di Provinsi Riau Tahun 2021-2023

Sumber: PK 2021-2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau

Pada gambar diatas diketahui bahwa capaian IBangga Provinsi Riau dari tahun 2021 sampai dengan 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 IBangga Provinsi Riau mencapai angka 53,01 kemudian meningkat menjadi 56,74 pada tahun 2022 dan kemudian meningkat lagi menjadi 63,7. Ini berarti capaian IBangga di Provinsi Riau sudah mencapai tahap cukup baik (berkembang).

2.2.2.3 Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu serta meningkatkan kesehatan reproduksi. Salah Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan instansi pembina program KB yang berkomitmen meningkatkan cakupan akseptor KB, terutama untuk kesertaan KB Modern. Metode Kontrasepsi Modern terdiri dari *Intrauterine Divice* (IUD), implant, Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP), pil, suntik juga kondom. Dengan cakupan kesertaan KB yang terus meningkat diharapkan laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan, angka kematian ibu dan bayi diturunkan sehingga Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) dapat diwujudkan.

Prevalensi Kontrasepsi Modern atau *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) adalah proporsi wanita kawin usia 15-19 tahun (Pasangan Usia Subur/PUS) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern saat pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk menunda, mengatur jarak kelahiran, atau

membatasi jumlah kelahiran dibandingkan dengan jumlah seluruh PUS. Provinsi Riau telah melakukan berbagai strategi dalam upaya-upaya meningkatkan capaian mCPR, yaitu dengan memperluas jaringan kemitraan atau jaringan pelayanan KB hingga ke pelosok desa wilayah terpencil dan perbatasan, mengoptimalkan KB pasca persalinan dan pasca keguguran, memberikan pelayanan KB gratis, melakukan pembinaan ke kelompok-kelompok kegiatan (Poktan) untuk meningkatkan kesetaraan ber-KB, mempermudah akses dan cakupan pelayanan KB.

Tabel 2.40 Capaian *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019-2023

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 | Riau | 64,14 | 66,89 | 71,29 | 51,39 | 63,48 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 58,02 | 62,76 | 80,97 | 50,69 | 60,91 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 71,01 | 69,89 | 69,02 | 58,41 | 73,37 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 63,68 | 68,25 | 69,92 | 43,86 | 63,45 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 61,9 | 64,1 | 64,74 | 56,31 | 64,85 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 59,45 | 60,24 | 71,49 | 56,21 | 66,21 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 66,68 | 74,33 | 74,87 | 50,17 | 57,95 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 74,82 | 76,51 | 73,24 | 46,31 | 53,14 |
| 14.08 | Kab. Siak | 62,45 | 64,26 | 68,04 | 53,34 | 63,54 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 74,34 | 74,31 | 78,76 | 62,3 | 69,23 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 65,95 | 69,25 | 70,44 | 50,74 | 62,53 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 58,81 | 61,31 | 65,05 | 46,89 | 66,37 |
| 14.12 | Kota Dumai | 71,9 | 75,51 | 75,12 | 53,83 | 65,72 |

Sumber : Perwakilan BKKBN Provinsi Riau (diolah)

Keterangan warna: Dibawah capaian provinsi

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian mCPR di Provinsi Riau mengalami fluktuatif. Tahun 2019 capaian mCPR Provinsi Riau sebesar 64,14 persen kemudian naik menjadi 66,89 persen pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 71,29 persen kemudian turun secara signifikan menjadi 51,39 persen pada tahun 2022 dan kemudian naik lagi menjadi 63,48 persen pada tahun 2023.

Terjadinya penurunan yang signifikan pada tahun 2021 ke tahun 2022 besar kemungkinan lebih disebabkan sumber data yang digunakan dalam

penghitungan mCPR di Provinsi Riau. Jika pada tahun sebelum tahun 2022 penghitungan mCPR di Provinsi Riau menggunakan cakupan data dari statistik rutin atau yang sering disebut data R/R di mana data ini adalah hasil rekapan pelayanan KB dari lini lapangan secara manual maka tahun 2022 sumber data bermigrasi dengan menggunakan data mCPR bersumber dari aplikasi Siga dimana data ini bersifat real time dan bisa diupdate kapan saja. Jadi penurunan data terutama pada tahun 2021 ke tahun 2022 tersebut lebih disebabkan belum semua hasil pelayanan KB masuk atau terintrikan ke dalam aplikasi Siga karena masih merupakan aplikasi yang baru.

Mengacu pada capaian mCPR Provinsi Riau pada tabel diatas dimana pada tahun 2023 capaiannya adalah sebesar 63,48 persen atau setara dengan sekitar 63 dari 100 pasangan usia subur telah menggunakan alat kontrasepsi modern untuk perencanaan kehamilan, mengakhiri kehamilan atau mengatur jarak kehamilan. Lebih dari separuh PUS di Provinsi Riau yang telah menggunakan metode kontrasepsi modern untuk perencanaan kehamilan, mengakhiri kehamilan atau mengatur jarak kehamilan memberi bukti bahwa program KB saat ini sudah banyak diterima masyarakat.

Berdasarkan tabel di atas juga diketahui bahwa pada tahun 2023 masih terdapat 5 (lima) kabupaten di Provinsi Riau dengan capaian rendah yaitu capaian mCPR di bawah rata-rata capaian Provinsi. Kelima kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kampar dengan capaian sebesar 60,91 persen, Kabupaten Rokan Hulu dengan capaian sebesar 57,95 persen, Kabupaten Bengkalis dengan capaian sebesar 63,45 persen, Kabupaten Rokan Hilir dengan capaian sebesar 53,14 persen dan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan capaian sebesar 62,53 persen. Masih rendahnya mCPR di lima kabupaten tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keterbatasan akses ke tempat pelayanan KB, pengetahuan yang masih rendah mengenai manfaat KB, kondisi geografis, ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang terbatas, SDM serta sarana dan prasarana yang kurang hingga ke faktor budaya dan agama.

Adapun seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan minim resiko efek

samping terhadap kesehatan pemakaiannya dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

2.2.2.4 *Unmet Need* (Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi)

Unmet Need atau permintaan KB tetapi tidak terpenuhi didefinisikan sebagai Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menjarangkan kehamilan atau membatasi kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Para ibu yang mengalami *unmet need* beresiko mengalami kehamilan yang tidak diinginkan yang dikhawatirkan pada rendahnya kepedulian akan perawatan kehamilan dan perawatan bayi yang dilahirkan dan tumbuh kembang anak. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) tipe yakni kehamilan yang belum waktunya (*mistimed*) dan kehamilan yang tidak diinginkan sama sekali (*unwanted*). Baik kejadian *unmet need* maupun kejadian yang tidak diinginkan mengindikasikan kegagalan perencanaan kehamilan dan tentunya ini menjadi perhatian serius bagi para pengelola program.



Gambar 2.28 Unmet Need di Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Sumber data: LAKIP Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2019-2023

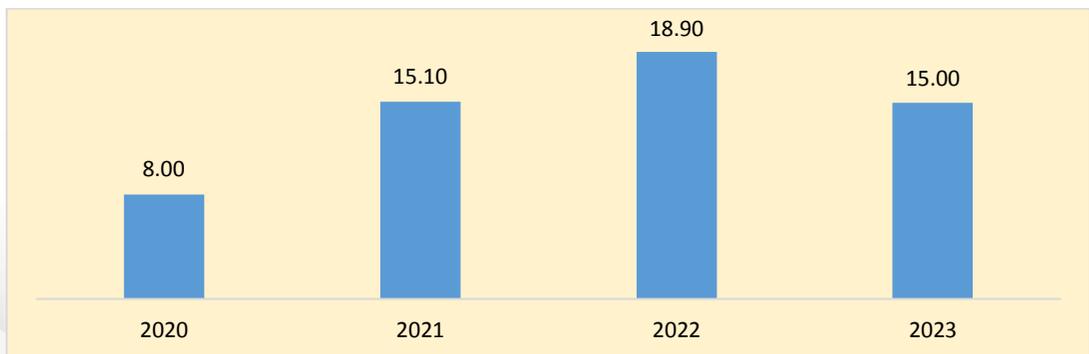
Dari data pada gambar tersebut di atas diketahui bahwa angka *unmet need* di Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 angka *unmet need* di Provinsi Riau sebesar 24,09 persen kemudian turun menjadi 16,20 persen pada tahun 2020. Sementara itu angka *unmet need* di Provinsi Riau pada tahun 2021 sempat mengalami kenaikan menjadi sebesar 25,60 persen namun turun lagi menjadi 18,30 persen pada tahun 2022 dan kemudian turun lagi menjadi 13,90 persen pada tahun 2023.

Meningkatnya angka *unmet need* pada tahun 2022 disebabkan oleh pandemi Covid-19 dimana mengakibatkan pelayanan KB terhambat karena harus melaksanakan *social distancing*, kebijakan *work from home*, dan juga ketakutan atau kekhawatiran (*panic bullying*) baik pada pemberi pelayanan maupun yang akan dilayani mengenai untuk datang ke fasilitas kesehatan. Hal ini mengakibatkan makin meningkatkan angka *unmet need* di Provinsi Riau.

Upaya menurunkan angka *unmet need* yang tepat sasaran melalui pemenuhan permintaan KB yang berkualitas akan menghindarkan kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak tepat waktu (*mistimed*). Selain untuk menjaga kesehatan ibu dan menghindari terjadinya kematian ibu hamil, secara makro penurunan *unmet need* berdampak pada penurunan *Total Fertility Rate*.

2.2.2.5 Age Specific Fertility Rate (ASFR) Usia 15-19 Tahun

Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR) adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. Kegunaan indikator ASFR merupakan dasar untuk mengembangkan proyeksi penduduk, mengetahui jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di masa yang akan datang. Manfaat lain adalah untuk mengetahui jumlah kelahiran menurut kelompok umur tertentu sehingga diketahui apakah kelahiran pada kelompok umur tertentu tersebut beresiko atau tidak. Khusus untuk ASFR usia 15-19 tahun juga dapat dimanfaatkan untuk melihat keberhasilan program pendewasaan usia perkawinan dan juga untuk mengetahui mengenai kesehatan reproduksi remaja khususnya perempuan usia di bawah 20 tahun.



Gambar 2.29 Age Specific Fertility Rate (ASFR) Usia 15-19 Tahun di Provinsi Riau Tahun 2020-2023

Sumber: LAKIP Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2020-2023

Pada gambar di atas diketahui bahwa angka *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) 15-19 tahun di Provinsi Riau kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 angka ASFR usia 15-19 tahun adalah sebesar 8 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun. Angka kemudian naik menjadi 15,1 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun pada tahun 2021 kemudian naik lagi menjadi 18,9 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun pada tahun 2022. Sementara itu pada tahun 2023 angkanya menurun lagi menjadi 15 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun. Meningkatnya angka ASFR 15-19 tahun pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 kemungkinan diakibatkan oleh pandemic covid 19 yang dapat mengakibatkan akses perempuan terhadap pendidikan menjadi terbatas atau meningkatnya angka putus sekolah, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada menurunnya pendapat per kapita keluarga sehingga hal ini berdampak pada meningkatnya kejadian pernikahan dini pada usia remaja.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka ASFR usia 15-19 tahun antara lain meningkatkan perluasan akses pendidikan kepada kaum perempuan, meningkatkan sosialisasi dan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan juga meningkatkan kesadaran orang tua atau keluarga untuk tidak mengawinkan anaknya pada usia di bawah 19 tahun.

2.2.2.6 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak adalah indikator yang menggambarkan pencapaian Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang menjadi acuan dalam peningkatan pembangunan perlindungan anak. Perkembangan Indeks Perlindungan Anak Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.41 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun 2018-2022

| Provinsi | Tahun | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Riau | 63,11 | 64,31 | 65,76 | 61,59 | 62,78 |

Sumber: Kementerian PPPA

2.2.2.7 Indeks Pembangunan Gender

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran laki-laki dan perempuan. Untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi/advokasi pendidikan dan latihan bagi kaum perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor.

Keberhasilan pembangunan perempuan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender atau yang difokuskan kepada perempuan. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.42 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Riau Tahun 2018-2023

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Indeks Pembangunan Gender | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14 | Riau | 88,37 | 88,43 | 88,14 | 88,38 | 88,71 | 88,98 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 89,29 | 89,83 | 89,52 | 89,79 | 89,81 | 89,87 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 86,61 | 87,33 | 86,94 | 86,69 | 86,73 | 87,07 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 89,96 | 90,08 | 90,07 | 90,1 | 90,11 | 89,94 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 82,37 | 82,57 | 82,34 | 82,37 | 82,74 | 83,2 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 88,5 | 88,51 | 88,06 | 88,73 | 88,94 | 89,37 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 81,85 | 82,13 | 81,88 | 82,12 | 82,44 | 82,72 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 84,86 | 85,22 | 84,91 | 84,65 | 85,13 | 85,38 |
| 14.08 | Kab. Siak | 88,52 | 88,58 | 88,62 | 88,69 | 88,79 | 88,93 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 90,06 | 90,57 | 90,16 | 90,06 | 90,48 | 90,47 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 85,9 | 86,2 | 86,3 | 86,45 | 86,97 | 87,35 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 92,97 | 93,12 | 93,01 | 93,27 | 93,63 | 93,89 |
| 14.12 | Kota Dumai | 90,82 | 90,86 | 90,66 | 90,72 | 90,74 | 90,92 |

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2023

Keterangan warna: Dibawah capaian provinsi

2.2.2.8 Indeks Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender Provinsi Riau selama lima tahun terakhir dari tahun 2019 hingga 2023 membaik ditandai dengan turunnya nilai indek setiap tahunnya.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG), turun rata-rata 0,02 poin per tahun. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya ketimpangan dalam pasar tenaga kerja.

Tabel 2.43 Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Riau Tahun 2018-2023

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|-----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | Riau | 0,5 | 0,52 | 0,5 | 0,48 | 0,47 | 0,46 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 0,52 | 0,56 | 0,53 | 0,5 | 0,53 | 0,49 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 0,52 | 0,63 | 0,64 | 0,62 | 0,62 | 0,57 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 0,53 | 0,53 | 0,49 | 0,48 | 0,45 | 0,49 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 0,64 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,57 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 0,61 | 0,85 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,59 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 0,57 | 0,62 | 0,6 | 0,55 | 0,59 | 0,56 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 0,63 | 0,58 | 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,53 |
| 14.08 | Kab. Siak | 0,55 | 0,59 | 0,6 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 0,62 | 0,65 | 0,61 | 0,6 | 0,58 | 0,54 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 0,52 | 0,54 | 0,49 | 0,48 | 0,5 | 0,49 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 0,34 | 0,25 | 0,23 | 0,29 | 0,15 | 0,13 |
| 14.12 | Kota Dumai | 0,38 | 0,39 | 0,31 | 0,41 | 0,46 | 0,41 |

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2023

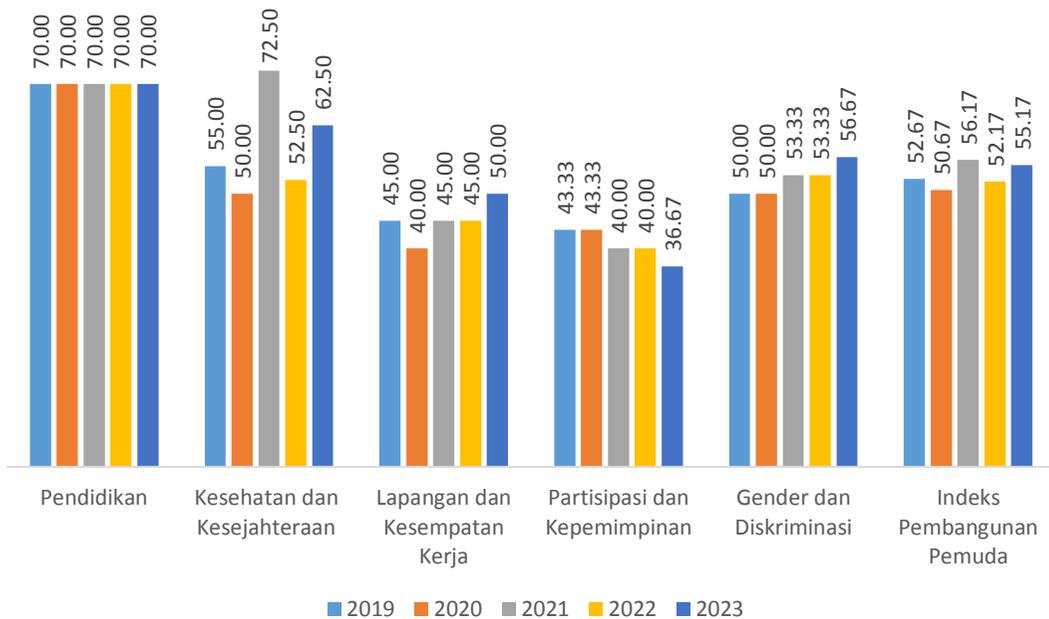
Keterangan warna: Diatas capaian provinsi

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menurun tahun 2023 per Februari sebesar 44,01 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 45,85 persen, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mengalami peningkatan 85,44 persen pada tahun 2023 dari 85,20 persen tahun 2022.

Tahun 2023 masih terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi, tapi capaian ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Riau tahun 2023 dipengaruhi besaran perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pemberdayaan. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan indikator wanita melahirkan tidak di fasilitas kesehatan, dimana Provinsi Riau mengalami penurunan 20,4 persen tahun 2021 menjadi 15,9 persen pada tahun 2022, baik belum memadainya fasilitas kesehatan, akses ke fasilitas kesehatan maupun perilaku masyarakat untuk melakukan pengecekan kehamilan (K6) di fasilitas kesehatan.

2.2.2.9 Indeks Pembangunan Pemuda

Investasi pada peningkatan kualitas pemuda menjadi prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas generasi muda yang merupakan ujung tombak kemajuan dan Pembangunan bangsa. Membangun pemuda tidak hanya membangun individu pemuda tetapi juga membangun lingkungan sumber penghidupan pemuda. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan instrumen penting untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia, dan digunakan sebagai alat ukur pembangunan pemuda yang terdiri dari lima domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Berikut disajikan data perkembangan IPP Provinsi Riau tahun 2019 sampai dengan 2023.



Gambar 2.30 Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Sumber : Bappenas Tahun 2024

Pada tahun 2023, Provinsi Riau memiliki jumlah pemuda sebesar 24,03 persen (Statistik Pemuda Indonesia, 2023) dan mengalami peningkatan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebesar 3 poin dari 52,17 pada 2022 menjadi 55,17 pada 2023. Nilai ini berada sedikit di bawah IPP Nasional (56,33). Peningkatan nilai IPP Provinsi Riau disebabkan oleh peningkatan yang signifikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan dari 52,50 menjadi 62,50 pada 2023. Capaian domain lapangan dan kesempatan kerja juga meningkat dari 45,00 menjadi 50,00. Begitu pula dengan domain gender dan diskriminasi yang meningkat dari 53,33 menjadi 56,67. Hanya domain partisipasi dan kepemimpinan yang mengalami penurunan dari 40,00 menjadi 36,67, domain ini menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Riau. Sedangkan domain pendidikan mengalami stagnasi sebesar 70,00 selama 5 tahun berturut-turut.

2.2.2.10 Organisasi Pemuda yang Aktif di Provinsi Riau

Organisasi pemuda merupakan wadah bagi pemuda untuk melatih kepemimpinan. Oleh sebab itu pembinaan terhadap organisasi pemuda harus senantiasa dilakukan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Persentase jumlah organisasi pemuda yang aktif di Provinsi Riau selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.44 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---|--------|--------|-------|--------|--------|
| 1 | Jumlah organisasi pemuda yang aktif | 546 | 546 | 138 | 546 | 546 |
| 2 | Jumlah seluruh organisasi pemuda | 580 | 580 | 1.692 | 580 | 580 |
| 3 | Persentase organisasi pemuda yang aktif | 94,14% | 94,14% | 8,16% | 94,14% | 94,14% |

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2024

Organisasi Pemuda yang aktif di Provinsi Riau pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, tidak mengalami perubahan, artinya organisasi pemuda masih berjumlah 546 organisasi setiap tahunnya dengan persentase sebesar 94,14 persen.

2.2.2.11 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Tahun 2023, skor Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Riau mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 58,52 menjadi 58,99. Skor IPK berhasil meningkat sebanyak 0,47 poin, diiringi dengan meningkatnya hampir seluruh dimensi pembentuk, kecuali Dimensi Ekonomi Budaya yang mengalami sedikit penurunan.

Tabel 2.45 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2019-2023

| Kode | Dimensi | Bobot Dimensi | Nilai 2019 | Nilai 2020 | Nilai 2021 | Nilai 2022 | Nilai 2023 |
|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| D1 | Ekonomi Budaya | 0,10 | 48,32 | 42,45 | 26,35 | 39,34 | 30,73 |
| D2 | Pendidikan | 0,20 | 77,23 | 75,29 | 74,27 | 76,22 | 78,03 |
| D3 | Ketahanan Sosial Budaya | 0,20 | 75,41 | 75,64 | 70,07 | 73,88 | 75,30 |
| D4 | Warisan Budaya | 0,25 | 45,91 | 48,00 | 47,47 | 51,75 | 53,02 |
| D5 | Ekspresi Budaya | 0,10 | 36,13 | 36,05 | 22,31 | 25,39 | 26,54 |
| D6 | Budaya Literasi | 0,10 | 61,90 | 65,25 | 56,39 | 61,92 | 63,46 |
| D7 | Gender | 0,05 | 60,24 | 58,82 | 59,20 | 57,91 | 60,03 |
| IPK Provinsi Riau | | | 57,47 | 59,65 | 59,65 | 59,50 | 54,20 |
| IPK Nasional | | | 53,74 | 55,91 | 55,91 | 54,65 | 51,90 |

Sumber Data : Ditjen Kebudayaan - Kemendikbudriek RI

2.2.2.12 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Melayu Riau

Budaya Melayu menjadi ciri khas dari Provinsi Riau yang dihasilkan dalam kehidupan orang-orang Melayu yang mendiami hampir seluruh wilayah Provinsi Riau. Hasil budaya ini membentuk karakter dan jati diri Melayu Riau yang dapat diklasifikasi ke dalam 11 OPK. Perhitungan OPK dilakukan per lima tahun, terakhir dilakukan pada tahun 2018 dimana secara keseluruhan dari hasil pendataan terhadap 11 jenis OPK di Provinsi Riau terdapat 3.810 OPK yang tumbuh dan berkembang di 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Untuk lebih jelas disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.46 Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau Tahun 2018

| No | Obyek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah | Terawat | Kurang/Tidak Terawat |
|-----|---------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 1. | Tradisi Lisan | 160 | 77 | 83 |
| 2. | Manuskrip | 43 | 39 | 4 |
| 3. | Adat Istiadat | 65 | 45 | 20 |
| 4. | Ritus | 273 | 212 | 61 |
| 5. | Pengetahuan Tradisional | 385 | 321 | 64 |
| 6. | Teknologi Tradisional | 189 | 184 | 5 |
| 7. | Kesenian | 370 | 313 | 57 |
| 8. | Bahasa | 74 | 71 | 3 |
| 9. | Permainan Rakyat | 219 | 20 | 199 |
| 10. | Olahraga Tradisional | 44 | 27 | 17 |
| 11. | Cagar Budaya | 1.988 | 1.603 | 385 |
| | Jumlah | 3.810 | 2.617 | 1.193 |

Sumber: Data Olahan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019

2.2.2.13 Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan Cagar Budaya Provinsi Riau

Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya pemajuan kebudayaan telah mengusulkan dan menetapkan warisan budaya baik secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam upaya perlindungan status OPK sebagai bagian dari kebudayaan Melayu Riau. Adapun jumlah penetapan WBTB dan Cagar Budaya selama kurun waktu tersebut serta perbandingan persentasinya terhadap jumlah OPK yang ada, lebih jelas disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.47 Penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya Provinsi Riau Tahun 2016-2020

| No | Uraian | Tahun | | | |
|----|---|--------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | OPK Non Bendawi | 42 OPK | | | |
| | Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) | 57 | 5 | 8 | 2 |
| | - Persentase (%) | 3,12 | 50 | 80 | 40 |
| 2 | OPK Bendawi | 27 OPK | | | |
| | - Penetapan Cagar Budaya | 0 | 22 | 47 | 62 |
| | - Persentase (%) | 0,00 | 1,11 | 2,36 | 2,47 |

Sumber: Data olahan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Penetapan WBTB dan Cagar Budaya di Provinsi Riau bila dibandingkan dari jumlah OPK yang telah tercatat masih sangat rendah. Perlu strategi dan kebijakan yang tepat untuk dapat mendorong pengusulan dan penetapan WBTB dan Cagar Budaya. Upaya dokumentasi dan pengkajian OPK non bendawi serta pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya, merupakan langkah konkret dalam menggesa pengusulan dan penetapan WBTB dan Cagar Budaya di 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

2.2.2.14 Cagar Budaya yang Dilestarikan di Provinsi Riau

Cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Provinsi Riau memiliki berbagai cagar budaya baik bergerak maupun yang tidak bergerak. Adapun jumlah cagar budaya yang sudah dilestarikan di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.48 Persentase Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah cagar budaya yang dilestarikan | 91 | 91 | 91 | 155 | 155 |
| 2 | Total cagar budaya yang dimiliki daerah | 91 | 91 | 91 | 155 | 155 |
| 3 | Persentase yang dilestarikan (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 jumlah cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 91 cagar budaya, dengan seluruh cagar budaya yang dimiliki daerah dilestarikan. Selanjutnya jumlah cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 155 cagar budaya dengan seluruh cagar budaya yang dimiliki daerah dilestarikan.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun. PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Provinsi Riau dalam satu tahun. Unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 sektor yaitu (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estate; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (17) Jasa lainnya.

Kontribusi Provinsi Riau terhadap perekonomian nasional pada tahun 2023 sebesar 5,00 persen sehingga Provinsi Riau menjadi provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia atau PDRB terbesar kedua di luar Pulau Jawa. Nilai PDRB harga berlaku Provinsi Riau periode 2019-2023 mengalami peningkatan pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 8,18% per tahun. Sektor yang memberikan nilai produksi barang dan jasa tertinggi pada tahun 2019 adalah sektor pertambangan dan penggalian senilai Rp184.47 triliun, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi Rp203 triliun dengan rata-rata pertumbuhan 6,11% per tahun. Pada tahun 2023 terjadi perubahan dimana sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan nilai produksi barang dan jasa tertinggi sebesar Rp282.78 triliun dengan pertumbuhan 9,93% per tahun. Sedangkan sektor yang memberikan nilai terendah pada tahun 2019 adalah sektor jasa perusahaan dengan nilai sebesar Rp46,39 milyar dan pada tahun 2023 naik menjadi Rp47,19 milyar dengan pertumbuhan 1,62% per tahun.

Nilai PDRB harga berlaku pada setiap sektor produksi tahun 2023 di Provinsi Riau rata-rata mengalami kenaikan namun, jika berdasarkan harga konstan terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan per tahunnya,

contohnya sektor Pertambangan dan Penggalian. Adapun sektor yang memberikan nilai produksi barang dan jasa tertinggi pada tahun 2019 adalah sektor industri pengolahan senilai Rp194.25 triliun dan meningkat menjadi Rp282.78 triliun pada tahun 2023 dengan pertumbuhan 9,93% per tahun. Sedangkan sektor yang memberikan nilai terendah adalah sektor jasa perusahaan dengan nilai sebesar Rp46,39 milyar pada tahun 2019 kemudian naik menjadi menjadi Rp47,19 milyar pada tahun 2023 dengan kontraksi sebesar 1,62% per tahun.

Untuk menjaga kestabilan pertumbuhan nilai PDRB dapat dilakukan dengan membangun semua sektor dengan baik terutama dengan memperdalam struktur sektor sehingga menghasilkan nilai tambah yang semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya perkembangan nilai dan pertumbuhan PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan menurut lapangan usaha Provinsi Riau dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada beberapa tabel dibawah ini.

Tabel 2.49 Nilai dan Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

| No | Kategori PDRB | PDRB ADHB Lapangan Usaha Tahunan (Milyar Rupiah) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|-----|--|--|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023** | |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 174.297,88 | 194.660,94 | 225.489,33 | 253.079,27 | 269.938,04 | 11,60 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 184.471,87 | 129.020,59 | 165.084,24 | 225.118,96 | 203.007,68 | 6,11 |
| C | Industri Pengolahan | 194.254,53 | 207.301,21 | 235.379,36 | 270.307,27 | 282.789,05 | 9,93 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 546,30 | 628,11 | 655,96 | 776,41 | 830,00 | 11,17 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 83,23 | 84,01 | 88,36 | 93,72 | 102,47 | 5,38 |
| F | Konstruksi | 72.673,62 | 70.553,91 | 75.516,71 | 84.970,04 | 99.415,70 | 8,41 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 81.728,71 | 74.931,46 | 82.995,89 | 97.084,95 | 105.304,32 | 6,97 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 6.905,12 | 5.304,76 | 5.670,42 | 7.343,71 | 8.544,10 | 7,39 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4.196,30 | 3.333,29 | 3.978,27 | 4.521,22 | 4.823,51 | 4,78 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 5.710,94 | 6.420,32 | 6.915,27 | 7.530,84 | 8.192,72 | 9,46 |
| K | Jasa Keuangan dan Asurans | 6.915,54 | 7.170,82 | 7.954,98 | 9.144,24 | 9.692,46 | 8,89 |
| L | Real Estate | 6.866,31 | 7.025,35 | 7.321,90 | 7.992,86 | 8.531,36 | 5,61 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 46,39 | 35,99 | 36,55 | 42,82 | 47,19 | 1,62 |
| O | Administrasi | 11.402,50 | 11.375,33 | 11.562,58 | 12.379,51 | 13.223,71 | 3,82 |

| No | Kategori PDRB | PDRB ADHB Lapangan Usaha Tahunan (Milyar Rupiah) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023** | |
| | Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | | | | | | |
| P | Jasa Pendidikan | 4.223,00 | 4.406,44 | 4.585,18 | 4.832,17 | 5.077,05 | 4,71 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1.636,75 | 1.941,49 | 2.188,00 | 2.287,70 | 2.514,01 | 11,44 |
| R,S T,U | Jasa lainnya | 4.288,54 | 3.405,44 | 3.579,44 | 4.109,70 | 4.438,68 | 1,83 |
| | Jumlah | 760.247,51 | 727.599,47 | 839.002,42 | 991.615,38 | 1.026.472,05 | 8,18 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel 2.50 Nilai dan Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

| No | Kategori PDRB | PDRB ADHK Lapangan Usaha Tahunan (Milyar Rupiah) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|----|--|--|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023** | |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 129.690,41 | 135.124,21 | 140.717,73 | 144.691,04 | 149.361,11 | 3,60 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 85.631,56 | 80.190,79 | 77.687,79 | 78.744,07 | 80.730,23 | -1,40 |
| C | Industri Pengolahan | 153.155,80 | 156.073,85 | 162.436,92 | 170.116,90 | 176.290,06 | 3,58 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 323,17 | 370,41 | 385,54 | 440,82 | 447,20 | 8,62 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 66,47 | 66,95 | 70,26 | 73,41 | 77,47 | 3,92 |
| F | Konstruksi | 42.898,58 | 41.491,52 | 42.630,30 | 44.659,75 | 48.756,79 | 3,35 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 48.418,47 | 42.612,68 | 46.853,89 | 52.427,97 | 55.636,27 | 3,99 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 4.240,48 | 3.204,23 | 3.347,98 | 3.969,95 | 4.300,02 | 1,74 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2.335,94 | 1.841,07 | 2.162,17 | 2.397,73 | 2.498,89 | 2,84 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 4.725,66 | 5.317,97 | 5.704,89 | 6.094,46 | 6.561,69 | 8,58 |
| K | Jasa Keuangan dan Asurans | 4.591,23 | 4.781,68 | 5.028,14 | 5.277,31 | 5.491,87 | 4,58 |
| L | Real Estate | 4.606,62 | 4.695,02 | 4.840,83 | 5.106,22 | 5.307,41 | 3,61 |

| No | Kategori PDRB | PDRB ADHK Lapangan Usaha Tahunan (Milyar Rupiah) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023** | |
| M,N | Jasa Perusahaan | 29,98 | 22,59 | 22,93 | 25,87 | 27,58 | -0,93 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 8.597,34 | 8.309,17 | 8.374,82 | 8.875,52 | 9.354,72 | 2,20 |
| P | Jasa Pendidikan | 2.533,15 | 2.586,21 | 2.672,26 | 2.777,13 | 2.881,48 | 3,28 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1.020,00 | 1.182,51 | 1.318,95 | 1.351,71 | 1.445,97 | 9,23 |
| R,S T,U | Jasa lainnya | 2.742,11 | 2.124,82 | 2.216,44 | 2.503,04 | 2.659,74 | 0,25 |
| | Jumlah | 495.607,05 | 489.995,75 | 506.471,90 | 529.532,97 | 551.828,49 | 2,75 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel 2.51 Kontribusi Pertumbuhan Sektoral dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

| No | LAPANGAN USAHA | Tahun (%) | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020* | 2021 | 2022* | 2023** |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 22,93 | 26,75 | 26,88 | 25,52 | 26,30 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 24,26 | 17,73 | 19,68 | 22,70 | 19,78 |
| C | Industri Pengolahan | 25,55 | 28,49 | 28,05 | 27,26 | 27,55 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| F | Konstruksi | 9,56 | 9,70 | 9,00 | 8,57 | 9,69 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 10,75 | 10,30 | 9,89 | 9,79 | 10,26 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 0,91 | 0,73 | 0,68 | 0,74 | 0,83 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,55 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 0,47 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 0,75 | 0,88 | 0,82 | 0,76 | 0,80 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,91 | 0,99 | 0,95 | 0,92 | 0,94 |
| L | Real Estate | 0,90 | 0,97 | 0,87 | 0,81 | 0,83 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,50 | 1,56 | 1,38 | 1,25 | 1,29 |
| P | Jasa Pendidikan | 0,56 | 0,61 | 0,55 | 0,49 | 0,49 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,22 | 0,27 | 0,26 | 0,23 | 0,24 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 0,56 | 0,47 | 0,43 | 0,41 | 0,43 |
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel 2.52 Kontribusi Pertumbuhan Sektoral dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

| No | LAPANGAN USAHA | Tahun (%) | | | | |
|----|--|-----------|-------|-------|-------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023** |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 26,17 | 27,58 | 27,78 | 27,32 | 27,07 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 17,28 | 16,37 | 15,34 | 14,87 | 14,63 |
| C | Industri Pengolahan | 30,90 | 31,85 | 32,07 | 32,13 | 31,95 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| F | Konstruksi | 8,66 | 8,47 | 8,42 | 8,43 | 8,84 |

| No | LAPANGAN USAHA | Tahun (%) | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023** |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 9,77 | 8,70 | 9,25 | 9,90 | 10,08 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 0,86 | 0,65 | 0,66 | 0,75 | 0,78 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,47 | 0,38 | 0,43 | 0,45 | 0,45 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 0,95 | 1,09 | 1,13 | 1,15 | 1,19 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,93 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| L | Real Estate | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,73 | 1,70 | 1,65 | 1,68 | 1,70 |
| P | Jasa Pendidikan | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,52 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 0,55 | 0,43 | 0,44 | 0,47 | 0,48 |
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

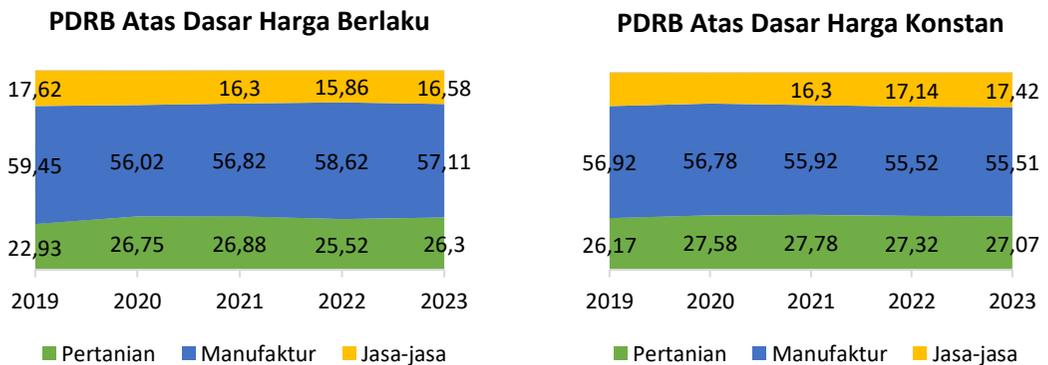
Lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap produksi barang dan jasa pada PDRB ADHB dengan migas pada tahun 2019 adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 25,55% kemudian Kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 27,55%. Dan lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap produksi barang dan jasa PDRB ADHK dengan migas pada tahun 2019 adalah industri pengolahan sebesar 30,90% dan pada tahun 2023 industri pengolahan ini kembali meningkat menjadi 31,95%.

Dilihat dari kontribusi terbesar pada PDRB baik harga berlaku maupun harga konstan diketahui bahwa manufaktur memiliki kontribusi yang sangat besar dalam ekonomi Provinsi Riau. Berdasarkan *International Standard Industrial Classification* (ISIC), manufaktur ini merupakan gabungan dari beberapa sektor yakni Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, serta Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi.

Dalam memperkuat perekonomian Provinsi Riau diperlukan adanya transformasi ekonomi yang merupakan titik kunci untuk meningkatkan produktivitas dengan mengubah struktur perekonomian dari produktivitas rendah ke produktivitas tinggi. Transformasi ini menjadikan sektor jasa lebih banyak

dibandingkan sektor industri. Provinsi Riau masih didominasi oleh sektor manufaktur/industri sedangkan sektor jasa belum terlalu berkembang di Provinsi Riau. Untuk menjadikan Provinsi Riau daerah maju diperlukan penguasaan teknologi, modal, dan skill serta menciptakan lebih banyak *entrepreneur* selain itu diperlukan juga kebijakan pemerintah dalam mengubah perekonomian lebih baik.

Berdasarkan Gambar dibawah menunjukkan bahwa kontribusi PDRB dengan migas ADHB dan ADHK untuk tiga lapangan usaha utama dari tahun 2019 hingga 2023. Kontribusi lapangan usaha pertanian pada PDRB ADHB tahun 2019 sebesar 22,93% kemudian tahun 2023 meningkat menjadi 26,3%. Kontribusi PDRB ADHK lapangan usaha pertanian juga mengalami peningkatan dari 26,17% pada tahun 2019 kemudian tahun 2023 meningkat menjadi 27,07%. Peningkatan tersebut masih dapat dilakukan jika lapangan usaha pertanian dan manufaktur menjadi pendukung utama lapangan usaha jasa-jasa. Secara umum ketiga lapangan usaha utama tersebut akan meningkatkan lapangan usaha lainnya.



Gambar 2.31 Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Utama di Provinsi Riau 2019-2023 (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (Diolah Kembali)

Perekonomian Riau juga ditopang oleh peningkatan permintaan domestik terutama konsumsi rumah tangga dan tetap terjaganya kinerja ekspor. Terjaganya permintaan domestik serta eksternal terhadap komoditas ekspor utama Riau antara lain CPO, pulp dan kertas, serta minyak bumi dapat menjadi stimulus peningkatan daya beli masyarakat serta investasi oleh sektor swasta. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi terbesar PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan menurut pengeluaran berikut ini.



Gambar 2.32 Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Pengeluaran di Provinsi Riau 2010-2023 (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Pada tahun 2010-2015 pengeluaran ekspor impor masih mendominasi kemudian mulai terjadi penurunan hingga tahun 2023. Kenaikan ekspor luar negeri dua tahun terakhir (2021-2022) disebabkan naiknya ekspor nonmigas terutama ekspor pertanian dan industri pengolahan dengan golongan barang ekspor terbesar yakni lemak dan minyak hewan/nabati, berbagai produk kimia, kertas dan karton, serta bubur kayu (pulp). Tiongkok, India, dan Malaysia merupakan negara tujuan ekspor utama di Riau. Komoditas utama yang diekspor ke Tiongkok adalah minyak kelapa sawit dan fraksinya, pulp kayu kimia, serta berbagai produk kimia. Komoditas utama yang diekspor ke India adalah minyak sawit mentah, fraksi cair dari minyak sawit, minyak sawit olahan, dan lain-lain. Ke negara Malaysia, Riau mengekspor bahan bakar minyak, asam lemak monokarboksilat industri, minyak sawit olahan, dan lain-lain.

Tabel 2.53 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Termasuk Minyak Bumi dan Gas Tahun 2010-2023 (Triliun Rupiah)

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/ Kota | Tahun | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|-------|---------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 14 | RIAU | 3,89 | 4,1 | 4,26 | 4,36 | 4,48 | 4,49 | 4,59 | 4,71 | 4,82 | 4,96 | 4,9 | 5,06 | 5,3 | 5,52 | 2,75 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 0,38 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,49 | 0,5 | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 3,38 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 3,89 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 0,85 | 0,92 | 0,91 | 0,88 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | -0,64 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 4,72 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 4,07 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 4,8 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 0,4 | 0,4 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 1,64 |
| 14.08 | Kab. Siak | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,94 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 3,73 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 3,79 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,65 | 0,68 | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 0,78 | 0,82 | 5,41 |
| 14.12 | Kota Dumai | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 4,09 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Sebaran rata-rata pertumbuhan per tahun PDRB harga konstan pada kabupaten/kota di Riau menunjukkan Kota Pekanbaru memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 5,41% per tahun. Sedangkan pertumbuhan terendah terdapat pada Kabupaten Bengkalis sebesar -0,64% per tahun. Walaupun Kabupaten Bengkalis memiliki rata-rata pertumbuhan terendah namun yang memiliki kontribusi PDRB cukup tinggi bagi Provinsi Riau pada tahun 2023 dengan nilai PDRB sebesar 0,78 triliun rupiah setelah Kota Pekanbaru yang memiliki kontribusi PDRB tertinggi yakni sebesar 0,82 triliun rupiah.

Perkembangan PDRB harga konstan terjadi akibat perubahan harga produksi atau indikator produksi. Perubahan ini menyebabkan sumbangan nilai tambah setiap sektor terhadap PDRB juga akan mengalami perubahan. Jika perkembangan setiap sektor tidak proporsional, misalnya beberapa sektor tertentu berkembang lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya, maka dalam jangka panjang akan terjadi perubahan secara nyata sumbangan di setiap sektor yang dikenal sebagai perubahan struktur ekonomi.

Tabel 2.54 Sumbangan Terbesar PDRB Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2010-2023

| Kode | Kabupaten /Kota | Tahun (%) | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 9,73 | 9,6 | 9,79 | 10,16 | 10,23 | 10,32 | 10,38 | 10,41 | 10,36 | 10,47 | 10,49 | 10,5 | 10,53 | 10,53 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 5,35 | 5,33 | 5,57 | 5,77 | 5,93 | 5,74 | 5,83 | 5,9 | 5,97 | 6,03 | 6,09 | 6,14 | 6,15 | 6,16 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 21,95 | 22,43 | 21,47 | 20,27 | 18,97 | 18,41 | 17,56 | 16,81 | 16,15 | 15,41 | 15,07 | 14,66 | 14,33 | 14,13 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 7,22 | 7,33 | 7,62 | 7,97 | 8,3 | 8,45 | 8,65 | 8,81 | 8,92 | 9,03 | 9,18 | 9,27 | 9,34 | 9,24 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 6,12 | 6,13 | 6,09 | 6,27 | 6,49 | 6,63 | 6,68 | 6,77 | 6,86 | 6,93 | 7,17 | 7,21 | 7,2 | 7,24 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 4,1 | 4,15 | 4,25 | 4,39 | 4,55 | 4,63 | 4,75 | 4,88 | 4,96 | 5,06 | 5,2 | 5,28 | 5,31 | 5,3 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 10,28 | 9,74 | 9,73 | 9,72 | 9,92 | 9,95 | 9,93 | 9,82 | 9,57 | 9,37 | 9,38 | 9,23 | 9,06 | 8,94 |
| 14.08 | Kab. Siak | 13,49 | 12,71 | 12,51 | 11,92 | 11,49 | 11,44 | 11,24 | 11,05 | 10,91 | 10,77 | 10,88 | 10,77 | 10,69 | 10,7 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 4,28 | 4,22 | 4,31 | 4,43 | 4,54 | 4,43 | 4,51 | 4,58 | 4,68 | 4,76 | 4,87 | 4,89 | 4,89 | 4,83 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 2,24 | 2,26 | 2,33 | 2,37 | 2,41 | 2,47 | 2,5 | 2,51 | 2,55 | 2,55 | 2,59 | 2,57 | 2,53 | 2,55 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 10,73 | 10,93 | 11,36 | 11,7 | 12,18 | 12,83 | 13,27 | 13,72 | 14,13 | 14,56 | 14,08 | 14,34 | 14,64 | 14,9 |
| 14.12 | Kota Dumai | 4,5 | 4,45 | 4,44 | 4,49 | 4,49 | 4,58 | 4,66 | 4,74 | 4,88 | 5,02 | 5,02 | 5,15 | 5,24 | 5,33 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

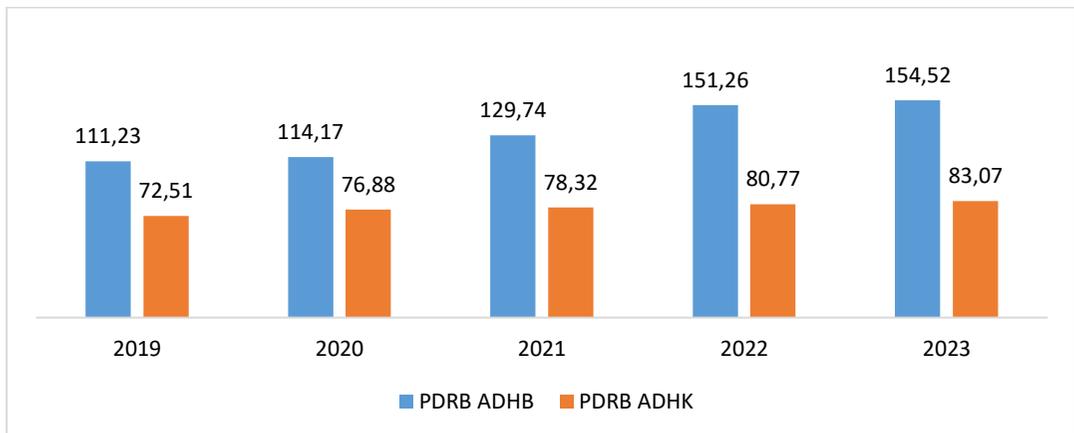
Ket. Tinggi Sedang Rendah

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang memberikan sumbangan PDRB tertinggi untuk Provinsi Riau adalah Kota Pekanbaru didukung oleh tingginya perdagangan besar dan eceran. Kemudian Kabupaten Bengkalis juga memberikan sumbangan yang tinggi melalui minyak bumi dan gas yang ada di Kecamatan Duri. Sedangkan Kepulauan Meranti memberikan sumbangan yang terendah untuk Provinsi Riau sejak tahun 2010 hingga tahun 2023, karena Kepulauan Meranti hanya ditopang oleh sektor pertanian.

2.3.1.2 PDRB Per Kapita

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang akan meningkatkan PDRB per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat dari besarnya kenaikan PDRB per kapita penduduk. Struktur perekonomian Provinsi Riau telah bergeser sejak tahun 2014 dari sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor industri pengolahan.

Pergeseran kontribusi tersebut mempengaruhi penurunan nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian, namun tidak mempengaruhi terhadap nilai PDRB ADHB dan ADHK yang tetap mengalami kenaikan hal yang sama juga terhadap PDRB ADHB dan ADHK per kapita penduduk Provinsi Riau. PDRB ADHB per kapita meningkat dari tahun 2019-2023 yaitu Rp111,23 juta per kapita tahun 2019 kemudian meningkat menjadi Rp154,52 juta per kapita tahun 2023. Sementara PDRB ADHK per kapita per tahun selama periode 2019-2023, naik dari Rp72,51 juta tahun 2019 meningkat menjadi Rp83,07 juta per kapita tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.33 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Riau Tahun 2019-2023 (Rp. Juta)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Periode tahun 2019-2023, PDRB ADHK per kapita kabupaten/kota yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 8,33% per tahun sedangkan terendah terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar -1,16% per tahun. Periode yang sama, PDRB ADHB per kapita dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Rokan Hulu sebesar

16,14% dan terendah terjadi di Kabupaten Bengkalis sebesar 5,00%. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum perkembangan PRDB per kapita Provinsi Riau mengalami kenaikan, sehingga dapat diindikasikan bahwa tingkat pembangunan dan kemakmuran di Provinsi Riau mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.55 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2019-2023 (Juta Rp)

| Kode | Kabupaten/ Kota | Tahun | | | | | | | | | | Pertumbuhan/ tahun (%) | |
|-----------|------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|-------------|
| | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | ADHK | ADHB |
| | | ADHK | ADHB | | |
| 14 | RIAU | 72,51 | 111,23 | 76,88 | 114,17 | 78,32 | 129,74 | 80,77 | 151,26 | 83,07 | 154,52 | 3,47 | 8,76 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 60,73 | 90,43 | 61,40 | 87,17 | 62,39 | 101,40 | 64,32 | 119,44 | 65,96 | 121,37 | 2,09 | 8,03 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 68,94 | 96,00 | 67,42 | 95,93 | 69,18 | 106,18 | 71,37 | 118,84 | 73,50 | 122,20 | 1,64 | 6,34 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 136,06 | 250,07 | 130,95 | 203,16 | 130,19 | 244,87 | 131,35 | 304,61 | 133,31 | 288,31 | -0,49 | 5,20 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 62,38 | 87,35 | 68,64 | 99,28 | 70,98 | 110,90 | 73,81 | 124,22 | 75,28 | 129,26 | 4,86 | 10,36 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 72,28 | 100,47 | 90,56 | 130,72 | 92,41 | 145,72 | 94,87 | 163,05 | 97,74 | 172,62 | 8,26 | 14,84 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 36,93 | 49,85 | 45,56 | 64,53 | 47,07 | 74,22 | 48,71 | 86,02 | 49,99 | 89,13 | 8,19 | 15,99 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 66,25 | 106,42 | 72,39 | 106,89 | 72,44 | 124,19 | 73,28 | 146,80 | 74,28 | 142,69 | 2,96 | 8,01 |
| 14.08 | Kab. Siak | 110,99 | 170,76 | 116,94 | 168,91 | 117,68 | 193,40 | 120,36 | 227,50 | 123,82 | 230,42 | 2,79 | 8,08 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 73,64 | 99,39 | 71,43 | 100,87 | 73,21 | 114,65 | 75,83 | 131,36 | 77,16 | 137,87 | 1,21 | 8,67 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 67,55 | 98,38 | 61,75 | 87,96 | 62,60 | 101,51 | 63,97 | 118,66 | 66,42 | 120,91 | -0,30 | 5,90 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 64,36 | 105,89 | 70,30 | 117,66 | 73,01 | 127,21 | 77,10 | 143,75 | 80,91 | 157,38 | 5,91 | 10,43 |
| 14.12 | Kota Dumai | 82,14 | 119,45 | 78,05 | 115,22 | 81,37 | 124,69 | 85,39 | 138,76 | 89,39 | 149,08 | 2,23 | 5,85 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau

2.3.1.3 Indeks Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau merupakan model pembangunan yang menyinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung”. Strategi Ekonomi Hijau ini diharapkan dapat membantu Indonesia menjadi salah satu negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Dalam implementasinya, Ekonomi Hijau diharapkan dapat mendukung promosi investasi hijau, penyediaan modal dan infrastruktur berkelanjutan, serta lapangan kerja dan keterampilan yang layak untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan serta pertumbuhan ekonomi. Indeks Ekonomi Hijau nasional ini terdiri dari 16 (enam belas) indikator di bawah 3 (tiga)

pilar, yaitu pilar lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ke-16 indikator tersebut antara lain luas tutupan hutan, bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) primer, sampah terkelola, penurunan emisi kumulatif, penurunan tutupan lahan gambut, intensitas emisi, intensitas energi final, GNI/kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja sektor industri, produktivitas tenaga kerja sektor jasa, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 2.56 Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Riau Tahun 2015-2023

| Uraian | Tahun | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Indeks Ekonomi Hijau | 51,38 | 50,45 | 54,02 | 51,5 | 50,72 | 50,03 | 51,77 | 50,99* | 50,88* |

Sumber: Bappenas, 2024

*Angka proyeksi dari data realisasi 2015-2021

Indeks ekonomi hijau Provinsi Riau tahun 2018-2021 berfluktuatif. Indeks ekonomi hijau tahun 2021 sebesar 51,77, angka ini meningkat sebesar 3,5% dari tahun 2020. Beberapa parameter yang sudah sangat baik (nilai 75-100) diantaranya tingkat pengangguran, angka harapan hidup, produktivitas perikanan budidaya, produktivitas tenaga kerja sektor industri, intensitas energy final dan kualitas udara pada parameter NO₂. Sedangkan parameter yang berada dalam kategori kurang (nilai 0-25) antara lain kualitas air permukaan pada parameter BOD, persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline, produktivitas padi dan produktivitas tenaga kerja sektor jasa. Hal yang perlu menjadi catatan untuk indikator ini adalah beberapa parameter dalam tujuh tahun terakhir berada pada kategori kurang, seperti: bauran energi, kualitas air permukaan, persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline, produktivitas padi dan produktivitas tenaga kerja sektor jasa. Indeks ekonomi hijau Provinsi Riau tahun 2022 dan 2023 diproyeksi dari data realisasi tahun 2015-2021, sehingga diperoleh angka proyeksi tahun 2022 sebesar 50,99 poin dan tahun 2023 sebesar 50,88 poin.

2.3.1.4 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/*Prevalence of Undernourishment* (PoU) merupakan proporsi populasi penduduk yang mengalami

ketidacukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energy di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan.

Tabel 2.57 Prevalence of Undernourishment (PoU) Provinsi Riau Tahun 2019-2023

| Uraian | Tahun | | | | | Pertumbuhan (%) |
|---|-------|------|-------|-------|-------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| <i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i> | 8,32 | 9,16 | 10,61 | 15,12 | 12,33 | 12,48 |

Sumber: BAPANAS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, PoU Provinsi Riau tahun 2023 sebesar 12,33, berada pada peringkat 12 se-Indonesia, dengan jumlah penduduk yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan sebesar 895.700 jiwa, dimana besaran PoU tertinggi berada di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 17,06%, dan terendah berada di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 9,32%. Secara umum kabupaten/kota di Provinsi Riau mengalami peningkatan pertumbuhan PoU, dengan pertumbuhan terbesar berada di Kabupaten Pelalawan dan yang terkecil di Kabupaten Bengkalis. PoU kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.58 Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019-2023

| Kode | Kabupaten /Kota | PoU(%) | | | | | Pertumbuhan (%) | Jumlah Penduduk Undernourished (Jiwa) |
|------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------------|---------------------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 1406 | Kampar | 7,99 | 9,34 | 10,52 | 14,69 | 12,01 | 12,74 | 129.027 |
| 1402 | Indragiri Hulu | 8,07 | 9,11 | 10,8 | 15,22 | 12,31 | 13,31 | 70.633 |
| 1408 | Bengkalis | 10,07 | 9,45 | 12 | 15,75 | 12,77 | 8,29 | 91.831 |
| 1403 | Indragiri Hilir | 11,53 | 13,91 | 14,1 | 22,03 | 17,06 | 13,92 | 145.550 |
| 1404 | Pelalawan | 5,56 | 7,14 | 9,08 | 14,42 | 10,96 | 22,63 | 59.262 |
| 1407 | Rokan Hulu | 6,98 | 9,64 | 9,78 | 14,58 | 9,32 | 13,16 | 84.970 |
| 1409 | Rokan Hilir | 8,6 | 8,24 | 10,19 | 15,93 | 12,62 | 13,77 | 104.869 |
| 1405 | Siak | 7,4 | 7,02 | 8,75 | 13,07 | 10,33 | 12 | 62.433 |
| 1401 | Kuantan Singingi | 9,56 | 10,87 | 9,02 | 15,8 | 13,75 | 14,72 | 47.567 |
| 1410 | Kep. Meranti | 9,74 | 10,41 | 14,51 | 18,81 | 15,95 | 15,19 | 40.172 |
| 1471 | Pekanbaru | 7,42 | 7,51 | 10,11 | 11,81 | 11,75 | 13,03 | 119.014 |
| 1473 | Dumai | 8,32 | 8,35 | 9,59 | 12,58 | 12,42 | 11,27 | 41.752 |

Sumber: BAPANAS, 2024

2.3.1.5 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan menunjukkan seberapa besar keragaman konsumsi penduduk Riau, karena semakin beragam konsumsi penduduk memperlihatkan tingkat kesehatan penduduk semakin meningkat dan pada akhirnya dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan. Dari tabel dapat dilihat bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH) penduduk Riau tahun 2018–2019 mengalami peningkatan, namun tahun 2020-2021 mengalami penurunan dan tahun 2022 mengalami peningkatan kembali sebesar 5,3 poin. Rata-rata secara keseluruhan terjadi peningkatan skor PPH, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.59 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018-2023

| Kode | Kabupaten/Kota | Tahun | | | | | |
|-----------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
| 14 | RIAU | 84,66 | 86,31 | 85,50 | 84,10 | 89,40 | 88,90 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 85,5 | 86,1 | 86,1 | 86,2 | 91,9 | 90,4 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 86 | 88,7 | 87 | 84,2 | 82,7 | 92,7 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 79,7 | 82,4 | 82,5 | 83 | 88,3 | 89,7 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 81,5 | 86,4 | 85 | 81 | 81,9 | 85,3 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 86,2 | 87,8 | 86 | 84,6 | 92,1 | 90,7 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 91,3 | 94,7 | 90,5 | 81,9 | 88,8 | 91,8 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 86,6 | 87,4 | 86 | 85,2 | 92,7 | 81,4 |
| 14.08 | Kab. Siak | 87,5 | 90,5 | 90,5 | 85,4 | 91,8 | 93,8 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 81,2 | 84,9 | 84,9 | 84,1 | 90,7 | 89,4 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 83,5 | 77,2 | 80 | 77,7 | 81,3 | 86 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 85 | 87,2 | 85 | 81,8 | 85,6 | 83,1 |
| 14.12 | Kota Dumai | 81,9 | 82,4 | 82,5 | 82,9 | 88,6 | 87,9 |

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, Tahun 2024 (*Angka Sementara)

2.3.1.6 Perkembangan Koperasi

Koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Untuk melihat aktivitas koperasi dapat dilihat dari koperasi aktif, yaitu koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir

secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

Pemerintah Provinsi Riau melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk memperkuat peran koperasi dalam perekonomian, meningkatkan kualitas manajemen, dan memperluas akses serta partisipasi masyarakat dalam koperasi. Selain itu penguatan regulasi, pendidikan, dukungan finansial, pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas, dan kolaborasi juga sangat diperlukan. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan koperasi dapat berkembang lebih baik, berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya dan masyarakat secara umum. Perkembangan koperasi di Provinsi Riau dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.60 Perkembangan Koperasi di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

| No | Koperasi | Perkembangan | | | | | Rata-rata pertumbuhan per tahun |
|----|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Jumlah Koperasi | 5.227 | 5.385 | 5.630 | 5.871 | 6.013 | 4,04 |
| 2 | Koperasi Aktif | 2.946 | 3.130 | 3.248 | 3.166 | 3.220 | 3,41 |
| 3 | Anggota | 342.198 | 246.072 | 313.939 | 308.159 | 341.622 | 3,01 |
| 4 | Modal Sendiri (Rp. Juta) | 5.383.714,37 | 1.249.202,63 | 1.558.690,60 | 2.162.747,43 | 2.586.908,11 | 1,69 |
| 5 | Modal Luar (Rp. Juta) | 1.438.191,34 | 1.464.123,39 | 1.779.978,99 | 2.444.445,95 | 3.007.038,22 | 18,57 |
| 6 | Volume Usaha (Rp. Juta) | 3.113.316,84 | 1.882.987,75 | 1.931.247,89 | 2.119.578,08 | 3.281.777,84 | 8,25 |
| 7 | SHU (Rp. Juta) | 200.779,40 | 114.635,42 | 157.600,61 | 256.579,33 | 323.014,20 | 20,51 |

Sumber: *Online Data System (ODS) Kemenkop UKM RI Tahun, 2023*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah koperasi dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,04% per tahun dengan perkembangan koperasi aktif juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,41% per tahun, dengan jumlah koperasi aktif yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 888 koperasi atau 27,87% (sumber: Kementerian Koperasi) yang menjalankan manajemen perkoperasian sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dilihat dari dua tahun terakhir peningkatan jumlah koperasi tidak diikuti dengan peningkatan jumlah koperasi aktif atau terjadi peningkatan terhadap koperasi tidak aktif sebesar 13,56%.

Terhadap modal sendiri terjadi penurunan sebesar 1,69% per tahun, penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 diindikasikan karena dampak dari pandemi Covid-19. Namun terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) berfluktuatif dengan persentase peningkatan per tahun sebesar 20,51%.

Melihat perkembangan koperasi di Provinsi Riau saat ini dan potensi sumber daya alam yang mendukung aktivitas perkoperasian, maka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kelompok komoditi unggulan Provinsi Riau menjadi tantangan dan potensi sendiri untuk ditingkatkan.

Pertumbuhan koperasi yang ada di Provinsi Riau dapat dilihat juga sebarannya berdasarkan kabupaten/kota, dimana jumlah anggota, modal, volume usaha dan Sisa Hasil Usaha per tahun dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini.

Tabel 2.61 Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

| Kode | Kabupaten / Kota | Kinerja Koperasi | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | Jumlah Koperasi | Jumlah Koperasi Aktif | Anggota | Modal Sendiri (Milyar Rp) | Modal Luar (Milyar Rp) | Volume Usaha (Milyar Rp) | SHU (Milyar Rp) |
| 14.01 | Kab. Kampar | 559 | 360 | 50.316 | 243,12 | 87,6 | 410,02 | 20,35 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 286 | 146 | 39.163 | 720,46 | 486,19 | 364,02 | 64,13 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 1.003 | 323 | 25.701 | 30,66 | 344,95 | 24,17 | 3,22 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 377 | 241 | 5.431 | 42,89 | 13,79 | 75,3 | 3,02 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 265 | 214 | 23.462 | 90,68 | 168,71 | 141,89 | 11,49 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 319 | 154 | 9.112 | 37,5 | 60,3 | 62,85 | 5,12 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 442 | 394 | 35.582 | 86,79 | 144,75 | 178,38 | 14,23 |
| 14.08 | Kab. Siak | 325 | 167 | 16.188 | 195,26 | 79,8 | 234,15 | 37,08 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 233 | 140 | 25.047 | 104,07 | 114,65 | 122,61 | 10,19 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 292 | 66 | 1.001 | 3 | 4,83 | 38,65 | 4,46 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 1.150 | 521 | 22.715 | 241,26 | 716,21 | 144,13 | 21,48 |
| 14.12 | Kota Dumai | 283 | 175 | 9.261 | 72,66 | 22,85 | 146 | 12,71 |
| Binaan Provinsi | | 212 | 163 | 39.807 | 257,28 | 195,53 | 165,02 | 48,30 |
| Binaan Nasional | | 125 | 122 | 5.373 | 37,13 | 2,30 | 12,38 | 0,81 |
| Jumlah | | 5.871 | 3.186 | 308.159 | 2.162,75 | 2.444,45 | 2.119,58 | 256,58 |

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau

Kabupaten/kota dengan jumlah koperasi terbanyak di Provinsi Riau terdapat di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 1.150 koperasi, diikuti oleh Kabupaten Bengkalis sebanyak 1.003 koperasi, sedangkan koperasi aktif terbanyak di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hilir. Volume usaha terbesar yang menandakan aktivitas koperasi terdapat di Kampar dan Indragiri Hulu dengan jumlah koperasi aktif masing-masing sebanyak 360 dan 146 koperasi.

2.3.1.7 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diklasifikasikan tersendiri berdasarkan modal usaha sesuai dengan Pasal 35 (ayat 3) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, dimana usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha sampai dengan 1 milyar, sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki modal usaha 1 milyar sampai 5 milyar. Selanjutnya usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memiliki modal usaha 5 milyar sampai 10 milyar. Perkembangan UMKM di Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.62 Perkembangan UMKM di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

| No | Investasi | Perkembangan | | | | | Rata-rata pertumbuhan per tahun |
|----|----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Usaha Mikro | 104.774 | 133.684 | 137.128 | 277.869 | 278.342 | 27,63 |
| 2 | Usaha Kecil | 24.660 | 3.257 | 2.565 | 5.891 | 5.909 | 4,77 |
| 3 | Usaha Menengah | 2.321 | 132 | 560 | 701 | 702 | 51,21 |

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2023

Perkembangan UMKM di Provinsi Riau dalam 5 tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi pada Usaha Menengah (51,21%), Usaha Mikro (27,63%) dan Usaha Kecil (4,77%). Jika dibandingkan dengan perkembangan UMKM 2 tahun terakhir di semua kelompok jenis usaha mengalami peningkatan, baik peningkatan kelas jenis usaha maupun penambahan usaha baru.

Sedangkan terhadap usaha yang telah difasilitasi legalitas usahanya melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Riau diantaranya sertifikasi halal sebanyak 41 unit usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB)

sebanyak 110.127 unit usaha dan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sebanyak 51 unit usaha. Legalitas usaha ini dibutuhkan oleh UKM untuk bermitra dengan pengusaha menengah dan besar.

2.3.1.8 Lokasi Kawasan Industri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Sarana dan prasarana yang dimaksud di atas meliputi jalan, pengolahan air bersih dan air limbah terpadu, perumahan, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi, dan sebagainya, sehingga pabrik (disebut dengan perusahaan industri) yang masuk ke kawasan industri akan mendapatkan sarana/prasarana ini. Pembangunan dan pengembangan kawasan industri bertujuan untuk mempercepat penyediaan dan pemerataan pembangunan industri, meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri, serta memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang. Berikut lokasi kawasan industri di Provinsi Riau.

Tabel 2.63 Lokasi Kawasan Industri di Provinsi Riau Tahun 2023

| No | Wilayah Industri | Luas (ha) | Lokasi | Keterangan |
|----|---|-----------|----------------|---|
| 1 | Kawasan Industri Dumai - Pelintung - Lubuk Gaung - Dock Yard - Pelindo (BK) | 1.731 Ha | Kota Dumai | Sudah memiliki Pengelola Pengelola : PT. Kawasan Industri Dumai |
| 2 | Kawasan Industri Tanjung Buton | 600 Ha | Kab. Siak | Sudah memiliki Pengelola; Pengelola PT. Kawasan Industri Tanjung Buton |
| 3 | Kawasan Industri Tenayan Raya | 1.550 Ha | Kota Pekanbaru | Sudah memiliki Pengelola; Pengelola PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru |

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2024

2.3.1.9 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, yang merupakan unsur penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk penenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Pendapatan daerah berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Unsur-unsur pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk melihat realisasi pendapatan Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.64 Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2019-2023 (Ribu-Rupiah)**

| No | Jenis Penerimaan | Tahun | | | | | Pertumbuhan /Tahun (%) |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 3.558.210.585.339,97 | 3.332.148.976.452,57 | 4.050.486.932.385,44 | 4.696.769.079.910,17 | 5.891.605.742.972,21 | 14,15 |
| A | Pajak Daerah | 2.989.749.791.033,00 | 2.783.416.736.343,00 | 3.327.500.336.694,85 | 4.054.918.904.730,36 | 4.412.361.453.766,84 | 10,83 |
| | Pajak Kendaraan Bermotor | 1.129.336.200.214,00 | 1.109.848.684.824,00 | 1.224.094.546.237,00 | 1.317.737.567.028,00 | 1.592.655.758.668,00 | 9,27 |
| | Pajak Kendaraan Di Atas Air | 13.374.300,00 | 0 | 0 | 9.730.650,00 | 10.024.950,00 | |
| | Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan di Atas Air | 802.194.810.924,00 | 558.925.504.891,00 | 887.056.639.195,00 | 1.145.692.491.863,00 | 1.119.636.295.006,00 | 13,82 |
| | Pajak Bahan Bakar KB | 713.227.575.843,00 | 645.163.654.363,00 | 764.782.831.375,85 | 1.045.239.690.323,36 | 1.158.048.093.972,84 | 14,12 |
| | Pajak Air Permukaan | 32.089.318.423,00 | 34.691.079.876,00 | 45.830.123.643,00 | 45.714.182.867,00 | 48.945.378.190,00 | 11,76 |
| | Pajak Rokok | 312.888.511.329,00 | 434.787.812.389,00 | 405.736.196.244,00 | 500.534.972.649,00 | 493.075.927.930,00 | 13,54 |
| B | Retribusi Daerah | 15.741.302.452,00 | 12.474.391.250,00 | 13.790.515.597,00 | 16.684.961.995,00 | 17.145.487.538,50 | 3,39 |
| | Retribusi jasa umum | 1.852.280.000,00 | 1.864.294.150,00 | 2.312.141.000,00 | 2.453.392.000,00 | 2.618.462.500,00 | 9,38 |
| | Retribusi jasa usaha | 13.566.150.452,00 | 10.102.787.100,00 | 11.023.990.297,00 | 13.999.536.345,00 | 13.984.066.788,50 | 2,62 |
| | Retribusi perizinan tertentu | 322.872.000,00 | 507.310.000,00 | 454.384.300,00 | 232.033.650,00 | 542.958.250,00 | 32,94 |
| C | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 118.530.642.555,72 | 88.442.501.751,00 | 117.417.430.069,00 | 101.607.146.246,00 | 948.660.382.439,65 | 206,89 |
| D | Lain-Lain PAD yang Sah | 434.188.849.299,25 | 447.815.347.108,57 | 591.778.650.024,59 | 523.558.066.938,81 | 513.438.419.227,22 | 5,46 |
| 2 | Dana Perimbangan | 5.136.706.027.820,00 | 5.286.397.816.405,00 | 3.451.144.289.446,00 | 4.113.106.484.205,00 | 4.109.295.808.506,00 | -3,18 |
| A | Dana Bagi Hasil Pajak/SDA | - | - | - | 1.664.531.062.715,00 | 1.536.866.672.146,00 | |
| | DBH Pajak | - | - | - | 1.664.531.062.715,00 | 1.536.866.672.146,00 | |
| | DBH Bukan Pajak/SDA | - | - | - | | | |
| B | Dana Alokasi Umum | - | - | 1.455.383.959.000,00 | 1.452.245.879.000,00 | 1.506.286.541.167,00 | |
| C | Dana Alokasi Khusus | - | - | 1.995.760.330.446,00 | 956.328.413.490,00 | 1.044.594.949.193,00 | |
| D | DANA INSENTIF DAERAH (DID) | - | - | - | 40.001.129.000,00 | 21.547.646.000,00 | |
| 3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 8.315.997.000,00 | 3.251.000.000,00 | 7.422.160.004,00 | 8.794.200.000,00 | 9.078.040.000,00 | 22,28 |

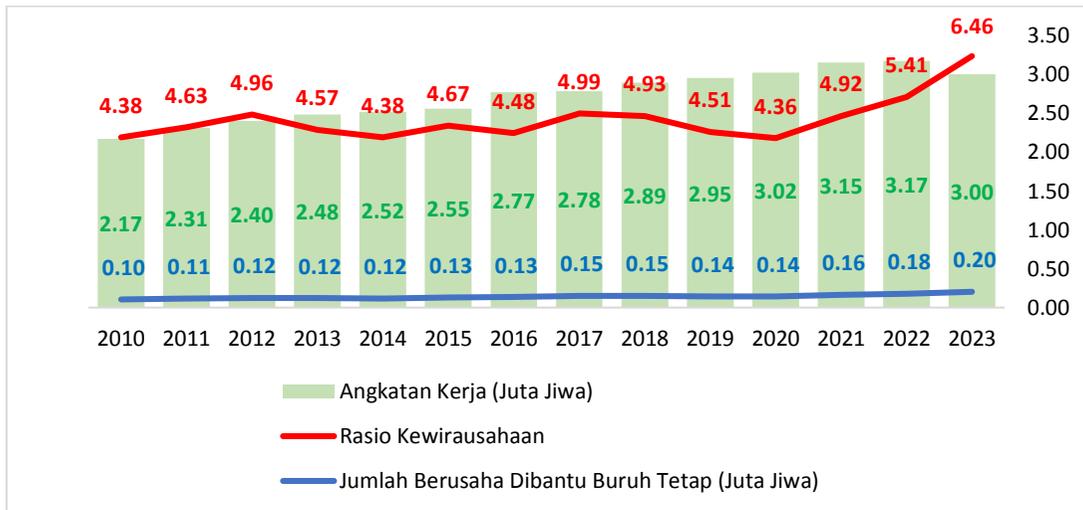
| No | Jenis Penerimaan | Tahun | | | | | Pertumbuhan /Tahun (%) |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | PENDAPATAN HIBAH | - | - | 7.422.160.004,00 | 8.794.200.000,00 | 9.078.040.000,00 | |
| | PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT | - | - | - | 2.780.040.000,00 | 2.857.140.000,00 | |
| | SUMBANGAN PIHAK KETIGA / SEJENIS | - | - | - | 6.014.160.000,00 | 6.220.900.000,00 | |
| Total Pendapatan Daerah | | 8.703.232.610.159,97 | 8.621.797.792.857,57 | 7.509.053.381.835,44 | 8.818.669.764.115,17 | 10.009.979.591.478,20 | 4,28 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019–2023 tumbuh sebesar 14,15% per tahun dengan pertumbuhan tertinggi pada kelompok Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 206,89% per tahun, tingginya rata-rata pertumbuhan ini merupakan kontribusi dari Participating Interest yang direalisasikan tahun 2023. Pertumbuhan tertinggi kedua pada kelompok pajak daerah sebesar 10,83% terhadap total pendapatan asli daerah. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer mengalami penurunan sebesar 3,18% per tahun. Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan tahun 2023 sebesar 58,39%, lebih tinggi dari proporsi dana transfer.

2.3.1.10 Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Dengan peningkatan rasio kewirausahaan, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan dan program yang efektif untuk mendukung pengembangan kewirausahaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja.



Gambar 2.34 Rasio Kewirausahaan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau (Diolah Kembali)

Meningkatnya rasio kewirausahaan di Provinsi Riau dari 4,38 pada tahun 2010 menjadi 6,46 pada 2023. Hal ini didukung oleh meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dan dibantu oleh buruh tetap serta meningkatnya keterampilan dan

pengetahuan dalam berwirausaha. Dukungan dari buruh tetap membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung bagi pengusaha. Dengan adanya tenaga kerja yang terampil dan loyal, pengusaha dapat lebih fokus pada pertumbuhan dan inovasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasio kewirausahaan.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

2.3.2.1 Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen pengukur pendidikan. Indeks pendidikan adalah cerminan dari hasil pembangunan dibidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tercermin didalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu negara. Pendidikan itu penting untuk meningkatkan *human capital*. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Indeks pendidikan digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan sebagai salah satu variabel pembangunan manusia yang merupakan penggabungan dua indikator pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Berikut ini disajikan indeks Pendidikan Provinsi Riau selama tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel 2.65 Indeks Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019-2023

| Kode | Provinsi/Kabupaten/ Kota | Indeks Pendidikan (Poin) | | | | |
|-----------|-----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14 | RIAU | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 69 | 65 | 69 | 69 | 65 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 68 | 69 | 68 | 68 | 69 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 57 | 58 | 57 | 57 | 58 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 63 | 65 | 63 | 63 | 65 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 64 | 65 | 64 | 64 | 65 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 63 | 64 | 63 | 63 | 64 |
| 14.08 | Kab. Siak | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 66 | 67 | 66 | 66 | 67 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 14.12 | Kota Dumai | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |

Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan

Perkembangan Indeks Pendidikan Provinsi Riau periode 2019-2022 mengalami stagnan, selama 5 tahun berturut-turut tidak mengalami peningkatan. Capaian indeks Pendidikan Kabupaten/Kota yang melebihi capaian Provinsi Riau tahun 2023 yakni Kota Pekanbaru (83), Kota Dumai (71), Kabupaten Bengkalis (69) dan Kabupaten Siak (69). Sedangkan capaian indeks Pendidikan dibawah rata-rata provinsi Riau tahun 2023 yakni Kabupaten Indragiri Hilir (58), Kabupaten Meranti (62), Kabupaten Indragiri Hulu (63) Kabupaten Rokan Hilir (64), Kabupaten Rokan Hulu (65), Kabupaten Kampar (65), Kabupaten Pelalawan (65), dan Kabupaten Kuansing (67).

2.3.2.2 Angka Literasi/Numerasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan pada pasal 11 yang menyatakan bahwa kualitas hasil belajar peserta didik mencakup Literasi dan Numerasi. Kemampuan Literasi dianggap sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk kepada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Literasi dan numerasi sangat penting dalam kehidupan modern karena hampir semua aspek kehidupan memerlukan keterampilan ini. Misalnya, untuk memahami instruksi dokter, membaca label makanan, atau mengelola keuangan pribadi seseorang harus memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik. Kemampuan literasi dan numerasi juga sangat penting dalam pendidikan. Siswa yang memiliki keterampilan literasi numerasi yang baik memiliki keunggulan dalam memahami pelajaran dan memecahkan masalah. Oleh karena itu literasi numerasi adalah dua keterampilan dasar yang harus dipelajari dan dikuasai oleh semua orang terutama anak-anak di usia sekolah.

Berikut ini disajikan angka literasi/numerasi Provinsi Riau selama tahun 2021 sampai dengan 2023.

Tabel 2.66 Angka Literasi/Numerasi Provinsi Riau Tahun 2021-2023

| Kelompok Indikator | Capaian (%) | | |
|---------------------------|-------------|-------|-------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kemampuan Literasi | | | |
| SMA | 62,84 | 63,27 | 69,23 |
| SMK | 60,71 | 60,41 | 65,94 |
| SMALB | 57,63 | 57,48 | 64,80 |
| SMPLB | 67,68 | 69,58 | 65,96 |
| SDLB | 57,43 | 57,09 | 69,45 |
| Kemampuan Numerasi | | | |
| SMA | 50,47 | 52,89 | 58,64 |
| SMK | 49,64 | 50,94 | 55,81 |
| SMALB | 58,30 | 54,86 | 59,56 |
| SMPLB | 55,38 | 60,26 | 65,75 |
| SMALB | 48,15 | 52,70 | 58,90 |

Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan Tahun 2024

Rata-rata kemampuan literasi pada setiap jenjang pendidikan di Provinsi Riau masih berkisar pada angka 60 persen pada tahun 2023, sedangkan untuk kemampuan numerasi masih berkisar 50-60 persen dan dilihat dari trend dari tahun ketahun mengalami peningkatan rata-rata 2-4 persen.

2.3.2.3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2019-2023 Provinsi Riau memiliki trend meningkat. Pencapaian rata-rata lama sekolah Provinsi Riau hingga tahun 2023 yaitu 9,32 tahun sudah diatas wajib belajar 9 tahun. Upaya peningkatan rata-rata lama sekolah minimal 9 tahun tetap menjadi prioritas pembangunan sumberdaya manusia di Provinsi Riau ke depannya melalui program pembangunan Pendidikan. Terdapat 7 kabupaten yang perlu mendapatkan prioritas utama dalam peningkatan RLS karena berada di bawah rata-rata RLS Provinsi yaitu kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 2.67 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010 – 2023 (Tahun)

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/ Kota | Tahun | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14 | RIAU | 8,25 | 8,29 | 8,34 | 8,38 | 8,47 | 8,49 | 8,59 | 8,76 | 8,92 | 9,03 | 9,14 | 9,19 | 9,22 | 9,32 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 8,08 | 8,56 | 8,56 | 8,62 | 8,62 | 8,84 | 8,85 | 9,09 | 9,1 | 9,25 | 9,26 | 9,27 | 9,39 | 9,4 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 7,2 | 7,31 | 7,38 | 7,46 | 7,55 | 7,82 | 7,83 | 7,89 | 8,16 | 8,17 | 8,38 | 8,39 | 8,4 | 8,42 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 8,14 | 8,34 | 8,64 | 8,76 | 8,8 | 8,82 | 8,83 | 8,89 | 9,21 | 9,41 | 9,69 | 9,7 | 9,71 | 9,73 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 6,54 | 6,66 | 6,7 | 6,74 | 6,81 | 6,82 | 6,94 | 7,18 | 7,19 | 7,22 | 7,23 | 7,24 | 7,26 | 7,31 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 6,94 | 7,2 | 7,41 | 7,74 | 7,82 | 8,17 | 8,18 | 8,19 | 8,44 | 8,49 | 8,5 | 8,7 | 8,72 | 8,73 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 7,18 | 7,24 | 7,31 | 7,38 | 7,83 | 7,84 | 7,97 | 8,18 | 8,37 | 8,38 | 8,39 | 8,54 | 8,55 | 8,81 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 7,24 | 7,3 | 7,36 | 7,42 | 7,62 | 7,62 | 7,88 | 7,89 | 8,15 | 8,24 | 8,25 | 8,26 | 8,28 | 8,52 |
| 14.08 | Kab. Siak | 8,6 | 8,72 | 8,77 | 8,81 | 9,05 | 9,2 | 9,21 | 9,4 | 9,64 | 9,65 | 9,66 | 9,86 | 9,87 | 9,88 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 7,19 | 7,46 | 7,68 | 7,7 | 8,17 | 8,18 | 8,19 | 8,2 | 8,31 | 8,58 | 8,59 | 8,75 | 8,76 | 8,9 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 6,12 | 6,27 | 6,8 | 7,33 | 7,44 | 7,45 | 7,46 | 7,47 | 7,48 | 7,51 | 7,7 | 7,84 | 7,88 | 7,99 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 10,67 | 10,84 | 10,88 | 10,93 | 10,95 | 10,97 | 11,2 | 11,21 | 11,22 | 11,43 | 11,68 | 11,92 | 11,93 | 11,94 |
| 14.12 | Kota Dumai | 9,36 | 9,42 | 9,48 | 9,54 | 9,56 | 9,57 | 9,58 | 9,67 | 9,84 | 9,85 | 10,07 | 10,14 | 10,15 | 10,16 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Ket. Dibawah capaian provinsi

2.3.2.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada pendidikan Sekolah Menengah diartikan sebagai persentase dari jumlah siswa yang terdaftar di sekolah menengah dibandingkan dengan jumlah total populasi usia sekolah menengah. Perkembangan APK Sekolah Menengah sederajat yang meliputi SMA, SMLB, SMK, Paket C, Salaf Ulya, Bimas non islam pada penduduk usia 16-18 tahun di Provinsi Riau selama tahun ajaran 2018/2019 hingga 2022/2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.68 Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Sederajat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Tahun Ajaran | | | | | Pertumbuhan / Tahun (%) |
|-----------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| | | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 | 2020/ 2021 | 2021/ 2022 | 2022 /2023 | |
| 14 | RIAU | 76,65 | 86,65 | 90,11 | 90,11 | 90,44 | 4,35 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 62,12 | 75,53 | 82,92 | 82,92 | 85,41 | 8,59 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 79,67 | 91,74 | 94,53 | 94,53 | 94,67 | 4,58 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 79,43 | 87,73 | 88,35 | 88,35 | 86,78 | 2,34 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 47,15 | 66,68 | 69,67 | 69,67 | 70,86 | 11,9 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 85,91 | 88,32 | 94,06 | 94,06 | 91,81 | 1,73 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 86,64 | 91,7 | 96,74 | 96,74 | 97,84 | 3,12 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 68,8 | 76,43 | 77,03 | 77,03 | 76,88 | 2,92 |
| 14.08 | Kab. Siak | 87,4 | 93,81 | 96,91 | 96,91 | 98,35 | 3,03 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 86,21 | 94,62 | 96,58 | 96,58 | 85,41 | 0,07 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 69,23 | 86,59 | 76,83 | 76,83 | 76,48 | 3,34 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 94,13 | 98,78 | 107,82 | 107,82 | 108,57 | 3,7 |
| 14.12 | Kota Dumai | 93,82 | 102,78 | 107,1 | 107,1 | 103,38 | 2,57 |

Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan 2018-2023

Selama kurun waktu 2018/2019 hingga 2022/2023 terjadi peningkatan APK jenjang Sekolah Menengah sederajat Provinsi Riau dari 76,65% menjadi 90,44% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,35 persen. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan partisipasi sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Sederajat selama kurun waktu 5 tahun. Bila dilihat sebarannya pada masing-masing kabupaten/kota terdapat 6 kabupaten yang APK Sekolah Menengah Sederajat di bawah capaian Provinsi Riau pada tahun ajaran 2022/2023, yaitu: Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Kampar, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti.

2.3.2.5 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Sederajat

Peningkatan rata-rata lama sekolah juga dipengaruhi oleh peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM). APM yaitu proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka Partisipasi Murni (APM) lebih spesifik dan hanya mencakup usia yang sesuai untuk jenjang pendidikan tersebut.

APM tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar dari kelompok usia yang sesuai untuk pendidikan menengah terdaftar di sekolah menengah. Ini

mengindikasikan bahwa hampir semua individu dalam kelompok usia tersebut mendapatkan akses ke pendidikan menengah. Sedangkan APM rendah menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari kelompok usia yang sesuai terdaftar di sekolah menengah. Ini bisa mengindikasikan adanya masalah dalam akses pendidikan atau kualitas pendidikan yang rendah, yang mungkin mengakibatkan banyak anak usia sekolah menengah tidak bersekolah. Secara rinci angka partisipasi murni sekolah menengah sederajat dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.69 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Sederajat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Tahun Ajaran | | | | | Pertumbuhan / Tahun (%) |
|-----------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| | | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 | 2020/ 2021 | 2021/ 2022 | 2022 /2023 | |
| 14 | RIAU | 63,80 | 56,36 | 66,90 | 66,02 | 66,43 | 1,59 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 58,27 | 47,43 | 57,5 | 61,75 | 64,08 | 3,45 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 64,42 | 55,73 | 69,39 | 67,58 | 67,73 | 2,16 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 62,68 | 56,59 | 69,24 | 64,42 | 62,41 | 0,64 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 47,54 | 33,9 | 49,72 | 51,58 | 50,41 | 4,86 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 65,67 | 63,51 | 66,53 | 66,22 | 67,98 | 0,91 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 70,1 | 64,02 | 65,41 | 69,67 | 72,59 | 1,05 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 54,32 | 48,78 | 59,85 | 54,51 | 54,57 | 0,92 |
| 14.08 | Kab. Siak | 71,82 | 65,67 | 73,05 | 72,41 | 72,82 | 0,59 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 72,49 | 63,44 | 73,01 | 74,52 | 70,78 | -0,09 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 60,07 | 48,33 | 67,16 | 59,5 | 53,32 | -0,59 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 76,51 | 71,57 | 80,67 | 80,35 | 81,77 | 1,91 |
| 14.12 | Kota Dumai | 71,56 | 68,83 | 81,53 | 74,68 | 72,92 | 0,97 |

Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan Tahun 2018-2023

APM Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018/2019 sampai dengan tahun 2022/2023 capaian APM sebesar 63,8 persen menjadi 66,43 persen atau pertumbuhan sebesar 1,59 persen. Kecuali pada tahun 2019/2020 terjadi penurunan terjadi sebesar 56,36 persen. Jika dilihat sebaran Sekolah Menengah Sederajat pada masing-masing kabupaten/kota terdapat 5 kabupaten/kota yang capaian APM dibawah capaian provinsi pada tahun ajaran 2022/2023 antara lain Kabupaten Indragiri Hilir, Kampar, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti. Keadaan ini patut menjadi perhatian serius mengingat kewenangan pendidikan Sekolah Menengah Sederajat sudah menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi.

2.3.2.6 Angka Partisipasi Sekolah

Perkembangan angka partisipasi sekolah Provinsi Riau meningkat dari tahun 2020-2022. Angka partisipasi sekolah di Provinsi Riau secara umum diatas nasional, khususnya pada jenjang SD / sederajat, SMA/ sederajat dan perguruan tinggi. Nilai tertinggi Angka Partisipasi sekolah berada pada jenjang umur 7-12 tahun atau tingkat SD/Sederajat. Angka partisipasi sekolah terendah berada pada jenjang umur 19-24 tahun atau tingkat pendidikan tinggi, yang mengindikasikan bahwa hanya 28.35-28,65 % yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Secara rinci angka partisipasi sekolah di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.70 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Riau dan Indonesia Sesuai Jenjang Pendidikan Tahun 2021-2023

| Angka Partisipasi Sekolah | Usia (Tahun) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 7-12 | | | 13-15 | | | 16-18 | | | 19-24 | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| RIAU | 99,65 | 99,61 | 95,65 | 95,66 | 95,72 | 95,89 | 77,81 | 77,32 | 78,15 | 28,79 | 28,65 | 30,07 |
| INDONESIA | 99,19 | 99,10 | 99,16 | 95,99 | 95,92 | 96,10 | 73,09 | 73,15 | 73,42 | 26,01 | 25,99 | 26,85 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan angka partisipasi sekolah Provinsi Riau meningkat dari tahun 2021-2023. Angka partisipasi sekolah di Provinsi Riau secara umum diatas nasional, khususnya pada jenjang SD/ sederajat (usia 7-12 tahun), SMP/ sederajat (usia 13-15 tahun) SMA/ sederajat (usia 16-18 tahun) dan perguruan tinggi (usia 19-24 tahun). Nilai tertinggi Angka Partisipasi sekolah berada pada jenjang umur 7-12 atau tingkat SD/Sederajat. Angka partisipasi sekolah terendah berada pada jenjang umur 19-24 tahun atau tingkat pendidikan tinggi. Sedangkan Angka partisipasi sekolah jenjang SMP/ sederajat lebih tinggi dibandingkan dengan angka partisipasi sekolah jenjang SMA, artinya banyak anak yang tamatan SMP tidak melanjutkan lagi ke sekolah jenjang SMA, begitu juga anak yang jenjang SMA/ sederajat banyak tidak melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Hal tersebut bisa disebabkan beberapa faktor, antara lain anak tersebut sudah bekerja membantu orang tua, menikah pada usia sekolah atau sekolah yang tidak dapat diakses.

2.3.2.7 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat literasi di masyarakat suatu daerah atau negara. Literasi dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup keterampilan lain yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari. IPLM biasanya digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pendidikan dan pembangunan dalam meningkatkan keterampilan literasi masyarakat.

Pencapaian nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Riau sebesar 66,88 dan masuk ke dalam kategori sedang. Empat kabupaten/kota dengan pencapaian IPLM di atas Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru 70,77; Kabupaten Siak 70,06; Kota Dumai 68,42; Kabupaten Pelalawan 66,96. Sedangkan, tiga kabupaten/kota yang terendah yaitu Kabupaten Indragiri Hilir 48,99; Kabupaten Rokan Hilir 50,36; dan Kabupaten Rokan Hulu 52,69.

Tabel 2.71 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Unit Pengelola Literasi Masyarakat (UPLM) | | | | | | | Skor IPLM |
|-----------|-----------------------------|---|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|--------------|
| | | UPLM 1 | UPLM 2 | UPLM 3 | UPLM 4 | UPLM 5 | UPLM 6 | UPLM 7 | |
| 14 | RIAU | 0,3518 | 0,2753 | 1 | 0,0543 | 1 | 1 | 1 | 66,88 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 0,3344 | 0,2978 | 1 | 0,0199 | 0,3168 | 1 | 1 | 56,7 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 0,2912 | 0,251 | 1 | 0,0524 | 0,6669 | 1 | 1 | 60,88 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 0,2976 | 0,1213 | 0,3045 | 0,0467 | 1 | 1 | 1 | 53,86 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 0,1832 | 0,0766 | 0,8029 | 0,037 | 0,2396 | 1 | 1 | 48,99 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 0,3252 | 0,5023 | 1 | 0,0915 | 0,7684 | 1 | 1 | 66,96 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 0,2608 | 0,2457 | 0,1416 | 0,0402 | 1 | 1 | 1 | 52,69 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 0,1416 | 0,2422 | 0,1063 | 0,0349 | 1 | 1 | 1 | 50,36 |
| 14.08 | Kab. Siak | 0,6055 | 0,2804 | 1 | 0,0871 | 0,9314 | 1 | 1 | 70,06 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 0,4915 | 0,281 | 1 | 0,0328 | 0,7294 | 1 | 1 | 64,78 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 0,2323 | 0,3011 | 1 | 0,0632 | 0,8271 | 1 | 1 | 63,19 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 0,7958 | 0,4211 | 1 | 0,0856 | 0,6515 | 1 | 1 | 70,77 |
| 14.12 | Kota Dumai | 0,5065 | 0,2299 | 1 | 0,0533 | 1 | 1 | 1 | 68,42 |

Sumber : Perpustakaan Nasional RI Tahun 2023

Ket. **Dibawah** capaian provinsi

2.3.2.8 Indeks Literasi Digital

Literasi digital sangat penting dalam era digital saat ini karena teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan efektif untuk mencari, menganalisis, mengevaluasi dan menyebarkan informasi. Pengukuran dilakukan menggunakan empat pilar, yaitu kecakapan digital (digital skills), etika digital (digital ethics), keamanan digital (digital safety), dan budaya digital (digital culture). Indeks Digital Provinsi Riau pada tahun 2022 sebesar 3,33 poin dan masih dibawah rata-rata nasional sebesar 3,54 poin. Adapun keempat faktor pembentuk digital Riau adalah (1) Digital skills atau indikator kecakapan digital 3,55 poin. Pilar ini mengukur kecakapan pengguna internet dalam menggunakan komputer atau gawai, mengunggah/mengunduh data, mengecek ulang informasi dari internet, dan sebagainya. (2) Digital budaya atau indikator budaya digital 3,71 poin. Pilar ini mengukur kebiasaan pengguna internet seperti mencantumkan nama penulis/pengunggah asli saat melakukan reposting dan sebagainya. (3) Digital Etika atau indikator etika digital 3,55 poin. Pilar ini mengukur kepekaan pengguna internet dalam mengunggah konten tanpa izin, berkomentar kasar di media sosial, menghargai privasi di media sosial, dan sebagainya. (4) Digital Safety atau indikator keamanan 2,84 poin. Pilar ini mengukur kemampuan pengguna internet dalam mengidentifikasi dan menghapus spam/malware/virus di komputer atau gawai pribadi, kebiasaan mencadangkan data, perlindungan data pribadi.

2.3.2.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki dan Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK ini merupakan indikator yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/provinsi/ kabupaten/kota. Interpretasinya, semakin tinggi TPAK kota, menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa suatu perekonomian di kota tersebut. Di Provinsi Riau TPAK laki-laki lebih besar bila dibanding perempuan dengan perbandingan 2 : 1, dan perkembangannya meningkat setiap tahunnya. Secara rinci perkembangan TPAK laki - laki dan perempuan dari tahun 2021 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.72 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021-2023

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Jenis Kelamin (%) | | | | | |
|-----------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Laki-Laki | | | Perempuan | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14 | RIAU | 82,15 | 83,59 | 83,77 | 47,14 | 43,28 | 44,27 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 83,13 | 82,19 | 81,83 | 42,2 | 39,82 | 36,42 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 83,7 | 85,46 | 85,43 | 52,51 | 45,63 | 48,74 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 83,32 | 82,04 | 82,13 | 49,48 | 41,07 | 40,41 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 85,4 | 86,03 | 82,19 | 50,85 | 40,79 | 37,61 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 86,9 | 87,77 | 89,76 | 50,22 | 39,35 | 46,5 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 85,13 | 84,93 | 88,48 | 46,94 | 42,22 | 44,06 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 83,1 | 84,36 | 86,64 | 37,35 | 43,79 | 44,29 |
| 14.08 | Kab. Siak | 83,99 | 88,01 | 86,86 | 44,19 | 42,4 | 43,19 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 82,24 | 83,04 | 82,17 | 51,34 | 41,64 | 45,24 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 79,46 | 81,14 | 82,54 | 51,2 | 47,93 | 47,58 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 74,3 | 78,59 | 78,66 | 48,54 | 48,81 | 53,5 |
| 14.12 | Kota Dumai | 79,6 | 84,42 | 84,99 | 49,55 | 45,64 | 46,19 |

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2024

2.3.2.10 Tenaga Kerja Asing

Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah tiap orang bukan warga Negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada 2 (dua) aspek yang menjadi dasar pertimbangan dalam mempekerjakan TKA di Indonesia, yaitu:

- Aspek manfaat (prosperity): mempekerjakan TKA harus membawa manfaat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui alih teknologi dan alih keahlian, mendorong investasi dan perluasan lapangan usaha, serta penyediaan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.
- Aspek keamanan (security): kebijakan penggunaan TKA terkait kebijakan lalu lintas orang asing. Masuknya tenaga kerja asing harus selektif dan dilaksanakan melalui kebijakan satu pintu dengan tetap memperhatikan kepentingan keamanan Negara.

Penggunaan TKA dilaksanakan melalui Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang bersifat wajib. Adapun kewajiban Pemberi Kerja TKA dalam mempekerjakan TKA antara lain menunjuk TKI sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA,

melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA, memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA, dan memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir. Jumlah TKA yang mengurus izin bekerja di Provinsi Riau dalam kurun waktu tahun 2008 - 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Gambar 2.35 Jumlah Tenaga Kerja Asing yang Mengurus Izin Kerja di Provinsi Riau Tahun 2008-2023

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja asing yang mengurus izin kerja di Provinsi Riau mengalami penurunan dari 617 orang pada tahun 2008 menjadi 204 orang pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan investasi yang membutuhkan tenaga kerja asing semakin berkurang dan masih terdapat perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja asingnya.

2.3.2.11 Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum

produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan Provinsi Riau tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Rasio ketergantungan Provinsi Riau tahun 2023 sebesar 46,03%, ini berarti bahwa untuk setiap 100 orang usia kerja, ada sekitar 46 orang yang berada dalam kelompok usia bergantung (baik usia muda maupun usia tua). Rasio ini memberikan gambaran tentang beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja untuk mendukung mereka yang tidak aktif secara ekonomi. Hampir setengah dari populasi usia kerja harus menanggung beban dari mereka yang tidak aktif secara ekonomi. Ini dapat mencerminkan tingkat ketergantungan yang moderat, di mana penduduk usia kerja memiliki tanggung jawab untuk mendukung populasi yang lebih muda dan lebih tua.

Tabel 2.73 Rasio Ketergantungan Provinsi Riau Tahun 2023

| Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Distribusi (%) |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 0 – 4 | 318.806 | 304.059 | 622.865 | 9,25 |
| 5 – 9 | 311.729 | 298.453 | 610.182 | 9,06 |
| 10 – 14 | 303.698 | 287.383 | 591.081 | 8,78 |
| 15 – 19 | 293.483 | 275.089 | 568.572 | 8,44 |
| 20 – 24 | 293.570 | 279.526 | 573.096 | 8,51 |
| 25 – 29 | 290.498 | 281.806 | 572.304 | 8,50 |
| 30 – 34 | 281.507 | 272.862 | 554.369 | 8,23 |
| 35 – 39 | 267.099 | 260.499 | 527.598 | 7,83 |
| 40 – 44 | 248.680 | 240.255 | 488.935 | 7,26 |
| 45 – 49 | 226.091 | 216.079 | 442.170 | 6,56 |
| 50 – 54 | 189.994 | 180.058 | 370.052 | 5,49 |
| 55 – 59 | 152.166 | 143.125 | 295.291 | 4,38 |
| 60 – 64 | 114.200 | 106.788 | 220.988 | 3,28 |
| 65-69 | 77.279 | 72.266 | 149.545 | 2,22 |
| 70-74 | 43.958 | 42.062 | 86.020 | 1,28 |
| 75+ | 29.741 | 32.520 | 62.261 | 0,92 |
| Jumlah Penduduk | 3.442.499 | 3.292.830 | 735.329 | 100,00 |
| Usia Produktif | 2.357.288 | 2.170.210 | 527.498 | 67,22 |
| Usia Belum Produktif | 934.233 | 874.644 | 808.877 | 26,86 |
| Usia Tidak Produktif | 150.978 | 124.012 | 274.990 | 4,08 |
| Usia Non Produktif (BP+TP) | 1.085.211 | 998.656 | 1.083.867 | 30,94 |

| Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Distribusi (%) |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Persentase Usia Produktif | 68,48 | 65,91 | 67,22 | 0,00 |
| Persentase Usia Belum Produktif | 27,14 | 26,56 | 26,86 | 0,00 |
| Persentase Usia Tidak Produktif | 4,39 | 3,77 | 4,08 | 0,00 |
| Rasio Ketergantungan | 46,04 | 46,02 | 46,03 | 0,00 |

Sumber: BPS Provinsi Riau

2.3.2.12 Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan

Salah satu komponen untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia adalah upaya meningkatkan pelayanan kesehatan. Berkenaan dengan itu pembangunan bidang kesehatan menjadi prioritas baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan kesehatan merupakan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar, artinya wajib diselenggarakan oleh semua kabupaten/kota dan harus menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran. Salah satu upaya meningkatkan pelayanan kesehatan adalah meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang indikatornya adalah semakin baiknya rasio antara sarana dan prasarana dengan jumlah penduduk. Adapun perkembangan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan rasio pelayanan kesehatan di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.74 Jumlah Fasilitas dan Rasio Pelayanan Kesehatan di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Penduduk (jiwa) | 6.971.745 | 6.394.087 | 6.493.603 | 6.614.384 | 6.642.874 |
| 2 | Jumlah Balita (jiwa) | 743.920 | 748.154 | 640.238 | 640.001 | 641.043 |
| 3 | Jumlah Posyandu (unit) | 5.519 | 5.569 | 5.707 | 5.701 | 5.667 |
| 3 | Jumlah Puskesmas (unit) | 228 | 228 | 234 | 238 | 239 |
| 4 | Jumlah Puskesmas Pembantu (unit) | 981 | 981 | 1.000 | 1.069 | 1.069 |
| 5 | Jumlah Rumah Sakit (unit) | 74 | 74 | 75 | 76 | 79 |
| 6 | Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit (unit) | 6.790 | 6.847 | 7.960 | 8.144 | 9.205 |
| 7 | Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS (BOR) (%) | 46 | 44 | 29 | 51 | 35 |
| 8 | Rasio Puskesmas (per 30.000 penduduk) | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 1,08 |
| 9 | Rasio Tempat Tidur RS (per 1000 penduduk) | 0,97 | 0,96 | 1,13 | 1,15 | 1,39 |

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Bila dicermati data tabel diatas, prasarana kesehatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023) mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit. Rasio tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk mengalami peningkatan namun jumlah tempat tidur rumah sakit tidak seimbang dengan penambahan penduduk dapat dilihat pada tahun 2023 dimana 1 tempat digunakan untuk 1.390 penduduk.

2.3.2.13 Prevalensi Balita Gizi Buruk

Menurut Panduan Indikator Program Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak yang dikeluarkan oleh Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan tahun 2023, prevalensi balita wasting (gizi kurang dan gizi buruk) adalah persentase balita umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z-score kurang dari -2 SD. Balita gizi buruk adalah anak usia 0-59 bulan yang memiliki tanda klinis gizi buruk dengan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) atau berat badan menurut panjang badan (BB/PB) dengan nilai Z-Score kurang dari -3 SD atau Lingkar Lengan Atas (LILA) kurang 11,5 cm dan atau ditemukan tanda-tanda klinis *marasmus*, *kwashiorkor* dan *marasmus-kwashiorkor*.

Kekurangan gizi, terutama pada anak usia dini akan berdampak pada tumbuh kembang anak, rendahnya kemampuan kognitif dan kecerdasan anak. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Riau harus terus melakukan upaya perbaikan kesehatan balita kedepan. Sesuai rekomendasi *World Health Organization* (WHO), perbaikan status gizi balita gizi buruk dilakukan mulai dari memperbaiki asupan zat gizi makro dan mikro dengan pemberian suplemen dan makanan formula sebagai makanan terapi secara bertahap, pengobatan penyakit penyerta atau penyulit, dan penatalaksanaan gizi buruk dilakukan secara rawat inap maupun rawat jalan bagi balita tanpa komplikasi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.75 Balita Gizi Buruk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Jumlah Balita Gizi Buruk | Jumlah Balita | Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 14 | RIAU | 781 | 237.168 | 0,33 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 77 | 47.317 | 0,16 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 83 | 15.901 | 0,52 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 103 | 7.579 | 1,36 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 14 | 17.688 | 0,08 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 34 | 11.864 | 0,29 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 147 | 21.506 | 0,68 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 82 | 25.966 | 0,32 |
| 14.08 | Kab. Siak | 123 | 20.162 | 0,61 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 55 | 16.056 | 0,34 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 30 | 7.719 | 0,39 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 24 | 29.183 | 0,08 |
| 14.12 | Kota Dumai | 9 | 16.227 | 0,06 |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau (EPPGBM), Tahun 2024

Sebaran prevalensi gizi buruk pada kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di atas. Mencermati data pada tabel diatas terlihat bahwa Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Siak, Rokan Hulu, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti merupakan daerah terjadinya kasus balita gizi buruk diatas rata-rata gizi buruk Provinsi Riau Tahun 2023 sebesar 0,33 persen. Kenyataan ini menjadi referensi dalam penanganan gizi buruk ke depan di Provinsi Riau.

2.3.2.14 Prevalensi Balita Gizi Kurang

Menurut WHO, penyebab gizi kurang pada anak balita adalah karena kurangnya asupan gizi sesuai usianya dan penyakit infeksi yang sering dialami anak. Jika masalah kekurangan gizi ini tidak segera diatasi, maka anak-anak akan mengalami masalah gizi buruk. Prevalensi gizi kurang di Provinsi Riau selama tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang semakin menurun dari 6,61 persen pada Tahun 2019 menurun menjadi 2,40 persen pada Tahun 2023. Prevalensi gizi kurang di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.76 Persentase Balita Gizi Kurang di Provinsi Riau Tahun 2019-2023

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Pertumbuhan /Tahun (%) |
|----|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| 1 | Jumlah balita kurang | 9.863 | 12.785 | 14.909 | 4.310 | 5.690 | 1,79 |
| 2 | Jumlah balita | 149.280 | 348.340 | 352.428 | 364.039 | 237.168 | 25,74 |
| 3 | Persentase Balita Gizi Kurang | 6,61 | 3,7 | 4,2 | 1,18 | 2,40 | 0,24 |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Menurunnya prevalensi gizi kurang ini tidak bisa dilepaskan dari upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki status kurang gizi pada anak seperti pemberian tambahan gizi dalam asupan makanan. Namun demikian, besaran angka kasus balita gizi kurang masih cukup signifikan dan memerlukan penanganan khusus ke depannya. Sebaran prevalensi gizi kurang pada kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.77 Persentase Balita Gizi Kurang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Jumlah Balita Gizi Kurang | Jumlah Balita | Persentase Balita Gizi Kurang |
|-----------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|
| 14 | RIAU | 5.690 | 237.168 | 2,40 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 871 | 47.317 | 1,84 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 558 | 15.901 | 3,51 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 424 | 7.579 | 5,59 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 515 | 17.688 | 2,91 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 110 | 11.864 | 0,93 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 630 | 21.506 | 2,93 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 416 | 25.966 | 1,6 |
| 14.08 | Kab. Siak | 1.002 | 20.162 | 4,97 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 424 | 16.056 | 2,64 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 293 | 7.719 | 3,8 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 365 | 29.183 | 1,25 |
| 14.12 | Kota Dumai | 82 | 16.227 | 0,51 |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Data di atas memperlihatkan terdapat 7 kabupaten yang angka prevalensi gizi kurang di atas rata-rata Provinsi yaitu Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri

Hilir, Siak, Rokan Hulu, Bengkalis dan Kep. Meranti, hal ini perlu mendapat perhatian khusus.

2.3.2.15 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) didefinisikan sebagai jumlah kematian maternal selama periode waktu tertentu per 100.000 kelahiran hidup pada waktu yang sama. Menurut Kementerian Kesehatan, kematian maternal adalah kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilan atau penanganannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan hasil *Long Form* SP 2020 BPS Provinsi Riau, AKI di Provinsi Riau adalah 158 (BPS, 2023). Hal ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018) sebesar 305. Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Riau tahun 2024, jumlah kematian ibu yang dilaporkan pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu dari 114 kasus menjadi 122 kasus kematian ibu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.78 Jumlah Kematian Ibu (Kehamilan, Kelahiran, Nifas) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019-2023

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Jumlah Kematian Ibu (Jiwa) | | | | |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14 | RIAU | 125 | 129 | 180 | 114 | 122 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 11 | 11 | 7 | 20 | 11 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 11 | 10 | 12 | 16 | 12 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 14 | 21 | 20 | 10 | 15 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 7 | 10 | 17 | 8 | 15 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 7 | 7 | 14 | 6 | 3 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 13 | 14 | 18 | 11 | 9 |
| 14.08 | Kab. Siak | 12 | 9 | 22 | 7 | 15 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 10 | 14 | 11 | 10 | 8 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 7 | 8 | 7 | 10 | 5 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 13 | 14 | 22 | 5 | 13 |
| 14.12 | Kota Dumai | 10 | 3 | 22 | 5 | 9 |

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2024 – Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Upaya penurunan AKI dapat digambarkan dari pendekatan program cakupan pemeriksaan kehamilan (ante natal care), penyediaan fasilitas pelayanan persalinan dan pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu nifas. Mencegah kematian ibu, khususnya saat persalinan telah menjadi perhatian baik secara global dan nasional. Salah satu target dalam SDGs adalah untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (target 3,1). Memastikan seluruh wanita memiliki akses terhadap kontrasepsi, menyediakan perawatan untuk melahirkan, serta akses perawatan darurat yang tepat waktu pada ibu hamil ketika akan melahirkan dinilai menjadi upaya terbaik dalam upaya mencapai target AKI.

Data kematian ibu di Provinsi Riau adalah bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan kematiannya (facility based) bukan bersumber dari masyarakat berdasarkan hasil survey (community based) sehingga sulit untuk membandingkan trend kematian antar kab/kota maupun dari tahun ke tahun, karena provinsi Riau selama ini belum mendapatkan laporan yang valid terkait jumlah kelahiran hidup per tahun

Kematian Ibu di Provinsi Riau fluktuatif dari tahun ke tahun kecuali di tahun 2021 terjadinya peningkatan yang signifikan disebabkan Pandemi Covid 19 dimana dari total 180 kematian ibu 60 kasus disebabkan terpapar Covid-19 (33,3% dari total kematian)

Salah satu penyebab terjadinya peningkatan kematian ibu di Provinsi Riau mulai tahun 2022 disebabkan adanya Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan No. HK.02.02/D/7767/2023 tentang Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Melakukan Pelaporan kelahiran hidup dan Kematian Ibu maupun Perinatal Melalui Aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), dimana dalam edaran ini dinyatakan apabila fasilitas pelayanan kesehatan tidak melaporkan kelahiran hidup maupun kematian ibu dan perinatalnya setiap bulan akan mendapat sanksi pengurangan point dalam penilaian akreditasi, hal ini berdampak positif untuk kepatuhan fasilitas pelayanan kesehatan melaporkan kelahiran hidup dan kematian di fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing sehingga terkesan di tahun 2023 terjadi jumlah kematian ibu maupun perinatal.

Selain dalam sistem pencatatan dan pelaporan kematian yang belum tercatat maupun dilaporkan dengan baik selama ini, banyak faktor masih tingginya kematian ibu di Provinsi Riau antara lain:

1. Akses ibu hamil, bersalin dan nifas ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar berdasarkan Permenkes No. 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, Pelayanan Kontrasepsi, serta pelayanan Kesehatan Seksual masih sangat sedikit belum memenuhi mutu berdasarkan Permenkes No. 6 Tahun 2024 (terkait mutu barang/peralatan dan SDM Kesehatan) yang belum terpenuhi terutama di daerah perifer dan DTPK (daerah terpencil perbatasan dan kepulauan terluar sehingga pelayanan yang dilakukan masih belum memenuhi mutu (belum berkualitas)
2. Sistem rujukan yang masih belum terencana dengan baik dimana belum adanya sistem rujukan terpadu yang terkelola dengan baik dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas rujukan tingkat lanjut
3. Masih belum optimalnya kompetensi bidan di desa dalam mengenal faktor resiko ibu hamil di desa
4. Masih belum semua puskesmas melakukan pertolongan persalinan di Puskesmas (persalinan masih di Polindes atau bidan desa)
5. Masih belum terpenuhi sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas (Buku KIA, USG, alat resusitasi,dll)
6. Belum semua tenaga kesehatan di Puskesmas terampil dalam melakukan pelayanan pada ibu hamil, bersalin dan nifas, untuk itu butuh peningkatan kapasitas dengan Pelatihan/Orientasi.

2.3.2.16 Prevalensi Stunting Balita

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kekurangan gizi pada balita antara lain masih kurang baiknya praktik pemberian makan bayi dan anak. Stunting mengacu pada kondisi anak yang terlalu pendek untuk anak seusianya. Kondisi ini menggambarkan kekurangan gizi kronis yang terjadi karena buruknya kualitas nutrisi sejak di dalam kandungan, di masa anak-anak, dan/atau disebabkan infeksi

atau penyakit. Stunting begitu menjadi perhatian karena efek jangka panjangnya yang menyebabkan anak tidak dapat mencapai kapasitas penuh dari pertumbuhan, cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah, serta lebih rawan terserang penyakit (UNICEF, 2020). Di masa depan, hal tersebut akan memengaruhi produktivitas kerja dan kemampuan bekerja, yang dapat berakibat pada rendahnya pendapatan rumah tangga secara mikro dan perkembangan ekonomi nasional secara makro.

Penanganan stunting telah menjadi target prioritas baik secara global dan di Indonesia termasuk di Provinsi Riau. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 - 2024, penurunan prevalensi stunting pada balita telah menjadi salah satu program prioritas dengan target sebesar 14 persen di tahun 2024. Pencapaian target tersebut membutuhkan kerja keras oleh pemerintah dan berbagai pihak. Walaupun telah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan prevalensi stunting hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 yang sebesar 36,8 persen. Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan prevalensi stunting pada balita di Provinsi Riau menurun 3,4 poin dari tahun sebelumnya, yaitu dari 17 persen menjadi 13,6 persen.

Dalam rangka mencapai target stunting 2024, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa percepatan penurunan stunting di Indonesia dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi antar pihak.

Tabel 2.79 Prevalensi Stunting Balita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2013-2023

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Prevalensi Balita Stunting (%) | | | | | |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2013* | 2018* | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14 | RIAU | 36,8 | 27,4 | 23,95 | 22,3 | 17,0 | 13,6 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 32,1 | 32,1 | 23,07 | 25,7 | 14,5 | 7,6 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 40,5 | 32,2 | 29,67 | 23,6 | 16,7 | 12,7 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 26,9 | 32,3 | 21,07 | 21,9 | 8,4 | 17,9 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 39,9 | 32,2 | 27,43 | 28,4 | 28,5 | 18,8 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 44,4 | 25,5 | 22,97 | 21,2 | 11,2 | 10,1 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 58,9 | 27,3 | 24,37 | 25,8 | 22 | 15,9 |

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Prevalensi Balita Stunting (%) | | | | | |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|------|------|------|
| | | 2013* | 2018* | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 27,3 | 38,1 | 28,87 | 29,7 | 14,7 | 16,6 |
| 14.08 | Kab. Siak | 24,4 | 21 | 27,43 | 19 | 22 | 10,4 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 38,7 | 24,6 | 29,55 | 22,4 | 17,8 | 23 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 37 | 29,9 | 25,1 | 23,3 | 17,5 | 19,6 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 34,7 | 16 | 18,58 | 11,4 | 16,8 | 8,7 |
| 14.12 | Kota Dumai | 34,1 | 17,3 | 11,59 | 23 | 12,8 | 14,9 |

(*) Hasil Riskesdas

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2024

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian Prevalensi Stunting Balita Provinsi Riau pada tahun 2023 adalah 13,6% menurun sebesar 3,4% dari tahun 2022 dan Provinsi Riau berada pada peringkat terendah ke-3 Nasional setelah Provinsi Bali (7,2%) dan Provinsi Jambi (13,5%).

2.3.2.17 Pengendalian Penyakit Tuberkulosis

Indonesia merupakan negara peringkat ke-2 penderita TBC tertinggi di dunia setelah India dengan proporsi kasus baru sebesar 13% dibandingkan seluruh kasus di dunia. Secara global, diperkirakan 10,6 juta orang menderita TBC pada tahun 2021. (WHO, Global Tuberculosis Report, 2022). Sekitar 75% penderita TBC merupakan usia produktif (15-50) tahun. Pada tahun 2022 jumlah semua kasus Tuberkulosis yang ditemukan sebanyak 677.464 kasus, meningkat cukup tinggi bila dibandingkan semua kasus Tuberkulosis yang ditemukan pada tahun 2021 yang sebesar 397.377 kasus. Jumlah kasus tertinggi dilaporkan dari provinsi dengan jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kasus Tuberkulosis di ketiga provinsi tersebut menyumbang angka sekitar 47% dari jumlah seluruh kasus Tuberkulosis di Indonesia.

Di Provinsi Riau jumlah semua kasus Tuberkulosis yang ditemukan dan diobati pada tahun 2023 mencapai 12.858 dan cakupan ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 dimana jumlah semua kasus Tuberkulosis mencapai 8.934 orang.

Tabel 2.80 Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis yang Ditemukan dan Diobati Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Jumlah Semua Kasus |
|-----------|-----------------------------|--------------------|
| 14 | RIAU | 12.858 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 1.204 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 551 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 1.097 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 924 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 767 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 1.136 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 1.204 |
| 14.08 | Kab. Siak | 580 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 442 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 226 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 3.834 |
| 14.12 | Kota Dumai | 893 |

(*) Hasil Riskesdas

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2024

Kota Pekanbaru merupakan wilayah dengan jumlah semua kasus Tuberkulosis yang ditemukan dan diobati paling tinggi yaitu 3.834 orang mengingat Kota Pekanbaru merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Riau sekaligus jumlah terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar.

Treatment Coverage (TC) adalah jumlah kasus TBC yang tercatat dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus TBC pada tahun yang sama dan dinyatakan dalam persentase. TC menggambarkan seberapa banyak kasus Tuberkulosis yang terjangkau oleh program. *Treatment Coverage* di Provinsi Riau pada tahun 2023 mencapai 55,397% meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang baru mencapai 44,92% (SITB Kemenkes RI, 2023). Jika dibandingkan dengan rata-rata *Treatment Coverage* pengobatan Tuberkulosis di Indonesia, Provinsi Riau masih dibawah capaian nasional yaitu 87%.

2.3.2.18 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dasar hukum untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). JKN adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pada Tahun 2023 kepesertaan Jaminan Kesehatan di Provinsi Riau mencapai 6.499.166 jiwa dengan cakupan sebesar 96,38% meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.81 Capaian Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

| No | Tahun | Kepesertaan | |
|----|-------|-------------|-------|
| | | Jiwa | (%) |
| 1 | 2023 | 6.499.166 | 96,38 |
| 2 | 2022 | 5.686.029 | 85,55 |
| 3 | 2021 | 5.142.247 | 79,67 |
| 4 | 2020 | 4.870.805 | 78,30 |
| 5 | 2019 | 4.680.215 | 76,73 |

Sumber: BPJS Kesehatan Tahun 2024

Sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Riau melalui skema *Budget Sharing* yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran PBI yang didaftarkan oleh kabupaten/kota, untuk iuran kepesertaannya sebesar 55% (Rp19.250,-)/jiwa iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau sedangkan 45% (Rp15.750,-)/jiwa dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan berbagai upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudkan Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) di Provinsi Riau.

Hal tersebut terbukti sampai tahun 2023 di Provinsi Riau sudah 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau sudah mencapai UHC, sedangkan untuk Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu ditargetkan sudah UHC pada tahun 2024. Capaian Provinsi Riau sudah mencapai 96,38% menempatkan Provinsi Riau dengan peringkat 29 dari 38 Provinsi se Indonesia dengan total jumlah

penduduk yang sudah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 6.499.166 Jiwa.

2.3.2.19 Pengunjung dan Dokumen Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau

Keberadaan perpustakaan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab fasilitas perpustakaan terutama buku baik menyangkut keragaman koleksi maupun jumlah koleksi buku yang tersedia harus menjadi perhatian disamping fasilitas lainnya. Hal ini karena masing-masing pengunjung mempunyai kepentingan referensi yang berbeda dengan buku yang ingin dicari dan memanfaatkan fasilitas peminjaman buku. Adapun pengunjung perpustakaan di Perpustakaan Soeman HS dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.82 Jumlah Pengunjung dan Dokumen Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | | Pertumbuhan /Tahun (%) |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Jumlah pengunjung (orang) | 416.277 | 114.075 | 97.031 | 144.184 | 220.614 | 3,52 |
| 2 | Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani | 6.971.745 | 6.394.087 | 6.574.932 | 6.614.380 | 6.642.870 | -1,11 |
| 3 | Rasio | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 8,33 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2023

Jumlah pengunjung di Perpustakaan Soeman HS selama kurun tahun 2019-2023 meningkat rata-rata 3,52 persen/tahun. Sementara itu, jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani dari tahun 2019-2023 mengalami penurunan dengan rata-rata -1,11 persen/tahun. Hal ini disebabkan oleh perhitungan sensus penduduk oleh BPS tahun 2020. Penurunan signifikan jumlah pengunjung terjadi pada tahun 2021, dimana pada tahun tersebut terjadi pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan sosial, sehingga pengunjung perpustakaan mengalami penurunan yang tinggi.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1 Kondisi Jalan dan Transportasi

a) Kondisi Jalan Provinsi

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar daerah. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Pemerintah harus memperhatikan berbagai aspek kondisi jalan provinsi, termasuk kualitas permukaan, struktur, keamanan, konektivitas, pemeliharaan, dampak lingkungan, fasilitas pendukung, dan efisiensi anggaran. Dengan perhatian yang tepat pada faktor-faktor ini, pemerintah dapat memastikan bahwa jalan provinsi mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memastikan keselamatan serta kenyamanan berkendara.

Tabel 2.83 Kondisi Jalan Provinsi di Provinsi Riau Tahun 2019-2023

| No | Kondisi Jalan | Jalan Provinsi | | | | | | | | | |
|----|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | Panjang (km) | (%) |
| | Mantap | 1.641,53 | 58,63 | 1.773,17 | 63,33 | 1.763,18 | 62,97 | 1.818,15 | 64,94 | 1.795,19 | 66,64 |
| 1 | Baik | 1.320,26 | 47,16 | 1.514,07 | 54,08 | 1.474,68 | 52,67 | 1.447,80 | 51,71 | 1.486,37 | 55,18 |
| 2 | Sedang | 321,27 | 11,47 | 259,10 | 9,25 | 292,40 | 10,44 | 370,36 | 13,23 | 308,82 | 11,46 |
| | Tidak Mantap | 1.158,28 | 41,37 | 1.026,64 | 36,67 | 1.036,63 | 37,03 | 981,66 | 35,06 | 898,69 | 33,36 |
| 1 | Rusak Ringan | 109,65 | 3,91 | 70,52 | 2,52 | 589,67 | 21,06 | 60,59 | 2,16 | 17,49 | 0,65 |
| 2 | Rusak Berat | 1.048,63 | 37,45 | 956,12 | 34,15 | 443,06 | 15,82 | 921,07 | 32,90 | 881,20 | 32,71 |
| | Total | 2.799,81 | 100 | 2.799,81 | 100 | 2.799,81 | 100 | 2.799,81 | 100 | 2.693,88 | 100 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, Tahun 2024



Gambar 2.36 Sebaran Kondisi Ruas Jalan Kewenangan Provinsi

Panjang jaringan jalan Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS. 7464/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 adalah 2.693,88 km. Pada tahun 2023, kondisi jalan mantap pada jalan kewenangan provinsi sepanjang 1.795,19 km atau 66,64% dari panjang keseluruhan.

Adapun kondisi jalan tidak mantap pada tahun 2023 sepanjang 898,69 km atau 33,36%. Kondisi jalan tidak mantap ini memerlukan perhatian serius, mengingat kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus barang dan jasa yang mendorong stabilitas dan mengurangi disparitas harga antar daerah, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar daerah. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui proporsi

panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Total panjang jalan di Provinsi Riau sepanjang 24.614,13 km yang terbagi sesuai kewenangan sebagai berikut :

1. Kewenangan Provinsi sepanjang 2.693,88 km (Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS. 7464/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023);
2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sepanjang 20.477,69 km;
3. Kewenangan Nasional sepanjang 1.336,63 km.

Tabel 2.84 Panjang Jalan di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (Km) Tahun 2023

| Kode | Kabupaten/Kota | Tahun 2023 | | | |
|---------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | Negara | Provinsi | Kabupaten/Kota | Jumlah |
| 14.01 | Kab. Kampar | 161,26 | 349,84 | 2.073,10 | 2.633,32 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 193,33 | 241,63 | 1.593,61 | 2.126,32 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 103,16 | 157,95 | 1.257,11 | 1.442,87 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 163,32 | 373,81 | 1.190,59 | 1.634,06 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 114,33 | 218,17 | 1.985,80 | 2,333,72 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 0 | 438,66 | 2.140,36 | 2.643,94 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 193,78 | 226,12 | 1.961,53 | 2.373,29 |
| 14.08 | Kab. Siak | 128,13 | 110,34 | 2.880,19 | 3.163,32 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 123,42 | 137,44 | 1.989,85 | 2.302,97 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 0 | 156,3 | 929,42 | 1.060,66 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 65,25 | 161,57 | 1.277,90 | 1.488,86 |
| 14.12 | Kota Dumai | 72,45 | 122,04 | 1.198,24 | 1.410,81 |
| Jumlah | | 1.336,63 | 2.693,88 | 20.477,69 | 24.614,13 |

Data belum termasuk jalan tol

Sumber : Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

b) Transportasi

Provinsi Riau memiliki aksesibilitas darat, sungai, laut, dan udara yang menghubungkan Provinsi Riau dengan wilayah luar sekitar provinsi. Aksesibilitas darat dihubungkan dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalan bebas hambatan serta terminal Antar Kota Antar Provinsi.

Salah satu jaringan jalan bebas hambatan yang telah operasional adalah Jalan Tol Pekanbaru – Dumai. Jalan Tol Pekanbaru – Dumai merupakan bagian dari Jalan Tol Trans-Sumatera sepanjang 2.878 km yang membentang dari Lampung

hingga Aceh. Jalan Tol Pekanbaru – Dumai akan meningkatkan konektivitas antara Ibukota Provinsi Riau dengan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan dan agribisnis yang maju, serta kawasan industri dan perkebunan lainnya. Jalan Tol Pekanbaru – Dumai juga memperpendek jarak tempuh Kota Pekanbaru-Dumai, dari sebelumnya 200 km jika melewati jalan nasional, menjadi 131 km jika ditempuh melalui jalan tol ini.

Tol Pekanbaru – Dumai memiliki enam seksi ruas. Di antaranya, seksi I Pekanbaru – Minas (9,5 km), Seksi II Minas – Petapahan (24,1km), seksi III Petapahan – Kadis Utara (16,9 km). Lalu seksi IV Kandis Utara – Duri Selatan (27,23 km), seksi V Duri Selatan – Duri Utara (27,23), dan Seksi VI Duri Utara – Dumai (24,65 km). Nantinya, Jalan Tol Trans Sumatera akan menyambungkan Aceh hingga Lampung sepanjang 2.765 km. Tol ini juga akan tersambung dengan kota lain yakni Padang dan Bengkulu.



Gambar 2.37 Gerbang Tol Pekanbaru, Gerbang Tol Dumai, dan Gerbang Tol Bathin Solapan



Gambar 2.38 Kondisi Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, Jalan Tol Duri dan Jalan Tol Bathin Solapan-Dumai



Gambar 2.39 Kondisi Jembatan Menuju Jambi

Saat ini, proses pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Padang, yaitu seksi Pekanbaru – Bangkinang telah selesai dan operasional, sedangkan seksi Bangkinang – Pangkalan masih dalam proses pembangunan. Perkembangan pembangunan ruas jalan tol tersebut dapat berdampak pada peningkatan aksesibilitas darat di Provinsi Riau dengan wilayah di sekitar Provinsi Riau, khususnya akses antara Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat.

Aksesibilitas darat di Provinsi Riau juga dilayani oleh empat hub/simpul transportasi jalan (terminal) kelas A yang melayani pergerakan regional Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari dan menuju Provinsi Riau. Sementara, transportasi sungai dan penyeberangan merupakan sarana penghubung jaringan prasarana jalan yang terputus akibat adanya hambatan berupa sungai untuk menghubungkan dua wilayah daratan/pulau yang berseberangan. Transportasi sungai di Provinsi Riau banyak digunakan untuk perhubungan antar kecamatan dan antardesa yang sifatnya pergerakan lokal. Aksesibilitas laut menuju Provinsi Riau didukung oleh pelabuhan dengan berbagai tipe yang tersebar di berbagai lokasi. Provinsi Riau memiliki jaringan transportasi laut berupa pelabuhan yaitu pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan regional. Aksesibilitas udara menuju dan dari Provinsi Riau dilayani oleh prasarana bandar udara (bandara) yang dapat melayani pergerakan penumpang dan barang, baik domestik maupun internasional, yakni Bandara Sultan Syarif Kasim II yang terletak di Kota Pekanbaru, serta juga terdapat beberapa bandara lainnya dengan hirarki yang berbeda.

Selain itu, aksesibilitas di dalam wilayah Provinsi Riau yang menghubungkan kabupaten/kota didominasi oleh aksesibilitas darat berupa jaringan jalan dan terminal, yang dilengkapi oleh ketersediaan pelabuhan penyeberangan

antarkabupaten dalam provinsi dan dalam kabupaten. Namun, pelayanan transportasi penyeberangan belum berfungsi secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya antrian panjang masyarakat yang ingin menyeberang di kedua sisi pada waktu-waktu tertentu, khususnya yang menggunakan kendaraan roda empat maupun lebih. Keterpaduan aksesibilitas adalah konektivitas yang dibangun untuk memadukan aksesibilitas menuju dan di dalam wilayah Provinsi Riau. Keterpaduan aksesibilitas juga perlu dibangun antara aksesibilitas udara, laut, dan darat.

2.3.3.2 Daerah Irigasi Permukaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah irigasi dimana kriteria pembagian tanggungjawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi meliputi:

- a. Kewenangan pemerintah, yakni pada Daerah Irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha;
- b. Kewenangan provinsi, yakni Daerah Drigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha; dan
- c. Kewenangan pemerintah kab/kota, yakni Daerah Drigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.

Luas daerah daratan rendah/rawa yang potensi untuk prasarana pengairan Provinsi Riau adalah seluas 426.325 Ha. Agar lahan tersebut dapat difungsikan, diperlukan suatu program peningkatan/Rehabilitasi dan operasi pemeliharaan yang berkelanjutan. Sedangkan luas lahan rawa yang masih tersedia (reklamasi) yang masih dapat dikembangkan adalah seluas 289.836 Ha. Dengan adanya penanganan lahan irigasi dan rawa dimaksudkan, maka akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Provinsi Riau.

Daerah irigasi kewenangan Provinsi Riau sebanyak 8 daerah irigasi permukaan dan 50 daerah irigasi rawa. Total luas daerah irigasi permukaan kewenangan provinsi yaitu 10.035 ha serta luas daerah irigasi rawa kewenangan

Provinsi Riau yaitu 106.936 ha. Daerah irigasi permukaan kewenangan Provinsi Riau terdapat di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Rokan Hulu. Dimana ada 6 daerah irigasi di Kabupaten Kampar, 1 daerah irigasi di Kabupaten Kuantan Singingi serta 1 daerah irigasi di Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan Daerah Irigasi Rawa kewenangan Provinsi Riau terdapat 6 Kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Siak. Dimana ada 6 daerah irigasi rawa di Kabupaten Kepulauan Meranti, 3 daerah irigasi rawa di Kabupaten Bengkalis, 3 daerah irigasi rawa di Kabupaten Indragiri Hulu, 31 daerah irigasi rawa di Kabupaten Indragiri Hilir, 6 daerah irigasi rawa di Kabupaten Rokan Hilir, dan 1 daerah irigasi rawa di Kabupaten Siak.

Tabel 2.85 Kondisi Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

| No. | Nama Daerah Irigasi | | Luas Baku (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Total Panjang Saluran (Primer ; Tersier ; Sekunder) (m) | Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%) | Penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi | Tahun IKSI |
|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---|-----------------------------------|---|------------|
| | | | | | | Jumlah | | |
| | | | | | | Nilai Maks 100% | | |
| DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI | | | 116.971 | 13.677 | 2.432.663 | | | |
| DAERAH IRIGASI PERMUKAAN | | | 10.035 | 5.040 | 169.916 | | | |
| KABUPATEN KAMPAR | | | 6.588 | 1.901 | 96.279 | | | |
| 1 | D.I | Bancah Labi Sei Silam | 1.063 | 195 | 26.028 | 49,50 | JELEK | 2023 |
| 2 | D.I | Muara Jalai Sei Tanang Sawah | 1.065 | 250 | 7.485 | 52,29 | JELEK | 2023 |
| 3 | D.I | Ranah Singkuang Sei Sirah Penyesawan | 1.203 | 130 | 16.009 | 22,38 | JELEK | 2023 |
| 4 | D.I | Sei Paku | 1.123 | | 15.091 | 21,85 | JELEK | 2021 |
| 5 | D.I | Sei Tibun Petapahan | 1.105 | 486 | 14.856 | 25,26 | JELEK | 2023 |
| 6 | D.I | Uwai Pangoan | 1.029 | 840 | 16.810 | 30,28 | JELEK | 2023 |
| KABUPATEN KUANTAN SINGINGI | | | 1.293 | 1.093 | 25.849 | | | |
| 7 | D.I | Seberang Gunung Paing | 1.293 | 1.093 | 25.849 | 25,16 | JELEK | 2021 |
| KABUPATEN ROKAN HULU | | | 2.154 | 2.046 | 47.788 | | | |
| 8 | D.I | Kaiti Samo | 2.154 | 2.046 | 47.788 | 28,97 | JELEK | 2019 |

Sumber: Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2024

Dapat kita lihat pada tabel diatas bahwa daerah irigasi permukaan kewenangan Provinsi Riau yang paling luas yaitu Daerah Irigasi Kaiti Samo di Kabupaten Rokan Hulu. Apabila dilihat berdasarkan kondisi eksisting kinerja Daerah

Irigasi Permukaan kewenangan Provinsi dapat disimpulkan bahwa seluruhnya dalam kondisi jelek.

2.3.3.3 Daerah Irigasi Rawa (DIR)

Daerah Irigasi Rawa kewenangan Provinsi Riau yang paling luas yaitu daerah irigasi rawa Tanjung Lajau dengan luas 2.918 ha di Kabupaten Indragiri Hilir. Kondisi eksisting kinerja Daerah Irigasi Rawa kewenangan Provinsi Riau sebagian besar dalam kondisi sedang dan rusak.

Tabel 2.86 Kondisi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kewenangan Provinsi se-Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

| No. | Nama Daerah Irigasi | | Luas Baku (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Total Panjang Saluran (Primer; Tersier; Sekunder) (m) | Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%) | Penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi | Tahun IKSI |
|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---|-----------------------------------|---|------------|
| | | | | | | Jumlah Nilai Maks 100% | | |
| DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI | | | 116.971 | 13.677 | 2.432.663 | | | |
| DAERAH IRIGASI RAWA | | | 106.936 | 8.637 | 2.262.747 | | | |
| KABUPATEN BENGKALIS | | | 4.493 | 1.365 | 116.203 | | | |
| 1 | D.I.R | Siak Kecil A',B',C' | 1.341 | 62 | 23.080 | 21,03 | JELEK | 2021 |
| 2 | D.I.R | Siak Kecil A,B,C,D | 1.262 | 388 | 26.455 | 22,92 | JELEK | 2021 |
| 3 | D.I.R | Siak Kecil E,F,H,I,J,K | 1.890 | 914 | 66.668 | 21,51 | JELEK | 2021 |
| KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | | | 68.868 | 5.125 | 1.180.580 | | | |
| 12 | D.I.R | Belantaraya | 2.100 | - | 40.890 | 40,99 | JELEK | 2022 |
| 13 | D.I.R | Belaras | 2.670 | - | 44.893 | 45,30 | JELEK | 2022 |
| 14 | D.I.R | Benteng/Pesanggrahan | 1.794 | 610 | 33.672 | 40,56 | JELEK | 2022 |
| 15 | D.I.R | Kampung Baru | 1.200 | - | 29.790 | 48,57 | JELEK | 2022 |
| 16 | D.I.R | Kempas | 2.900 | 157 | 44.580 | 53,79 | JELEK | 2022 |
| 17 | D.I.R | Kotabaru Reteh | 2.769 | 462 | 76.669 | 53,14 | JELEK | 2022 |
| 18 | D.I.R | Kuala Cinaku II/Harapan & Bayas Jaya | 2.892 | 373 | 36.925 | 50,41 | JELEK | 2022 |
| 19 | D.I.R | Kuala Lemang | 2.873 | 483 | 25.817 | 34,03 | JELEK | 2022 |
| 20 | D.I.R | Mumpa | 1.454 | 161 | 20.954 | 39,92 | JELEK | 2022 |

| No. | Nama Daerah Irigasi | | Luas Baku (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Total Panjang Saluran (Primer; Tersier; Sekunder) (m) | Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%) | Penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi | Tahun IKSI |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------|---|-----------------------------------|---|------------|
| | | | | | | Jumlah Nilai Maks 100% | | |
| 21 | D.I.R | Pebenaan | 2.891 | 411 | 44.043 | 45,06 | JELEK | 2022 |
| 22 | D.I.R | Pekan Arba | 1.243 | 45 | 14.957 | 36,17 | JELEK | 2022 |
| 23 | D.I.R | Pulau Burung | 2.500 | - | 20.509 | 46,28 | JELEK | 2022 |
| 24 | D.I.R | Pulau Kecil | 1.900 | 427 | 61.824 | 42,52 | JELEK | 2022 |
| 25 | D.I.R | Pulau Kijang | 2.706 | 140 | 40.948 | 47,86 | JELEK | 2022 |
| 26 | D.I.R | Pulau Palas | 2.032 | 191 | 30.400 | 38,74 | JELEK | 2022 |
| 27 | D.I.R | Rete Lokal (Sei Gantang) | 1.207 | 320 | 44.001 | 45,07 | JELEK | 2022 |
| 28 | D.I.R | Sanglar | 2.908 | 641 | 89.378 | 36,81 | JELEK | 2022 |
| 29 | D.I.R | Sei Piring / Tasik Raya | 2.792 | 4 | 27.582 | 34,15 | JELEK | 2022 |
| 30 | D.I.R | Sei Salak | 2.073 | 157 | 54.180 | 34,02 | JELEK | 2022 |
| 31 | D.I.R | Sei Dusun | 2.097 | 89 | 37.275 | 35,13 | JELEK | 2022 |
| 32 | D.I.R | Sei Perak | 1.007 | 56 | 17.348 | 36,63 | JELEK | 2022 |
| 33 | D.I.R | Sei Piyai | 1.905 | 5 | 31.710 | 41,25 | JELEK | 2022 |
| 34 | D.I.R | Sei Teritip | 1.750 | - | 32.077 | 39,22 | JELEK | 2022 |
| 35 | D.I.R | Simpang Kateman | 2.240 | - | 23.070 | 46,77 | JELEK | 2022 |
| 36 | D.I.R | Tanjung Lajau | 2.918 | - | 44.632 | 30,98 | JELEK | 2022 |
| 37 | D.I.R | Teluk Dalam | 2.054 | - | 33.234 | 43,91 | JELEK | 2022 |
| 38 | D.I.R | Teluk Kelasa | 2.784 | 222 | 49.528 | 42,05 | JELEK | 2022 |
| 39 | D.I.R | Teluk Kiambang | 2.054 | 170 | 34.721 | 44,09 | JELEK | 2022 |
| 40 | D.I.R | Teluk Sungka | 2.769 | - | 45.317 | 31,34 | JELEK | 2022 |
| 41 | D.I.R | Terusan Kempas | 2.703 | - | 27.052 | 43,05 | JELEK | 2022 |
| 42 | D.I.R | Togaraja | 1.683 | - | 22.604 | 31,44 | JELEK | 2022 |
| KABUPATEN INDRAGIRI HULU | | | 7.202 | 340 | 208.148 | | | |
| 43 | D.I.R | Dagang | 2.902 | 120 | 69.132 | 18,05 | JELEK | 2021 |

| No. | Nama Daerah Irigasi | | Luas Baku (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Total Panjang Saluran (Primer; Tersier; Sekunder) (m) | Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%) | Penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi | Tahun IKSI |
|------------------------------------|---------------------|---|----------------|----------------------|---|-----------------------------------|---|------------|
| | | | | | | Jumlah Nilai Maks 100% | | |
| 44 | D.I.R | Kuala Mulya / Rawa Sekip | 2.793 | 140 | 46.983 | 18,82 | JELEK | 2023 |
| 45 | D.I.R | Rengat | 1.507 | 80 | 92.033 | 15,02 | JELEK | 2021 |
| KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI | | | 10.495 | 879 | 119.276 | | | |
| 46 | D.I.R | Anak Setatah | 1.235 | 118 | 9.404 | 52,39 | JELEK | 2022 |
| 47 | D.I.R | Centai / Semukut | 1.010 | 77 | 3.060 | 38,02 | JELEK | 2022 |
| 48 | D.I.R | Kedabu Rapat | 2.400 | 172 | 18.156 | 55,24 | KURANG | 2023 |
| 49 | D.I.R | Melai | 2.900 | 323 | 67.724 | 20,33 | JELEK | 2023 |
| 50 | D.I.R | Sei Cina | 1.450 | 183 | 10.885 | 31,06 | JELEK | 2023 |
| 51 | D.I.R | Sei Tohor | 1.500 | 7 | 10.047 | 53,74 | JELEK | 2022 |
| KABUPATEN ROKAN HILIR | | | 13.008 | 728 | 547.614 | | | |
| 52 | D.I.R | Lenggadai Mukti Jaya (N.4) | 1.750 | 96 | 36.469 | 26,51 | JELEK | 2021 |
| 53 | D.I.R | Padamaran (N.17, N.18) | 2.082 | 146 | 100.122 | 13,05 | JELEK | 2021 |
| 54 | D.I.R | Parit Aman | 2.015 | 164 | 84.625 | 23,85 | JELEK | 2021 |
| 55 | D.I.R | Pekaitan | 2.500 | 66 | 64.869 | 25,69 | JELEK | 2021 |
| 56 | D.I.R | Teluk Bano II (N.15, N.16) | 1.876 | 188 | 215.865 | 22,94 | JELEK | 2021 |
| 57 | D.I.R | Teluk Pulau | 2.785 | 68 | 45.664 | 15,32 | JELEK | 2023 |
| KABUPATEN SIAK | | | 2.870 | 200 | 90.926 | | | |
| 58 | D.I.R | Siak Kiri Pake A (Langkat Permai, Jati Baru dan Dayang Suri) | 2.870 | 200 | 90.926 | 22,59 | JELEK | 2023 |
| TOTAL | | | | | 2.432.663 | 35,40 | JELEK | |

Sumber: Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2024

2.3.3.4 Penggunaan Lahan Sawah Irigasi

Lahan sawah sangat membutuhkan jaringan irigasi untuk kebutuhan tanaman baik padi maupun komoditi lainnya, sawah dapat diartikan sebagai usaha pertanian yang dilaksanakan pada tanah basah dan memerlukan air irigasi. Sedangkan irigasi adalah usaha penyediaan air untuk menunjang pertanian yang

jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Luas lahan sawah yang teraliri irigasi di Provinsi Riau, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.87 Penggunaan Lahan Sawah Irigasi di Provinsi Riau Tahun 2023

| Kode | Kabupaten/ Kota | Realisasi Dalam Satu Tahun (Ha) | | | | | Jumlah | Luas Lahan SK. BPN /ATF 2019 |
|-------|------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| | | Ditanami Padi | | | Tidak ditanami padi | | | |
| | | Satu Kali | Dua Kali | ≥ Tiga Kali | Ditanami tanaman lainnya | Tidak ditanami apapun | | |
| 14.01 | Kab. Kampar | 1.032 | 1.457 | 77 | 195 | 352 | 3.113 | 3.220,42 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 875 | 173 | 0 | 379 | 1.297 | 2.724 | 2.667,29 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 1.354 | 1.291 | 0 | 0 | 348 | 2.992 | 2.992,42 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 8.751 | 4.348 | 567 | 60 | 4.121 | 17.846 | 19.020,55 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 4.344 | 676 | 0 | 779 | 1.795 | 7.593 | 6.718,24 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 118 | 1.198 | 0 | 8 | 505 | 1.829 | 1.683,64 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 7.886 | 1.808 | 0 | 1.638 | 2.440 | 13.772 | 12.185,64 |
| 14.08 | Kab. Siak | 326 | 3.220 | 467 | 553 | 250 | 4.816 | 4.331,71 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 4.685 | 429 | 15 | 138 | 976 | 6.244 | 6.212,58 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 2.308 | 60 | 0 | 110 | 1.044 | 3.522 | 3.436,23 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,27 |
| 14.12 | Kota Dumai | 178 | 55 | 0 | 15 | 0 | 248 | 217,36 |
| | JUMLAH | 31.857 | 14.715 | 1.126 | 3.874 | 13.129 | 64.700 | 62.689,40 |

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 2024

Lahan sawah yang ditanami padi dua kali setahun seluas 14.715 ha (23,47%) dari jumlah total luas pemanfaatan sawah Provinsi Riau 62.689,4 ha. Untuk mengurangi ketergantungan kebutuhan beras Provinsi Riau, peran irigasi dan benih unggul sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas, baik untuk meningkatkan indeks pertanaman maupun perluasan areal sawah beririgasi.

2.3.3.5 Pengamanan Pantai di Pulau Terluar

Pengamanan Pantai di Pulau Terluar adalah langkah-langkah yang diambil untuk melindungi pantai-pantai di pulau-pulau yang berada di batas wilayah negara, khususnya yang terletak jauh dari pusat-pusat aktivitas. Pulau terluar sering kali

memiliki tantangan unik yang memerlukan perhatian khusus untuk melindungi mereka dari ancaman lingkungan, keamanan, dan kepentingan strategis.

Pengamanan pantai di pulau terluar memerlukan usaha yang kompleks dan multifaset yang melibatkan perlindungan lingkungan, keamanan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat, penanggulangan bencana, dan kerjasama internasional. Pendekatan yang holistik dan terkoordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa pulau-pulau terluar tetap terlindungi dan dapat berfungsi dengan baik sebagai bagian dari wilayah negara.

Terjadinya abrasi yang ada di Provinsi Riau saat ini sudah cukup memprihatinkan, mengingat panjangnya garis Pantai Provinsi Riau sementara tutupan vegetasi di pesisir sudah mengalami degradasi. Tingginya tingkat abrasi di wilayah pesisir dengan panjang abrasi pantai di 3 pulau terluar (Rupat, Bengkalis, dan Rangsang) ialah 287,15 km, dengan tingkat kekritisannya tinggi sepanjang 167,22 km. Berikut adalah kondisi penanganan pengamanan pantai di pulau terluar Provinsi Riau sampai tahun 2023.

Tabel 2.88 Rekapitulasi Pengamanan Pantai di Pulau Terluar Provinsi Riau

| Uraian Kegiatan | Kabupaten | Panjang Abrasi Pantai (Km) | Lokasi | Penanganan Abrasi Tahun | | | Total Penanganan (Km) | Sisa Penanganan (Km) |
|--|--------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengamanan Pantai Lainnya | Bengkalis | 95,17 | Pulau Rupat | Pantai Tanjung Lapin Kec. Rupat Utara (62,2 m) | Pantai Ketapang Pulau Rupat (7 m) | Pantai Ketapang Pulau Rupat (86 m) | 0,16 | 95,01 |
| | | 95,34 | Pulau Bengkalis | | Pantai Sekodi (33,85 m) | Pantai Sekodi (185,19 m) | 0,22 | 95,12 |
| | Kep. Meranti | 96,64 | Pulau Rangsang | | | Pantai Pulau Rangsang Kec. Rangsang | 0,47 | 96,17 |

| Uraian Kegiatan | Kabupaten | Panjang Abrasi Pantai (Km) | Lokasi | Penanganan Abrasi Tahun | | | Total Penanganan (Km) | Sisa Penanganan (Km) |
|-----------------|-----------|----------------------------|--------|-------------------------|------|------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| | | | | | | Barat (470,33 m) | | |

Sumber: Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, 2024

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa penanganan abrasi secara struktural melalui pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya masih sangat terbatas. Oleh sebab itu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau saat ini terus berupaya mendapatkan bantuan Pemerintah untuk mengatasi abrasi.

2.3.3.6 Akses Sumber Air Minum Bersih dan Air Minum Layak

Salah satu kebutuhan hakiki manusia adalah kebutuhan air minum bersih yang dapat dimanfaatkan untuk air minum maupun memasak. Kondisi pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat dilihat dari persentase rumah tangga berdasarkan sumber air minum bersih dan persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air minum layak.

Sumber air minum bersih adalah sumber air minum yang terdiri atas air kemasan, air isi ulang, leding dan sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m. Adapun yang dimaksud dengan akses air minum layak adalah jika sumber utama air yang digunakan untuk minum berasal dari air leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan termasuk juga ketika sumber air utama air yang digunakan oleh rumah tangga berasal dari kemasan bermerk atau air isi ulang.

Tabel 2.89
Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih dan Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses terhadap Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018 - 2023

| Kode | Kabupaten/Kota | Sumber Air Minum Bersih | | | | | | Akses Air Minum Layak | | | | | |
|-----------|------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14 | Provinsi Riau | 68,43 | 69,56 | 71,68 | 71,56 | 70,15 | 72,70 | 79,68 | 87,42 | 88,25 | 89,76 | 90,07 | 90,47 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 69,66 | 67,51 | 71,73 | 73,85 | 69,9 | 75,33 | 69,13 | 88,49 | 90,07 | 90,41 | 91,37 | 94,18 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 77,61 | 78,39 | 76,66 | 79,78 | 79,39 | 83,66 | 63,2 | 65,5 | 73,93 | 64,84 | 72,86 | 73,31 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 61,7 | 61,35 | 67,69 | 60,4 | 55,57 | 63,12 | 83,51 | 91,19 | 93,73 | 93,26 | 94,2 | 95,64 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 20 | 25,15 | 30,44 | 29,11 | 30,41 | 26,88 | 94,32 | 93,16 | 86,04 | 89,6 | 88,76 | 90,27 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 78,48 | 86,63 | 85,78 | 80,33 | 81,45 | 86,37 | 67,98 | 75,68 | 79,7 | 83,61 | 86,09 | 82,81 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 76,39 | 66,59 | 74,81 | 77,84 | 80,3 | 84,3 | 72,08 | 82,49 | 85,32 | 92,17 | 91,12 | 90,75 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 57,21 | 61,1 | 63,73 | 63,94 | 63,86 | 62,72 | 73,87 | 83,91 | 81,13 | 87,52 | 86,38 | 86,56 |
| 14.08 | Kab. Siak | 83,95 | 85,95 | 83,11 | 86,98 | 85,29 | 90,1 | 82,81 | 94,18 | 92,3 | 93,13 | 91,62 | 93,76 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 70,54 | 71,34 | 73,49 | 74,56 | 68,1 | 71,06 | 70,13 | 79,33 | 88,19 | 85,78 | 82,49 | 83,02 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 9,77 | 7,79 | 12,06 | 7,71 | 5,54 | 10,42 | 89,99 | 84,18 | 87,78 | 88,69 | 94,62 | 93,37 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 93,56 | 96,48 | 94,16 | 93,86 | 89,99 | 92,17 | 93,31 | 98,3 | 97,99 | 98,76 | 98,57 | 99,17 |
| 14.12 | Kota Dumai | 86,74 | 87,9 | 90,7 | 90,39 | 94,05 | 86,9 | 84,31 | 89,76 | 91,49 | 92,86 | 89,96 | 89,81 |

Sumber: Publikasi Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau – BPS Provinsi Riau Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat sampai dengan Tahun 2023 baru 72,70 persen Rumah Tangga di Provinsi Riau yang mempunyai sumber air minum bersih, dan 90,47 persen Rumah Tangga yang mempunyai akses terhadap sumber air minum layak. Persentase Rumah Tangga yang mempunyai sumber air minum bersih Tahun 2023 meningkat 6,24 persen dari kondisi pada Tahun 2018, yang sebesar 68,43 persen. Adapun Persentase Rumah Tangga yang mempunyai akses terhadap air minum layak pada Tahun 2023 meningkat sebesar 13,54 persen dari Tahun 2018. Hal ini menunjukkan relatif lambatnya pertumbuhan penyediaan sumber air bersih, dan akses terhadap air minum layak di Provinsi Riau

Dari 12 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau, persentase rumah tangga yang mempunyai sumber air bersih terendah pada periode Tahun 2018 – Tahun 2023 adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan kondisi yang menurun sampai dengan Tahun 2022, yaitu 9,77 persen pada Tahun 2018 dan menjadi 5,54 persen pada Tahun 2022. Namun pada Tahun 2023 terjadi perbaikan, dimana persentase rumah tangga yang memiliki sumber air minum bersih menjadi 10,42 persen. Kabupaten dengan persentase rumah tangga dengan sumber bersih yang paling rendah pada periode Tahun 2018 – 2023 berikutnya adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis, dengan persentase masing-masing sebesar 26,88 persen, 62,72 dan 63,12 persen pada Tahun 2022.

Upaya penyediaan sumber air minum bersih dilakukan pemerintah dengan pembangunan SPAM perpipaan maupun SPAM non perpipaan. Pembangunan SPAM Non Perpipaan telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk penyediaan sumur bor di daerah permukiman, dan penyediaan air minum berbasis masyarakat di daerah perdesaan. Namun sejauh ini belum tersedia data yang lengkap terkait hal ini SPAM Non Perpipaan, ditambah lagi dengan berakhirnya Program Pamsimas pada Tahun 2023, menyebabkan tidak tersedia lagi data PAMSIMAS di website Kementerian PUPR.

a) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyediaan Air Minum menerangkan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah suatu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana

dan prasarana yang mengikut proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan penyediaan air minum bersih terutama di daerah perkotaan, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi telah berupaya membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan. Dari data yang dipublikasi oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Riau, diketahui terdapat 129 Unit SPAM Perpipaan yang dikelola oleh 12 Kabupaten/Kota, 17 diantaranya tidak berfungsi, 2 unit belum berfungsi, 1 unit berfungsi tapi belum operasional, dan 2 unit membutuhkan rehabilitasi. Selain itu di Provinsi Riau juga terdapat 2 SPAM Regional, yaitu SPAM Regional Durolis dan SPAM Regional Pekan Kampar, yang keduanya belum berfungsi secara optimal.

Seluruh SPAM perpipaan yang ada di Provinsi Riau mempunyai total kapasitas sebesar 3.617,55 liter/detik. Kapasitas tersebut setara untuk melayani 289.404 Sambungan Rumah Tangga. Namun sampai dengan Tahun 2023, masih terdapat idle capacity sebesar 1.550,00 liter/detik atau 42,85 persen dari kapasitas terpasang. Adapun jumlah Sambungan Rumah Tangga yang telah terpasang baru mencapai 99.339 Sambungan Rumah Tangga atau 34,35% dari kapasitas layanan. Waktu produksi rata-rata seluruh SPAM adalah 13,89 jam/hari, sedangkan jam distribusi 12,83 jam/hari dari target seharusnya 24 jam per hari. Tingkat kehilangan air rata-rata dari seluruh SPAM yang ada lebih kurang 32,62 persen. Data terkait SPAM yang ada di Provinsi Riau pada Tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.90
Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan di Wilayah Provinsi Riau Tahun 2023

| Kode | Kabupaten/ Kota | Jumlah SPAM (Unit) | Jumlah SPAM Belum/ Tidak Berfungsi | Kapasitas (L/Det.) | | | Idle Capacity | | Jam Operasi (Jam/ Hari) | | % NRW (Kehilangan Air) | Pelayanan Unit SR |
|---------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------------|
| | | | | IPA Terpasang | Produksi | Distribusi | (L/Det.) | % | Produksi | Distribusi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 14 | - | 307,05 | 174,15 | 148 | 132,9 | 43,28 | 10,11 | 10,11 | 18,19 | 10.538 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 15 | - | 375 | 276,6 | 272,72 | 98,4 | 26,24 | 13,44 | 13,44 | 37,98 | 15.238 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 6 | 1 | 347,5 | 134,69 | 129,37 | 212,81 | 61,24 | 14 | 12,17 | 27,17 | 13.293 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 22 | 7 | 380 | 163,61 | 158,05 | 216,89 | 57,08 | 9,47 | 9,33 | 53,9 | 11.642 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 12 | - | 92,5 | 56,5 | 56 | 36 | 38,92 | 10,33 | 10,08 | 20-30 | 3.396 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 16 | 3 | 420 | 298 | 231 | 122 | 29,05 | 6 | 5,92 | 25,5 | 5.428 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 5 | 5 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 14.08 | Kab. Siak | 14 | - | 375 | 230 | 200,5 | 145 | 38,67 | 11,43 | 9,21 | 30,7 | 12.472 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 9 | 1 | 140 | 10 | 110 | 30 | 21,43 | 9 | 8,33 | 36 | 4.792 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 8 | 2 | 58,5 | 47,5 | 30 | 11 | 18,8 | 8 | 2 | 28,57 | 2.063 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 2 | - | 580 | 277 | 225 | 303 | 52,24 | 24 | 24 | 66 | 13.455 |
| 14.12 | Kota Dumai | 6 | - | 442 | 300 | 90 | 142 | 32,13 | 24 | 22,5 | 34,8 | 7.022 |
| Jumlah | | 129 | 19 | 3.617,55 | 2.068,05 | 1.950,64 | 1.550,00 | 42,85 | 13,89 | 12,83 | 32,62 | 99.339 |

Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau, 2024 (diolah)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045

b) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan

Untuk meningkatkan pelayanan air minum di wilayah perdesaan, Pemerintah berupaya menyediakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Non Jaringan Perpipaan, berupa SPAM yang pengelolaannya diserahkan kepada kelompok masyarakat dan sumur bor yang berfungsi sebagai hydrant umum. Pembangunan SPAM Non Jaringan di wilayah Provinsi Riau, terutama di wilayah pesisir tidak mudah, karena terbatasnya kualitas air permukaan, dan air sumur dangkal, demikian juga dengan upaya memanfaatkan sumur air dalam. Pada saat dilakukan pemboran untuk memperoleh air sumur dalam, kualitas air yang ditemukan cenderung mengandung ferum yang tinggi, atau jumlah air yang terbatas, akibatnya setelah pemanfaatan dalam jangka pendek sumber air sudah tekor atau air tidak lagi tersedia. Data jumlah Kepala Keluarga atau Rumah Tangga yang telah mendapat layanan SPAM Non Jaringan Perpipaan di wilayah Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.91 Data Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Non Jaringan Perpipaan di Wilayah Provinsi Riau Tahun 2023

| Kode | Kabupaten/Kota | Layanan Spam Non Jaringan Perpipaan (Kk) | | | | |
|---------------|------------------------|--|-----------------|------------|--------------------------|---------------|
| | | PAMSIMAS | SPAM Permukiman | | Sumur Bor / Hidrant Umum | Jumlah |
| | | | 2022 | 2023 | | |
| 14.01 | Kab. Kampar | 13.162 | 74 | 157 | - | 13.393 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 9.655 | 45 | - | - | 9.700 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 5.498 | 45 | 95 | - | 5.638 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 9.550 | 78 | 92 | 7.469 | 17.189 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 5.325 | 23 | - | - | 5.348 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 8.669 | 48 | 190 | - | 8.907 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 3.149 | 52 | 60 | - | 3.261 |
| 14.08 | Kab. Siak | 5.336 | 39 | - | - | 5.375 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 6.916 | 35 | - | - | 6.951 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 7.240 | 39 | 75 | - | 7.354 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 1.280 | | 51 | - | 1.331 |
| 14.12 | Kota Dumai | 391 | 23 | 55 | - | 469 |
| JUMLAH | | 76.171 | 501 | 775 | 7.469 | 84.916 |

Sumber: BPPW Provinsi Riau dan Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, 2023, diolah

2.3.3.7 Akses Terhadap Sanitasi Layak

Pengolahan limbah domestik merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal untuk Bidang Pekerjaan Umum yang merupakan pelayanan dasar. Salah satu indikator kinerja dalam pembangunan pengolahan limbah domestik adalah akses sanitasi layak. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat.

Pada tahun 2023, persentase rumah tangga di Provinsi Riau yang mempunyai akses sanitasi layak mencapai 84,58 persen. Kondisi ini meningkat sebesar 5,57 persen dari Tahun 2018. Dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, terdapat 3 Kabupaten dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak lebih rendah dari Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 57,13 persen, Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 57,67 persen, Kabupaten Rokan Hilir sebesar 79,71 persen. Mengingat air limbah domestik merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal, perlu diupayakan peningkatan akses sanitasi layak di Provinsi Riau, terutama di 3 kabupaten yang kondisinya lebih rendah dari Provinsi Riau. Data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.92 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten/Kota Tahun 2018 - 2023

| Kode | Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (Persen) | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1401 | Kuantan Singingi | 77,53 | 79,91 | 82,81 | 87,98 | 86,98 | 85,36 |
| 1402 | Indragiri Hulu | 80,26 | 77,79 | 84,16 | 82,82 | 84,63 | 85,43 |
| 1403 | Indragiri Hilir | 50,60 | 46,80 | 59,33 | 49,64 | 56,32 | 57,13 |
| 1404 | Pelalawan | 85,87 | 83,15 | 89,18 | 81,13 | 83,77 | 85,30 |
| 1405 | Siak | 88,96 | 92,48 | 90,51 | 95,41 | 93,51 | 91,15 |
| 1406 | Kampar | 86,27 | 90,41 | 89,47 | 89,62 | 82,97 | 86,40 |
| 1407 | Rokan Hulu | 81,06 | 74,86 | 81,44 | 88,85 | 90,10 | 89,49 |
| 1408 | Bengkalis | 78,47 | 87,79 | 89,67 | 90,34 | 86,99 | 91,11 |
| 1409 | Rokan Hilir | 72,40 | 70,99 | 74,75 | 73,94 | 81,15 | 79,71 |
| 1410 | Kepulauan Meranti | 51,63 | 53,53 | 57,43 | 55,98 | 57,03 | 57,67 |
| 1471 | Pekanbaru | 95,33 | 93,35 | 96,73 | 96,28 | 96,65 | 95,13 |
| 1473 | Dumai | 92,39 | 94,65 | 95,38 | 97,03 | 91,44 | 95,50 |
| Provinsi Riau | | 80,12 | 80,04 | 83,99 | 83,64 | 84,06 | 84,58 |

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024

2.3.3.8 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

Salah satu indikator pembangunan untuk pengolahan limbah domestik adalah persentase rumah tangga yang mempunyai akses sanitasi aman. Akses sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga, yang terhubung dengan septic tank, dan disedot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolahan tinja atau IPLT.

Tabel 2.93 Kondisi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Provinsi Riau

| Kode | Kabupaten/ Kota | Nama Iplt | Lokasi Kecamatan/ Distrik | Kapasitas (Debit) Iplt | Kapasitas Terpakai | Target Kk Terlayani | Opsi Teknologi Iplt | Fungsiona- lisasi | Armada |
|------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| 1401 | Kuantan Singingi | Iplt Kabupaten Kuantan Singingi | Sentajo Raya | 15 M3/Hari | 2 M3/Hari | 3.600 | Solid Separation Chamber (Ssc) | Berfungsi | 1 Unit Truk Tinja Kapasitas 4m3 tahun 2007 (APBD) |
| 1402 | Indragiri Hulu | Iplt Kabupaten Indragiri Hulu | Rengat Barat | 10 M3/Hari | 8 M3/Hari | 800 | Solid Separation Chamber (Ssc) | Berfungsi | 1 Unit Truk Tinja Tahun 2016 (APBN) Kapasitas 5M3 |
| 1405 | Siak | Iplt Kecamatan Tualang | Tualang | 10 M3/Hari | 8 M3/Hari | 3.500 | Solid Separation Chamber (Ssc) | Berfungsi | 1 Unit Truk Tinja Tahun 2016 (APBD) Kapasitas 4M3 |
| 1406 | Kampar | Iplt Kabupaten Kampar | Bangkinang | 10 M3/Hari | 0 M3/Hari | 46.367 | Solid Separation Chamber (Ssc) | Belum Berfungsi | 1 Unit Truk Tinja Tahun 2020 (APBN) Kapasitas 4M3 |
| 1407 | Rokan Hulu | Iplt Kabupaten Rokan Hulu | Rambah | 10 M3/Hari | 0 M3/Hari | 60.376 | Solid Separation Chamber (Ssc) | Belum Berfungsi | 1 Unit Truk Tinja Tahun 2020 (APBN) Kapasitas 4M3 |
| 1408 | Bengkalis | Iplt Kota Duri | Bathin Selopan | 5 M3/Hari | 0 M3/Hari | 2.700 | Solid Separation Chamber (Ssc) | Belum Berfungsi | Belum mempunyai armada truk tinja |
| 1471 | Pekanbaru | Iplt Muara Fajar (Optimalisasi) | Rumbai | 40 M3/Hari | 0 M3/Hari | 100 | Tangki Imhoff | Tidak Berfungsi | 1 Unit Truk Tinja, 2005 (APBN), sudah beralih fungsi menjadi armada penyiram tanaman |
| 1473 | Dumai | Iplt Kota Dumai | Dumai Selatan | 10 M3/Hari | 0 M3/Hari | 58.332 | Solid Separation Chamber (Ssc) | Belum Berfungsi | 1 Unit Truk Tinja Tahun 2020 (APBN) Kapasitas 4M3 |

Sumber : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Riau, 2024

Sampai dengan Tahun 2023, telah dibangun 8 unit IPLT di 8 Kabupaten/Kota, namun 4 unit belum berfungsi dan 1 unit, yaitu di Kota Pekanbaru tidak berfungsi. Belum berfungsinya IPLT, umumnya terkait dengan kelmbagaan, yaitu belum terbentuknya unit pengelola dan regulasi terkait pengelolaan IPLT. Data terkait IPLT yang telah ada di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel diatas.

2.3.3.9 Persampahan

Persentase cakupan area pelayanan persampahan di Provinsi Riau Tahun 2018 sampai dengan 2023 relatif tetap, yaitu 49,59%. Dimana pelayanan persampahan terendah adalah 10,00% yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir dan 100,00% di Kota Pekanbaru. Untuk kabupaten/kota yang cakupan pelayanannya masih rendah perlu program peningkatan kinerja dinas terkait dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah. Capaian pengelolaan sampah, baik penanganan maupun pengurangan sampah di Provinsi Riau tahun 2018 - 2023 masih belum bisa mengikuti capaian nasional. Hal ini karena masih kurangnya sarana prasarana, anggaran pengelolaan sampah dan kepedulian masyarakat terhadap sampahnya. Disamping itu, timbulan sampah akan selalu meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Persentase cakupan area pelayanan persampahan Provinsi Riau tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.94 Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan Tahun 2018-2023

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 | RIAU | 49,59 | 49,59 | 49,59 | 49,59 | 49,59 | 49,59 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 21,39 | 17,98 | 17,63 | 30 | 30 | 33,33 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 56,02 | 56,02 | 56,02 | 42,86 | 42,86 | 42,86 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 73,07 | 65,06 | 68,12 | 90,9 | 90,9 | 90,91 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 21,32 | 21,32 | 21,99 | 10 | 10 | 10 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 26,89 | 32,42 | 29,4 | 41,7 | 41,7 | 41,67 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 40 | 19,54 | 19,15 | 25 | 25 | 25 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 51,2 | 29,4 | 29,66 | 33,3 | 33,3 | 33,33 |
| 14.08 | Kab. Siak | 70,08 | 70,08 | 73,53 | 78,57 | 78,57 | 78,57 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 37,64 | 37,64 | 37,01 | 60 | 60 | 60 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22,22 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 70 | 71,64 | 67,77 | 100 | 100 | 100 |
| 14.12 | Kota Dumai | 82,29 | 82,29 | 90,32 | 83,1 | 83,1 | 57,14 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2018 - 2023

Dari tabel di atas, cakupan area pelayanan persampahan pada tahun 2023 Kota Pekanbaru mencapai seratus persen. Untuk kabupaten/kota yang cakupan pelayanannya masih rendah perlu program peningkatan kinerja dinas terkait dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah.

Jumlah timbunan sampah Provinsi Riau (data dari 10 kabupaten/kota) pada tahun 2023 sebesar 1.051.298,13 ton, dimana upaya pengurangan sampah sebesar 90.898,22 ton (8,65%), penanganan sampah sebesar 464.561,28 ton (44,19%) dan timbunan sampah terolah sebesar 555.459,5 ton (52,84%). Perhitungan sampah sangat dipengaruhi ketaatan kabupaten/kota dalam pelaporan capaian kebijakan strategi daerah persampahan. Timbunan sampah tertinggi berada di Kota Pekanbaru sedangkan terendah berada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jumlah timbunan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah Provinsi Riau tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.95 Jumlah Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah Provinsi Riau Tahun 2019-2023 (Ton)

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
| 1 | Timbunan Sampah | 1.941.104,71 | 2.892.076,5 | 2.955.442,78 | 1.342.018 | 1.051.298,13 |
| 2 | Pengurangan Sampah | 191.963,87 | 129.041,38 | 197.931,1 | 111.092,3 | 90.898,22 |
| 3 | Penanganan Sampah | 460.943,3 | 690.007,95 | 510.597,27 | 524.900 | 464.561,28 |
| 4 | Timbunan Sampah Terolah | 652.907,17 | 819.049,33 | 708.528,37 | 635.992,3 | 555.459,5 |
| | Keterangan | Data 9 kab/kota | Data 11 kab/kota | Data 12 kab/kota | Data 12 kab/kota | Data 10 kab/kota |

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

2.3.3.10 Akses Hunian yang Layak dan Terjangkau

Keberhasilan penanganan Rumah Tidak Layak Huni ditandai dengan tingginya angka capaian pada indikator "Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau". Indikator ini merupakan indikator yang telah ditetapkan secara Nasional, dengan perhitungan angka yang dikeluarkan oleh BPS. Angka ini diperoleh dengan memperhatikan pemenuhan 4 (empat) kriteria yaitu: Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita; Memiliki akses terhadap air minum layak; Memiliki akses terhadap sanitasi layak; dan Ketahanan bangunan dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, baik untuk dimiliki sendiri maupun untuk disewa. Hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi dari 30%. Saat ini perhitungan keterjangkauan akan

dilakukan terbatas bagi rumah tangga dengan kategori sewa. Sementara, untuk rumah tangga yang menghuni milik sendiri maka diasumsikan terjangkau

Mulai tahun 2025, terjadi perubahan nomenklatur pada indikator ini yaitu menjadi “Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan”. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama BPS dan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan (BP2P), formulasi untuk keberlanjutan belum dapat diperhitungkan karena data yang dibutuhkan berupa Sertifikat Laik Fungsi (SLF) belum tersedia. Sehingga proyeksi kedepannya masih dengan formulasi perhitungan yang telah ada yaitu dengan memperhatikan pemenuhan 4 kriteria yang telah disebutkan di awal pembahasan. Pada tabel berikut ini akan disajikan data capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau tahun 2019-2023.

Tabel 2.96 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019-2023

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 | RIAU | 62,94 | 68,44 | 70,63 | 69,43 | 71,53 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 70,93 | 72,89 | 75,03 | 69,69 | 73,80 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 53,94 | 60,74 | 54,71 | 57,67 | 61,83 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 70,63 | 80,49 | 78,99 | 77,66 | 81,43 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 35,57 | 46,71 | 38,82 | 39,58 | 46,93 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 59,47 | 68,13 | 66,71 | 62,01 | 67,64 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 57,09 | 63,33 | 77,76 | 75,92 | 74,40 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 54,77 | 53,61 | 62,07 | 62,94 | 62,78 |
| 14.08 | Kab. Siak | 60,30 | 66,26 | 72,76 | 78,25 | 75,19 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 62,81 | 72,35 | 74,71 | 68,53 | 68,96 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 45,87 | 51,60 | 48,77 | 48,95 | 52,22 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 83,70 | 86,88 | 89,70 | 90,25 | 90,17 |
| 14.12 | Kota Dumai | 78,61 | 82,31 | 84,76 | 75,63 | 81,30 |

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret Povinsi Riau 2019-2023, BPS Provinsi Riau (diolah)

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian terendah untuk indikator ini kebanyakan berada pada kabupaten yang terletak di daerah pesisir seperti Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Rokan Hilir. Capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak

dan terjangkau di Provinsi Riau cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, capaian tahun 2023 naik sebesar 2,1% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Namun jika melihat data P3KE (10 Juni 2024) yang merujuk pada 4 kriteria pembentuk indikator di atas, maka masih terdapat 59.554 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota, dimana Kabupaten dengan jumlah RTLH tertinggi adalah Kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah RTLH sebanyak 11.064 unit. Sedangkan menurut data E-RTLH (10 Juni 2024), maka masih terdapat 76.464 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dimana Kabupaten dengan jumlah RTLH tertinggi adalah Kabupaten Siak dengan jumlah RTLH sebanyak 12.198 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.90. Hal tersebut merupakan tugas bersama (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) untuk dituntaskan. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni pada dasarnya juga mendapatkan dukungan dari stakeholder lainnya di luar Pemerintah seperti Basnaz dan CSR, namun tidak terdata secara time series.

Tabel 2.97 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Data E-RTLH dan Data P3KE (Tertanggal 10 Juni 2024)

| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah RTLH | |
|-----------|------------------------|---------------|---------------|
| | | Data E-RTLH | Data P3KE |
| 14 | RIAU | 76.464 | 59.554 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 8.188 | 5.616 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 733 | 3.717 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 8.922 | 5.046 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 8.094 | 11.064 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 2.167 | 3.776 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 9.581 | 6.112 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 9.008 | 7.108 |
| 14.08 | Kab. Siak | 12.198 | 1.175 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 167 | 3.977 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 7.189 | 9.616 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 9.779 | 1.776 |
| 14.12 | Kota Dumai | 438 | 571 |

Sumber : Data E-RTLH dan Data P3KE 2024 (diolah)

Selain data P3KE dan E-RTLH, kebutuhan Hunian layak juga dapat dilihat dari persentase rumah berdasarkan status penguasaan bangunan tempat tinggal. Untuk lebih detailnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.98 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Riau Tahun 2023

| Kode | Kabupaten/ Kota | Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Milik Sendiri | | | | | Kontrak/Sewa | | | | | Lainnya | | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14 | RIAU | 70,55 | 69,78 | 72,52 | 76,52 | 77,56 | 15,40 | 13,61 | 11,82 | 10,12 | 8,31 | 14,05 | 16,61 | 15,66 | 13,36 | 14,13 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 75,1 | 67,75 | 73,49 | 80,81 | 80,41 | 9,31 | 9,59 | 7,7 | 4,77 | 4,76 | 15,59 | 22,66 | 18,81 | 14,42 | 14,83 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 82,82 | 80,42 | 76,52 | 86,61 | 85,05 | 6 | 6,57 | 6,22 | 3,52 | 3,24 | 11,18 | 13,01 | 17,27 | 9,88 | 11,72 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 77,52 | 78,67 | 75,76 | 77,06 | 79,68 | 14,54 | 13,18 | 10,13 | 10,06 | 8,18 | 7,94 | 8,14 | 14,11 | 12,88 | 12,14 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 82,11 | 83 | 82,73 | 86,98 | 89,47 | 6,44 | 4,66 | 3,66 | 3,2 | 1,84 | 11,45 | 12,34 | 13,61 | 9,81 | 8,69 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 63,91 | 57,44 | 69,16 | 66,15 | 70,02 | 14,01 | 13,18 | 12,45 | 10,52 | 6,74 | 22,08 | 29,37 | 18,38 | 23,33 | 23,24 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 79,27 | 72,51 | 73,87 | 79,93 | 81,22 | 8,49 | 5,94 | 9,01 | 5,98 | 6,23 | 12,24 | 21,55 | 17,11 | 14,09 | 12,55 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 70,98 | 76,71 | 78,86 | 80,7 | 79,95 | 8,9 | 6,77 | 4,73 | 4,99 | 5,04 | 20,12 | 16,53 | 16,41 | 14,31 | 15 |
| 14.08 | Kab. Siak | 74,73 | 69,07 | 75,01 | 78,37 | 77,53 | 12,98 | 9,46 | 12,07 | 8,92 | 6,5 | 12,28 | 21,47 | 12,92 | 12,71 | 15,97 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 81,79 | 81,19 | 82,72 | 88,56 | 86,47 | 4,53 | 5,74 | 6,86 | 2,47 | 3,18 | 13,67 | 13,07 | 10,43 | 8,97 | 10,35 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 90,75 | 89,89 | 88,55 | 89,13 | 90,21 | 3,9 | 3,36 | 3,5 | 2,51 | 1,87 | 5,35 | 6,75 | 7,95 | 8,36 | 7,92 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 45,81 | 51,26 | 54,71 | 58,84 | 59,66 | 39,64 | 35,35 | 28,2 | 28,26 | 23,73 | 14,55 | 13,38 | 17,09 | 12,89 | 16,61 |
| 14.12 | Kota Dumai | 56,52 | 58,56 | 65,31 | 67,52 | 71,12 | 28,32 | 28,52 | 22,75 | 18,75 | 14,84 | 15,16 | 12,92 | 11,94 | 13,73 | 14,04 |

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, Maret 2023

Data persentase rumah berdasarkan status penguasaan bangunan tempat tinggal merupakan angka dasar dalam perhitungan Backlog Perumahan. Backlog Perumahan adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat, atau kuantitas rumah yang belum/tidak

tertangani. Selain itu, Backlog perumahan diartikan juga sebagai rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah di tempat lain dengan formulasi sebagai berikut : Persentase Rumah Tangga dengan status kontrak/sewa + Persentase Rumah Tangga dengan status lainnya - Persentase Rumah Tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri namun memiliki rumah ditempat lain. Berdasarkan data BPS, angka Backlog perumahan di Provinsi Riau dari tahun 2019-2023 secara berturut-turut adalah 26,17% (2019); 26,81% (2020); 24,56% (2021); 21,05% (2022); 20,54% (2023).

Sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, Pemerintah Provinsi Riau telah berusaha untuk menangani Rumah Tidak Layak Huni melalui Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2021, bantuan rumah Layak Huni (RLH) di Provinsi Riau dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke 12 Kabupaten/Kota. Dari tahun 2017-2023 telah dilaksanakan pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 8.707 unit dan pada tahun 2024, berdasarkan SK Bantuan Keuangan Provinsi diketahui bahwa Pembangunan RLH sebanyak 305 unit. Untuk detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.99 Pembangunan Rumah Layak Huni Di Provinsi Riau Tahun 2017 – 2023 (Unit)

| Kode | Kabupaten/ Kota | TAHUN | | | | | | | Total | RLH TA. 2024 |
|-------|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|--------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 14.01 | Kab. Kampar | 165 | 226 | 189 | 16 | 224 | 144 | 96 | 1.060 | 123 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 167 | 172 | 180 | 17 | - | 90 | 50 | 676 | 12 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 172 | 180 | 153 | 17 | 139 | 77 | 54 | 792 | 20 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 167 | 218 | 160 | 26 | 132 | 70 | 67 | 840 | 21 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 166 | 167 | 128 | 16 | - | 20 | 50 | 547 | 0 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 165 | 155 | 137 | 18 | 266 | 157 | 70 | 968 | 15 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 166 | 170 | 185 | 15 | 113 | 60 | 50 | 759 | 63 |
| 14.08 | Kab. Siak | 166 | 154 | 172 | 17 | - | 75 | 50 | 634 | 5 |

| Kode | Kabupaten/ Kota | TAHUN | | | | | | | Total | RLH TA. 2024 |
|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 167 | 161 | 112 | 16 | - | 24 | 74 | 554 | 1 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 167 | 144 | 173 | 15 | 49 | 20 | 46 | 614 | 10 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 179 | 164 | 104 | 18 | 147 | 90 | 50 | 752 | 15 |
| 14.12 | Kota Dumai | 167 | 150 | 90 | 16 | - | 38 | 50 | 511 | 20 |
| Jumlah | | 2.014 | 2.061 | 1.783 | 207 | 1.070 | 865 | 707 | 8.707 | 305 |

Sumber : Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Tahun 2024

Selain Pembangunan RLH melalui mekanisme BKK, Provinsi Riau juga melaksanakan Pembangunan RLH yang menjadi kewenangannya, dimana hal tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan SPM Perumahan yaitu pembangunan RLH untuk korban bencana dan korban relokasi akibat Program Pemerintah Provinsi. Mulai dari tahun 2021-2023 telah terlaksanan pembangunan RLH untuk korban bencana sebanyak 119 unit dan pembangunan RLH untuk korban relokasi Program Pemerintah Provinsi sebanyak 24 unit. Untuk data detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.100 Realisasi Rumah Layak Huni Korban Bencana Yang Tertangani Tahun 2021-2023

| No. | Kabupaten/Kota | Unit | Keterangan |
|-------------------|----------------------|------|--|
| TAHUN 2021 | | | |
| 1 | Kab. Indragiri Hilir | 10 | - Lokasi : Kel. Tanjung Baru Kec. Tanah Merah. - Bencana : Longsor |
| | | 10 | - Lokasi : Kel. Enok Kec. Tanah Merah - Bencana : Longsor |
| 2 | Kab. Rokan Hilir | 5 | - Lokasi : Kel. Bangko Kec. Bagan Kunak. - Bencana : Kebakaran |
| 3 | Kab. Kampar | 21 | - Lokasi : Desa Gobah Kec. Tambang. - Relokasi Program Pemerintah : Pembangunan Turap |

| No. | Kabupaten/Kota | Unit | Keterangan |
|-------------------|----------------------|------|--|
| TAHUN 2022 | | | |
| 1 | Kab. Indragiri Hilir | 11 | - Bencana : Longsor |
| 2 | Pekanbaru | 3 | - Relokasi Program Pemerintah : Pelebaran jalan provinsi |
| TAHUN 2023 | | | |
| 1 | Kab. Indragiri Hilir | 28 | - Bencana : Abrasi Sungai |
| 2 | Kab. Rokan Hilir | 54 | - Bencana : Abrasi Sungai |
| 3 | Kota Pekanbaru | 1 | - Bencana : Longsor |

Sumber : Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Tahun 2024

Meskipun Pemerintah Provinsi Riau dan seluruh Stakeholder telah berupaya untuk menangani Rumah Tidak Layak Huni sebagai kebutuhan dasar masyarakat, namun upaya tersebut belum bisa dilaksanakan secara maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat diantaranya yaitu : Masih terbatasnya Kewenangan Pemerintah Daerah; Program Kegiatan Pemerintah belum melayani seluruh segmentasi masyarakat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja sektor informal; Kurangnya pengawasan untuk menjamin keandalan bangunan dan kesesuaian terhadap tata ruang; Belum optimalnya integrasi antara penyediaan perumahan dengan sarana prasarana khususnya di perkotaan; Pasar pembiayaan primer dan skunder perumahan yang belum mapan; serta manajemen dan pemanfaatan lahan untuk perumahan yang belum efektif (ketersediaan lahan, urban sprawl/tumbuhnya wilayah perkotaan yang tidak terstruktur, dan keamanan bermukim).

Pemenuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat perlu menjadi perhatian pemerintah karena rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

2.3.3.11 Kawasan Kumuh

Kekumuhan suatu kawasan ditandai pada 7 aspek diantaranya yaitu : Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan dan Proteksi

Kebakaran. Berdasarkan SK Kumuh yang telah ditetapkan oleh 12 Bupati/Walikota yang ada di Provinsi Riau, diketahui bahwa adanya 3 katagori luas kawasan yang harus ditangani yaitu : Kawasan Kumuh dengan luas 0-10 Ha yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota, Kawasan Kumuh dengan luas 10-15 Ha yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi serta Kawasan Kumuh dengan luas diatas 15 Ha yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat. Namun pada Surat Keputusan (SK) yang telah ditetapkan (periode SK Kumuh sampai dengan tahun 2023), tidak satupun SK yang menampilkan Kondisi kekumuhan tiap kawasan dan pola penanganan berdasarkan 7 kriteria yang telah disebutkan.

Berdasarkan SK Awal yang menjadi data dasar di tahun 2020 (Penggalan 5 tahun terakhir periode RPJP 2005-2025), diketahui bahwa luasan kawasan kumuh yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau seluas 249,27 Ha, luasan tersebutlah yang menjadi pedoman dalam melakukan intervensi penanganan kawasan kumuh. Mulai dari tahun 2017-2023 telah dicapai penanganan kawasan kumuh seluas 103,07 Ha, sehingga sisa luasan kawasan kumuh yang harus dituntaskan seluas 146,20 Ha. Untuk lebih detailnya, capaian penanganan kawasan permukiman kumuh kewenangan Provinsi dari tahun 2017-2023 dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.101 Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Riau dari Tahun 2017-2023

| Kode | Provinsi/Kabupaten/ Kota | Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Ha) | Capaian Luas Kawasan Kumuh Tertangani (Ha) | Capaian Penurunan Luas Kawasan Kumuh (Ha) |
|-----------|-----------------------------|---|---|---|--|
| 14 | RIAU | 20 Kawasan | 249,27 | 102,18 | 147,09 |
| 14.01 | Kab. Kampar | - | - | - | - |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | Sekip Hulu | 13,58 | 10,77 | 2,81 |
| | | Kampung Dagang | 14,89 | 14,89 | 0 |
| | | Air Molek 1 | 13,68 | 1,02 | 12,66 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | Perkotaan Bengkalis- Cik Mas Ayu | 11,23 | 6,13 | 5,1 |
| | | Perkotaan Duri - Batang Serosa | 13,11 | - | 13,11 |

| Kode | Provinsi/Kabupaten/ Kota | Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Kawasan Permukiman | Capaian Luas Kawasan | Capaian Penurunan Luas |
|-------|-----------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | Permukiman Nelayan Tanjung Medang | 11,81 | 2,03 | 9,78 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | Pulau Kijang | 13,09 | 13,09 | 0 |
| | | Teluk Pinang | 11,85 | 2,04 | 9,81 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | - | - | - | - |
| 14.01 | Kab. Rokan Hulu | Dusun 1 | 11,87 | 2,4 | 9,47 |
| | | Tulang Gajah | 10,22 | - | 10,22 |
| | | Petakur Bawah | 10,96 | 10,96 | 0 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | - | - | - | - |
| 14.08 | Kab. Siak | Kampung Tualang | 12,04 | 12,04 | 0 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | Sawah Taluk | 11,3 | 11,3 | 0 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | Kawasan Kota Lama Selat Panjang | 11,8 | 0,24 | 11,56 |
| | | Kawasan Kota Lama Selan Panang I | 14,8 | - | 14,8 |
| | | Kawasan Kota Lama Selan Panang II | 13,2 | 0,52 | 12,68 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | Rumbai Pesisir | 14,6 | - | 14,6 |
| | | Lembah Damai | 13 | 13 | 0 |
| 14.12 | Kota Dumai | Pangkalan Sesai | 11,3 | 1,06 | 10,24 |
| | | Dumai Selatan | 10,94 | 0,69 | 10,25 |

Sumber: Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2024

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 3 kabupaten yang tidak diintervensi penanganan kawasan kumuhnya oleh pemerintah provinsi karena pada kabupaten tersebut tidak terdapat kawasan kumuh dengan luasan 10-15 ha. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hilir.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045

Masih banyaknya luasan kawasan kumuh yang harus dituntaskan diakibatkan oleh pencegahan dan pengentasan kawasan kumuh belum dilakukan secara terpadu. Artinya setelah dilakukan penanganan, kekumuhan kawasan tersebut akan muncul ditahun-tahun berikutnya karena penanganannya tidak meliputi 7 aspek, hanya menangani sebahagian kecil saja. Selain itu, pembagian anggaran untuk penanganan kawasan kumuh masih berdasarkan asas sama rata antar kabupaten/kota, sehingga penanganan tidak dapat dilakukan secara tuntas serta pola penanganan kawasan kumuh masih diseragamkan untuk seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, belum berdasarkan tingkat kekumuhannya.

Seiring berjalannya waktu, masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota mengupdate data luasan kawasan kumuhnya yang mengakibatkan bertambahnya luas kawasan kumuh baik yang menjadi kewenangan pusat maupun yang menjadi kewenangan Provinsi. Untuk menertibkan hal tersebut, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau melakukan verifikasi terhadap seluruh SK Kumuh yang ada di 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau serta membuat format baku yang harus menampilkan tingkat kekumuhan disetiap kawasan kumuh. Format tersebut menjadi acuan untuk SK Kumuh di tahun 2024.

Puncak acara verifikasi SK Kumuh kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 1 April 2024 yang menghasilkan output Berita Acara Kesepakatan Bersama antara pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Riau dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau yang berisikan tentang penetapan hasil verifikasi luasan permukiman kumuh pada 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Luasan hasil verifikasi ini akan menjadi angka luasan yang ditampilkan pada SK Kumuh Kabupaten/Kota di tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, data luasan kumuh Kabupaten/Kota Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102 Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama dan SK Kumuh Kabupaten/Kota Tahun 2024

| No | Kabupaten/Kota Nomor BA Kesepakatan (1 s/d 3) Nomor SK Kumuh Kab/Kota (4) | Luas Kawasan | | | | Jumlah Kawasan | | | |
|----|---|----------------|-----------------|----------------|--------|----------------|-----------------|----------------|-------|
| | | < 10 Hektar | 10-15 Hektar | > 15 Hektar | Total | < 10 Hektar | 10-15 Hektar | > 15 Hektar | Total |
| 1 | Kabupaten Kuantan Singingi - 600/DPKPP-KS/IV/2024/491 - 517/BA-PKP/IV/2024 - 51/BA.KUMUH/BPPW- RIAU/2024 - SK Kumuh Nomor : Kpts.296/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024 | 31,46 | 31,65 | 138,35 | 201,46 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 2 | Kabupaten Indragiri Hulu 1) 19/BA-KUMUH/DPRKP- INHU/IV/2024 2) 526/BA-PKP/IV/2024 3) 59/BA.KUMUH/BPPW- RIAU/2024 4) SK Kumuh Nomor : Kpts.336/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 | 10,13 | 11,83 | 77,69 | 99,65 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Kabupaten Indragiri Hilir 1) 000.5.7/PERKIM-SET 2) 520/BA-PKP/IV/2024 3) 53/BA.KUMUH/BPPW- RIAU/2024 4) SK Kumuh Nomor : Kpts.629/X/HK-2024 tanggal 03 Oktober 2024 | 9,39 | 58,12 | 88,70 | 156,20 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 4 | Kabupaten Pelalawan 1) 600/DPUPR/2024/60 2) 519/BA-PKP/IV/2024 3) 52/BA.KUMUH/BPPW- RIAU/2024 4) SK Kumuh Nomor : Kpts.000,7/BAPPEDA/2024/811 tanggal 13 September 2024 | 23,97 | 10,38 | 19,28 | 53,63 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Kabupaten Siak 1) 600.1.14/DPU- TARUKIM/BA.KUMUH/2024 2) 527/BA-PKP/IV/2024 3) 60/BA.KUMUH/BPPW- RIAU/2024 4) SK Kumuh Nomor : 100.3.3.2/941.a/HK/KPTS/2024 tanggal 23 September 2024 | 0,00 | 10,27 | 101,75 | 112,02 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Kabupaten Kampar 1) 600.1.14/DISPERKIM/670 2) 524/BA-PKP/IV/2024 3) 57/BA.KUMUH/BPPW- RIAU/2024 4) SK Kumuh Nomor : 522/PERKIM/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 | 29,35 | 27,25 | 75,04 | 131,64 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 7 | Kabupaten Rokan Hulu 1) 600.2/DPKP-UMPK/129 2) 518/BA-PKP/IV/2024 3) 50/BA.KUMUH/BPPW- RIAU/2024 4) SK Kumuh Nomor : 100.3.3.2/BAPPEDA/650/2024 tanggal 17 Juli 2024 | 40,72 | 56,01 | 62,36 | 159,09 | 10 | 5 | 2 | 17 |

| No | Kabupaten/Kota Nomor BA Kesepakatan (1 s/d 3) Nomor SK Kumuh Kab/Kota (4) | Luas Kawasan | | | | Jumlah Kawasan | | | |
|--------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------|
| | | < 10 Hektar | 10-15 Hektar | > 15 Hektar | Total | < 10 Hektar | 10-15 Hektar | > 15 Hektar | Total |
| 8 | Kabupaten Bengkalis 1) 600.2.1/01- BA.KUMUH/PERKIMTAN/2024 2) 523/BA-PKP/IV/2024 3) 56/BA.KUMUH/BPPW- RIAU/2024 4) SK Kumuh Nomor : 528/KPTS/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 | 62,44 | 11,49 | 32,06 | 105,99 | 11 | 1 | 2 | 14 |
| 9 | Kabupaten Rokan Hilir 1) 600/PRKP-KP?IV/2024/33 2) 525/BA-PKP/IV/2024 3) 58/BA.KUMUH/BPPW- RIAU/2024 4) SK Kumuh Nomor : 472/PERKIM/2024 tanggal 27 Juni 2024 | 46,06 | 28,49 | 46,35 | 120,90 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 10 | Kabupaten Kepulauan Meranti 1) 600/DPRKPLH- PERKIM/BA.KUMUH/070 2) 528/BA-PKP/IV/2024 3) 61/BA.KUMUH/BPPW- RIAU/2024 4) SK Kumuh Nomor : 345/HK/KPTS/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 | 67,09 | 12,26 | 53,78 | 133,13 | 16 | 1 | 3 | 20 |
| 11 | Kota Pekanbaru 1) 600.1.14/PR/PERKIM/75/2024 2) 521/BA-PKP/IV/2024 3) 54/BA.KUMUH/BPPW- RIAU/2024 4) SK Kumuh Nomor : 519 Tahun 2024 tanggal 08 Juli 2024 | 53,75 | 63,06 | 61,21 | 178,02 | 11 | 5 | 2 | 18 |
| 12 | Kota Dumai 1) 01/BA- KPLPKK/DISPERKIM/IV/2024 2) 522/BA-PKP/IV/2024 3) 55/BA.KUMUH/BPPW- RIAU/2024 4) SK Kumuh Nomor : 050.13/576/2024 tanggal 07 Mei 2024 | 13,59 | 10,76 | 140,97 | 165,32 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| Total | | 387,95 | 331,57 | 897,54 | 1617,05 | 74 | 28 | 36 | 138 |

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Bersama dan SK Kumuh Kabupaten/Kota Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa luasan kumuh kewenangan Provinsi Riau (katagori 10-15 Ha) seluas **331,57 ha** yang terdiri dari **28 Kawasan**. Luasan inilah yang akan menjadi fokus intervensi penanganan pada penggalan pertama dokumen RPJPD Provinsi Riau.

2.3.3.12 Jaringan Komunikasi

Kebutuhan jaringan komunikasi di Provinsi Riau berdasarkan pada kebutuhan internet yang dilakukan oleh provider dibawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2023 dari 382 kelurahan yang masih terdapat *Low Signal* dan *blankspot* wilayahnya. Data kelurahan yang belum sepenuhnya mempunyai akses terhadap internet dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.103 Data *Low Signal* (Sinyal Lemah) dan *Blankspot* Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022 dan 2023

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Jumlah Kelurahan/ Desa | Data <i>Low Signal</i> dan <i>Blankspot</i> | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------|--------------------|--------------|
| | | | 2022 | | 2023 | |
| | | | Kelurahan/ Desa | % | Kelurahan/ Desa | % |
| 14 | RIAU | 1.831 | 593 | 32,38 | 382 | 20,86 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 250 | 6 | 2,4 | 47 | 18,8 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 194 | 38 | 19,58 | 39 | 20,1 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 155 | 111 | 71,61 | 27 | 17,41 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 205 | 50 | 24,39 | 110 | 49,26 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 118 | 30 | 25,42 | 26 | 22,03 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 145 | 22 | 15,17 | 22 | 15,17 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 184 | 220 | 119,57 | 35 | 19,02 |
| 14.08 | Kab. Siak | 131 | 27 | 20,61 | 17 | 12,97 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 229 | 25 | 10,91 | 27 | 11,79 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 101 | 31 | 30,69 | 34 | 33,66 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 83 | 16 | 19,27 | 3 | 3,61 |
| 14.12 | Kota Dumai | 36 | 17 | 47,22 | 4 | 11,11 |

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Prov. Riau, Tahun 2024

Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah *low signal* dan *blankspot* mengalami penurunan sebesar 211 dengan selisih persentase data berdasarkan kelurahan/desa dari tahun 2022 dengan tahun 2023 sebesar 11,52%. Kabupaten/kota yang mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kota Dumai,

Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru. Jumlah *low signal* dan *blankspot* yang tetap adalah Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten yang mengalami kenaikan tahun 2023 yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hulu. Kenaikan yang dialami oleh beberapa kabupaten tersebut bisa dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk, ruang publik dan lainnya.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1 Indeks Ketahanan Nasional (IKN)

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya (Lemhanas RI, 2008). Sehingga dapat dikatakan bahwa Indeks Ketahanan Nasional suatu daerah dapat menjadi faktor penentu didalam menentukan daya saing investasi suatu daerah. Ketahanan nasional dapat digolongkan menjadi delapan gatra, meliputi gatra geografi, demografi dan sumber kekayaan alam sebagai gatra alamiah (*natural determinants*) serta gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan sebagai gatra sosial (*social determinants*).

Tabel 2.104 Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023

| No | Gatra | Tahun | | | | | | | | | |
|----|----------------------|-------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | Skor | Status Kondisi | Skor | Status Kondisi | Skor | Status Kondisi | Skor | Status Kondisi | Skor | Status Kondisi |
| 1 | Geografi | 3,19 | Cukup Tangguh | 3,15 | Cukup Tangguh | 3,48 | Tangguh | 3,35 | Cukup Tangguh | 3,35 | Cukup Tangguh |
| 2 | Demografi | 2,98 | Cukup Tangguh | 2,82 | Cukup Tangguh | 3,54 | Tangguh | 3,03 | Cukup Tangguh | 3,06 | Cukup Tangguh |
| 3 | Sumber Kekayaan Alam | 2,29 | Kurang Tangguh | 2,37 | Kurang Tangguh | 1,44 | Rawan | 2,36 | Kurang Tangguh | 2,35 | Kurang Tangguh |
| 4 | Ideologi | 2,89 | Cukup Tangguh | 3,09 | Cukup Tangguh | 2,21 | Kurang Tangguh | 2,93 | Cukup Tangguh | 3,00 | Cukup Tangguh |
| 5 | Politik | 3,22 | Cukup Tangguh | 3,20 | Cukup Tangguh | 1,54 | Rawan | 3,24 | Cukup Tangguh | 3,29 | Cukup Tangguh |
| 6 | Ekonomi | 2,98 | Cukup | 3,06 | Cukup | 2,67 | Cukup | 3,11 | Cukup | 3,16 | Cukup |

| No | Gatra | Tahun | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | Skor | Status Kondisi | Skor | Status Kondisi | Skor | Status Kondisi | Skor | Status Kondisi | Skor | Status Kondisi |
| | | | Tangguh | | Tangguh | | Tangguh | | Tangguh | | Tangguh |
| 7 | Sosial dan Budaya | 2,59 | Kurang Tangguh | 2,88 | Cukup Tangguh | 2,18 | Kurang Tangguh | 2,86 | Cukup Tangguh | 2,93 | Cukup Tangguh |
| 8 | Pertahanan & Keamanan | 3,15 | Cukup Tangguh | 3,36 | Cukup Tangguh | 1,78 | Rawan | 3,36 | Cukup Tangguh | 3,36 | Cukup Tangguh |
| | Skor IKN | 2,92 | Cukup Tangguh | 3,03 | Cukup Tangguh | 2,26 | Kurang Tangguh | 3,05 | Cukup Tangguh | 3,08 | Cukup Tangguh |

Sumber: Lemhanas RI/ Kesbangpol Provinsi Riau

Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Riau mengalami fluktuatif pada tahun 2019 hingga 2023. Status kondisi IKN pada tahun 2023 mengalami peningkatan yakni cukup tangguh dengan skor 3,08 dimana pada tahun 2021 dengan skor 2,26 dengan kondisi kurang tangguh. IKN Provinsi Riau tahun 2022 dengan skor tertinggi sebesar 3,36 pada gatra pertahanan dan keamanan dan skor terendah sebesar 2,36 pada gatra sumber kekayaan alam.

2.3.4.2 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan ukuran untuk memotret kualitas perilaku demokrasi pemerintah dan masyarakat di sebuah wilayah. IDI diharapkan dapat menjadi ukuran demokrasi yang sesuai dengan falsafah Pancasila sehingga arah pembangunan tidak menyimpang daripolitik Indonesia ideologi bangsa. Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan suatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) merumuskan pengukuran IDI.

IDI merupakan ukuran untuk memotret kualitas perilaku demokrasi pemerintah dan masyarakat di sebuah wilayah. IDI diukur khusus untuk Indonesia sehingga cara pengukurannya berbeda dengan indeks-indeks lain yang unit analisisnya negara. IDI 2009–2020 telah menjadi rujukan pembangunan politik nasional dan daerah. IDI memiliki keunggulan berupa data dan informasi yang detail karena yang dikumpulkan adalah kasus dan data riil. Sejak tahun 2021 perhitungan IDI menggunakan metoda baru tetap menggunakan triangulasi, yakni mengombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain. Aspek yang dinilai dengan metoda baru yaitu: Aspek 1. Kebebasan dengan 7 indikator; Aspek 2. Kesetaraan dengan 7 indikator; Aspek 3. Kapasitas Lembaga Demokrasi dengan 8 indikator.

Tabel 2.105 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Kebebasan | 85,15 | 86,08 | - | - | |
| 2 | Hak-hak Politik | 61,68 | 65,40 | - | - | - |
| 3 | Lembaga Demokrasi | 84,19 | 83,48 | - | - | - |
| 4 | Kebebasan | - | - | 88,40 | 84,46 | 79,39 |
| 5 | Kesetaraan | - | - | 75,88 | 70,53 | 80,13 |
| 6 | Kapasitas Lembaga Demokrasi | - | - | 62,83 | 66,69 | 66,30 |
| Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau | | 75,21 | 76,86 | 75,66 | 73,64 | 75,55 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau Tahun 2024

Tahun 2019-2020 (Metode Lama), Tahun 2021-2023 (Metode Baru)

Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut Provinsi Riau dari tahun 2019 hingga 2023 berkisar dengan kategori sedang memiliki nilai berkisar antara 60-80. Capaian IDI Provinsi Riau tahun 2023 mengalami kenaikan 1,91 poin bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Hal ini disebabkan karena naiknya penilaian pada aspek kesetaraan. Pada aspek kesetaraan, indikator partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan merupakan indikator dengan skor tertinggi di Provinsi Riau.

2.3.4.3 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) bertujuan untuk mengukur tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama di Indonesia. Kerukunan merupakan salah satu pilar penting dalam memelihara persatuan rakyat dan bangsa Indonesia serta alat penting untuk menilai dan memantau hubungan antar kelompok agama dalam suatu komunitas atau wilayah. Dengan memahami berbagai aspek kerukunan, pemerintah dan organisasi dapat merancang dan melaksanakan kebijakan yang mendukung toleransi, perdamaian, dan harmonisasi sosial. Implementasi dan penggunaan IKUB harus mempertimbangkan konteks lokal dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan hasil yang efektif dan bermanfaat.

Indeks KUB terdiri dari tiga indikator yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Secara rinci perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.106 Perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau Tahun 2018 – 2023

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Indeks Dimensi Kesetaraan | - | 68,30 | 68,30 | 76,60 | 75,99 | 73,59 |
| 2 | Indeks Dimensi Kerja Sama | - | 71,18 | 71,18 | 74,40 | 75,95 | 68,71 |
| 3 | Indeks Dimensi Toleransi | - | 68,30 | 68,30 | 74,30 | 71,03 | 72,50 |
| Indeks Kerukunan Umat Beragama | | 68,41 | 69,26 | 69,26 | 75,11 | 74,32 | 71,60 |

Sumber: Badan Litbang dan Dilat Kemenag RI Tahun 2024

Indeks KUB Provinsi Riau pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,72 poin dari tahun 2022. Hal ini disebabkan karena turunnya penilaian dari indeks dimensi kerja sama. Pada indeks dimensi kerja sama, indikator bersedia berpartisipasi dalam organisasi yang melibatkan penganut agama lain merupakan indikator dengan skor terendah di Provinsi Riau.

2.3.4.4 Indeks Rasa Aman

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, rasa aman adalah rasa yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan. Konsep ini sering digunakan

dalam psikologi untuk menggambarkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan seseorang dalam situasi tertentu. Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas. Beberapa dimensi pengukuran indeks rasa aman dapat dilihat melalui: (a) dimensi perlindungan dan pemanfaatan kebhinekaan; (b) dimensi pemenuhan kesejahteraan sosial; (c) dimensi keamanan dan kekerasan. Untuk proporsi penduduk Provinsi Riau Tahun 2014 – 2020 yang merasa aman di area tempat tinggalnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.107 Indeks Rasa Aman Provinsi Riau Tahun 2014-2020

| 2014 | 2017 | 2020 |
|-------|-------|-------|
| 69,66 | 51,15 | 64,80 |

Sumber: BPS Provinsi Riau, Susenas Modul Hansos, 2020

Pada periode tahun 2020 secara umum, persepsi rasa aman di banyak daerah termasuk Provinsi Riau mengalami penurunan rasa aman. Tingkat proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian ini selaras dengan indeks kriminalitas. Turunnya persentase warga yang merasa aman saat berjalan sendiri termasuk di Provinsi Riau dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi dari media massa yang meunculkan asosiasi dengan kejadian-kejadian sebelumnya;
- b. Meningkatnya kejahatan di tempat umum yang sifatnya menyerang
- c. Pengalaman masa lalu yang mempengaruhi persepsi di masa kini

2.3.4.5 Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks Ketentraman dan Ketertiban terkait dengan Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Dasar hukum Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Target pencapaian SPM Provinsi Riau untuk Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengacu pada target nasional yaitu 100 persen. Secara rinci capaian

SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.108 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau Tahun 2021 - 2023

| NO | JENIS SPM TRANTIBUMLINMAS | INDIKATOR | CAPAIAN | | |
|----|--|---|---------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provinsi | Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Satpol PP Provinsi Riau

Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 telah mencapai hasil yang maksimal.

2.3.4.6 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Pembangunan daerah dilakukan dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Pembangunan daerah dilakukan dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah. Dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mengukur pencapaian seluruh aktivitas di daerah dalam memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dengan mengoptimalkan ekosisten, potensi dan berbagai hasil iptek dan inovasi untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
- b. Menjadi pendorong kepada seluruh stakeholder terutama para pelaku inovasi (seluruh lembaga, daerah, dunia usaha dan masyarakat) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi dalam

rangka meningkatkan tingkat daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

- c. Sebagai upaya untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia;
- d. Menjadikan dasar dalam perumusan, penetapan, evaluasi dan monitoring kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
- e. Menjadi alat dalam proses harmonisasi berbagai kebijakan dan program pembangunan baik pada level nasional dan daerah

Kerangka pengukuran Indeks Daya Saing Daerah mengacu kepada *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 (WEF, 2019), yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing seperti pada gambar di bawah ini. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu, yang sifatnya hanya sebagai kerangka konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks. Rincian dimensi dan indikator pembentuk daya saing diurai pada penjelasan pilar.

**Tabel 2.109 Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023**

| No | Tahun | Nilai | Kategori |
|----|-------|--------|---------------|
| 1 | 2019 | 9,4226 | Sangat Tinggi |
| 2 | 2020 | 2,2399 | Sedang |
| 3 | 2021 | 2,9890 | Tinggi |
| 4 | 2022 | 3,16 | Tinggi |
| 5 | 2023 | 3,25 | Tinggi |

Sumber : Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2024

Capaian Indeks Daya Saing Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Riau tahun 2023 tertinggi diperoleh Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kota Dumai, sedangkan capaian yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Indeks daya saing ini menunjukkan maju dan produktivitasnya sebuah daerah dari segala sektor. Secara rinci capaian IDSD kabupaten/kota tahun 2023 pada dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.110 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | LINGKUNGAN PENDUKUNG | | | | SDM | | PASAR | | | | EKOSISTEM INOVASI | | SKOR IDSD |
|-----------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | Pilar 1 | Pilar 2 | Pilar 3 | Pilar 4 | Pilar 5 | Pilar 6 | Pilar 7 | Pilar 8 | Pilar 9 | Pilar 10 | Pilar 11 | Pilar 12 | |
| 14 | RIAU | 4,26 | 2,82 | 3,41 | 3,61 | 3,91 | 3,93 | 0,99 | 3,60 | 2,15 | 4,82 | 3,20 | 2,31 | 3,25 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 4,04 | 2,69 | 4,09 | 3,15 | 3,93 | 3,55 | 0,51 | 3,5 | 1,68 | 4,87 | 2,51 | 2,16 | 3,06 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 4,15 | 1,82 | 3,86 | 3,24 | 3,88 | 3,2 | 1,17 | 2,9 | 1,02 | 4,63 | 2,31 | 1,43 | 2,8 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 4,28 | 2,28 | 4,03 | 2,88 | 3,96 | 3,75 | 0,61 | 3,41 | 0,88 | 5 | 2,12 | 1,85 | 2,92 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 4,19 | 1,72 | 3,97 | 3,26 | 3,71 | 2,9 | 1,4 | 2,99 | 0,75 | 4,82 | 2,35 | 1,46 | 2,79 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 4,07 | 2,56 | 4,04 | 3,29 | 3,96 | 3,42 | 0,42 | 3,02 | 0,89 | 4,7 | 2,5 | 0,89 | 2,81 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 4,2 | 2,38 | 4,2 | 2,93 | 3,88 | 3,23 | 0,75 | 3,31 | 1,46 | 4,56 | 2,35 | 1,55 | 2,9 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 4,15 | 2,04 | 4,5 | 2,88 | 3,89 | 3,19 | 0,41 | 3,02 | 1,29 | 4,8 | 2,23 | 1,31 | 2,81 |
| 14.08 | Kab. Siak | 4,39 | 2,55 | 4,23 | 2,93 | 3,95 | 3,75 | 0,36 | 3,58 | 1,04 | 4,88 | 2,78 | 0,27 | 2,89 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 4,31 | 2,56 | 3,95 | 3,32 | 3,75 | 3,47 | 0,59 | 2,83 | 0,93 | 4,53 | 2,29 | 1,44 | 2,83 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 4,2 | 1,94 | 3,91 | 2,79 | 3,69 | 3,1 | 0,9 | 3,08 | 0,27 | 4,23 | 2,05 | 1,27 | 2,62 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 4,38 | 1,91 | 4,9 | 3,99 | 4,05 | 4,3 | 3,26 | 3,88 | 2,24 | 5 | 2,94 | 4 | 3,74 |
| 14.12 | Kota Dumai | 4,39 | 1,89 | 4,14 | 3,19 | 3,94 | 3,93 | 1,5 | 3,65 | 0,96 | 4,56 | 2,18 | 2,12 | 3,04 |

Sumber: Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)

Pilar 1: Institusi

Pilar 2: Infrastruktur

Pilar 3: Adopsi TIK

Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro

Pilar 5: Kesehatan

Pilar 6: Keterampilan

Pilar 7: Pasar Produk

Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja

Pilar 9: Sistem Keuangan

Pilar 10: Ukuran Pasar

Pilar 11: Dinamisme Bisnis

Pilar 12: Kapabilitas Inovasi

2.3.4.7 Penanaman Modal / Investasi

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Untuk melihat perkembangan investasi di Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.111 Jumlah Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Riau Tahun 2019-2023

| No | Investasi | Perkembangan | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|----|--------------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | PMDN | | | | | | |
| | Proyek (Unit) | 1.002 | 3.617 | 5.526 | 4.793 | 7.788 | 80,28 |
| | Nilai (Rp. Milyar) | 26.292,18 | 34.117,80 | 24.997,7 | 43.061,13 | 48.243,30 | 55,54 |
| | Penyerapan TK | 55.352 | 91.010 | 40.003 | 45.003 | 50.830 | 16,88 |
| 2 | PMA | | | | | | |
| | Proyek (Unit) | 578 | 903 | 809 | 731 | 880 | 14,43 |

| No | Investasi | Perkembangan | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|----|--------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | Nilai (US\$. Juta) | 1.034,03 | 1.077,99 | 1.921,41 | 2.748,69 | 2.042,26 | 19,99 |
| | Penyerapan TK | 6.103 | 32.178 | 21.385 | 5.918 | 14.395 | 91,78 |

Sumber: Buku Statistik Investasi DPMPTSP Provinsi Riau

Nilai investasi PMDN Provinsi Riau dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan pertumbuhan rata-rata sebesar 55,54% per tahun dengan jumlah proyek tumbuh sebesar 80,28% dan penyerapan tenaga kerja rata-rata tumbuh sebesar 16,88% per tahun. Peningkatan jumlah proyek dan nilai investasi pertahun tidak diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, hal ini mengindikasikan bahwa investasi yang dilakukan sudah menggunakan teknologi tinggi sehingga tidak membutuhkan banyak tenaga kerja manusia, disamping itu realisasi investasi yang tercatat melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) juga berasal dari perluasan proyek yang sudah ada dan bukan berasal dari proyek investasi baru.

Nilai investasi PMDN tertinggi pada tahun 2023 dengan sektor terbesar yaitu: listrik, gas dan air bersih (28%), industri makanan (16%) dan tanaman pangan, perkebunan dan peternakan (15%). Untuk nilai investasi PMA Provinsi Riau dalam 5 tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan sebesar 12,94% dan rata-rata peningkatan jumlah proyek sebesar 32,82% serta rata-rata peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 78,92%. Investasi PMA berbanding terbalik dengan investasi PMDN, dimana rata-rata penyerapan tenaga kerja lebih tinggi daripada peningkatan jumlah proyek dan nilai investasi. Nilai investasi PMA tertinggi pada tahun 2022 dengan sektor terbesar adalah industri kertas dan percetakan (29%), listrik, gas dan air (22%) dan industri kimia dan farmasi (16%).

2.3.4.8 Ekspor Bersih Perdagangan

Selanjutnya indikator pelayanan penanaman modal dapat dilihat dari perkembangan ekspor. Pada periode 2019-2023 pertumbuhan nilai ekspor bersih di Provinsi Riau sebesar 13,26 persen. Hal ini mengindikasikan pelayanan penanaman modal di Provinsi Riau semakin perlu ditingkatkan untuk dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

**Tabel 2.112 Ekspor Bersih Perdagangan Provinsi Riau
(Migas dan Non Migas) Tahun 2019-2023**

| No | Ekspor Bersih | Tahun (Juta USD) | | | | | Pertumbuhan/ Tahun (%) |
|----|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Perdagangan | 12.412,50 | 13.763,80 | 19.969,90 | 22.596,00 | 18.956,8 | 13,26 |

Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan RI

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau, disajikan pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.40 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2024

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau dari tahun 2019 sampai tahun 2023 menunjukkan peningkatan, dimana tahun 2019 dengan nilai 61,49 dan pada tahun 2023 dengan nilai 74.63. Hal ini menunjukkan bahwa untuk usaha yang dilakukan pemerintah daerah telah dapat meningkatkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, namun masih memerlukan perbaikan dan peningkatan untuk kedepannya agar dapat menciptakan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

2.4.2 Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, indeks pelayanan publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Tabel 2.113 Perkembangan Indeks Pelayanan Publik di Provinsi Riau Tahun 2020-2023

| No. | Unit Lokus Evaluasi | TAHUN | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4,28 (A-) | 4,64 (A) | 4,53 (A) | - |
| 2 | UPT Samsat Pekanbaru Kota | 3,15 (C) | 2,72 (C) | 2,88 (C) | - |
| 3 | UPT Pengelola Pendapatan Simpang Tiga | - | - | - | 4,45 (A-) |
| 4 | Dinas Sosial | - | - | - | 4,10 (A-) |
| 5 | RSUD Arifin Achmad | - | - | - | 3,66 (B) |
| Indeks Pelayanan Publik | | 3,61 (B) | 3,68 (B) | 3,62 (B) | 4,04 (A-) |
| Ranking Nasional | | 20 | 23 | - | 14 |

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2024

Pelayanan publik di Provinsi Riau dilihat dari data capaian tahun 2020-2023 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,97%. Provinsi Riau pada tahun 2023 menempati peringkat 14 Nasional dari 38 Provinsi. Adapun Perangkat Daerah yang menjadi objek penilaian pelayanan publik di Provinsi Riau yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, UPT Samsat Pekanbaru Kota, UPT Pengelola Pendapatan Simpang Tiga, Dinas Sosial, RSUD Arifin Achmad.

2.4.3 Indeks Inovasi Daerah (IID)

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2018 yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kemajuan daerah dalam penerapan hasil riset dan inovasi di daerah. IID merupakan 1 (satu) dari 4 pengukuran kinerja pemerintah daerah, selain Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PTKPD).

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba inovasi sampai pada proses keberhasilan uji coba yang kemudian diterapkan dengan perda dan perkada. Pengukuran indeks inovasi daerah digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengarahkan sumber daya dan inisiatif ke wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar dalam mendorong inovasi. Ini membantu mengarahkan kebijakan secara efektif untuk meningkatkan ekosistem inovasi. Disamping itu bermanfaat juga menarik investor dan perusahaan yang mencari lokasi yang inovatif untuk menanam modal atau berkolaborasi dengan mitra lokal. Ini dapat meningkatkan daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.114 Perkembangan Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2023

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/ Kota | Kategori | | | | | |
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
| 14 | RIAU | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif |
| 14.01 | Kab. Kampar | Belum Mengisi Data | Kurang Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | Belum Mengisi Data | Kurang Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif |
| 14.04 | Kab. | Belum | Sangat | Sangat | Sangat | Sangat | Sangat |

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/ Kota | Kategori | | | | | |
|-------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | Indragiri Hilir | Mengisi Data | Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | Kurang Inovatif | Sangat Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | Belum Mengisi Data | Tidak Dapat Dinilai | Kurang Inovatif | Kurang Inovatif | Inovatif | Inovatif |
| 14.08 | Kab. Siak | Sangat Inovatif | Kurang Inovatif | Kurang Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | Inovatif | Sangat Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | Belum Mengisi Data | Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif |
| 14.12 | Kota Dumai | Kurang Inovatif | Kurang Inovatif | Kurang Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif |

Sumber: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.002.6-415 Tahun 2019
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.002.6-5848 Tahun 2021
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.400.10.11-6301.A Tahun 2022

Perhitungan IID mengalami perubahan pada tahun 2021. Perkembangan IID Provinsi Riau dari tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan nilai, dimana tahun 2023 naik sebesar 4,82 persen bila dibandingkan tahun 2022 dengan kategori inovatif. Kabupaten/kota pada tahun 2023 yang berperingkat sangat inovatif adalah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru.

2.4.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dilakukan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya dalam mempertahankan maupun meningkatkan indikator layanan bidang urusan komunikasi dan informatika. Adapun indikator layanan bidang urusan komunikasi dan informatika yakni indeks SPBE dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045



Gambar 2.41 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tahun 2024

Pemantauan dan evaluasi berpedoman pada Permenpan RI Nomor 59 Tahun 2020 terdiri dari 4 domain, 8 aspek dan 47 indikator. Indeks SPBE di Provinsi Riau mengalami peningkatan sekitar 0,01 dari tahun 2023, hal ini menunjukkan Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen dalam peningkatan SPBE. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada aspek kebijakan internal tata kelola SPBE, aspek perencanaan strategis SPBE, aspek penyelenggara SPBE, aspek penerapan manajemen SPBE, aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, aspek layanan publik berbasis elektronik. Secara keseluruhan 4 domain mengalami peningkatan namun perlu ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya.

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025

Dokumen RPJPD memuat visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan yang ingin dicapai pada tahapan periodenya, dan indikator sasaran serta rencana capaiannya. Visi RPJPD Provinsi Riau 2005-2025 adalah **“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 12 misi yaitu:

1. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian
2. Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan berdaya saing
3. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah
4. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah
5. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pemerintah daerah
6. Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal
7. Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera
8. Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan
9. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak
10. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat
11. Mewujudkan lingkungan yang lestari
12. Mewujudkan masyarakat madani

Masing-masing misi memiliki arah kebijakan dan sasaran pokok yang harus dicapai melalui pembangunan yang dilakukan. RPJPD Provinsi Riau 2005-2025 dibagi menjadi 4 (empat) periode RPJMD yaitu:

1. Periode Pertama RPJMD Provinsi Riau Tahun 2005-2009
2. Periode Kedua RPJMD Provinsi Riau Tahun 2009-2014
3. Periode Ketiga RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019
4. Periode Keempat RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Sedangkan indikator terhadap target sasaran pokok RPJPD Provinsi Riau 2005-2025, dilakukan dengan mengelompokkan 12 Misi yang ada ke dalam 4 kelompok yang berkaitan, yaitu:

1. Kelompok 1, berkaitan dengan infrastruktur, kawasan industri, keseimbangan pembangunan antar wilayah, dan lingkungan untuk mendukung pencapaian Misi 1, Misi 3, Misi 4, dan Misi 11.

2. Kelompok 2, berkaitan dengan perekonomian daerah untuk mendukung pencapaian Misi 2, Misi 5, Misi 6.
3. Kelompok 3, berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung pencapaian Misi 7.
4. Kelompok 4, berkaitan dengan kebudayaan Melayu untuk mendukung pencapaian Misi 8, Misi 9, Misi 10, dan Misi 12.

2.5.1 Capaian Kinerja RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 Per Periode RPJMD

1. Periode I RPJPD (RPJMD Tahun 2005-2009)

Berdasarkan hasil analisis, rata-rata capaian kinerja untuk periode I RPJPD Provinsi Riau tahun 2005-2009 adalah sebesar 94,6 dengan Predikat kinerja Sangat Tinggi.

2. Periode II RPJPD (RPJMD Tahun 2009-2014)

Berdasarkan hasil analisis di atas, rata-rata capaian kinerja untuk periode II RPJPD Provinsi Riau tahun 2009-2014 adalah sebesar 90,6 dengan Predikat kinerja Sangat Tinggi

3. Periode III RPJPD (RPJMD Tahun 2014-2019)

Berdasarkan hasil analisis di atas, rata-rata capaian kinerja untuk periode III RPJPD Provinsi Riau tahun 2014-2019 adalah sebesar 90,7 dengan Predikat kinerja Sangat Tinggi

4. Periode IV RPJPD (RPJMD Tahun 2019-2024)

Untuk capaian pada periode akhir RPJPD (periode IV), evaluasi dilakukan sampai dengan tahun 2022 yang merupakan tahun ke 3 dari periode IV (RPJMD 2019-2024).

- a. Kelompok 1, berkaitan dengan infrastruktur, kawasan industri, keseimbangan pembangunan antar wilayah, dan lingkungan untuk mendukung pencapaian Misi 1, Misi 3, Misi 4, dan Misi 11. Dengan capaian sebagai berikut:
 1. Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai telah selesai dibangun dan mulai fungsional sejak tanggal 25 September 2020.
 2. Pembangunan 3 (tiga) kawasan industri tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Sampai dengan tahun 2022 baru Kawasan Industri Dumai yang sudah berjalan dengan baik. Kawasan Industri Kuala Enok, tidak

berkembang sesuai dengan harapan, tetapi industri berkembang diluar Kawasan. Adapun di Kawasan Industri Tanjung Buton baru kegiatan kepelabuhanan yang sudah berjalan. Sampai dengan tahun 2022 tingkat capaian dengan realisasi sebesar 33%.

- b. Kelompok 2, berkaitan dengan perekonomian daerah untuk mendukung pencapaian Misi 2, Misi 5, Misi 6. Dengan capaian sebagai berikut:
 1. Keberhasilan Provinsi Riau dalam mengurangi ketergantungan pada produk minyak dan gas bumi yang tercermin dari peningkatan kontribusi sektor non migas di dalam PDRB. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2005 kontribusi sektor migas dibanding sektor non migas (Atas Dasar Harga Konstan 2000) adalah 55:45. Pada tahun 2019 perbandingan itu menjadi 17,3:82,7 dan terus menurun menjadi 14,9:85,1 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Riau sudah bisa lepas dari ketergantungan pada sektor perekonomian yang berasal dari migas dan beralih ke sektor pertanian/perkebunan, dan industri pengolahan.
 2. Pertumbuhan ekonomi non migas ditargetkan sebesar 4,0-5,0%. Pada akhir tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tumbuh sebesar 4,55%, meskipun pada tahun 2020 dan 2021 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau mengalami kontraksi akibat Pandemi Covid-19.
 3. Tingkat inflasi pada Periode IV dengan target 4,0-5,0%. Pada akhir tahun 2022 sedikit melebihi target angka inflasi 6,81%, hal ini bisa dimaklumi akibat imbas pasca krisis.
- c. Kelompok 3, berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung pencapaian Misi 7. Angka Indeks Pembangunan Manusia pada periode IV dengan target sebesar 73-75 dan pada akhir tahun 2022 terealisasi sebesar 73,52, dengan tingkat capaian 100%. Target penurunan tingkat pengangguran pada periode IV ditargetkan sebesar 5,5-6,0%. Capaian pada akhir tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 4,37%, dengan tingkat capaian 100%. Angka gini ratio yang menggambarkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat pada akhir periode IV dengan nilai gini ratio 0,34-0,30. Pada akhir tahun 2022 angka gini ratio berhasil diturunkan menjadi 0,323, dengan tingkat capaian 100%. Penurunan angka kemiskinan pada akhir periode IV ditargetkan sebesar 5,5-6,0% dan terealisasi pada tahun 2022 sebesar 6,78%, dengan tingkat capaian 88,5%.

d. Kelompok 4, berkaitan dengan kebudayaan Melayu untuk mendukung pencapaian Misi 8, Misi 9, Misi 10, dan Misi 12. Dengan capaian sebagai berikut:

1. Visi RPJPD Provinsi Riau 2005-2025 salah satunya adalah menjadi Riau sebagai Pusat Kebudayaan Melayu di Asia Tenggara, sehingga sasaran pokoknya adalah beroperasinya pusat referensi promosi kebudayaan Melayu. Meskipun indikator dari sasaran pokok ini tidak mudah mengukurnya, tetapi beberapa capaian yang dapat ditandai sebagai berikut.
2. Pengakuan Pantun sebagai Warisan Dunia (World Heritage) dari UNESCO pada tahun 2021.
3. Dalam upaya melengkapi referensi budaya melayu dilakukan Ekspedisi Empat Sungai tahun 2019-2024 terhadap empat sungai besar di Riau yaitu Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar, dan Sungai Indragiri.
4. Berdirinya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2017.
5. Riau menjadi Pusat Pengembangan dan Pelestarian Zapin Melayu Dunia tahun 2012.
6. Penggunaan Bahasa melayu diruang publik, mulai tanggal 2 Mei 2018
7. Pakaian Melayu sudah menjadi seragam sekolah dan pegawai Pemda.
8. Bangunan kantor dan perdagangan banyak bernuansa Melayu.
9. Budaya Melayu Riau menjadi muatan lokal di kurikulum sekolah. Penerapan nuansa budaya Melayu juga dikuatkan dengan Pergub No.46 tahun 2018 tentang Penerapan Muatan Budaya Melayu Riau di Ruang Umum.
10. Dibangunnya tugu yang bernuansa melayu sebagai icon (tugu songket, tugu keris, tugu alat musik dan lain-lain).

Berdasarkan hasil analisis, rata-rata capaian kinerja untuk periode IV RPJPD Provinsi Riau tahun 2019-2024 adalah sebesar 90,2 dengan Predikat kinerja Sangat Tinggi. Dari hasil capaian 4 (empat) penggalan periode RPJPD Provinsi Riau diatas, maka rata-rata capaian sasaran pokok RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 adalah sebesar 91,5 dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.

2.5.2 Capaian Indikator Makro RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025

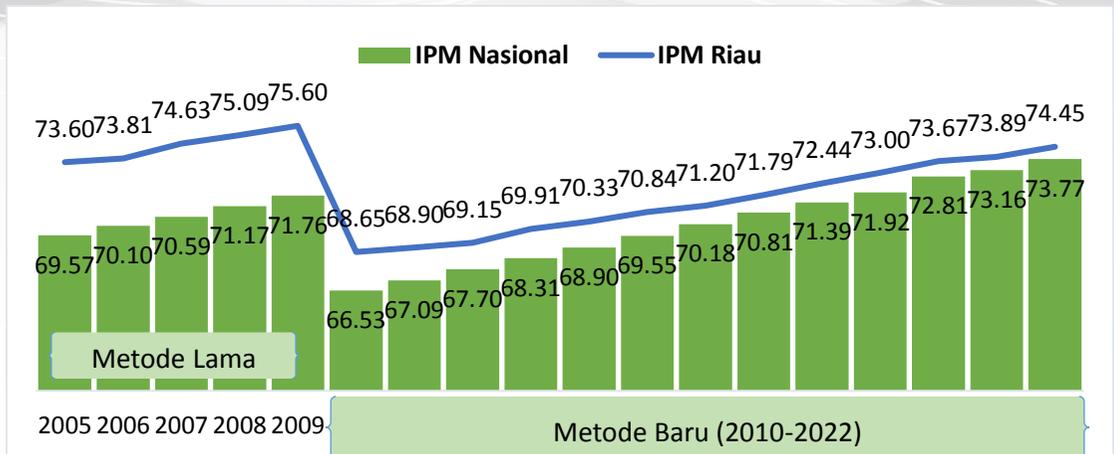
Capaian indikator kinerja makro pembangunan daerah dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain Indek Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Perkapita, Tingkat Ketimpangan dan PDRB Per Kapita. Berikut disajikan capaian kinerja pembangunan Provinsi Riau secara makro.

Tabel 2.115 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2005-2025

| No | Indikator Kinerja Makro | Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005) | Capaian Pada Tahun Berjalan (2023) | Pertumbuhan /Penurunan | Tingkat Capaian Kinerja | Prediket Kinerja |
|----|---|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | 73,63 | 74,95 | 1,32 | 101,79 | Sangat Tinggi |
| 2 | Angka Kemiskinan (Tingkat Kemiskinan %) | 12,51 | 6,68 | - 5,83 | 187,28 | Sangat Tinggi |
| 3 | Angka Pengangguran (TPT %) | 12,16 | 4,23 | - 7,93 | 287,47 | Sangat Tinggi |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,41 | 4,21 | - 1,20 | 77,82 | Tinggi |
| 5 | Pendapatan Perkapita (Juta Rp) | - | - | - | - | - |
| 6 | Ketimpangan Pendapatan | 0,283 | 0,324 | 0,04 | 87,35 | Tinggi |
| 7 | PDRB Perkapita (Juta Rp) | | | | | |
| | 1. Harga Berlaku | 28,04 | 154,52 | 126,48 | 551,07 | Sangat Tinggi |
| | 2. Harga Konstan | 15,92 | 83,07 | 67,15 | 521,80 | Sangat Tinggi |

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2005-2025, Tahun 2024

Perkembangan angka IPM Provinsi Riau dengan menggunakan metode lama dari tahun 2005-2009 menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 1,97 poin atau naik dari 73,63 poin pada tahun 2005 menjadi 75,60 poin tahun 2009 (kategori tinggi) dengan pertumbuhan sebesar 0,66% per tahun selama tahun 2005-2009. Sedangkan perkembangan angka IPM Provinsi Riau dengan menggunakan metode baru dari tahun 2010-2022 menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 4,87 poin atau naik dari 68,65 poin tahun 2010 menjadi 73,52 poin pada tahun 2022 (kategori tinggi) dengan pertumbuhan sebesar 0,57% per tahun selama tahun 2010-2022.



Gambar 2.42 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2005-2022

Sumber : Buku Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025, Tahun 2023

Persentase penduduk miskin di Provinsi Riau mengalami penurunan dari pada tahun 12,51% tahun 2005 turun menjadi sebesar 6,84% tahun 2022 atau sebesar 5,67%. Rata-rata penurunan persentase penduduk miskin selama periode tahun 2005–2022 sebesar -0,33% per tahun. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau juga mengalami penurunan yang signifikan dari 12,16% pada tahun 2005 turun menjadi 4,37% pada tahun 2022 dengan penurunan pertumbuhan sebesar 64,18% selama periode tersebut.

Secara relatif capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dengan migas sebesar 4,55% dan lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja awal tahun 2005 sebesar 5,41%, namun secara nominal nilai PDRB ADHK dengan migas tahun 2005 hanya senilai Rp. 79.287.586,75 Juta (Rp79,28 triliun) dan meningkat menjadi Rp529.532.979,00 Juta (Rp529,53 triliun) tahun 2022 atau terjadi peningkatan sebesar 567,86%.

Terjadinya peningkatan ketimpangan pengeluaran penduduk yang semakin bertambah antara masyarakat sebesar 0,95% atau naik dari 0,283 poin tahun 2005 menjadi 0,323 poin tahun 2022. Walaupun tingkat ketimpangan mengalami peningkatan 0,040 poin namun angka tersebut masih dapat kategori dengan tingkat ketimpangan rendah.

PDRB ADHB perkapita dengan migas dari tahun 2005 ke 2022 mengalami peningkatan sebesar 393,79% atau meningkat sebanyak Rp119,55 juta/kapita. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi sektor migas lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi sektor non migas. PDRB ADHK perkapita dengan migas dari tahun 2005 ke 2022 mengalami peningkatan sebesar 362,49% atau meningkat sebanyak Rp62,75 juta/kapita. Lebih rendahnya pertumbuhan sektor migas tersebut disebabkan oleh lifting minyak Provinsi Riau yang terus mengalami penurunan.

2.5.3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi kinerja sasaran pokok RPJPD Provinsi Riau 2005-2025, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Semua indikator makro pembangunan selama periode 2005-2022 diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja di atas 121,43% atau dinyatakan 100% dengan predikat sangat tinggi.
- b. Berdasarkan hasil capaian dari 4 (empat) penggalan periode RPJPD Provinsi Riau diatas, maka rata-rata capaian sasaran pokok RPJPD Provinsi Riau tahun 2005-2025 adalah sebesar 91,5 dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.
- c. Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Riau.
- d. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, terutama di wilayah pesisir dan pulau sangat penting karena mempengaruhi kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat.
- e. Pemeliharaan jalan dan pengaturan pembatasan angkutan ODOL harus menjadi prioritas.
- f. Kontribusi sektor non migas di bidang pertanian/perkebunan, pulp/paper, dan industri pengolahannya perlu ditingkatkan ke arah industri hilirnya, sehingga pemanfaatan lahan bisa semakin efisien dan efektif sehingga lahan konservasi lingkungan menjadi lebih banyak untuk meningkatkan kualitas lingkungan.
- g. Pengelolaan lahan pertanian/perkebunan baik di tanah mineral maupun di lahan gambut memerlukan perencanaan, pengawasan dan pertimbangan lingkungan yang benar untuk mengatasi dampak lingkungan kebakaran hutan/lahan, banjir, maupun kekeringan yang akan semakin masif di masa depan.

- h. Penerapan budaya Melayu memerlukan dukungan program dan dana untuk pemajuan kebudayaan berupa perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

2.5.4 Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk penyusunan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

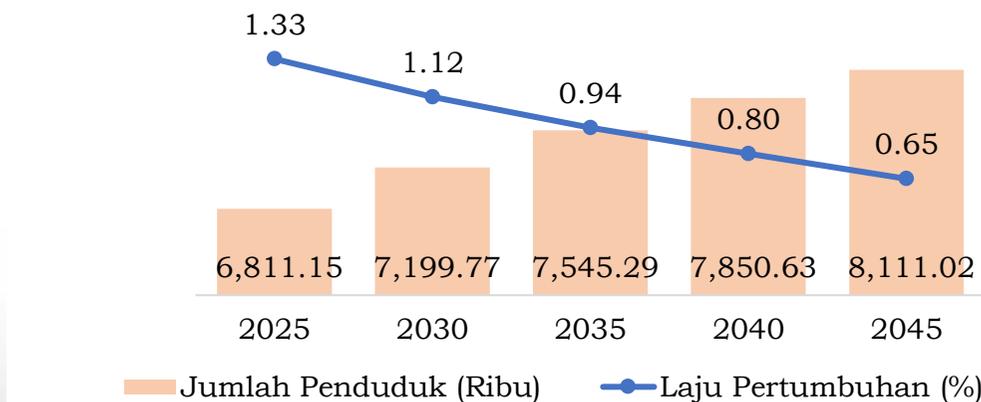
- a. Pengaturan dan pengawasan pemanfaatan lahan gambut;
- b. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dengan pembangunan jalan, jembatan, dan penyeberangan kawasan lintas pesisir dan pulau;
- c. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar di seluruh wilayah terutama pesisir dan pulau;
- d. Pengembangan industri hilir kelapa sawit untuk meningkatkan nilai tambah; intensifikasi pertanian dan efektifitas penggunaan lahan; peningkatan konservasi lingkungan dan mitigasi bencana akibat kerusakan lingkungan;
- e. Peningkatan aktifitas pemajuan kebudayaan Melayu Riau.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan penduduk yang tinggi serta rendahnya kualitas rendah bisa menghambat tercapainya tujuan pembangunan. Sebaliknya keberhasilan dalam mengendalikan jumlah dan pertumbuhan penduduk serta mengembangkan kualitas penduduk akan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

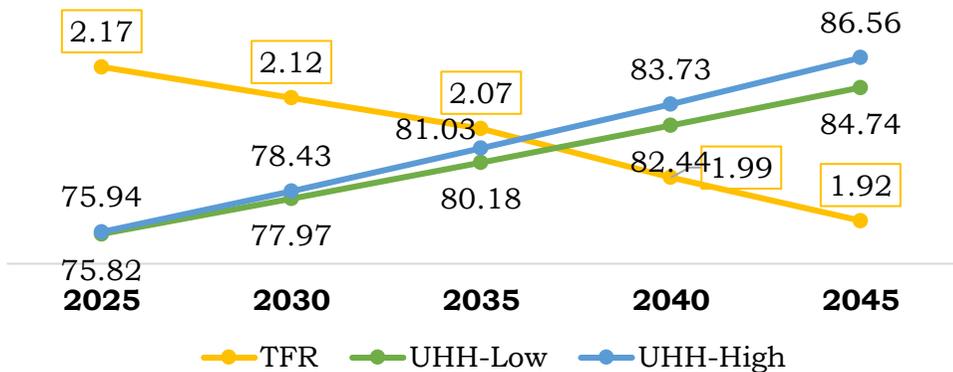
Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan di Provinsi Riau yang diinginkan adalah tercapainya jumlah penduduk yang stabil dan dalam jumlah penduduk yang tidak terlalu besar. Untuk mencapai kondisi ini maka jumlah kelahiran diharapkan sama dengan jumlah kematian sehingga jumlah penduduk menjadi stasioner. Indikator pencapaian penduduk tumbuh seimbang (PTS) adalah dimana angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*) sama dengan 2,1 atau angka reproduksi bersih (*Net Reproduction Rate*) sama dengan 1 per perempuan.

2.6.1 Proyeksi Jumlah Penduduk



Gambar 2.43 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Riau

Sumber : Hasil Long Form SP 2020 – BPS Provinsi Riau



Gambar 2.44 Total Fertility Rate (TFR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) Penduduk Provinsi Riau

Sumber : Hasil Long Form SP 2020 – BPS Provinsi Riau

Jumlah penduduk Provinsi Riau diproyeksikan mencapai 8,11 juta pada tahun 2045. Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan terus melambat hingga berada dibawah 0,65 persen pada tahun 2045. Perlambatan ini terjadi akibat menurunnya tingkat fertilitas (*Total Fertility Rate/TFR*) dari 2,17 anak lahir hidup untuk wanita subur pada tahun 2025 menjadi 1,92 pada tahun 2045. Kesehatan masyarakat juga meningkat sejalan dengan berkurangnya jumlah anak. Hal ini terlihat dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Riau sejak tahun 2020 dari 73,67 tahun menjadi 84,74 tahun untuk proyeksi skenario *low* dan 86,56 tahun untuk proyeksi skenario *high*.

Tabel 2.116 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (Jiwa) | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 14 | RIAU | 6.811.158 | 7.199.743 | 7.545.263 | 7.850.626 | 8.110.994 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 908.385 | 972.377 | 1.030.090 | 1.082.993 | 1.131.853 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 474.398 | 503.202 | 529.873 | 554.201 | 575.162 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 598.331 | 626.418 | 648.637 | 667.493 | 684.003 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 692.189 | 725.841 | 754.353 | 777.554 | 795.331 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 421.237 | 451.596 | 480.979 | 509.682 | 536.219 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 601.632 | 641.046 | 677.452 | 709.022 | 734.281 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 682.617 | 727.957 | 770.823 | 809.624 | 842.395 |

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (Jiwa) | | | | |
|-------|-----------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 14.08 | Kab. Siak | 490.376 | 522.308 | 552.026 | 578.918 | 601.871 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 352.777 | 369.051 | 382.840 | 394.073 | 402.822 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 215.586 | 224.089 | 230.864 | 236.123 | 240.292 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 1.036.563 | 1.079.997 | 1.114.843 | 1.143.374 | 1.165.570 |
| 14.12 | Kota Dumai | 337.067 | 355.861 | 372.483 | 387.569 | 401.195 |

Sumber : Hasil Long Form SP 2020 – BPS Provinsi Riau

Ket. Tinggi Sedang Rendah

Berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 jumlah penduduk kabupaten/kota terus meningkat. Dimana Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk terbesar diikuti oleh Kabupaten Kampar. Pada tahun 2030, Kabupaten Rokan Hilir menjadi kabupaten ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Pada tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hilir menjadi kabupaten ketiga dengan jumlah penduduk yang terbesar. Jumlah penduduk terendah terdapat pada Kabupaten Kepulauan Meranti, diikuti oleh Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Dumai. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.117 Klasifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

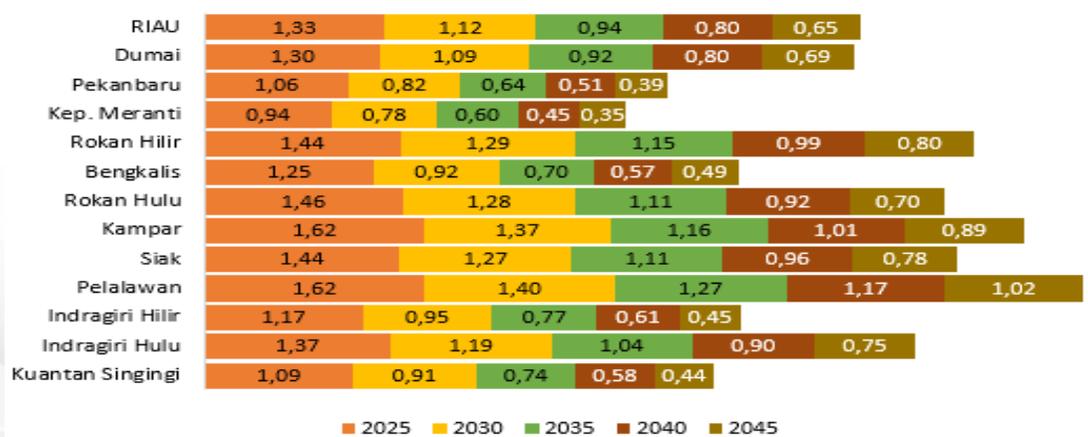
| Kode | Kabupaten /Kota | 2023 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
|-------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 14.01 | Kab. Kampar | Besar | Besar | Besar | Metropolitan | Metropolitan | Metropolitan |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | Sedang | Sedang | Besar | Besar | Besar | Besar |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | Besar | Besar | Besar | Besar | Besar | Besar |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | Besar | Besar | Besar | Besar | Besar | Besar |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Besar | Besar |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | Besar | Besar | Besar | Besar | Besar | Besar |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | Besar | Besar | Besar | Besar | Besar | Besar |
| 14.08 | Kab. Siak | Sedang | Sedang | Besar | Besar | Besar | Besar |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | Metropolitan | Metropolitan | Metropolitan | Metropolitan | Metropolitan | Metropolitan |
| 14.12 | Kota Dumai | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang |

Sumber : Hasil Long Form SP 2020 – BPS Provinsi Riau (diolah)

Klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk, dapat dilihat bahwa Kota Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan (1-5 juta jiwa) mulai dari tahun 2023 hingga tahun 2045. Diperkirakan Kabupaten Kampar mulai memasuki kota metropolitan pada tahun 2035. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mendukung sarana dan prasarana perkotaan dimana makin banyaknya jumlah penduduk pada kabupaten/kota tersebut.

Untuk kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Siak terdapat perubahan klasifikasi yang beralih dari klasifikasi sedang pada tahun 2023-2025 kemudian menjadi klasifikasi besar mulai pada tahun 2030-2045. Dan Kabupaten Pelalawan juga beralih status kota besar mulai tahun 2040-2045. Sedangkan Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai tidak berubah, yakni tetap menjadi kota sedang dari tahun 2023 hingga tahun 2045.

Untuk melihat penambahan penduduk dari tahun ke tahun dapat dilihat dari laju pertumbuhan yang juga mencerminkan interaksi komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Pergerakan pertumbuhan penduduk tentunya akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pembangunan terlebih lagi yang berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi masa depan. Laju pertumbuhan penduduk memproyeksikan pertumbuhan penduduk secara positif di seluruh periode proyeksi meskipun laju pertumbuhan semakin lama semakin melambat dari waktu ke waktu dengan laju yang berbeda-beda.



Gambar 2.45 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota (%)

Sumber : Hasil Long Form SP 2020 – BPS Provinsi Riau

Dari proyeksi data oleh BPS tersebut, terlihat bahwa meskipun jumlah penduduk terus bertambah, tetapi laju pertumbuhan penduduk di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau terus menurun. Kabupaten Kampar akan menyusul Kota Pekanbaru menjadi kabupaten/kota dengan penduduk di atas 1 juta jiwa pada tahun 2035. Dengan kondisi saat ini, diperkirakan Kabupaten Kepulauan Meranti tetap menjadi kabupaten dengan penduduk terkecil di Provinsi Riau.

Hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 menunjukkan pertumbuhan penduduk Provinsi Riau tahun 2000-2010 sebesar 3,58 persen pertahun. Kemudian berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2020, pertumbuhan penduduk Provinsi Riau tahun 2010-2020 menurun sebesar 1,40 persen pertahun. Berdasarkan proyeksi BPS Provinsi Riau hingga tahun 2045, pertumbuhan penduduk Provinsi Riau per tahun terus menurun dari 1,33 persen tahun 2023 menjadi 0,65 persen tahun 2045. Kabupaten Pelalawan, Kampar, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Siak termasuk kabupaten dengan pertumbuhan penduduk tertinggi di Riau. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Pekanbaru menjadi kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk terendah di Riau sampai tahun 2045.

2.6.2 Komponen Kependudukan

2.6.2.1 Distribusi Penduduk

Permasalahan penduduk dapat berimbas pada distribusi penduduk yang tidak merata sehingga akan menimbulkan masalah kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, tidak memadainya akses dan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta permasalahan sosial lainnya. Sementara di sisi lainnya, wilayah dengan jumlah penduduk yang kecil akan menimbulkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Tabel 2.118 Distribusi Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

| Kode | Kabupaten/Kota | Distribusi Penduduk (%) | | | | | |
|-------|------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 13,15 | 13,34 | 13,51 | 13,65 | 13,79 | 13,95 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 6,95 | 6,97 | 6,99 | 7,02 | 7,06 | 7,09 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 8,82 | 8,78 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,43 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 10,24 | 10,16 | 10,08 | 10 | 9,9 | 9,81 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 6,1 | 6,18 | 6,27 | 6,37 | 6,49 | 6,61 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 8,78 | 8,83 | 8,9 | 8,98 | 9,03 | 9,05 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 9,97 | 10,02 | 10,11 | 10,22 | 10,31 | 10,39 |
| 14.08 | Kab. Siak | 7,16 | 7,2 | 7,25 | 7,32 | 7,37 | 7,42 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 5,24 | 5,18 | 5,13 | 5,07 | 5,02 | 4,97 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 3,23 | 3,17 | 3,11 | 3,06 | 3,01 | 2,96 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 15,42 | 15,22 | 15 | 14,78 | 14,56 | 14,37 |
| 14.12 | Kota Dumai | 4,96 | 4,95 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,95 |

Sumber : Hasil Long Form SP 2020 – BPS Provinsi Riau (Diolah kembali)

Ket. Tinggi Sedang Rendah

Dilihat dari pola persebaran penduduk, Provinsi Riau merupakan wilayah dengan persebaran penduduk antar kabupaten/kota yang masih timpang. Penduduk Provinsi Riau sebagian besar berada di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Kedua kabupaten/kota tersebut menjadi pusat aktivitas perekonomian dan pendidikan sehingga mempengaruhi mobilitas penduduk. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten dengan distribusi penduduk yang terkecil dimana pada wilayah tersebut dengan topografi yang sulit dan dataran yang terbatas serta infrastruktur maupun aksesibilitas yang kurang baik dan tidak merata antar wilayah.

Tabel 2.119 Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Kepadatan Penduduk (%) | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 14 | RIAU | 70,83 | 75,66 | 79,98 | 83,82 | 87,21 | 90,1 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 81,16 | 87,96 | 94,16 | 99,75 | 104,87 | 109,6 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 56,29 | 60,26 | 63,92 | 67,31 | 70,4 | 73,06 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 65,29 | 69,47 | 72,73 | 75,31 | 77,5 | 79,42 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 48,3 | 51,19 | 53,68 | 55,78 | 57,5 | 58,81 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 29,12 | 31,56 | 33,84 | 36,04 | 38,19 | 40,18 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 72,83 | 78,3 | 83,43 | 88,17 | 92,27 | 95,56 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 70,07 | 75,27 | 80,27 | 85 | 89,28 | 92,89 |

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Kepadatan Penduduk (%) | | | | | |
|-------|-----------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 14.08 | Kab. Siak | 58,49 | 62,82 | 66,91 | 70,72 | 74,16 | 77,1 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 61,21 | 64,64 | 67,62 | 70,14 | 72,2 | 73,81 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 56,78 | 59,5 | 61,84 | 63,71 | 65,16 | 66,31 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 1.540,24 | 1.623,87 | 1.691,91 | 1.746,50 | 1.791,20 | 1.825,97 |
| 14.12 | Kota Dumai | 153,26 | 163,48 | 172,6 | 180,66 | 187,98 | 194,59 |

Sumber : Hasil Long Form SP 2020 – BPS Provinsi Riau

Ket. Jarang Sedang Padat

Kepadatan penduduk di Provinsi Riau terkonsentrasi pada Kota Pekanbaru yang menjadi pusat perekonomian dan bisnis. Dalam dua puluh tahun ke depan, kota tersebut masih merupakan kota terpadat di Provinsi Riau. Pemerintah telah berupaya dalam pemerataan penyebaran penduduk yang dapat dilihat dari perizinan pembangunan perumahan di wilayah-wilayah yang kurang padat penduduknya serta peningkatan infrastruktur yang mencakup jaringan transportasi, akses air bersih, listrik, dan fasilitas pendukung lainnya.

2.6.2.2 Fertilitas (Kelahiran)

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Diharapkan jumlah bayi yang dilahirkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi *stationer*. Indikator pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS), adalah angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*) sama dengan 2,1 per wanita subur dan angka reproduksi bersih (*Net Reproduction Rate*) sebesar 1 per wanita subur.

Salah satu proyeksi penduduk dengan menggunakan asumsi indikator *Total Fertility Rate* (TFR) adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, dan tingkat urbanisasi.

Tingginya angka TFR memberikan tantangan pemerintah dalam mengintervensi dan lebih menggiatkan pelaksanaan program pengendalian kelahiran penduduk di masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten Bengkalis

memiliki angka TFR tertinggi hingga tahun 2045. Pencapaian PTS di Provinsi Riau ditargetkan tercapai pada tahun 2025 hingga 2030 yang diikuti oleh seluruh kabupaten/kota lainnya kecuali Kota Pekanbaru dimana kota tersebut telah mencapai penduduk tumbuh seimbang pada tahun 2020.

Tabel 2.120 Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten/Kota Provinsi Riau

| Kode | Provinsi/Kabupaten/Kota | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
|-----------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | RIAU | 2,17 | 2,12 | 2,07 | 2,05 | 2,04 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 2,2 | 2,14 | 2,09 | 2,07 | 2,05 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 2,14 | 2,09 | 2,05 | 2,03 | 2,01 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 2,45 | 2,36 | 2,3 | 2,26 | 2,23 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 2,14 | 2,09 | 2,05 | 2,03 | 2,01 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 2,16 | 2,11 | 2,06 | 2,04 | 2,02 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 2,14 | 2,08 | 2,05 | 2,03 | 2,01 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 2,21 | 2,15 | 2,1 | 2,07 | 2,05 |
| 14.08 | Kab. Siak | 2,2 | 2,14 | 2,09 | 2,07 | 2,05 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 2,16 | 2,11 | 2,07 | 2,04 | 2,02 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 2,13 | 2,09 | 2,04 | 2,02 | 2,01 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 2,04 | 2,02 | 2,00 | 1,99 | 1,99 |
| 14.12 | Kota Dumai | 2,11 | 2,06 | 2,02 | 2,00 | 1,98 |

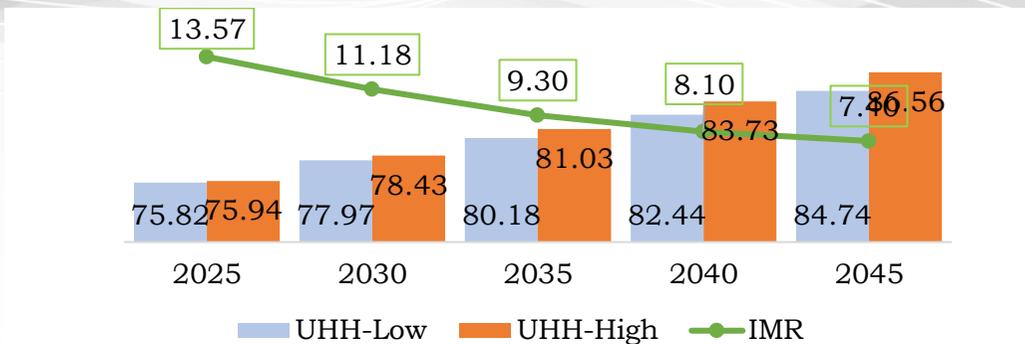
Sumber : Hasil Long Form SP 2020 – BPS Provinsi Riau

Ket. > 2 : Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)

2.6.2.3 Mortality (Kematian)

Asumsi mortality (kematian) menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. *Infant Mortality Rate* (IMR) merupakan banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kondisi kesehatan masyarakat juga turut membaik sejalan dengan menurunnya jumlah anak. Tahun 2025 diproyeksikan 13 kematian bayi dari 1000 kelahiran hidup. Angka ini diharapkan menurun pada tahun 2045 menjadi 7 kematian bayi dari 1000 kelahiran hidup.

Menurunnya IMR di Provinsi Riau berdampak terhadap peningkatan umur harapan hidup. Dengan *high scenario* diperkirakan pada tahun 2025 umur harapan hidup mencapai 75,94 tahun dan diperkirakan terus meningkat pada tahun 2045 dengan *low scenario* sebesar 84,74 tahun dan *high scenario* 86,56 tahun.



Gambar 2.46 Infant Mortality Rate (IMR) dan Umur Harapan Hidup Provinsi Riau

Sumber : Hasil Long Form SP 2020 – BPS Provinsi Riau

Pada tingkat kabupaten/kota diketahui bahwa angka IMR tertinggi diperkirakan terdapat pada Kabupaten Kepulauan Meranti mulai pada tahun 2025 hingga tahun 2045. Dan Kota Pekanbaru memiliki angka IMR terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini didukung dengan lengkapnya layanan kesehatan di Kota Pekanbaru sehingga meningkatkan usia harapan hidup penduduk. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti masih merupakan wilayah pesisir yang bergantung pada transportasi air sehingga berpengaruh pada peningkatan angka IMR.

Konsekuensi dari menurunnya kematian bayi dan meningkatnya UHH adalah semakin membesarnya penduduk lansia, untuk itu perlu dipersiapkan bagaimana menjadi lansia tangguh ke depan mulai dari sekarang, terutama bagaimana mempertahankan kualitas hidup, dengan menyiapkan penduduk dari sejak usia muda agar siap menjadi lansia kelak.

Tabel 2.121 Infant Mortality Rate (IMR) Kabupaten/Kota Provinsi Riau

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/ Kota | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
|-----------|---------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 14 | RIAU | 13,57 | 11,18 | 9,3 | 8,1 | 7,4 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 14,81 | 12,14 | 9,62 | 8,27 | 7,61 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 16,2 | 13,53 | 10,63 | 9,34 | 8,52 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 13,89 | 11,22 | 9,3 | 7,97 | 7,27 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 16,67 | 14,01 | 10,59 | 9,34 | 8,56 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 12,18 | 10,29 | 8,79 | 7,59 | 6,86 |

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/ Kota | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
|-------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 10,32 | 9,15 | 7,63 | 6,72 | 6,48 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 14,92 | 12,38 | 9,87 | 8,52 | 7,84 |
| 14.08 | Kab. Siak | 15,04 | 12,38 | 10,19 | 8,79 | 8,01 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 15,32 | 12,46 | 10,23 | 9,03 | 8,24 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 21,55 | 19,75 | 14,53 | 12,06 | 10,91 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 9,79 | 8,9 | 7,21 | 6,62 | 6,37 |
| 14.12 | Kota Dumai | 10,86 | 9,47 | 8,03 | 6,87 | 6,57 |

Sumber : Hasil Long Form SP 2020 – BPS Provinsi Riau

Ket. Rendah Sedang Tinggi

2.6.2.4 Penduduk Usia Tua

Provinsi Riau sudah memasuki era *ageing population*. Dimana jumlah penduduk lanjut usia (lansia) 65+ tahun sudah mencapai lebih dari sepuluh persen populasi pada tahun 2040-2045. Pada tahun 2040 terdapat 840 ribu jiwa penduduk lansia (10,7%) dan 1,03 juta jiwa pada tahun 2045 atau setara dengan 12,7% persen penduduk. Apabila Provinsi Riau berhasil menyiapkan penduduk lansia yang sehat dan produktif di masa depan, Provinsi Riau dapat memperpanjang periode bonus demografi yang berlanjut ke tahap kedua. Proporsi penduduk non-produktif pada tahap tersebut lebih banyak disumbang oleh penduduk lansia yang jumlahnya semakin meningkat. Dengan demikian, pemerintah harus mulai menerapkan kebijakan yang menunjang penuaan penduduk. Beberapa program yang dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan antara lain perluasan jaminan sosial, pengembangan program *Long-Term Care* (LTC), memperpanjang usia pensiun, mempromosikan jaminan hari tua, serta mengembangkan skema lapangan pekerjaan ramah lansia.

Distribusi penduduk lansia pada kabupaten/kota berbeda-beda. Kabupaten Bengkalis memasuki *ageing population* pada lebih awal yakni tahun 2035 yang mencapai 10 persen. Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti dan Kota Pekanbaru memasuki *ageing population* pada tahun 2040. Kabupaten/kota lainnya memasuki *ageing population* pada tahun 2045 kecuali Kabupaten Pelalawan yang masih berada.

**Tabel 2.122 Distribusi Penduduk Lanjut Usia 65+ Tahun
(Provinsi/Kabupaten/Kota), Persen**

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | 2020 | 2023 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
|-----------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | RIAU | 3,65 | 4,56 | 5,04 | 6,77 | 8,65 | 10,7 | 12,7 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 3,26 | 3,99 | 4,56 | 6,29 | 8,22 | 9,71 | 11,39 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 3,44 | 4,21 | 4,8 | 6,53 | 8,32 | 9,86 | 11,52 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 4 | 5,05 | 5,79 | 7,83 | 10 | 11,88 | 13,89 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 4,35 | 5,21 | 5,8 | 7,36 | 9,21 | 10,65 | 12,25 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 2,25 | 2,91 | 3,43 | 4,94 | 6,85 | 8,12 | 9,65 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 3,41 | 4,07 | 4,58 | 6,09 | 7,68 | 9,01 | 10,46 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 3,46 | 4,23 | 4,82 | 6,45 | 8,11 | 9,61 | 11,19 |
| 14.08 | Kab. Siak | 2,7 | 3,28 | 3,77 | 5,43 | 7,69 | 8,95 | 10,61 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 4,88 | 5,84 | 6,48 | 8 | 9,63 | 11,16 | 12,72 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 5,82 | 6,54 | 7,09 | 8,56 | 9,78 | 11,2 | 12,56 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 3,8 | 4,7 | 5,4 | 7,53 | 9,81 | 11,65 | 13,69 |
| 14.12 | Kota Dumai | 3,6 | 4,41 | 5,02 | 6,71 | 8,38 | 9,93 | 11,54 |

Sumber : Hasil Long Form SP 2020 – BPS Provinsi Riau (diolah)

Ket. > 10% : Memasuki *Ageing Population*

2.6.3 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi penduduk Provinsi Riau berdasarkan jenis kelamin masih di dominasi oleh penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin 1,04 pada tahun 2023 menjadi 1,00 pada tahun 2045 yang artinya, pada tahun 2045 yang akan datang jumlah penduduk laki-laki hampir sama dengan jumlah penduduk perempuan. Kondisi yang sama juga terjadi pada kabupaten/kota lainnya, seperti Kabupaten Kuantan Singingi (tahun 2040-2045), Indragiri Hulu (tahun 2045), Pelalawan (tahun 2045), Rokan Hulu (tahun 2045) dan Rokan Hilir (tahun 2045). Untuk Kota Pekanbaru, jumlah penduduk laki-laki hampir sama dengan jumlah penduduk perempuan dan diproyeksikan mulai terjadi pada tahun 2025.

Meningkatnya jumlah penduduk perempuan di masa yang akan datang menjadi perhatian pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah yang dapat diambil yakni mendorong akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan formal dan non formal; menyediakan akses yang mudah dan terjangkau pada layanan kesehatan reproduksi; memberikan pelatihan dan pendidikan keterampilan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja; menerapkan kebijakan

yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga, seperti cuti orang tua, fasilitas penitipan anak, dan fleksibilitas jam kerja; meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak-hak properti, hak-hak pernikahan, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender.

Tabel 2.123 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Provinsi Riau/Kabupaten/Kota)

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/ Kota | Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) | 2023 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 14 | RIAU | Laki-laki | 3.437,20 | 3.515,20 | 3.691,90 | 3.844,50 | 3.974,90 | 4.081,10 |
| | | Perempuan | 3.290,90 | 3.377,20 | 3.580,20 | 3.765,00 | 3.931,80 | 4.075,70 |
| | | Rasio | 1,044 | 1,041 | 1,031 | 1,021 | 1,011 | 1,001 |
| 14.01 | Kampar | Laki-laki | 450,9 | 464,2 | 494,9 | 522 | 546,1 | 568,1 |
| | | Perempuan | 430,2 | 444,2 | 477,5 | 508,1 | 536,8 | 563,8 |
| | | Rasio | 1,048 | 1,045 | 1,037 | 1,027 | 1,017 | 1,008 |
| 14.02 | Indragiri Hulu | Laki-laki | 237 | 242,7 | 256,1 | 268,1 | 278,8 | 287,8 |
| | | Perempuan | 225,3 | 231,7 | 247,1 | 261,8 | 275,4 | 287,4 |
| | | Rasio | 1,052 | 1,048 | 1,036 | 1,024 | 1,013 | 1,002 |
| 14.03 | Bengkalis | Laki-laki | 299,5 | 306 | 319,3 | 329,4 | 337,6 | 344,7 |
| | | Perempuan | 285,4 | 292,3 | 307,1 | 319,3 | 329,9 | 339,3 |
| | | Rasio | 1,049 | 1,047 | 1,04 | 1,032 | 1,024 | 1,016 |
| 14.04 | Indragiri Hilir | Laki-laki | 350,1 | 357 | 372,1 | 384,5 | 394,1 | 401,1 |
| | | Perempuan | 327,2 | 335,2 | 353,7 | 369,8 | 383,4 | 394,3 |
| | | Rasio | 1,07 | 1,065 | 1,052 | 1,04 | 1,028 | 1,017 |
| 14.05 | Pelalawan | Laki-laki | 210,6 | 216,6 | 230,9 | 244,4 | 257,3 | 268,9 |
| | | Perempuan | 198 | 204,6 | 220,7 | 236,6 | 252,4 | 267,3 |
| | | Rasio | 1,064 | 1,059 | 1,046 | 1,033 | 1,019 | 1,006 |
| 14.06 | Rokan Hulu | Laki-laki | 298,4 | 306,3 | 324,9 | 341,8 | 361,8 | 367,1 |
| | | Perempuan | 286,8 | 295,4 | 316,1 | 335,6 | 352,9 | 367,2 |
| | | Rasio | 1,04 | 1,037 | 1,028 | 1,018 | 1,025 | 1 |
| 14.07 | Rokan Hilir | Laki-laki | 340 | 348,9 | 370,2 | 389,9 | 407,4 | 421,7 |
| | | Perempuan | 24 | 333,7 | 357,8 | 380,9 | 402,3 | 420,7 |
| | | Rasio | 1,05 | 1,045 | 1,035 | 1,023 | 1,013 | 1,002 |
| 14.08 | Siak | Laki-laki | 245,7 | 252,1 | 267,2 | 280,9 | 292,9 | 302,7 |
| | | Perempuan | 231,4 | 238,3 | 255,1 | 271,2 | 286,1 | 299,1 |

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/ Kota | Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) | 2023 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Rasio | 1,062 | 1,058 | 1,047 | 1,036 | 1,024 | 1,012 |
| 14.09 | Kuantan Singingi | Laki-laki | 175,6 | 178,9 | 186,5 | 192,6 | 197,3 | 200,7 |
| | | Perempuan | 170,1 | 173,8 | 182,6 | 190,3 | 196,8 | 202,1 |
| | | Rasio | 1,032 | 1,029 | 1,021 | 1,012 | 1,002 | 0,993 |
| 14.10 | Kepulauan Meranti | Laki-laki | 9,4 | 111,4 | 115,7 | 119,1 | 121,5 | 123,5 |
| | | Perempuan | 2,3 | 104,2 | 108,4 | 111,8 | 114,6 | 116,8 |
| | | Rasio | 1,069 | 1,069 | 1,067 | 1,065 | 1,061 | 1,057 |
| 14.11 | Pekanbaru | Laki-laki | 10,7 | 520 | 539,4 | 554,1 | 565,5 | 573,6 |
| | | Perempuan | 5,7 | 516,6 | 540,6 | 560,8 | 577,9 | 592 |
| | | Rasio | 1,01 | 1,007 | 0,998 | 0,988 | 0,978 | 0,969 |
| 14.12 | Dumai | Laki-laki | 168,7 | 172,6 | 181,5 | 189,2 | 196 | 202 |
| | | Perempuan | 160,3 | 164,5 | 174,3 | 183,3 | 191,6 | 199,2 |
| | | Rasio | 1,052 | 1,049 | 1,041 | 1,032 | 1,023 | 1,014 |

Sumber : Hasil Long Form SP 2020 – BPS Provinsi Riau

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa hingga tahun 2045, jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Riau lebih banyak daripada perempuan, tetapi diperkirakan setelah tahun 2045, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.

2.6.4 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Jumlah penduduk di Provinsi Riau pada usia 0-14 tahun diperkirakan cenderung terus menurun hingga tahun 2045 yang berdampak pada meningkatnya penduduk usia 65 tahun keatas dengan laju pertumbuhan cukup tinggi sekitar 6,14 persen per tahun. Jumlah penduduk usia tua yang semakin banyak dapat disebabkan akibat kontribusi kualitas kesehatan masyarakat dan juga pelayanan kesehatan yang semakin baik. Banyak jumlah penduduk usia tua ini, tentu memerlukan fasilitas pelayanan yang lebih banyak untuk usia tersebut.

Rasio ketergantungan Provinsi Riau yang tertinggi diproyeksikan terjadi pada tahun 2045 sebesar 50,56 persen yang artinya bahwa dari 100 jiwa penduduk usia produktif di Provinsi Riau menanggung 50-51 jiwa penduduk usia tidak produktif. Pada Kabupaten Bengkalis, rasio ketergantungan terbesar dimulai pada tahun 2030

hingga 2045. Hal ini berarti bahwa terjadi bonus demografi pada seluruh kabupaten/kota hingga tahun 2045 kecuali Kabupaten Bengkalis yang berakhirnya bonus demografi pada tahun 2025 atau memasuki tahun 2030. Tingginya angka kelahiran di Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu penyebab besarnya rasio ketergantungan di kabupaten tersebut.

**Tabel 2.124 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
(Provinsi Riau/Kabupaten/Kota)**

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/ Kota | Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa) | 2023 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
|-------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | RIAU | 0 - 14 | 1.792 | 1.789 | 1.756 | 1.712 | 1.694 | 1.694 |
| | | 15 - 64 | 4.556 | 4.679 | 4.957 | 5.181 | 5.316 | 5.387 |
| | | 65+ | 295 | 343 | 487 | 653 | 840 | 1030 |
| | | RK | 45,8 | 45,58 | 45,24 | 45,64 | 47,67 | 50,56 |
| 14.01 | Kampar | 0 - 14 | 241,5 | 244,2 | 245,4 | 236,1 | 233,2 | 235,4 |
| | | 15 - 64 | 604,4 | 622,7 | 665,8 | 709,3 | 738,7 | 758,7 |
| | | 65+ | 35,1 | 41,4 | 61,2 | 84,7 | 111,1 | 137,7 |
| | | RK | 45,77 | 45,87 | 46,05 | 45,23 | 46,61 | 49,17 |
| 1402 | Indragiri Hulu | 0 - 14 | 125,2 8 | 124,49 8 | 120,96 5 | 120,03 4 | 120,91 9 | 122,08 8 |
| | | 15 - 64 | 317,5 | 327,13 1 | 349,36 6 | 365,77 8 | 376,74 8 | 383,73 4 |
| | | 65+ | 19,46 | 22,769 | 32,871 | 44,061 | 56,534 | 69,34 |
| | | RK | 45,59 | 45,02 | 44,03 | 44,86 | 47,1 | 49,89 |
| 1408 | Bengkalis | 0 - 14 | 160,7 | 162,4 | 161 | 151,6 | 145,6 | 146 |
| | | 15 - 64 | 394,7 | 401,3 | 416,4 | 432,2 | 441,5 | 442,7 |
| | | 65+ | 29,5 | 34,6 | 49,1 | 64,8 | 80,4 | 95,3 |
| | | RK | 48,18 | 49,09 | 50,44 | 50,07 | 51,19 | 54,51 |
| 1403 | Indragiri Hilir | 0 - 14 | 171,6 | 170,9 | 169,8 | 169,3 | 165,5 | 162,5 |
| | | 15 - 64 | 470,4 | 481,1 | 502,6 | 515,6 | 524,2 | 526,6 |
| | | 65+ | 35,3 | 40,1 | 53,5 | 69,5 | 87,8 | 106,3 |
| | | RK | 43,99 | 43,86 | 44,42 | 46,32 | 48,32 | 51,04 |
| 1404 | Pelalawan | 0 - 14 | 120,5 | 119,1 | 113,4 | 108,8 | 111,4 | 115,3 |
| | | 15 - 64 | 276,2 | 287,7 | 315,8 | 339,2 | 352,4 | 360 |
| | | 65+ | 11,9 | 14,4 | 22,3 | 32,9 | 45,9 | 60,9 |
| | | RK | 47,93 | 46,43 | 42,99 | 41,78 | 44,61 | 48,95 |
| 1407 | Rokan Hulu | 0 - 14 | 155,9 | 154,6 | 152 | 161,5 | 160,3 | 157,1 |
| | | 15 - 64 | 405,5 | 419,5 | 450 | 463,9 | 486,5 | 491,1 |
| | | 65+ | 23,8 | 27,5 | 39 | 52,1 | 67,9 | 86 |
| | | RK | 44,32 | 43,41 | 42,45 | 46,03 | 46,92 | 49,51 |
| 1409 | Rokan Hilir | 0 - 14 | 182,8 | 181,3 | 178 | 182,9 | 184,9 | 184,5 |
| | | 15 - 64 | 453,1 | 468,5 | 503 | 525,4 | 544,8 | 559,9 |
| | | 65+ | 28,1 | 32,9 | 47 | 62,5 | 79,9 | 97,9 |
| | | RK | 46,55 | 45,72 | 44,74 | 46,71 | 48,62 | 50,45 |
| 1405 | Siak | 0 - 14 | 131,4 | 130,7 | 128,3 | 127,3 | 128,5 | 129,1 |
| | | 15 - 64 | 330 | 341,2 | 365,7 | 382,3 | 392 | 399,3 |
| | | 65+ | 15,7 | 18,5 | 28,4 | 42,5 | 58,5 | 73,5 |
| | | RK | 44,57 | 43,73 | 42,84 | 44,4 | 47,69 | 50,75 |
| 1401 | Kuantan Singingi | 0 - 14 | 88,67 | 88,68 | 87,77 | 86,47 | 84,44 | 82,96 |
| | | 15 - 64 | 236,7 | 241,24 | 251,76 | 259,53 | 264,65 | 266,65 |

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/ Kota | Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) | 2023 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
|------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 6 | | | | | |
| | | 65+ | 20,18 | 22,86 | 29,52 | 36,85 | 44,99 | 53,21 |
| | | RK | 45,97 | 46,24 | 46,59 | 47,51 | 48,91 | 51,07 |
| 1410 | Kepulauan Meranti | 0 - 14 | 52,3 | 52,9 | 53 | 50,4 | 48,9 | 47,8 |
| | | 15 - 64 | 145,6 | 147,4 | 151,9 | 157,9 | 160,8 | 161,6 |
| | | 65+ | 13,9 | 15,3 | 19,2 | 22,6 | 26,5 | 30,9 |
| | | RK | 45,43 | 46,23 | 47,51 | 46,2 | 46,86 | 48,71 |
| | | | | | | | | |
| 1471 | Pekanbaru | 0 - 14 | 268,8 | 268,1 | 257,6 | 236,4 | 229,9 | 229,6 |
| | | 15 - 64 | 699,8 | 712,5 | 741,1 | 769,1 | 772,9 | 767,2 |
| | | 65+ | 47,8 | 55,9 | 81,3 | 109,4 | 140,5 | 168,8 |
| | | RK | 45,24 | 45,48 | 45,72 | 44,96 | 47,93 | 51,93 |
| 1473 | Dumai | 0 - 14 | 92,2 | 91,7 | 88,4 | 80,8 | 80,4 | 81,5 |
| | | 15 - 64 | 222,2 | 228,4 | 243,6 | 260,5 | 266,8 | 269,6 |
| | | 65+ | 14,5 | 16,9 | 23,9 | 31,2 | 40,3 | 50,1 |
| | | RK | 48,02 | 47,57 | 46,09 | 43,01 | 45,25 | 48,81 |

Sumber : Hasil Long Form SP 2020 – BPS Provinsi Riau (diolah)

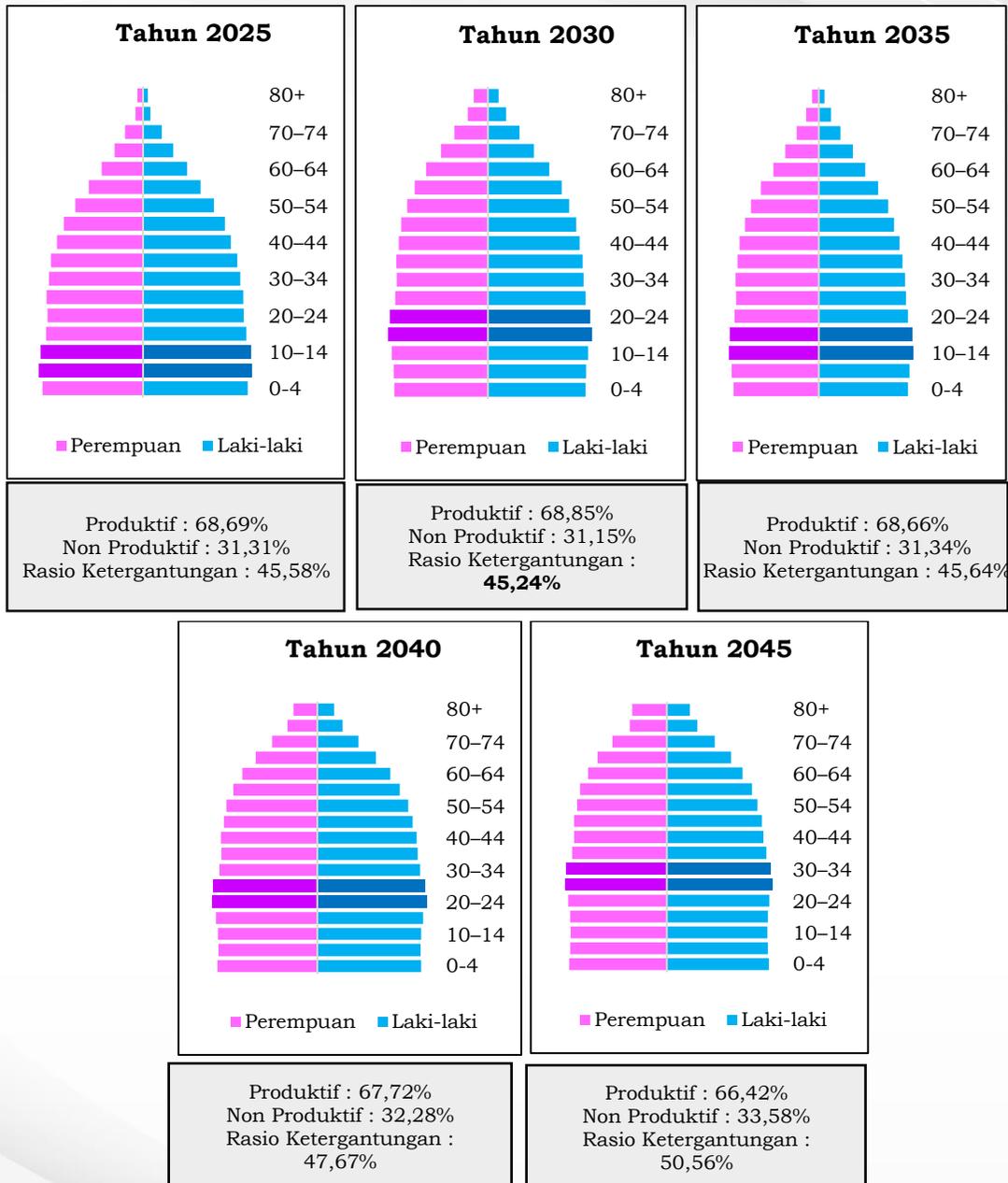
RK : Rasio Ketergantungan (%), > 50% (Tinggi)

Kondisi Provinsi Riau saat ini dapat dikatakan sedang mengalami masa bonus demografi. Bonus demografi ditandai dengan kenaikan dua kali lipat jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang diiringi dengan penundaan pertumbuhan usia penduduk muda dan semakin sedikit jumlah penduduk lansia. Dengan kata lain terjadi penurunan rasio ketergantungan dari penduduk. Provinsi Riau diperkirakan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2020-2030 dan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030, dimana saat itu angka ketergantungan merupakan yang paling kecil, yakni sebesar 45,24 persen artinya jumlah penduduk dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun lebih rendah.

Dalam perencanaan pembangunan, komposisi penduduk yang sering digunakan adalah komposisi penduduk menurut kelompok umur. Komposisi ini tidak hanya mencerminkan proses demografi masa lalu tetapi sekaligus menggambarkan perkembangan penduduk pada masa yang akan datang. Berdasarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat dikembangkan beberapa indikator yang umum digunakan dalam penyajian data penduduk, salah satunya adalah rasio ketergantungan (RK).

Rasio ketergantungan Provinsi Riau cenderung menurun dari 2020 sampai 2030, kemudian meningkat dari 2030 sampai 2045. Rasio ketergantungan ini juga menunjukkan kualitas demografi suatu wilayah, semakin kecil rasio

ketergantungan maka semakin baik, artinya lebih sedikit usia non produktif yang harus ditanggung kebutuhan hidupnya oleh usia produktif.



Gambar 2.47 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Provinsi Riau Tahun 2025-2045

Sumber : SP 2020 BPS Provinsi Riau

2.6.5 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

2.6.5.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Persentase rumah tangga atau keluarga yang sudah memiliki rumah sendiri pada tahun 2023 di kabupaten/kota di Provinsi Riau adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Kota Pekanbaru adalah yang paling rendah persentase kepemilikan rumah sendiri yaitu sekitar 58,84 persen, disusul Pelalawan sekitar 66,15 persen. Kepemilikan rumah sendiri yang paling tinggi justru ada di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan 89,13 persen, meskipun di sana angka kemiskinannya paling tinggi di Riau. Secara rata-rata di Provinsi Riau, kepemilikan rumah sendiri adalah sekitar 76,93 persen. Jika diambil rata-rata jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga adalah 4,15 orang, maka jumlah rumah tangga pada masing-masing tahun proyeksi bisa didapatkan. Demikian pula dengan proyeksi kebutuhan rumah yang diasumsikan sama dengan jumlah rumah tangga, dimana satu rumah tangga masing-masing memiliki satu rumah. Jika diharapkan pada tahun 2045, semua rumah tangga di masing-masing kabupaten/kota di Riau sudah memiliki rumah sendiri (100 persen), maka target penyediaan rumah untuk setiap penggalan lima tahun pada masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 2.125 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Provinsi/Kabupaten/Kota)

| Kode | Provinsi/Kabupaten/ Kota (Jumlah rumah yang perlu dibangun sampai 2045) | Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit) | | | | |
|-------|--|---|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 14 | Riau (722.993 rumah) | Jumlah Penduduk | 6.642.874 | 6.811.158 | 7.199.743 | 7.545.263 | 7.850.626 | 8.110.994 |
| | | Jumlah Rumah Tangga | 1.600.693 | 1.641.243 | 1.734.878 | 1.818.136 | 1.891.717 | 1.954.456 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Rumah | 1.600.693 | 1.641.243 | 1.734.878 | 1.818.136 | 1.891.717 | 1.954.456 |
| | | Persentase kepemilikan rumah sendiri | 76,93 | 77,25 | 82,41 | 87,54 | 92,63 | 100 |
| | | Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri | 1.231.463 | 1.267.811 | 1.429.669 | 1.591.515 | 1.752.312 | 1.954.456 |
| 14.01 | Kampar (101.179 rumah) | Jumlah Penduduk | 881.028 | 908.385 | 972.377 | 1.030.090 | 1.082.993 | 1.131.853 |
| | | Jumlah Rumah Tangga | 212.296 | 218.888 | 234.308 | 248.214 | 260.962 | 272.736 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Rumah | 212.296 | 218.888 | 234.308 | 248.214 | 260.962 | 272.736 |
| | | Persentase kepemilikan rumah sendiri | 80,81 | 82 | 84 | 86 | 88 | 100 |
| | | Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri | 171.556 | 179.488 | 196.818 | 213.464 | 229.647 | 272.736 |
| 14.02 | Indragiri Hulu (42.128 rumah) | Jumlah Penduduk | 462.220 | 474.398 | 503.202 | 529.873 | 554.201 | 575.162 |
| | | Jumlah Rumah Tangga | 111.378 | 114.313 | 121.253 | 127.680 | 133.542 | 138.593 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Rumah | 111.378 | 114.313 | 121.253 | 127.680 | 133.542 | 138.593 |
| | | Persentase kepemilikan rumah sendiri | 86,61 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
| | | Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri | 96.465 | 100.595 | 110.341 | 120.019 | 129.536 | 138.593 |

| Kode | Provinsi/Kabupaten/ Kota (Jumlah rumah yang perlu dibangun sampai 2045) | Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit) | | | | |
|-------|--|---|--------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 14.03 | Bengkalis (56.209 rumah) | Jumlah Penduduk | 584.916 | 598.331 | 626.418 | 648.637 | 667.493 | 684.003 |
| | | Jumlah Rumah Tangga | 140.944 | 144.176 | 150.944 | 156.298 | 160.842 | 164.820 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Rumah | 140.944 | 144.176 | 150.944 | 156.298 | 160.842 | 164.820 |
| | | Persentase kepemilikan rumah sendiri | 77,06 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| | | Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri | 108.611 | 115.341 | 128.302 | 140.668 | 152.800 | 164.820 |
| 14.04 | Indragiri Hilir (49.693 rumah) | Jumlah Penduduk | 677.290 | 692.189 | 725.841 | 754.353 | 777.554 | 795.331 |
| | | Jumlah Rumah Tangga | 163.202 | 166.793 | 174.901 | 181.772 | 187.362 | 191.646 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Rumah | 163.202 | 166.793 | 174.901 | 181.772 | 187.362 | 191.646 |
| | | Persentase kepemilikan rumah sendiri | 86,98 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
| | | Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri | 141.953 | 146.777 | 159.160 | 170.865 | 181.742 | 191.646 |
| 14.05 | Pelalawan (64.089 rumah) | Jumlah Penduduk | 408.543 | 421.237 | 451.596 | 480.979 | 509.682 | 536.219 |
| | | Jumlah Rumah Tangga | 98.444 | 101.503 | 108.818 | 115.899 | 122.815 | 129.209 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Rumah | 98.444 | 101.503 | 108.818 | 115.899 | 122.815 | 129.209 |
| | | Persentase kepemilikan rumah sendiri | 66,15 | 70 | 77,5 | 85 | 92,5 | 100 |
| | | Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri | 65.121 | 71.052 | 84.334 | 98.514 | 113.604 | 129.209 |
| 14.06 | Rokan Hulu | Jumlah Penduduk | 585.183 | 601.632 | 641.046 | 677.452 | 709.022 | 734.281 |

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045

| Kode | Provinsi/Kabupaten/ Kota (Jumlah rumah yang perlu dibangun sampai 2045) | Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit) | | | | |
|-------|--|--|--------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| | (64.228 rumah) | Jumlah Rumah Tangga | 141.008 | 144.972 | 154.469 | 163.241 | 170.849 | 176.935 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Rumah | 141.008 | 144.972 | 154.469 | 163.241 | 170.849 | 176.935 |
| | | Persentase kepemilikan rumah sendiri | 79,93 | 82 | 84 | 86 | 88 | 100 |
| | | Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri | 112.708 | 118.877 | 129.754 | 140.388 | 150.347 | 176.935 |
| 14.07 | Rokan Hilir (74.883 rumah) | Jumlah Penduduk | 663.956 | 682.617 | 727.957 | 770.823 | 809.624 | 842.395 |
| | | Jumlah Rumah Tangga | 159.989 | 164.486 | 175.411 | 185.740 | 195.090 | 202.987 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Rumah | 159.989 | 164.486 | 175.411 | 185.740 | 195.090 | 202.987 |
| | | Persentase kepemilikan rumah sendiri | 80,07 | 82 | 86,5 | 91 | 95,5 | 100 |
| | | Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri | 128.104 | 134.879 | 151.731 | 169.024 | 186.311 | 202.987 |
| 14.08 | Siak (54.939 rumah) | Jumlah Penduduk | 477.064 | 490.376 | 522.308 | 552.026 | 578.918 | 601.871 |
| | | Jumlah Rumah Tangga | 114.955 | 118.163 | 125.857 | 133.018 | 139.498 | 145.029 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Rumah | 114.955 | 118.163 | 125.857 | 133.018 | 139.498 | 145.029 |
| | | Persentase kepemilikan rumah sendiri | 78,37 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| | | Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri | 90.090 | 94.530 | 106.979 | 119.716 | 132.523 | 145.029 |
| 14.09 | Kuantan Singingi (23.313 rumah) | Jumlah Penduduk | 345.610 | 352.777 | 369.051 | 382.840 | 394.073 | 402.822 |
| | | Jumlah Rumah Tangga | 83.280 | 85.007 | 88.928 | 92.251 | 94.957 | 97.066 |

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045

| Kode | Provinsi/Kabupaten/ Kota (Jumlah rumah yang perlu dibangun sampai 2045) | Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit) | | | | |
|-------|--|--|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Rumah | 83.280 | 85.007 | 88.928 | 92.251 | 94.957 | 97.066 |
| | | Persentase kepemilikan rumah sendiri | 88,56 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 |
| | | Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri | 73.752 | 76.506 | 82.258 | 87.638 | 92.583 | 97.066 |
| 14.10 | Kepulauan Meranti (12.415 rumah) | Jumlah Penduduk | 211.791 | 215.586 | 224.089 | 230.864 | 236.123 | 240.292 |
| | | Jumlah Rumah Tangga | 51.034 | 51.948 | 53.997 | 55.630 | 56.897 | 57.902 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Rumah | 51.034 | 51.948 | 53.997 | 55.630 | 56.897 | 57.902 |
| | | Persentase kepemilikan rumah sendiri | 89,13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| | | Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri | 45.487 | 31.169 | 37.798 | 44.504 | 51.207 | 57.902 |
| 14.11 | Pekanbaru (136.757 rumah) | Jumlah Penduduk | 1.016.366 | 1.036.563 | 1.079.997 | 1.114.843 | 1.143.374 | 1.165.570 |
| | | Jumlah Rumah Tangga | 244.907 | 249.774 | 260.240 | 268.637 | 275.512 | 280.860 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Rumah | 244.907 | 249.774 | 260.240 | 268.637 | 275.512 | 280.860 |
| | | Persentase kepemilikan rumah sendiri | 58,84 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| | | Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri | 144.104 | 149.865 | 182.168 | 214.909 | 247.961 | 280.860 |
| 14.12 | Dumai (43.161 rumah) | Jumlah Penduduk | 328.907 | 337.067 | 355.861 | 372.483 | 387.569 | 401.195 |
| | | Jumlah Rumah Tangga | 79.255 | 81.221 | 85.750 | 89.755 | 93.390 | 96.673 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Rumah | 79.255 | 81.221 | 85.750 | 89.755 | 93.390 | 96.673 |

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045

| Kode | Provinsi/Kabupaten/ Kota (Jumlah rumah yang perlu dibangun sampai 2045) | Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit) | | | | |
|------|--|--|--------------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| | | Persentase kepemilikan rumah sendiri | 67,52 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| | | Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri | 53.513 | 48.733 | 60.025 | 71.804 | 84.051 | 96.673 |

Sumber : Data Olahan

2.6.5.2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Ketersediaan air bersih sistem perpipaan (leding) di kabupaten/kota di Provinsi Riau berbeda-beda, dimana secara rata-rata di Provinsi Riau pada tahun 2023 adalah sebesar 3,08%. Jika dipakai standar kebutuhan air bersih domestik (rumah tangga) per orang 120 liter/hari, maka bisa dihitung proyeksi kebutuhan air minum per harinya. Selain kebutuhan air domestik, diestimasikan kebutuhan air non domestik sebesar 67% dan kemungkinan kehilangan sekitar 20%. Demikian pula jumlah debit air bersih dari sistem pengolahan air bersih bisa dihitung dalam liter per detik. Pada tahun 2045 proyeksi kebutuhan air minum di Provinsi Riau adalah sekitar 2,03 juta m³ per hari atau dengan kapasitas 23.516 liter/detik.

Tabel 2.126 Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Provinsi/Kabupaten/Kota)

| Kode | Provinsi/ Kabupaten / Kota | Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Kebutuhan Air Minum | | | | |
|-------|----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 14 | Riau | Jumlah Penduduk | 6.642.874 | 6.811.158 | 7.199.743 | 7.545.263 | 7.850.626 | 8.110.994 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari) | 1.664.039.937 | 1.706.195.079 | 1.803.535.622 | 1.890.088.382 | 1.966.581.813 | 2.031.803.997 |
| | | Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik) | 19.260 | 19.748 | 20.874 | 21.876 | 22.761 | 23.516 |
| | | Persentase layanan air minum perpipaan | 3,08 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 14.01 | Kampar | Jumlah Penduduk | 881.028 | 908.385 | 972.377 | 1.030.090 | 1.082.993 | 1.131.853 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari) | 220.697.514 | 227.550.443 | 243.580.439 | 258.037.545 | 271.289.747 | 283.529.177 |
| | | Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik) | 2.554 | 2.634 | 2.819 | 2.987 | 3.140 | 3.282 |
| | | Persentase layanan air minum perpipaan | 1,39 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 14.02 | Indragiri Hulu | Jumlah Penduduk | 462.220 | 474.398 | 503.202 | 529.873 | 554.201 | 575.162 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari) | 115.786.110 | 118.836.699 | 126.052.101 | 132.733.187 | 138.827.351 | 144.078.081 |
| | | Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik) | 1.340 | 1.375 | 1.459 | 1.536 | 1.607 | 1.668 |

| Kode | Provinsi/ Kabupaten / Kota | Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Kebutuhan Air Minum | | | | |
|-------|----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| | | Persentase layanan air minum perpipaan | 8,66 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 14.03 | Bengkalis | Jumlah Penduduk | 584.916 | 598.331 | 626.418 | 648.637 | 667.493 | 684.003 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari) | 146.521.458 | 149.881.916 | 156.917.709 | 162.483.569 | 167.206.997 | 171.342.752 |
| | | Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik) | 1.696 | 1.735 | 1.816 | 1.881 | 1.935 | 1.983 |
| | | Persentase layanan air minum perpipaan | 2,02 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 14.04 | Indragiri Hilir | Jumlah Penduduk | 677.290 | 692.189 | 725.841 | 754.353 | 777.554 | 795.331 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari) | 169.661.145 | 173.393.345 | 181.823.171 | 188.965.427 | 194.777.277 | 199.230.416 |
| | | Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik) | 1.964 | 2.007 | 2.104 | 2.187 | 2.254 | 2.306 |
| | | Persentase layanan air minum perpipaan | 4,77 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 14.05 | Pelalawan | Jumlah Penduduk | 408.543 | 421.237 | 451.596 | 480.979 | 509.682 | 536.219 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari) | 102.340.022 | 105.519.869 | 113.124.798 | 120.485.240 | 127.675.341 | 134.322.860 |
| | | Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik) | 1.184 | 1.221 | 1.309 | 1.395 | 1.478 | 1.555 |
| | | Persentase layanan air minum perpipaan | 0,36 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045

| Kode | Provinsi/ Kabupaten / Kota | Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Kebutuhan Air Minum | | | | |
|--------|----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 14.06 | Rokan Hulu | Jumlah Penduduk | 585.183 | 601.632 | 641.046 | 677.452 | 709.022 | 734.281 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari) | 146.588.342 | 150.708.816 | 160.582.023 | 169.701.726 | 177.610.011 | 183.937.391 |
| | | Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik) | 1.697 | 1.744 | 1.859 | 1.964 | 2.056 | 2.129 |
| | | Persentase layanan air minum perpipaan | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 14.07 | Rokan Hilir | Jumlah Penduduk | 663.956 | 682.617 | 727.957 | 770.823 | 809.624 | 842.395 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari) | 166.320.978 | 170.995.559 | 182.353.229 | 193.091.162 | 202.810.812 | 211.019.948 |
| | | Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik) | 1.925 | 1.979 | 2.111 | 2.235 | 2.347 | 2.442 |
| | | Persentase layanan air minum perpipaan | 0,16 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 14.018 | Siak | Jumlah Penduduk | 477.064 | 490.376 | 522.308 | 552.026 | 578.918 | 601.871 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari) | 119.504.532 | 122.839.188 | 130.838.154 | 138.282.513 | 145.018.959 | 150.768.686 |
| | | Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik) | 1.383 | 1.422 | 1.514 | 1.600 | 1.678 | 1.745 |
| | | Persentase layanan air minum perpipaan | 14,6 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045

| Kode | Provinsi/ Kabupaten / Kota | Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Kebutuhan Air Minum | | | | |
|-------|----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 14.09 | Kuantan Singingi | Jumlah Penduduk | 1.016.366 | 1.036.563 | 1.079.997 | 1.114.843 | 1.143.374 | 1.165.570 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari) | 254.599.683 | 259.659.032 | 270.539.249 | 279.268.172 | 286.415.187 | 291.975.285 |
| | | Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik) | 2.947 | 3.005 | 3.131 | 3.232 | 3.315 | 3.379 |
| | | Persentase layanan air minum perpipaan | 1,84 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 14.10 | Kepulauan Meranti | Jumlah Penduduk | 211.791 | 215.586 | 224.089 | 230.864 | 236.123 | 240.292 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari) | 53.053.646 | 54.004.293 | 56.134.295 | 57.831.432 | 59.148.812 | 60.193.146 |
| | | Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik) | 614 | 625 | 650 | 669 | 685 | 697 |
| | | Persentase layanan air minum perpipaan | 1,83 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 14.11 | Pekanbaru | Jumlah Penduduk | 1.016.366 | 1.036.563 | 1.079.997 | 1.114.843 | 1.143.374 | 1.165.570 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari) | 254.599.683 | 259.659.032 | 270.539.249 | 279.268.172 | 286.415.187 | 291.975.285 |
| | | Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik) | 2.947 | 3.005 | 3.131 | 3.232 | 3.315 | 3.379 |
| | | Persentase layanan air minum perpipaan | 10 | 20 | 50 | 67 | 85 | 100 |

| Kode | Provinsi/ Kabupaten / Kota | Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Kebutuhan Air Minum | | | | |
|-------|----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 14.12 | Dumai | Jumlah Penduduk | 328.907 | 337.067 | 355.861 | 372.483 | 387.569 | 401.195 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari) | 82.391.204 | 84.435.284 | 89.143.181 | 93.306.992 | 97.086.035 | 100.499.348 |
| | | Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik) | 954 | 977 | 1.032 | 1.080 | 1.124 | 1.163 |
| | | Persentase layanan air minum perpipaan | 0,55 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

Sumber: Data Olahan

2.6.5.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Di dalam SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, ditetapkan kebutuhan listrik adalah 450 watt per jiwa. Sedangkan menurut standar kebutuhan listrik negara maju adalah antara 700 hingga 1.200 watt per jiwa. Perkembangan kebutuhan listrik akan terus meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu diproyeksikan kebutuhan listrik di Riau meningkat terus hingga menjadi 800 watt per kapita pada tahun 2045.

Tabel 2.127 Rata-Rata Jumlah Daya Listrik Per Kapita (Watt) Tahun 2021

| No | Negara | Jumlah Penduduk | Rata-Rata Jumlah Daya Listrik per Kapita (Watt) |
|-----------|--------------------------|--------------------|---|
| 1 | Republik Rakyat Tiongkok | 1.425.893.504 | 624 |
| 2 | USA | 336.997.632 | 1.285 |
| 3 | India | 1.407.563.904 | 117 |
| 4 | Rusia | 145.102.752 | 783 |
| 5 | Jepang | 124.612.528 | 836 |
| 6 | Brazil | 214.326.224 | 307 |
| 7 | Korea Selatan | 51.830.136 | 1.250 |
| 8 | Jerman | 83.408.560 | 700 |
| 9 | Meksiko | 126.705.136 | 271 |
| 10 | Turki | 84.775.408 | 382 |
| 11 | Indonesia | 273.753.184 | 117 |
| 12 | Vietnam | 97.468.024 | 268 |
| 13 | Malaysia | 33.573.872 | 513 |

Sumber: Wikipedia (*List of Countries by Electricity Consumption*)

Daya listrik terpasang dan daya listrik mampu untuk Provinsi Riau tahun 2021 bisa dilihat pada tabel dibawah. Besar daya mampu listrik yang tersalurkan di Riau adalah sebesar 1.648,51 MW atau sebesar 248 watt per kapita. Dari total pembangkit tenaga listrik terpasang di Riau tersebut, hanya 1.090 MW yang berasal dari PLN (43,1%), selebihnya adalah dari pihak swasta. Sedangkan untuk daya mampu dari PLN lebih besar yaitu 57,7%. Menurut data dari Statistik PLN tahun 2021, daya tersambung di Provinsi Riau 3.716 MW yang terdiri dari rumah tangga 2.069 MW (55,68%), Industri 617 MW (16,6%), Bisnis 736 MW (19,8%), Sosial 169 MW (4,55%), Kantor Pemerintah 86 MW (2,31%), dan Penerangan Jalan Umum 37

MW (1%). PT Wilmar Nabati di Dumai sendiri merupakan pelanggan PLN dengan daya tertinggi sebesar 60 MW (masuk kelompok industri).

Tabel 2.128 Besar Daya Listrik (dalam MW) di Provinsi Riau Tahun 2021

| No | Sumber Energi Listrik | Daya Terpasang | | | Daya Mampu | | |
|----|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| | | PLN | Non PLN | Total | PLN | Non PLN | Total |
| 1 | PLTU (uap) | 238,00 | 125,00 | 363,00 | 234,00 | 62,00 | 296,00 |
| 2 | PLTG (gas) | 165,80 | - | 165,80 | 119,21 | - | 119,21 |
| 3 | PLTGU (gas uap) | - | 30,00 | 30,00 | - | 26,00 | 26,00 |
| 4 | PLTMG (mesin gas) | 357,20 | 6,00 | 363,20 | 308,84 | 6,00 | 314,84 |
| 5 | PLTD | 214,86 | - | 214,86 | 174,86 | - | 174,86 |
| 6 | PLTA | 114,00 | - | 114,00 | 114,00 | - | 114,00 |
| 7 | PLTMH (micro hydro) | - | 0,06 | 0,06 | - | 0,06 | 0,06 |
| 8 | PLTBg (bio gas) | - | 29,94 | 29,94 | - | 24,20 | 24,20 |
| 9 | PLTBm (bio massa) | - | 1.249,44 | 1.249,44 | - | 577,68 | 577,68 |
| 10 | PLTS | - | 1,36 | 1,36 | - | 1,36 | 1,36 |
| 11 | PLT Hybrid | - | 0,30 | 0,30 | - | 0,30 | 0,30 |
| | Jumlah | 1.089,86 (43,1%) | 1.442,09 | 2.531,95 | 950,91 (57,7%) | 697,60 | 1.648,51 |

Sumber: Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Sebagai perbandingan, menurut Wikipedia (List of Countries by Electricity Consumption) konsumsi energi listrik Indonesia adalah sebesar 282.000 Gwh (giga watt hour) per tahun pada tahun 2021, yang berarti daya listrik perkapita di Indonesia adalah 117 watt. Sementara itu, menurut data dari Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, konsumsi energi listrik di Riau dan Kepri adalah sebesar 7.021 Gwh pada tahun 2021, yang berarti daya listrik perkapita yang terpakai di Riau dan Kepri adalah sebesar 91 watt. Proyeksi kebutuhan daya listrik total di dalam MegaWatt (MW) adalah sebagai berikut.

Tabel 2.129 Proyeksi Kebutuhan Listrik (Provinsi/Kabupaten/Kota)

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/ Kota | Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Kebutuhan Listrik | | | | |
|--|---------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik per kapita (watt) | | | 248 | 300 | 425 | 550 | 675 | 800 |
| 14 | Riau | Jumlah Penduduk | 6.642.874 | 6.811.158 | 7.199.743 | 7.545.263 | 7.850.626 | 8.110.994 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW) | 1.647 | 2.043 | 3.060 | 4.150 | 5.299 | 6.489 |
| 14.01 | Kampar | Jumlah Penduduk | 881.028 | 908.385 | 972.377 | 1.030.090 | 1.082.993 | 1.131.853 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW) | 218 | 273 | 413 | 567 | 731 | 905 |
| 14.02 | Indragiri Hulu | Jumlah Penduduk | 462.220 | 474.398 | 503.202 | 529.873 | 554.201 | 575.162 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW) | 115 | 142 | 214 | 291 | 374 | 460 |
| 14.03 | Bengkalis | Jumlah Penduduk | 584.916 | 598.331 | 626.418 | 648.637 | 667.493 | 684.003 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW) | 145 | 179 | 266 | 357 | 451 | 547 |
| 14.04 | Indragiri Hilir | Jumlah Penduduk | 677.290 | 692.189 | 725.841 | 754.353 | 777.554 | 795.331 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW) | 168 | 208 | 308 | 415 | 525 | 636 |
| 14.05 | Pelalawan | Jumlah Penduduk | 408.543 | 421.237 | 451.596 | 480.979 | 509.682 | 536.219 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW) | 101 | 126 | 192 | 265 | 344 | 429 |
| 14.06 | Rokan Hulu | Jumlah Penduduk | 585.183 | 601.632 | 641.046 | 677.452 | 709.022 | 734.281 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW) | 145 | 180 | 272 | 373 | 479 | 587 |
| 14.07 | Rokan Hilir | Jumlah Penduduk | 663.956 | 682.617 | 727.957 | 770.823 | 809.624 | 842.395 |

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/ Kota | Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Kebutuhan Listrik | | | | |
|-------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW) | 165 | 205 | 309 | 424 | 546 | 674 |
| 14.08 | Siak | Jumlah Penduduk | 477.064 | 490.376 | 522.308 | 552.026 | 578.918 | 601.871 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW) | 118 | 147 | 222 | 304 | 391 | 481 |
| 14.09 | Kuantan Singingi | Jumlah Penduduk | 345.610 | 352.777 | 369.051 | 382.840 | 394.073 | 402.822 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW) | 86 | 106 | 157 | 211 | 266 | 322 |
| 14.10 | Kep. Meranti | Jumlah Penduduk | 211.791 | 215.586 | 224.089 | 230.864 | 236.123 | 240.292 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW) | 53 | 65 | 95 | 127 | 159 | 192 |
| 14.11 | Pekanbaru | Jumlah Penduduk | 1.016.366 | 1.036.563 | 1.079.997 | 1.114.843 | 1.143.374 | 1.165.570 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW) | 252 | 311 | 459 | 613 | 772 | 932 |
| 14.12 | Dumai | Jumlah Penduduk | 328.907 | 337.067 | 355.861 | 372.483 | 387.569 | 401.195 |
| | | Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW) | 82 | 101 | 151 | 205 | 262 | 321 |

Sumber: Data Olahan

Dari kapasitas daya mampu sekarang sekitar 1.647 MW di Riau, maka untuk memenuhi kebutuhan pada tahun 2045 dibutuhkan kapasitas daya mampu sekitar 4 kali yang ada saat ini menjadi 6.489 MW kapasitas daya mampu, dengan daya listrik per kapita sekitar 800 watt. Secara rata-rata dibutuhkan penambahan kapasitas daya mampu sekitar 220 MW per tahun sampai tahun 2045.

2.6.5.4 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Menurut SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman, jumlah timbulan sampah per orang adalah 2,5 liter per hari untuk sampah rumah tangga, ditambah sepertiganya untuk timbulan sampah sejenis sampah rumah tangga (sampah kantor, pasar, perdagangan dan lainnya). Karena itu, proyeksi timbulan sampah kabupaten/kota dan provinsi di Riau bisa dihitung sebagai berikut.

Tabel 2.130 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan (Provinsi Kabupaten/Kota)

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Timbulan Sampah | | | | |
|-------|-----------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 14 | Riau | Jumlah Penduduk | 6.642.874 | 6.811.158 | 7.199.743 | 7.545.263 | 7.850.626 | 8.110.994 |
| | | Proyeksi Timbulan Sampah Total (m ³ /hari) | 22.088 | 22.647 | 23.939 | 25.088 | 26.103 | 26.969 |
| 14.01 | Kampar | Jumlah Penduduk | 881.028 | 908.385 | 972.377 | 1.030.090 | 1.082.993 | 1.131.853 |
| | | Proyeksi Timbulan Sampah Total (m ³ /hari) | 2.929 | 3.020 | 3.233 | 3.425 | 3.601 | 3.763 |
| 14.02 | Indragiri Hulu | Jumlah Penduduk | 462.220 | 474.398 | 503.202 | 529.873 | 554.201 | 575.162 |
| | | Proyeksi Timbulan Sampah Total (m ³ /hari) | 1.537 | 1.577 | 1.673 | 1.762 | 1.843 | 1.912 |
| 14.03 | Bengkalis | Jumlah Penduduk | 584.916 | 598.331 | 626.418 | 648.637 | 667.493 | 684.003 |
| | | Proyeksi Timbulan Sampah Total (m ³ /hari) | 1.945 | 1.989 | 2.083 | 2.157 | 2.219 | 2.274 |
| 14.04 | Indragiri Hilir | Jumlah Penduduk | 677.290 | 692.189 | 725.841 | 754.353 | 777.554 | 795.331 |
| | | Proyeksi Timbulan Sampah Total (m ³ /hari) | 2.252 | 2.302 | 2.413 | 2.508 | 2.585 | 2.644 |

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/Kota | Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Timbunan Sampah | | | | |
|-------|-----------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 14.05 | Pelalawan | Jumlah Penduduk | 408.543 | 421.237 | 451.596 | 480.979 | 509.682 | 536.219 |
| | | Proyeksi Timbunan Sampah Total (m ³ /hari) | 1.358 | 1.401 | 1.502 | 1.599 | 1.695 | 1.783 |
| 14.06 | Rokan Hulu | Jumlah Penduduk | 585.183 | 601.632 | 641.046 | 677.452 | 709.022 | 734.281 |
| | | Proyeksi Timbunan Sampah Total (m ³ /hari) | 1.946 | 2.000 | 2.131 | 2.253 | 2.357 | 2.441 |
| 14.07 | Rokan Hilir | Jumlah Penduduk | 663.956 | 682.617 | 727.957 | 770.823 | 809.624 | 842.395 |
| | | Proyeksi Timbunan Sampah Total (m ³ /hari) | 2.208 | 2.270 | 2.420 | 2.563 | 2.692 | 2.801 |
| 14.08 | Siak | Jumlah Penduduk | 477.064 | 490.376 | 522.308 | 552.026 | 578.918 | 601.871 |
| | | Proyeksi Timbunan Sampah Total (m ³ /hari) | 1.586 | 1.631 | 1.737 | 1.835 | 1.925 | 2.001 |
| 14.09 | Kuantan Singingi | Jumlah Penduduk | 345.610 | 352.777 | 369.051 | 382.840 | 394.073 | 402.822 |
| | | Proyeksi Timbunan Sampah Total (m ³ /hari) | 1.149 | 1.173 | 1.227 | 1.273 | 1.310 | 1.339 |
| 14.10 | Kep. Meranti | Jumlah Penduduk | 211.791 | 215.586 | 224.089 | 230.864 | 236.123 | 240.292 |
| | | Proyeksi Timbunan Sampah Total (m ³ /hari) | 704 | 717 | 745 | 768 | 785 | 799 |
| 14.11 | Pekanbaru | Jumlah Penduduk | 1.016.366 | 1.036.563 | 1.079.997 | 1.114.843 | 1.143.374 | 1.165.570 |
| | | Proyeksi Timbunan Sampah Total (m ³ /hari) | 3.379 | 3.447 | 3.591 | 3.707 | 3.802 | 3.876 |
| 14.12 | Dumai | Jumlah Penduduk | 328.907 | 337.067 | 355.861 | 372.483 | 387.569 | 401.195 |
| | | Proyeksi Timbunan Sampah Total (m ³ /hari) | 1.094 | 1.121 | 1.183 | 1.239 | 1.289 | 1.334 |

Sumber: Data olahan

* Konversi dari volume timbunan sampah (dalam m³) ke berat sampah dalam ton, bisa dibuat dengan mengasumsikan rata-rata berat volume sampah adalah 0,3 kg/m³.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045

2.6.5.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Menurut standar WHO, untuk 1.000 penduduk harus dipersiapkan 1 tempat tidur rumah sakit. Saat ini, di Provinsi Riau terdapat 69 rumah sakit dengan 5.402 tempat tidur. Berdasarkan pada standar WHO, maka kebutuhan tempat tidur rumah sakit di Provinsi Riau tahun 2023 seharusnya sekitar 6.643 tempat tidur, yang berarti masih kurang sekitar 1.241 tempat tidur. Permasalahan pemenuhan tempat tidur rumah sakit bukan hanya pada jumlahnya, tetapi juga pada penyebarannya. Semua kabupaten/kota di Riau kekurangan tempat tidur rumah sakit dan jumlah rumah sakit. Hanya Kota Pekanbaru yang memiliki rasio tempat tidur rumah sakit dan jumlah rumah sakit yang berlebih sampai 2,6 kali lipat dari standar yang diperlukan. Fasilitas rumah sakit dan tempat tidur rumah sakit menumpuk di Pekanbaru dan menyebabkan pasien-pasien rujukan banyak berdatangan ke Pekanbaru.

Dengan mengasumsikan satu rumah sakit memiliki rata-rata 100 tempat tidur, maka masih diperlukan penambahan tempat tidur rumah sakit sebanyak 2.709 tempat tidur dan 12 rumah sakit sampai tahun 2045 (123 tempat tidur dan 1 rumah sakit pertahun). Jumlah Puskesmas di Riau tahun 2023 adalah 239 buah. Standar WHO untuk Puskesmas adalah 1: 30.000. Jumlah Puskesmas di Riau saat ini memang berlebih 18 buah, tetapi penyebarannya harus lebih baik, terutama di daerah kabupaten yang terpencil.

Jumlah Puskesmas Pembantu di Riau tahun 2023 adalah 879 buah. Dengan mengasumsikan kebutuhan Puskesmas Pembantu adalah 1:15.000 penduduk, maka jumlah Puskesmas Pembantu saat ini sudah cukup. Hal yang perlu ditingkatkan adalah kualitas pelayanannya dan penyebarannya supaya merata.

Tabel 2.131 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Provinsi/Kabupaten/Kota)

| Kode | Provinsi/ Kabupaten /Kota | Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan | | | | |
|------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 14 | Riau | Jumlah Penduduk | 6.642.874 | 6.811.158 | 7.199.743 | 545.263 | 7.850.626 | 8.110.994 |
| | | Total Tempat Tidur | 5.402 | 6.811 | 7.200 | 7.545 | 7.851 | 8.111 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur RS | 69 | 69 | 72 | 76 | 79 | 81 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Puskesmas | 239 | 227 | 240 | 252 | 262 | 270 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Pustu | 879 | 454 | 480 | 503 | 523 | 541 |
| 1406 | Kampar | Jumlah Penduduk | 881.028 | 908.385 | 972.377 | 1.030.090 | 1.082.993 | 1.131.853 |
| | | Total Tempat Tidur | 225 | 908 | 972 | 1.030 | 1.083 | 1.132 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur RS | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Puskesmas | 31 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Pustu | 177 | 61 | 65 | 69 | 72 | 75 |
| 1402 | Indragiri Hulu | Jumlah Penduduk | 462.220 | 474.398 | 503.202 | 529.873 | 554.201 | 575.162 |
| | | Total Tempat Tidur | 211 | 474 | 503 | 530 | 554 | 575 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur RS | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Puskesmas | 20 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Pustu | 20 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 |

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045

| Kode | Provinsi/ Kabupaten /Kota | Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan | | | | |
|------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 1408 | Bengkalis | Jumlah Penduduk | 584.916 | 598.331 | 626.418 | 648.637 | 667.493 | 684.003 |
| | | Total Tempat Tidur | 480 | 598 | 626 | 649 | 667 | 684 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur RS | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Puskesmas | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Pustu | 60 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| 1403 | Indragiri Hilir | Jumlah Penduduk | 677.290 | 692.189 | 725.841 | 754.353 | 777.554 | 95.331 |
| | | Total Tempat Tidur | 248 | 692 | 726 | 754 | 778 | 795 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur RS | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Puskesmas | 29 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Pustu | 204 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 |
| 1404 | Pelalawan | Jumlah Penduduk | 408.543 | 421.237 | 451.596 | 480.979 | 509.682 | 536.219 |
| | | Total Tempat Tidur | 336 | 421 | 452 | 481 | 510 | 536 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur RS | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Puskesmas | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Pustu | 37 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 1407 | Rokan Hulu | Jumlah Penduduk | 585.183 | 601.632 | 641.046 | 677.452 | 709.022 | 734.281 |

| Kode | Provinsi/ Kabupaten /Kota | Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan | | | | |
|------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| | | Total Tempat Tidur | 292 | 602 | 641 | 677 | 709 | 734 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur RS | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Puskesmas | 23 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Pustu | 85 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| 1409 | Rokan Hilir | Jumlah Penduduk | 663.956 | 682.617 | 727.957 | 770.823 | 809.624 | 842.395 |
| | | Total Tempat Tidur | 273 | 683 | 728 | 771 | 810 | 842 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur RS | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Puskesmas | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Pustu | 83 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 |
| 1405 | Siak | Jumlah Penduduk | 477.064 | 490.376 | 522.308 | 552.026 | 578.918 | 601.871 |
| | | Total Tempat Tidur | 170 | 490 | 522 | 552 | 579 | 602 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur RS | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Puskesmas | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Pustu | 94 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1401 | Kuantan Singingi | Jumlah Penduduk | 345.610 | 352.777 | 369.051 | 382.840 | 394.073 | 402.822 |
| | | Total Tempat Tidur | 164 | 353 | 369 | 383 | 394 | 403 |

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045

| Kode | Provinsi/ Kabupaten /Kota | Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan | | | | |
|------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur RS | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Puskesmas | 25 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Pustu | 56 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 1410 | Kepulauan Meranti | Jumlah Penduduk | 211.791 | 215.586 | 224.089 | 230.864 | 236.123 | 240.292 |
| | | Total Tempat Tidur | 94 | 216 | 224 | 231 | 236 | 240 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur RS | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Puskesmas | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Pustu | 30 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 1471 | Pekanbaru | Jumlah Penduduk | 1.016.366 | 1.036.563 | 1.079.997 | 1.114.843 | 1.143.374 | 1.165.570 |
| | | Total Tempat Tidur | 2.624 | 1.037 | 1.080 | 1.115 | 1.143 | 1.166 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur RS | 26 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Puskesmas | 21 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Pustu | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 1473 | Dumai | Jumlah Penduduk | 328.907 | 337.067 | 355.861 | 372.483 | 387.569 | 401.195 |
| | | Total Tempat Tidur | 285 | 337 | 356 | 372 | 388 | 401 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur RS | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045

| Kode | Provinsi/ Kabupaten /Kota | Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan | | | | |
|------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|------|------|------|------|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Puskesmas | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| | | • Jumlah Tempat Tidur Pustu | 7 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |

Sumber: Data olahan

2.6.5.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2017 tentang standar pendidikan anak usia dini (PAUD), menyatakan bahwa rasio guru untuk PAUD adalah 1 guru untuk 15 siswa PAUD. Sementara itu, Permendikbud 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar untuk SD/MI adalah 28 orang, untuk SMP/MTs sebesar 32 orang, dan untuk SMA/SMK/MA 36 orang. Untuk kenyamanan diambil jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar SD/MI sebesar 25 orang, untuk SMP/MTs sebesar 30 orang, serta untuk SMA/SMK/MA sebesar 35 orang.

PAUD yang terdiri dari Kelompok Bermain dan TK berada pada usia 4 sampai 6 tahun. Sedangkan SD/MI berada pada rentang usia 7 sampai 12 tahun, untuk SMP/MTs berada pada rentang usia 13 sampai 15 tahun, serta SMA/SMK/MA pada rentang usia 16 sampai 19 tahun. Jumlah peserta didik pada masing-masing tingkatan ini diproyeksikan berdasarkan kelompok umur dari data BPS yang ada (kolom 4). Jumlah rombongan belajar ideal (kolom 5) dengan hitungan jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar masing-masing tingkatan adalah 15, 25, 30, dan 35 didapat dengan membagi jumlah peserta didik (kolom 4) dengan jumlah maksimum peserta didik per rombongan

belajar. Jumlah sekolah eksisting (kolom 6) dan jumlah murid 2023 eksisting (kolom 7) dicantumkan sebagai baseline data. Jumlah rombel per sekolah (kolom 8) didapat dengan membagi (7) dengan (6) dan jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar. Selanjutnya, jumlah rombel per sekolah (asumsi) pada kolom (9) didapat dari pembulatan atau nilai pendekatan berdasarkan hasil dari kolom (8).

Jumlah peserta didik pada kolom (10) didapat dari proyeksi berdasarkan kelompok umur dari BPS. Jumlah rombel pada kolom (11) didapat dari membagi kolom (10) dengan jumlah maksimum peserta didik pada masing-masing tingkatan (15, 25, 30, dan 35). Jumlah sekolah yang dibutuhkan (kolom 12) didapat dari membagi rombel (kolom 11) dengan kolom (9). Begitulah seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya. Dari tabel proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan ini didapatkan bahwa dalam 20 tahun kedepan, untuk PAUD/TK masih dibutuhkan banyak sekali. Untuk pendidikan pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs secara rata-rata sudah memadai pada kabupaten/kota. Permasalahan terletak pada distribusi (pemerataan) pada daerah-daerah pelosok dan sekolah-sekolah swasta yang minim dana operasional sehingga murid-murid menumpuk pada sekolah negeri saja. Hanya saja kebutuhan prioritas pada SMP/MTs di Kabupaten Pelalawan cukup mendesak dengan kekurangan minimal 15 sekolah SMP/MTs saat ini.

Jumlah proyeksi kebutuhan SMA/SMK/MA pada masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.116 dan diringkaskan pada Tabel 2.117 dan Tabel 2.118. Terlihat bahwa Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan merupakan kabupaten yang prioritas untuk pembangunan SMA/SMK/MA. Kebutuhan untuk seluruh Provinsi Riau sampai tahun 2045 dibutuhkan sekitar 190 unit SMA/SMK/MA atau rata-rata 20 unit sekolah harus dibangun setiap tahun.

Tabel 2.132 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Provinsi/Kabupaten/Kota)

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/ Kota | Uraian | Kondisi Tahun 2023 | | | | Jumlah Rombel Per Sekolah | Jumlah Rombel Per Sekolah (Asumsi) | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan 2025 | | | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan 2030 | | | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan 2035 | | | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan 2040 | | | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan 2045 | | | | | |
|-------|---------------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--------|---------|--|--------|---------|--|--------|---------|--|--------|---------|--|--------|---------|----------------------------|--------|---------|
| | | | Jumlah Peserta Didik (Proyeksi) | Rombel (Proyeksi) | Jumlah Sekolah (Eksisting) | Jumlah Murid 2023 (Eksisting) | | | Jumlah Peserta Didik | Rombel | Sekolah | Jumlah Peserta Didik | Rombel | Sekolah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.01 | Kampar | Kelompok Bermain dan TK | 49.496 | 3.300 | 432 | 15.284 | 2,4 | 3 | 50.588 | 3.373 | 1.124 | 47.924 | 3.195 | 1.065 | 46.676 | 3.112 | 1.037 | 46.543 | 3.103 | 1.034 | 45.671 | 3.045 | 1.015 | | | |
| | | SD/MI | 93.762 | 3.750 | 563 | 107.187 | 7,6 | 8 | 98.268 | 3.931 | 491 | 100.440 | 4.018 | 502 | 95.694 | 3.828 | 478 | 103.609 | 4.144 | 518 | 106.215 | 4.249 | 531 | | | |
| | | SMP/MTs | 44.328 | 1.478 | 249 | 48.345 | 6,5 | 6 | 45.502 | 1.517 | 253 | 50.150 | 1.672 | 279 | 49.776 | 1.659 | 277 | 54.485 | 1.816 | 303 | 57.362 | 1.912 | 319 | | | |
| | | SMA/SMK/MA | 43.926 | 1.255 | 144 | 36.917 | 8,8 | 9 | 42.852 | 1.339 | 149 | 43.506 | 1.360 | 151 | 46.584 | 1.456 | 162 | 44.923 | 1.404 | 156 | 45.233 | 1.414 | 157 | | | |
| 14.02 | Indragiri Hulu | Kelompok Bermain dan TK | 24.970 | 1.665 | 208 | 6.566 | 2,1 | 3 | 24.434 | 1.629 | 543 | 23.920 | 1.595 | 532 | 23.922 | 1.595 | 532 | 22.934 | 1.529 | 510 | 22.361 | 1.491 | 497 | | | |
| | | SD/MI | 51.138 | 2.046 | 337 | 61.083 | 7,3 | 6 | 50.772 | 2.031 | 338 | 48.798 | 1.952 | 325 | 47.952 | 1.918 | 320 | 46.468 | 1.859 | 310 | 45.186 | 1.807 | 301 | | | |
| | | SMP/MTs | 25.354 | 845 | 112 | 27.213 | 8,1 | 9 | 25.664 | 855 | 95 | 25.230 | 841 | 93 | 24.338 | 811 | 90 | 24.649 | 822 | 91 | 24.450 | 815 | 91 | | | |
| | | SMA/SMK/MA | 23.520 | 672 | 70 | 20.750 | 9,6 | 10 | 24.330 | 695 | 70 | 24.762 | 707 | 71 | 26.010 | 743 | 74 | 27.222 | 778 | 78 | 28.343 | 810 | 81 | | | |
| 14.03 | Bengkalis | Kelompok Bermain dan TK | 33.422 | 2.228 | 239 | 8930 | 2,5 | 3 | 33.780 | 2.252 | 751 | 31.766 | 2.118 | 706 | 29.540 | 1.969 | 656 | 29.252 | 1.950 | 650 | 28.097 | 1.873 | 624 | | | |
| | | SD/MI | 62.100 | 2.484 | 386 | 79346 | 8,2 | 9 | 81.165 | 3.247 | 361 | 84.968 | 3.399 | 378 | 87.984 | 3.519 | 391 | 90.520 | 3.621 | 402 | 92.760 | 3.710 | 412 | | | |
| | | SMP/MTs | 28.136 | 938 | 162 | 35.124 | 7,2 | 7 | 35.929 | 1.198 | 171 | 37.613 | 1.254 | 179 | 38.948 | 1.298 | 185 | 40.071 | 1.336 | 191 | 41.062 | 1.369 | 196 | | | |
| | | SMA/SMK/MA | 26.184 | 748 | 108 | 31.340 | 6,9 | 7 | 32.059 | 891 | 127 | 33.561 | 932 | 133 | 34.752 | 965 | 138 | 35.754 | 993 | 142 | 36.638 | 1.018 | 145 | | | |
| 14.04 | Indragiri Hilir | Kelompok Bermain dan TK | 34.070 | 2.271 | 117 | 4.892 | 2,8 | 3 | 33.866 | 2.258 | 753 | 34.468 | 2.298 | 766 | 33.604 | 2.240 | 747 | 33.862 | 2.257 | 752 | 33.793 | 2.253 | 751 | | | |
| | | SD/MI | 68.784 | 2.751 | 710 | 84.521 | 4,8 | 6 | 67.620 | 2.705 | 451 | 67.902 | 2.716 | 453 | 68.334 | 2.733 | 456 | 67.109 | 2.684 | 447 | 66.651 | 2.666 | 444 | | | |
| | | SMP/MTs | 34.722 | 1.157 | 289 | 34.266 | 4 | 4 | 34.510 | 1.150 | 288 | 33.468 | 1.116 | 279 | 34.022 | 1.134 | 284 | 33.077 | 1.103 | 276 | 32.626 | 1.088 | 272 | | | |
| | | SMA/SMK/MA | 34.410 | 983 | 130 | 27.051 | 7,4 | 8 | 33.756 | 1.055 | 132 | 34.512 | 1.079 | 135 | 33.594 | 1.050 | 131 | 33.441 | 1.045 | 131 | 33.100 | 1.034 | 129 | | | |
| 14.05 | Pelalawan | Kelompok Bermain dan TK | 24.428 | 1.629 | 168 | 7.612 | 3 | 3 | 23.812 | 1.587 | 529 | 21.600 | 1.440 | 480 | 21.656 | 1.444 | 481 | 19.520 | 1.301 | 434 | 18.164 | 1.211 | 404 | | | |
| | | SD/MI | 49.500 | 1.980 | 236 | 56.265 | 9,5 | 9 | 49.854 | 1.994 | 222 | 46.692 | 1.868 | 208 | 43.224 | 1.729 | 192 | 42.404 | 1.696 | 188 | 40.437 | 1.617 | 180 | | | |
| | | SMP/MTs | 23.430 | 781 | 107 | 21.067 | 6,6 | 7 | 24.242 | 808 | 122 | 24.984 | 833 | 126 | 22.850 | 762 | 115 | 24.789 | 826 | 125 | 25.155 | 838 | 127 | | | |
| | | SMA/SMK/MA | 19.686 | 562 | 56 | 16.663 | 9,9 | 10 | 20.424 | 584 | 58 | 22.854 | 653 | 65 | 25.038 | 715 | 72 | 27.157 | 776 | 78 | 29.309 | 837 | 84 | | | |
| 14.06 | Rokan Hulu | Kelompok Bermain dan TK | 29.892 | 1.993 | 271 | 9.966 | 2,5 | 3 | 28.528 | 1.902 | 634 | 32.304 | 2.154 | 718 | 32.336 | 2.156 | 719 | 33.005 | 2.200 | 733 | 33.874 | 2.258 | 753 | | | |
| | | SD/MI | 64.710 | 2.588 | 397 | 76.302 | 7,7 | 6 | 60.360 | 2.414 | 402 | 58.788 | 2.352 | 392 | 64.446 | 2.578 | 430 | 57.321 | 2.293 | 382 | 55.462 | 2.218 | 370 | | | |
| | | SMP/MTs | 34.210 | 1.140 | 187 | 32.654 | 5,8 | 6 | 33.792 | 1.126 | 188 | 28.900 | 963 | 161 | 30.260 | 1.009 | 168 | 26.449 | 882 | 147 | 24.327 | 811 | 135 | | | |
| | | SMA/SMK/MA | 33.012 | 943 | 106 | 26.423 | 8,9 | 9 | 33.882 | 968 | 108 | 33.624 | 961 | 107 | 33.414 | 955 | 106 | 34.909 | 997 | 111 | 35.536 | 1.015 | 113 | | | |
| 14.07 | Rokan Hilir | Kelompok Bermain dan TK | 36.074 | 2.405 | 368 | 14.043 | 2,5 | 3 | 34.832 | 2.322 | 774 | 36.152 | 2.410 | 803 | 36.794 | 2.453 | 818 | 36.099 | 2.407 | 802 | 36.171 | 2.411 | 804 | | | |

| Kode | Provinsi/ Kabupaten/ Kota | Uraian | Kondisi Tahun 2023 | | | | Jumlah Rombel Per Sekolah | Jumlah Rombel Per Sekolah (Asumsi) | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan 2025 | | | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan 2030 | | | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan 2035 | | | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan 2040 | | | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan 2045 | | | | | |
|-------|---------------------------------|----------------------------|--|----------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--------|---------|--|--------|---------|--|--------|---------|--|--------|---------|--|--------|---------|----------------------------|--------|---------|
| | | | Jumlah Peserta Didik (Proyeksi) | Rombel (Proyeksi) | Jumlah Sekolah (Eksisting) | Jumlah Murid 2023 (Eksisting) | | | Jumlah Peserta Didik | Rombel | Sekolah | Jumlah Peserta Didik | Rombel | Sekolah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SD/MI | 75.768 | 3.031 | 455 | 87.659 | 7,7 | 7 | 72.786 | 2.911 | 416 | 70.212 | 2.808 | 401 | 72.522 | 2.901 | 414 | 66.964 | 2.679 | 383 | 64.701 | 2.588 | 370 | | | |
| | | SMP/MTs | 38.418 | 1.281 | 212 | 37.016 | 5,8 | 6 | 38.376 | 1.279 | 213 | 35.666 | 1.189 | 198 | 35.366 | 1.179 | 196 | 33.540 | 1.118 | 186 | 32.153 | 1.072 | 179 | | | |
| | | SMA/SMK/MA | 36.834 | 1.052 | 127 | 32.778 | 8,3 | 8 | 37.596 | 1.044 | 131 | 37.884 | 1.052 | 132 | 38.238 | 1.062 | 133 | 39.662 | 1.102 | 138 | 40.545 | 1.126 | 141 | | | |
| 14.08 | Siak | Kelompok Bermain dan TK | 26.418 | 1.761 | 233 | 8.485 | 2,4 | 3 | 25.984 | 1.732 | 577 | 25.304 | 1.687 | 562 | 25.544 | 1.703 | 568 | 24.587 | 1.639 | 546 | 24.100 | 1.607 | 536 | | | |
| | | SD/MI | 53.460 | 2.138 | 277 | 62079 | 9 | 9 | 53.172 | 2.127 | 236 | 51.504 | 2.060 | 229 | 50.580 | 2.023 | 225 | 49.307 | 1.972 | 219 | 48.176 | 1.927 | 214 | | | |
| | | SMP/MTs | 26.434 | 881 | 158 | 27.791 | 5,9 | 6 | 26.554 | 885 | 148 | 26.428 | 881 | 147 | 25.496 | 850 | 142 | 25.651 | 855 | 143 | 25.395 | 847 | 141 | | | |
| | | SMA/SMK/MA | 26.046 | 744 | 93 | 23.949 | 8 | 8 | 26.526 | 758 | 95 | 25.902 | 740 | 93 | 26.604 | 760 | 95 | 26.881 | 768 | 96 | 27.213 | 778 | 97 | | | |
| 14.09 | Kuantan Singingi | Kelompok Bermain dan TK | 17.792 | 1.186 | 235 | 6.637 | 1,9 | 3 | 17.750 | 1.183 | 394 | 17.656 | 1.177 | 392 | 17.194 | 1.146 | 382 | 17.140 | 1.143 | 381 | 16.939 | 1.129 | 376 | | | |
| | | SD/MI | 35.190 | 1.408 | 283 | 41.154 | 5,8 | 6 | 35.262 | 1.259 | 210 | 35.208 | 1.408 | 235 | 34.824 | 1.393 | 232 | 34.942 | 1.398 | 233 | 34.852 | 1.394 | 232 | | | |
| | | SMP/MTs | 17.488 | 583 | 108 | 17.788 | 5,5 | 6 | 17.484 | 546 | 91 | 17.450 | 582 | 97 | 17.472 | 582 | 97 | 17.466 | 582 | 97 | 17.458 | 582 | 97 | | | |
| | | SMA/SMK/MA | 17.640 | 504 | 49 | 15.397 | 10,1 | 10 | 17.628 | 504 | 50 | 16.974 | 485 | 48 | 17.202 | 491 | 49 | 16.773 | 479 | 48 | 16.554 | 473 | 47 | | | |
| 14.10 | Kepulau n Meranti | Kelompok Bermain dan TK | 10.762 | 717 | 93 | 2.959 | 2,1 | 3 | 11.012 | 734 | 245 | 10.314 | 688 | 229 | 10.036 | 669 | 223 | 9.958 | 664 | 221 | 9.716 | 648 | 216 | | | |
| | | SD/MI | 20.160 | 806 | 184 | 21.830 | 4,7 | 5 | 21.252 | 850 | 170 | 21.534 | 861 | 172 | 20.394 | 816 | 163 | 22.038 | 882 | 176 | 22.501 | 900 | 180 | | | |
| | | SMP/MTs | 9.828 | 328 | 88 | 9.590 | 3,6 | 3 | 9.824 | 327 | 109 | 10.774 | 359 | 120 | 10.558 | 352 | 117 | 11.157 | 372 | 124 | 11.509 | 384 | 128 | | | |
| | | SMA/SMK/MA | 11.364 | 325 | 52 | 7.905 | 6,3 | 6 | 11.274 | 322 | 54 | 9.444 | 270 | 45 | 9.852 | 281 | 47 | 8.523 | 244 | 41 | 7.781 | 222 | 37 | | | |
| 14.11 | Pekanbar u | Kelompok Bermain dan TK | 55.448 | 3.697 | 399 | 14.523 | 2,4 | 3 | 55.522 | 3.701 | 1.234 | 48.912 | 3.261 | 1.087 | 46.593 | 3.106 | 1.035 | 45.670 | 3.045 | 1.015 | 46.239 | 3.083 | 1.028 | | | |
| | | SD/MI | 102.619 | 4.105 | 354 | 121.659 | 13,7 | 12 | 124.080 | 4.431 | 369 | 129.251 | 5.170 | 431 | 133.440 | 5.338 | 445 | 136.878 | 5.475 | 456 | 139.986 | 5.599 | 467 | | | |
| | | SMP/MTs | 48.357 | 1.612 | 202 | 56.475 | 9,3 | 9 | 57.599 | 1.800 | 200 | 59.999 | 2.000 | 222 | 61.944 | 2.065 | 229 | 63.540 | 2.118 | 235 | 64.982 | 2.166 | 241 | | | |
| | | SMA/SMK/MA | 50.993 | 1.457 | 147 | 61.559 | 10 | 10 | 62.784 | 1.744 | 174 | 65.401 | 1.817 | 182 | 67.520 | 1.876 | 188 | 69.260 | 1.924 | 192 | 70.832 | 1.968 | 197 | | | |
| 14.12 | Dumais | Kelompok Bermain dan TK | 19.144 | 1.276 | 112 | 4.450 | 2,6 | 3 | 19.162 | 1.277 | 426 | 16.368 | 1.091 | 364 | 16.052 | 1.070 | 357 | 14.422 | 961 | 320 | 13.105 | 874 | 291 | | | |
| | | SD/MI | 36.852 | 1.474 | 115 | 39.245 | 13,7 | 12 | 38.514 | 1.376 | 115 | 36.894 | 1.476 | 123 | 32.520 | 1.301 | 108 | 34.283 | 1.371 | 114 | 33.489 | 1.340 | 112 | | | |
| | | SMP/MTs | 17.020 | 567 | 57 | 16.304 | 9,5 | 10 | 17.538 | 548 | 55 | 19.574 | 652 | 65 | 17.704 | 590 | 59 | 19.935 | 664 | 66 | 20.699 | 690 | 69 | | | |
| | | SMA/SMK/MA | 16.344 | 467 | 42 | 15.345 | 11,1 | 11 | 16.182 | 462 | 42 | 16.374 | 468 | 43 | 17.712 | 506 | 46 | 17.319 | 495 | 45 | 17.626 | 504 | 46 | | | |

Sumber : Data olahan

Tabel 2.133 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (SMA/SMK/MA) (Provinsi/Kabupaten/Kota)

| Kode | Kabupaten/Kota | Existing 2023 | Proyeksi Kebutuhan SMA/SMK/MA | | | | |
|-----------|------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 14 | Riau | 1.124 | 1.189 | 1.204 | 1.240 | 1.254 | 1.274 |
| 14.01 | Kab. Kampar | 144 | 149 | 151 | 162 | 156 | 157 |
| 14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 70 | 70 | 71 | 74 | 78 | 81 |
| 14.03 | Kab. Bengkalis | 108 | 127 | 133 | 138 | 142 | 145 |
| 14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 130 | 132 | 135 | 131 | 131 | 129 |
| 14.05 | Kab. Pelalawan | 56 | 58 | 65 | 72 | 78 | 84 |
| 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 106 | 108 | 107 | 106 | 111 | 113 |
| 14.07 | Kab. Rokan Hilir | 127 | 131 | 132 | 133 | 138 | 141 |
| 14.08 | Kab. Siak | 93 | 95 | 93 | 95 | 96 | 97 |
| 14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 49 | 50 | 48 | 49 | 48 | 47 |
| 14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 52 | 54 | 45 | 47 | 41 | 37 |
| 14.11 | Kota Pekanbaru | 147 | 174 | 182 | 188 | 192 | 197 |
| 14.12 | Kota Dumai | 42 | 42 | 43 | 46 | 45 | 46 |

Sumber : Data olahan

**Tabel 2.134 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan
(Proyeksi Tambahan SMA/SMK/MA)**

| Kode | Kabupaten/Kota | Proyeksi Kebutuhan Tambahan SMA/SMK/MA | | | | |
|-----------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 14 | Riau | 34 | 41 | 39 | 37 | 190 |
| 1406 | Kampar | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 1402 | Indragiri Hulu | - | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 1408 | Bengkalis | 7 | 7 | 8 | 8 | 37 |
| 1403 | Indragiri Hilir | 2 | 3 | - | - | 5 |
| 1404 | Pelalawan | 3 | 7 | 6 | 6 | 28 |
| 1407 | Rokan Hulu | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 1409 | Rokan Hilir | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 1405 | Siak | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 1401 | Kuantan Singingi | 1 | - | - | - | 2 |
| 1410 | Kepulauan Meranti | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 1471 | Pekanbaru | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 1473 | Dumai | 1 | 1 | 1 | - | 4 |

Sumber : Data olahan

Ket. Rendah Sedang Tinggi

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Wilayah Sumatera berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 22 persen pada tahun 2023. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, pada tahun 2045 Sumatera berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional menjadi 25,9 hingga 27,3 persen apabila rata - rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar 5,6-6,4 persen per tahun.

Peluang kontribusi ekonomi Wilayah Sumatera bersumber dari letak geografis yang dilalui oleh jalur sutra (silk road) dan wilayah ALKI I serta SLOC (Sea Line of Communication) sebagai jalur perdagangan internasional yang menghubungkan antara wilayah timur dan barat dunia. Terdapat beberapa kawasan strategis yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pengungkit ekonomi baru, seperti kawasan strategis industri, pertanian agroindustri, pariwisata, perkotaan dan kawasan konservasi strategis. Termasuk, optimalisasi beberapa kawasan pengungkit ekonomi yang sudah ada, seperti Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Wilayah Metropolitan (WM), dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Salah satu tujuan utama dari pembangunan wilayah pertumbuhan ini adalah mendorong upaya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan.

Untuk mendukung ini, *backward* dan *forward linkage* serta konektivitas untuk efisiensi biaya produksi perlu terus ditingkatkan. Pusat - pusat pertumbuhan harus lebih diintegrasikan dengan simpul - simpul transportasi melalui upaya peningkatan jaringan infrastruktur jalan dan pelabuhan di sekitarnya, serta kereta api terutama untuk angkutan barang. Sementara itu, pada beberapa wilayah di Sumatera telah diterapkan rintisan *smart city*, *creative financing* dan pusat - pusat pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis digital yang menjadi cikal bakal pendorong inovasi dan teknologi dalam optimasi industri dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Wilayah Sumatera diarahkan menjadi "**Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, serta Hub Ekonomi Biru di Kawasan Barat Indonesia**". Tema pembangunan Provinsi Riau "Gerbang Integrasi ekonomi Indonesia dan ASEAN serta Penumpu Ketahanan BioIndustri Sumatera".

Oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan ke dalam 6 (enam) prioritas, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan, serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi/3T;
2. Pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan strategis yang sudah terbangun, seperti pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan; pengembangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan dan pertanian herbal, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian; pengembangan kawasan strategis pariwisata yang dilengkapi atraksi yang unik, serta amenitas, aksesibilitas, dan *ancillary* yang baik dan biru pengembangan ekonomi terutama perikanan baik tangkap maupun budidaya, termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi *blue energy*;
3. Penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkuler, dan berkelanjutan, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan-kawasan lindung dan geopark, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan;
4. Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti penglambangan multi-infrastruktur *backbone* dan *feeder*, serta maritime *backbone*, yang menciptakan interkoneksi antarkawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar.
5. Meningkatkan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT; dan
6. Penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan, perdesaan, dan wilayah sepanjang pantai barat Sumatera.

Kebijakan Utama Pengembangan Wilayah Riau tahun 2025-2029 yaitu:

- Kawasan Perkotaan sebagai *growth pole* dan pusat pengembangan industri berbasis keunggulan wilayah: Kota Pekanbaru dan Kota Dumai

- Kawasan Strategis Industri: Kota Medan-Kota Dumai-Kota Pekanbaru (klaster industri hilirisasi bioproduct, industri hilirisasi sumber daya mineral, industri mesin, dan industri pengolahan minyak dan gas bumi)
- Kawasan Afirmasi Wilayah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan (3TP) prioritas: Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hilir (Pulau Jemur, Kecamatan Pasir Limau Kapas).
- *Multiinfrastructure Corridor & Key Logistics Infrastructure*
- Jalan tol Kisaran-Dumai
- Jalan tol Pekanbaru-Padang
- Jalan tol Pekanbaru-Jambi
- Jalan arteri lingkaran barat Kota Dumai
- Peningkatan kualitas jalan pada Kawasan Afirmasi Kep. Meranti
- BRT Kawasan Perkotaan Pekanbaru
- Optimalisasi, integrasi, dan peningkatan layanan sistem transportasi publik di Kawasan Perkotaan Pekanbaru dan Kawasan Perkotaan Dumai
- Jaringan kereta api logistik Rantauprapat-Kotapinang-Dumai-Pekanbaru
- Peningkatan Pelabuhan Dumai
- Peningkatan Pelabuhan Selatpanjang
- Peningkatan pelabuhan-pelabuhan intrakawasan antarpulau di Kawasan Afirmasi Kep. Meranti
- Optimalisasi Bandara SSK II
- Peningkatan Bandara Pinang Kampai (Dumai)
- Pembangunan baru Bandara Selatpanjang (Kep. Meranti)
Pra-FS/FS/DED Direct Interconnection Dumai-Rupat-Malaka

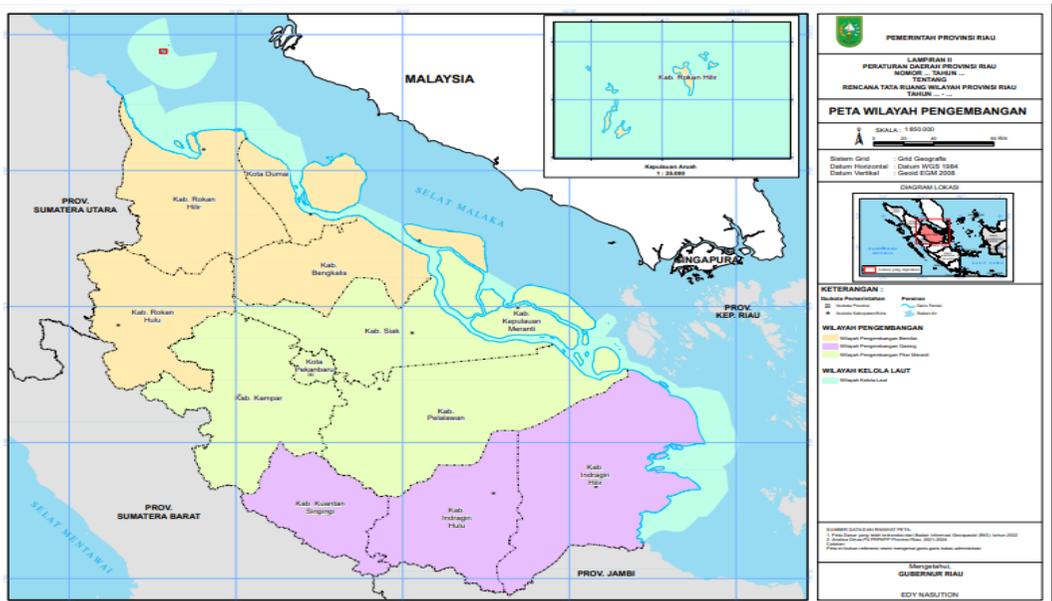
2.7.1 Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Provinsi Riau

2.7.1.1 Konsep Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Revisi RTRW Provinsi Riau 2023-2043 Konsep pengembangan wilayah RTRW Provinsi Riau dilakukan dengan pendekatan cluster wilayah promosi pusat pertumbuhan untuk pemerataan pembangunan melalui pengembangan ekonomi lokal dan inovasi wilayah yang didukung oleh infrastruktur wilayah terintegrasi berbasis wilayah sungai yang memperhatikan hubungan kawasan hulu – tengah – hilir (berorientasi hubungan daratan, pesisir dan laut) di Provinsi Riau.

Pendekatan cluster atau Wilayah Pengembangan (WP) ini bertujuan untuk mengintegrasikan potensi ekonomi wilayah ke dalam potensi urban region sehingga tercipta kawasan perkotaan yang terintegrasi antar wilayah sesuai dengan potensi ekonomi lokal dan daya dukung lingkungan. Dengan konsep pengembangan wilayah ini, maka wilayah Provinsi Riau dibagi menjadi 3 (tiga) WP, yaitu:

1. **WP Pilar Meranti**, sebagai pengembangan Kawasan perkotaan berbasis perdagangan/jasa, agrobisnis dan agroindustri meliputi Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. **WP Bernilai**, sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis sumber daya alam minyak/gas bumi dan Kawasan industri terpadu meliputi Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai; dan
3. **WP Gasing**, sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis sumber daya alam perkebunan dan agroindustri, meliputi Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi.



Gambar 2.48 Peta Wilayah Pengembangan Provinsi Riau

Sumber: RTRW Provinsi Riau

Pengembangan wilayah Provinsi Riau tersebut secara spesifik terdiri dari 4 pengembangan wilayah terintegrasi, yaitu (1) Pendekatan Berbasis Kawasan

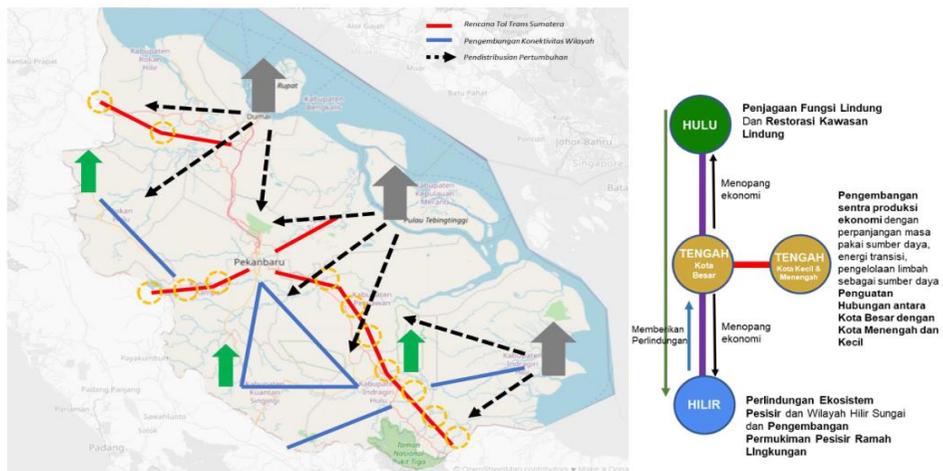
Metropolitan, (2) Pendekatan Berbasis Pesisir, (3) Pendekatan Berbasis Kepulauan, dan (4) Pendekatan Berbasis wilayah pendukung. Konsep pengembangan wilayah tersebut didukung dengan pelayanan infrastruktur wilayah terintegrasi dengan 3 tahapan utama pengembangan wilayah. Pada tahapan pertama, pengembangan wilayah Provinsi Riau dapat difokuskan pada pengembangan industri-industri besar berbasis sektor pertanian berkelanjutan yang berada pada kawasan pesisir dengan dukungan transportasi darat dan laut yang terintegrasi. Selanjutnya, pada tahapan kedua pengembangan kawasan pendukung industri besar yaitu pengembangan industri pengolahan sedang atau menengah hingga kecil yang merupakan kesatuan rantai pasok yang tidak terpisah dengan industri besar. Hal ini untuk mendorong perkembangan perekonomian berkelanjutan pada wilayah-wilayah pendukung yang berada wilayah pesisir timur hingga barat. Tahapan ketiga, merupakan pengembangan wilayah lanjutan yang juga masih berfokus pada pengembangan industri pengolahan berkelanjutan berskala sedang atau menengah hingga kecil dan mikro.

Pendekatan pengembangan wilayah disesuaikan dengan keberadaan empat wilayah Sungai besar di Provinsi Riau yaitu WS Rokan, WS Siak, WS Kampar, dan WS Indragiri. Konsep pengembangan dengan pendekatan wilayah sungai dibagi menjadi pengembangan wilayah hulu – tengah – hilir. Konsep pengembangan wilayah berbasis wilayah sungai dilakukan dengan arahan sebagai berikut :

1. **Wilayah Hulu:** pengembangan wilayah akan difokuskan kepada peningkatan fungsi perlindungan yang mempertimbangkan fungsi tata air serta meminimalisir terjadinya gangguan terhadap wilayah tengah dan hilir seperti penjagaan kualitas sungai akibat gangguan dari kegiatan antropologis dan juga erosi lahan. Wilayah hulu di keempat wilayah sungai besar di Provinsi Riau berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara maka dari itu dibutuhkan koordinasi dalam pengelolaan kawasan hulu. Kabupaten yang didefinisikan sebagai kawasan hulu meliputi Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Sebagian Kabupaten Indragiri Hilir.
2. **Wilayah Tengah:** pengembangan kawasan budidaya dan juga intensifikasi kegiatan dapat dilakukan di wilayah tengah menimbang tingkat ancaman dan gangguan tidak terlalu besar seperti pada wilayah hulu dan hilir. Pengembangan di wilayah tengah namun tetap perlu memperhatikan batasan

pengembangan, khususnya pada wilayah ekosistem gambut dan juga wilayah yang berbatasan dengan kawasan lindung.

3. **Wilayah Hilir:** wilayah hilir di Provinsi Riau memiliki posisi yang sangat strategis yaitu terletak di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan berada di segitiga pertumbuhan ekonomi tiga negara, namun di satu sisi kerusakan lingkungan dan juga potensi ancaman bahaya dapat mengganggu kegiatan di wilayah hilir atau pesisir Provinsi Riau. Pengembangan pada wilayah hilir difokuskan untuk konservasi wilayah pesisir untuk mengurangi kerusakan pada ekosistem pesisir yang dapat menyebabkan terjadinya abrasi dan juga penggenangan pesisir yang parah.

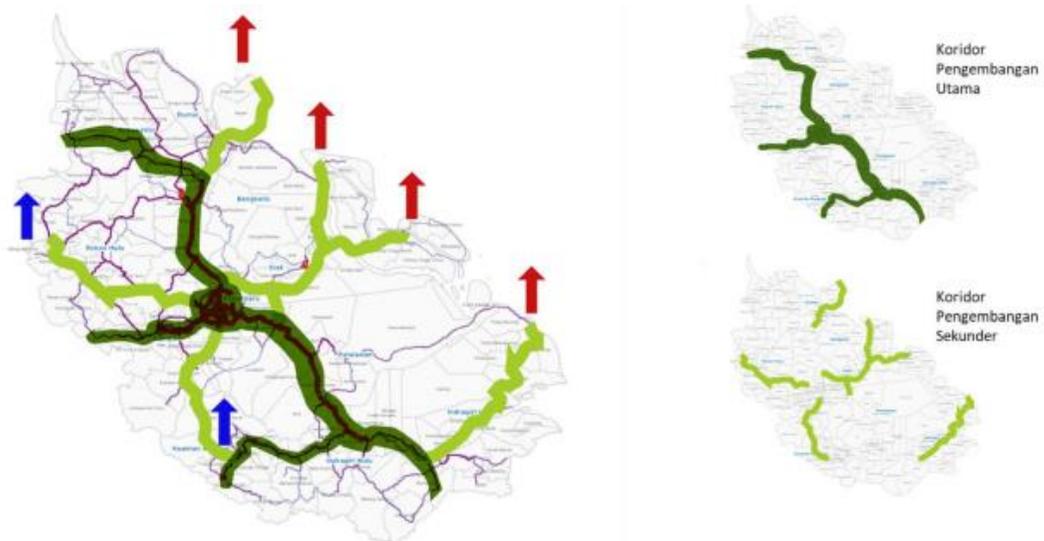


Gambar 2.49 Konsep Spasial Pengembangan Provinsi Berbasis Wilayah Sungai

Sumber: RTRW Provinsi Riau

Terkait dengan pengembangan transportasi di Provinsi Riau, konsep yang akan diusung adalah pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang saling terintegrasi sehingga mampu meningkatkan pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah secara spasial di mana tidak hanya terpusat di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai saja, namun juga di wilayah kepulauan dan wilayah-wilayah lainnya. Hal tersebut diharapkan mampu menstimulasi pembangunan infrastruktur dan peningkatan aktivitas sosial ekonomi di wilayah-wilayah pendukung.

Konsep spasial pengembangan transportasi terintegrasi ini berupa jaringan jalan bebas hambatan (jalan tol) berfungsi sebagai jaringan aksesibilitas primer yang akan membentang dari Kota Pekanbaru (sebagai pusat) menuju arah utara (Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir), arah timur (Kabupaten Siak), arah selatan (Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir), arah barat (Kabupaten Kampar), dan. Kemudian, jaringan jalan nasional akan menghubungkan gerbang tol-gerbang tol dengan wilayah-wilayah pendukung. Sementara, wilayah-wilayah kepulauan yang tersebar di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan, serta Kabupaten Indragiri Hilir akan dilayani oleh layanan angkutan penyeberangan serta pembangunan dan pengembangan jembatan. Selain itu, perencanaan integrasi moda antar simpul transportasi darat dan perairan perlu diterapkan agar pelayanan angkutan umum antar moda dapat berjalan secara optimal.



Gambar 2.50 Dukungan Transportasi Terintegrasi Wilayah Pengembangan Provinsi Riau

Sumber: RTRW Provinsi Riau

2.7.1.2 Pusat Pertumbuhan Wilayah di Provinsi Riau

Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Riau yakni Mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang Berkeadilan, Produktif, Nyaman, dan Berkelanjutan menuju Pusat Perekonomian Regional yang Berdaulat (Berbudaya, Dinamis, Inovatif, Hijau, Kolaborasi, dan Bersatu) di Kawasan Selat Malaka, adapun konsep kebijakan pengembangan Struktur Ruang wilayah Provinsi Riau sebagai berikut:

- 1) Peningkatan akses pelayanan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
- 2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air dan lainnya yang terpadu dan inovatif untuk mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Riau terutama dibentuk oleh jaringan prasarana transportasi, pusat-pusat permukiman yang berfungsi sebagai pusat pelayanan, dan fungsi primer. Pertimbangan utama bagi penetapan struktur ruang wilayah Provinsi Riau adalah pengembangan struktur ruang yang lebih bersifat horizontal dibandingkan berhirarki secara vertikal, serta perkuatan struktur mikro pada satuan ruang yang lebih efisien melalui pembangunan feeder-road dan fungsi transshipment point bagi sentra-sentra produksi.

Pengembangan hirarki fungsional yang lebih bersifat horizontal dimaksudkan sebagai upaya pengembangan ruang yang lebih terdesentralisasi pada keberadaan sumberdaya alam setempat serta terciptanya keseimbangan pertumbuhan yang proporsional (*balance growth*). Konsep ini mendorong terciptanya satuan ruang wilayah yang lebih efisien.

Tabel 2.135 Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Riau

| PKN | PKW | PKSN | PKL |
|------------------------------------|--|---|--|
| 1. Kota Pekanbaru 2. Kota Dumai | 1. Bangkinang 2. Rengat 3. Bengkalis 4. Tembilahan 5. Pangkalan Kerinci 6. Pasir Pangaraian 7. Bagan Siapiapi 8. Siak Sri Indrapura 9. Teluk Kuantan | 1. Kabupaten Bengkalis 2. Kota Dumai | 1. Tapung di Kabupaten Kampar 2. Lipat Kain di Kabupaten Kampar 3. Air Molek di Kabupaten Indragiri Hulu 4. Peranap di Kabupaten Indragiri Hulu 5. Pangkalan Kasai di Kabupaten Indragiri Hulu |

| PKN | PKW | PKSN | PKL |
|-----|--|------|---|
| | <p>Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) yang diusulkan menjadi PKW yaitu Selat Panjang.</p> | | <ol style="list-style-type: none"> 6. Sungai Pakning di Kabupaten Bengkalis 7. Duri di Kabupaten Bengkalis 8. Tanjung Medang di Kabupaten Bengkalis 9. Kuala Enok di Kabupaten Indragiri Hilir 10. Sungai Guntung di Kabupaten Indragiri Hilir 11. Kempas di Kabupaten Indragiri Hilir 12. Pulau Kijang di Kabupaten Indragiri Hilir 13. Gaung Anak Serka di Kabupaten Indragiri Hilir 14. Sorek di Kabupaten Pelalawan 15. Ukui di Kabupaten Pelalawan 16. Sokoi di Kabupaten Pelalawan 17. Ujung Batu di Kabupaten Rokan Hulu 18. Kepenuhan Tengah di Kabupaten Rokan Hulu 19. Tambusai Utara di Kabupaten Rokan Hulu 20. Ujung Tanjung di Kabupaten Rokan Hilir 21. Sinaboi di Kabupaten Rokan Hilir 22. Bagan Batu di Kabupaten Rokan Hilir 23. Panipahan di Kabupaten Rokan Hilir 24. Tanjung Buton di Kabupaten Siak 25. Perawang di Kabupaten Siak 26. Baserah di Kabupaten Kuantan Singingi 27. Lubuk Jambi di Kabupaten Kuantan Singingi 28. Tanjung Samak di Kabupaten Kepulauan Meranti 29. Merbau di Kabupaten Kepulauan Meranti. |

Sumber: RTRW Provinsi Riau



Gambar 2.51 Sebaran Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Riau

Sumber : RTRW Provinsi Riau

Sistem pusat permukiman yang telah dijelaskan diatas, terintegrasi dengan Pusat Pertumbuhan Kelautan, meliputi:

1. Gaung Anak Serka di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai destinasi pariwisata Pulau Cawan Indragiri Hilir;
2. Bagan Siapiapi di Kabupaten Rokan Hilir sebagai sentra kegiatan budi daya Bagan Siapiapi;
3. Kuala Enok di Kabupaten Rokan Hilir sebagai sentra kegiatan budi daya Tanah Merah;
4. Panipahan di Kabupaten Rokan Hilir sebagai sentra kegiatan budi daya Pasir Limau Kapas;
5. Sinaboi di Kabupaten Rokan Hilir sebagai sentra kegiatan budi daya Sinaboi;
6. Selat Panjang di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai sentra kegiatan budi daya Kakap Putih Meranti; dan
7. Kota Dumai sebagai sentra kegiatan budi daya Sungai Sembilan.

Sedangkan konsep kebijakan pengembangan Pola Ruang wilayah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ekonomi sirkular antarkegiatan dalam kerangka inovasi regional;
- 2) Perwujudan dan peningkatan keterkaitan serta keterpaduan antarkegiatan budi daya;
- 3) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 4) Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan
- 5) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pola ruang Provinsi Riau merupakan arahan bagi penggunaan ruang di wilayah Provinsi Riau yang didasari prinsip pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar bagian wilayah Provinsi Riau yang lebih berimbang secara proporsional, tanpa mengganggu kelestarian lingkungannya.

Kawasan budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi adalah kawasan budidaya yang dipandang sangat penting bagi upaya pencapaian pembangunan provinsi dan/atau menurut peraturan perundang-undangan dimana perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Kawasan Budidaya Ruang di wilayah Provinsi Riau diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.136 Kawasan Budidaya di Wilayah Provinsi Riau

| No. | Kawasan Peruntukan | Lokasi (Kab/Kota) | Luas (Ha) | Keterangan |
|-----|------------------------|--|--|--|
| 1 | Kawasan Hutan Produksi | 1. Bengkalis 2. Indragiri Hilir 3. Indragiri Hulu 4. Kampar 5. Kepulauan Meranti 6. Kuantan Singingi 7. Pelalawan 8. Rokan Hilir 9. Rokan Hulu 10. Siak 11. Dumai 12. Pekanbaru | 520.465 653.569 355.255 386.811 251.894 228.543 738.085 533.760 321.187 345.286 151.502 3.361 | Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau seluas kurang lebih 1.148.515 hektar. |

| No. | Kawasan Peruntukan | Lokasi (Kab/Kota) | Luas (Ha) | Keterangan |
|-----|---------------------------------|---|---|--|
| 2 | Kawasan Pertanian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bengkalis 2. Indragiri Hilir 3. Indragiri Hulu 4. Kampar 5. Kepulauan Meranti 6. Kuantan Singingi 7. Pelalawan 8. Rokan Hilir 9. Rokan Hulu 10. Siak 11. Dumai 12. Pekanbaru | <p>180.431 493.315 214.879 391.348 72.180 189.756 340.303 305.322 336.757 279.098 12.733 10.323</p> | Kawasan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Kawasan pertanian tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau seluas kurang lebih 2.832.506,23 hektar. Kawasan pertanian di Provinsi Riau, meliputi Kawasan tanaman pangan, Kawasan perkebunan, dan Kawasan hortikultura. |
| 3 | Kawasan Perikanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bengkalis 2. Indragiri Hilir 3. Rokan Hilir 4. Rokan Hulu 5. Dumai 6. Perairan Pesisir | <p>1.824 378 42 30 973 1.050.246</p> | Kawasan perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir. Kawasan Perikanan di Provinsi Riau tersebar pada 6 (enam) kabupaten/kota dan wilayah perairan pesisir. Adapun di wilayah darat, tersebar di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai. Berdasarkan analisis yang dilakukan, rencana alokasi ruang kawasan perikanan seluas kurang lebih 1.053.494 hektar |
| 4 | Kawasan Pertambangan dan Energi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bengkalis 2. Indragiri Hilir 3. Indragiri Hulu 4. Kampar 5. Kepulauan Meranti 6. Kuantan Singingi 7. Pelalawan 8. Rokan Hilir 9. Rokan Hulu 10. Siak 11. Dumai 12. Perairan Pesisir | <p>13.339 81 12.082 3.718 299 3.603 342 1.417 27 24.015 523 17.346</p> | Kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik. Kawasan Pertambangan dan Energi di Provinsi Riau berdasarkan data RTRW Provinsi |

| No. | Kawasan Peruntukan | Lokasi (Kab/Kota) | Luas (Ha) | Keterangan |
|-----|--------------------|---|---|--|
| | | | | Riau Tahun 2018-2038, data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Aktif. Kawasan Pertambangan dan Energi tersebar pada 11 (lima) kabupaten/kota dan perairan pesisir. Berdasarkan analisis ruang kawasan Pertambangan dan Energi seluas kurang lebih 76.792 hektar. |
| 5 | Kawasan Industri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bengkalis 2. Indragiri Hilir 3. Kampar 4. Kepulauan Meranti 5. Pelalawan 6. Rokan Hulu 7. Dumai 8. Pekanbaru | <p>4.580</p> <p>2.361</p> <p>1.848</p> <p>2.448</p> <p>7.050</p> <p>419</p> <p>7.699</p> <p>8.022</p> <p>350</p> | Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan peruntukan industri meliputi industri kehutanan, industri makanan, industri kertas, industri pertanian, industri gas dan kondensat, industri pupuk, industri perikanan dan hasil laut, industri perkebunan, industri logam, industri migas dan batubara, industri galangan kapal, industri manufaktur, industri kimia dan farmasi, serta industri biodiesel yang tersebar di seluruh wilayah provinsi. |
| 6 | Kawasan Pariwisata | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bengkalis 2. Rokan Hilir 3. Pekanbaru 4. Perairan Pesisir | <p>5.350</p> <p>29</p> <p>607</p> <p>937</p> | Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. |
| 7 | Kawasan Permukiman | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bengkalis 2. Indragiri Hilir 3. Indragiri Hulu 4. Kampar 5. Kepulauan Meranti 6. Kuantan Singingi 7. Pelalawan 8. Rokan Hilir 9. Rokan Hulu 10. Siak 11. Dumai | <p>49.791</p> <p>18.159</p> <p>27.670</p> <p>76.937</p> <p>12.484</p> <p>22.036</p> <p>37.820</p> <p>30.351</p> <p>33.314</p> <p>44.303</p> <p>27.791</p> | Kawasan permukiman adalah kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Berdasarkan |

| No. | Kawasan Peruntukan | Lokasi (Kab/Kota) | Luas (Ha) | Keterangan |
|-----|---------------------------------|--|--|---|
| | | 12. Perairan Pesisir | 46.582 | analisis yang dilakukan, rencana alokasi ruang kawasan permukiman tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau seluas kurang lebih 427.912 hektar. |
| 8 | Kawasan Transportasi | 1. Bengkalis 2. Indragiri Hilir 3. Indragiri Hulu 4. Pelalawan 5. Rokan Hulu 6. Siak 7. Dumai 8. Pekanbaru 9. Perairan Pesisir | 14 249 62 185 161 1 670 243 11.800 | <p>Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.</p> <p>Kawasan transportasi terdiri dari wilayah darat dan perairanpesisir. Kawasan transportasi pada wilayah darat berupa kawasan bandar udara yang tersebar di 8 kabupaten/kota sedangkan kawasan transportasi pada wilayah perairan pesisir berupa kawasan pelabuhan.</p> |
| 9 | Kawasan Pertahanan dan Keamanan | 1. Pekanbaru | 624 | <p>Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya. Memedomani Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, bahwa data dan informasi izin pemanfaatan ruang eksisting, baik dari sektor kehutanan, kelautan, pertanahan, pertambangan dan</p> |

| No. | Kawasan Peruntukan | Lokasi (Kab/Kota) | Luas (Ha) | Keterangan |
|-----|--------------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | lain lain, terutama yang berskala besar (dengan asumsi di peta skala 1:250.000 tergambar sebesar 0,5 cm x 0,5 cm atau seluas minimal 156,25 hektar di lapangan) sehingga rencana alokasi ruang kawasan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih 624 hektar di Kota Pekanbaru. |

Sumber: RTRW Provinsi Riau

2.7.1.3 Kebijakan Perkotaan

Arah kebijakan pengembangan wilayah yang termuat dalam Revisi RTRW Provinsi Riau 2023-2043, selain terkait dengan Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang, juga memperhatikan arahan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah penataan ruangnya yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, ditetapkan Kawasan Strategis Provinsi yang terdiri dari:

1. Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

a. Kawasan Metropolitan PEKANSIKAWAN

Sebagai kawasan metropolitan, kabupaten/kota yang termasuk dalam kawasan Pekansikawan memiliki keterkaitan fungsional satu sama lain yang dihubungkan oleh prasarana wilayah yang terintegrasi. Wilayah yang termasuk dalam kawasan metropolitan ini adalah Kota Pekanbaru, serta sebagian Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Pelalawan yang berdekatan dengan Kota Pekanbaru. Pengembangan kawasan ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, percepatan pengembangan daerah perbatasan, serta pengelolaan potensi daerah dengan saling menguntungkan demi kepentingan masyarakat. Selain itu, keterhubungan antarwilayah dan keselarasan potensi ekonomi masing-masing wilayah di kawasan metropolitan ini sangat membantu dalam pengembangan ekonomi Provinsi Riau.

Kawasan metropolitan Pekansikawan ditetapkan sebagai kawasan strategis karena karakteristik berikut:

- Pusat kegiatan ekonomi wilayah

Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup masif, terutama pada sektor industri, serta perdagangan dan jasa. Perkembangan kedua sektor ini mendorong pertumbuhan kawasan perkotaan di wilayah sekitar Kota Pekanbaru, yaitu di sebagian Kabupaten Siak, Kampar, dan Pelalawan yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru. Pertumbuhan ini ditandai dengan berkembangnya kawasan permukiman, serta kawasan perdagangan dan jasa di kabupaten-kabupaten yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru.

- Wilayah dengan potensi ekonomi cepat tumbuh dan pengembangan produk unggulan.

Merupakan wilayah yang kontribusi besar bagi PDRB Provinsi Riau pada berbagai sektor. Kota Pekanbaru memiliki kontribusi tinggi pada sektor industri, serta perdagangan dan jasa. Kedua sektor ini merupakan sektor yang berperan penting bagi pertumbuhan Provinsi Riau. Aktivitas perdagangan dan jasa dapat ditemukan pada hampir sebagian besar wilayah Kota Pekanbaru. Sementara kegiatan industri dapat ditemukan pada Kawasan Industri Tenayan yang merupakan pusat pengolahan produk hilir komoditas unggulan Provinsi Riau, yaitu sawit.

Wilayah di sekitar Kota Pekanbaru, selain memiliki kegiatan ekonomi yang serupa, juga mendukung pengembangan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Pekansikawan. Hal ini ditandai dengan Kabupaten Siak yang memiliki kontribusi ekonomi tinggi pada sektor pertanian, perkebunan, dan industri, serta Kabupaten Kampar, dan Pelalawan yang memiliki kontribusi tinggi pada sektor pertanian dan perkebunan.

- Wilayah didukung sarana dan prasarana pendorong kegiatan ekonomi.

Kawasan metropolitan Pekansikawan terhubung oleh jaringan transportasi strategis, yaitu oleh Jalan Lintas Sumatera, Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang, Jalan Tol Ruas Rengpek, Jalan arteri ruas Pekanbaru-Bangkinang, ruas Jalan Pekanbaru-Pelalawan, ruas Jalan Pekanbaru-Siak, serta Bandara Sultan Syarif Kasim II.

Secara rinci, arah kebijakan untuk Kawasan Metropolitan Pekansikawan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.137 Arahan Kebijakan Kawasan Metropolitan Pekansikawan

| | |
|--------------------------------|---|
| Nilai strategis kawasan | Kawasan Metropolitan Pekansikawan memiliki nilai strategis berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan pusat kegiatan ekonomi wilayah, khususnya pusat kegiatan perdagangan dan jasa. • Wilayah dengan potensi ekonomi cepat tumbuh. • Terdapat pusat pengembangan produk unggulan (Kawasan Industri Tenayan (industri hilir sawit)). • Wilayah didukung sarana dan prasarana pendorong kegiatan ekonomi (jalan lintas Sumatera, tol). |
| Delineasi | Delineasi Kawasan Metropolitan Pekansikawan terdiri dari Kota Pekanbaru dan kawasan di sekitarnya yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Siak bagian barat daya. • Kabupaten Pelalawan bagian barat laut. • Kabupaten Kampar bagian timur. |
| Tujuan pengembangan | Tujuan penetapan Kawasan Metropolitan Pekansikawan sebagai kawasan strategis adalah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Riau bagian tengah (WP Pekansikawan) yang berbasis industri dan jasa. |
| Arahan pengembangan | Arahan pengembangan Kawasan Metropolitan Pekansikawan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri hijau pada skala kecil-besar • Pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa • Pengembangan dan pemberdayaan industri lokal • Peningkatan kapasitas kewirausahaan dan inovasi pada pelaku usaha lokal |

Sumber: RTRW Provinsi Riau

b. Kawasan Industri Selinsing

Kawasan Industri Selinsing direncanakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Riau bagian utara yang berbasis industri dan jasa. Kawasan ini strategis terutama untuk pengembangan kawasan industri hulu agro. Kawasan Industri Selinsing ditetapkan sebagai kawasan strategis karena memiliki kriteria:

- Wilayah dengan potensi ekonomi cepat tumbuh, pengembangan sektor unggulan, dan memiliki potensi ekspor.
Pengembangan industri hulu agro yang merupakan sektor prospektif hingga dua puluh tahun mendatang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, khususnya di wilayah Riau bagian utara. Selain itu,

bertumbuhnya kegiatan perdagangan dan jasa di kawasan ini juga diharapkan dapat menjadi outlet Provinsi Riau bagian utara.

- Terdapat pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi.

Berkaitan dengan hal ini, Kota Dumai ditetapkan dalam RIPIN 2015-2035 sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Dalam RPIP Riau 2018-2038, pusat pertumbuhan industri di Kota Dumai berada pada Kawasan Industri Pelintung, Kawasan Industri Lubuk Gaung, dan Kawasan Industri Pelindo.

- Terdapat pusat pengembangan produk unggulan (khususnya pada kawasan industri Dumai).
- Wilayah didukung sarana dan prasarana pendorong kegiatan ekonomi. Wilayah ini dilalui Jalan Lintas Sumatera, Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, serta Pelabuhan Dumai.

Secara rinci, arah kebijakan untuk Kawasan Industri Selinsing dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.138 Arah Kebijakan Kawasan Industri Selinsing

| | |
|--------------------------------|--|
| Nilai strategis kawasan | Kawasan Industri Selinsing memiliki nilai strategis berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Wilayah dengan potensi ekonomi cepat tumbuh, pengembangan sektor unggulan (industri hulu sawit, pertanian, pertambangan, dan perdagangan), dan potensi ekspor. • Terdapat pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi (termasuk WPPI (RIPIN, 2015)). • Terdapat pusat pengembangan produk unggulan (Kawasan Industri Dumai) • Wilayah didukung sarana dan prasarana pendorong kegiatan ekonomi (jalan lintas sumatera, tol Pekanbaru-Dumai, pelabuhan) |
| Delineasi | Delineasi Kawasan Industri Selinsing terdiri dari kawasan di sepanjang kawasan industri Kota Dumai, yang secara rinci delineasi kawasan ini meliputi Kota Dumai. |
| Tujuan pengembangan | Tujuan penetapan Kawasan Duri-Dumai sebagai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Riau bagian utara yang berbasis industri dan jasa. |

| | |
|----------------------------|--|
| Arahan pengembangan | <p>Arahan pengembangan Kawasan Duri-Dumai antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri hijau pada skala kecil-besar • Pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa • Pengembangan dan pemberdayaan industri lokal • Peningkatan kapasitas kewirausahaan dan inovasi pada pelaku usaha lokal |
|----------------------------|--|

Sumber: RTRW Provinsi Riau

c. Kawasan Bekanhulir

Kawasan Bekan Hulir direncanakan sebagai Kawasan strategis karena merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, pengembangan sektor unggulan (industri hulu migas dan hilir sawit, pertanian, pertambangan, dan perdagangan), yang saat ini di kawasan tersebut telah terbangun sejumlah industri hulu migas. Kawasan Bekan Hulir ditetapkan sebagai Kawasan strategis karena memiliki kriteria :

- Wilayah dengan potensi ekonomi cepat tumbuh, pengembangan sektor unggulan, dan memiliki potensi ekspor.
Sebagai kawasan yang tumbuh karena pertumbuhan kegiatan industri yang sangat masif, terutama pada sektor industri hulu migas dan hilir sawit, pertanian, pertambangan, dan perdagangan, aktivitas pada kawasan Bekan Hulir telah memberikan kontribusi tinggi pada perekonomian Provinsi Riau sejak dua puluh tahun terakhir. Sektor ini juga memiliki nilai ekspor yang tinggi hingga skala internasional.
- Terdapat pusat pengembangan produk unggulan (khususnya pada kawasan industri hulu migas Duri).
- Wilayah didukung sarana dan prasarana pendorong kegiatan ekonomi.
Wilayah ini dilalui Jalan Lintas Sumatera dan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai. Secara rinci, arah kebijakan untuk Kawasan Bekan Hulir dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.139 Arahan Kebijakan Kawasan Bekan Hulir

| | |
|--------------------------------|---|
| Nilai strategis kawasan | Kawasan Industri Bekan Hulir memiliki nilai strategis berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Wilayah dengan potensi ekonomi cepat tumbuh, pengembangan sektor unggulan (industri hulu migas dan hilir sawit, pertanian, pertambangan, dan perdagangan). • Terdapat pusat pengembangan produk unggulan (khususnya pada kawasan industri hulu migas Duri). • Wilayah didukung sarana dan prasarana pendorong kegiatan ekonomi (jalan lintas sumatera, tol Pekanbaru-Dumai) |
| Delineasi | Delineasi Kawasan Bekan Hulir terdiri dari kawasan di sepanjang kawasan industri hulu migas Kota Duri, yang secara rinci delineasi kawasan ini berada di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu |
| Tujuan pengembangan | Tujuan pengembangan Kawasan Bekanhulir adalah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Riau bagian utara dengan potensi ekonomi cepat tumbuh, pengembangan sektor unggulan industri hulu migas, industri hilir sawit, pertanian, pertambangan dan perdagangan |
| Arahan pengembangan | Arahan pengembangan Kawasan Bekan Hulir antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri hijau pada skala kecil-besar • Pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa • Pengembangan dan pemberdayaan industri lokal • Peningkatan kapasitas kewirausahaan dan inovasi pada pelaku usaha local dan perencanaan infrastruktur pendukung kegiatan industri, pertanian dan pertambangan |

Sumber: RTRW Provinsi Riau

d. Kawasan Japura-Pematang Reba

Kawasan Japura-Pematang Reba ditetapkan sebagai kawasan strategis adalah agar kawasan ini dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Riau bagian selatan. Kawasan ini merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh dan pengembangan sektor unggulan. Hal ini ditandai dengan tingginya potensi sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Nantinya, di kawasan ini dapat dikembangkan kawasan industri pengolahan, baik pada skala kecil maupun besar, untuk mengolah komoditas unggulan di wilayah sekitarnya, seperti sawit, kelapa, sagu, hingga tanaman biofarmaka. Secara spasial, lokasi kawasan Japura – Pematang Reba cukup strategis, yang ditandai dengan adanya rencana tol ruas Rengat – Jambi ruas Indragiri Hulu – Kuantan Singingi. Selain itu, kawasan ini dilalui oleh Jalan Lintas Sumatera dan terdapat Bandar Udara Japura – Rengat yang nantinya

dapat mendukung aktivitas Kawasan Japura - Pematang Reba sebagai *outlet* Riau bagian selatan.

Secara rinci, arah kebijakan untuk Kawasan Japura-Pematang Reba dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.140 Arah Kebijakan Kawasan Japura-Pematang Reba

| | |
|--------------------------------|--|
| Nilai strategis kawasan | Kawasan Japura-Pematang Reba memiliki nilai strategis berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Wilayah dengan potensi ekonomi cepat tumbuh dan pengembangan sektor unggulan (industri pengolahan dan pertanian). • Direncanakan untuk dikembangkan pusat pengembangan produk unggulan (Kawasan Industri). • Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah Riau bagian selatan. |
| Delineasi | Delineasi Kawasan Japura-Pematang Reba terdiri dari kawasan di sepanjang kawasan Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Indragiri Hulu. |
| Tujuan pengembangan | Tujuan penetapan Kawasan Japura-Pematang Reba sebagai kawasan strategis adalah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Riau bagian selatan (WP Indraku) yang berbasis industri dan jasa. |
| Arah pengembangan | Arah pengembangan Kawasan Japura-Pematang Reba antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri hijau pada skala kecil-besar • Pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa • Pengembangan dan pemberdayaan industri lokal • Peningkatan produktivitas komoditas unggulan pada wilayah sekitarnya (sawit, karet, kelapa, padi, dan biofarmaka) • Peningkatan kapasitas kewirausahaan dan inovasi pada pelaku usaha lokal • Perencanaan infrastruktur pendukung kegiatan industri dan jasa |

Sumber: RTRW Provinsi Riau

e. Kawasan Pariwisata Pulau Rupat

Pulau Rupat bagian utara memiliki berbagai potensi wisata alam, terutama karena keindahan pantainya. Pulau Rupat Utara merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis, Riau. Terletak di utara Pulau Rupat, Kecamatan Rupat Utara terdiri dari 5 desa yaitu Kadur, Tanjung Punak, Teluk Rhu, Titi Akar, dan ibu kota kecamatan Tanjung Medang. Berdasarkan data dari BPN Kabupaten Bengkalis, luas wilayah Kecamatan Rupat Utara adalah 628,50 Km dengan desa terluas yaitu Desa Titi Akar seluas 300,00 Km atau sebesar 47,73 persen dari luas Kecamatan Rupat Utara. Salah satu wisata

unggulan di Pulau Rupa bagian utara adalah Pantai Pesona Pulau Rupa Utara yang merupakan objek pengembangan wisata pantai di Kabupaten Bengkalis. Pantai ini termasuk salah satu dari lima daerah unggulan wisata dalam *Master Plan* Pariwisata Nasional untuk Provinsi Riau. Selain itu, di Pulau Rupa ada pantai yang cukup dikenal seperti Pantai Rhu di Desa Teluk Rhu, Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam, Pantai Lapin di Desa Tanjung Punak, Pantai Alohong, dan Pantai Makeruh.

Selain wisata alam, Dinas Pariwisata Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya menggelar kegiatan Festival tahunan Pulau Rupa. Festival pantai tersebut menampilkan berbagai macam perlombaan bernuansa bahari maupun kebudayaan, diantaranya lomba yang sering di adakan seperti parade pancung, lomba pancung, lomba mencari kepah, serta *windsurfing*. Di sekitar kawasan wisata juga telah didukung akomodasi bagi wisatawan berupa penginapan atau *homestay*. Untuk menuju Pulau Rupa, telah didukung pula aksesibilitas transportasi, yaitu dari Kota Pekanbaru melewati tol Pekanbaru-Dumai, kemudian menuju Pelabuhan Sri Tanjung. Wisatawan kemudian dapat menggunakan kapal Roro atau *speedboat* menuju Pulau Rupa.

Secara rinci, arah kebijakan untuk Kawasan Pariwisata Pulau Rupa dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.141 Arah Kebijakan Kawasan Pariwisata Pulau Rupa

| | |
|--------------------------------|---|
| Nilai strategis kawasan | Kawasan Pariwisata Pulau Rupa memiliki nilai strategis berupa kawasan yang memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi (pengembangan sektor wisata) |
| Delineasi | Delineasi Kawasan Pariwisata Pulau Rupa terletak di Kabupaten Bengkalis. |
| Tujuan pengembangan | Tujuan penetapan Kawasan Pariwisata Pulau Rupa sebagai kawasan strategis adalah untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat di sekitar objek wisata Pulau Rupa. |
| Arah pengembangan | Arah pengembangan Kawasan Pariwisata Pulau Rupa, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pariwisata Alam Pantai dan Pulau sebagai Daya Tarik Wisata Unggulan Skala Nasional dengan diversifikasi daya tarik wisata buatan, • Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan wisata. • Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, khususnya untuk meningkatkan amenities wisatawan. |

Sumber: RTRW Provinsi Riau

f. Kawasan Technopark Pelalawan

Kawasan *Technopark* Pelalawan terletak di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Kawasan ini memenuhi kriteria sebagai kawasan strategis, terutama untuk mendukung pengembangan industri hilir Provinsi Riau yang berbasis pengetahuan, inovasi, dan teknologi berkelanjutan. Sebagai kawasan teknopolitan, di kawasan ini terdapat kegiatan industri pengolahan yang terintegrasi dengan pengembangan pusat penelitian dan pendidikan. Pengembangan industri di kawasan ini diarahkan sebagai industri hilir komoditas unggulan Provinsi Riau, yaitu sawit. Sementara, kegiatan pusat penelitian dan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan inovasi, teknologi, serta kualitas sumber daya manusia pendukung kegiatan industri. Nantinya, pengembangan pengetahuan, inovasi, dan teknologi dapat berkembang, tidak hanya untuk kegiatan industri di dalam kawasan teknopolitan, melainkan dapat menjadi pusat penelitian pengembangan industri lainnya di Provinsi Riau. Secara spasial, lokasi kawasan *Technopark* Pelalawan didukung oleh Jalur Lintas Sumatera, yang menghubungkan wilayah-wilayah di Provinsi Riau, maupun di Pulau Sumatera.

Secara rinci, arah kebijakan untuk *Technopark* Pelalawan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.142 Arah Kebijakan Kawasan *Technopark* Pelalawan

| | |
|--------------------------------|--|
| Nilai strategis kawasan | Kawasan <i>Technopark</i> Pelalawan memiliki nilai strategis berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pengembangan sektor unggulan (industri hilir sawit). • Pusat pengembangan teknologi tinggi (industri berbasis inovasi, pengetahuan, dan teknologi). • Terdapat infrastruktur pendukung (jalur lintas Sumatera). |
| Delineasi | Delineasi Kawasan <i>Technopark</i> Pelalawan berada di Kabupaten Pelalawan |
| Tujuan pengembangan | Tujuan penetapan Kawasan <i>Technopark</i> Pelalawan sebagai kawasan strategis adalah sebagai pusat pengembangan pengetahuan, inovasi, dan teknologi, khususnya pada sektor industri pengolahan, yang kolaboratif untuk meningkatkan daya saing wilayah. |
| Arah pengembangan | Arah pengembangan Kawasan <i>Technopark</i> Pelalawan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal • Pengembangan pusat penelitian yang berperan sebagai pusat pengelolaan pengetahuan, inovasi, dan teknologi dalam mengembangkan produk unggulan wilayah. |

Sumber: RTRW Provinsi Riau

g. Kawasan Meno (Mendol – Bono)

Kawasan ini direncanakan untuk mengembangkan potensi ekonomi sektor wisata dan pertanian. Kawasan ini merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh dan pengembangan sektor unggulan. Hal ini ditandai dengan tingginya potensi sektor pertanian di Pulau Mendol dan Kawasan Pariwisata Bono terletak di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan di sepanjang Sungai Kampar.

Secara rinci, arah kebijakan untuk Kawasan Meno dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.143 Arah Kebijakan Kawasan Meno (Mendol – Bono)

| | |
|--------------------------------|--|
| Nilai strategis kawasan | Kawasan Meno (Mendol – Bono) memiliki nilai strategis berupa kawasan yang memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi (pengembangan sektor wisata dan pertanian) |
| Delineasi | Delineasi Kawasan Meno (Mendol – Bono) di Kabupaten Pelalawan. |
| Tujuan pengembangan | Tujuan penetapan Kawasan Meno (Mendol – Bono) sebagai kawasan strategis adalah untuk mengembangkan potensi ekonomi sektor wisata dan pertanian |
| Arahan pengembangan | Arahan pengembangan Kawasan Meno (Mendol – Bono), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pariwisata Minat Khusus, • Pengembangan kegiatan ekonomi kreatif bagi masyarakat lokal. • penguatan pertanian pangan berkelanjutan • Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa akomodasi di sekitar kawasan wisata • Pengembangan wisata buatan sebagai komplementer Wisata Ombak Bono. • Peningkatan kapasitas kewirausahaan dan inovasi pada pelaku usaha lokal. |

Sumber: RTRW Provinsi Riau

h. Kawasan Sekitar Kawasan Industri Tanjung Buton

Kawasan industri Tanjung Buton terletak di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan strategis karena merupakan pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi. Dalam RIPIN 2015-2035, Kabupaten Siak ditetapkan sebagai bagian dari Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Dalam RPIP Riau 2018-2038, pusat pertumbuhan industri di Kabupaten Siak dijelaskan berada di Kawasan

Industri Tanjung Buton. Aktivitas industri di Kawasan Industri Tanjung Buton meliputi kegiatan pengolahan komoditas unggulan Provinsi Riau (sawit) dan memiliki potensi ekspor hingga skala internasional yang didukung oleh adanya Pelabuhan Tanjung Buton. Selain itu, kawasan industri ini didukung oleh jaringan jalan arteri primer, yaitu Jalur Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan kawasan industri dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau dan Pulau Sumatera.

Dengan adanya aktivitas industri, wilayah di sekitar Kawasan Industri Tanjung Buton menerima efek berganda (*multiplier effect*) pada berbagai sektor, seperti meningkatnya daya serap tenaga kerja di wilayah sekitar kawasan industri hingga mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat lokal yang ditandai dengan mulai bertumbuhnya kawasan perdagangan dan jasa baru, serta kegiatan industri pengolahan pada skala kecil-menengah yang memanfaatkan limbah dari industri-industri besar di Kawasan Industri Tanjung Buton.

Secara rinci, arah kebijakan untuk Kawasan Sekitar Kawasan Industri Tanjung Buton dan sekitarnya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.144 Arah Kebijakan Kawasan Sekitar Kawasan Industri Tanjung Buton

| | |
|--------------------------------|--|
| Nilai strategis kawasan | Kawasan Sekitar Kawasan Industri Tanjung Buton memiliki nilai strategis berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi (termasuk WPPI (RIPIN)). • Kawasan pengembangan sektor unggulan (industri hilir sawit) dan memiliki potensi ekspor. • Terdapat infrastruktur pendukung (jalan arteri primer (lintas timur Sumatera), pelabuhan Tanjung Buton) |
| Delineasi | Delineasi Kawasan Sekitar Kawasan Industri Tanjung Buton berada di Kabupaten Siak |
| Tujuan pengembangan | Tujuan penetapan Kawasan Sekitar Kawasan Industri Tanjung Buton sebagai kawasan strategis adalah sebagai salah satu pusat pengembangan industri hilir di Provinsi Riau. |
| Arah pengembangan | Arah pengembangan Kawasan Sekitar Kawasan Industri Tanjung Buton antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri hijau pada skala kecil-besar • Pengembangan dan pemberdayaan industri lokal • Peningkatan kapasitas kewirausahaan dan inovasi pada pelaku usaha lokal |

Sumber: RTRW Provinsi Riau

i. Kawasan Medang Terang (Merbau, Padang, Tebing Tinggi, dan Rangsang)

Secara geografis Kawasan Medang Terang mempunyai keunggulan sebagai daerah lintas antara Riau Pesisir dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Negara Malaysia-Singapura. Sebagai daerah lintas, Kawasan Medang Terang merupakan daerah yang sejak dulu menjadi transit bagi masyarakat sekaligus menjadi titik awal pendistribusian barang. Kawasan perkotaan terbesar di Kawasan Medang Terang adalah Kota Selat Panjang. Selat Panjang merupakan pusat kota di Kecamatan Tebing Tinggi yang menjadi pusat transit pelayaran yang menghubungkan Kota Pekanbaru dengan Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kota Tanjung Balai Karimun di Kabupaten Karimun. Sejak tahun 2007, Selat Panjang memiliki jalur khusus pelayaran menuju Pelabuhan Batu Pahat di Malaysia dengan waktu tempuh selama 1,5-2 jam. Selat Panjang juga menjadi jalur transit dari berbagai kawasan di Provinsi Riau, seperti dari Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Siak, dan kawasan Duri.

Kawasan Medang Terang dengan berpusat di Selat Panjang direncanakan di masa depan sebagai outlet utama dari tiga pulau besar yang mengelilinginya yaitu Pulau Merbau, Rangsang dan Padang. Selain itu, Pelabuhan PT. Pelindo Selat Panjang juga menjadi bagian dari rencana trayek tol laut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi disparitas ekonomi di wilayah kepulauan. Rencana Trayek untuk Provinsi Riau masuk dalam Trayek T1 (Tanjung Priok – Air Putih Kabupaten Bengkalis) – Kepulauan Meranti (Kab. Kepulauan Meranti) – Belawan – Lhouksemauwe – Malahayati – Tanjung Priok.

Selain letak Kawasan Medang Terang yang sangat strategis, daerah ini mempunyai berbagai sumber daya alam baik hasil hutan, pertanian, perkebunan dan minyak/gas bumi. Salah satu sumberdaya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah produksi sagu dan hasil turunannya. Kawasan Medang Terang memiliki karakteristik yang sesuai dengan budidaya tanaman sagu. Secara bertahap, masyarakat dan pemerintah daerah telah berhasil mengembangkan budidaya tanaman sagu serta mendorong terbentuknya industri sagu dan turunannya. Potensi Kawasan Medang Terang lainnya adalah minyak dan gas yang terus dikelola oleh BUMN bekerjasama dengan perusahaan swasta lainnya.

Secara rinci, arah kebijakan untuk Kawasan Medang Terang (Merbau, Padang, Tebing Tinggi, dan Rangsang) dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.145 Arahan Kebijakan Kawasan Medang Terang (Merbau, Padang, Tebing Tinggi dan Rangsang)

| | |
|--------------------------------|--|
| Nilai strategis kawasan | Kawasan Medang Terang (Merbau, Padang, Tebing Tinggi, dan Rangsang) memiliki nilai strategis berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Wilayah pengembangan sektor unggulan (pertanian, perikanan, dan pariwisata) • Merupakan daerah lintas antara Riau Pesisir dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Negara Malaysia – Singapura. |
| Delineasi | Delineasi Kawasan Medang Terang (Merbau, Padang, Tebing Tinggi dan Rangsang) adalah wilayah se-Kabupaten Kepulauan Meranti |
| Tujuan pengembangan | Tujuan penetapan Kawasan Medang Terang (Merbau, Padang, Tebing Tinggi, dan Rangsang) sebagai kawasan strategis adalah untuk mempercepat pertumbuhan wilayah pesisir dan kepulauan di Provinsi Riau. |
| Arahan pengembangan | Arahan pengembangan Kawasan Medang Terang (Merbau, Padang, Tebing Tinggi, dan Rangsang), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan infrastruktur pendukung fungsi Kota Selat Panjang sebagai pusat transit. • Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di Kawasan Selat Panjang dan sekitarnya. • Peningkatan kapasitas kewirausahaan dan inovasi pada pelaku usaha lokal |

Sumber: RTRW Provinsi Riau

j. Kawasan Maritim Gaung Anak Serka

Kawasan Maritim Gaung Anak Serka terletak di Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan strategis karena memiliki potensi infrastruktur, pertanian, dan perikanan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038, Indragiri Hilir didorong untuk dapat ditetapkan sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Baru. Kabupaten Indragiri Hilir juga memiliki potensi industri perkapalan sebagai industri prioritas. Industri maritim merupakan industri yang berperan penting dalam peningkatan daya saing khususnya industri perkapalan nasional.

Aktivitas industri pada Kawasan Maritim Gaung Anak Serka dapat difokuskan kepada kegiatan pemanfaatan potensi kemaritiman, baik yang memiliki hubungan langsung (hasil perikanan laut dan budi daya perikanan) dan tidak langsung (pusat kegiatan pengumpulan, pengolahan dan lainnya). Aktivitas industri perkapalan dan sarana lepas pantai mulai dari penyediaan bahan baku, teknologi

produksi, reparasi/pemeliharaan, pemasaran baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor juga dapat dilakukan, yang dapat meningkatkan minat investasi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Secara rinci, arah kebijakan untuk Kawasan Maritim Gaung Anak Serka dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.146 Arah Kebijakan Kawasan Maritim Gaung Anak Serka

| | |
|--------------------------------|--|
| Nilai strategis kawasan | Kawasan Sekitar Maritim Gaung Anak Serka memiliki nilai strategis berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki potensi infrastruktur, pertanian, dan perikanan. • Memiliki potensi industri perkapalan. |
| Delineasi | Delineasi Kawasan Maritim Gaung Anak Serka berada di Kabupaten Indragiri Hilir |
| Tujuan pengembangan | Tujuan penetapan Kawasan Maritim Gaung Anak Serka sebagai kawasan strategis adalah sebagai salah satu pusat pengembangan industri perkapalan di Provinsi Riau. |
| Arahan pengembangan | Arahan pengembangan Kawasan Maritim Gaung Anak Serka antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan klaster industri pendukung. • Peningkatan jumlah dan kemampuan industri perkapalan/galangan kapal regional dalam pembangunan kapal. • Peningkatan produktivitas industri perkapalan/galangan kapal regional dengan semakin pendeknya <i>delivery time</i> maupun <i>docking days</i>. |

Sumber: RTRW Provinsi Riau

k. Kawasan Perindustrian Pangkalan Kerinci

Kawasan Perindustrian Pangkalan Kerinci terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Dalam RPIP Riau 2018-2038, Kabupaten Pelalawan memiliki potensi untuk industri pangan, industri tekstil dan aneka, industri transportasi, industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri, industri hulu agro, dan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam. Pada kawasan Perindustrian Pangkalan Kerinci terdapat operasional pabrik pulp dan kertas serta perkebunan Grup Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) utama yaitu PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP). Pabrik pulp dan kertas tersebut mampu memproduksi hingga 2,8 juta ton pulp dan 1,15 juta ton kertas per tahun. Kawasan industri ini didukung oleh Bandar Udara Khusus yaitu Bandara S.S.H. Setia Negara, jaringan jalan arteri primer, yaitu Jalur Lintas Timur Sumatera, selain itu terdapat pelabuhan TUKS PT.

RAPP Desa Sering di Kabupaten Pelalawan dan pelabuhan TUKS PT. RAPP Futong di Kabupaten Siak.

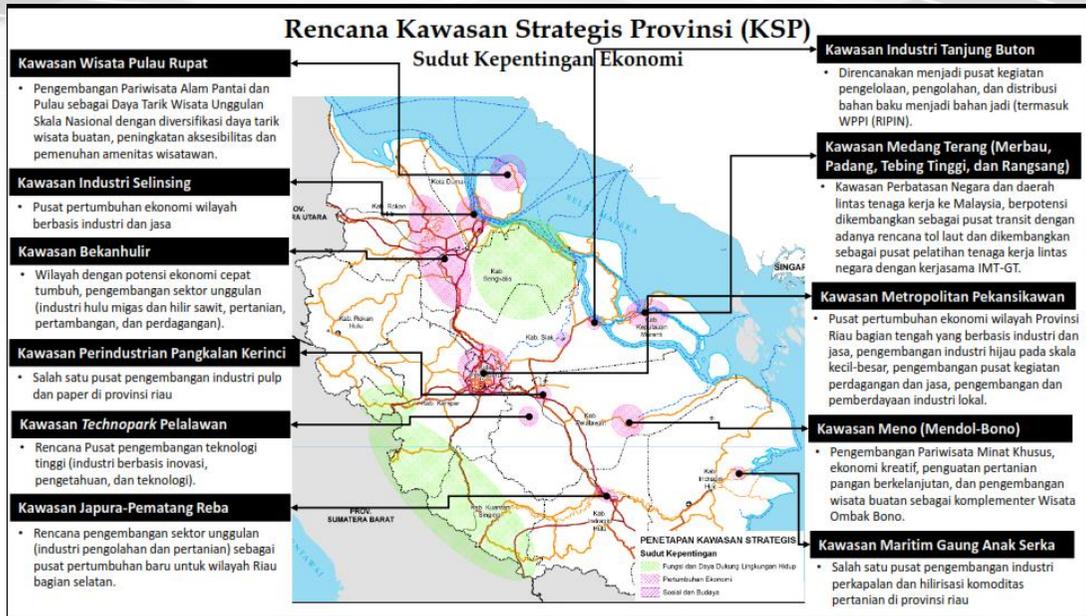
Dengan adanya aktivitas industri, wilayah di sekitar Kawasan Perindustrian Pangkalan Kerinci telah lama menerima efek berganda pada berbagai sektor, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan Pangkalan Kerinci serta menyediakan ribuan lapangan pekerjaan di berbagai bidang.

Secara rinci, arah kebijakan untuk Kawasan Sekitar Kawasan Industri Pelalawan dan sekitarnya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.147 Arah Kebijakan Kawasan Perindustrian Pangkalan Kerinci

| | |
|--------------------------------|--|
| Nilai strategis kawasan | Kawasan Perindustrian Pangkalan Kerinci memiliki nilai strategis berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Potensi untuk industri pangan, industri tekstil dan aneka, industri transportasi, industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri, industri hulu agro, dan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam (RPIP Riau). • Terdapat operasional pabrik pulp dan kertas serta perkebunan Grup Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) utama yaitu PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) • Terdapat infrastruktur pendukung (Bandar Udara Khusus (Bandara S.S.H. Setia Negara), jalan arteri primer (lintas timur Sumatera), pelabuhan TUKS PT. RAPP Desa Sering dan pelabuhan TUKS PT. RAPP Futong) |
| Delineasi | Delineasi Kawasan Perindustrian Pangkalan Kerinci berada di Kabupaten Pelalawan |
| Tujuan pengembangan | Tujuan penetapan Kawasan Perindustrian Pangkalan Kerinci sebagai kawasan strategis adalah sebagai salah satu pusat pengembangan industri pulp and paper di Provinsi Riau |
| Arah pengembangan | Arah pengembangan Kawasan Perindustrian Pangkalan Kerinci antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pengolahan hasil kehutanan yang ramah lingkungan • Pengembangan dan pemberdayaan industri lokal |

Sumber: RTRW Provinsi Riau



Gambar 2.52 Rencana Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari Sudut Kepentingan Ekonomi

Sumber: RTRW Provinsi Riau

2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- 1) Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
- 2) Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- 3) Merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- 4) Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya nasional;
- 5) Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
- 6) Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut ditetapkan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut pandang kepentingan sosial budaya ialah sebagai berikut:

a. Kawasan Candi Muara Takus dan sekitarnya

Kompleks percandian ini terdaftar dalam registrasi cagar budaya nasional dengan nomor CB. 453. Kompleks Percandian Muara Takus ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya berdasarkan SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

KM.9/PW.007/MKP/2003 tentang Penetapan Komplek Percandian Muara Takus yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Riau sebagai Benda Cagar Budaya dan/atau Situs yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia.

Candi Muara Takus adalah situs candi tertua di Sumatera, merupakan satu-satunya situs peninggalan sejarah yang berbentuk candi di Riau. Candi ini berada di Desa Muara Takus, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, jaraknya kurang lebih 135 km dari Kota Pekanbaru. Bangunan utama di kawasan ini adalah sebuah stupa yang besar, berbentuk menara yang sebagian besar terbuat dari batu bata dan sebagian kecil batu pasir kuning, serta terdapat beberapa bangunan candi yang disebut dengan Candi Tua, Candi Bungsu, Stupa Mahligai serta Palangka. Selain bangunan tersebut, di dalam kawasan ini ditemukan pula gundukan yang diperkirakan sebagai tempat pembakaran tulang manusia. Sementara di luar situs ini terdapat pula bangunan-bangunan (bekas) yang terbuat dari batu bata, yang belum dapat dipastikan jenis bangunannya.

Dengan demikian amat penting untuk melestarikan Candi Muara Takus untuk pelestarian nilai-nilai budaya masa pra Islam Provinsi Riau. Kawasan ini juga penting bagi penelitian kondisi masa silam di Provinsi Riau. Penetapan kawasan Candi Muara Takus sebagai kawasan strategis dapat disnergiskan dan dikolaborasikan dengan kawasan PLTA Koto Panjang akan dapat meningkatkan daya tarik wisata Candi Muara Takus.

b. Kawasan Istana Siak Sri Indrapura dan Sekitarnya

Istana Siak Sri Indrapura terdaftar sebagai bangunan cagar budaya dengan nomor registrasi CB.442 dan ditetapkan dengan SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.13/PW.007/MKP/2004 sebagai Bangunan Cagar Budaya.

Kawasan Istana Siak Sri Indrapura adalah kawasan yang memiliki beberapa situs peninggalan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang merupakan aset wilayah yang harus dilestarikan, serta memiliki potensi panorama alam sekitar yang indah. Kesultanan Siak Sri Indrapura merupakan kerajaan melayu terbesar di Provinsi Riau dengan wilayah terbentang dari kuala kampar sampai perbatasan Sumatera Utara. Kesultanan Siak awalnya merupakan bagian wilayah Kerajaan Melayu Johor. Sebagai bentuk eksistensi dan kebesaran Kesultanan Siak Sri Indrapura dimasa lalu maka sampai sekarang masih dijumpai situs-situs kebudayaan berupa Istana Asserayah Al Hasyimiah, Balai Kerapatan Tinggi, Makam Sultan Syarif Kasim II, Masjid Raya Syahabuddin dan Jembatan Istana, Makam Koto Tinggi, dan Gudang

Mesiu. Selain itu, terdapat pula Kelenteng Hock Siu Kong yang merupakan satu blok permukiman masyarakat Tionghoa pada sekitar Kesultanan Siak yang juga merupakan peninggalan kondisi keberagaman budaya masa lampau.

Peninggalan-peninggalan pada kawasan ini mengandung nilai sosial dan budaya yang tinggi sehingga perlu dilestarikan dan diposisikan sebagai penghargaan atas eksistensinya di masa lalu dan menjadi motivasi bagi generasi mendatang. Dengan demikian eksistensi Istana Siak dan sekitarnya amat penting bagi pelestarian nilai-nilai budaya melayu serantau, sehingga direncanakan menjadi Kawasan Strategis yang diarahkan untuk menjaga nilai – nilai budaya yang tinggi dan dapat dilestarikan serta diwariskan ke generasi – generasi mendatang.



Gambar 2.53 Rencana Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Sumber: RTRW Provinsi Riau

3. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

- 1) Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- 2) Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;

- 3) Memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- 4) Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- 5) Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 6) Memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
- 7) Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut ditetapkan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut pandang kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ialah sebagai berikut :

a. Kawasan Sekitar PLTA Koto Panjang

Danau PLTA Koto Panjang yang terletak di Kabupaten Kampar, merupakan pembangkit listrik tenaga air yang selama ini mensuplai kebutuhan energi untuk daerah Riau – Sumbar. Posisi Danau PLTA Koto Panjang terbentang di sepanjang perbatasan Sumbar – Riau yang dilintasi Jalan Nasional. Disamping sebagai sumber energi, Danau PLTA Koto Panjang juga berfungsi sebagai penyangga dan pengendali hidroorologis wilayah perbatasan. Daerah perbatasan merupakan daerah rawan bencana terutama bencana longsor serta banjir pada bagian hilir Danau PLTA Koto Panjang. Danau PLTA yang mempunyai debit yang besar, juga potensial menjadi sumber air baku serta untuk keperluan pengairan/irigasi untuk mendukung sektor pertanian di daerah hitherlandnya. Danau PLTA Koto Panjang juga menyimpan potensi wisata yang besar, keindahan danau tersebut membutuhkan sentuhan professional sehingga dapat diciptakan objek wisata unggulan dimas mendatang. Mengingat vitalnya fungsi Danau PLTA Koto Panjang maka strategi untuk untuk perlindungan dan pelestarian kawasan ini guna tetap menjaga kesinambungan suplai energi sekaligus pelestarian kawasan Danau PLTA Koto Panjang.

b. Kawasan Sekitar Cagar Biosfer Giam Siak Kecil – Bukit Batu; dan

Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukti Batu termasuk dalam kawasan lindung lainnya yang memiliki fungsi cagar biosfer sebagaimana ditetapkan Perpres No. 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera. Kawasan ini terletak di dalam Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak. Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, Riau, merupakan suaka margasatwa yang memiliki ribuan keanekaragaman hayati. Koridor ekologi yang menggabungkan dua suaka

margasatwa, yakni Giam Siak Kecil dan Bukit Batu. Kawasan Giam Siak Kecil seluas 84.967 ha menempati posisi di bagian Utara Kabupaten Siak, sedangkan SM Bukit Batu seluas 21.500 ha berada di barat daya Kabupaten Bengkalis. Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu merupakan bentangan alam berupa hutan rawa gambut serta perairan dan tasik (danau) dengan keanekaragaman hayati yang tinggi.

c. Kawasan Sekitar Koridor RIMBA (Riau – Jambi – Sumatera Barat)

Kawasan Sekitar Koridor RIMBA (Riau – Jambi – Sumatera Barat) yang terletak di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi, termasuk dalam kawasan lindung lainnya yang memiliki fungsi koridor ekosistem sebagaimana ditetapkan Perpres No. 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera. Koridor RIMBA (Riau – Jambi – Sumatera Barat) yang menghubungkan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang – Bukit Baling, Cagar Alam Batang Pangean I – Cagar Alam Batang Pangean II, Taman Nasional Kerinci Seblat, Suaka Margasatwa Bukit Tiga Puluh, Taman Nasional Berbak, Cagar Alam Maninjau Utara, Cagar Alam Bukit Bungkok, Cagar Alam Cempaka, Taman Wisata Alam Sungai Bengkal, dan Taman Hutan Raya Thaha Saifuddin sebagai koridor satwa gajah, harimau, dan burung. Kawasan ini juga meliputi hutan lindung dan koridor penghubungnya (hutan lindung dan kawasan budidaya).

Kebijakan pengembangan kawasan ini terutama yang termasuk dalam wilayah Provinsi Riau, yaitu:

- Pelestarian kawasan bagi habitat harimau Sumatera dan orang utan
- Reboisasi secara bertahap seluruh kawasan yang rusak dengan vegetasi alaminya
- Restorasi kawasan yang rusak sesuai dengan ekosistem aslinya
- Pemberian insentif-disinsentif bagi kegiatan budi daya komersial untuk merelokasi kegiatannya keluar Kawasan lindung
- Relokasi kegiatan-kegiatan budidaya komersial (Hutan Tanaman Industri dan Perkebunan Besar) yang berlokasi pada lahan yang berkemiringan lebih besar.

d. Infrastruktur

- Kebutuhan air bersih dari leding yang terjamin kualitas dan kuantitasnya sangat diperlukan terutama di wilayah pesisir yang air tanahnya berkualitas buruk (rawa dan gambut) seperti di pesisir Rokan Hilir, pesisir Dumai, pesisir Kabupaten Bengkalis dan Pulau Bengkalis, Kepulauan Meranti, pesisir Siak,

pesisir Pelalawan, pesisir Inhu, dan Inhil. Pembangunan SPAM Regional terutama di kawasan pesisir perlu diprioritaskan.

- Perekonomian Riau yang sangat tergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit dan kayu untuk kebutuhan pulp, paper, dan rayon membutuhkan jaringan transportasi yang dibuat khusus untuk itu. Jaringan jalan atau keretaapi yang khusus dan terpisah dari jalan umum perlu direncanakan dan dimulai pembangunannya pada pembangunan jangka panjang tahap ini.
- Meskipun jalan tol Pekanbaru Dumai, dan Pekanbaru Bangkinang, sudah dibangun, dan akan disusul dengan jaringan pada segmen lainnya, truk CPO dan TBS sawit tidak bisa melewati jalan tol karena over dimension and over load (ODOL). Mereka justru lewat jalan biasa. Hanya kendaraan pribadi, bus, dan truk standar yang lewat tol. Karena itu, perawatan jalan biasa (jalan nasional, provinsi, dan kabupaten) di Riau menjadi penting untuk mendukung KI dan Pelabuhan Dumai.
- Beberapa wilayah di Provinsi Riau yang tertinggal dalam hal kesejahteraan dan perekonomiannya dominan disebabkan oleh infrastruktur transportasi yang belum memadai, kawasan ini antara lain meliputi Rokan Hulu (Mahato dan sekitarnya), Rokan Hilir (Panipahan, Kubu, Senaboi dan sekitarnya), Dumai (Sungai Sembilan), Meranti (seluruh pulau), Pelalawan (kawasan lintas Bono), Indragiri Hilir (hampir seluruhnya), Kampar (Kampir Kiri hulu dan sekitarnya), dan beberapa kawasan lainnya. Karena itu sangat perlu untuk mengembangkan dan meningkatkan **jaringan jalan provinsi lintas pesisir dan kabupaten kota**.

e. Lingkungan

Penataan, konservasi, dan pengelolaan lahan gambut tersebar di pesisir Provinsi Riau harus disinkronkan dengan upaya penyediaan air baku untuk air bersih, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karena rawan terbakar di musim kemarau), serta untuk kepentingan pariwisata lingkungan perlu direncanakan dan dilakukan dengan baik.

f. Kerjasama Kawasan

- Kerjasama kawasan yang sudah dimulai saat ini seperti Pekansikawan, Siapbedelau, dan lainnya perlu dikaji lagi baik dari ruang lingkup wilayahnya, maupun aktifitas kerjasamanya.

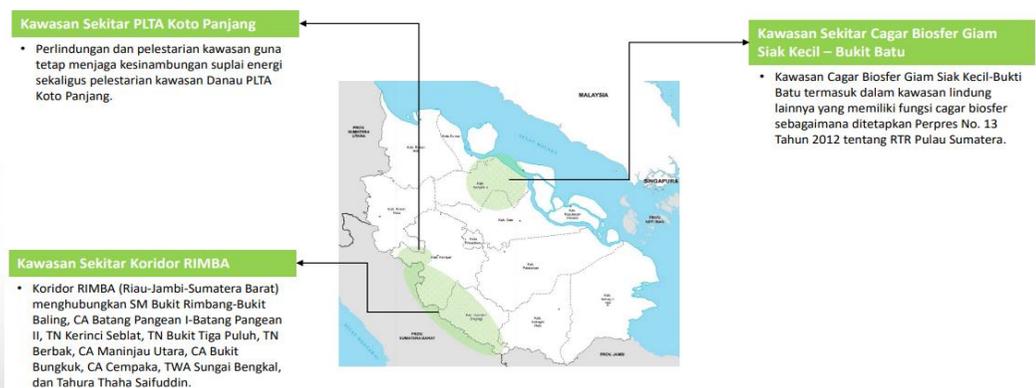
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2020 – 2025 menyatakan: Pulau Rupa ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

g. Pengembangan Bandara

Untuk mengantisipasi pertumbuhan transportasi udara lewat pelayanan Bandara SSK II di Pekanbaru yang akan mencapai 9,4 juta penumpang pada tahun 2025, maka perlu direncanakan untuk membangun bandara komersial (commercial airport) di luar kawasan Pekanbaru tetapi dalam jangkauan yang masih optimal.

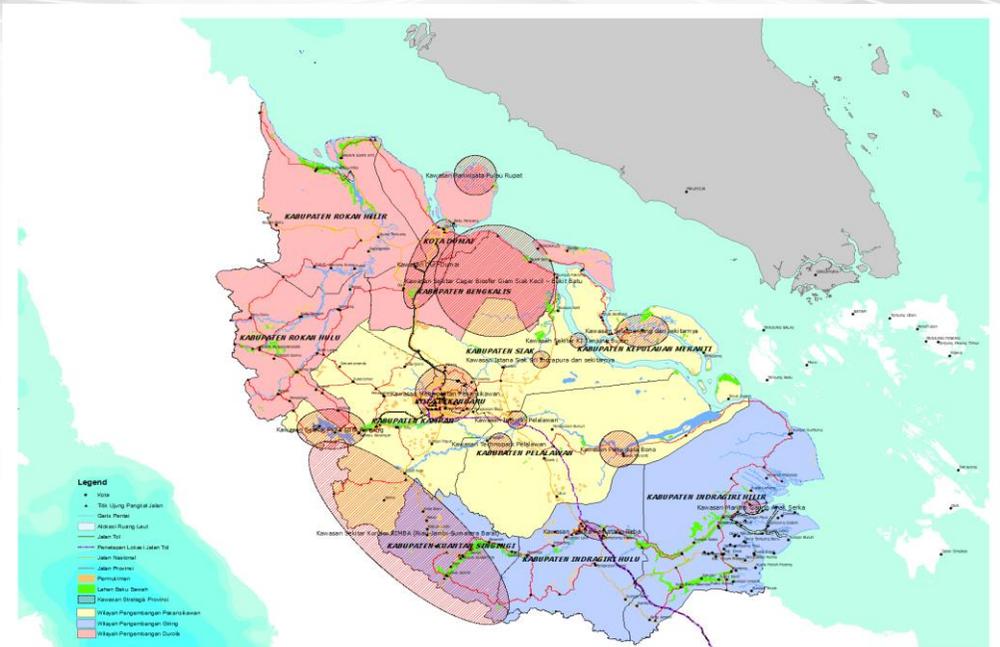
h. Kawasan Industri

- Kawasan industri saat ini yang berada di Dumai, Tanjung Buton, Tenayan, dan Kuala Enok memiliki prospek untuk terus dikembangkan. Kawasan Industri di Kota Dumai yang saat ini ada di Pelintung, Lubuk Gaung, Dumai Timur, Dumai Kota, dan Dumai Barat berpotensi untuk terus berkembang ke arah utara Dumai dan ke arah timur sampai ke rencana kawasan industri Buruk Bakul di Kabupaten Bengkalis.
- Kawasan Industri Tanjung Buton yang saat ini sudah beroperasi untuk aktifitas bongkar muat dan pergudangan berpotensi untuk terus berkembang dan bekerjasama dengan kawasan industri Futong dan sekitarnya.
- Kawasan industri Tenayan di Pekanbaru yang sudah dimulai dengan PLTU Tenayan berpotensi untuk berkembang seiring dengan peningkatan jalan lingkar Pekanbaru dan Jembatan Siak V.



Gambar 2.54 Rencana Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Sumber: RTRW Provinsi Riau

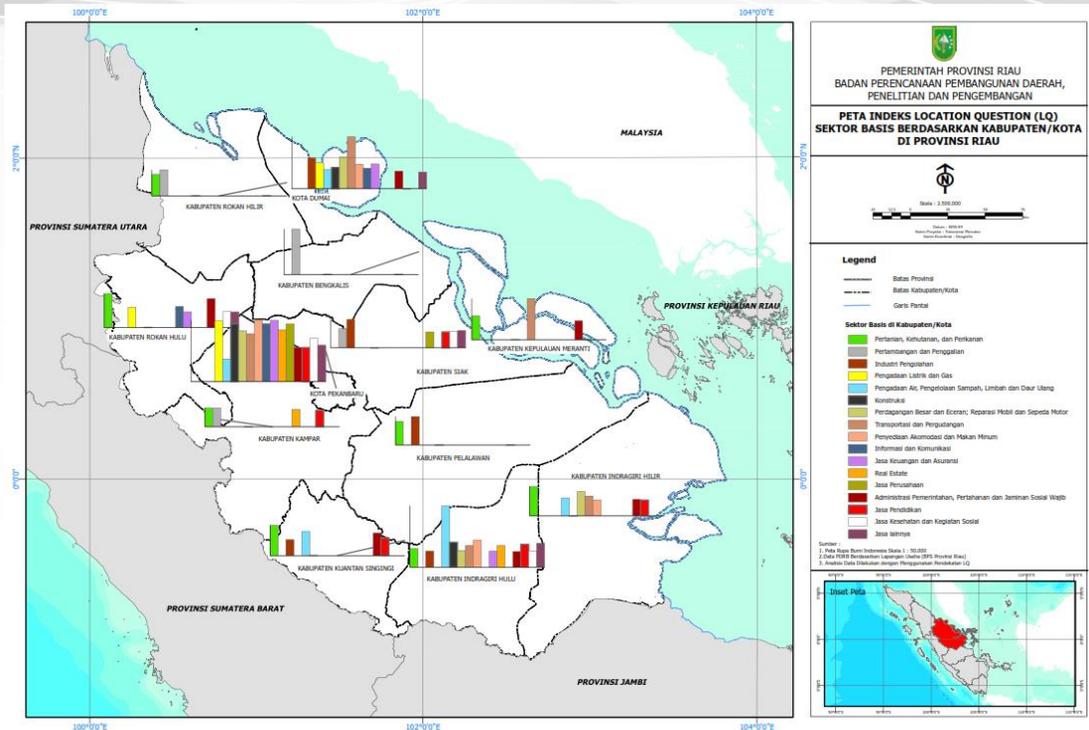


Gambar 2.55 Arah Pengembangan Wilayah dan Sebaran Kawasan Strategis Provinsi Riau

Sumber: RTRW Provinsi Riau

2.7.2 Arah Kebijakan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Kerangka kerja pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau tahun 2025 – 2045 tidak terlepas dari sinerginya kabupaten/kota di Provinsi Riau, maka untuk itu arah kebijakan kewilayahan dilihat dari sektor PDRB pada kabupaten/kota yang merupakan sektor unggulan (basis) dan memberikan nilai tambah ke daerah lain maka dapat dilihat pada gambar peta dibawah ini.



Gambar 2.56 Sektor PDRB Pada Kabupaten/Kota yang Merupakan Sektor Unggulan (Basis)

Sumber: Olahan Bappedalitbang 2023

2.7.2.1 Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan sektor PDRB yang menjadi unggulan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sektor Pertanian, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Industri Pengolahan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Parameter tingkat kesejahteraan Kuantan Singingi berada sedikit dibawah rata-rata Provinsi Riau. Pelayanan infrastruktur di Kuantan Singingi masih menyisakan 26 desa dengan sinyal seluler yang lemah dan 27,4 km jalan provinsi yang masih kerikil, serta 5,5 km jalan tanah/belum tembus. Produksi kelapa sawit di Kuantan Singingi termasuk besar di Riau yang tentu memerlukan jaringan jalan yang baik untuk pengangkutannya.

Di dalam RTRW Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singingi masuk ke dalam wilayah pengembangan Giring sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis sumber daya alam perkebunan dan agroindustri, meliputi Kabupaten Indragiri

Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi. Selain Taluk Kuantan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah, di Kuantan Singingi juga terdapat Baserah dan Lubuk Jambi sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang harus dikembangkan dan dilengkapi prasarana perkotaannya.

2.7.2.2 Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan sektor PDRB yang menjadi unggulan yaitu sektor hampir 17 sektor kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Informasi dan Komunikasi serta Jasa Perusahaan. Parameter tingkat kesejahteraan Inhu berada sedikit dibawah rata-rata Provinsi Riau. Pelayanan infrastruktur jaringan telepon seluler masih rendah. Perekonomian Inhu berkembang dengan produksi buah-buahan, kelapa sawit, dan karet. Pertambangan baru-baru juga sudah berproduksi, tetapi menimbulkan masalah pada jaringan jalan yang cepat rusak.

Jalan lintas provinsi di Indragiri Hulu masih menyisakan 129 km jalan kerikil dan 18 km jalan tanah/belum tembus. Konektivitas jalan tol di Indragiri Hulu meliputi ruas Jambi – Rengat – Pekanbaru dan Dharmasraya – Rengat. Skema konektivitas ini harus direncanakan dengan baik supaya pembangunan jaringan jalan baru dan peningkatan/pengembangan jaringan lama yang akan terhubung ke jalan tol bisa efisien dan tepat sasaran khususnya untuk peningkatan layanan transportasi dan logistik.

Di dalam RTRW Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu masuk ke dalam wilayah pengembangan Giring sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis sumber daya alam perkebunan dan agroindustri, meliputi Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi. Selain Rengat sebagai Pusat kegiatan Wilayah, di Inhu juga terdapat Air Molek, Peranap, dan Pangkalan Kasai sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang harus dikembangkan dan dilengkapi prasarana perkotaannya.

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan hulu dari Sungai Indragiri yang panjang dan berbelok-belok sangat rentan terhadap sedimentasi dan penumpukan sampah di dasarnya. Di waktu curah hujan tinggi, Sungai Indragiri sering meluap dan membanjiri wilayah di sekitarnya yang rendah dan menimbulkan banyak kerugian. Studi tentang normalisasi, naturalisasi, dan pengendalian banjir di

sepanjang DAS sungai-sungai besar ini harus dilakukan sebelum tindakan diambil untuk memperkecil berdampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan normalisasi/naturalisasi sungai ini.

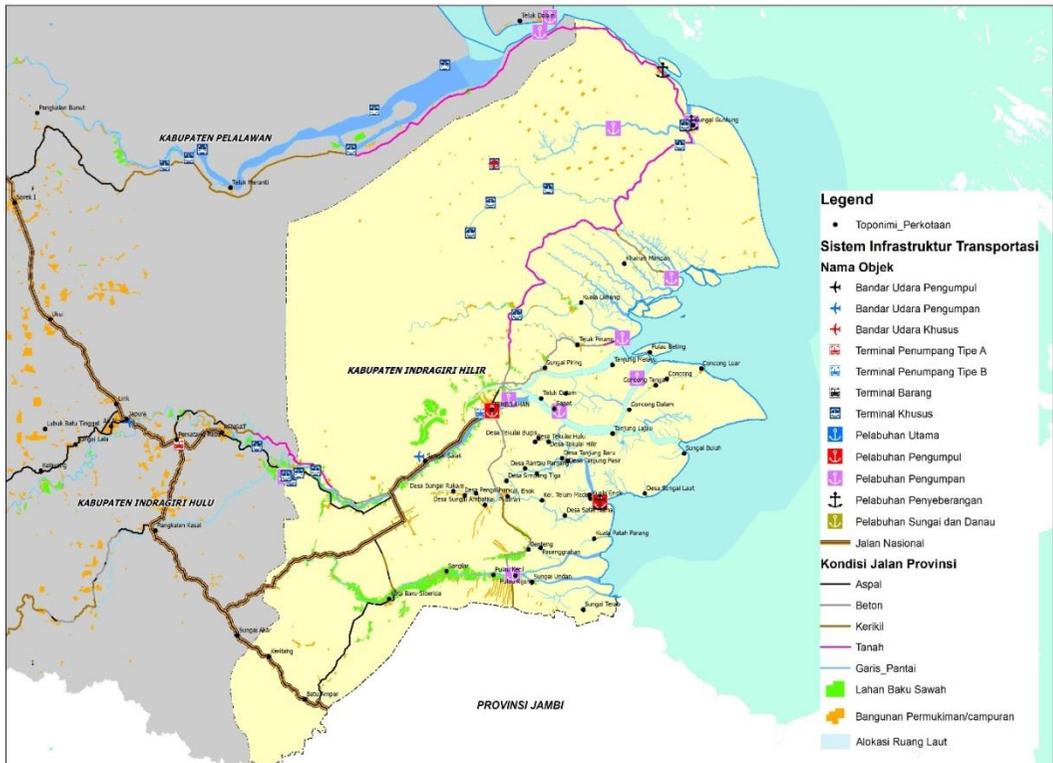
2.7.2.3 Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan sektor PDRB yang menjadi unggulan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Indikator kesejahteraan berupa kesehatan (angka harapan hidup), IPM, pendidikan, dan IPG termasuk yang terendah bersaing dengan Kepulauan Meranti. Bahkan indikator pendidikannya lebih rendah dari yang ada di Kepulauan Meranti. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin dan pengangguran masih tergolong rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Riau. Kondisi infrastrukturnya termasuk yang terendah, terutama air bersih, layanan persampahan, sinyal telepon seluler, rasio elektrifikasi, dan jalan penghubung. Dari sisi perekonomian, Indragiri Hilir cukup unggul terutama di produksi buah-buahan, kelapa, sawit, dan perikanan. Perekonomian yang maju di Inhil berbanding terbalik dengan minat sekolah khususnya tingkat SMA. Karena itu, stimulus terhadap pendidikan SMA sederajat juga mesti diberikan.

Kondisi infrastrukturnya termasuk yang terendah, terutama air bersih, layanan persampahan, sinyal telepon seluler, rasio elektrifikasi, dan jalan penghubung. Hambatan terbesar Indragiri Hilir adalah transportasi yang sulit akibat kondisi alam yang didominasi oleh tanah gambut, dataran rendah dan banyaknya sungai. Karena itu, pembangunan jalan, jembatan, dan sarana penyeberangan (pelabuhan) yang memadai bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan dan memberikan daya ungkit yang besar terhadap perekonomian daerah. Pembangunan jalan lintas provinsi dan jembatan dari Tembilahan ke arah Mandah, Pulau Burung, Danai, hingga Teluk Meranti dan jalan lintas provinsi di Indragiri Hilir perlu dituntaskan untuk mendukung hal tersebut. Konektivitas di Indragiri Hilir masih menyisakan jalan kewenangan provinsi yang belum tersambung dengan baik. Ruas Teluk Meranti – Sebekek – Guntung; Tembilahan – Spg. Kuala Saka – Tlk Lanjut – Sei Guntung; dan Enok batas Jambi (total sekitar

234 km) yang sebagian besar masih berupa jalan tanah dan kerikil yang perlu diprioritaskan.

Jika jalan lintas ini sudah terhubung dengan baik, maka bisa berdampak positif untuk pengembangan Pelabuhan Sokoi di Kabupaten Pelalawan sebagai hub komoditi di bagian selatan Riau. Pelabuhan Sokoi sebagai pelabuhan samudera dengan akses ke Batam dan sekitarnya tentu memiliki akses yang lebih baik.



Gambar 2.57 Rencana Sistem Infrastruktur Transportasi dan Kondisi Jalan Provinsi di Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber: RTRW Provinsi Riau

Pengadaan air bersih bisa menggunakan SPAM Regional Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir di bagian selatan dengan sumber air baku dari kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT).

Kebijakan kunci untuk pengembangan kewilayahan Riau jangka panjang di dalam RPJPN, Kabupaten Indragiri Hilir masuk ke dalam Pengembangan Kawasan

Agrikultur Ketahanan Pangan Kampar – Indragiri (Kabupaten Kampar, Indragiri, dan Indragiri Hilir). Hal ini sejalan dengan Kebijakan Wilayah Provinsi Riau di dalam RTRW Provinsi Riau dimana Kabupaten Indragiri Hilir masuk ke dalam Wilayah Pengembangan Giring, sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis sumber daya alam perkebunan dan agroindustri, meliputi Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Keberadaan Bandar Udara Tempuling di Indragiri Hilir sebagai bandar udara pengumpan di dalam RTRW Provinsi Riau (setingkat di bawah Bandara SSK II), bisa dimanfaatkan untuk memperlancar transportasi udara di Riau bagian selatan.

Di dalam RTRW Provinsi Riau, rencana sistem jaringan transportasi laut menetapkan Pelabuhan Kuala Enok dan Pelabuhan Tembilahan sebagai Pelabuhan Pengumpul (setingkat di bawah Pelabuhan Dumai sebagai Pelabuhan Utama).

Sungai Indragiri yang melewati Kabupaten Indragiri Hilir sarat dengan sedimentasi dan juga rawan terhadap abrasi. Upaya normalisasi, naturalisasi, dan pengendalian banjir serta efek merusak sungai memerlukan studi dan tindakan lanjut sehingga sungai Indragiri bisa memberikan kemanfaatan yang lebih besar, baik sebagai sarana transportasi, pemenuhan kebutuhan pangan, dan penyokong perekonomian lainnya.

2.7.2.4 Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan sektor PDRB yang menjadi unggulan Kabupaten Pelalawan yaitu sektor Pertanian dan Industri Pengolahan. Parameter tingkat kesejahteraan Pelalawan berada sekitar rata-rata Provinsi Riau, meskipun kemiskinan berada pada urutan ketiga, lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan provinsi dan pengeluaran konsumsi rumah tangganya paling rendah di Riau. Rumah tangga di Pelalawan yang belum memiliki rumah sendiri juga tergolong tinggi setelah Pekanbaru dan Dumai.

Pelayanan infrastrukturnya berada di bawah rata-rata provinsi, khususnya di cakupan layanan persampahan, sinyal seluler, dan rasio elektrifikasi. Pelalawan yang dilewati jalur lintas Provinsi Riau masih menyisakan jalan kerikil 72 km dan jalan tanah/belum tembus 68 km, pada jalur lintas Bono menuju Pulau Burung di Indragiri Hilir. Produksi kelapa sawit dan karet termasuk yang terbesar di Riau, dan akan lebih produktif jika jalan lintas provinsi ini bisa diselesaikan. Jika jalan lintas

ini bisa berfungsi optimal maka sejalan dengan pengembangan pelabuhan Soko sebagai hub di Riau bagian selatan yang memiliki akses lebih dekat ke Batam dan Kepri.

Kabupaten Pelalawan juga direncanakan dilalui jalan tol Jambi – Rengat – Pekanbaru. Skema konektivitas ini harus direncanakan dengan baik supaya pembangunan jaringan jalan baru dan peningkatan/pengembangan jaringan lama yang akan terhubung ke jalan tol bisa efisien dan tepat sasaran khususnya untuk peningkatan layanan transportasi dan logistik.

Di dalam RTRW Provinsi Riau, Pelalawan masuk di dalam Wilayah Pengembangan Pekansikawan, sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis perdagangan/jasa, agrobisnis dan agroindustri meliputi Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain Pangkalan Kerinci sebagai Pusat Kegiatan Wilayah, di Kabupaten Pelalawan terdapat Sorek, Ukui, dan Soko sebagai Pusat Kegiatan Lokal. Kota-kota ini perlu dipersiapkan untuk menjadi kota sedang di masa depan, lengkap dengan infrastruktur dan pelayanan perkotaannya.

Kabupaten Pelalawan merupakan hilir dari Sungai Kampar yang panjang dan berbelok-belok sangat rentan terhadap sedimentasi dan penumpukan sampah di dasarnya. Di waktu curah hujan tinggi, Sungai Kampar sering meluap dan membanjiri wilayah di sekitarnya yang rendah dan menimbulkan banyak kerugian. Studi tentang normalisasi, naturalisasi, dan pengendalian banjir di sepanjang DAS sungai-sungai besar ini harus dilakukan sebelum tindakan diambil untuk memperkecil berdampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan normalisasi/naturalisasi sungai ini.

2.7.2.5 Kabupaten Siak

Berdasarkan sektor PDRB yang menjadi unggulan Kabupaten Siak yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Lainnya. Kabupaten Siak merupakan kabupaten yang paling sejahtera di Riau, tentu saja setelah Pekanbaru dan Dumai sebagai kota. Tingkat layanan infrastrukturnya pun cukup baik, dengan layanan air bersih dari leding 14,6%, paling tinggi se-Riau. Perekonomian sumber daya alam pertanian sangat menonjol dari produksi buah-buahan, sawit, dan karet.

Di dalam RTRW Provinsi Riau, Kabupaten Siak masuk ke dalam Wilayah Pengembangan Pekansikawan sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis perdagangan/jasa, agrobisnis dan agroindustri meliputi Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Di dalam RTRW Provinsi Riau, selain Siak Sri Indrapura sebagai ibukota Kabupaten Siak yang menjadi Pusat Kegiatan Wilayah, terdapat pula Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Siak yaitu Tanjung Buton dan Perawang. Ketiga kota perlu dipersiapkan prasarana pelayanan perkotaannya. Di dalam RTRW Provinsi Riau, Pelabuhan Tanjung Buton menjadi pelabuhan pengumpul (setingkat di bawah Pelabuhan Utama di Kota Dumai).

Sungai Siak yang memiliki hulu di Tapung Kabupaten Kampar, melewati kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan bermuara di Selat Malaka memiliki beban pencemaran dan sedimentasi yang tinggi. Pemanfaatan Sungai Siak untuk transportasi, sumber air bersih, dan perikanan harus terus ditingkatkan. Studi tentang normalisasi, naturalisasi, dan pengendalian banjir di sepanjang DAS sungai-sungai besar ini harus dilakukan sebelum tindakan diambil untuk memperkecil berdampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan normalisasi/naturalisasi sungai ini.

2.7.2.6 Kabupaten Kampar

Berdasarkan sektor PDRB yang menjadi unggulan Kabupaten Kampar yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Real Estate dan Jasa Pendidikan. Parameter kesejahteraan Kampar adalah sekitar rata-rata Provinsi Riau. Kampar merupakan kawasan *hinterland* yang memproduksi sawit, karet, perikanan darat, dan buah-buahan yang besar di Riau. Meskipun demikian, kesenjangan pembangunan terdapat di sekitar Kampar Kiri dibandingkan dengan kawasan lainnya. Hal ini antara lain dipicu oleh minimnya akses infrastruktur jalan/jembatan, sinyal seluler dan listrik ke daerah tersebut. Jalan lintas kewenangan provinsi masih 82 km lagi yang belum beraspal (kerikil). Karena itu, peningkatan akses menjadi isu utama di wilayah Kampar Kiri yang mesti dituntaskan pada periode jangka panjang ke depan.

Kampar yang berada di tengah-tengah Provinsi Riau merupakan kawasan perlintasan yang penting. Koridor multi-infrastruktur dan infrastruktur logistik kunci yang direncanakan di dalam RPJPN untuk konektivitas Provinsi Riau dan sekitarnya adalah berupa jalan tol Pekanbaru – Padang yang melewati Kabupaten Kampar. Skema konektivitas harus direncanakan dengan baik supaya pembangunan jaringan jalan baru dan peningkatan/pengembangan jaringan lama yang akan terhubung ke jalan tol bisa efisien dan tepat sasaran khususnya untuk peningkatan layanan transportasi dan logistik.

Di dalam RPJPN pengembangan kewilayahan Riau, Kabupaten Kampar masuk ke dalam wilayah Pengembangan Kawasan Agrikultur Ketahanan Pangan Kampar – Indragiri (Kabupaten Kampar, Indragiri, dan Indragiri Hilir). Hal ini sejalan dengan Kebijakan Wilayah Provinsi Riau di dalam RTRW Provinsi Riau, dimana Kabupaten Kampar masuk ke dalam wilayah pengembangan Pekansikawan sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis perdagangan/jasa, agrobisnis dan agroindustri meliputi Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Di dalam RTRW Provinsi Riau, selain Bangkinang (ibu kota Kabupaten Kampar) sebagai Pusat Kegiatan Wilayah, pada level Pusat Kegiatan Lokal (setingkat dibawah PKW) terdapat Tapung dan Lipat Kain yang berpotensi juga untuk menjadi wilayah perkotaan yang harus dipersiapkan infrastruktur dan layanan perkotaannya.

Sungai Kampar yang berhulu di Pegunungan Bukit Barisan yang panjang dan berbelok-belok melintasi Kabupaten Kampar dan Pelalawan sangat rentan terhadap sedimentasi dan penumpukan sampah di dasarnya. Di waktu curah hujan tinggi sungai ini sering meluap dan membanjiri wilayah di sekitarnya yang rendah dan menimbulkan banyak kerugian. Normalisasi, naturalisasi dan pengendalian banjir harus dilakukan pada sungai Kampar, dengan didahului oleh studi analisis dampak lingkungan dari tindakan tersebut.

Waduk Kotopanjang di XIII Kotokampar yang berhulu di Sumatera Barat merupakan sumber energi dari PLTA Kotopanjang, pengendali banjir di hilirnya, sebagai prasarana perekonomian perikanan air tawar. Kelestarian waduk ini mesti dijaga untuk menjamin intake yang stabil ke dalam waduk dari kawasan hulunya dengan menjaga kelestarian tutupan lahan di kawasan hulu waduk di Sumatera Barat dan sekitarnya. Pola kerjasama antara daerah bisa dilakukan. Pengendalian

pencemaran akibat *over capacity* dari perikanan air tawar di waduk juga harus dilakukan supaya tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan.

2.7.2.7 Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan sektor PDRB yang menjadi unggulan Kabupaten Rokan Hulu yaitu sektor Pertanian, Pengadaan Listrik dan Gas, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial. Persentase penduduk miskin di Rokan Hulu masih lebih besar dari rata-rata provinsi, dan nomor dua setelah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pembangunan gender di Rohul adalah paling rendah di Riau. Jumlah SMP kurang, terutama di wilayah yang berbatasan dengan Sumatera Barat.

Di dalam RTRW Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu masuk di dalam wilayah pengembangan Durolis, sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis sumber daya alam minyak/gas bumi dan kawasan industri terpadu meliputi Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis. Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Rokan Hulu (setingkat di bawah Pusat Kegiatan Wilayah Pasir Pengaraian) terdiri dari Ujung Batu, Kepenuhan Tengah, dan Tambusai Utara. Kota-kota ini harus dipersiapkan menjadi kota sedang di masa datang terutama infrastruktur perkotaannya.

Keterjangkauan elektrifikasi dan sinyal seluler masih rendah dan dibawah rata-rata provinsi. Produksi sawit dan karet di Rokan Hulu merupakan yang terbesar di Riau, tetapi angka kemiskinan juga tinggi. Produksi buah-buahan di Rokan Hulu juga termasuk tertinggi di Riau.

Konektivitas jalan kewenangan provinsi di Kabupaten Rokan Hulu masih menyisakan jalan kerikil sekitar 71 km lagi yang harus ditingkatkan. Dengan kondisi alam Rokan Hulu yang berbukit dan banyak aliran sungai, maka butuh anggaran banyak untuk membangun jembatan dan jalannya. Seharusnya ada jalan nasional yang melewati Rokan Hulu. Ruas Rantau Berangin – Tandun – Ujung Batu – Pasir Pengarayan – Dalu-dalu – Batas Sumatera Utara bisa dijadikan ruas jalan nasional karena fungsinya yang strategis menghubungkan lintas provinsi dan kepentingan nasional. Exit tol pada jalan tol Bangkinang – Sumbar tidak ada di Rokan Hulu. Padahal akses ke jalan tol diperlukan untuk memaksimalkan manfaat jalan tol bagi daerah sekitarnya. Truk *over dimension over load (ODOL)* sering

dijumpai, terutama yang mengangkat sawit yang mengakibatkan jalan cepat rusak. Pilihan jalan dari *rigid pavement* lebih baik dalam hal ini.

Di dalam RTRW Provinsi Riau, Bandar udara Tuanku Tambusai merupakan bandara udara pengumpan (setingkat di bawah bandar udara pengumpul Bandara SSK II).

Sungai Rokan yang hulunya di Rokan Hulu dan bermuara di Bagansiapiapi sering meluap dan membanjiri wilayah sekitarnya, serta sarat dengan sedimentasi. Normalisasi, naturalisasi, dan pengendalian banjir yang didahului dengan studi intensif di sepanjang DAS sungai Rokan ini harus dilakukan supaya sungai Rokan bisa memberikan manfaat maksimal.

2.7.2.8 Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan sektor PDRB yang menjadi unggulan Kabupaten Bengkalis yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian. Tingkat kesejahteraan di Kabupaten Bengkalis secara rata-rata cukup baik dibandingkan dengan kabupaten/kota di Riau. Meskipun demikian tingkat pengangguran terbuka adalah tertinggi di Riau, dan APK/APM SMA nya masih dibawah rata-rata Riau.

Perekonomian Kabupaten Bengkalis banyak tergantung pada aktifitas pertambangan migas di Duri dan sekitarnya, meskipun produksinya relatif menurun. Duri memiliki potensi yang sangat strategis sehingga di dalam kebijakan kunci (*key policies*) pengembangan kewilayahan Riau jangka panjang di dalam RPJPN merupakan bagian dari Pengembangan Koridor strategis industri: Dumai – Duri – Pekanbaru untuk klaster industri hilirisasi *bioproduct*, industri hilirisasi sumberdaya mineral, industri mesin, dan industri pengolahan minyak dan gas bumi. Hal ini sejalan dengan RTRW Provinsi Riau yang menetapkan bahwa Kabupaten Bengkalis termasuk wilayah pengembangan Durolis, sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis sumber daya alam minyak/gas bumi dan kawasan industri terpadu meliputi Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis (khususnya kawasan perkotaan Duri). Kabupaten Bengkalis bersama Kota Dumai di dalam RTRW Provinsi juga sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Sedangkan Duri dan Sei Pakning merupakan Pusat Kegiatan Lokal (setingkat di bawah Bengkalis sebagai Pusat Kegiatan Wilayah). Selain Bengkalis sebagai ibukota kabupaten, kawasan Perkotaan

Duri dan Sei Pakning juga diperkirakan akan tumbuh dan berkembang menjadi kota menengah. Karena itu, persiapan infrastruktur perkotaan juga diperlukan untuk kota-kota ini.

Infrastruktur kewilayahan berupa penyeberangan Roro di Sungai Pakning – Bengkalis dan Dumai – Rumat masih bermasalah dengan antrian yang panjang terutama pada volume puncak liburan dan hari besar. Padahal, transportasi penyeberangan ini berpengaruh besar terhadap berbagai faktor seperti perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Karena itu, penyeberangan ini perlu ditingkatkan fasilitas dan pelayanannya. Berbagai pola pembiayaan bisa diterapkan, termasuk *blended finance*. Di dalam jangka panjang, upaya merangkai pulau terutama Pulau Bengkalis dengan daratan Sumatera (Jembatan Sei Pakning – Bengkalis sepanjang 7,7 km) dan Pulau Bengkalis dengan Pulau Padang (Jembatan Ketam Putih – Dakal sepanjang 1,6 km) bisa direncanakan dan dibangun secara bertahap.

Jalan lingkar pulau di Pulau Bengkalis dan Pulau Rumat masih belum tuntas, padahal sangat penting untuk kegiatan perekonomian dan aktifitas sosial masyarakat. Perkembangan jalan lintas di Pulau Bengkalis, selain jalan lintas pesisir, perlu juga meningkatkan jalan poros tengah pulau yaitu Jalan Air Putih – Selat Baru (jalur tengah)

Saat ini, konektivitas wilayah perkotaan Duri dengan Sei Pakning sebagai gerbang ke Pulau Bengkalis masih melalui Kota Dumai, ataupun melewati arah Siak, sehingga waktu tempuh bisa sampai 3 hingga 4 jam, karena belum ada jalan poros yang langsung menuju Sei Pakning. Pembangunan jalan poros Duri – Sei Pakning sebagai solusi alternatif untuk mempersingkat jarak dan waktu akan meningkatkan konektivitas dan perekonomian di wilayah ini.

Di dalam RPJPN direncanakan juga koridor multi infrastruktur dan infrastruktur logistik kunci yang meliputi *Direct Interconnection* Dumai – Rumat – Malaka. Pulau Rumat menjadi pijakan antara dari Dumai menuju Malaka dan memegang peran strategis dalam konektivitas ini, baik sebagai jalur transportasi maupun dalam meningkatkan perekonomian Pulau Rumat sendiri. Kabupaten Bengkalis juga direncanakan untuk dilalui oleh Jaringan Kereta Api Rantau Prapat – Kota Pinang – Dumai – Pekanbaru. Hal ini sejalan dengan rencana jalur kereta api yang direncanakan di dalam RTRW Provinsi Riau yang meliputi: Rantau Prapat – Duri – Dumai; Duri – Pekanbaru. Selain itu, mengingat penggerak perekonomian di

Riau banyak yang berasal dari komoditi perkebunan dan kayu hutan tanaman industri, maka pemanfaatan kereta api di Riau selain untuk penumpang, bisa juga diarahkan terutama untuk logistik barang (hasil bumi). Di dalam RPJPN, direncanakan pengembangan bandara regional Pekanbaru-Duri-Dumai sebagai antisipasi terhadap pelayanan angkutan udara pada koridor strategis industri Dumai-Duri-Pekanbaru.

Di dalam RPJPN direncanakan pengembangan kepelabuhanan dengan menyediakan layanan *maritime backbone* yang menghubungkan Dumai - Bengkalis - Meranti - Karimun - Batam. Hal ini sejalan dengan rencana sistem jaringan transportasi laut di dalam RTRW Provinsi Riau dimana pelabuhan pengumpul di Kabupaten Bengkalis terdapat di pelabuhan Bengkalis dan pelabuhan Sungai Pakning. Selain itu, perlu direncanakan untuk mencari pelabuhan alternatif lain di sisi timur Dumai (wilayah Kabupaten Bengkalis), untuk dijadikan pelabuhan dengan akses yang lebih baik dari Selat Malaka sesuai kemudahan alur pelayaran yang langsung. Di samping itu, perencanaan konektivitas dan pelayanan kepelabuhanan terutama untuk angkutan logistik (kargo, kontainer dan sebagainya) di Dumai dan sekitarnya untuk gerbang transportasi *channelling* dari Selat Malaka.

Abrasi di pantai utara Pulau Bengkalis memerlukan tindakan yang lebih komprehensif supaya tidak lebih banyak wilayah daratan yang hilang serta mempengaruhi garis batas wilayah negara.

2.7.2.9 Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan sektor PDRB yang menjadi unggulan Kabupaten Rokan Hilir yaitu sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian. Meskipun tingkat kesejahteraan di Rokan Hilir bukan yang terendah di Riau, tetapi masih di bawah rata-rata Provinsi Riau. Produksi perikanan yang tinggi di Rokan Hilir belum mampu mensejahterakan nelayannya karena sistem tata niaga yang belum berpihak pada nelayan.

Di dalam RTRW Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir masuk ke dalam wilayah pengembangan Durolis, sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis sumber daya alam minyak/gas bumi dan kawasan industri terpadu meliputi Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis. Ujung Tanjung, Sinaboi, Panipahan, dan Bagan Batu

merupakan Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Rokan Hilir (setingkat di bawah Bagansiapiapi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah sekaligus ibukota Kabupaten Rokan Hilir). Karena itu, penyiapan kawasan perkotaan di PKL dan PKW ini perlu dilakukan terutama infrastruktur perkotaannya.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan kabupaten yang dilewati oleh rencana jalan tol Kisaran – Dumai atau Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat dan juga jaringan kereta api Rantau Prapat – Kota Pinang – Dumai. Karena itu perlu dipersiapkan jalan akses menuju jalan tol dan jaringan kereta api tersebut sehingga keberadaan koridor lintas cepat tersebut bisa termanfaatkan maksimal oleh Rokan Hilir dan Riau pada umumnya. Di dalam RTRW Provinsi Riau direncanakan bandar udara Bagansiapiapi sebagai bandar udara pengumpan, setingkat dibawah bandara udara pengumpul Bandara SSK II di Pekanbaru.

Infrastruktur jalan provinsi ke arah Panipahan di sebelah barat dan ke arah Dumai di sebelah timur masih belum tuntas. Konektivitas ini merupakan penghubung lintas pesisir Riau yang penting. Produksi kelapa sawit di Rokan Hilir termasuk yang tinggi dan membutuhkan konektivitas jalan darat yang bagus. Konektivitas jalan kewenangan provinsi yang melewati Kabupaten Rokan Hilir masih menyisakan ruas Bagansiapiapi – Teluk Piyai – Panipahan – Batas Sumut sekitar 33 km berupa jalan tanah yang harus ditingkatkan menjadi jalan kerikil/timbunan dan jalan aspal beserta dengan kebutuhan jembatannya.

Infrastruktur transportasi laut menuju Pulau Jemur perlu dibangun dalam rangka pengembangan potensi pariwisata bahari Pulau Jemur. Sementara itu, Sungai Rokan yang hulunya di Rokan Hulu dan bermuara di Bagansiapiapi sering meluap dan membanjiri wilayah sekitarnya, serta sarat dengan sedimentasi. Normalisasi, naturalisasi, dan pengendalian banjir yang didahului dengan studi intensif di sepanjang DAS sungai Rokan ini harus dilakukan supaya sungai Rokan bisa memberikan manfaat maksimal.

2.7.2.10 Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan sektor PDRB yang menjadi unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sektor Pertanian, Transportasi dan Pergudangan, serta Administrasi Pemerintahan. Indikator kesejahteraan di Kepulauan Meranti menunjukkan yang terendah di Riau dengan persentase penduduk miskin yang mencolok, yaitu 3,5 kali

lipat dari rata-rata persentase penduduk miskin Provinsi Riau. Demikian pula halnya dengan infrastruktur juga yang paling tertinggal.

Perekonomian sumber daya alam Kepulauan Meranti cukup baik, terutama dari hasil produksi buah-buahan, kelapa, karet, dan sagu. Kebutuhan air bersih tidak terpenuhi (mahal) baik untuk rumah tangga, maupun terkhusus untuk industri pengolahan sagu. Harga barang pangan kebutuhan pokok lainnya di Kab. Kepulauan Meranti tergolong lebih mahal. Harga ikan laut di Kab. Kepulauan Meranti juga tergolong mahal, meskipun dikelilingi oleh laut. Harga sayur juga mahal karena sayur dikirim dari Sumbar. Bahkan air bersih di dalam galon banyak didatangkan dari Tg. Balai Karimun. Padahal Kab. Kep. Meranti punya banyak tasik air gambut yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk air bersih. Posisi Kepulauan Meranti yang berada di sisi paling timur dari Riau dan berada di wilayah kepulauan membuat wilayahnya menjadi sulit dijangkau. Harga barang kebutuhan hidup yang mahal akibat transportasi yang sulit menyebabkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penunjang perekonomian menjadi lebih sulit didapatkan.

Karena itu pembangunan di bidang transportasi berupa fasilitas penyeberangan antar pulau (dermaga atau jembatan), baik yang menghubungkan Pulau Sumatera sebagai *hinterland* dengan Kepulauan Meranti, maupun antar pulau di dalam Kepulauan Meranti harus ditingkatkan. Fasilitas jembatan antar pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti yang menghubungkan antar pulau masih belum ada. Layanan penyeberangan saat ini banyak menggunakan kapal pompong ataupun kempang (sejenis kapal Roro tetapi lebih kecil hanya untuk mengangkut sepeda motor). Karena itu pengadaan fasilitas penyeberangan Ro-Ro yang bisa memuat lebih banyak dan kendaraan roda empat bisa dilakukan sebelum dibangun jembatan. Dalam jangka panjang, ada 5 jembatan yang perlu dibangun untuk menghubungkan pulau-pulau di Kab. Kepulauan Meranti satu sama lain dan dengan daratan Sumatera, yaitu Jembatan Sei Pakning-Bengkalis (7,7 km); Jembatan Ketam Putih-Dakal (1,6 km); Jembatan Pelantai-Ketapang (1,8 km); Jembatan Selat Rengit (Semukut) (300 m); serta Jembatan Lalang (P. Sumatera) dan P. Padang (5,5 km).

RPJPN telah menetapkan pengembangan kepelabuhanan untuk Peningkatan Pelabuhan Selatpanjang untuk melayani kebutuhan transportasi di wilayah sekitarnya; Peningkatan pelabuhan-pelabuhan intrakawasan antarpulau di

Kawasan Afirmasi Kep. Meranti; serta Penyediaan layanan *maritime backbone* yang menghubungkan Dumai Bengkalis – Meranti – Karimun – Batam. Hal ini juga selaras dengan RTRW Provinsi Riau yang menetapkan Pelabuhan Selat Panjang sebagai pelabuhan pengumpul (dibawah pelabuhan utama di Dumai).

Demikian pula halnya, jalan lintas di dalam masing-masing pulau di Kepulauan Meranti harus dimantapkan supaya pergerakan barang dan jasa menjadi lancar dan mendukung aktifitas perekonomian dan sosial masyarakat. Jalan kewenangan provinsi yang berupa timbunan kerikil di Kabupaten Kepulauan Meranti masih ada sepanjang 87 km lebih, yaitu ruas Teluk Belitung-Meranti Bunting; Tanjung Padang - Teluk Belitung; Selat Panjang – Alai – Kampung Balak. Jika jalan poros provinsi ini bisa ditingkatkan perkerasannya, maka akses utama masyarakat akan sangat terbantu. Biaya membangun infrastruktur di Kab. Kepulauan Meranti jauh lebih mahal karena ketiadaan bahan baku pasir, batu, dan tanah timbun serta akses yang jauh dan sulit dijangkau karena minimnya jalan poros.

Bahkan untuk semakin memperlancar transportasi, di dalam RPJPN, direncanakan untuk pembangunan baru Bandara Selat Panjang (Kep. Meranti) dan penyediaan layanan penerbangan sipil Pekanbaru – Selat Panjang dan/atau Batam-Selat Panjang.

Pelayanan listrik meskipun jangkauannya sudah semakin meluas, tetapi banyak yang menyala hanya pada malam hari saja. Komoditas kelapa sawit di Kabupaten Kepulauan Meranti lebih menjanjikan dari segi pendapatan masyarakat dibandingkan dengan kelapa atau pun sagu. Sawit bisa dipanen 2 kali dalam sebulan mulai umur 5 tahun dan menyediakan lapangan pekerjaan cukup banyak. Sementara kelapa panen 3 bulan sekali, bahkan sagu panen sekali dalam setahun. Namun demikian, di sisi lain ketersediaan lahan yang minim karena banyak tanah gambut. Sementara di sisi lain gambut dan mangrove merupakan cadangan karbon besar dan merupakan potensi untuk *carbon trade*. Ancaman abrasi dan ekspansi air laut ke daratan menyebabkan 240 ha lahan sawah terlantar karena tidak adanya tanggul dan bangun pengendali air laut.

Produk-produk yang dijual dari Kab. Kepulauan Meranti banyak dalam bentuk produk dasar (kelapa bulat, sagu, dan kopi yang belum diolah) dengan harga yang sangat murah. Meskipun ada beberapa yang sudah diolah, tetapi

pemasarannya kurang. Selain itu, perlu tata niaga produk kelapa, sagu, dan kopi supaya lebih menguntungkan petani.

Penetapan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kabupaten untuk Pengembangan Kawasan Afirmasi 3TP prioritas di dalam RPJPN merupakan kebijakan yang positif untuk mempercepat pembangunan di daerah ini, sehingga pembangunan di Meranti bukan hanya dari anggaran kabupaten, tetapi juga dari APBD Provinsi Riau dan APBN. Di dalam RTRW Provinsi, Kabupaten Kepulauan Meranti masuk ke dalam wilayah Pengembangan Pekansikawan bersama-sama dengan Kota Pekanbaru, Kab. Kampar, Kab. Siak, dan Kab. Pelalawan sebagai kawasan perkotaan berbasis perdagangan/jasa, agrobisnis dan agroindustri.

2.7.2.11 Kota Pekanbaru

Hampir seluruh 17 (tujuh belas) sektor PDRB yang menjadi unggulan Kota Pekanbaru kecuali sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian serta Industri Pengolahan. Tingkat kesejahteraan penduduk Pekanbaru adalah paling tinggi di antara kabupaten/kota yang ada di Riau. Permasalahan hanya ada pada tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi yaitu 6,4%, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi sebesar 4,37%. Ketersediaan infrastruktur Pekanbaru juga paling baik se Riau, meskipun demikian, penyediaan rumah masih minim karena baru 58,84% rumah tangga yang memiliki rumah sendiri di Pekanbaru. Dari sisi perekonomian, Pekanbaru memang tidak menghasilkan banyak produksi dari sumberdaya alam, tetapi lebih mengandalkan pada sektor perdagangan dan jasa. Di samping itu, posisi Pekanbaru yang berada di tengah, merupakan tempat perlintasan sekaligus persinggahan arus perdagangan, barang, dan jasa bukan hanya bagi kabupaten/kota di Riau, tetapi juga lintas Sumatera. Karena itu disamping melancarkan lalu lintas di dalam kota, maka dari segi kewilayahan adalah penting untuk melancarkan lalu lintas menuju dan keluar dari Pekanbaru. Dalam jangka pendek bisa dilakukan berupa menjadikan jalan 2 jalur (4 lajur) pada jalan di pinggir kota Pekanbaru, yaitu Jl. Pasir Putih, Jl. Kaharuddin Nasution, Jl. Kubang Raya, dan Jl. Garuda Sakti (lihat gambar dibawah) sepanjang 25 km. Jalan ini merupakan jalan nasional satu-satunya sebagai jalur truk-truk CPO, kayu, TBS sawit, kontainer dan truk besar lainnya yang melewati Pekanbaru dari arah Sumbar, Jambi, Medan dan lintas Sumatera lainnya. Jalan-jalan tersebut masih

terdiri dari satu jalur (lebar 6 m), dan saat ini sudah berada di tengah-tengah kawasan pemukiman yang padat, rawan macet dan kecelakaan. Jika jalan ini tidak dilebarkan, maka truk-truk akan mencuri-curi memakai jalan dalam kota (Jl. Soekarno Hatta, Jl. Soebrantas, dan Jl. SM Amin) sehingga menyebabkan banyak kecelakaan dan kemacetan pada jam-jam sibuk.



Gambar 2.58 Kondisi Jalan Kota Pekanbaru

Sumber: Hasil Analisis

Pembangunan jalan lingkar Kota Pekanbaru untuk jangka panjang perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan kota kelancaran arus transportasi menuju dan dari Pekanbaru. Jalan lingkar Pekanbaru ini bisa disinkronkan dengan pintu akses jalan tol Pekanbaru – Dumai, Pekanbaru – Bangkinang, dan rencana pembangunan jalan tol Rengat Pekanbaru.



Gambar 2.59 Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Kota Pekanbaru
Sumber: Hasil Analisis

Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan mengantisipasi perkembangan kota menuju aglomerasi kawasan Perkotaan Pekanbaru dan sekitarnya yang meliputi Siak Hulu, Tambang, Tapung, Minas, Bandar Sei Kijang, dan Tualang, maka dibutuhkan transportasi massal yang bisa menghubungkan sudut ke sudut kawasan aglomerasi Pekanbaru Raya semisal LRT atau angkutan massal lainnya, dari arah Tambang (sisi barat) ke Bandar Sei Kijang (sisi Timur) dan dari arah Siak Hulu (sisi Selatan) ke Minas (sisi Utara). Termasuk juga transportasi massal ke arah bandara baru di luar kota Pekanbaru sebagai antisipasi padatnya pelayanan di Bandara SSK yang ada sekarang.

Isu kewilayahan yang penting lainnya di Pekanbaru adalah menyangkut banjir. Sebagian wilayah Pekanbaru bagian Selatan merupakan bagian dari DAS Kampar, antara lain Kecamatan Marpoyan Damai bagian selatan (aliran sungai

Kelulut), Kecamatan Tuah Madani, dan Kelurahan Air Dingin di Kecamatan Bukit Raya. Sumber air di wilayah ini berasal dari wilayah Pekanbaru, tetapi airnya mengalir ke wilayah Kabupaten Kampar yang akhirnya bermuara di Sungai Kapar. Banjir yang terjadi di kawasan perbatasan antara wilayah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar ini sering tidak tertangani dengan baik, karena penanganan di wilayah hilir (Kabupaten Kampar) yang tidak baik, sehingga menyebabkan hambatan dan banjir di wilayah Pekanbaru, seperti yang terjadi di Jl. Cipta Karya Ujung, Perumahan Sidomulyo, Waduk alam di Lapangan Golf PT Surya Dumai (sekarang sudah jadi kebun sawit). Minimnya penanganan di wilayah Kampar yang dekat dengan perbatasan Pekanbaru dan sebaliknya Pekanbaru tidak bisa menanganinya karena berada di wilayah Kampar, maka penanganan kewilayahan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini sangat penting.

Di dalam kebijakan kunci (key policies) RPJPN, Pekanbaru masuk di Pengembangan Koridor Strategis Industri Dumai – Duri – Pekanbaru untuk kluster industri hilirisasi bioproduct, industri hilirisasi sumberdaya mineral, industri mesin, dan industri pengolahan minyak dan gas bumi. Di dalam RPJPN, Pekanbaru juga masuk dalam Pengembangan Kawasan Perkotaan sebagai kutub pertumbuhan (growth pole) dan pusat pengembangan industri berbasis keunggulan wilayah di Pekanbaru, Dumai, dan Rengat.

Di dalam RTRW Provinsi Riau, Pekanbaru masuk di dalam wilayah pengembangan Pekansikawan, sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis perdagangan/jasa, agrobisnis dan agroindustri meliputi Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemukiman di Kota Pekanbaru terus berkembang sampai ke wilayah perbatasannya seperti di Tanah Merah, Pandau, Kualu, Rimbo Panjang, Karya Indah, Minas, dan Sikijang Mati. Permasalahan banjir, sampah, transportasi umum, air bersih, dan infrastruktur jalan pada kawasan perbatasan ini harus dikelola secara bersama oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah perbatasan ini, termasuk juga oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pembentukan semacam lembaga bersama diperlukan dalam hal ini, seperti Pekanbaru Metropolitan Area yang mengurus pelayanan pada perluasan kawasan fungsional Pekanbaru yang melewati batas administrasinya untuk melayani fungsi perkotaan seperti persampahan, transportasi, drainase, dan lainnya kemungkinan bisa dilakukan. Bentuk lainnya

adalah Pengembangan kawasan metropolitan Pekansikawan ataupun Pekanbaru Raya baik sebagai kawasan strategis atau kawasan khusus lainnya.

Sebagai bandar udara pengumpul, bandar udara Sultan Syarif Kasim II di Kota Pekanbaru perlu lebih dioptimalkan. Terbuka juga kemungkinan untuk membangun *Aero City* sebagai kawasan pengembangan baru untuk bandara baru di wilayah atau yang berbatasan dengan Pekanbaru.

Sungai Siak yang melalui Kota Pekanbaru merupakan badan air penerima drainase primer dan anak sungai di Pekanbaru. Di samping menerima limbah air, Sungai Siak merupakan muara limbah domestik, baik cair maupun padat. Karena itu, pengelolaan sampah terkhusus yang kemungkinan masuk di drainase primer dan anak sungai di Pekanbaru perlu dibuatkan semacam perangkat sampah supaya beban pencemaran limbah padat tidak mengotori sungai Siak. Penanganan limbah cair domestik dan industri juga perlu dilakukan dengan IPAL domestik dan industri sehingga tidak lagi mengotori sungai.

Pelabuhan di Kota Pekanbaru sebagai pelabuhan pengumpul (RTRW Provinsi Riau) bisa juga dimanfaatkan secara sinergi dengan jalur tol dan jalan lingkar yang melewati Pekanbaru. Penggunaan kapal pengangkut kontainer yang lebih kecil, lebih rendah, lebih efisien dan lebih rendah resiko terhadap gangguan di sungai (seperti yang terjadi sebelumnya ketika penggunaan kapal besar) bisa masuk sampai ke Pekanbaru melewati sungai Siak dan lebih efisien mengantarkan barang/kontainer ke jalan lintas dan jalan tol Sumatera.

2.7.2.12 Kota Dumai

Berdasarkan sektor PDRB yang menjadi unggulan Kota Dumai yaitu sektor Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi Makan Minuman, Informasi dan Komunikasi, Jasa keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan Jasa Lainnya. Indikator Kesejahteraan di bidang kesehatan, pendidikan, IPM, dan pembangunan gender relatif tinggi, meskipun masih di bawah Pekanbaru.

Kebijakan kunci (*key policies*) pengembangan kewilayahan Riau dalam jangka panjang di dalam RPJPN menyatakan bahwa Dumai masuk ke dalam

Pengembangan Koridor strategis industri Dumai – Duri – Pekanbaru untuk klaster industri hilirisasi *bioproduct*, industri hilirisasi sumberdaya mineral, industri mesin, dan industri pengolahan minyak dan gas bumi. Selain itu, Dumai juga termasuk ke dalam kebijakan Pengembangan Kawasan Perkotaan sebagai kutub pertumbuhan (*growth pole*) dan pusat pengembangan industri berbasis keunggulan wilayah bersama-sama dengan Kota Pekanbaru dan Rengat. Hal ini sejalan dengan RTRW Provinsi Riau dimana Dumai masuk di wilayah pengembangan Durolis sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis sumber daya alam minyak/gas bumi dan kawasan industri terpadu meliputi Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis. Di dalam RTRW juga dinyatakan bahwa Kota Dumai sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) bersama-sama dengan Kota Pekanbaru.

Di dalam RPJPN direncanakan koridor multi-infrastruktur (multi infrastructure corridor) dan infrastruktur logistik kunci (Key Logistics Infrastructure) yang melibatkan Dumai, seperti: Jalan Tol Kisaran – Dumai; Jalan arteri lingkaran barat Kota Dumai; dan *Direct Interconnection* Dumai-Rupat-Malaka. Hal ini sejalan dengan ruas jalan tol yang direncanakan di dalam RTRW Provinsi Riau meliputi ruas jalan tol: Pekanbaru - Kandis – Dumai; Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat. Skema konektivitas jalan tol dan koneksi Dumai – Rupat – Malaka ini harus direncanakan dengan baik supaya pembangunan jaringan jalan baru dan peningkatan/pengembangan jaringan lama yang akan terhubung ke jalan tol bisa efisien dan tepat sasaran khususnya untuk peningkatan layanan transportasi dan logistik.

Penyediaan infrastruktur relatif baik, namun penyediaan air bersih, dan jalan lintas provinsi yang ada di wilayah administratif Dumai ke arah Senaboi (Rokan Hilir) masih belum tuntas. Meskipun produksi sawitnya tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Riau, Dumai adalah tempat bermuaranya banyak TBS (tandan buah segar sawit) dan CPO dari berbagai wilayah di Riau maupun dari Sumatera Utara.

- Dumai adalah muara *bottle neck* untuk semua produk CPO dari PKS di Riau, perbatasan Jambi, Sumbar, dan Sumut. Serta muara TBS sawit karena PKS besar ada di Dumai
- **Jalan Lingkar Kota Dumai menuju kawasan industri:** Lingkar Timur menuju Pelintung dan Lingkar Barat (Parit Kitang) menuju Lubuk Gaung
- Melancarkan aliran di *bottle neck* ini akan meningkatkan kinerja dan efisiensi KI dan Pelabuhan Dumai.



Gambar 2.60 Kondisi Jalan Kota Dumai

Sumber: Hasil Analisis

Dumai merupakan ujung yang menyempit (*bottle neck*) dari semua produk CPO dari PKS di Riau, perbatasan Jambi, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Juga muara dari TBS sawit, karena keberadaan PKS besar yang ada di Dumai. Sementara itu, jalan lingkar Kota Dumai yang menuju kawasan industri yaitu Lingkar timur menuju Pelintung dan Lingkar Barat (Parit Kitang) menuju Lubuk Gaung masih belum tersedia. Upaya untuk melancarkan aliran di *bottle neck* ini akan meningkatkan kinerja dan efisiensi kawasan industri dan Pelabuhan Dumai. Konektivitas jalan Provinsi di Dumai juga masih menyisakan ruas jalan Dumai – Lubuk Gaung – Sinaboi sepanjang 51 km yang masih berupa jalan tanah.

Di dalam RPJPN, jaringan perkeretaapian yang melingkupi Dumai adalah Jaringan kereta api Rantau Prapat – Kota Pinang – Dumai – Pekanbaru, sesuai dengan jaringan kereta api yang direncanakan di dalam RTRW Provinsi Riau yang meliputi jalur Rantau Prapat – Duri – Dumai. Di samping mengangkut penumpang dan barang, kereta api ini juga diharapkan bisa mengangkut hasil bumi seperti kelapa sawit dan lainnya.

Di dalam RPJPN Rencana Transportasi Udara di Dumai meliputi Peningkatan Bandara Pinang Kampai (Dumai) dan Pengembangan bandara regional

Pekanbaru – Duri Dumai. Hal ini sejalan dengan rencana di dalam RTRW Provinsi Riau dimana bandar udara Pinang Kampai di Kota Dumai dijadikan bandar udara pengumpan (setingkat di bawah bandara udara pengumpul SSK II).

Di dalam RPJPN direncanakan pengembangan kepelabuhanan yang meliputi Peningkatan Pelabuhan Dumai. Hal ini sejalan dengan rencana sistem jaringan transportasi laut di dalam RTRW Provinsi Riau dimana Pelabuhan Dumai sebagai Pelabuhan Utama dengan hirarki paling tinggi di Riau. Untuk mengantisipasi perkembangan angkutan laut yang semakin besar volumenya di Selat Malaka dan menarik sebanyak mungkin kapal untuk bersandar di pelabuhan, maka perlu direncanakan untuk mencari pelabuhan alternatif lain di sisi timur Dumai (wilayah Kabupaten Bengkalis), untuk dijadikan pelabuhan dengan akses yang lebih baik dari Selat Malaka sesuai kemudahan alur pelayaran yang langsung.

Perkembangan Dumai sebagai kawasan perkotaan harus didukung oleh transportasi publik perkotaan yang handal (RPJPN) melalui optimalisasi, integrasi, dan peningkatan layanan sistem transportasi publik di Kawasan Perkotaan Dumai. Skema BRT yang menghubungkan barat timur dan utara selatan perlu dipersiapkan.

Kesejahteraan di bidang kesehatan, pendidikan, IPM, dan pembangunan gender relatif tinggi, meskipun masih di bawah Pekanbaru. Demikian pula halnya dengan penyediaan infrastruktur relatif baik. Penyediaan air bersih di Kota Dumai, termasuk dalam skema SPAM Durolis yang meliputi wilayah Dumai, Rokan Hilir dan Bengkalis.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



Permasalahan pembangunan adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional.

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai saat ini dengan rencana atau standar yang ada, serta apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan kondisi riil yang terjadi saat ini. Gap yang terjadi dipengaruhi faktor penyebab, baik faktor yang mendorong keberhasilan maupun kegagalan, yang harus dilakukan analisis dalam rangka menyusun

perencanaan selanjutnya. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum daerah Provinsi Riau yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025. Permasalahan pembangunan daerah Provinsi Riau yang masih relevan dalam dua puluh tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul dan Sejahtera

1. Akses pendidikan yang terbatas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur pendidikan terutama di daerah terpencil dan pedalaman, seperti sekolah, ruang kelas, dan fasilitas belajar; Alokasi sumber daya manusia yang kurang memadai seringkali menjadi hambatan dalam peningkatan akses dan kualitas Pendidikan; Kondisi geografis yang cukup kompleks dengan banyak pulau dan daerah pedalaman, yang membuat akses pendidikan menjadi sulit bagi masyarakat lokal, terutama anak-anak di daerah terpencil; Kondisi ekonomi yang kurang stabil mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, terutama bagi keluarga dengan pendapatan rendah.
2. Masih rendahnya mutu pendidikan. Hal disebabkan oleh kesulitan dalam mendapatkan dan mempertahankan tenaga pendidik yang berkualifikasi dan berpengalaman di daerah-daerah terpencil, dan sering menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas Pendidikan; Kurangnya tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran di sekolah; Kurikulum pendidikan yang tidak responsif terhadap kebutuhan dan realitas lokal bisa mengurangi relevansi dan efektivitas pendidikan serta tidak berkelanjutan.
3. Mutu dan akses layanan masyarakat ke fasilitas kesehatan.
 - a. Ketersediaan sumber daya manusia layanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit belum terpenuhi/merata. Hal ini disebabkan karena:
 - Terbatasnya akses ke pelatihan dan pendidikan yang berkualitas terhadap pengembangan keterampilan dan pengetahuan SDM kesehatan.

- Puskesmas dan Rumah Sakit yang berlokasi di daerah terpencil menyebabkan kesulitan dalam menarik dan mempertahankan SDM yang berkualitas.
 - Permintaan SDM kesehatan melebihi penawaran, atau sebaliknya, yang dapat menyebabkan ketidakmerataan distribusi SDM.
 - Kurangnya insentif dan kondisi kerja yang tidak memadai juga menjadi faktor yang mempengaruhi SDM untuk bekerja di Puskesmas atau Rumah Sakit.
 - Kurangnya perencanaan strategis dan kebijakan yang mendukung dapat mempengaruhi ketersediaan dan distribusi SDM di fasilitas kesehatan.
- b. Kepesertaan jaminan layanan kesehatan belum universal merupakan tantangan dalam sistem kesehatan. *Universal Health Coverage (UHC)* atau cakupan kesehatan universal bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan keuangan. Namun belum terwujud sepenuhnya disebabkan oleh:
- Banyak individu mungkin tidak menyadari pentingnya memiliki jaminan kesehatan atau tidak memahami cara mendapatkan akses ke program jaminan kesehatan yang ada.
 - Sebagian masyarakat, membayar premi jaminan kesehatan bisa menjadi beban finansial yang berat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
 - Proses administrasi yang rumit serta kurangnya informasi yang jelas mengenai program jaminan kesehatan dapat menjadi hambatan bagi individu untuk bergabung.
 - Rendahnya akses terutama kelompok masyarakat miskin dan disabilitas menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses program jaminan kesehatan.
4. Belum adanya mitigasi penanganan terhadap wabah penyakit yang berpotensi pandemi. Terdapat beberapa penyakit yang belum dicover pembiayaannya dan lama pelayanannya (ex. wabah, dan lain-lain). Beberapa

- penyakit yang dapat menyebar dengan cepat dan berpotensi menjadi pandemi termasuk virus dan penyakit menular lainnya.
5. Permasalahan gizi merupakan isu kesehatan publik yang mempengaruhi kualitas hidup individu, produktivitas, dan perkembangan ekonomi suatu negara. Masalah gizi dapat mencakup kekurangan gizi (*undernutrition*) dan kelebihan gizi (*overnutrition*), serta defisiensi zat gizi tertentu yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal.
 6. Masih rendahnya pelayanan dan perlindungan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas kerja dari petugas PPKS dalam menyediakan layanan yang responsif dan komprehensif kepada masyarakat yang membutuhkan.
 7. Belum terpenuhinya hak penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal tersebut terutama untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik.
 8. Masih terdapat daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, dibandingkan dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya. Daerah-daerah dengan kondisi geografis dan topografi yang sulit atau terpencil seringkali menghadapi kendala dalam aksesibilitas, distribusi sumber daya, dan peluang ekonomi, yang dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi.
 9. Belum optimalnya perlindungan ketenagakerjaan antara lain perlindungan ketenagakerjaan yang efektif untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, seperti hak atas upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta jaminan sosial. Kondisi ini dapat disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran ketenagakerjaan menyebabkan banyak perusahaan atau pemberi kerja yang tidak mematuhi standar ketenagakerjaan yang berlaku. Keterbatasan akses informasi mengenai hak-hak ketenagakerjaan dan mekanisme perlindungan yang tersedia dapat mengurangi kesadaran dan pemahaman pekerja tentang hak-hak mereka.
 10. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Riau dari tahun 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan penurunan. Artinya, tingkat ketimpangan gender di Provinsi semakin rendah (Kesetaraan gender semakin tinggi). Rentang capaian IKG Provinsi Riau pada rentang menengah-atas. Penurunan nilai

IKG di tahun 2022 dikarenakan penurunan Proporsi perempuan berusia 15-49 tahun pernah kawin yang Melahirkan Tidak di Faskes (MTF).

11. Masih rendahnya Tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Riau (64 persen). Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan dalam akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang mempersiapkan individu untuk pekerjaan yang tersedia di daerah tersebut; Ekonomi daerah tergantung pada sektor-sektor tertentu yang mungkin kurang padat karya, ini dapat mempengaruhi kesempatan pekerjaan yang tersedia; Keterbatasan infrastruktur seperti transportasi, jaringan listrik, atau akses ke teknologi informasi dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan sektor-sektor yang lebih inklusif; Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, dan perubahan iklim investasi dapat mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja. Selain itu, lulusan di Provinsi Riau masih didominasi lulusan SMK yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan yang diperoleh dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri dan sektor lainnya di daerah tersebut.
12. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda (tahun 2022 sebesar 52,17). Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) mencerminkan kualitas hidup dan kesejahteraan pemuda dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, partisipasi, dan lingkungan sosial.
13. Kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi usia remaja. Kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi di kalangan remaja sehingga mempengaruhi kesejahteraan dan masa depan generasi muda. Pemahaman yang kurang atau salah tentang kesehatan reproduksi dapat menyebabkan berbagai risiko kesehatan, termasuk kehamilan tidak diinginkan, penyebaran penyakit menular seksual (PMS), dan masalah kesehatan reproduksi lainnya. Selain itu, pemahaman yang buruk tentang kesehatan reproduksi juga dapat mempengaruhi keputusan remaja terkait hubungan interpersonal, keterlibatan seksual, dan kehidupan keluarga.

3.1.2. Belum Optimalnya Pengembangan Nilai Tambah Ekonomi Yang Produktif

1. Permasalahan bidang pertanian meliputi sub sektor tanaman pangan, peternakan dan perkebunan. Secara umum sarana dan prasarana

penunjang pertanian serta penerapan inovasi dan teknologi pertanian belum optimal. Produktivitas perkebunan rakyat juga masih relatif rendah. Lebih detail permasalahan lingkup pertanian adalah sebagai berikut:

- a) Terjadi penurunan luas lahan pertanian akibat Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian seperti perumahan, industri, atau infrastruktur dapat menyebabkan penurunan luas lahan pertanian;
- b) Rendahnya produktivitas pertanian akibat belum optimalnya penerapan Inovasi dan Teknologi Budidaya Pertanian sehingga efisiensi produksi, kerugian hasil, dan kualitas produk yang rendah. Hal ini disebabkan oleh:
 - Terbatasnya program pendidikan dan pelatihan bagi petani tentang teknik budidaya modern dan penerapan teknologi pertanian.
 - Rendahnya akses informasi, penelitian, dan teknologi terbaru melalui penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
 - Rendahnya akses pembiayaan yang terjangkau dan subsidi untuk petani yang ingin mengadopsi teknologi pertanian.
 - Terbatasnya infrastruktur yang mendukung penerapan teknologi pertanian, seperti jaringan irigasi, pusat penelitian, dan pasar yang modern.
 - Kurangnya kebijakan yang mendukung inovasi dan teknologi pertanian melalui insentif fiskal, regulasi yang kondusif, dan kerjasama antar sektor.
 - Terbatasnya kemitraan antara pemerintah, organisasi pertanian, sektor swasta, dan lembaga penelitian untuk mempromosikan inovasi dan teknologi budidaya pertanian.
- c) Tata niaga pertanian masih belum optimal, termasuk harga di tingkat petani yang masih rendah dan hal ini disebabkan oleh:
 - Rantai pasokan perantara antara petani dan konsumen membuat harga komoditas pertanian menjadi mahal bagi konsumen sementara petani mendapatkan harga yang rendah.

- Kurangnya Akses Pasar yang lebih luas dan mendapatkan informasi harga yang akurat.
 - Infrastruktur penyimpanan, transportasi, dan distribusi yang kurang memadai mengakibatkan kerugian hasil dan kualitas produk.
 - Kurangnya pengetahuan tentang manajemen bisnis dan pemasaran dalam tata niaga pertanian.
 - Fluktuasi harga, permintaan yang tidak stabil, dan risiko lain yang melekat dalam pasar pertanian.
- d) Terdapat kebun dalam kawasan hutan. Kondisi kebun dalam kawasan hutan ini tidak saja menjadi kendala dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas, akan tetapi merugikan negara dalam hal hilangnya potensi penerimaan negara. Hal ini disebabkan oleh:
- Kebutuhan ekonomi masyarakat lokal, yang melakukan aktifitas ekonomi pada sektor pertanian atau perkebunan secara turun temurun pada kawasan hutan, dan mengkonversi hutan menjadi kebun untuk memperoleh pendapatan dari hasil pertanian atau perkebunan.
 - Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari pihak berwenang dalam mencegah dan mengatasi illegal dan perambahan hutan untuk kebun.
 - Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi hutan dan dampak negatif dari konversi hutan menjadi kebun.
 - Terbatasnya akses masyarakat terhadap lahan pertanian yang produktif menyebabkan mereka beralih ke kawasan hutan untuk membuka lahan baru.

Hal tersebut akan berdampak pada kehilangan potensi pendapatan negara dari sumber daya alam yang seharusnya dikelola secara berkelanjutan melalui konservasi hutan; kerusakan lingkungan akibat deforestasi, erosi tanah, serta penurunan kualitas air dan tanah; pengurangan keanekaragaman hayati yang berdampak pada ekosistem dan habitat alami; dan potensi konflik antara masyarakat lokal, pihak

berwenang, dan pemilik kebun yang mengklaim hak atas tanah tersebut.

- e) Sumber Daya Manusia (SDM) pasca panen dalam peningkatan mutu produk dan penerapan teknologi pengolahan yang baik dan benar (*Good Manufacturing Practices/GMP*) masih kurang dan kapasitas belum memadai.

2. Kelautan dan Perikanan

Terjadi penurunan produksi perikanan selama 5 tahun terakhir akibat harga pakan masih tinggi; terbatasnya ketersediaan benih bermutu tinggi dan tidak tersedianya indukan; sumber daya ikan yang semakin terbatas pada zona penangkapan di bawah 4 mil, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan belum optimal; masih tingginya kasus *illegal, unregulated, unreported (IUU) fishing* dan *destructive fishing*.

3. Pariwisata

- a) Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Riau mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dampak pandemi Covid-19 dimana tahun 2018 sebanyak 146.935 jiwa sedangkan pada tahun 2023 hanya sebanyak 49.921 jiwa. Sementara itu, wisatawan mancanegara berdasarkan perhitungan *Mobile Positioning Data (MPD)* dalam enam tahun terakhir meningkat sebesar 70,93% per tahun. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang dihitung melalui MPD dibanding dengan wisatawan dari 4 pintu masuk dikarenakan oleh pendeteksian perangkat komunikasi wisatawan yang bisa terhitung lebih dari satu kali.

- b) Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara (domestik) sebesar -4,47% pertahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir, hal ini menandakan bahwa destinasi, objek dan event wisata belum memberikan kenyamanan untuk berwisata.

- c) Objek wisata di Kabupaten/Kota terdiri dari objek wisata alam, budaya dan buatan yang masih dibutuhkan peningkatan akses dan prasarana wisata.

4. Kontribusi sektor ekonomi di Provinsi Riau didominasi oleh produk pertanian khususnya komoditi Perkebunan kelapa sawit, hal ini tergambar dari kontribusi PDRB terbesar pada sektor pertanian dan industri

pengolahan khususnya industri makanan dan minuman. Industri komoditi tersebut pada saat ini belum memberikan nilai tambah yang maksimal bagi perekonomian daerah.

3.1.3. Belum Optimalnya Tatakelola Pemerintahan Yang Berintegritas dan Adaptif

1. Kinerja Pelayanan Publik
 - a) Belum optimalnya pelayanan publik berbasis digital.
 - b) Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal.
 - c) Masih banyak data data penduduk yang belum padan untuk data kependudukan khususnya penduduk miskin.
2. Tata Kelola Pemerintahan
 - a) Belum optimalnya penyelenggaraan dan manajemen pemerintahan berbasis elektronik
 - b) Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih rendah.
 - c) Masih belum optimalnya implementasi manajemen ASN.
 - d) Belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, baik dari sisi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah sebagai upaya percepatan perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - e) Masih belum optimalnya upaya penyusunan kebijakan dan pengordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas purnagkat daerah serta pelayanan administratif yang diberikan oleh komponen Sekretariat Daerah.
 - f) Implementasi sistem MERIT dalam manajemen ASN belum optimal.
 - g) Pelayanan administrasi kepegawaian belum sepenuhnya terintegrasi dan memanfaatkan teknologi informasi.
 - h) Belum optimalnya pemetaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi ASN yang berkelas dunia.
 - i) Tingkat partisipasi ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan masih rendah.
 - j) Kelembagaan masih rendah sehingga mempengaruhi pelaksanaan pelatihan dan kompetensi.

- k) Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah dari kelompok pajak daerah pada komponen PKB, BBNKB dan PBB KB.
3. Pendapatan yang bersumber dari dana transfer mengalami penurunan sebesar 6,74% per tahun, paling tinggi pada kelompok dana bagi hasil pajak SDA dan dana alokasi umum.

3.1.4. Masih Tingginya Pengaruh Ekonomi Global Dan Regional

1. Produksi pangan strategis di Provinsi Riau masih rendah, banyak mendatangkan pangan dari daerah dan negara lain. Hal ini menyebabkan kerentanan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pangan di pasar.
2. Fluktuasi harga minyak di pasar dunia memberikan pengaruh terhadap perekonomian Indonesia, khususnya harga minyak di Indonesia. Harga minyak dapat mempengaruhi naik/turunnya pertumbuhan ekonomi, baik itu ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, jumlah uang beredar, nilai tukar riil rupiah terhadap dolar amerika dan suku bunga.

3.1.5. Masih Tinggi Ketimpangan Pembangunan Wilayah

1. Investasi di Provinsi Riau masih terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu seperti di Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Dukungan infrastruktur dibutuhkan untuk membangun konektivitas antar wilayah yang memiliki potensi investasi di Kawasan Duri-Dumai, Kabupaten Siak dan daerah lainnya.
2. Belum optimalnya Program Desa Inklusi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pendidikan masyarakat dan pihak-pihak terkait belum sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat dari Program Desa Inklusi; dan keterbatasan sumber daya yang memadai, seperti pendanaan, pelatihan, dan tenaga ahli untuk implementasi dan monitoring.
3. Potensi Desa belum menjadi sumber pendapatan bagi kesejahteraan desa dalam Branding Desa. Hal terjadi karena belum tersusunnya potensi desa dengan baik seperti potensi alam, budaya, pariwisata, pertanian, kerajinan, atau sumber daya lain yang dapat dikembangkan; Belum adanya branding desa atau identitas merek desa yang mencerminkan nilai-nilai, keunikan, dan kekayaan potensi desa dengan pembuatan logo, slogan, dan materi

pemasaran lainnya yang menarik; belum optimalnya pengelolaan dan pemasaran potensi desa.

4. Ketimpangan dan kesenjangan antar daerah masih tinggi. Hal ini terjadi disebabkan oleh masih kurangnya pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih di daerah-daerah yang tertinggal dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar daerah; terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas di daerah-daerah terpencil dan tertinggal sehingga mengalami hambatan dalam percepatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan ekonomi Masyarakat.

3.1.6. Belum Optimalnya Penyediaan, Konektivitas Transportasi dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

1. Provinsi Riau memiliki posisi strategis dalam konstelasi global maupun nasional. Provinsi Riau belum secara menyeluruh menghubungkan antar pulau dan wilayah, sehingga perlu penguatan konektivitas yang memuat yaitu optimalisasi pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan, integrasi moda dalam konsep inter-moda *supply chain system* yang menghubungkan *hinterland* dengan pusat-pusat pertumbuhan, dan pertumbuhan inklusif yang harus menyentuh semua lini dan dilakukan secara komprehensif.
2. Angkutan barang di Provinsi Riau banyak didominasi oleh angkutan hasil sumber daya alam, seperti TBS (Tandan Buah Segar) Sawit, CPO (*Crude Palm Oil*), batubara dan kayu untuk industri *Pulp and Paper*. Angkutan barang ini banyak yang melebihi ukuran dan berat yang standar sehingga menyebabkan kerusakan jalan lebih cepat dari biasanya. Karena itu pemeliharaan jalan dan pengaturan pembatasan angkutan *Over Dimension Over Load (ODOL)* menjadi prioritas.
3. Aksesibilitas
 - a) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan nadi bagi mobilitas masyarakat. Persentase jalan provinsi mantap tahun 2023 secara agregat sebesar 66,64% sedangkan kondisi tidak mantap

sebesar 33,36%. Tingkat kemantapan Jalan Provinsi tahun 2023 masih dibawah rata-rata kemantapan jalan provinsi secara nasional yang mencapai 70%.

- b) Kinerja program penyelenggaraan jalan provinsi baik pembangunan maupun preservasi masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan panjang tiap jenis permukaan jalan, jenis permukaan beraspal urutan tertinggi pada Kota Pekanbaru sebesar 79,73%, Kabupaten Kampar sebesar 76,80%, dan Kabupaten Siak sebesar 74,85%. Sedangkan jenis permukaan jalan kerikil/tanah/belum tembus urutan tertinggi yaitu di Kota Dumai sebesar 35,98%, Kabupaten Pelalawan sebesar 32,74%, dan Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 30,23%.

4. Sarana dan Prasarana Dasar

- a) Pembangunan air minum di Indonesia adalah akses universal, dimana diharapkan seluruh rumah tangga di Indonesia mempunyai akses terhadap sumber air minum layak. Pemerintah tidak lagi menggunakan akses terhadap sumber air minum layak sebagai target pembangunan air minum, melainkan bergeser menjadi akses terhadap sumber air minum aman, dengan target 100% pada Tahun 2045.
- b) Ruang lingkup air minum aman adalah air yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan). Untuk aspek kualitas, air minum tergolong aman bila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Sumber air minum yang dapat memenuhi keempat aspek tersebut adalah air leding.
- c) Dengan kondisi persentase rumah tangga yang menggunakan leding sebagai sumber utama air minum di Provinsi Riau baru 2,72% pada Tahun 2022, maka target 100% rumah tangga mempunyai akses sumber air minum aman pada Tahun 2045 membutuhkan upaya yang sangat besar. Hal ini disebabkan rendahnya kualitas air baku yang bersumber dari Sungai-sungai yang ada di wilayah di Provinsi Riau. Kualitas air baku tersebut diperkirakan akan terus menurun akibat menurunnya kondisi wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mencakup Provinsi Riau. Selain itu, faktor lain yang menjadi

tantangan dalam upaya peningkatan akses terhadap sumber air minum aman adalah luasnya wilayah Provinsi Riau, serta tersebarinya lokasi-lokasi permukiman yang akan menjadi target layanan air minum perpipaan sehingga perlu dilakukan pembangunan SPAM baru atau peningkatan jaringan layanan SPAM yang lebih luas, dimana keduanya membutuhkan investasi yang besar.

- d) Masih terbatasnya sarana sanitasi yang berkualitas, rendahnya akses sanitasi aman di Provinsi Riau disebabkan oleh luasnya pemukiman yang berada di pinggir sungai sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan limbah, dari pada harus mengeluarkan biaya untuk membangun sarana sanitasi yang layak atau aman.

3.1.7. Adanya Potensi Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

1. Lingkungan hidup

Permasalahan di bidang lingkungan hidup adalah masih tingginya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan tingginya emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup antara lain disebabkan karena degradasi hutan dan lahan gambut, potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan masih ada.
- b) Rendahnya akses masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan.
- c) Terbatasnya program edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan cara-cara berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam
- d) Aktivitas domestik dan industri Limbah industri dan domestik tanpa pengolahan yang memadai menyebabkan pencemaran air, mengancam keanekaragaman hayati air dan mengurangi ketersediaan sumber air bersih

2. Abrasi

Abrasi di Provinsi Riau sepanjang 167 km pada tiga pulau terluar perbatasan dengan Malaysia (Pulau Bengkalis, Pulau Rupat, Pulau

Rangsang dan Pulau Jemur) terjadi akibat degradasi dan deforestasi hutan mangrove untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Berkurangnya luas daratan akibat abrasi merupakan isu geopolitik karena berkurangnya batas negara, apalagi Negara tetangga (Malaysia) melakukan reklamasi. Beberapa permasalahan abrasi di Provinsi Riau khususnya di Pulau-Pulau terluar yaitu kerusakan Gambut dan Mangrove, Gelombang dan arus laut yang besar dari Selat Malaka, Mundurnya Garis Pantai akan mempengaruhi seperti sumber daya alam pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), hilangnya mata pencaharian masyarakat, Infrastruktur jalan, rumah, fasum dan fasos terancam rusak, dan pendangkalan alur sungai dan laut sekitar pelabuhan mengganggu aktivitas pelayaran.

3.1.8. Kurang Pengamalan Budaya Dalam Kehidupan Bermasyarakat

1. Belum optimalnya internalisasi budaya melayu di lingkungan Masyarakat. Internalisasi budaya merupakan proses di mana suatu kelompok masyarakat mengadopsi dan menginternalisasi nilai-nilai, norma, tradisi, serta identitas budaya sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari Masyarakat. Ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan belum optimalnya internalisasi budaya Melayu di lingkungan masyarakat, antara lain:
 - a) Pesatnya kemajuan teknologi dan media massa, pengaruh budaya asing dapat dengan mudah masuk dan mendominasi sehingga menggeser atau mengaburkan budaya lokal, termasuk budaya Melayu.
 - b) Dalam proses modernisasi, masyarakat cenderung lebih tertarik dengan hal-hal yang baru dan modern, sehingga kurang memperhatikan atau menghargai warisan budaya tradisional mereka.
 - c) Kurikulum pendidikan yang kurang memasukkan materi atau pengajaran tentang budaya Melayu juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi.
 - d) Masyarakat mungkin kurang memiliki kesadaran dan apresiasi terhadap pentingnya melestarikan dan menghargai budaya Melayu sebagai bagian dari identitas nasional mereka.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi yang dampaknya signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa depan. Suatu kondisi/kejadian penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui pengumpulan dan analisis informasi, termasuk analisis kebijakan terhadap entitas pemerintahan di atasnya. Isu strategis daerah Provinsi Riau diidentifikasi dengan mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, maupun daerah), dan potensi yang dimiliki Provinsi Riau yang relevan dan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan. Isu strategis daerah Provinsi Riau dua puluh tahun ke depan sebagai berikut.

3.2.1 Isu Strategis Global

1. Provinsi Riau berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I) untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia. Selat Malaka berada di pesisir utara Provinsi Riau yang merupakan jalur maritim kapal dunia yang dapat memberikan kesempatan bagi Riau untuk membangun jalur-jalur logistik yang dapat menjangkau pasar global yang lebih luas.
2. Pertumbuhan ekonomi China melambat ke 5,2 persen (yoy) pada 2023 dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi pra pandemi. Sektor properti China yang lemah mengurangi permintaan impor China.
3. Perang Rusia – Ukraina serta konflik di Timur Tengah masih berlangsung, berpotensi memberikan tekanan pada harga komoditas yang berdampak pada potensi inflasi.
4. Inggris dan Jerman mengalami resesi. Kebijakan moneter Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris untuk mempertahankan suku bunga kebijakan memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi meskipun inflasi mengalami perlambatan.

5. Krisis energi tahun 2022 memberikan tekanan untuk penggunaan energi fosil Kembali melalui reaktivasi PLTU batu bara, menjadikan negara-negara semakin jauh dari target Target Nol Emisi Karbon dan sasaran emisi tahun 2030.
6. Telah dilaunchingnya produk pengganti minyak kelapa sawit. Apabila produk pengganti tersebut sudah dapat meningkatkan efisiensi biaya, kepercayaan konsumen, keamanan pangan dan produksi dalam jangka waktu menengah maupun jangka panjang, produk pengganti minyak kelapa sawit menjadi salah satu tantangan besar bagi industri sawit di Riau.
7. Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati yang termasuk tiga krisis secara global (*global-the triple planetary crisis*) diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

1. Ekonomi Indonesia tahun 2023 tetap solid berada di atas 5 persen. Ekonomi Indonesia masuk ke jajaran 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dengan kondisi di tengah ketidakpastian global yang terus terjadi, perekonomian nasional tetap terjaga, salah satunya karena permintaan domestik yang tetap kuat dan juga berlanjutnya pertumbuhan dan peningkatan investasi tumbuh sebesar 4,40 persen yang ditopang oleh Pembangunan infrastruktur dan meningkatnya aktivitas penanaman modal.
2. Sebagian besar subsektor industri pengolahan mampu tumbuh positif. Subsektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Lima besar kontributor PDB adalah industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik, industri alat angkutan, serta industri tekstil dan pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa industri industri pengolahan punya peran penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Industri mampu bertahan di zona ekspansi.

Industri Pengolahan masih terus bertahan di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi global. Hal ini tampak pada Indeks Kepercayaan Industri terus mengalami peningkatan hingga Juni 2024. Adapun ekspansi yang tinggi pada industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki didorong oleh peningkatan pesanan baru yang cukup signifikan yaitu 3,21 poin dan penyerapan persediaan yang meningkat.

4. Investasi pemerintah dan swasta meningkat.

Upaya peningkatan pemerintah dan swasta di daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pengembangan potensi investasi daerah (*regional champions*) sesuai dengan sektor unggulan dan mendorong daerah untuk meningkatkan kesiapan dalam menarik investasi.
- b. Promosi investasi di daerah, untuk mendorong *investor awareness and willingness*, yang antara lain melalui gelar promosi investasi daerah.
- c. Pemberian insentif investasi di daerah, sesuai dengan kewenangan daerah terutama untuk UKM.
- d. Pengembangan mekanisme konsultasi pemerintah dan pelaku bisnis (terutama UKM).

5. Kinerja Produk Domestik Bruto (PDB) didukung peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.

Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara mencerminkan pulihnya sektor pariwisata, sementara devisa pariwisata yang meningkat menandakan kontribusi ekonomi yang signifikan. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan dampak positif, didukung oleh peningkatan tenaga kerja yang semakin kuat. Kinerja investasi pariwisata dan ekspor ekonomi kreatif menunjukkan kepercayaan dan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan,

6. Penyaluran kredit tumbuh positif

Hasil survei menunjukkan responden tetap optimis terhadap pertumbuhan kredit ke depan. Responden memprakirakan *outstanding* kredit sampai dengan akhir tahun 2024 terus tumbuh. Optimisme tersebut antara lain didorong oleh prospek kondisi moneter dan ekonomi serta relatif terjaganya risiko dalam penyaluran kredit.

Long List Isu Strategis yang terkait kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Riau dapat diidentifikasi pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Long List Isu Strategis Provinsi Riau Tahun 2025-2045

| Aspek Pembangunan | Fokus | Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Riau |
|--|---|--|
| Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar | Pendidikan | Menjamin semua individu memiliki akses pendidikan yang setara dan inklusif Keseimbangan Kualitas pendidikan Kesiapan Kerja |
| | Kesehatan | Kesadaran masyarakat dengan Perilaku PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) Kualitas dan pemerataan pelayanan Kesehatan yang berbasis teknologi |
| | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan kondisi jalan mantap di Provinsi Riau; Peningkatan Konektivitas dan aksesibilitas jalan di Provinsi Riau Pulau Terluar dan Daerah Perbatasan; |
| | | Peningkatan perlindungan pantai dan sungai Penyediaan layanan air minum perpipaan untuk masyarakat Peningkatan akses sanitasi aman dan bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Pengembangan pengelolaan persampahan <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> (3R) dengan melibatkan berbagai pihak Penyimpangan pemanfaatan pola ruang yang berakibat konflik antar sektor |
| | Perumahan dan Kawasan Permukiman | Pemenuhan akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Penanganan Kawasan Kumuh secara Terpadu |
| | Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat | Mitigasi dan penanganan pasca bencana Penguatan SDM perlindungan masyarakat |
| | Sosial | Peningkatan Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penguatan Rehabilitasi Sosial dalam rangka pelayanan dan pengembalian fungsi sosial khususnya kelompok lanjut usia dan disabilitas Pemenuhan hak dasar pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin |

| Aspek Pembangunan | Fokus | Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Riau |
|--|---|--|
| | | <p>Pemenuhan hak penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas</p> <p>Optimalisasi implementasinya dan Sarana prasarana SPM yang belum memenuhi standar</p> |
| Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | <p>Kualitas SDM yang mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja yang responsif gender.</p> <p>Peningkatan produktifitas tenaga kerja dan Perluasan akses Kesempatan Kerja yang responsif gender.</p> <p>Peningkatan SDM bagi Perempuan untuk kesetaraan Gender.</p> <p>Kesempatan kerja disabilitas pada sektor formal</p> |
| | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <p>Ketimpangan gender dalam Pembangunan.</p> <p>Perlindungan Anak.</p> |
| | Pangan | <p>Ketahanan dan Keamanan pangan daerah.</p> |
| | Pertanahan | <p>Konflik dan sengketa kepemilikan tanah</p> |
| | Lingkungan Hidup | <p>Tingginya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup</p> |
| | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | <p>Pengembangan Ekonomi kawasan perdesaan</p> <p>Kemandirian Desa yang berkelanjutan</p> <p>Pengendalian penduduk</p> |
| | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | <p>E-government dan digitalisasi administrasi kependudukan dan pelayanan.</p> |
| | Perhubungan | <p>Integrasi antarmoda, transportasi darat, laut dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas orang yang memenuhi aspek pelayanan yang aman, nyaman, cepat dan berkeselamatan</p> <p>Penyediaan sarana dan prasarana penyeberangan orang dan barang</p> |
| | Komunikasi dan Informatika | <p>Transformasi Digital</p> |
| | Statistik | <p>Satu Data Indonesia</p> |
| | Persandian | <p>Keamanan Siber</p> |
| | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | <p>Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai penopang ekonomi masyarakat, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan</p> |
| | Penanaman Modal | <p>Peningkatan investasi yang diimbangi dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk komoditi unggulan serta peningkatan serapan tenaga kerja lokal</p> |

| Aspek Pembangunan | Fokus | Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Riau |
|--------------------------------------|---|--|
| | Kepemudaan dan Olahraga | Keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan Budaya olahraga untuk pola hidup sehat masyarakat |
| | Statistik | Peningkatan kerjasama dan sinergitas yang terintegrasi antar perangkat daerah, baik Provinsi maupun pusat dalam penguatan penyelenggaraan statistik sektoral |
| | Persandian | Peningkatan penerapan strategi dan standarisasi keamanan siber yang meliputi: tata kelola, manajemen resiko, dan kebijakan keamanan siber |
| | Kebudayaan | Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan. |
| | | Pengembangan teknologi kebudayaan digital dalam pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan |
| | Perpustakaan | Layanan perpustakaan berbasis transformasi digital yang responsif gender |
| | Kearsipan | Pengelolaan digitalisasi dan e-arsip |
| Urusan Pemerintahan Pilihan | Kelautan dan Perikanan | Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan |
| | | Pengendalian dan Pengawasan kelautan dan perikanan |
| | | Peningkatan nilai tambah melalui Hilirisasi Produk perikanan |
| | Pariwisata | Optimalisasi destinasi dan event wisata dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan dan rata-rata lama tinggal wisatawan |
| | Pertanian | Peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas pertanian |
| | | Tataniaga Komoditas Pertanian |
| | | Produksi Daging Ruminansia Lokal |
| | Kehutanan | Peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengelolaan Hutan dan lahan |
| Energi dan Sumberdaya Mineral | Pengembangan Infrastruktur ketenagalistrikan dengan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) | |
| | Pengendalian dan pengawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan | |
| Perdagangan | Efisiensi tataniaga dan pengembangan pangsa pasar komoditas berbasis sumber daya lokal | |

| Aspek Pembangunan | Fokus | Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Riau |
|-------------------|---------------------------------|---|
| | | Pusat Perdagangan secara terpadu |
| | Perindustrian | Pengembangan Kawasan Industri dan hilirisasi komoditi unggulan berbasis sumber daya lokal serta Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang berdaya saing |
| | Transmigrasi | Pengembangan ekonomi lokal dan integrasi sosial budaya pada kawasan transmigrasi |
| | Kepegawaian | ASN Profesional. |
| | Pendidikan dan Pelatihan | Pengembangan Kompetensi ASN yang inovatif |
| | Keuangan | Kemandirian Fiskal |
| | Sekretariat Daerah | Perumusan kebijakan strategis daerah yang berkualitas |
| | Pengawasan | Penguatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan daerah |
| | Pemerintahan Umum | Persatuan, kerukunan dan stabilitas daerah |

Sumber : Hasil Analisis

Dari Tabel 3.1 *Long list* Isu strategis tersebut kemudian dilakukan perumusan kembali dan pengelompokan isu-isu strategis yang memiliki kesamaan sehingga diperoleh 19 isu Strategis Daerah, seperti yang termuat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Short List Isu Strategis Provinsi Riau Tahun 2025-2045

| No | Isu Strategis Jangka Panjang Provinsi Riau |
|----|---|
| 1 | Menjamin semua individu memiliki akses dan kualitas pendidikan yang inklusif |
| 2 | Kualitas dan pemerataan layanan Kesehatan serta pembudayaan masyarakat dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) |
| 3 | Peningkatan Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) |
| 4 | Peningkatan produktifitas tenaga kerja dan Perluasan akses Kesempatan Kerja yang responsif gender |
| 5 | Kemandirian, Keamanan dan ketahanan pangan daerah |
| 6 | Peningkatan investasi yang diimbangi dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk komoditi unggulan serta peningkatan serapan tenaga kerja lokal |
| 7 | Optimalisasi destinasi dan event wisata dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan dan rata-rata lama tinggal wisatawan |
| 8 | Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai penopang ekonomi masyarakat, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan |
| 9 | Kemandirian Desa yang berkelanjutan dan Inklusi |
| 10 | Pembangunan Kota yang Maju, Produktif dan Berkelanjutan |
| 11 | Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi |

| No | Isu Strategis Jangka Panjang Provinsi Riau |
|----|---|
| 12 | ASN yang profesional |
| 13 | Penyediaan Infrastruktur dasar yang handal dan memadai |
| 14 | Integrasi antarmoda, transportasi darat, laut dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas orang yang memenuhi aspek pelayanan yang aman, nyaman, cepat dan berkeselamatan |
| 15 | Riau sebagai pusat kebudayaan melayu |
| 16 | Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup |
| 17 | Persatuan, Kerukunan dan Stabilitas Daerah |
| 18 | Kemandirian Fiskal |
| 19 | Pengendalian Rasio Ketergantungan Penduduk Riau |

Sumber: Hasil Analisis

Selanjutnya dari tabel 3.2 *Short List Isu Strategis* Provinsi Riau Tahun 2025-2045 dilakukan pengelompokan dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu yang ada yang menjadi dasar dalam perencanaan jangka panjang Provinsi Riau tahun 2025-2045, seperti yang termuat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Isu Strategis Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025-2045

| Permasalahan Pokok | Short List Isu Strategis Jangka Panjang Provinsi Riau | Pengelompokan Isu | Isu Strategis Jangka Panjang Provinsi Riau |
|--|---|---------------------------------|---|
| 1. Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul Dan Sejahtera | 1. Menjamin semua individu memiliki akses dan kualitas pendidikan yang inklusif | 1. Kualitas Sumber Daya Manusia | 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia |
| | 2. Kualitas dan pemerataan layanan Kesehatan serta pembudayaan masyarakat dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | | |
| | 3. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | | |
| | 4. Peningkatan produktifitas tenaga | | |

| Permasalahan Pokok | Short List Isu Strategis Jangka Panjang Provinsi Riau | Pengelompokan Isu | Isu Strategis Jangka Panjang Provinsi Riau |
|--|--|-------------------|--|
| | kerja dan Perluasan akses Kesempatan Kerja yang responsif gender | | |
| 2. Belum optimalnya pengembangan nilai tambah ekonomi yang produktif | 5. Kemandirian, Keamanan dan Ketahanan pangan daerah | 2. Ekonomi | 2. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas |
| | 6. Peningkatan investasi yang diimbangi dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk komoditi unggulan serta peningkatan serapan tenaga kerja lokal | | |
| | 7. Optimalisasi destinasi dan event wisata dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan dan rata-rata lama tinggal wisatawan | | |
| | 8. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai penopang ekonomi masyarakat, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan | | |
| | 9. Kemandirian Desa yang berkelanjutan dan Inklusi | | |
| 3. Masih tingginya pengaruh ekonomi global dan regional | 10. Kemandirian Fiskal | | |
| | 11. Persatuan, Kerukunan dan Stabilitas Daerah | | |
| 4. Belum optimalnya tatakelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif | 12. Pengendalian Rasio Ketergantungan Penduduk Riau | 3. Tata Kelola | 3. Tatakelola Pemerintahan yang baik dan berkualitas |
| | 13. Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi | | |
| | 14. ASN yang profesional | | |

| Permasalahan Pokok | Short List Isu Strategis Jangka Panjang Provinsi Riau | Pengelompokan Isu | Isu Strategis Jangka Panjang Provinsi Riau |
|--|---|-------------------|---|
| 5. Masih tinggi ketimpangan pembangunan wilayah | 15. Pembangunan Kota yang Maju, Produktif dan Berkelanjutan | 4. Infrastruktur | 4. Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan serta pengawasan pemanfaatannya |
| 6. Belum optimalnya penyediaan, konektivitas transportasi dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan | 16. Penyediaan Infrastruktur dasar yang handal dan memadai 17. Integrasi antarmoda, transportasi darat, laut dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas orang yang memenuhi aspek pelayanan yang aman, nyaman, cepat dan berkeselamatan | | |
| 7. Adanya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup | 18. Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | 5. Lingkungan | 5. Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup |
| 8. Kurang pengamalan budaya dalam kehidupan bermasyarakat | 19. Riau sebagai pusat kebudayaan melayu | 6. Budaya | 6. Pusat Kebudayaan Melayu |

Sumber: Hasil Analisis

3.2.3 Pengintegrasian Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 dalam Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045

Pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam arah kebijakan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 tersebut selanjutnya dijadikan masukan dalam perumusan kebijakan umum pembangunan Provinsi Riau. Pengintegrasian rekomendasi KLHS ini merupakan penguatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian dan atau pengawasan pembangunan yang akan dilakukan. Hal ini diperlukan agar Program Pembangunan sebagai turunan dari Arah Kebijakan RPJPD

nantinya tetap berada dalam koridor prinsip pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan hasil rumusan isu strategis serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang perlu dilakukan intervensi maka dilakukan rumusan terhadap rekomendasi yang secara rinci disajikan pada Tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4.
Pengintegrasian Rekomendasi KLHS ke Dalam Arah Kebijakan RPJPD
Provinsi Riau Tahun 2025-2045

| No | TPB yang Perlu Intervensi | Isu Strategis | Rumusan Strategi | Rumusan Arah Kebijakan |
|----|---|--|--|--|
| 1 | TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penataan kota, yang meliputi tersedianya hunian layak dan terjangkau, akses penanganan sampah di lingkungan permukiman, tersedianya ruang terbuka hijau. 2. Masih tingginya indeks risiko bencana belum tersedia fasilitas kota tangguh bencana, belum tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan kota dan penanganan resiko bencana 2. Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan 3. Peningkatan jumlah kota yang berkelanjutan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program revitalisasi permukiman di 20 Kota Sedang dan 10 Kota Baru untuk memastikan pemenuhan standar pelayanan yang aman, nyaman, dan layak huni. 2. Fokus pada perbaikan infrastruktur dasar, termasuk akses air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah, serta peningkatan ketersediaan ruang terbuka publik. 3. Pengembangan sistem transportasi umum yang efisien dan terintegrasi di perkotaan. 4. Pembentukan Forum Dialog Perencanaan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan organisasi profesi. 5. Program pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perubahan iklim dan bencana. 6. Penguatan lembaga-lembaga lokal dalam perencanaan respons dan pemulihan pasca-bencana. |

| No | TPB yang Perlu Intervensi | Isu Strategis | Rumusan Strategi | Rumusan Arah Kebijakan |
|----|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> 7. Implementasi strategi mitigasi bencana yang terfokus pada daerah dengan IRB tinggi. 8. Pengembangan sistem pemantauan dan peringatan dini bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. 9. Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan. 10. Promosi perilaku masyarakat yang ramah lingkungan, termasuk pengurangan, daur ulang, dan pengelolaan sampah |
| 2. | TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) | Belum tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum layak dan sanitasi yang memadai, termasuk infrastruktur air dan kelembagaannya | <ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan air bersih melalui pemerataan SPAM. 2. Meningkatkan kapasitas dan layanan SPALDT | <ul style="list-style-type: none"> 1. Implementasi program untuk mencapai 100% akses terhadap layanan air minum 2. Pengembangan infrastruktur air minum untuk memastikan kapasitas prasarana air baku yang memadai untuk melayani rumah tangga, perkotaan, dan industri. 3. Implementasi program untuk mencapai 100% akses terhadap layanan air minum 4. Pengembangan infrastruktur sanitasi yang efisien dan ramah lingkungan. 5. Pembangunan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal 6. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 7. Peningkatan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, serta pantai. |

| No | TPB yang Perlu Intervensi | Isu Strategis | Rumusan Strategi | Rumusan Arah Kebijakan |
|----|---|---|---|--|
| | | | | 8. Program rehabilitasi dan perlindungan ekosistem air untuk membaiknya kualitas air 9. Pelibatan masyarakat. |
| 3. | TPB 13 (Penanggulangan Perubahan Iklim) | Masih rendahnya ketahanan terhadap perubahan iklim | Meningkatkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | 1. Implementasi strategi mitigasi bencana yang terfokus pada daerah dengan IRB tinggi. 2. Pengembangan sistem pemantauan dan peringatan dini bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. 3. Pembuatan dokumen terkait kebencanaan, KRB, RPB dan lain-lain. |
| 4. | TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) | Belum meratanya layanan terhadap perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, air bersih, sanitasi layak, listrik, dan korban bencana alam. | 1. Penurunan kemiskinan disemua dimensi 2. Peningkatan akses layanan sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, air bersih dan sanitasi layak 3. Peningkatan akses terhadap sumberdaya ekonomi dan pelayanan dasar terhadap masyarakat miskin dan rentan | 1. Melaksanakan kampanye penyuluhan tentang manfaat dan mekanisme SJSN Bidang Kesehatan. 2. Meningkatkan aksesibilitas dan keberlanjutan Program SJSN Kesehatan 3. Pengembangan infrastruktur air minum untuk memastikan kapasitas prasarana air baku yang memadai untuk melayani rumah tangga, perkotaan, dan industri. 4. Peningkatan akses air minum layak dan sanitasi untuk penduduk berpendapatan terbawah. 5. Program perumahan yang terjangkau dan berkualitas untuk memastikan akses hunian layak bagi 40% penduduk berpendapatan terbawah. 6. Kemitraan dengan sektor swasta dan LSM untuk memfasilitasi akses perumahan. 7. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat dengan memperbaiki |

| No | TPB yang Perlu Intervensi | Isu Strategis | Rumusan Strategi | Rumusan Arah Kebijakan |
|----|---------------------------------------|--|---|---|
| | | | | kualitas dan akses pendidikan. 8. Sosialisasi dan upaya untuk meningkatkan kepemilikan akte lahir pada penduduk berpendapatan terbawah 9. Implementasi strategi mitigasi bencana yang terfokus pada daerah dengan IRB tinggi. 10. Pengembangan sistem pemantauan dan peringatan dini bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. 11. Pembuatan dokumen terkait kebencanaan, KRB, RPB dll |
| 5. | TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) | 1. Belum meratanya akses terhadap layanan kesehatan pada ibu, bayi dan balita 2. Masih tingginya prevalensi penyakit tropis, penyakit tidak menular 3. Tidak tersedianya data kesehatan mental, penyalahgunaan NAPZA, dan perlindungan lainnya | 1. Penurunan angka kematian anak dan balita 2. Penurunan jumlah kematian akibat penyakit tidak menular 3. Mengakhiri epidemi penyakit tropis 4. Pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat termasuk obat terlarang dan alkohol | 1. Melaksanakan program intensif imunisasi dengan target meningkatkan persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi 2. Peningkatan upaya pencegahan, deteksi, dan pengobatan 3. Evaluasi dan perbaikan kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan JKN |
| 6. | TPB 4 (Pendidikan Berkualitas) | Belum meratanya akses dan fasilitas pendidikan | 1. Peningkatan layanan pendidikan untuk semua 2. Peningkatan kualitas pendidik/guru | Peningkatan akses pendidikan dengan target meningkatkan Angka Partisipasi Kasar |

| No | TPB yang Perlu Intervensi | Isu Strategis | Rumusan Strategi | Rumusan Arah Kebijakan |
|----|---|---|--|--|
| | | | 3. Peningkatan akses sekolah terhadap fasilitas dan teknologi | |
| 7. | TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) | Belum tersedianya lapangan kerja yang memadai | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses lapangan kerja dan layanan jasa keuangan yang mendorong pertumbuhan UMKM dan kewirausahaan 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi per kapita 3. Meningkatkan produktifitas ekonomi yang lebih tinggi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. 2. Mendorong formalisasi tenaga kerja melalui insentif dan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja formal. 3. Menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 4. Mendorong lembaga pembiayaan untuk memberikan dukungan finansial kepada UMKM. 5. Mengembangkan infrastruktur pariwisata dan pelayanan yang menarik bagi wisatawan. |

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045

BAB IV

VISI DAN MISI



4.1 VISI

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD tersebut memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan tahapan pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 dan upaya menjawab isu strategis daerah jangka panjang, dimana visi pembangunan Provinsi Riau tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045

dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025.

Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025-2045 dilakukan dengan menggunakan paradigma baru dalam rangka mendukung pencapaian cita-cita besar Bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045, dengan visi pembangunan Indonesia tahun 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Mendukung cita-cita besar menjadi Indonesia Emas 2045, Provinsi Riau turut andil menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan juga merupakan untuk menghadapi dinamika global dan nasional yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Dinamika tersebut dipicu oleh megatren global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geoeкономи. Hal tersebut menuntut respon mitigasi dan adaptasi yang cepat dengan segala potensi yang dimiliki. Respon terhadap dinamika yang serba cepat ini diperlukan percepatan pembangunan dengan pendekatan transformasi dalam setiap aspek pembangunan. Transformasi untuk merespon dinamika harus juga diseimbangkan dengan ketahanan sumber daya dan budaya agar tetap tangguh dalam menghadapi setiap ancaman dan tantangan yang dimungkinkan akan terjadi di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan kondisi objektif, potensi, permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang dihadapi saat ini dan tantangan yang akan dihadapi, serta amanat peraturan dan perundangan dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka rumusan Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025-2045 yaitu:

**“RIAU MAJU DAN BERKELANJUTAN
BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU YANG AGAMIS”**



Gambar 4.1
Visi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025-2045

Pernyataan Visi Pembangunan Provinsi Riau tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. **Maju** bermakna pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat serta nilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat

a. Mandiri

Mandiri merupakan spirit, kekuatan dan keteguhan masyarakat yang pantang menyerah meraih perubahan yang lebih baik. Kemandirian adalah hakikat dari tujuan kemerdekaan, oleh karena itu seluruh potensi wilayah yang berupa kekayaan alam dan sumber daya manusia yang ada di Provinsi Riau merupakan modal dasar pembangunan yang akan dikerahkan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, dan menjadi bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Kemandirian juga tercermin pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan, pembiayaan pembangunan yang semakin kokoh yang berasal dari kemampuan masyarakatnya dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Apabila karena sumber daya alam tidak lagi

memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan lain sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap guncangan keadaan. Kemandirian juga mencerminkan semangat dan sikap individu dan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi tantangan-tantangan.

b. Berdaya Saing

Berdaya saing merupakan kondisi masyarakat Riau yang dapat bersaing dalam berbagai tingkatan baik tingkatan nasional dan global. Kondisi ini dicirikan dengan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, menguatnya ekonomi, dan kehidupan sosial yang mendasari oleh budaya dan agama. Selain itu, perekonomian Provinsi Riau Tahun 2045 mampu tumbuh bersaing dengan daerah lain dan mampu berkontribusi tinggi pada perekonomian nasional. Riau berdaya saing diwujudkan dengan pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah, ekonomi kreatif, dan hilirisasi berbasis riset dan teknologi, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup menuju pada perwujudan ekonomi hijau.

c. Modern

Modern tercermin dari kondisi masyarakat Riau yang beragam dan diharapkan mampu memandang wawasan ke masa depan. Riau maju modern dengan masyarakat dalam tingkat peradaban tinggi dengan kemampuan pemanfaatan teknologi dan layanan terkini untuk memenuhi kebutuhannya. Infrastruktur juga didukung dengan teknologi yang modern yang memungkinkan masyarakat Riau terhubung dengan global.

d. Tangguh

Tangguh memiliki arti kokoh memiliki kekuatan menghadapi ancaman, hambatan dan masalah dan memiliki solusi untuk meredam dan menyingkirkannya. Tangguh juga dicirikan kemandirian daerah dalam menjaga ketersediaan pangan, air dan sumber energi sekaligus menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

e. Inovatif

Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memperkuat perekonomian daerah adalah sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan mampu memanfaatkan teknologi terkini, yang mampu menciptakan inovasi produk dan layanan di berbagai sektor agar mampu berdaya saing tinggi di pasar global maupun nasional. Inovatif menggambarkan masyarakat Riau yang unggul disegala bidang dikarenakan mampu mendayagunakan pemikirannya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

f. Adil dan Sejahtera

Adil dan sejahtera yaitu menciptakan keharmonisan dan kesinergian masyarakat dalam menjalani kehidupan serta adanya keseimbangan dalam aspek kehidupan serta menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan daerah.

2. **Berkelanjutan** bermakna terwujudnya pembangunan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang kuat dan berlanjut untuk menjamin kesejahteraan kehidupan generasi mendatang. Riau yang berkelanjutan akan menciptakan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik, mendapatkan lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman yang layak dan nyaman, bebas pencemaran air, udara, sampah, serta kondisi hutan dan lahan, sumber daya air baik air permukaan, air tanah, serta pesisir yang semakin terjaga dengan baik.

a. Lestari dan Seimbang

Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan harus digunakan dengan bijaksana, untuk diwariskan dengan baik dan tidak meninggalkan beban kepada generasi penerus dimasa mendatang dengan menjaga kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan.

b. Ekonomi

Keseimbangan pembangunan ekonomi dengan lingkungan diimplementasikan dengan kebijakan ekonomi hijau yang diperkuat dengan sistem pengelolaan ketahanan bencana dan mitigasi perubahan iklim yang handal.

c. Sosial

Pembangunan Provinsi Riau yang dapat menjaga keberlangsungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta memperhatikan keseimbangan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga terjaminnya modalitas generasi mendatang untuk melanjutkan pembangunan yang baik.

d. Lingkungan

Lingkungan harus memperhatikan keseimbangan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah.

3. **Berlandaskan Budaya Melayu yang Agamis** bermakna terwujudnya masyarakat Provinsi Riau yang selalu menjunjung tinggi nilai Kebudayaan Melayu dan Pola pikir masyarakat melayu di dalam kehidupan bermasyarakat. Riau berbudaya juga akan terintegrasi dalam pembangunan manusia yang utuh dan berkarakter yang melibatkan individu, keluarga, masyarakat dalam semua sektor, baik sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Riau yang berbudaya juga akan menjadi kendali akan kemajuan dan modernisasi yang tanpa batas pada semua sektor. Peran dan fungsi agama secara mendalam dan inklusif juga dapat mewujudkan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.

a. Memahami nilai-nilai budaya

Memahami nilai budaya dalam upaya membangun karakter masyarakat yang memuat dengan budaya lokal. Memahami nilai-nilai budaya sangatlah penting karena pada dasarnya budaya senantiasa diwariskan, ditafsirkan dan dilaksanakan seiring dengan perubahan sosial kemasyarakatan.

b. Berperilaku sesuai nilai-nilai budaya yang agamis

Berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya yang agamis sangat penting karena berhubungan dengan proses membina, memperbaiki dan mewarisi perilaku, budi pekerti dan nilai luhur budaya Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sehingga terinternalisasi dalam diri individu dan terbentuk masyarakat yang tangguh, inovatif, bertoleran, berakhlak mulia berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasarkan oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

c. Agama sebagai motor penggerak pembangunan

Agama sebagai lokomotif dan motor penggerak tidak hanya memahami dan berperilaku sesuai nilai agama sehingga menjadikan pendekatan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berdampak kepada sosial dan pembangunan daerah.

4.2 SASARAN VISI

Pencapaian Riau Maju Dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu Yang Agamis tercermin dalam lima sasaran visi sebagai berikut:

Tabel 4.1

Sasaran Visi RPJP Provinsi Riau Tahun 2025 -2045

| NO | SASARAN VISI | BASELINE 2025 | SASARAN 2045 |
|----------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | Peningkatan pendapatan per kapita | | |
| | a. PDRB per kapita (Rp Juta) | 164,18 – 165,17 | 706,31 - 883,56 |
| | b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) | 27,85 | 77,46 |
| | c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) | 27,59 | 36,20 – 36,35 |
| 2 | Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan | | |
| | a. Tingkat Kemiskinan (%) | 5,19 - 6,19 | 0,08 - 0,58 |
| | b. Rasio gini (Indeks) | 0,318 - 0,324 | 0,256 - 0,279 |
| | c. Kontribusi PDRB Provinsi (%) | 4,88 | 4,00 |
| | d. Pertumbuhan Ekonomi (%) | 3,90 - 4,23 | 4,31 - 5,31 |
| 3 | Meningkatnya Peran Kepimpinan Daerah Untuk Mencapai Visi Daerah | | |
| | a. Indeks Daya Saing Daerah | 3,31 | 4,86 |
| | b. Indeks Inovasi Daerah | 58,68 | 100,00 |
| | c. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | 60,30 – 60,37 | 70,37 – 70,99 |
| | d. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | 72,30 - 72,36 | 79,22 - 79,92 |
| 4 | Peningkatan daya saing Sumber daya manusia | | |
| | Indeks Modal Manusia | 0,56 | 0,72 |
| 5 | Penurunan emisi GRK menuju net zero emission | | |
| | a. Penurunan intensitas emisi GRK (%) | 46,88 | 97,16 |
| | b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 71,85 | 79,00 |

Sumber : SEB Mendagri RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 dan Hasil Analisa

4.3 MISI

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau tahun 2025-2045 yaitu Riau Maju Dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu Yang Agamis pada tahun 2045 akan dapat terwujud melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai berikut:

- Misi Satu : Transformasi Sosial Untuk Membangun Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul dan Sejahtera.
- Misi Dua : Transformasi Ekonomi Untuk Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif dan Ekonomi Hijau.
- Misi Tiga : Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.
- Misi Empat : Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.
- Misi Lima : Mewujudkan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi.
- Misi Enam : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Antar Kabupaten/Kota.
- Misi Tujuh : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Berkualitas yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan.
- Misi Delapan : Kestinambungan Pembangunan untuk Mewujudkan Riau Maju.

Adapun berkenaan dengan arti dan maksud Misi Riau Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

- 1) **Transformasi Sosial Untuk Membangun Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul dan Sejahtera** dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan yang berkualitas, merata dan inklusi, derajat kesehatan manusia, perlindungan sosial dan ketenagakerjaan serta peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan transformasi sosial, pemerintah daerah menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan dasar tanpa memandang latar belakang, identitas dan status.

- 2) **Transformasi Ekonomi Untuk Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif dan Ekonomi Hijau** difokuskan pada Pertanian, Hilirisasi SDA, penguatan industri dan UMKM, serta produktivitas tenaga kerja didukung dengan digitalisasi ekonomi serta berbasis pada riset dan inovasi. Peningkatan produktivitas secara masif dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas rendah menjadi tinggi dengan menggerakkan sektor unggulan daerah serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat mewujudkan Provinsi Riau berpendapatan sangat tinggi. Transformasi ekonomi juga diarahkan pada ekonomi hijau yaitu model pembangunan ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau (green investment) termasuk investasi yang berbasis syariah.
- 3) **Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif** dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif dan akuntabel. Transformasi tata kelola difokuskan pada Kelembagaan tepat fungsi, kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, pelayanan publik berbasis TI, penguatan kapasitas masyarakat sipil sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang prima serta inovasi pemerintah daerah. Birokrasi kolaboratif menjadi hal penting untuk diwujudkan dalam konteks membangun tata kelola pemerintahan yang dinamis, tidak hanya kolaborasi antar daerah, kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya pun semakin diperkuat agar tujuan pembangunan daerah dapat dicapai.
- 4) **Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah** difokuskan pada Komitmen penguatan hukum terkait keamanan, Peningkatan pengawasan keamanan dan kerjasama untuk mewujudkan stabilitas daerah dan kehidupan yang demokratis dan kondusif. Keamanan daerah yang tangguh akan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, rasa aman dan nyaman serta wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat Riau. Stabilitas ekonomi makro daerah menciptakan kemudahan bagi masyarakat dan usaha kecil menengah dalam mengakses layanan keuangan, mendorong pertumbuhan inklusif dan kesejahteraan secara menyeluruh.

- 5) **Mewujudkan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi** difokuskan Peningkatan ketahanan keluarga, penguatan karakter masyarakat dalam lingkungan yang berbudaya dan agamis yang akan mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan adaptif. Untuk membentuk ketahanan Sosial, nilai agama dan nilai budaya ditanamkan sejak dini melalui pendidikan karakter dari dalam keluarga. Ketahanan ekologi fokus pada memantapkan ketahanan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup (baik lingkup air, udara, lahan dan air laut), ketahanan perubahan iklim dan ketangguhan bencana. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestariannya lingkungan hidup akan dapat mengurangi potensi terjadinya bencana serta mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 6) **Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Antar Kabupaten/Kota** difokuskan pada peningkatan pembangunan kewilayahan terutama dikawasan afirmasi dan perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sehingga ketimpangan antarwilayah akan semakin mengecil. Arah pembangunan kewilayahan di Riau adalah untuk mengembangkan perekonomian wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.
- 7) **Mewujudkan Sarana dan Prasarana Berkualitas yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan** difokuskan pada peningkatan dan pemantapan pembangunan sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan (infrastruktur hijau). Pembangunan sarana dan prasarana berkaitan dalam hal pergerakan orang, distribusi barang dan jasa, upaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Sarana prasarana lainnya yang menjadi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah adalah sarana prasarana sumber daya air terutama untuk penyediaan air baku, jaringan listrik, energi, komunikasi dan informasi.
- 8) **Kesinambungan Pembangunan untuk Mewujudkan Riau Maju** difokuskan pada komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam perwujudan Riau Maju melalui pelaksanaan pembangunan yang efektif dan pembiayaan pembangunan yang memadai. Pelaksanaan yang efektif mencakup mekanisme proses pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan. Sedangkan pembiayaan yang memadai baik

melalui inovasi pembiayaan juga merupakan salah satu upaya perwujudan visi Riau 2045 agar tetap berkesinambungan.



Gambar 4.2.

Misi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025-2045

Penjabaran Visi dan Misi dituangkan pada Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan serta indikator utama pembangunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2023 - 2043, serta evaluasi pencapaian pembangunan jangka panjang Provinsi Riau tahun 2005-2025 dengan mempertimbangkan kondisi aktual perekonomian dan isu-isu kemasyarakatan.

4.4 Sinkronisasi Berbagai Kebijakan Perumusan Visi dan Misi Provinsi Riau dengan Visi dan Misi Indonesia tahun 2045

Berikutnya, keterkaitan atau keselarasan antara Visi, Sasaran Visi dan Misi pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 yang memperlihatkan bahwa Visi merupakan untaian kata yang mengandung impian, cita-cita atau nilai-nilai inti dari tujuan masa depan organisasi atau lembaga yang akan dicapai pada tabel 4.1 s/d tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.2
Penyelarasan Visi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045

| No | Visi RPJPN 2025-2045 | Visi RPJPD 2025-2045 |
|-----|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERSATU, BERDAULAT, MAJU DAN BERKELANJUTAN | RIAU MAJU DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU YANG AGAMIS |

Sumber : RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045

Tabel 4.3
Sasaran Visi RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045

| No | RPJPN 2025-2045 | | | | RPJPD 2025-2045 | | | |
|-----|--|----------------------------------|---------------|---------------|--|--|-----------------|-----------------|
| | Sasaran Visi | Indikator | Baseline 2025 | Target 2045 | Sasaran Visi | Indikator | Baseline 2025 | Target 2045 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Pendapatan per kapita setara negara maju | a. GNI Per Kapita (USD) | 5.500 – 5.520 | 30.300 | Peningkatan Pendapatan per kapita | a. PDRB per kapita (Rp Juta) | 164,18 – 165,17 | 706,31 – 883,56 |
| | | b. Kontribusi PDB Maritim (%) | 8,1 | 15,0 | | b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) | 27,85 | 77,46 |
| | | c. Kontribusi PDB Manufaktur (%) | 20,8 | 28,0 | | c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) | 27,59 | 36,20 – 36,35 |
| 2 | Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang | a. Tingkat Kemiskinan (%) | 7,0 - 8,0 | 0,5 - 0,8 | Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan | a. Tingkat Kemiskinan (%) | 5,19 - 6,19 | 0,08 - 0,58 |
| | | b. Rasio Gini (indeks) | 0,379 - 0,382 | 0,290 – 0,320 | | b. Rasio gini (Indeks) | 0,318- 0,324 | 0,256- 0,279 |
| | | c. Kontribusi PDRB KTI (%) | 21,4 | 28,5 | | c. Kontribusi PDRB Provinsi (%) | 4,88 | 4,00 |
| | | | | | | d. Pertumbuhan Ekonomi (%) | 3,90 - 4,23 | 4,31 - 5,31 |

| No | RPJPN 2025-2045 | | | | RPJPD 2025-2045 | | | |
|-----|--|---------------------------------------|---------------|-------------|--|--|---------------|---------------|
| | Sasaran Visi | Indikator | Baseline 2025 | Target 2045 | Sasaran Visi | Indikator | Baseline 2025 | Target 2045 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 3 | Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat | <i>Global Power Index</i> (peringkat) | 34 (2023) | 15 besar | Meningkatny a Peran Kepimpinan Daerah Untuk Mencapai Visi Daerah | a. Indeks Daya Saing Daerah | 3,31 | 4,86 |
| | | | | | | b. Indeks Inovasi Daerah | 58,68 | 100,00 |
| | | | | | | c. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | 60,30 – 60,37 | 70,37 – 70,99 |
| | | | | | | d. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | 72,30 - 72,36 | 79,22 - 79,92 |
| 4 | Daya saing sumber daya manusia meningkat | Indeks Modal Manusia (indeks) | 0,56 | 0,73 | Peningkatan daya saing sumber daya manusia | Indeks Modal Manusia | 0,56 | 0,72 |
| 5 | Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i> | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 38,6 | 93,5 | Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i> | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 46,88 | 97,16 |
| | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 76,49 | 83,00 | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 71,85 | 79,00 |

Sumber : SEB Mendagri RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 dan Hasil Analisa

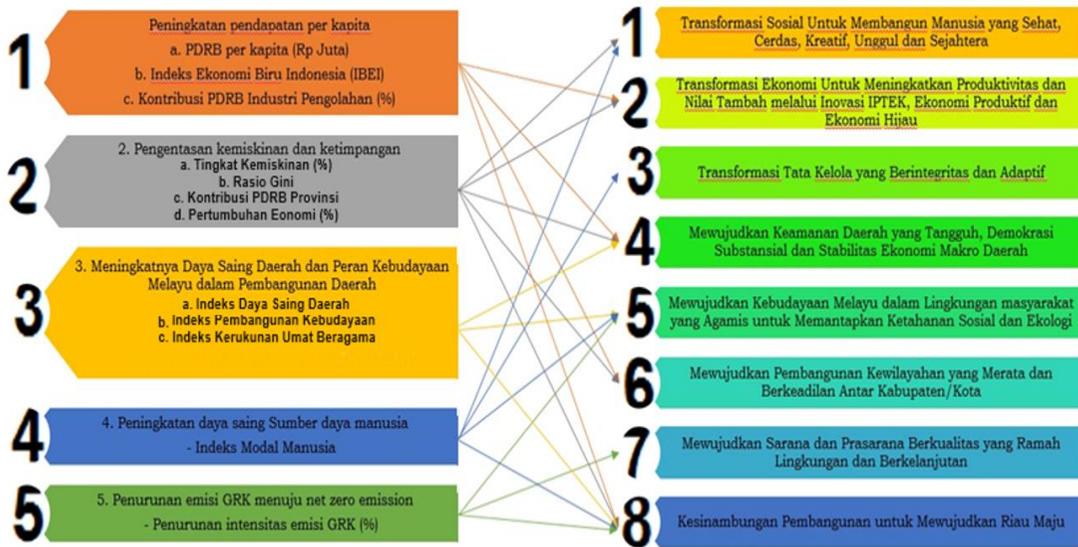
Tabel 4.4.
Penyelarasan 8 Misi RPJPN Tahun 2025-2045 ke dalam 8 Misi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045

| No | Kelompok Agenda | No | RPJPN 2025-2045 | RPJPD 2025-2045 |
|-----|------------------------------------|-----|--|--|
| | | | Misi | Misi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Transformasi Indonesia | 1 | Transformasi sosial | Transformasi Sosial Untuk Membangun Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul dan Sejahtera |
| | | 2 | Transformasi ekonomi | Transformasi Ekonomi Untuk Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif Dan Ekonomi Hijau |
| | | 3 | Transformasi tata kelola | Transformasi Tata Kelola Yang Berintegritas Dan Adaptif |
| 2 | Landasan Transformasi | 4 | Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia | Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah |
| | | 5 | Ketahanan sosial budaya dan ekologi | Mewujudkan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi |
| 3 | Kerangka Implementasi Transformasi | 6 | Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan | Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan antar kabupaten/kota |
| | | 7 | Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan | Mewujudkan Sarana dan Prasarana Berkualitas yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan |
| | | 8 | Kesinambungan pembangunan | Kesinambungan Pembangunan untuk Mewujudkan Riau Maju |

Sumber : RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045

Selanjutnya pada Gambar 4.3 menggambarkan keterkaitan antara Visi dan Misi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 berupa penyandingan Visi dan Misi yang akan dilakukan yang menunjukkan bahwa setiap Visi termasuk Pokok Visi telah dijawab dengan berbagai Misi yang ditetapkan.



Gambar 4.3.
Keterkaitan Visi dan Misi Provinsi Riau Tahun 2025-2045

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK



Pada tahun 2045 mendatang penduduk Riau diproyeksikan akan 8,11 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk Provinsi Riau menggambarkan bahwa Riau memiliki potensi sekaligus menjadi tantangan sendiri terutama pada penciptaan lapangan kerja, produktivitas, pembangunan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif dan unggul, penyediaan kebutuhan pangan, energi, lahan permukiman, fasilitas layanan dasar serta kualitas lingkungan hidup yang sehat, aman dan nyaman serta terjaganya stabilitas daerah.

Provinsi Riau masih menghadapi tantangan pembangunan yang senantiasa menjadi perhatian kita bersama. Disisi internal, pemerintah daerah terus berupaya untuk menghadapi tantangan pembangunan seperti kemiskinan, kualitas sumber

daya manusia yang kurang berdaya saing, ketimpangan antar wilayah, degradasi lingkungan, kerawanan sosial serta belum optimalnya sarana dan prasarana wilayah termasuk peningkatan kinerja pemerintahan menjadi lebih adaptif, antisipatif dan rensposif dan akuntabel.

Rumusan arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi dalam 4 (empat) tahapan setiap 5 (lima) tahun dan diterjemahkan ke dalam sasaran pokok beserta indikator yang mengukur keberhasilan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045. Dalam penentuan sasaran pokok memperhatikan Sasaran Visi dan arah pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) sasaran pokok.

Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Riau adalah Riau Maju Dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu Yang Agamis. Hal ini diupayakan dengan mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, keamanan daerah yang tangguh, staabilitas ekonomi makro, mewujudkan kebudayaan melayu berlandaskan masyarakat yang agamis, pembangunan kewilayahan yang merada dan berkeadilan, sarana dan prasarana infastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sumber daya industri yang memiliki kemampuan dalam menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, serta berdaya saing dan kreatif. Selain itu, perencanaan ini juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan target tercapainya keseimbangan sosial, ekonomi, tata kelola serta lingkungan.

5.1 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menjadi panduan strategis yang mengarahkan suatu rencana pembangunan dari visi dan misi yang telah ditentukan. Kerangka kerja pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau tahun 2025-2045 dijabarkan dalam empat tahapan arah kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah. Arah kebijakan lima tahunan diarahkan guna penekanan prioritas pembangunan yang ditetapkan secara berkesinambungan antara satu periode dengan periode berikutnya. Arah kebijakan setiap tahapan lima tahunan digambarkan sebagai berikut.



Gambar 5.1.
Tahapan Arah Kebijakan Lima Tahunan Jangka Panjang
Provinsi Riau Tahun 2025-2045

Pentahapan pembangunan yang dilakukan oleh Provinsi Riau disusun secara terukur dan konsisten untuk mewujudkan Riau Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu yang Agamis. Arah kebijakan dirumuskan untuk mencapai misi-misi yang mengarah pada transformasi pembangunan secara menyeluruh. Dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi pembangunan, keberhasilan pembangunan jangka panjang memiliki arah pembangunan yang disesuaikan dengan misi Provinsi Riau.

Untuk mencapai visi RPJPD Provinsi Riau pada tahun 2045 diperlukan upaya transformatif untuk mencapai arah pembangunan di masa yang akan datang. Keberhasilan transformasi secara menyeluruh memerlukan dukungan dalam bentuk landasan transformasi sebagai faktor penguat. Transformasi di Provinsi Riau terdiri dari 1) Transformasi Sosial untuk Membangun Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul dan Sejahtera; 2) Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif dan Ekonomi Hijau; 3) Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif. Untuk mewujudkan transformasi beranjak pada kerangka landasan dan implementasi, yang terdiri dari 1) Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah; 2) Mewujudkan Kebudayaan Melayu

Berlandaskan Masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi; 3) Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Antar Kabupaten/Kota; 4) Mewujudkan Sarana dan Prasarana Berkualitas yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan dan Kesenambungan Pembangunan untuk Mewujudkan Riau Maju.

5.1.1 Transformasi Sosial Untuk Membangun Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul dan Sejahtera

Pembangunan Provinsi Riau dua puluh tahun ke depan akan menghadapi perubahan yang menuntut sumber daya manusia yang maju dan berkualitas. Perubahan ini menjadi kunci penting dalam pembangunan manusia menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan dan dapat beradaptasi terhadap perubahan zaman.

Transformasi sosial diharapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, adil, sejahtera, dan kohesif. Dalam transformasi sosial, aspek yang diperhatikan adalah manusia sehingga diupayakan adanya pemenuhan terhadap pelayanan dasar masyarakat serta pengembangan modal manusia. Dalam mewujudkan transformasi sosial ini dilakukan implementasi melalui arah kebijakan dengan indikator kinerja yang tertera berikut ini.



Gambar 5.2.

Tahapan Arah Kebijakan Lima Tahunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025-2045 pada Transformasi Sosial untuk Membangun Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul dan Sejahtera

Tabel 5.1. Target Indikator Transformasi Sosial Untuk Membangun Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul dan Sejahtera

| No | Indikator | Baseline 2025 | Target | | | |
|--|---|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | 2029 | 2034 | 2039 | 2045 |
| APR1 Kesehatan untuk Semua | | | | | | |
| 1 | Usia Harapan Hidup (tahun) | 74,30 | 75,44 | 76,89 | 78,38 | 80,19 |
| 2 | Kesehatan Ibu dan Anak | | | | | |
| | a. Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 131 | 83 | 46 | 26 | 13 |
| | b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 12 | 10,32 | 8,22 | 6,12 | 3,6 |
| 3 | Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk): | | | | | |
| | a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%) | 66 | 70,99 | 77,75 | 85,17 | 95 |
| | b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%) | 93,94 | 94,74 | 95,75 | 96,76 | 98 |
| 4 | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%) | 98,00 | 98,30 | 98,67 | 99,05 | 99,50 |
| APR2 Pendidikan Berkualitas yang Merata | | | | | | |
| 5 | Hasil pembelajaran | | | | | |
| | a. Persentase kabupaten/ kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: | | | | | |
| | i) Literasi Membaca | 16,67 - 16,67 | 22,52 - 23,00 | 32,80 - 34,39 | 47,77 - 51,42 | 75,00 -83,33 |
| | ii) Numerasi | 0,00 - 8,33 | 0,01 - 12,63 | 0,14 - 21,24 | 2,17 - 35,72 | 58,33 -66,67 |
| | b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: | | | | | |
| | i) Literasi Membaca | 40,49- 42,49 | 45,94 - 48,00 | 53,80 - 55,89 | 63,00 - 65,09 | 76,14 -78,14 |
| | ii) Numerasi | 26,68 - 28,68 | 31,31 - 33,39 | 38,24 - 40,38 | 46,70 - 48,84 | 59,36 -61,36 |
| | c. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | 9,94 - 9,94 | 10,42 - 10,43 | 11,06 - 11,08 | 11,74 - 11,77 | 12,61 -12,66 |
| | d. Harapan Lama Sekolah (tahun) | 13,56 - 13,57 | 13,84 - 13,86 | 14,19 - 14,23 | 14,56 - 14,60 | 15,01 -15,07 |
| 6 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | 11,74 | 12,20 | 12,67 | 13,13 | 11,74- 13,59 |

| No | Indikator | Baseline 2025 | Target | | | |
|--|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2029 | 2034 | 2039 | 2045 |
| 7 | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | 67,86 | 70,13 | 73,08 | 76,15 | 80,00 |
| APR3 Perlindungan Sosial yang Adaptif | | | | | | |
| 8 | Tingkat Kemiskinan (%) | 5,19 - 6,19 | 4,24 - 4,92 | 3,13 - 3,42 | 1,89 - 1,99 | 0,08 - 0,58 |
| 9 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) | 38,05 | 60 | 70 | 80 | 95,13 |
| 10 | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) | 29 | 35 | 40 | 50 | 60 |

Sumber : SEB Mendagri RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 dan Hasil Analisis

Pada setiap arah kebijakan dalam misi transformasi sosial akan dirinci penjelasan dari masing-masing tahapan 5 tahunan selama 4 periode, diantaranya:

1. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perkuatan Fondasi Transformasi”**. Transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul dan sejahtera bertumpu pada peningkatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Pembangunan manusia yang sehat melalui arah kebijakan 1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui pemenuhan penyediaan air minum, sanitasi lingkungan/perumahan, RTH dan fasilitas komunal pendukung kesehatan; 2) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal; 3) Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer; 4) Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya; 5) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; 6) Peningkatan kualitas, kesejahteraan, dan pemerataan tenaga kesehatan dan insentif khusus untuk daerah afirmatif dan terpencil; 7) Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas di daerah afirmasi dan daerah terpencil; 8) Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting; 9) Penguatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan pada tingkat individu, keluarga dan

masyarakat; 10) Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.

Pembangunan manusia yang cerdas, kreatif, dan unggul dilakukan melalui arah kebijakan 1) Percepatan wajib belajar 13 tahun; 2) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah; 3) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan berprestasi; 4) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah; 5) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 6) Penguatan kurikulum PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis talenta, karakter, *digital literacy* dan muatan lokal budaya Melayu Riau; 7) Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, dan kaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 8) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik; 9) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 10) Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan; 11) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; 12) Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif di Daerah Afirmasi 3TP dan kawasan terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya) 13) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP dan kawasan terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya); 14) Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*); 15) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global; 16) Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP dan kawasan terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya); 17) Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya); 18) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*.

Pembangunan manusia yang sejahtera dilakukan melalui arah kebijakan 1) Penguatan sarana dan prasarana dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi di Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya); 2) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya); 3) Penyediaan akses permodalan usaha yang luas bagi masyarakat miskin dan rentan; 4) Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya); 5) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya); 6) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien; 7) Perkuatan Kelembagaan dan Kompetensi SDM (PSKS) dalam rangka Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial terutama bagi kelompok marjinal, rentan di Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (Khusus di Kep Meranti dan daerah lainnya); 8) Peningkatan Sarana Prasarana SPM untuk Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial terutama bagi kelompok marjinal dan rentan; 9) Perkuatan Kelembagaan, SDM, dan Data Pensasaran Penanggulangan Kemiskinan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien serta pembangunan sistem layanan terpadu yang terintergrasi dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial; 10) Perluasan penyediaan bantuan sosial (bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi), dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP dan daerah

terpencil lainnya (khususnya di Kepulauan Meranti dan daerah lainnya); 11) Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya); 12) Perluasan dan perkutan cakupan program jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk jaminan kehilangan pekerjaan; 13) Peningkatan kolaborasi pemerintah dan pihak swasta dalam memberikan subsidi kepada pekerja rentan; 14) Perkuatan kelembagaan pilar - pilar sosial, KAT dan restorasi sosial, dalam pemberdayaan sosial masyarakat miskin, individu dan lembaga kesejahteraan sosial; 15) Perkuatan tentang ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas di PEMDA, BUMN, BUMD, dan swasta di seluruh sektor; 16) Perkuatan implementasi Kebijakan Inklusif: Memastikan bahwa kebijakan mendukung inklusivitas, termasuk kelompok masyarakat yang rentan; 17) Pengembangan/peningkatan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP melalui bertambahnya demand; 18) Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi; 19) Percepatan sanitasi terpadu berbasis masyarakat (STBM); 20) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah; 21) Percepatan penyediaan hunian layak di kawasan kumuh perkotaan.

2. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Percepatan Transformasi”**. Transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul dan sejahtera bertumpu pada percepatan pembangunan SDM berkualitas dan merata.

Periode kedua ini melanjutkan apa yang sudah dilakukan pada periode pertama tetapi dengan percepatan. Upaya untuk **membangun manusia yang sehat** melalui arah kebijakan 1) Percepatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui percepatan pemenuhan penyediaan air minum, sanitasi lingkungan/perumahan, RTH dan fasilitas komunal pendukung kesehatan di wilayah yang belum tercover pada periode pertama; 2) Percepatan pemerataan dan

peningkatan akses layanan kesehatan universal; 3) Percepatan peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; 4) Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya; 5) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; 6) Peningkatan kualitas, kesejahteraan, dan pemerataan tenaga kesehatan dan insentif khusus untuk daerah afirmatif dan terpencil; 7) Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas di daerah afirmasi dan daerah terpencil; 8) Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting; 9) Penguatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; 10) Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan; 11) Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan.

Pembangunan manusia yang cerdas, kreatif, dan unggul tetap dilakukan melalui arah kebijakan 1) Percepatan wajib belajar 13 tahun; 2) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah; 3) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik bagi masyarakat berpendapatan rendah dan berprestasi; 4) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah; 5) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 6) Penguatan kurikulum PAUD, dasar, dan menengah berbasis talenta, karakter, *digital literacy* dan muatan lokal budaya Melayu Riau; 7) Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, keunggulan daerah, dan kaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 8) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik; 9) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 10) Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan; 11) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; 12) Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif di Daerah Afirmasi 3TP dan kawasan terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya); 13) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP dan kawasan terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya); 14) Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*); 15)

Fasilitasi Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global; 16) Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP dan kawasan terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya); 17) Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP dan kawasan terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya); 18) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui *upskilling* maupun *reskilling*.

Pembangunan manusia yang sejahtera dilakukan melalui arah kebijakan 1) Penguatan sarana dan prasarana dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi di Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya); 2) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya); 3) Penyediaan akses permodalan usaha yang luas bagi masyarakat miskin dan rentan; 4) Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya); 5) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya); 6) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien; 7) Percepatan pemenuhan kebutuhan layanan Perlindungan Sosial Berbasis IT terintegrasi, dengan SDM yang maju berkarakter dan Kelembagaan yang Profesional; 8) Percepatan penyediaan sarana prasarana SPM untuk perlindungan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial terutama bagi kelompok marjinal dan rentan yang sesuai dengan standar SPM; 9) Perluasan penyediaan bantuan sosial (bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal

yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi), dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya); 10) Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya); 11) Percepatan peran swasta agar meningkatkan perluasan dan memperkuat cakupan program jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk jaminan kehilangan pekerjaan termasuk memberikan subsidi kepada pekerja rentan; 12) Percepatan Implementasi pilar - pilar sosial, KAT dan Restorasi Sosial, dalam pemberdayaan Sosial masyarakat miskin, individu dan lembaga kesejahteraan Sosial; 13) Perluasan kesempatan kerja khususnya bagi penyandang disabilitas di Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor; 14) Pengembangan/peningkatan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP melalui bertambahnya demand; 15) Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi; 16) Percepatan sanitasi terpadu berbasis masyarakat (STBM); 17) Percepatan pembangunan Rumah Layak Huni dan terjangkau dengan skema kolaborasi antar pemangku kepentingan bidang perumahan; 18) Penuntasan Rumah Tidak Layak huni di Kawasan Kumuh Perkotaan.

3. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perluasan Transformasi”**. Transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul dan sejahtera bertumpu pada penguatan daya saing SDM dan keberkelanjutan kesejahteraan.

Periode ketiga ini melanjutkan apa yang sudah dilakukan pada periode kedua tetapi dengan banyak perluasan. Kawasan afirmatif seperti di Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan pada periode pertama dan kedua sudah bisa mengejar ketertinggalannya. Upaya untuk **membangun manusia yang sehat** melalui arah kebijakan 1) Perluasan upaya *promotif-preventif* dan pembudayaan perilaku hidup

sehat melalui percepatan pemenuhan penyediaan air minum, sanitasi lingkungan/perumahan, RTH dan fasilitas komunal pendukung kesehatan di wilayah yang belum tercover pada periode kedua; 2) Perluasan pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal; 3) Perluasan peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; 4) Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya; 5) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; 6) Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas di daerah afirmasi dan daerah terpencil; 7) Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting; 8) Penguatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; 9) Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.

Dalam **membangun manusia yang cerdas, kreatif, dan unggul** dilakukan melalui arah kebijakan 1) Percepatan wajib belajar 13 tahun; 2) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah; 3) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik bagi masyarakat berpendapatan rendah dan berprestasi; 4) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah; 5) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 6) Penguatan kurikulum PAUD, dasar, dan menengah berbasis talenta, karakter, *digital literacy* dan muatan lokal budaya Melayu Riau; 7) Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, keunggulan daerah, dan kaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 8) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik; 9) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 10) Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan; 11) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; 12) Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif di Daerah Afirmasi 3TP dan kawasan terpencil lainnya; 13) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP dan kawasan terpencil lainnya; 14) Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*); 13) Fasilitasi

Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global; 14) Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK di Daerah Afirmasi 3TP dan kawasan terpencil lainnya; 15) Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama; 16) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui *upskilling* maupun *reskilling*.

Untuk **membangun manusia yang sejahtera** dilakukan melalui arah kebijakan 1) Perluasan pengembangan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi; 2) Perluasan pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan; 3) Penyediaan Akses permodalan usaha yang luas bagi masyarakat miskin dan rentan; 4) Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan; 5) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion; 6) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien; 7) Penyediaan Akses Layanan terpadu, profesional, merata, berkeadilan dan bermartabat bagi seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial terutama bagi kelompok marjinal, rentan; 8) Perluasan penyediaan bantuan sosial (bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi), dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan; 9) Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan; 10) Pemerataan dan peningkatan akses layanan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 11) Perluasan Implementasi pemberdayaan pilar - pilar sosial, KAT dan Restorasi Sosial, dalam pemberdayaan Sosial masyarakat miskin, individu dan Lembaga Kesejahteraan Sosial; 13) Pemerataan dan Akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas di PEMDA, BUMN, BUMD, dan swasta di seluruh sektor; 14) Pengembangan/peningkatan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi

di Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya melalui bertambahnya *demand*;

- 15) Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi;
- 16) Percepatan sanitasi terpadu berbasis masyarakat (STBM);
- 17) Peningkatan penyediaan rumah layak huni dengan skema kolaborasi antar pemangku kepentingan bidang perumahan;
- 18) Percepatan penyediaan hunian layak di kawasan kumuh perkotaan.

4. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perwujudan Riau Maju”**. Transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul dan sejahtera bertumpu pada SDM Riau yang maju dan berkarakter.

Periode keempat ini merupakan periode terakhir dari penggalan RPJPD yang merupakan hasil final dari Perwujudan Riau Maju pada Transformasi Sosial. Upaya untuk **membangun manusia yang sehat** dilakukan melalui arah kebijakan 1) Menjaga konsistensi upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui percepatan pemenuhan penyediaan air minum, sanitasi lingkungan/perumahan, RTH dan fasilitas komunal pendukung kesehatan di wilayah sudah terjangkau di semua daerah; 2) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal; 3) Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan menjangkau semua wilayah; 4) Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya; 5) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan Internasional; 6) Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas di daerah afirmasi dan daerah terpencil; 7) Penuntasan dan pencegahan stunting di semua wilayah; 8) Terwujudnya Ketahanan Pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; 9) Eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan di semua wilayah.

Untuk **membangun manusia yang cerdas, kreatif, dan unggul** dilakukan melalui arah kebijakan 1) Wajib belajar 13 tahun merata di semua wilayah; 2) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah; 3) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik bagi masyarakat berpendapatan rendah dan berprestasi di semua wilayah; 4) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah; 4)

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 5) Penguatan kurikulum PAUD, dasar, dan menengah berbasis talenta, karakter, *digital literacy* dan muatan lokal budaya Melayu Riau beserta kesiapan gurunya; 6) Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, keunggulan daerah, dan kaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 7) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik; 8) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 9) Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan; 10) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; 11) Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di semua wilayah; 12) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas (bila diperlukan); 13) Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*); 14) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global; 15) Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK; 16) Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama di semua wilayah; 17) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui *upskilling* maupun *reskilling* yang berkelanjutan.

Untuk **membangun manusia yang sejahtera** dilakukan melalui arah kebijakan 1) Penguatan sarana dan prasarana dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi; 2) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan secara merata; 3) Penyediaan Akses permodalan usaha yang luas bagi masyarakat miskin dan rentan; 4) Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan di semua wilayah; 5) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion di semua wilayah; 6) Perwujudan Perlindungan Sosial yang inklusi, adil dan merata; 7) Penyediaan bantuan sosial (bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi), dan sebagainya bagi kelompok marjinal dan rentan; 8) Perwujudan Perlindungan Sosial yang inklusi, adil dan

merata; 9) Perkuatan kelembagaan pilar-pilar sosial, KAT dan restorasi sosial, dalam pemberdayaan sosial masyarakat miskin, individu dan lembaga kesejahteraan sosial; 10) Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas; 11) Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya melalui bertambahnya demand; 12) Pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi di semua wilayah; 13) Percepatan sanitasi terpadu berbasis masyarakat (STBM); 14) Penuntasan Rumah Tidak Layak Huni melalui implementasi skema yang inovatif; 15) Percepatan penyediaan hunian layak di kawasan kumuh perkotaan.

5.1.2 Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif dan Ekonomi Hijau

Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi Provinsi Riau dari yang berbasis komoditas bernilai tambah rendah menjadi komoditas yang bernilai tambah tinggi yang didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Pengembangan sektor ekonomi dilakukan terutama pada industri manufaktur dan pertanian, pengembangan ekonomi hijau, penerapan teknologi informasi, investasi yang besar dan didukung pembangunan infrastruktur. Guna mewujudkan transformasi ekonomi maka disusun arah kebijakan dan indikatornya sebagai berikut.



Gambar 5.3.

Tahapan Arah Kebijakan Lima Tahunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025-2045 pada Transformasi Ekonomi Untuk Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif dan Ekonomi Hijau

Tabel 5.2. Target Indikator Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif dan Ekonomi Hijau

| No | Indikator | Baseline | Target | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2025 | 2029 | 2034 | 2039 | 2045 |
| APR4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi | | | | | | |
| 1 | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | 27,59 | 27,69 - 30,25 | 27,96 - 34,88 | 28,55 - 39,11 | 36,20 - 36,35 |
| 2 | Pengembangan Pariwisata | | | | | |
| | a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | 0,54 | 0,55 - 0,53 | 0,57 - 0,55 | 0,59 - 0,57 | 0,94 |
| | b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang) | 16,00 | 26,56 | 38,63 | 55,52 | 76,35 |
| 3 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) | 0,150 - 0,167 | 0,140 - 0,160 | 0,140 - 0,150 | 0,150 - 0,140 | 0,194 - 0,102 |
| 4 | Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD | | | | | |
| | a-i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian pada level provinsi (%) | 12,66 | 13,06 | 13,57 | 14,08 | 14,70 |
| | a-ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada level provinsi (%) | 2,15 | 2,45 | 2,83 | 3,21 | 3,65 |
| | b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%) | 5,75 | 6,99 | 8,55 | 10,11 | 12,00 |
| | c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) | 0,52 | 1,28 | 2,24 | 3,20 | 4,34 |
| | d. Return on Asset (ROA) BUMD (%) | 4,10 | 4,42 | 4,82 | 5,22 | 5,71 |
| 5 | Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik | | | | | |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,55 - 3,66 | 3,12 - 3,52 | 2,86 - 3,36 | 2,42 - 3,08 | 1,81 - 2,83 |
| | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal | 52,00 | 60,60 | 71,35 | 82,10 | 95,00 |
| 6 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 45,70 | 48,24 | 51,62 | 55,23 | 59,90 |
| 7 | Tingkat Penguasaan IPTEK | | | | | |
| | a. Indeks Kapabilitas Daerah | 2,36 | 2,90 | 3,49 | 4,19 | 4,88 |
| | b. Indeks Inovasi Daerah | 58,68 | 69,00 | 77,31 | 86,62 | 100,00 |
| APR5 Transformasi Digital | | | | | | |
| 8 | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 6,1 | 6,33 | 6,63 | 6,93 | 7,50 |
| APR6 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global | | | | | | |
| 9 | Koefisien Variasi Harga Antarwilyah Tingkat Provinsi | 8,27 | 7,64 | 6,86 | 6,07 | 5,13 |

| No | Indikator | Baseline | Target | | | |
|---|---|----------|--------|-------|-------|-------|
| | | 2025 | 2029 | 2034 | 2039 | 2045 |
| 10 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | 33,00 | 32,03 | 30,86 | 29,74 | 28,44 |
| 11 | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | 39,10 | 40,76 | 42,94 | 45,24 | 48,16 |
| APR7 Penerapan Ekonomi Hijau | | | | | | |
| 12 | Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau | | | | | |
| | a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah | 59,86 | 65,91 | 75,09 | 82,80 | 87,18 |
| | b. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%) | 36,00 | 39,01 | 43,12 | 47,67 | 53,76 |
| APR8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi | | | | | | |
| 13 | Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan | | | | | |
| | a. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | 80,00 | 83,65 | 88,45 | 93,52 | 100 |
| | b. Persentase Desa Mandiri | 1,13 | 4,18 | 8,00 | 11,82 | 16,40 |

Sumber : SEB Mendagri RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 dan Hasil Analisis

Berdasarkan tabel di atas, pada Transformasi Ekonomi Untuk Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif dan Ekonomi Hijau yang akan menjadi acuan utama untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat dijelaskan ke dalam 5 (lima) tahapan untuk 4 (empat) kali periode dalam arah kebijakan.

1. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perkuatan Fondasi Transformasi”**. Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif dan Ekonomi Hijau bertumpu pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, hilirisasi SDA, penguatan industri dan UMKM, serta produktivitas tenaga kerja.

Peningkatan produktivitas dan nilai tambah **inovasi IPTEK** melalui arah kebijakan 1) Modernisasi pertanian dan implementasi teknologi *smart farming* melalui penyediaan bibit, varietas unggul, instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang berstandar nasional/global, ramah lingkungan dan ekonomis; 2) Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer

yang dapat diimplementasikan oleh petani; 3) Penguatan kelembagaan usaha petani dan pembiayaan koperasi petani; 4) Modernisasi usaha perikanan dan implementasi teknologi komoditas perikanan; 5) Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan, petambak dan Pembudidaya ikan guna meningkatkan produktivitasnya; 6) Penguatan kelembagaan usaha/koperasi nelayan, petambak dan pembudidaya ikan; 7) Pengembangan kemitraan pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasi jaringan pemasaran, perbankan dan asuransi pertanian; 8) Pengembangan kemitraan perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi perikanan, serta penguatan kolaborasi jaringan pemasaran, perbankan dan asuransi perikanan; 9) Penataan amenities, peningkatan SDM Pariwisata dan manajemen pengelolaan destinasi wisata; 10) Promosi pariwisata; 11) Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif; 12) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global; 13) Penguatan proses bisnis dan kelembagaan koperasi serta adopsi teknologi; 14) Peningkatan produktivitas BUMD; 15) Pembangunan infrastruktur penunjang industri yang ramah lingkungan; 16) Pembangunan/peningkatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/*stockyard* yang modern terintegrasi); 17) Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital; 18) Penguatan proses bisnis UMKM melalui penguatan kelembagaan, perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis; 19) Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi dan penerapan insentif serta disinsentif.

Peningkatan produktivitas dan nilai tambah melalui **Ekonomi Produktif**, dilakukan dengan arah kebijakan 1) Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan yang menjadi akses penghubung ke beberapa kawasan strategis (kawasan industri/pariwisata); 2) Fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum untuk ruas jalan tol baru (Untuk ruas tol yang baru peran pemerintah provinsi memfasilitasi dalam pengadaan tanah sesuai dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang diajukan oleh

instansi/lembaga yang memerlukan tanah) yaitu Pembangunan Tol Trans Sumatera pada wilayah Riau untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: Pekanbaru – Pangkalan Kerinci – Rengat, Rengat – Jambi, Pekanbaru – Siak Sri Indrapura, Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi, Pasir Pengarayan – Duri, Teluk Kuantan – Rengat; 3) Fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum untuk ruas jalan tol baru (Penetapan lokasi): Untuk ruas tol yang baru peran pemerintah provinsi memfasilitasi dalam pengadaan tanah sesuai dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang diajukan oleh instansi/lembaga yang memerlukan tanah pada pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkaran Dumai dan lingkaran Pekanbaru serta pengembangan/peningkatan jalan akses menuju jalan tol untuk pengembangan ekonomi dan logistik daerah; 4) Fasilitasi, Koordinasi dan Verifikasi untuk Peningkatan sarana dan prasarana perkeretaapian pada ruas Rantau Prapat – Kota Pinang – Dumai – Pekanbaru, Pekanbaru –Jambi, dan Padang – Pekanbaru dan alternatif untuk pengangkutan hasil bumi (sawit, CPO, kayu untuk pulp/paper, dan lainnya) dari wilayah produksi ke wilayah pengolahan; 5) Fasilitasi, Koordinasi dan Verifikasi Peningkatan kepelabuhanan untuk peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama bertaraf *global port*, terutama di Pelabuhan Dumai serta pembangunan pelabuhan lainnya untuk menangkap peluang jasa kepelabuhanan dari kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka dan sekitarnya; 6) Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya, terutama di Kep. Meranti dan daerah lainnya; 7) Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya dengan pelabuhan-pelabuhan utama, terutama dari Kep. Meranti dan daerah lainnya; 8) Fasilitasi, Koordinasi dan Verifikasi Peningkatan kualitas pelayanan Bandar Udara yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP dan/atau Bandar Udara Internasional baru.

Untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah melalui **Ekonomi Hijau**, dilakukan dengan arah kebijakan 1) Membangun infrastruktur migas dan pengembangan kilang minyak untuk ketahanan energi; 2) Penyediaan perumahan

yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya, termasuk penguatan regulasi dan kelembagaannya; 3) Penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan akses ke sumber daya IKM mendukung rantai nilai industri domestik dan global; 4) Penguatan kelembagaan skema-skema kerja sama regional dan internasional; 5) Pembangunan/peningkatan jalan akses menuju kawasan pertanian; 6) Penguatan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah; 7) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan; 8) Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Provinsi Riau yaitu Penguatan kelembagaan, dan Promosi kawasan; 9) Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau (perdagangan karbon, *offsetting*, dan pajak karbon); 10) Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, terutama pada metropolitan Pekanbaru dan kawasan perkotaan Dumai dan perkotaan Duri (penguatan kelembagaan dan perencanaan); 11) Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dan sebagainya); 12) Percepatan penyediaan infrastruktur, layanan persampahan, sanitasi, air baku dan air minum pada kawasan perkotaan; 13) Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green and grey infrastructure)* pada kawasan perkotaan; 14) Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan dan Sanitasi Penyediaan Infrastruktur Sampah dan Sanitasi Perkotaan; 15) Peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage* di kawasan 3TP, perdesaan dan terpencil; 16) Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Pekanbaru; 17) Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Pekanbaru (penguatan kelembagaan dan regulasi); 18) Percepatan penyediaan

infrastruktur energi rendah emisi berbasis pembangunan jaringan gas kota di sekitar sumur gas dan wilayah yang sudah ada infrastruktur pipa gas; 19) *City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada kawasan perkotaan; 20) Penguatan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal; 21) Ketersediaan, pemanfaatan dan pengembangan energi kelistrikan yang ramah lingkungan; 22) Peningkatan koordinasi antar-lembaga, kualitas pelatihan, perkuatan pembentukan kelembagaan *transition school to work* dan perkuatan pelayanan ketenagakerjaan melalui Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK); 23) Perkuatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan melalui penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengarusutamaan gender dan inklusi sosial; 24) Perkuatan Kelembagaan dan Pelayanan Desa dari Tata Kelola keuangan desa; 25) Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

2. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Percepatan Transformasi”**. Transformasi Ekonomi Untuk Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif dan Ekonomi Hijau bertumpu pada peningkatan produksi dan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi.

Pada periode kedua ini, melanjutkan apa yang telah dimulai pada periode pertama. Transformasi Ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah melalui **inovasi IPTEK** dilakukan dengan arah kebijakan 1) Percepatan modernisasi pertanian dan implementasi teknologi smart farming melalui penyediaan bibit, varietas unggul, instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang berstandar nasional/global, ramah lingkungan dan ekonomis; 2) Percepatan Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer; 3) Percepatan Penguatan kelembagaan usaha petani dan pembiayaan koperasi petani; 4) Pengembangan Modernisasi usaha perikanan dan implementasi teknologi komoditas perikanan; 5) Pengembangan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan, petambak dan Pembudidaya ikan guna meningkatkan produktivitasnya; 6)

Percepatan penguatan kelembagaan dan peningkatan akses pembiayaan kredit usaha, market, bank dan asuransi perikanan bagi nelayan, petambak dan pembudidaya ikan; 7) Pengembangan kemitraan pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasi jaringan pemasaran, perbankan dan asuransi pertanian; 8) Percepatan pengembangan kemitraan perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi perikanan, serta penguatan kolaborasi jaringan pemasaran, perbankan dan asuransi perikanan; 9) Percepatan penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata buatan, wisata kultural/budaya, wisata religi, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif melalui Penguatan amenitas, Peningkatan SDM Pariwisata dan manajemen pengelolaan Destinasi Wisata; 10) Percepatan promosi pariwisata; 11) Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif; 12) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global; 13) Percepatan penguatan proses bisnis dan kelembagaan koperasi serta adopsi teknologi; 14) Peningkatan produktivitas BUMD; 15) Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang industri yang ramah lingkungan; 16) Pembangunan/peningkatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/*stockyard* yang modern terintegrasi); 17) Pengembangan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital; 18) Percepatan pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital; 19) Penguatan proses bisnis UMKM melalui penguatan kelembagaan, perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis; 20) Percepatan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi dan penerapan insentif serta disinsentif.

Untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah melalui **Ekonomi Produktif**, dilakukan dengan arah kebijakan 1) Percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan yang menjadi akses penghubung ke beberapa kawasan strategis (kawasan industri/pariwisata); 2) Fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum untuk ruas

jalan tol baru (Untuk ruas tol yang baru peran Pemprov memfasilitasi dalam pengadaan tanah sesuai dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang diajukan oleh instansi/lembaga yang memerlukan tanah) yaitu Pembangunan Tol Trans Sumatera pada wilayah Riau untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: Pekanbaru – Pangkalan Kerinci – Rengat, Rengat – Jambi, Pekanbaru – Siak Sri Indrapura, Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi, Pasir Pengarayan – Duri, Teluk Kuantan – Rengat; 3) Pengembangan/ peningkatan jalan akses menuju jalan tol untuk pengembangan ekonomi dan logistik daerah; 4) Fasilitasi, Koordinasi dan Verifikasi Peningkatan sarana dan prasarana perkeretaapian pada ruas Rantau Prapat – Kota Pinang – Dumai – Pekanbaru, Pekanbaru –Jambi, dan Padang – Pekanbaru dan alternatif untuk pengangkutan hasil bumi (sawit, CPO, kayu untuk pulp/paper, dan lainnya) dari wilayah produksi ke wilayah pengolahan; 5) Fasilitasi, Koordinasi dan Verifikasi Peningkatan kepelabuhanan untuk peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama bertaraf global port, terutama di Pelabuhan Dumai serta pembangunan pelabuhan lainnya untuk menangkap peluang jasa kepelabuhan dari kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka dan sekitarnya; 6) Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP daerah terpencil lainnya, terutama di Kep. Meranti dan daerah lainnya; 7) Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya dengan pelabuhan-pelabuhan utama, terutama dari Kep. Meranti dan daerah lainnya; 8) Fasilitasi, Koordinasi dan Verifikasi Peningkatan kualitas pelayanan Bandar Udara yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP dan/atau Bandar Udara Internasional baru.

Untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah melalui **Ekonomi Hijau**, dilakukan dengan arah kebijakan 1) Mempercepat pembangunan infrastruktur migas dan pengembangan kilang minyak untuk ketahanan energi; 2) Percepatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya, termasuk penguatan regulasi dan kelembagaannya; 3) Penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan akses ke sumber daya IKM mendukung rantai nilai industri domestik dan global; 4) Percepatan peningkatan rantai nilai global

melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya; 5) Pembangunan/peningkatan jalan akses menuju kawasan pertanian; 6) Percepatan penguatan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah; 7) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan termasuk Pembangunan/Peningkatan Jalan Akses menuju kawasan perikanan; 8) Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Provinsi Riau (Pengelolaan dan Promosi Kawasan); 9) Percepatan penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau (perdagangan karbon, *offsetting*, dan pajak karbon); 10) Percepatan penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, terutama pada metropolitan Pekanbaru dan kawasan perkotaan Dumai dan perkotaan Duri (penguatan kelembagaan dan perencanaan); 11) Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dan sebagainya); 12) Percepatan penyediaan infrastruktur, layanan persampahan, sanitasi, air baku dan air minum pada kawasan perkotaan; 13) Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green & grey infrastructure)* pada kawasan perkotaan; 14) Penyediaan Infrastruktur Sampah dan Sanitasi Perkotaan; 15) Percepatan peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage* di kawasan 3TP, perdesaan dan terpencil; 15) Percepatan pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Pekanbaru; 16) Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Pekanbaru; 17) Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan dan di sekitar sumur gas; 18) Percepatan *City Beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban

tourism, terutama pada kawasan perkotaan; 19) Percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal; 20) Percepatan ketersediaan, pemanfaatan dan pengembangan energi kelistrikan yang ramah lingkungan; 21) Pengembangan program pelatihan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; 22) Pemberdayaan pekerja upahan dan Pengembangan kewirausahaan pemuda, sosial, desa, dan inklusif; 23) Percepatan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dan Pelatihan reskilling dan upskilling dan transisi *school to work*; 24) Pengembangan pelayanan ketenagakerjaan melalui Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK); 25) Percepatan inklusif gender dengan membangun program pembimbingan dan pendampingan kewirausahaan dan jejaring usaha bagi perempuan; 26) Percepatan pembangunan kawasan Perdesaan.

3. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perluasan Transformasi”**. Transformasi Ekonomi Untuk Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif dan Ekonomi Hijau bertumpu pada Riau sebagai pembangkit perekonomian yang terintegrasi dalam jaringan domestik, regional dengan ekspor yang stabil.

Pada periode ketiga ini, melanjutkan apa yang telah dilakukan pada periode kedua. Transformasi Ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah melalui **inovasi IPTEK** dilakukan dengan arah kebijakan 1) Perluasan modernisasi pertanian dan implementasi teknologi smart farming melalui penyediaan bibit, varietas unggul, instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang berstandar nasional/global, ramah lingkungan dan ekonomis; 2) Pengembangan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya menuju petani yang maju dan Berdayasaing; 3) Perluasan penguatan kelembagaan usaha petani dan pembiayaan koperasi petani; 4) Perluasan Modernisasi usaha perikanan dan implementasi teknologi komoditas perikanan; 5) Perluasan penguatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan, petambak dan pembudidaya ikan guna meningkatkan produktivitasnya; 6) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha, market, bank dan asuransi perikanan bagi nelayan, petambak dan pembudidaya ikan; 7) Perluasan penguatan kelembagaan usaha/koperasi nelayan, petambak dan pembudidaya ikan; 8) Perluasan pengembangan kemitraan perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi perikanan, serta

penguatan kolaborasi jaringan pemasaran, perbankan dan asuransi perikanan; 9) Perluasan penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata buatan, wisata kultural/budaya, wisata religi, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif (Penguatan amenitas, Peningkatan SDM Pariwisata dan Manajemen Pengelolaan Destinasi Wisata); 10) Perluasan promosi pariwisata; 11) Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif; 12) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global; 13) Perluasan penguatan proses bisnis dan kelembagaan koperasi serta adopsi teknologi; 14) Peningkatan produktivitas BUMD; 15) Perluasan pembangunan infrastruktur penunjang industri yang ramah lingkungan; 16) Pembangunan/Peningkatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi); 17) Perluasan pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital; 18) Penguatan proses bisnis UMKM melalui penguatan kelembagaan, perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis; 19) Perluasan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi dan penerapan insentif serta disinsentif.

Untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah melalui **Ekonomi Produktif**, dilakukan dengan arah kebijakan 1) Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan dan Pelabuhan yang menjadi akses penghubung ke beberapa kawasan strategis (kawasan industri/pariwisata); 2) Fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum untuk ruas jalan tol baru (Untuk ruas tol yang baru peran Pemprov memfasilitasi dalam pengadaan tanah sesuai dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang diajukan oleh instansi/lembaga yang memerlukan tanah) yaitu Pembangunan Tol Trans Sumatera pada wilayah Riau untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: Pekanbaru – Pangkalan Kerinci – Rengat, Rengat – Jambi, Pekanbaru – Siak Sri Indrapura, Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi, Pasir Pengarayan – Duri, Teluk Kuantan – Rengat; 3) Pengembangan/peningkatan jalan akses menuju jalan tol untuk pengembangan

ekonomi dan logistik daerah; 4) Fasilitasi, Koordinasi dan Verifikasi Peningkatan sarana dan prasarana perkeretaapian pada ruas Rantau Prapat – Kota Pinang – Dumai – Pekanbaru, Pekanbaru –Jambi, dan Padang – Pekanbaru dan alternatif untuk pengangkutan hasil bumi (sawit, CPO, kayu untuk pulp/paper, dan lainnya) dari wilayah produksi ke wilayah pengolahan; 5) Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama bertaraf global port, terutama di Pelabuhan Dumai serta pembangunan pelabuhan lainnya untuk menangkap peluang jasa kepelabuhanan dari kapal-kapal yang melintas di selat Malaka dan sekitarnya; 6) Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpulan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Kep. Meranti dan daerah terpencil lainnya; 7) Perluasan penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan pelabuhan-pelabuhan utama; 8) Fasilitasi, Koordinasi dan Verifikasi Peningkatan kualitas pelayanan Bandar Udara yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP dan/atau Bandar Udara Internasional baru.

Untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah melalui **Ekonomi Hijau**, dilakukan dengan arah kebijakan 1) Perluasan pembangunan infrastruktur migas dan pengembangan kilang minyak untuk ketahanan energi; 2) Perluasan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya, termasuk penguatan regulasi dan kelembagaannya; 3) Kemandirian kemitraan IKM pada rantai nilai industri domestik dan global; 4) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya; 5) Pembangunan/peningkatan jalan akses menuju kawasan pertanian; 6) Perluasan penguatan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah; 7) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan; 8) Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Provinsi Riau; 9) Perluasan penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau (perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon); 10) Perluasan penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan,

dan berketahanan, terutama pada metropolitan Pekanbaru dan kawasan perkotaan Dumai dan perkotaan Duri (penguatan kelembagaan dan perencanaan); 11) Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb); 12) Perluasan penyediaan infrastruktur, layanan persampahan, sanitasi, air baku dan air minum pada kawasan perkotaan; 13) Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green and grey infrastructure)* pada kawasan perkotaan; 14) Penyediaan Infrastruktur Sampah dan Sanitasi Perkotaan; 15) Perluasan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage* di kawasan 3TP, perdesaan dan terpencil; 16) Perluasan *coverage* sarana prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Pekanbaru; 17) Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Pekanbaru; 18) Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan dan di sekitar sumur gas; 19) Perluasan *City Beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada kawasan perkotaan; 20) Penguatan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal; 21) Perluasan ketersediaan, pemanfaatan dan pengembangan energi kelistrikan yang ramah lingkungan; 21) Pemenuhan Tuntutan Pasar Kerja Global dan perluasan pelayanan ketenagakerjaan melalui Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK); 22) Percepatan inklusif gender dengan membangun program pembimbingan dan pendampingan kewirausahaan dan jejaring usaha bagi perempuan; 23) Peningkatan Daya saing Daerah melalui peningkatan Daya saing ekonomi Desa yang global.

4. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perwujudan Riau Maju”**. Transformasi Ekonomi Untuk Meningkatkan

Produktivitas dan Nilai Tambah melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif dan Ekonomi Hijau bertumpu pada Provinsi Riau berpendapatan tinggi.

Pada periode keempat yang merupakan periode terakhir dari RPJPD ini Riau Maju harus sudah bisa diwujudkan dengan masyarakat yang berpendapatan tinggi. Untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah melalui **inovasi IPTEK** dilakukan dengan arah kebijakan 1) Modernisasi pertanian dan implementasi teknologi smart farming melalui penyediaan bibit, varietas unggul, instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang berstandar nasional/global, ramah lingkungan dan ekonomis di semua wilayah (terwujudnya produktivitas pertanian yang berkelanjutan); 2) Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer pada semua wilayah (Terwujudnya petani yang maju dan Berdayasaing); 3) Penguatan kelembagaan usaha petani dan pembiayaan koperasi petani secara merata (Terwujudnya petani yang mandiri, maju dan Berdayasaing); 4) Terwujudnya produktivitas usaha perikanan yang berdayasaing dan berkelanjutan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan, petambak dan pembudidaya ikan; 5) Perluasan kemitraan koperasi perikanan tangkap dan budidaya dengan jaringan pemasaran, perbankan dan asuransi perikanan; 6) Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata buatan, wisata kultural/budaya, wisata religi, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif (Pemantapan amenities, Peningkatan SDM dan manajemen pengelolaan); 7) Promosi pariwisata secara menyeluruh; 8) Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif pada sebagian besar kawasan; 9) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global; 10) Penguatan proses bisnis dan kelembagaan koperasi serta adopsi teknologi menuju Koperasi Maju dan Moderen; 11) Peningkatan produktivitas BUMD; 12) Pembangunan infrastruktur penunjang industri yang ramah lingkungan, terwujudnya Infrastruktur penunjang Industri yang handal dan berkelanjutan; 13) Pembangunan/Peningkatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi); 14) Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam

rangka transformasi digital di semua wilayah; 15) Penguatan proses bisnis UMKM melalui penguatan kelembagaan, perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis mewujudkan UMKM yang maju dan moderen sebagai penopang ekonomi; 17) Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi dan penerapan insentif serta disinsentif.

Untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah melalui **Ekonomi Produktif**, dilakukan dengan arah kebijakan 1) Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan yang menjadi akses penghubung ke beberapa kawasan strategis (kawasan industri/pariwisata) secara merata; 2) Fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum untuk ruas jalan tol baru (Untuk ruas tol yang baru peran Pemprov memfasilitasi dalam pengadaan tanah sesuai dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang diajukan oleh instansi/lembaga yang memerlukan tanah) yaitu Pembangunan Tol Trans Sumatera pada wilayah Riau untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: Pekanbaru – Pangkalan Kerinci – Rengat, Rengat – Jambi, Pekanbaru – Siak Sri Indrapura, Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi, Pasir Pengarayan – Duri, Teluk Kuantan – Rengat; 3) Pengembangan/peningkatan jalan akses menuju jalan tol untuk pengembangan ekonomi dan logistik daerah; 4) Fasilitasi, Koordinasi dan Verifikasi Peningkatan sarana dan prasarana perkeretaapian pada ruas Rantau Prapat – Kota Pinang – Dumai – Pekanbaru, Pekanbaru –Jambi, dan Padang – Pekanbaru dan alternatif untuk pengangkutan hasil bumi (sawit, CPO, kayu untuk pulp/paper, dan lainnya) dari wilayah produksi ke wilayah pengolahan; 5) Fasilitasi, Koordinasi dan Verifikasi Peningkatan kepelabuhanan untuk peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama bertaraf global port, terutama di Pelabuhan Dumai serta pembangunan pelabuhan lainnya untuk menangkap peluang jasa kepelabuhanan dari kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka dan sekitarnya; 6) Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpulan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Kep. Meranti dan daerah terpencil lainnya; 7) Fasilitasi, Koordinasi dan Verifikasi Peningkatan kualitas pelayanan Bandar Udara yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis

pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP dan/atau Bandar Udara Internasional baru.

Untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah melalui **Ekonomi Hijau**, dilakukan dengan arah kebijakan 1) Pengelolaan Infrastruktur migas, pengembangan kilang minyak untuk ketahanan energi; 2) Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya, termasuk penguatan regulasi dan kelembagaannya; 3) IKM yang unggul; 4) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya; 5) Penuntasan Aksesibilitas mendukung Produktivitas Pertanian dan Daya Saing Pertanian; 6) Terwujudnya ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah; 7) Penuntasan Aksesibilitas mendukung Produktivitas Pertanian dan Daya Saing perikanan; 8) Pemantapan Pengelolaan kawasan, pendalaman struktur industri dan diversifikasi produk; 9) Terwujudnya ekosistem dan lansekap ekonomi hijau; 10) Penuntasan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, terutama pada metropolitan Pekanbaru dan kawasan perkotaan Dumai dan perkotaan Duri; 11) Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dan sebagainya); 12) Penyediaan infrastruktur, layanan persampahan, sanitasi, air baku dan air minum pada kawasan perkotaan secara menyeluruh; 13) Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green and grey infrastructure) pada kawasan perkotaan; 14) Penyediaan Infrastruktur Sampah dan Sanitasi Perkotaan; 15) *Full coverage* dan akses internet yang cepat dan meliputi seluruh wilayah Riau; 16) Pembangunan dan *full coverage* sarana prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Pekanbaru dan kawasan perkotaan lainnya; 17) Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Pekanbaru; 18) Optimalisasi infrastruktur energi rendah emisi berbasis pembangunan jaringan gas kota di sekitar sumur gas dan wilayah yang sudah ada infrastruktur pipa gas; 19) *City beautification* dalam

rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan; 20) Kemandirian ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal; 21) Ketersediaan, pemanfaatan dan pengembangan energi kelistrikan yang ramah lingkungan; 22) Perwujudan tenagakerja yang siap bersaing dipasar global melalui Peningkatan mobilitas tenaga kerja, Mengurangi ketimpangan keterampilan, Peningkatan mobilitas tenaga kerja, Kerja sama yang berkelanjutan, Penguatan kerja sama dengan perusahaan, Kesiapan terhadap perubahan, Perlindungan pekerja migran dan Meningkatkan daya saing ekonomi; 23) Perwujudan kesempatan kerja secara nasional maupun daerah dan mencapai pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan, sekaligus menghadapi tantangan seperti pengangguran kaum muda, penuaan populasi, dan perubahan iklim; 24) Perwujudan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) sebagai market intelligence ketenagakerjaan saat pra, selama, dan pasca bekerja yang terintegrasi ke seluruh stakeholder pemerintah dan swasta; 25) Penguatan skiL dengan membangun kompetensi generasi emas khusus perempuan dalam menghadapi tuntutan pasar global; 26) Perwujudan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan.

5.1.3 Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Mewujudkan transformasi tata kelola yang berintegritas dan adaptif memungkinkan adanya pengelolaan sektor pemerintahan dan publik menjadi lebih efektif dan efisien melalui arah pembangunan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Hal ini memungkinkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih akuntabel yang didasarkan atas pertukaran informasi yang lebih terbuka dan transparan. Adanya tata kelola pemerintahan yang baik mendorong pelayanan terhadap publik yang lebih optimal dan munculnya regulasi yang adaptif. Berdasarkan arah kebijakan transformasi tata kelola di atas dengan arahan dari misi, maka untuk dapat mewujudkan transformasi tata kelola di Provinsi Riau disusun arah kebijakan dan indikatornya sebagai berikut.



Gambar 5.4.

Tahapan Arah Kebijakan Lima Tahunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025-2029 pada Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Tabel 5.3. Target Indikator Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

| No | Indikator | Baseline 2025 | Target | | | |
|---|---|---------------|--------|-------|-------|-------|
| | | | 2029 | 2034 | 2039 | 2045 |
| APR9 Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif | | | | | | |
| 1 | Indeks Reformasi Hukum | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |
| 2 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,06 | 3,40 | 3,90 | 4,40 | 5,00 |
| 3 | Indeks Pelayanan Publik | 4,11 | 4,20 | 4,30 | 4,50 | 5,00 |
| 4 | Indeks Integritas Nasional | 74,52 | 77,64 | 80,77 | 83,90 | 87,03 |

Sumber : SEB Mendagri RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 dan Hasil Analisis

Berdasarkan tabel di atas, pada misi Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif akan menjadi acuan utama untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat dijelaskan ke dalam 5 (lima) tahapan untuk 4 (empat) kali periode dalam arah kebijakan.

1. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perkuatan Fondasi Transformasi”** dan untuk mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif, dilakukan melalui kelembagaan tepat fungsi, kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, pelayanan publik berbasis TI, penguatan kapasitas masyarakat sipil.

Arah kebijakan pada tahap ini dilakukan melalui 1) Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah; 2) Peningkatan partisipasi masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; 3) Penguatan infrastruktur pelayanan dan inovasi pelayanan; 4) Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah; 5) Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Riau, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Riau yang profesional dan bebas korupsi; 6) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital; 7) Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja; 8) Penguatan integritas partai politik.

2. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Percepatan Transformasi”**. Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif bertumpu pada kelembagaan kolaboratif, SDM ASN sejahtera, proporsional, dan berkompeten; masyarakat sipil yang partisipatif.

Arah kebijakan pada tahap ini dilakukan melalui percepatan 1) Penataan kelembagaan untuk regulasi yang berkualitas, bersih dan akuntabel; 2) Percepatan peningkatan partisipasi masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; 3) Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat; 4) Percepatan penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah; 5) Percepatan penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Riau, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Riau yang profesional dan bebas korupsi; 6) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital; 7) Percepatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja; 8) Penguatan integritas partai politik; 9) Penguatan hukum dan sistem pengawasan.

3. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perluasan Transformasi”**. Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif bertumpu pada Kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, masyarakat sipil mandiri.

Arah kebijakan pada periode ini diantaranya 1) Penguatan Tim Percepatan Reformasi hukum di daerah; 2) Perluasan peningkatan partisipasi masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; 3) Perluasan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat; 4) Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah semakin luas; 5) Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Riau, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Riau yang profesional dan bebas korupsi secara meluas; 6) Perluasan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital; 7) Perluasan Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja; 8) Penguatan integritas partai politik; 9) Penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tindakan korupsi.

4. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perwujudan Riau Maju”**. Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif bertumpu pada Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif.

Arah kebijakan pada tahap ini dilakukan melalui 1) Perwujudan Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik dengan pemerintahan daerah yang memiliki integritas tinggi untuk menciptakan tatakelola pemerintah digital yang transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, bebas KKN, lincah, kolaboratif, Budaya BerAHKLAK dan Profesionalisme ASN; 2) Digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat secara menyeluruh; 3) Penguatan integritas partai politik.

5.1.4 Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah menjadikan daerah dapat meningkatkan daya saing dengan penguatan keamanan dan ketertiban, peningkatan kapasitas fiskal daerah dan dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan militer khususnya di daerah perbatasan. Hal ini dilakukan dengan agenda pembangunan Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial; Stabilitas Ekonomi Makro; serta Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan. Berdasarkan arah kebijakan transformasi dan arahan dari misi, maka untuk dapat mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah di Provinsi Riau disusun arah kebijakan dan indikatornya sebagai berikut.



Gambar 5.5.

Tahapan Arah Kebijakan Lima Tahunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025-2045 pada Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Tabel 5.4. Target Indikator Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

| No | Indikator | Baseline 2025 | Target | | | |
|---|---|---------------|--------|-------|-------|-------|
| | | | 2029 | 2034 | 2039 | 2045 |
| APR10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial | | | | | | |
| 1 | a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah | 70 | 76 | 83,5 | 91 | 100 |
| | b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM | 65 | 68,58 | 73,34 | 78,43 | 85 |
| 2 | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%) | 64,80 | 70,14 | 73,48 | 77,82 | 82,18 |

| No | Indikator | Baseline 2025 | Target | | | |
|--|---|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2029 | 2034 | 2039 | 2045 |
| 3 | Indeks Demokrasi Indonesia | Sedang | Sedang | Sedang | Tinggi | Tinggi |
| APR11 Stabilitas Ekonomi Makro | | | | | | |
| 4 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | 1,04 | 1,35 | 1,89 | 2,62 | 3,90 |
| 5 | Tingkat Inflasi (%) | 2,9 - 3,7 | 2,3 - 3,6 | 1,8 - 3,4 | 1,4 - 3,2 | 1,0 - 3,0 |
| 6 Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan | | | | | | |
| | a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) | 11,52 | 15,62 | 22,86 | 33,44 | 52,80 |
| | b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%) | 0,04 | 0,07 | 0,15 | 0,31 | 0,76 |
| | c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah) | 5.273.463,68 | 8.487.299,62 | 15.385.496,04 | 27.890.318,33 | 56.946.079,95 |
| | d. Total Kredit/PDRB (%) | 9,0 | 12,67 | 19,42 | 29,77 | 49,7 |
| 7 | Inklusi Keuangan (%) | 91,35 | 92,83 | 94,73 | 96,65 | 99,02 |
| APR12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan | | | | | | |
| 8 | Indeks Daya Saing Daerah | 3,31 | 3,51 | 3,90 | 4,33 | 4,86 |
| 9 | Indeks Ketahanan Nasional | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 3,70 | 3,80 |

Sumber : SEB Mendagri RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 dan Hasil Analisis

Berdasarkan tabel di atas, pada misi Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah akan menjadi acuan utama untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat dijelaskan ke dalam 5 (lima) tahapan untuk 4 (empat) kali periode dalam arah kebijakan.

1. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perkuatan Fondasi Transformasi”**. Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah bertumpu komitmen penguatan hukum terkait keamanan dan kerjasama antar pemerintah, masyarakat dan swasta.

Untuk mewujudkan **keamanan daerah yang tangguh** dilakukan melalui arah kebijakan 1) Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas ; 2) Penguatan SDM Perlindungan Masyarakat; 3) Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan

laut; 4) Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana dan prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP dan kawasan terpencil (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya); 5) Penguatan ketahanan nasional dalam perwujudan keterjaminan kelangsungan hidup dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional membangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; 6) Peningkatan pemahaman SDM dan dukungan kelembagaan untuk penguatan ketahanan nasional Provinsi Riau.

Untuk mewujudkan **demokrasi substantial** dilakukan melalui arah kebijakan penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan Penguatan SDM untuk kualitas demokrasi di Provinsi Riau.

Untuk mewujudkan **stabilitas ekonomi makro daerah** dilakukan melalui arah kebijakan 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) dan penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; 2) Penguatan TPID melalui pemantauan dan publikasi harga secara periodik, pengendalian harga, stabilisasi distribusi barang, kerjasama pemenuhan kebutuhan barang dengan daerah produsen, cadangan pangan daerah.

2. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Percepatan Transformasi”**. Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah bertumpu pada peningkatan pengawasan keamanan, stabilitas ekonomi makro dan kerjasama untuk mewujudkan stabilitas daerah.

Untuk mewujudkan **keamanan daerah yang tangguh** dilakukan melalui arah kebijakan 1) Percepatan Pembangunan kerjasama linmas dan masyarakat; 2) Percepatan peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut; 3) Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana dan prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP dan kawasan terpencil (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya); 4) Penguatan sarana dan perasana mendukung peningkatan ketahanan nasional Provinsi Riau.

Untuk mewujudkan **demokrasi substantial** dilakukan melalui arah kebijakan Penguatan Kelembagaan untuk kualitas demokrasi di Provinsi Riau.

Untuk mewujudkan **stabilitas ekonomi makro daerah** dilakukan melalui arah kebijakan 1) Percepatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) dan penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; 2) Optimalisasi TPID melalui pemantauan dan publikasi harga secara periodik, pengendalian harga, stabilisasi distribusi barang, kerjasama pemenuhan kebutuhan barang dengan daerah produsen, cadangan pangan daerah.

3. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perluasan Transformasi”**. Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah bertumpu pada Penguatan Stabilitas daerah, Stabilitas Ekonomi Makro dan kerjasama antar Stakeholder.

Untuk mewujudkan **keamanan daerah yang tangguh** dilakukan melalui arah kebijakan 1) Perluasan penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas; 2) Perluasan peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut; 3) Pelibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dan kerjasama antar daerah dan dengan pemerintah pusat;

Untuk mewujudkan **demokrasi substantial** dilakukan melalui arah kebijakan Penyelarasan penyusunan dan monitoring evaluasi rencana aksi penegakan hukum, anti korupsi dan HAM, politik dan keamanan sebagai bagian IDI.

Untuk mewujudkan **stabilitas ekonomi makro daerah** dilakukan melalui arah kebijakan 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) dan penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.; 2) Pemantapan TPID melalui pemantauan dan publikasi harga secara periodik, pengendalian harga, stabilisasi distribusi barang, kerjasama pemenuhan kebutuhan barang dengan daerah produsen, cadangan pangan daerah.

4. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perwujudan Riau Maju”**. Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah diarahkan pada Perwujudan kehidupan yang demokratis dan kondusif.

Untuk mewujudkan **keamanan daerah yang tangguh** dilakukan melalui arah kebijakan 1) Penegakan hukum secara komprehensif termasuk kenyamanan dan ketertiban lingkungan; 2); Perwujudan keterjaminan kelangsungan hidup dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional membangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Untuk mewujudkan **demokrasi substantial** dilakukan melalui arah kebijakan Perwujudan Demokrasi Indonesia yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan **stabilitas ekonomi makro daerah** dilakukan melalui arah kebijakan 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) dan penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; 2) Pemantapan TPID melalui pemantauan dan publikasi harga secara periodik, pengendalian harga, stabilisasi distribusi barang, kerjasama pemenuhan kebutuhan barang dengan daerah produsen, cadangan pangan daerah.

5.1.5 Mewujudkan Kebudayaan Melayu Berlandaskan Masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi

Mewujudkan kebudayaan Melayu berlandaskan masyarakat yang agamis untuk memantapkan ketahanan sosial dan ekologi dilakukan dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan hidup yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan, serta penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan juga dilakukan

dalam mewujudkan ketahanan sosial. Hal ini dilakukan melalui agenda pembangunan beragama maslahat dan berkebudayaan maju; keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif; lingkungan hidup berkualitas; resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim; serta berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan. Untuk dapat mewujudkan kebudayaan melayu berlandaskan masyarakat yang agamis untuk memantapkan ketahanan sosial dan ekologi di Provinsi Riau maka disusun arah kebijakan dan indikatornya sebagai berikut.



Gambar 5.6.

Tahapan Arah Kebijakan Lima Tahunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025-2045 pada Kebudayaan Melayu Berlandaskan Masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi

Tabel 5.5. Target Indikator Kebudayaan Melayu Berlandaskan Masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi

| No | Indikator | Baseline 2025 | Target | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2029 | 2034 | 2039 | 2045 |
| APR13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju | | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | 60,30-60,37 | 62,19 - 62,36 | 64,64 - 64,94 | 67,18 - 67,62 | 70,37-70,99 |
| 2 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | 72,30 - 72,36 | 72,36- 74,64 | 74,64- 76,92 | 76,92- 79,22 | 79,22 - 79,92 |
| APR14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif | | | | | | |
| 3 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | 73,50 - 73,51 | 73,51- 75,25 | 75,25- 76,99 | 76,99- 78,73 | 78,73 - 78,80 |
| 4 | Indeks Ketimpangan Gender | 0,436- 0,434 | 0,377 - 0,369 | 0,315 - 0,301 | 0,262 - 0,245 | 0,211- 0,192 |
| APR15 Lingkungan Hidup Berkualitas | | | | | | |
| 5 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah | 0,394 | 0,410 | 0,430 | 0,450 | 0,474 |
| 6 | Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | |
| | a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 71,85 | 73,28 | 75,07 | 76,86 | 79,00 |
| | b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) | 14,64 | 18,72 | 25,44 | 34,59 | 50,00 |

| No | Indikator | Baseline 2025 | Target | | | |
|---|--|------------------|--------|-------|-------|---------------|
| | | | 2029 | 2034 | 2039 | 2045 |
| c. Pengelolaan Sampah | | | | | | |
| | - Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) | 5,00 | 22,00 | 43,25 | 64,50 | 90,00 |
| | - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT) | 27,00 | 41,60 | 59,85 | 78,10 | 100,00 |
| APR16 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | | | | | | |
| 8 | Indeks Risiko Bencana (IRB) | 103,07 | 99,72 | 95,74 | 91,75 | 87,77 - 74,65 |
| 9 | Persentase Penurunan Emisi GRK (%) | | | | | |
| | a. Kumulatif | 25,21 | 31,94 | 40,34 | 48,75 | 58,84 |
| | b. Tahunan | 22,34 | 36,44 | 54,07 | 71,70 | 92,85 |
| APR17 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan | | | | | | |
| 7 | Ketahanan Energi, Air, dan Pangan | | | | | |
| | a. Ketahanan Energi | | | | | |
| | - Konsumsi listrik per kapita (kWh) | 1.032 | 1.353 | 1.899 | 2.664 | 4.000 |
| | - Intensitas energi primer (SBM/Rp Milyar) | 56,00 | 59,43 | 59,61 | 59,79 | 60,00 |
| | b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) | 11,07 | 8,92 | 6,23 | 3,55 | 0,32 |
| | Ketahanan Air | | | | | |
| | - Kapasitas Air Baku (m3/detik) | 0,24 | 2,43 | 4,62 | 6,81 | 9,01 |
| | - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) | 10,17 | 16,06 | 28,45 | 50,37 | 100,00 |

Sumber : SEB Mendagri RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 dan Hasil Analisis

Berdasarkan tabel di atas, pada misi Mewujudkan Kebudayaan Melayu Berlandaskan Masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi akan menjadi acuan utama untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat dijelaskan ke dalam 5 (lima) tahapan untuk 4 (empat) kali periode dalam arah kebijakan.

1. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perkuatan Fondasi Transformasi”**. Mewujudkan Kebudayaan Melayu Berlandaskan Masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi bertumpu pada peningkatan ketahanan keluarga dalam lingkungan yang berbudaya dan agamis.

Untuk mewujudkan **kebudayaan Melayu berlandaskan masyarakat yang agamis** dilakukan melalui arah kebijakan 1) Penguatan nilai luhur kebudayaan Melayu Riau (termasuk kurikulum pendidikan muatan lokal budaya Melayu Riau) dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila; 2) Pengembangan pusat kebudayaan Melayu; 3) Penguatan kelembagaan kebudayaan melayu; 4) Pembinaan SDM kebudayaan Melayu; 5) Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan Melayu.

Untuk **memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi** dilakukan melalui arah kebijakan 1) Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan; 2) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 3) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang; 4) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lanjut usia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; 5) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan; 6) Penyusunan RTRW Kab/Kota pasca Revisi RTRW Provinsi; 7) Penguatan tata kelola pengelolaan hutan lindung dan ekosisten alami; 8) Penguatan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*; 9) Peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM dan regulasi; 10) Pembangunan / Peningkatan Kapasitas Air baku di Kawasan Rawan dan Rentan terhadap bencana

2. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Percepatan Transformasi”**. Mewujudkan Kebudayaan Melayu Berlandaskan

Masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi bertumpu pada penguatan karakter masyarakat berbasis nilai budaya dan agama.

Untuk **mewujudkan kebudayaan Melayu berlandaskan masyarakat yang agamis** dilakukan melalui arah kebijakan 1) Percepatan penguatan nilai luhur kebudayaan Melayu Riau (termasuk kurikulum pendidikan muatan lokal budaya Melayu Riau) dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila; 2) Percepatan pengembangan pusat kebudayaan Melayu; 3) Percepatan penguatan kelembagaan kebudayaan Melayu; 4) Percepatan pembinaan SDM kebudayaan Melayu; 5) Percepatan peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan Melayu;

Untuk **memantapkan ketahanan sosial dan ekologi** dilakukan melalui arah kebijakan 1) Percepatan penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan; 2) Percepatan peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 3) Percepatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang; 4) Percepatan pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; 5) Percepatan penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan; 6) Penyusunan RDTR pasca Revisi RTRW Kab Kota; 7) Percepatan penguatan tata kelola pengelolaan hutan lindung dan ekosisten alami; 8) Percepatan penguatan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*; 9) Peningkatan Ketangguhan masyarakat berbasis desa, sekolah dan layanan kesehatan dalam menghadapi bencana; 10) Pembangunan / Peningkatan Kapasitas Air baku di Kawasan Rawan dan Rentan terhadap bencana.

3. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perluasan Transformasi”**. Mewujudkan Kebudayaan Melayu Berlandaskan Masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi bertumpu pada pembangunan masyarakat yang berbudaya dan religius.

Untuk **mewujudkan kebudayaan Melayu berlandaskan masyarakat yang agamis** dilakukan melalui arah kebijakan 1) Penguatan nilai luhur kebudayaan Melayu Riau yang semakin luas (termasuk kurikulum pendidikan muatan lokal budaya Melayu Riau) dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila; 2) Pengembangan pusat kebudayaan Melayu; 3) Penguatan kelembagaan kebudayaan Melayu yang semakin masif; 4) Pembinaan SDM kebudayaan Melayu yang semakin luas; 5) Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan Melayu yang semakin masif.

Untuk **memantapkan ketahanan sosial dan ekologi** dilakukan melalui arah kebijakan 1) Penguatan nilai-nilai keagamaan dalam sendi kehidupan masyarakat; 2) Perluasan peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 3) Perluasan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang; 4) Perluasan pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lanjut usia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; 5) Perluasan penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan; 6) Penguatan tata kelola pengelolaan hutan lindung dan ekosistem alami dalam rangka percepatan terwujudnya Hutan lindung dan ekosistem alami yang lestari; 7) Perluasan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*; 8) Perluasan ketangguhan masyarakat berbasis desa, sekolah dan layanan kesehatan dalam menghadapi bencana; 9) Penguatan Pemenuhan Kapasitas Air baku di Kawasan Rawan dan Rentan terhadap bencana.

4. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perwujudan Riau Maju”**. Mewujudkan Kebudayaan Melayu Berlandaskan Masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi bertumpu pada perwujudan masyarakat yang berkualitas dan adaptif.

Untuk **mewujudkan kebudayaan Melayu berlandaskan masyarakat yang agamis** dilakukan melalui arah kebijakan 1) Penguatan nilai luhur kebudayaan Melayu Riau (termasuk kurikulum pendidikan muatan lokal budaya Melayu Riau)

secara menyeluruh dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila; 2) Pengembangan pusat kebudayaan Melayu; 3) Penguatan kelembagaan kebudayaan Melayu; 4) Pembinaan SDM kebudayaan Melayu secara merata; 5) Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan Melayu;

Untuk memantapkan ketahanan sosial dan ekologi dilakukan melalui arah kebijakan 1) Perwujudan masyarakat kondusif dalam kehidupan dan kerukunan umat beragama; 2) Perwujudan keluarga tangguh, berkualitas, mandiri, bahagia, dan tentram serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.; 3) Perwujudan keluarga tangguh, berkualitas, mandiri, bahagia, dan tentram serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.; 4) Perwujudan keluarga tangguh, berkualitas, mandiri, bahagia, dan tentram serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.; 5) Perwujudan keluarga tangguh, berkualitas, mandiri, bahagia, dan tentram serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.; 6) Terwujudnya Hutan lindung dan ekosistem alami yang lestari 7) Terkelolanya sampah yang bernilai ekonomis; 9) Ketangguhan masyarakat berbasis desa, sekolah dan layanan kesehatan dalam menghadapi bencana; 10) Terpenuhinya Air baku di Kawasan Rawan dan Rentan terhadap bencana.

5.1.6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Antar Kabupaten/Kota

Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Antar Kabupaten/Kota adalah upaya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat umum dan sekaligus menekan ketimpangan yang terjadi di Provinsi Riau. Transformasi ini akan diarahkan kepada perwujudan infrastruktur dasar yang memiliki kualitas terbaik. Pelaksanaan transformasi ini akan difokuskan kepada pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan untuk kesejahteraan dan kepuasan masyarakat di Provinsi Riau. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi dengan mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah dan mewujudkan kebudayaan Melayu berlandaskan masyarakat yang agamis untuk memantapkan ketahanan sosial dan ekologi. Untuk

dapat mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau maka disusun arah kebijakan sebagai berikut.



Gambar 5.7.

Tahapan Arah Kebijakan Lima Tahunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025-2045 pada Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Antar Kabupaten/Kota

Berdasarkan tabel di atas, pada misi Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Antar Kabupaten/Kota yang akan menjadi acuan utama untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat dijelaskan ke dalam 5 (lima) tahapan untuk 4 (empat) kali periode dalam arah kebijakan.

1. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perkuatan Fondasi Transformasi”**. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Antar Kabupaten/Kota bertumpu pada peningkatan pembangunan kewilayahan terutama di kawasan afirmatif.

Arah kebijakan pada tahapan ini dilakukan melalui 1) Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah; 2) Percepatan penyusunan RTRW kabupaten/kota pasca Revisi RTRW Provinsi Riau; 3) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; 4) Pemantapan jalan dan peningkatan tingkat aksesibilitas ; 5)Peningkatan konektivitas antar pulau (merangkai pulau) Rupat, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti baik dengan penyeberangan RoRo, jalan, maupun jembatan.

2. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Percepatan Transformasi”**. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata

dan Berkeadilan Antar Kabupaten/Kota bertumpu pada percepatan pembangunan kewilayahan di kawasan afirmatif dan kawasan strategis.

Arah kebijakan pada tahapan ini dilakukan melalui 1) Percepatan penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah; 2) Percepatan penyusunan RDTR kawasan perkotaan dan NSPK Penataan Ruang; 3) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; 4) pemantapan jalan dan peningkatan tingkat aksesibilitas; 5) Peningkatan konektivitas antar pulau (merangkai pulau) Rupaat, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti baik dengan penyeberangan RoRo, jalan, maupun jembatan.

3. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perluasan Transformasi”**. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Antar Kabupaten/Kota bertumpu pada pemantapan pembangunan yang berkualitas dan merata antar wilayah.

Arah kebijakan pada tahapan ini dilakukan melalui 1) Perluasan penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah; 2) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; 3) pemantapan jalan dan peningkatan tingkat aksesibilitas; 4) Peningkatan konektivitas antar pulau (merangkai pulau) Rupaat, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti baik dengan penyeberangan RoRo, jalan, maupun jembatan.

4. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perwujudan Riau Maju”**. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Antar Kabupaten/Kota bertumpu pada perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

Arah kebijakan pada tahapan ini dilakukan melalui 1) Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah; 2) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; 3) pemantapan jalan dan peningkatan tingkat aksesibilitas; 4) Peningkatan konektivitas antar pulau (merangkai pulau) Rupaat, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti baik dengan penyeberangan RoRo, jalan, maupun jembatan.

5.1.7 Mewujudkan Sarana dan Prasarana Berkualitas yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

Mewujudkan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan dan berkelanjutan merupakan untuk upaya terciptanya pembangunan fisik yang tetap mengedepankan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Provinsi Riau. Transformasi ini akan diarahkan kepada perwujudan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas dengan tidak merusak lingkungan hidup. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi. Berdasarkan arah kebijakan transformasi dan arahan dari misi, maka untuk dapat mewujudkan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Provinsi Riau disusun arah kebijakan sebagai berikut.



Gambar 5.8.

Tahapan Arah Kebijakan Lima Tahunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025-2045 pada Sarana dan Prasarana Berkualitas yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

Berdasarkan tabel di atas, pada misi Mewujudkan Sarana dan Prasarana Berkualitas yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan yang akan menjadi acuan utama untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat dijelaskan ke dalam 5 (lima) tahapan untuk 4 (empat) kali periode dalam arah kebijakan.

1. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perkuatan Fondasi Transformasi”**. Mewujudkan Sarana dan Prasarana

Berkualitas yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan bertumpu pada perencanaan dan pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan terutama di kawasan afirmatif.

Arah kebijakan pada tahapan ini dilakukan melalui 1) Penyusunan RTRW/RDTR yang dilengkapi dengan KLHS; 2) Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan; 3) Perkuatan pelaksanaan kegiatan yang mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria; 4) Penguatan kelembagaan dan regulasi terhadap kehandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim; 5) Penguatan Kelembagaan dan regulasi serta pengembangan pembiayaan inovatif (Pembiayaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Dasar);

Selain itu, untuk mengatasi permasalahan lingkungan perlu dilakukan 6) Pengendalian banjir di wilayah perkotaan dan rawan banjir; 7) Peningkatan pelayanan sungai utama melalui pengerukan, normalisasi, dan naturalisasi untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai jalur transportasi, penyaluran air, pengendali banjir, wisata dan ekonomi; 8) Pengendalian abrasi sungai dan pantai; 9) Peningkatan pelayanan air bersih/minum perpipaan terutama di wilayah yang kualitas air tanahnya kurang baik dan daerah gambut; 10) Pengelolaan restorasi gambut dan mangrove secara terpadu dan berkesinambungan.

2. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Percepatan Transformasi”**. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Berkualitas yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan bertumpu pada percepatan pembangunan sarana dan prasarana dasar berkualitas dan merata yang terintegrasi antar wilayah, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Arah kebijakan pada tahapan ini dilakukan melalui 1) Penyusunan RTRW/RDTR yang dilengkapi dengan KLHS; 2) Percepatan pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi

produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan; 3) Dukungan pelaksanaan kegiatan yang mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria; 4) Percepatan kelembagaan dan regulasi terhadap kehandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim; 5) Percepatan Kelembagaan dan regulasi serta pengembangan pembiayaan inovatif (Pembiayaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Dasar).

Selain itu, untuk mengatasi permasalahan lingkungan perlu dilakukan 6) Percepatan pengendalian banjir di wilayah perkotaan dan rawan banjir; 7) Percepatan peningkatan pelayanan sungai utama melalui pengerukan, normalisasi, dan naturalisasi untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai jalur transportasi, penyaluran air, pengendali banjir, wisata dan ekonomi; 8) Percepatan pengendalian abrasi sungai dan pantai; 9) Percepatan peningkatan pelayanan air bersih/minum perpipaan terutama di wilayah yang kualitas air tanahnya kurang baik dan daerah gambut; 10) Percepatan pengelolaan restorasi gambut dan mangrove secara terpadu dan berkesinambungan.

3. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perluasan Transformasi”**. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Berkualitas yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan bertumpu pada pemantapan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana antar wilayah ramah lingkungan dan berkelanjutan

Arah kebijakan pada tahapan ini dilakukan melalui 1) Penyusunan RTRW/RDTR yang dilengkapi dengan KLHS; 2) Percepatan Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan; 3) Dukungan pelaksanaan kegiatan yang mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria; 4) Perluasan penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim; 5) Percepatan Kelembagaan dan regulasi serta pengembangan pembiayaan inovatif (Pembiayaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Dasar).

Selain itu, untuk mengatasi permasalahan lingkungan perlu dilakukan 6) Perluasan pengendalian banjir di wilayah perkotaan dan rawan banjir; 7) Perluasan

peningkatan pelayanan sungai utama melalui pengerukan, normalisasi, dan naturalisasi untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai jalur transportasi, penyaluran air, pengendali banjir, wisata dan ekonomi; 8) Perluasan pengendalian abrasi sungai dan pantai; 9) Percepatan peningkatan pelayanan air bersih/minum perpipaan terutama di wilayah yang kualitas air tanahnya kurang baik dan daerah gambut; 10) Perluasan pengelolaan restorasi gambut dan mangrove secara terpadu dan berkesinambungan.

4. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perwujudan Riau Maju”**. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Berkualitas yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan bertumpu pada perwujudan sarana dan prasarana yang terpadu, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Arah kebijakan pada tahapan ini dilakukan melalui 1) RTRW/RDTR yang dilengkapi dengan KLHS; 2) Perwujudan deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.; 3) Reforma agraria; 4) Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim pada semua wilayah; 5) Terwujudnya Kelembagaan dan regulasi serta pengembangan pembiayaan inovatif (Pembiayaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Dasar).

Selain itu, untuk mengatasi permasalahan lingkungan perlu dilakukan 6) Pengendalian banjir di wilayah perkotaan dan rawan banjir di semua wilayah; 7) Peningkatan pelayanan sungai utama melalui pengerukan, normalisasi, dan naturalisasi untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai jalur transportasi, penyaluran air, pengendali banjir, wisata dan ekonomi di semua wilayah; 8) Pengendalian abrasi sungai dan pantai secara menyeluruh; 9) Peningkatan pelayanan air bersih/minum perpipaan terutama di wilayah yang kualitas air tanahnya kurang baik dan daerah gambut di semua wilayah; 10) Pengelolaan restorasi gambut dan mangrove secara terpadu dan berkesinambungan di semua wilayah.

5.1.8 Kestinambungan Pembangunan untuk Mewujudkan Riau Maju

Kestinambungan Pembangunan untuk Mewujudkan Riau Maju adalah upaya untuk mengawal pencapaian Riau Maju yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan. Beberapa hal yang dilakukan yaitu melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah; sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi; peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional; pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan serta perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. Untuk dapat mewujudkan Kestinambungan Pembangunan untuk Mewujudkan Riau Maju maka disusun arah kebijakan sebagai berikut.



Gambar 5.9.

Tahapan Arah Kebijakan Lima Tahunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025-2045 pada Kestinambungan Pembangunan untuk Mewujudkan Riau Maju

Berdasarkan tabel di atas, pada misi Kestinambungan Pembangunan untuk Mewujudkan Riau Maju yang akan menjadi acuan utama untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat dijelaskan ke dalam 5 (lima) tahapan untuk 4 (empat) kali periode dalam arah kebijakan.

1. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perkuatan Fondasi Transformasi”**. Kestinambungan Pembangunan untuk

Mewujudkan Riau Maju bertumpu pada peningkatan kualitas perencanaan, sinkronisasi dan pengendalian pembangunan.

Arah kebijakan pada tahapan ini dilakukan melalui 1) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah; 2) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi; 3) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional; 4) Perencanaan pembangunan yang inklusif; 5) Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

2. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Percepatan Transformasi”**. Kesenambungan Pembangunan untuk Mewujudkan Riau Maju bertumpu pada percepatan peningkatan kualitas perencanaan, sinkronisasi dan pengendalian pembangunan.

Arah kebijakan pada tahapan ini dilakukan melalui 1) Percepatan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah; 2) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi; 3) Percepatan peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional; 4) Percepatan pembangunan yang inklusif; 5) Percepatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

3. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perluasan Transformasi”**. Kesenambungan Pembangunan untuk Mewujudkan Riau Maju bertumpu pada penguatan kualitas perencanaan, sinkronisasi dan pengendalian pembangunan.

Arah kebijakan pada tahapan ini dilakukan melalui 1) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah secara masif; 2) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi; 3) Perluasan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional; 4) Perluasan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko; 5) Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

4. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau adalah **“Perwujudan Riau Maju”**. Kesenambungan Pembangunan untuk

Mewujudkan Riau Maju bertumpu pada pemantapan kualitas perencanaan, sinkronisasi dan pengendalian pembangunan.

Arah kebijakan pada tahapan ini dilakukan melalui 1) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah secara menyeluruh; 2) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi secara menyeluruh; 3) Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional; 4) Terwujudnya pembangunan yang inklusif; 5)Terkendalnya pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

5.2 TIGA BELAS UPAYA TRANSFORMATIF SUPER PRIORITAS (GAME CHANGERS)

Dalam mewujudkan tercapainya Visi Riau Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu yang Agamis, Pemerintah Provinsi Riau merumuskan 13 Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changer*) yang menjadi pilar utama dalam transformasi menuju kesejahteraan dan kemajuan berkelanjutan. Didukung penyelarasan RPJPN dan RPJPD, langkah strategis berupa penguatan fondasi transformasi telah direncanakan untuk mengatasi permasalahan mendasar pembangunan yaitu melalui Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola yang dirinci pada tabel 5.6 dibawah ini.

Tabel 5.6
Upaya Transformasi Super Prioritas (*Game Changer*)

| No | Transformasi | Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>) Nasional | Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>) Provinsi Riau |
|-----|----------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Transformasi Sosial | 1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) | 1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) |

| No | Transformasi | Upaya Transformasi Super Prioritas (Game Changer) Nasional | Upaya Transformasi Super Prioritas (Game Changer) Provinsi Riau |
|-----|-----------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | <p>2. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan</p> | <p>2. Mendorong partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas</p> |
| | | <p>3. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan</p> | - |
| | | <p>4. Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan <i>stunting</i>, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama tuberkulosis dan kusta)</p> | <p>3. Pemenuhan pelayanan kesehatan primer, penuntasan <i>stunting</i> dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan terutama Tuberkulosis dan Kusta</p> |
| | | <p>4. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi</p> | <p>4. Penurunan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi</p> |
| 2 | Transformasi Ekonomi | <p>5. Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri</p> | - |
| | | <p>6. Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor</p> | <p>5. Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor</p> |

| No | Transformasi | Upaya Transformasi Super Prioritas (Game Changer) Nasional | Upaya Transformasi Super Prioritas (Game Changer) Provinsi Riau |
|-----|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | <p>6. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau</p> <p>7. Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital</p> <p>8. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi</p> <p>9. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)</p> | <p>6. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau</p> <p>7. Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital</p> <p>8. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi</p> <p>-</p> |
| 3 | Transformasi Tata Kelola | <p>10. Transformasi manajemen ASN (terutama penggajian tunggal dan pensiun), pemberantasan korupsi dan pembentukan lembaga pengelola tunggal regulasi</p> <p>11. Penguatan tata kelola Partai Politik</p> | <p>9. Peningkatan Manajemen ASN dan pemberantasan korupsi</p> <p>-</p> |
| 4 | Keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah | <p>12. Transformasi sistem penuntutan menuju Single <i>Prosecution System</i> dan Transformasi lembaga Kejaksaan sebagai <i>Advocaat General</i></p> | - |

| No | Transformasi | Upaya Transformasi Super Prioritas (Game Changer) Nasional | Upaya Transformasi Super Prioritas (Game Changer) Provinsi Riau |
|-----|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | 13. Transformasi Industri Pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan <i>value chain</i> industri nasional | |
| | | 14. Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi perencanaan dan fiskal | 10. Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBD serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal |
| | | 15. Reformasi Subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran | - |
| 5 | Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi | 16. Penguatan karakter dan jati diri bangsa | 11. Pembangunan masyarakat yang berbudaya Melayu dan berkarakter |
| | | 19. Reformasi Pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir | 12. Reformasi Pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir |
| | | 20. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (<i>food, energy, water</i>) | 13. Ketahanan energi dan air serta kemandirian menuju kedaulatan pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (<i>food, energy, water</i>) |

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045 dan Hasil Analisa

5.3 PEMBANGUNAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA MENUJU RIAU MAJU

Riau Maju tercermin dalam peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah, pengurangan kesenjangan antarwilayah serta dinikmati seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan. Hal ini dihasilkan dari pelaksanaan agenda Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, yang didukung oleh landasan transformasi Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

Dalam mewujudkan pembangunan wilayah, faktor pendorong yang penting dalam pembangunan sarana dan prasarana utamanya tata ruang dan pertanahan, konektivitas, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana dasar, desentralisasi, urbanisasi dan perkotaan serta perdesaan dan daerah afirmasi.

Jalur distribusi logistik dan transportasi menjadi tulang punggung pembangunan yang efektif dan efisien, memungkinkan pengiriman barang dan jasa serta mobilitas penduduk secara cepat dan tepat ke berbagai daerah. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur logistik dan transportasi menjadi kunci bagi daerah untuk memaksimalkan potensi yang ada, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah.

1. Tata Ruang dan Pertanahan

Arah kebijakan tata ruang untuk menyelesaikan isu penataan ruang yaitu (i) Penyusunan RTRW kabupaten/kota pasca revisi RTRW Provinsi dan (ii) Penyusunan RDTR pasca Revisi RTRW Kabupaten/Kota yang dilengkapi KLHS. Sedangkan arah kebijakan pertanahan (i) Memastikan fasilitasi persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terutama untuk pembangunan proyek strategis nasional dan (ii) Penyelesaian konflik pertanahan lintas kabupaten/kota, (iii) Perlu adanya penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat dan besinergi dengan bidang-bidang lainnya melalui kebijakan penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) agar dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat dan peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM bidang informasi geospasial yang berkualitas.

- (iv) Perencanaan konektivitas dan pelayanan kepelabuhanan terutama untuk angkutan logistik (cargo, container dan lain-lain) di Dumai dan sekitarnya untuk gerbang transportasi *channelling* dari Selat Malaka.
- (v) Beberapa wilayah di Provinsi Riau yang tertinggal dalam hal kesejahteraan dan perekonomiannya dominan disebabkan oleh infrastruktur transportasi yang belum memadai, kawasan ini antara lain meliputi Kabupaten Rokan Hulu (Mahato dan sekitarnya), Kabupaten Rokan Hilir (Panipahan, Kubu, Senaboi dan sekitarnya), Kota Dumai (Sungai Sembilan), Kabupaten Kepulauan Meranti (seluruh pulau), Kabupaten Pelalawan (kawasan lintas Bono), Kabupaten Indragiri Hilir (hampir seluruhnya), Kabupaten Kampar (Kampir Kiri Hulu dan sekitarnya), dan beberapa kawasan lainnya. Karena itu sangat perlu untuk mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan/jembatan provinsi lintas pesisir dan kabupaten/kota. Perlu direncanakan untuk mencukupkan kebutuhan jalan provinsi ini, dan perencanaannya secara terpadu dengan moda lainnya, termasuk angkutan sungai (terutama Sungai Siak) dan pelabuhan bila memungkinkan. Dibutuhkan lebih dari Rp 14,7 triliun dalam 20 tahun RPJPD untuk menyelesaikan pembangunan jalan dan jembatan demi konektivitas yang baik pada jalan lintas provinsi di Riau ini.



Gambar 5.11
Rencana Pembangunan Jalan di Provinsi Riau

Sumber : Peta olahan

- (vi) Keberadaan jalan Tol Sumatera yang melewati Riau baik dari ruas utara selatan (mulai dari arah batas Jambi – Rengat –Pekanbaru – Dumai – Duri – Batas Sumut), maupun ruas timur barat (mulai dari batas Sumbar – Bangkinang - Pekanbaru) perlu diupayakan supaya terkoneksi dengan baik dengan jalan-jalan Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Skema konektifitas ini harus direncanakan dengan baik supaya pembangunan jaringan jalan baru dan peningkatan/ pengembangan jaringan lama yang akan terhubung ke jalan tol bisa efisien dan tepat sasaran khususnya untuk peningkatan layanan transportasi dan logistik.
- (vii) Sungai-sungai di Riau yang panjang dan berbelok-belok sangat rentan terhadap sedimentasi dan penumpukan sampah di dasarnya. Di waktu curah hujan tinggi, sungai-sungai ini sering meluap dan membanjiri wilayah di sekitarnya yang rendah dan menimbulkan banyak kerugian. Banjir di DAS Sungai Rokan, Sungai Kampar dan Sungai Indragiri semakin lama semakin menimbulkan banyak kerugian sehingga perlu dilakukan pengelolaan sungai yaitu normalisasi, naturalisasi, untuk pengendalian banjir di sepanjang DAS sehingga memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan.

3. Ketenagalistrikan

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, ditetapkan kebutuhan listrik adalah 450 watt per jiwa. Sedangkan menurut standar kebutuhan listrik negara maju adalah antara 700 hingga 1.200 watt per jiwa karena perkembangan kebutuhan listrik akan terus meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diproyeksikan kebutuhan listrik di Riau meningkat terus hingga menjadi 800 watt per kapita pada tahun 2045. Kapasitas daya mampu listrik di Provinsi Riau saat ini sekitar 1.647 MW, maka untuk memenuhi kebutuhan pada tahun 2045 dibutuhkan kapasitas daya mampu listrik diperkirakan sebanyak 4 kali kapasitas daya mampu yang ada saat ini menjadi 6.489 MW, dengan daya listrik per kapita sekitar 800 watt. Secara rata-rata dibutuhkan penambahan kapasitas daya mampu sekitar 220 MW per tahun sampai tahun 2045.

Selain itu perluasan pemanfaatan tenaga listrik (elektrifikasi) dengan upaya Pembangunan/Peningkatan unit pembangkit PLTS/hybrid, PLT

Bioenergi, PLT Bayu khususnya di daerah terpencil, pulau terluar dan perbatasan Provinsi Riau yang juga dimanfaatkan untuk rumah tangga, industri dan sektor lainnya. Pengelolaan subsidi kelistrikan tepat sasaran menjadi alternatif skema dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.

4. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di masa datang akan semakin masif di bidang pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sosial, pengelolaan infrastruktur dan lingkungan, ekonomi, rekreasi dan hiburan. Strategi yang ditempuh yaitu (i) Penyediaan layanan berbasis zonasi wilayah berdasarkan kesiapan dan kebutuhan infrastruktur digital; (ii) Digitalisasi di sektor-sektor perekonomian baik kelembagaan, tata kelola serta mendorong riset untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

5. Sarana dan Prasarana Dasar

Pembangunan infrastruktur menjadi penting untuk mewujudkan agenda transformasi sosial dan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dalam tataran transformasi sosial difokuskan untuk menyediakan akses yang merata terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas di seluruh daerah. Pembangunan infrastruktur di titik beratkan untuk optimalisasi sektor produksi, komoditas unggulan dan pariwisata yang dimiliki di setiap daerah. Adapun arah kebijakan sarana dan prasarana yaitu (i) Penyediaan dukungan infrastruktur transportasi, logistik serta mobilitas penumpang, yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan yang dilengkapi penyediaan jalan menuju tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/*stockyard* yang modern terintegrasi; (ii) Integrasi pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dengan sumber energi baru terbarukan (EBT) dilakukan antara lain melalui percepatan penerapan dan/atau pengalihan ke pemanfaatan energi yang ramah lingkungan serta pembangunan/ pengelolaan ketenagalistrikan yang bersumber EBT sesuai potensi daerah; (iii) Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan

memenuhkan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya); (iv) Penataan, konservasi, dan pengelolaan lahan gambut tersebar di pesisir Provinsi Riau harus disinkronkan dengan upaya penyediaan air baku untuk air bersih, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karena rawan terbakar di musim kemarau), serta untuk kepentingan pariwisata lingkungan perlu direncanakan dan dilakukan dengan baik; (v) Penyediaan sarana dan prasarana dasar air minum, air bersih sistem perpipaan (leding), sanitasi, persampahan serta perumahan yang dilengkapi dengan ruang terbuka hijau pada permukiman di kawasan permukiman yang merata di seluruh wilayah; (vi) Perluasan jangkauan konektivitas digital di seluruh wilayah Provinsi Riau; (vii) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal yang di sertai perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya); (viii) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang mana dalam 20 tahun kedepan, PAUD/TK masih dibutuhkan banyak sekali.

6. Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pola ruang Provinsi Riau merupakan arahan bagi penggunaan ruang di wilayah Provinsi Riau yang didasari prinsip pemanfaatan sumberdaya alam berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar bagian wilayah Provinsi Riau yang lebih berimbang secara proporsional, tanpa mengganggu kelestarian lingkungannya. Terdapat 3 kawasan budidaya di Wilayah Provinsi Riau yang dapat menjadi prioritas pembangunan 20 tahun kedepan, yaitu: 1) Kawasan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Kawasan pertanian tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau seluas kurang lebih

2.832.506,23 hektar. Kawasan pertanian di Provinsi Riau, meliputi Kawasan tanaman pangan, Kawasan perkebunan, dan Kawasan hortikultura; 2) Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan peruntukan industri meliputi industri kehutanan, industri makanan, industri kertas, industri pertanian, industri gas dan kondensat, industri pupuk, industri perikanan dan hasil laut, industri perkebunan, industri logam, industri migas dan batubara, industri galangan kapal, industri manufaktur, industri kimia dan farmasi, serta industri biodiesel yang tersebar di seluruh wilayah provinsi dan 3) Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

7. Urbanisasi dan Perkotaan

Arah kebijakan pembangunan perkotaan difokuskan untuk mendorong pembangunan perkotaan yang lebih terstruktur terutama untuk mengelola urbanisasi. Proses pengkotaan (urbanisasi) baik melalui berpindahnya penduduk dari luar kota ke kota, maupun akibat dari berkembangnya kota karena perkembangan pemukiman dan sarana prasarana kota juga terjadi di Riau. Kawasan-kawasan yang dulunya seperti kampung kecil tempat persinggahan orang melintas, sekarang berubah menjadi sebuah kota, meskipun masih dalam taraf kota kecil dan menengah. Selain ibu kota kabupaten, beberapa ibukota kecamatan sudah menampakkan jati dirinya sebagai sebuah kota. Kota-kota baru tersebut antara lain: Bagan Batu, Ujung Tanjung (Rohil), Duri (Bengkalis), Minas, Kandis, Perawang (Siak), Sorek, Sikijang Mati (Pelalawan), Pematang Reba, Seberida (Indragiri), Ujung Batu (Rohul), Pandau, Kubang, dan Rimbopanjang (Kampar).

Pertumbuhan kota-kota baru tersebut seringkali tanpa diiringi dengan pertumbuhan prasarana perkotaan yang memadai seperti jaringan air bersih, jaringan jalan, drainase dan pengendalian banjir, pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau, jaringan listrik dan energi (gas), penataan kota serta tata ruang yang terencana dan terkontrol dengan baik. Ketersediaan sarana dan

prasarana sosial seperti sekolah, rumah sakit, hiburan/rekreasi, sarana olahraga, aula/tempat pertemuan, juga sering terabaikan.

Pemukiman di Kota Pekanbaru terus berkembang sampai ke wilayah perbatasannya seperti di Tanah Merah, Pandau, Kualu, Rimbo Panjang, Karya Indah, Minas, dan Sikijang Mati. Permasalahan banjir, sampah, transportasi umum, air bersih, dan infrastruktur jalan pada kawasan perbatasan ini harus dikelola secara bersama oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah perbatasan ini, termasuk juga oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pembentukan semacam lembaga bersama diperlukan dalam hal ini. Transportasi Perkotaan yang handal harus didukung oleh transportasi publik yang berkualitas (RPJPN)

- Pengembangan bus rapid transit (BRT) dan light rapid transit (LRT) di Kawasan Perkotaan Pekanbaru
- Optimalisasi, integrasi, dan peningkatan layanan sistem transportasi publik di Kawasan Perkotaan Pekanbaru dan Kawasan Perkotaan Dumai

8. Perdesaan dan Daerah Afirmasi

Arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan Perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan. Strategi yang dilaksanakan antara lain Pembangunan Desa Inklusif untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperkuat kelembagaan dan pelayanan desa serta meningkatkan sumber daya manusia lokal maupun pemerintahan desa yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan/peningkatan infrastruktur mobile connection pada area-area *weak coverage* di kawasan 3TP, perdesaan dan terpencil. Selain itu dilakukan peningkatan Ketangguhan dalam menghadapi bencana serta pemerataan pemenuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat berbasis desa seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, perumahan dan transportasi lokal. Pada daerah afirmasi yang meliputi kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar dan daerah terpencil, diperlukan kebijakan keberpihakan khusus untuk dapat mempercepat pemerataan pembangunan.

5.4 SASARAN POKOK

Sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator.

Sasaran pokok RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 merupakan perumusan dari misi satu sampai dengan misi lima, sedang misi enam sampai dengan misi delapan merupakan implementasi atau mendukung kelima misi RPJPD. Selanjutnya sasaran pokok juga dirumuskan dalam 17 Arah Pembangunan, arah kebijakan transformasi pembangunan daerah dan 45 indikator utama pembangunan. Arah pembangunan Provinsi Riau didefinisikan dengan Arah Pembangunan Riau 1 (APR1) hingga Arah Pembangunan Riau 17 (APR17) sebagai berikut:

- 1) APR1. Kesehatan untuk Semua;
- 2) APR2. Pendidikan Berkualitas yang Merata;
- 3) APR3. Perlindungan Sosial yang Adaptif;
- 4) APR4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
- 5) APR5. Transformasi Digital;
- 6) APR6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
- 7) APR7. Penerapan Ekonomi Hijau;
- 8) APR8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
- 9) APR9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif;
- 10) APR10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial;
- 11) APR11. Stabilitas Ekonomi Makro;
- 12) APR12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan;
- 13) APR13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju;
- 14) APR14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;
- 15) APR15. Lingkungan Hidup Berkualitas;
- 16) APR16. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim;
- 17) APR17. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan.

Adapun sasaran pokok RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 yang telah dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkarakter** merupakan sasaran pokok yang dirumuskan berdasarkan permasalahan daerah yaitu Akses pendidikan yang terbatas, masih rendahnya mutu pendidikan serta masih rendahnya mutu dan akses layanan fasilitas kesehatan. Sasaran pokok ini menjadi rangkaian kerja dari Arah Pembangunan Riau (APR1) Kesehatan untuk semua dan Arah Pembangunan Riau (APR2) Pendidikan Berkualitas yang merata. Sasaran pokok ini untuk mewujudkan misi Satu RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 yaitu Transformasi Sosial Untuk Membangun Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul dan Sejahtera.
- 2. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang adaptif dan inklusif** merupakan sasaran pokok yang dilatarbelakangi oleh Masih rendahnya pelayanan dan perlindungan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan belum terpenuhinya hak penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang akan diarahkan kepada Arah Pembangunan Riau (APR3) Perlindungan Sosial yang Adaptif. Sasaran pokok ini untuk mewujudkan misi Satu RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 yaitu Transformasi Sosial Untuk Membangun Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul dan Sejahtera.
- 3. Meningkatnya Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing** merupakan sasaran pokok yang dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengembangan nilai tambah ekonomi yang produktif terutama sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan, peternakan dan perkebunan) sektor kelautan dan perikanan serta pariwisata. Sasaran pokok ini akan diarahkan kepada Arah Pembangunan Riau (APR4) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi dan Arah Pembangunan Riau (APR5) Transformasi Digital dan Arah Pembangunan Riau (APR6) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global. Sasaran pokok ini untuk mewujudkan misi Dua RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 yaitu Transformasi Ekonomi Untuk Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif dan Ekonomi Hijau.
- 4. Terwujudnya Ekonomi Hijau** merupakan sasaran pokok yang dilatarbelakangi oleh kerusakan lingkungan akibat deforestasi, erosi tanah, serta penurunan kualitas air dan tanah; pengurangan keanekaragaman hayati yang berdampak pada ekosistem dan habitat alami, yang akan diarahkan kepada Arah Pembangunan Riau (APR7) Penerapan Ekonomi Hijau Sasaran pokok ini untuk mewujudkan misi Dua RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 yaitu

Transformasi Ekonomi Untuk Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif dan Ekonomi Hijau.

5. **Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi** merupakan sasaran pokok yang dilatarbelakangi oleh potensi desa belum menjadi sumber pendapatan bagi kesejahteraan desa dalam Branding Desa dan ketimpangan dan kesenjangan antar daerah masih tinggi. Sasaran pokok ini akan diarahkan pada Arah Pembangunan Riau (APR8) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Sasaran pokok ini untuk mewujudkan misi Dua RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 yaitu Transformasi Ekonomi Untuk Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif dan Ekonomi Hijau.
6. **Terwujudnya pemerintahan yang berterintegrasi dan adaptif.** merupakan sasaran pokok yang dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Kinerja Pelayanan Publik dan tata Kelola Pemerintahan yang akan diarahkan kepada Arah Pembangunan Riau (APR9) Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif. Sasaran pokok ini untuk mewujudkan misi Tiga RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 yaitu Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.
7. **Terwujudnya Daerah yang Kondusif dan Stabilitas Ekonomi yang handal** merupakan sasaran pokok yang dilatarbelakangi oleh belum secara menyeluruh wilayah di Provinsi Riau menghubungkan antar pulau dan wilayah masih tingginya pengaruh ekonomi global dan regional yang akan diarahkan kepada Arah Pembangunan Riau (APR10) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Demokrasi Substansial, Arah Pembangunan Riau (APR11) Stabilitas Ekonomi Makro dan Arah Pembangunan Riau (APR12) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan. Sasaran pokok ini untuk mewujudkan misi empat RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 yaitu Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.
8. **Terwujudnya penerapan nilai budaya melayu berlandaskan masyarakat agamis** merupakan sasaran pokok yang dilatarbelakangi oleh belum optimalnya internalisasi budaya melayu di lingkungan Masyarakat yang akan diarahkan kepada Arah Pembangunan Riau (APR13) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju. Sasaran pokok ini untuk mewujudkan misi Lima RPJPD

Provinsi Riau Tahun 2025-2045 yaitu Mewujudkan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi.

9. **Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender** merupakan sasaran pokok yang dilatarbelakangi oleh permasalahan gizi merupakan isu kesehatan publik yang mempengaruhi kualitas hidup individu dan produktivitas, dilihat dari penurunan Proporsi perempuan berusia 15-49 tahun pernah kawin yang Melahirkan Tidak di Faskes (MTF) dan kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi usia remaja yang akan diarahkan kepada Arah Pembangunan Riau (APR14) Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif. Sasaran pokok ini untuk mewujudkan misi Lima RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 yaitu Mewujudkan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi.
10. **Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim** merupakan sasaran pokok yang dilatarbelakangi oleh adanya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup dan tingginya abrasi yang akan diarahkan kepada Arah Pembangunan Riau (APR15) Lingkungan Hidup Berkualitas dan Arah Pembangunan Riau (APR16) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Sasaran pokok ini untuk mewujudkan misi Lima RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 yaitu Mewujudkan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi.
11. **Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Pangan Daerah** merupakan sasaran pokok yang dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana dasar, konektivitas transportasi dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan yang akan diarahkan kepada Arah Pembangunan Riau (APR17) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan. Sasaran pokok ini untuk mewujudkan misi Lima RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 yaitu Mewujudkan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi.

Secara keseluruhan perumusan sasaran pokok dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.7
Perumusan Sasaran Pokok Provinsi Riau Tahun 2025-2045

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|---|-----------------------|---|---|---------------|-------------|---|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Transformasi Sosial Untuk Membangun Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul dan Sejahtera | Kesehatan untuk Semua | Percepatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui percepatan pemenuhan penyediaan air minum, sanitasi lingkungan/perumahan, RTH dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. | Usia Harapan Hidup (tahun) | 74,3 | 80,19 | 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkarakter | |
| | | | Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. | Kesehatan Ibu dan Anak a. Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 131 | 13 | | |
| | | | | b. Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 12 | 3,6 | | |
| | | | Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. | Penanganan Tuberkulosis: a. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)* | 66 | 95 | | |
| | | | | b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) | 93,94 | 98 | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|------------------|---|--|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | (%)* | | | | |
| | | | Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%) | 98 | 99,50 | | |
| | | | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. | | | | | |
| | | | Peningkatan kualitas, kesejahteraan, dan pemerataan tenaga kesehatan dan insentif khusus untuk daerah afirmatif dan terpencil | | | | | |
| | | | Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas di daerah afirmasi dan daerah terpencil | | | | | |
| | | | Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting | | | | | |
| | | | Penguatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. | | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|------------------------------------|---|--|---|---------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan | | | | | |
| | | Pendidikan Berkualitas yang Merata | Percepatan wajib belajar 13 tahun | Hasil pembelajaran | | | | |
| | | | Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah | a) Persentase kabupaten/ kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: | | | | |
| | | | | i) Literasi Membaca | 16,6 -16,67 | 75,00 - 83,33 | | |
| | | | | ii) Numerasi | 0,00 – 8,33 | 58,33 – 66,67 | | |
| | | | | b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: | | | | |
| | | | | i) Literasi Membaca | 40,49 - 42,49 | 76,14 – 78,14 | | |
| | | | | ii) Numerasi | 26,68 - 28,68 | 59,36 – 61,36 | | |
| | | | | Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan | Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | 9,94 – 9,94 | 12,61 – 12,66 | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | berprestasi | | | | | |
| | | | Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah | Harapan Lama Sekolah (tahun) | 13,56 – 13,57 | 15,01 – 15,07 | | |
| | | | Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)* | 11,74 | 11,74 – 13,59 | | |
| | | | Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis talenta, karakter, digital literacy dan muatan lokal budaya Melayu Riau | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | 67,86 | 80 | | |
| | | | Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta | | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) | | | | | |
| | | | Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik | | | | | |
| | | | Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan | | | | | |
| | | | Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan | | | | | |
| | | | Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan | | | | | |
| | | | Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif di Daerah Afirmasi 3TP dan kawasan terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya) | | | | | |
| | | | Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan | | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP dan kawasan terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya) | | | | | |
| | | | Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) | | | | | |
| | | | Fasilitasi Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global | | | | | |
| | | | Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP dan kawasan terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah | | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | lainnya) | | | | | |
| | | | Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya) | | | | | |
| | | | Penguatan sarana dan prasarana dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi di Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya) | | | | | |
| | | | Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. | | | | | |
| | | | Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi | | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|----------------------------------|--|---|---------------|-------------|---|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya) | | | | | |
| | | Perlindungan Sosial yang Adaptif | Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya). | Tingkat Kemiskinan (%) | 5,19 – 6,19 | 0,08-0,58 | 2. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang adaptif dan inklusif | |
| | | | Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya) | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) | 38,05 | 95,13 | | |
| | | | Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di | 29 | 60 | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien | Sektor Formal (%) | | | | |
| | | | Perluasan penyediaan bantuan sosial (bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan | | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | komunikasi), dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya (khususnya di Kepulauan Meranti dan daerah lainnya) | | | | | |
| | | | Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya). | | | | | |
| | | | Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Meranti dan daerah terpencil lainnya), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di | | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | Daerah Afirmasi 3TP melalui bertambahnya demand. | | | | | |
| | | | Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. | | | | | |
| | | | Percepatan sanitasi terpadu berbasis masyarakat (STBM). | | | | | |
| | | | Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. | | | | | |
| | | | Percepatan Penyediaan Hunian Layak di kawasan Kumuh Perkotaan. | | | | | |
| | | | Pemberdayaan pilar - pilar sosial, KAT dan Restorasi Sosial, dalam pemberdayaan Sosial masyarakat miskin, individu dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. | | | | | |
| | | | Ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas | | | | | |
| 2 | Transformasi Ekonomi Untuk Meningkatkan | Ipatek, Inovasi, dan Produktivitas | Pembangunan/Peningkatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | 27,59 | 36,20 – 36,35 | 3. Meningkatnya Ekonomi yang | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan | |
|-----|--|------------------|--|--|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|--|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| | Produktivitas dan Nilai Tambah melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif dan Ekonomi Hijau. | Ekonomi | andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi) | | | | Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing | | |
| | | | Pembangunan infrastruktur penunjang industri yang ramah lingkungan, terwujudnya Infrastruktur penunjang Industri yang handal dan berkelanjutan | Pengembangan Pariwisata: | | | | | |
| | | | Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata buatan, wisata kultural/budaya, wisata religi, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. | - Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)* | 0,54 | 0,94 | | | |
| | | | Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. | - Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)* | 16 | 76,35 | | | |
| | | | Peningkatan konektivitas | Proporsi PDRB Ekonomi | 0,150 – | 0,194 – 0,102 | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|------------------|--|---|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif | Kreatif (%) | 0,167 | | | |
| | | | Modernisasi pertanian dan implementasi teknologi smart farming melalui penyediaan bibit, varietas unggul, instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang berstandar nasional/global, ramah lingkungan dan ekonomis di semua wilayah (terwujudnya produktivitas pertanian yang berkelanjutan) | Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD | | | | |
| | | | Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer pada semua wilayah (Terwujudnya petani yang maju dan Berdayasaing) | a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%) | 12,66 | 14,7 | | |
| | | | Penguatan kelembagaan usaha petani dan pembiayaan koperasi petani | b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan | 2,15 | 3,65 | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|------------------|--|--|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | secara merata (Terwujudnya petani yang mandiri, maju dan Berdayasaing) | Menengah pada Level Provinsi (%) | | | | |
| | | | | c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%) | 5,75 | 12 | | |
| | | | | d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) | 0,52 | 4,34 | | |
| | | | | e. <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)* | 4,10 | 5,71 | | |
| | | | Modernisasi usaha perikanan dan implementasi teknologi komoditas perikanan untuk mewujudkan produktivitas usaha perikanan yang berdayasaing dan berkelanjutan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan, petambak dan pembudidaya ikan | Penciptaan lapangan kerja yang baik | | | | |
| | | | Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan, petambak dan | a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,55 – 3,66 | 1,81 – 2,83 | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|------------------|--|--|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | Pembudidaya ikan guna meningkatkan produktivitasnya untuk mewujudkan nelayan, petambak dan pembudidaya ikan yang mandiri, maju dan Berdayasaing | | | | | |
| | | | Penguatan kelembagaan usaha/koperasi nelayan, petambak dan pembudidaya ikan mewujudkan nelayan, petambak dan pembudidaya ikan yang mandiri, maju dan Berdayasaing | b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal | 52,00 | 95,00 | | |
| | | | Pengembangan kemitraan perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi perikanan, serta penguatan kolaborasi jaringan pemasaran, perbankan dan asuransi perikanan | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 45,7 | 59,9 | | |
| | | | Pengembangan kemitraan pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasi jaringan pemasaran, | Tingkat Penguasaan IPTEK | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|----------------------|---|--|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | perbankan dan asuransi pertanian | | | | | |
| | | | Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global | a. Indeks Kapabilitas Daerah | 2,36 | 4,88 | | |
| | | | | b. b. Indeks Inovasi Daerah | 86,62 | 100,00 | | |
| | | | Penguatan proses bisnis dan kelembagaan koperasi serta adopsi teknologi menuju Koperasi Maju dan Modern | | | | | |
| | | | Peningkatan produktivitas BUMD. | Return on Aset (ROA) BUMD (%)* | 4,1 | 5,71 | | |
| | | Transformasi Digital | Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital di semua wilayah | Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi* | 6,1 | 7,5 | | |
| | | | Penguatan proses bisnis UMKM melalui penguatan kelembagaan, perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap | | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis mewujudkan UMKM yang maju dan moderen sebagai penopang ekonomi | | | | | |
| | | | Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi dan penerapan insentif serta disinsentif. | | | | | |
| | | Integrasi Ekonomi Domestik dan Global | Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan yang menjadi akses penghubung ke beberapa kawasan strategis (kawasan industri/ pariwisata) secara merata | Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi* | 8,27 | 5,13 | | |
| | | | Fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum untuk ruas jalan tol baru (Untuk ruas tol yang baru peran Pemprov memfasilitasi dalam pengadaan tanah sesuai dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang diajukan oleh | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | 33,00 | 28,44 | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|------------------|---|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | instansi/lembaga yang memerlukan tanah) yaitu Pembangunan Tol Trans Sumatera pada wilayah Riau untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: Pekanbaru – Pangkalan Kerinci – Rengat, Rengat – Jambi, Pekanbaru – Siak Sri Indrapura, Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi, Pasir Pengarayan – Duri, Teluk Kuantan – Rengat | | | | | |
| | | | Fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum untuk ruas jalan tol baru (Penetapan lokasi): Untuk ruas tol yang baru peran pemerintah provinsi memfasilitasi dalam pengadaan tanah sesuai dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang diajukan oleh instansi/lembaga yang memerlukan tanah pada | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | 39,10 | 48,16 | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkaran Dumai dan lingkaran Pekanbaru serta pengembangan/peningkatan jalan akses menuju jalan tol untuk pengembangan ekonomi dan logistik daerah | | | | | |
| | | | Fasilitasi, Koordinasi dan Verifikasi Peningkatan sarana dan prasarana perkeretaapian pada ruas Rantau Prapat – Kota Pinang – Dumai – Pekanbaru, Pekanbaru – Jambi, dan Padang – Pekanbaru dan alternatif untuk pengangkutan hasil bumi (sawit, CPO, kayu untuk pulp/paper, dan lainnya) dari wilayah produksi ke wilayah pengolahan | | | | | |
| | | | Fasilitasi, Koordinasi dan Verifikasi Peningkatan kepelabuhanan untuk peningkatan sarana dan | | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | <p>prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama bertaraf global port, terutama di Pelabuhan Dumai serta pembangunan pelabuhan lainnya untuk menangkap peluang jasa kepelabuhan dari kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka dan sekitarnya</p> | | | | | |
| | | | <p>Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP daerah terpencil lainnya, terutama di Kep. Meranti dan daerah lainnya</p> | | | | | |
| | | | <p>Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dan daerah terpencil lainnya dengan pelabuhan-pelabuhan</p> | | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | utama, terutama dari Kep. Meranti dan daerah lainnya | | | | | |
| | | | Fasilitasi, Koordinasi dan Verifikasi Peningkatan kualitas pelayanan Bandar Udara yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP dan/atau Bandar Udara Internasional baru. | | | | | |
| | | | Membangun Infrastruktur migas, pengembangan kilang minyak untuk ketahanan energi | | | | | |
| | | | Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya, termasuk penguatan regulasi dan kelembagaannya | | | | | |
| | | | Penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan | | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|-------------------------|---|---|---------------|-------------|------------------------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | akses ke sumber daya IKM mendukung rantai nilai industri domestik dan global. | | | | | |
| | | | Penguatan kelembagaan skema-skema kerja sama regional dan internasional | | | | | |
| | | Penerapan Ekonomi Hijau | Pembangunan/Peningkatan Jalan Akses menuju kawasan pertanian | Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau | | | 4. Terwujudnya Ekonomi Hijau | |
| | | | Penguatan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. | a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah | 59,86 | 87,18 | | |
| | | | Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan | b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) | 36,00 | 53,76 | | |
| | | | Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Provinsi Riau yaitu Penguatan kelembagaan, dan Promosi kawasan | | | | | |
| | | | Penguatan ekosistem dan | | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|---|--|---|---------------|-------------|--|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | lansekap ekonomi hijau (perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon) | | | | | |
| | | Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi | Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, terutama pada metropolitan Pekanbaru dan kawasan perkotaan Dumai dan perkotaan Duri (penguatan kelembagaan dan perencanaan | Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan | | | 5. Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi | |
| | | | Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air | Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%) | - | - | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|------------------|--|--|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dan sebagainya) | | | | | |
| | | | Percepatan penyediaan infrastruktur, layanan persampahan, Sanitasi, air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) | 80 | 100 | | |
| | | | Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green and grey infrastructure) pada kawasan perkotaan | Persentase Desa Mandiri (%) | 1,13 | 16,4 | | |
| | | | Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan dan Sanitasi Penyediaan Infrastruktur Sampah dan Sanitasi Perkotaan | | | | | |
| | | | Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan 3TP, perdesaan | | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | dan terpencil Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Pekanbaru | | | | | |
| | | | Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Pekanbaru (penguatan kelembagaan dan regulasi); | | | | | |
| | | | Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis pembangunan jaringan gas kota di sekitar sumur gas dan wilayah yang sudah ada infrastruktur pipa gas | | | | | |
| | | | City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, | | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan; | | | | | |
| | | | Penguatan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. | | | | | |
| | | | Ketersediaan, pemanfaatan dan pengembangan energi kelistrikan yang ramah lingkungan | | | | | |
| | | | Pembangunan SDM yang berdaya saing dipasar global melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, penciptaan kesempatan kerja, perlindungan ketenagakerjaan dan terjaminnya keberlanjutan pekerjaan | | | | | |
| | | | Pembangunan Desa Inklusif untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan | | | | | |
| 3 | Transformasi Tata Kelola | Regulasi dan Tata kelola | Penyederhanaan dan peningkatan kualitas | Indeks Reformasi Hukum | 70 | 100 | 6. Terwujudnya pemerintahan | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---------------|-------------|--------------------------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | yang Berintegritas dan Adaptif | yang Berintegritas dan Adaptif | regulasi di daerah. | | | | yang berintegritas dan adaptif | |
| | | | Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,06 | 5 | | |
| | | | Percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk peningkatan kepuasan masyarakat. | Indeks Pelayanan Publik | 4,11 | 5 | | |
| | | | Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. | Indeks Integritas Nasional | 74,52 | 87,03 | | |
| | | | Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Riau, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Riau yang profesional dan bebas korupsi. | | | | | |
| | | | Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek | | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|--|---|--|---|---------------|-------------|--|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | pemerintahan digital | | | | | |
| | | | Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. | | | | | |
| | | | Penguatan integritas partai politik | | | | | |
| 4 | Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah | Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial | Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. | Hukum Berkeadilan | | | 7. Terwujudnya Daerah yang Kondusif dan Stabilitas Ekonomi yang handal | |
| | | | Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut. | a. Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah | 70 | 100 | | |
| | | | | b. Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM | 65 | 85 | | |
| | | Stabilitas Ekonomi Makro | Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) | 64,8 | 82,18 | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|---|---|--|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | dan penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. | | | | | |
| | | | Penguatan pengendalian inflasi daerah | Indeks Demokrasi Indonesia | Sedang | Tinggi | | |
| | | | | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | 1,04 | 3,9 | | |
| | | | | Tingkat Inflasi (%) | 2,9 – 3,7 | 1,0 – 3,0 | | |
| | | | | Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan | | | | |
| | | | | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) * | 11,52 | 52,8 | | |
| | | | | Aset Dana Pensiun/PDRB (%) | 0,04 | 0,76 | | |
| | | | | Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan* | 5.273.463,68 | 56.946.079,95 | | |
| | | | | Total Kredit/PDRB (%) | 9 | 49,7 | | |
| | | | | Inklusi Keuangan (%) | 91,35 | 99,02 | | |
| | | Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar | Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos | Indeks Daya Saing Daerah | 3,31 | 4,86 | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|--|--|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | Kawasan | militer/sarana dan prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP dan kawasan terpencil (khususnya di Kep. Meranti dan daerah lainnya) | | | | | |
| | | | Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat | Indeks Ketahanan Nasional | 3,1 | 3,8 | | |
| | | | Penguatan Ketahanan Nasional dalam perwujudan keterjaminan kelangsungan hidup dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional membangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur | | | | | |
| 5 | Mewujudkan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan | Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju | Penguatan nilai luhur kebudayaan Melayu Riau (termasuk kurikulum muatan lokal budaya Melayu Riau) dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | 60,30 – 60,37 | 70,37 – 70,99 | 8. Terwujudnya penerapan nilai budaya melayu dalam lingkungan masyarakat agamis | |
| | | | Pengembangan pusat | | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|--------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|---------------|--|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | Sosial dan Ekologi | | kebudayaan Melayu | | | | | |
| | | | Penguatan Kelembagaan Kebudayaan Melayu | | | | | |
| | | | Pembinaan SDM Kebudayaan Melayu | | | | | |
| | | | Peningkatan sarana dan prasarana Kebudayaan Melayu | | | | | |
| | | | Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | 72,30 - 72,36 | 79,22 - 79,92 | | |
| | | Keluarga Berkualitas, Kesenjangan, dan Masyarakat Inklusif | Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | 73,50 - 73,51 | 78,73 - 78,8 | 9. Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesenjangan Gender | |
| | | | Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0,436 - 0,434 | 0,211 - 0,192 | | |
| | | | Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, | | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|------------------------------|--|--|---------------|-------------|---|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. | | | | | |
| | | | Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. | | | | | |
| | | Lingkungan Hidup Berkualitas | Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis. | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 0,394 | 0,474 | 10. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | |
| | | | Penguatan tata kelola pengelolaan hutan lindung dan ekosistem alami dalam rangka percepatan terwujudnya Hutan lindung dan ekosistem alami yang lestari | Kualitas Lingkungan Hidup | | | | |
| | | | Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pembangunan circular | Indeks kualitas lingkungan hidup | 71,85 | 79 | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|---|--|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | economy. | | | | | |
| | | | Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) | | 14,64 | 50 | | |
| | | | Pengelolaan Sampah | | | | | |
| | | | - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | | 5 | 90 | | |
| | | | - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)* | | 27 | 100 | | |
| | | Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. | Indeks Risiko Bencana (IRB)* | 103,7 | 87,77 – 74,65 | | |
| | | | | Persentase Penurunan Emisi GRK (%) | | | | |
| | | | | a. Kumulatif | 25,21 | 58,84 | | |
| | | | | b. Tahunan | 44,99 | 92,85 | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|--|---|--|--|--|---------------|-------------|--|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan | Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. | Ketahanan energi, air, dan pangan | | | 11. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Pangan Daerah | |
| | | | | Ketahanan Energi | | | | |
| | | | | - Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* | 1.032 | 4.000 | | |
| | | | | - Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)* | 56 | 60 | | |
| | | | | Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%) | 11,07 | 0,32 | | |
| | | | | Ketahanan Air: | | | | |
| | | | | - Kapasitas Air Baku (m3/detik)* | 0,24 | 9,01 | | |
| - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) | 10,17 | 100 | | | | | | |
| 6 | Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang | | Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. | | | | | |
| | | | Percepatan penyusunan | | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|---|------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | Merata dan Berkeadilan Antar Kabupaten/Kota | | panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb | | | | | |
| | | | Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum | | | | | |
| | | | Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri | | | | | |
| | | | Pemantapan jalan dan peningkatan tingkat aksesibilitas | | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|---|------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | Peningkatan konektivitas antar pulau (merangkai pulau) Rupat, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti baik dengan penyeberangan RoRo, jalan, maupun jembatan) | | | | | |
| 7 | Mewujudkan Sarana dan Prasarana Berkualitas yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan | | Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan rawan bencana | | | | | |
| | | | Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor- | | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan | | | | | |
| | | | Perkuatan pelaksanaan kegiatan yang mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria | | | | | |
| | | | Penguatan kelembagaan dan regulasi terhadap kehandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim | | | | | |
| | | | Penguatan Kelembagaan dan regulasi serta pengembangan pembiayaan inovatif (Pembiayaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Dasar) | | | | | |
| | | | Pengendalian banjir di wilayah perkotaan dan rawan banjir | | | | | |
| | | | Peningkatan pelayanan sungai utama melalui pengerukan, normalisasi, dan naturalisasi untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai jalur transportasi, penyaluran air, | | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan | |
|-----|---|------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|--|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| | | | pengendali banjir, wisata dan ekonomi | | | | | | |
| | | | Pengendalian abrasi sungai dan pantai | | | | | | |
| | | | Peningkatan pelayanan air bersih/minum perpipaan terutama di wilayah yang kualitas air tanahnya kurang baik dan daerah gambut | | | | | | |
| | | | Pengelolaan restorasi gambut dan mangrove secara terpadu dan berkesinambungan | | | | | | |
| 8 | Kestinambungan Pembangunan untuk Mewujudkan Riau Maju | | Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah | | | | | | |
| | | | Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi. | | | | | | |
| | | | Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. | | | | | | |
| | | | Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali | | | | | | |

| No | Misi | Arah Pembangunan | Arah Kebijakan Transformasi Daerah | Indikator Utama Pembangunan | Target | | Sasaran Pokok | Keterangan |
|-----|------|------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan | | | | | |
| | | | Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. | | | | | |
| | | | Perencanaan pembangunan yang inklusif | | | | | |

Sasaran pokok RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 yang memuat 17 Arah Pembangunan beserta indikator utama pembangunan diselaraskan dengan pencapaian misi perencanaan jangka panjang daerah Provinsi Riau yang disajikan pada tabel 5.8 dibawah ini.

Tabel 5.8
Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045

| No | 11 Sasaran Pokok | 17 Arah Pembangunan | 45 Indikator Utama Pembangunan | Target | | Ket. | | |
|-----|--|---|---|------------------|----------------|------|--|--|
| | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | |
| 1 | Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkarakter | APR1. Kesehatan untuk Semua | 1. Usia Harapan Hidup (tahun) | 74,3 | 80,19 | | | |
| | | | 2. Kesehatan Ibu dan Anak | | | | | |
| | | | a. Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 131 | 13 | | | |
| | | | b. Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 12 | 3,6 | | | |
| | | | 3. Penanganan Tuberkulosis | | | | | |
| | | | a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%) | 66 | 95 | | | |
| | | | b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%) | 93,94 | 98 | | | |
| | | | 4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) | 98 | 99,50 | | | |
| | | | APR2. Pendidikan Berkualitas yang Merata | | | | | |
| | | | 5. Hasil Pembelajaran | | | | | |
| | | a. Persentase kabupaten/ kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: | | | | | | |
| | | i) Literasi Membaca | 16,67 - 16,67 | 75,00 - 83,33 | | | | |
| | | ii) Numerasi | 0,00 - 8,33 | 58,33 - 66,67 | | | | |
| | | b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: | | | | | | |
| | | i) Literasi Membaca | 40,49 - 42,49 | 76,14 - 78,14 | | | | |
| | | ii) Numerasi | 26,68 - 28,68 | 59,36 - 61,36 | | | | |
| | | c. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | 9,94 - 9,94 | 12,61 - 12,66 | | | | |
| | | d. Harapan Lama Sekolah (tahun) | 13,56 - 13,57 | 15,01 - 15,07 | | | | |
| | | 6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi | 11,74 | 11,74 - 13,59 | | | | |

| No | 11 Sasaran Pokok | 17 Arah Pembangunan | 45 Indikator Utama Pembangunan | Target | | Ket. | | |
|-----|---|---|---|----------------------|----------------------|------|--|--|
| | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | |
| | | | Pendidikan Tinggi (%) | | | | | |
| | | | 7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | 67,86 | 80 | | | |
| 2 | Meningkatnya Perlindungan Sosial yang adaptif dan inklusif | APR3. Perlindungan Sosial yang Adaptif | 8. Tingkat Kemiskinan (%) | 5,19 - 6,19 | 0,08 -0,58 | | | |
| | | | 9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) | 38,05 | 95,13 | | | |
| | | | 10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) | 29 | 60 | | | |
| 3 | Meningkatnya Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing | APR4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi | 11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | 27,59 | 36,20 - 36,35 | | | |
| | | | 12. Pengembangan Pariwisata | | | | | |
| | | | a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | 0,54 | 0,94 | | | |
| | | | b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang) | 16 | 76,35 | | | |
| | | | 13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) | 0,150 - 0,167 | 0,194 - 0,102 | | | |
| | | | 14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD | | | | | |
| | | | a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%) | 12,66 | 14,7 | | | |
| | | | b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%) | 2,15 | 3,65 | | | |
| | | | c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%) | 5,75 | 12 | | | |
| | | | d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) | 0,52 | 4,34 | | | |
| | | | e. Return on Aset (ROA) BUMD (%) | 4,10 | 5,71 | | | |
| | | | 15. Penciptaan lapangan kerja yang baik | | | | | |
| | | | a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,55 - 3,66 | 1,81 - 2,83 | | | |
| | | | b. Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal | 52,00 | 95,00 | | | |
| | | | 16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 45,7 | 59,9 | | | |
| | | | 17. Tingkat Penguasaan IPTEK | | | | | |
| | | | a. Indeks Kapabilitas | 2,36 | 4,88 | | | |

| No | 11 Sasaran Pokok | 17 Arah Pembangunan | 45 Indikator Utama Pembangunan | Target | | Ket. | |
|-----|---|---|--|-----------------------------|--------------------|------|--|
| | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| | | | Daerah | | | | |
| | | | b. Indeks Inovasi Daerah | 86,62 | 100,00 | | |
| | | APR5. Transformasi Digital | 18. Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi | 6,1 | 7,5 | | |
| | | APR6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global | 19. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi* | 8,27 | 5,13 | | |
| | | | 20. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | 33,00 | 28,44 | | |
| | | | 21. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | 39,10 | 48,16 | | |
| 4 | Terwujudnya Ekonomi Hijau | APR7. Penerapan Ekonomi Hijau | 22. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau | | | | |
| | | | a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah | 59,86 | 87,18 | | |
| | | | b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) | 36,00 | 53,76 | | |
| 5 | Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi | APR8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi | 23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan | | | | |
| | | | a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) | 80 | 100 | | |
| | | | b. Persentase Desa Mandiri (%) | 1,13 | 16,4 | | |
| 6 | Terwujudnya pemerintahan yang berintegrasi dan adaptif | APR9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif | 24. Indeks Reformasi Hukum | 70 | 100 | | |
| | | | 25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,06 | 5 | | |
| | | | 26. Indeks Pelayanan Publik | 4,11 | 5 | | |
| | | | 27. Indeks Integritas Nasional | 74,52 | 87,03 | | |
| 7 | Terwujudnya Daerah yang Kondusif dan Stabilitas Ekonomi yang handal | APR10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial | 28. Hukum Berkeadilan | | | | |
| | | | a. Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah | 70 | 100 | | |
| | | | b. Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM | 65 | 85 | | |
| | | | 29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) | 64,8 (2020) | 82,18 | | |
| | | | 30. Indeks Demokrasi Indonesia | 73,80 – 76,86 Sedang | 81 (Tinggi) | | |
| | | APR11. Stabilitas Ekonomi Makro | 31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | 1,04 | 3,9 | | |
| | | | 32. Tingkat Inflasi (%) | 2,9 - 3,7 | 1,0 - 3,0 | | |
| | | | 33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan | | | | |
| | | a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) | 11,52 | 52,8 | | | |

| No | 11 Sasaran Pokok | 17 Arah Pembangunan | 45 Indikator Utama Pembangunan | Target | | Ket. | |
|-----|---|--|---|----------------------|----------------------|------|--|
| | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| | | | b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%) | 0,04 | 0,76 | | |
| | | | c. Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan | 5.273.463,68 | 56.946.079,95 | | |
| | | | d. Total Kredit/PDRB (%) | 9 | 49,7 | | |
| | | | 34. Inklusi Keuangan (%) | 91,35 | 99,02 | | |
| | | APR12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan | 35. Indeks Daya Saing Daerah | 3,31 | 4,86 | | |
| | | | 36. Indeks Ketahanan Nasional | 3,1 | 3,8 | | |
| 8 | Terwujudnya penerapan nilai budaya melayu berlandaskan masyarakat agamis | APR13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Masyarakat Maju | 37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | 60,30 - 60,37 | 70,37 - 70,99 | | |
| | | | 38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | 72,30 - 72,36 | 79,22 - 79,92 | | |
| 9 | Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender | APR14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif | 39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | 73,50 - 73,51 | 78,73 - 78,80 | | |
| | | | 40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0,436 - 0,434 | 0,211 - 0,192 | | |
| 10 | Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | APR15. Lingkungan Hidup Berkualitas | 41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 0,394 | 0,474 | | |
| | | | 42. Kualitas Lingkungan Hidup | | | | |
| | | | a. Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah | 71,85 | 79 | | |
| | | | b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) | 14,64 | 50 | | |
| | | | c. Pengelolaan Sampah | | | | |
| | | | - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | 5 | 90 | | |
| | | | - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | 27 | 100 | | |
| | | | 43. Indeks Risiko Bencana (IRB) | 103,7 | 87,77 - 74,65 | | |
| | | APR16. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | 44. Persentase Penurunan Emisi GRK (%) | | | | |
| | | | a. Kumulatif | 25,21 | 58,84 | | |
| | | | b. Tahunan | 22,34 | 92,85 | | |
| 11 | Meningkatnya Ketahanan | APR17. Berketahanan | 45. Ketahanan energi, air, dan pangan | | | | |
| | | | a. Ketahanan Energi | | | | |

| No | 11 Sasaran Pokok | 17 Arah Pembangunan | 45 Indikator Utama Pembangunan | Target | | Ket. |
|-----|--------------------------------------|--|--|------------------|----------------|------|
| | | | | Baseline 2025 | Target 2045 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Energi, Air dan Pangan Daerah | Energi, Air, dan Kemandirian Pangan | - Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) | 1.032 | 4.000 | |
| | | | - Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar) | 56 | 60 | |
| | | | b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%) | 11,07 | 0,32 | |
| | | | c. Ketahanan Air | | | |
| | | | - Kapasitas Air Baku (m3/detik) | 0,24 | 9,01 | |
| | | | - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) | 10,17 | 100 | |

Sumber: SEB Mendagri RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 dan Hasil Analisis

BAB VI PENUTUP



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan lainnya oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan.
2. Pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Provinsi Riau 2025-2045 dengan sebaik-baiknya;
3. Gubernur Riau berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah ini dengan menjabarkannya dalam RPJMD sesuai tahapannya serta menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menyesuaikan dengan urusan dan kewenangan pemerintahan provinsi, dalam penjabarannya pada semua dokumen perencanaan daerah. Oleh karena itu, RPJPD ini harus disosialisasikan secara luas kepada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi dan segenap pemangku kepentingan (stakeholder), untuk dapat memahaminya secara mendalam dan dapat menjabarkannya sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing;
4. DPRD Provinsi Riau berkewajiban menetapkan dan melaksanakan peraturan daerah ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang dalam penjabarannya pada RPJMD maupun dokumen perencanaan lainnya. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi penjabaran dalam dokumen perencanaan selanjutnya, terutama kaitannya dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau;
5. Pemerintah Kabupaten/kota dalam menyusun RPJPD daerahnya, mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi, dan bagi daerah yang telah

menyusun RPJPD melakukan penyelarasan dalam RPJMD atau menjadi acuan dalam proses perencanaan anggaran yang dituangkan dalam APBD;

6. Tokoh masyarakat, pimpinan organisasi keagamaan, lembaga budaya, komunitas adat, organisasi sosial, kalangan dunia usaha, organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya, diharapkan ikut bertanggungjawab dalam menjadikan acuan penyusunan program dan kegiatannya serta mengawasi pelaksanaannya;
7. Pimpinan perguruan tinggi di daerah ini, ikut bertanggungjawab dalam pengawasan pada penjabaran lebih lanjut dalam dokumen perencanaan daerah maupun pelaksanaannya oleh pemerintah daerah serta semua pemangku kepentingan (*stakeholder*);
8. Dalam melaksanakan RPJPD Provinsi Riau tahun 2025- 2045, Pemerintah Provinsi Riau wajib menerapkan 3 pilar dari *Good Governance* yang meliputi **transpartasi, akuntabilitas, dan partisipasi** untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Riau tahun 2025 – 2045 ini, **Transparansi:** berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (*reliable*). Transportasi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau. **Akuntabilitas:** atau *accountability* adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implemementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi. **Partisipasi:** pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu dinas dan antar dinas, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/

tugas yang melekat pada pemerintah Provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6.1 Manajemen Resiko Pembangunan

Periode pelaksanaan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 berakhir pada tahun 2025. Sebelum memasuki akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025, maka sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Daerah harus menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD Tahun 2005-2025 berakhir.

Dalam penyusunan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 harus berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang antar periode dan menjaga sinkronisasi kerangka logis RPJPN Tahun 2025-2045, dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045, sehingga dilakukan percepatan pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan perencanaan pembangunan jangka panjang sehingga diperlukan penyelenggaraan manajemen resiko yang terintegrasi serta memberikan landasan kepastian hukum dalam mengintegrasikan penyelenggaraan manajemen resiko. Adapun identifikasi resiko terhadap target yang telah ditetapkan yaitu

1. Target indikator Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) yang ditetapkan terlalu tinggi dimana yang ditetapkan berdasarkan pemutakhiran sebesar 36% pada tahun 2025 dan tahun 2045 sebesar 53,76%, tidak sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Tahun 2021-2050 dimana dalam dokumen RUED target EBT tahun 2025 sebesar 31,22 dan target tahun 2050 sebesar 46,64% sedangkan realisasi sampai tahun 2023 sebesar 26,13%.
2. Target indikator Intensitas Energi Primer yang ditetapkan dari tahun 2025 sebesar 56 SBM/Rp meningkat menjadi 60 SBM/Rp, seharusnya intensitas energi primer setiap tahunnya harus menurun karena intensitas energi merupakan parameter untuk menilai efisiensi energi di sebuah negara. Semakin rendah angka intensitas energi semakin efisiensi penggunaan energi.

3. Target indikator kemiskinan tahun 2045 sebesar 0,08 – 0,58 persen, target ini merupakan target optimis namun target ini beresiko tidak tercapai apabila:
 - a. Dalam pelaksanaan intervensi yang dilakukan program pemerintah yang merupakan implementasi dari kebijakan yang ada tidak dilakukan kolaborasi dalam pelaksanaannya dan tidak tertuju pada data sasaran dan lokus yang sama. Dimana kita ketahui untuk bisa mengeluarkan seseorang dari garis kemiskinan satu orang masyarakat miskin harus mendapat lebih dari 1 program baik untuk pengurangan beban, peningkatan pendapatan dan untuk menjaga agar masyarakat yang sudah keluar dari garis kemiskinan agar tidak jatuh kembali ke miskin tentunya harus didukung dengan pemberdayaan.
 - b. Ketidak berpihakan terhadap Indikator kemiskinan yang selama ini dalam dokumen perencanaan yang ada hanya di bebaskan kepada satu urusan (urusan sosial), sebagai mana kita ketahui bahwa masalah kemiskinan merupakan multi dimensi dan banyak sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ketahananpangan (pertanian, perkebunan, perikanan), sosial, pemberdayaan masyarakat desa, UMKM, dan Infrastruktur sehingga penempatan Indikator Kemiskinan merupakan indikator makro dan menjadi indikator tujuan kepala daerah untuk mewujudkan kebijakan Kesejahteraan Masyarakat.
 - c. Belum optimalnya Konsolidasi dan Kolaborasi Lintas Kewenangan dan Lintas Sektoral, sinergi dan agregasi program termasuk kolaborasi pentahelix antara pemerintah daerah dengan non pemerintah (perusahaan/pihak swasta dan filantropi) terutama dalam hal pensasaran program penanggulangan kemiskinan.
4. Target presentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal 60 % pada tahun 2045, target ini merupakan salah satu terhadap komitmen pemerintah dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas namun dalam pencapaian ini perlunya ketegasan pemerintah daerah dan komitmen kepala daerah dalam pengawasan terhadap perusahaan yang ada untuk memenuhi dan melaksanakan dari kebijakan perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja serta kementerian/lembaga, pemerintah

daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

5. Target Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEL) tahun 2045 terlalu tinggi sebesar 298,06. Hal yang paling krusial terhadap angka indeks adalah besaran yang lebih dari 100 dan indikator ini belum pernah diukur sebelumnya. Provinsi Riau terdiri dari 7 wilayah pesisir dengan kontribusi blue carbon dominan adalah hutan mangrove seluas 224.895 ha. Kondisi eksisting lainnya adalah penetapan kawasan konservasi perairan atau pesisir seluas 144.633,64 ha pada dua kabupaten dan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2022 sebesar 2.6%. Hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan *blue economy* adalah bagaimana Pemerintah Provinsi Riau dapat meningkatkan target PDRB sektor perikanan dari sisi produksi perikanan, sementara sudah terjadi overfishing untuk jenis ikan tertentu pada Wilayah Pengelolaan Perairan (WPP) 571 dan 711. Begitu juga dengan hilirisasi komoditas perikanan untuk meningkatkan volume ekspor ikan olahan yang belum berkembang di Provinsi Riau. Upaya untuk meningkatkan produksi serta hilirisasi komoditas perikanan harus berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan daya dukung perairan dan penangkapan ikan terukur.
6. Target Penurunan Intensitas Emisi GRK tahun 2045 terlalu tinggi sebesar 97,16. Salah satu penyebabnya adalah capaian persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Provinsi Riau Tahun 2022 baru mencapai 17,90 persen. Mempertimbangkan kondisi lahan gambut di Provinsi Riau sebesar 4,9 juta ha dan sekitar 55% sudah terkonversi sebagai fungsi budidaya, maka perlu analisa lanjutan penurunan emisi GRK yang optimal untuk provinsi dengan spesifik gambut. Berdasarkan pelaporan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Riau AKSARA Bappenas, persentase penurunan intensitas emisi tahun 2022 sebesar 3,0%. Sedangkan capaian penurunan emisi GRK tahunan sebesar 0,03% dan kumulatif sebesar 10% dari tahun baseline 2010. Dari angka tersebut, persentase penurunan emisi GRK dapat dikatakan sangat kecil, sementara target baseline tahun 2025 yang ditetapkan untuk intensitas emisi sebesar 67,98%, penurunan emisi GRK tahunan sebesar 44,99% dan kumulatif

sebesar 25,21%. Gap angka realisasi tahun 2022 dengan target baseline sangat berbeda jauh.

6.2 Pembiayaan Pembangunan

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Provinsi Riau, diperlukan sinergi dan kolaborasi para pihak karena keterbatasan sumber daya Pemerintah Provinsi Riau. Rata-rata kemampuan pembiayaan dari Pemerintah adalah sebesar 20%, sehingga 80% pembiayaan diharapkan dapat diisi dari pentahelix (*non state actor*). Selanjutnya, sinergi dan kolaborasi pentahelix ini terutama dalam hal pembiayaan program dan kegiatan untuk pencapaian target visi dan indikator utama pembangunan. Alternatif pembiayaan pembangunan dapat diperoleh melalui:

1. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam menyediakan infrastruktur yang bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan (Berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015).
2. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan sebagai alternatif pembiayaan untuk pembangunan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat. (Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020).
3. Hibah adalah penerimaan daerah berupa bantuan yang berasal dari pemerintah/lembaga asing, pemerintah/lembaga dalam negeri dan perorangan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah.
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) adalah kegiatan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat kepada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. (Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012).
5. Mitra pembangunan berperan penting memperluas jaringan dengan lembaga pembangunan dunia yang dapat dimanfaatkan untuk pendanaan publik di

Provinsi Riau melalui skema bilateral maupun multilateral. Mitra Pembangunan saat ini memberikan alokasi yang cukup besar untuk pembiayaan perubahan iklim, pertanian dan infrastruktur. Dana ini dikelola oleh Badan yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

6. Filantropi, Pemerintah dapat mengidentifikasi lembaga filantropi baik yayasan pribadi, keluarga maupun kelompok masyarakat yang selama ini sudah memberikan kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan terutama dalam pencapaian target SDG's. Contoh Filantropi yang sudah berkontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Riau antara lain: Tanoto Foundation, LAZISMU, dan sebagainya.

6.3 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman pembangunan di Provinsi Riau selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan Tahun 2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagai dasar hukum dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan oleh pemerintah provinsi. Oleh karena itu, dokumen RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 merupakan pedoman dalam:

1. Kepala Daerah dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
2. DPRD Provinsi Riau berkewajiban menetapkan dan melaksanakan peraturan daerah ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam penjabarannya pada RPJMD maupun dokumen perencanaan lainnya. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi penjabaran dalam dokumen perencanaan selanjutnya.
3. Tokoh masyarakat, pimpinan organisasi keagamaan, lembaga budaya, komunitas adat, organisasi sosial, organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya, diharapkan ikut bertanggungjawab dalam menjadikan acuan penyusunan program dan kegiatannya serta mengawasi pelaksanaannya;

4. Pimpinan perguruan tinggi di daerah ini, ikut bertanggungjawab dalam pengawasan pada penjabaran lebih lanjut dalam dokumen perencanaan daerah maupun pelaksanaannya oleh pemerintah daerah serta semua pemangku kepentingan (*stakeholder*).
5. Dalam melaksanakan RPJPD Provinsi Riau tahun 2025- 2045, Pemerintah Provinsi Riau wajib menerapkan 3 pilar dari *Good Governance* yang meliputi **Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi** untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Riau tahun 2025 - 2045 ini, **Transparansi** : berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (*reliable*). Transportasi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau. **Akuntabilitas** : atau *accountability* adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implemementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi. **Partisipasi** : pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu dinas dan antar dinas, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah Provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Perangkat Daerah Provinsi Riau dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada diwilayah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Provinsi Riau tahun 2025-2045 dengan sebaik-baiknya.

7. Dalam pelaksanaan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Riau agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.
8. Evaluasi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 dilakukan paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJMD Provinsi Riau.
9. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, sinergi baik antar daerah, dan menjamin pelaksanaan transformasi pada setiap tahapan RPJMD hingga tahun 2045 antar fungsi Pemerintah Daerah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menjawab tantangan, permasalahan dan isu strategis pembangunan Provinsi Riau maka dilakukan penyusunan Visi dan Misi Provinsi Riau Tahun 2025-2045. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 adalah **"Riau Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu yang Agamis"**. Upaya pemerintah Provinsi Riau dalam mengatasi pengendalian terhadap resiko-resiko perencanaan pembangunan jangka panjang yaitu:

1. Melakukan mitigasi yang cermat terhadap perubahan kebijakan
2. Menjalin kerjasama lintas sektor untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana
3. Meningkatkan capaian pembangunan dan kualitas tata kelola pemerintah
4. Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah
5. Meningkatkan perkembangan inovasi dan pelayanan publik pemerintah daerah

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 sangat tergantung pada komitmen antara penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat di Provinsi Riau. Untuk itu perlu sinergi dan kerjasama guna mewujudkan visi pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025-2045.

